

**RANCANGAN AKHIR RPJPD
KOTA BOGOR
TAHUN 2025-2045**

Rancangan Akhir RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2045

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA BOGOR
TAHUN 2025-2045**



IPB University
Bogor Indonesia

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH (BAPPERIDA)
KOTA BOGOR
2024



IPB University
Bogor Indonesia

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH (BAPPERIDA)
KOTA BOGOR
2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas Rahmat dan Karunia-NYA-lah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor 2025-2045 telah diselesaikan dengan baik. Perencanaan pembangunan daerah merupakan landasan dalam pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi saat ini beserta dinamika permasalahannya dan mimpi, serta cita cita di masa depan yang disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki. Perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerahnya sesuai dengan amanat Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024, dimana setiap pemerintah daerah harus menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai dokumen perencanaan berdurasi 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

RPJPD Kota Bogor 2025-2045 ini diharapkan menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah, dan penyusunan RPJMD Kota Bogor. Secara bertahap, diharapkan arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya, sehingga dapat terwujud visi Kota Bogor 2045: Kota Sains Kreatif, Maju, Berkelanjutan.

Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Bogor dan mendorong partisipasi seluruh pihak untuk turut aktif mewujudkan rencana pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Akhir kata, tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penyelesaian dokumen akhir RJPD Kota Bogor 2025-2045.

Bogor, Mei 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Dasar Penyusunan.....	3
1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....	4
1.4. Maksud dan Tujuan.....	5
1.5. Sistematika Penulisan.....	5
BAB 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	8
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	9
2.1.1. Geografi.....	9
2.1.2. Demografi.....	33
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	38
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi.....	38
2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya.....	52
2.3. Aspek Daya Saing Daerah.....	59
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah.....	60
2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	77
2.3.3. Daya Saing Infrastruktur.....	83
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi.....	95
2.4. Aspek Pelayanan Umum.....	100
2.4.1. Reformasi Birokrasi.....	101
2.4.2. Pelayanan Publik.....	103
2.4.3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.....	103
2.4.4. Inovasi Daerah.....	105
2.4.5. Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI).....	105
2.4.6. Kualitas Kebijakan.....	106
2.4.7. Kemandirian Daerah.....	107

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025	109
2.5.1. Refleksi Pembangunan.....	109
2.5.1. Evaluasi Pencapaian RPJMD Periode Tahun 2005 – 2025	110
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik.....	122
2.6.1. Proyeksi Demografi.....	122
2.6.2. Kebutuhan Sarana dan Prasarana	125
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	137
2.7.1. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah Kota Bogor dalam perspektif Nasional.....	137
2.7.2. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah Kota Bogor dalam perspektif Provinsi	138
2.7.3. Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Kota.....	142
2.7.4. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah.....	152
BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH.....	171
3.1. Permasalahan.....	172
3.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	172
3.1.2. Aspek Sosial Budaya	173
3.1.3. Aspek Perekonomian.....	182
3.1.4. Aspek Tata Kelola	190
3.1.5. Infrastruktur.....	193
3.2. Isu Strategis	200
BAB 4. VISI DAN MISI DAERAH.....	216
4.1. Visi Daerah.....	217
4.2. Misi Daerah.....	230
BAB 5. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK.....	233
5.1. Arah Kebijakan	234
5.2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045	250
5.2.1. Arah Pembangunan Daerah.....	250
5.2.2. Arah Kebijakan Transformatif	267
BAB 6. PENUTUP.....	273
6.1. Kaidah Pelaksanaan	274
6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan.....	274
6.1.2. Keterkaitan RPJP Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Nasional dan Propinsi	274
6.1.3. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.....	276
6.1.4. Skema Pendanaan dan Penganggaran	277
6.2. Kerangka Pengendalian	277

6.3. Mekanisme Perubahan.....	278
6.4. Komunikasi Publik.....	279
DAFTAR PUSTAKA.....	280

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas dan Pembagian Wilayah Administrasi Kota Bogor	10
Tabel 2.2.	Luas wilayah Kota Bogor berdasarkan jenis batuan	13
Tabel 2.3.	Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan di Kota Bogor	15
Tabel 2.4.	Indikator RTRW di Kota Bogor Tahun 2015-2022	17
Tabel 2.5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Bogor Tahun 2019 – 2022	17
Tabel 2.6.	Kondisi Daya Dukung Pangan Kota Bogor	18
Tabel 2.7.	Status Daya Dukung Pangan Terhadap Ambang Batas di Kota Bogor	19
Tabel 2.8.	Kebutuhan Air di Kota Bogor Tahun 2045	20
Tabel 2.9.	Status Daya Dukung Air Terhadap Ambang Batas Tahun 2045	21
Tabel 2.10.	Kerentanan Banjir per Kecamatan di Kota Bogor	25
Tabel 2.11.	Kawasan Rawan Longsor di Kota Bogor	26
Tabel 2.12.	Kawasan Rawan Kebakaran di Kota Bogor	26
Tabel 2.13.	Kawasan Rawan Puting Beliung di Kota Bogor	27
Tabel 2.14.	Kawasan Rawan Bahaya Gunung Api di Kota Bogor	28
Tabel 2.15.	Potensi Timbulan Sampah di Kota Bogor	31
Tabel 2.16.	Potensi Beban Pencemar dengan Parameter BOD, COD, TN dan TP	31
Tabel 2.17.	Total Emisi CO ₂ e di Kota Bogor Tahun 2013 – 2022	32
Tabel 2.18.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Jabodetabek, Kabupaten Bogor, dan Jawa Barat Tahun 2012 – 2022	36
Tabel 2.19.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bogor Tahun 2014-2023 Berdasarkan Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	61
Tabel 2.20.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Tahun Dasar=2010) Kota Bogor Tahun 2014-2023 Berdasarkan Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	62
Tabel 2.21.	Rasio Akomodasi Makanan dan Minuman Tahun 2014-2023 (persen)	65
Tabel 2.22.	Indikator Urusan Penanaman Modal di Kota Bogor Tahun 2019-2022	69
Tabel 2.23.	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2011-2021	69
Tabel 2.24.	Indeks Daya Saing Digital Kota Bogor dan Daerah Sekitarnya Tahun 2020-2023	72
Tabel 2.25.	Sebaran UMKM di Kota Bogor Tahun 2022	75
Tabel 2.26.	Share Net Ekspor terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2013 – 2022	77
Tabel 2.27.	Indeks Pendidikan di Wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi Tahun 2010-2022	78
Tabel 2.28.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi tahun 2018-2023	82
Tabel 2.29.	Angka Ketergantungan Menurut Wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, Tahun 2018-2023	83

Tabel 2.30.	Panjang Jalan Menurut Jenis Output di Kota Bogor Tahun 2023 (meter)	84
Tabel 2.31.	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kota Bogor (km)	85
Tabel 2.32.	Persentase Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Bogor Tahun 2019-2022	85
Tabel 2.33.	Tipologi Pengembangan TOD Kawasan Transit Kota Bogor	86
Tabel 2.34.	Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Bogor Tahun 2019-2022	87
Tabel 2.35.	Daya Tersambung dan Jumlah Pelanggan Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang PLN Kota Bogor Menurut Kawasan/ Rayon di Kota Bogor Tahun 2022	88
Tabel 2.36.	Daya terpasang, Produksi dan Distribusi PT.PLN Menurut Kecamatan di Kota Bogor	88
Tabel 2.37.	Pengelolaan Sampah di Kota Bogor Tahun 2019-2022	92
Tabel 2.38.	Potensi Timbulan Sampah di Kota Bogor Berdasarkan Kecamatan	93
Tabel 2.39.	Persentase Akses Air Bersih Jaringan Perpipaan Kota Bogor Tahun 2014-2021	93
Tabel 2.40.	Persentase Akses Air Bersih Kota Bogor Tahun 2014-2022	94
Tabel 2.41.	Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Zona Pelayanan di Kota Bogor Tahun 2021-2022	94
Tabel 2.42.	Zona Pelayanan Perumda Pakuan Tirta Bogor	95
Tabel 2.43.	Nilai IDSD Jabodetabek dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022	96
Tabel 2.44.	Share PMTB terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2013 - 2022	97
Tabel 2.45.	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023 Menurut Aspek	99
Tabel 2.46.	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Bogor	99
Tabel 2.47.	Nilai Indeks Inovasi Daerah Jabodetabek dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022	105
Tabel 2.48.	Nilai Survei Penilaian Integritas Bodetabek dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023	106
Tabel 2.49.	Nilai Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Bodetabek dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2023 (persen)	107
Tabel 2.50.	Nilai Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Bodetabek dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2023	108
Tabel 2.51.	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Bogor	122
Tabel 2.52.	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Bogor	122
Tabel 2.53.	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Bogor	123
Tabel 2.54.	Proyeksi Kebutuhan Rumah/ Tempat Tinggal di Kota Bogor	126
Tabel 2.55.	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Berdasarkan Kebutuhan Kota Bogor, Tahun 2023-2045	127
Tabel 2.56.	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Bogor, Tahun 2023-2045	128
Tabel 2.57.	Kebutuhan Air di Kota Bogor Tahun 2021	128
Tabel 2.58.	Proyeksi Kebutuhan Air Kota Bogor Berdasarkan Kecamatan Tahun 2045	128
Tabel 2.59.	Daya Tersambung dan Jumlah Pelanggan Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting Kota Bogor Menurut Kawasan/Rayon	131
Tabel 2.60.	Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kota Bogor, Tahun 2023-2045	131

Tabel 2.61.	Jumlah Produksi Sampah Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya, Tahun 2016-2022	132
Tabel 2.62.	Fasilitas Pengelolaan Persampahan Kota Bogor	132
Tabel 2.63.	Proyeksi Timbulan Sampah Kota Bogor Tahun 2023-2045.....	133
Tabel 2.64.	Jenis Fasilitas (Sarana/Prasarana Kesehatan)	135
Tabel 2.65.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2022-2045	136
Tabel 2.66.	Jumlah Sekolah Dasar, Menengah dan Tinggi di Kota Bogor, Tahun 2013-2022...	136
Tabel 2.67.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023-2045	137
Tabel 2.68.	Pembagian Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor	146
Tabel 2.69.	Indikasi Program Pengembangan Wilayah Pelayanan	147
Tabel 2.70.	Rencana Strategis Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Barat	150
Tabel 2.71.	Indikasi Program Transportasi	156
Tabel 2.72.	Indikasi Program Perwujudan Jaringan Prasarana Kota	163
Tabel 3.1.	Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2018 - 2022 (Tahun).....	174
Tabel 3.2.	Harapan Lama Sekolah Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2018 - 2022 (Tahun)	174
Tabel 3.3.	Angka Partisipasi Murni Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2022.....	175
Tabel 3.4.	Angka Partisipasi Kasar Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2022.....	176
Tabel 3.5.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2022.....	176
Tabel 3.6.	Usia Harapan Hidup Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2017- 2022	177
Tabel 3.7.	Indeks Kesehatan Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2018- 2022.....	177
Tabel 3.8.	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2018- 2022	178
Tabel 3.9.	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 - 2023.....	183
Tabel 3.10.	Struktur Perekonomian Kota Bogor Tahun 2016 - 2022	184
Tabel 3.11.	Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Kota Bogor	185
Tabel 3.12.	Profil Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kota Bogor.....	185
Tabel 3.13.	Gini Ratio Tahun 2011 - 2022.....	186
Tabel 3.14.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2010 - 2022.....	187
Tabel 3.15.	<i>Share</i> Net Ekspor terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2013 - 2022	188
Tabel 3.16.	<i>Share</i> PMTB terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2013 - 2022	188
Tabel 3.17.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan Peringkat Ketahanan Pangan Tahun 2018 - 2022.....	189
Tabel 3.18.	Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2021 - 2022	192
Tabel 4.1.	Sasaran Visi Kota Bogor 2025-2045.....	229
Tabel 5.1.	Matriks Arah Kebijakan Kota Bogor Periode 2025-2045.....	241
Tabel 5.2.	Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kota Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dan RPJPN Tahun 2025-2045.....	250
Tabel 5.3.	Sasaran Pokok RPJPD Kota Bogor Tahun 2025 - 2045.....	252
Tabel 5.4.	Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kota Bogor	267

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya	4
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kota Bogor	11
Gambar 2.2.	Peta Geologi Regional Kota Bogor	13
Gambar 2.3.	Peta Kemiringan Lereng Kota Bogor	14
Gambar 2.4.	Rata – Rata Suhu di Kota Bogor Tahun 2019 – 2022	15
Gambar 2.5.	Luasan Lahan Berdasarkan Penggunaan di Kota Bogor	16
Gambar 2.6.	Peta Jasa Ekosistem Pangan di Kota Bogor	18
Gambar 2.7.	Indeks Ketahanan Pangan Kota Bogor dan Jawa Barat Tahun 2019 – 2022	19
Gambar 2.8.	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air di Kota Bogor	21
Gambar 2.9.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dibanding Kontribusi Sektor Lain terhadap PDRB di Kota Bogor Tahun 2014 – 2022	22
Gambar 2.10.	Sebaran Lahan Sawah di Kota Bogor Per Kecamatan	22
Gambar 2.11.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Kota Bogor Tahun 2013 – 2022	23
Gambar 2.12.	Indeks Risiko Bencana Kota Bogor Tahun 2015 – 2022	24
Gambar 2.13.	Peta Kerentanan Banjir Kota Bogor	25
Gambar 2.14.	Peta Kawasan Rawan Longsor di Kota Bogor	26
Gambar 2.15.	Peta Kawasan Rawan Kebakaran di Kota Bogor	27
Gambar 2.16.	Peta Kawasan Rawan Puting Beliung di Kota Bogor	28
Gambar 2.17.	Peta Kerentanan terhadap Perubahan Iklim di Kota Bogor	30
Gambar 2.18.	Indeks Ketahanan Pangan Kota Bogor dan Jawa Barat Tahun 2019 – 2022	33
Gambar 2.19.	Jumlah Penduduk Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2005 – 2022	34
Gambar 2.20.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2011 – 2022	34
Gambar 2.21.	Kepadatan Penduduk Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya, Tahun 2005 – 2022	35
Gambar 2.22.	<i>Dependency Ratio</i> Kota Bogor dan wilayah sekitarnya, Tahun 2010 – 2022	37
Gambar 2.23.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2010-2023	39
Gambar 2.24.	Klassen Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Kabupaten/Kota sekitarnya, tahun 2023	40
Gambar 2.25.	Jumlah Penduduk Miskin Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2010-2023	41
Gambar 2.26.	Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2010-2023	41
Gambar 2.27.	Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kota Bogor Tahun 2025-2045 (Persen)	42

Gambar 2.28.	Klassen Indeks Gini dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Kabupaten/ Kota sekitarnya, tahun 2023.....	43
Gambar 2.29.	Indeks Gini Kota Bogor dan Wilayah Perbandingan tahun 2010-2022	44
Gambar 2.30.	Proyeksi Indeks Gini Kota Bogor Tahun 2025-2045	44
Gambar 2.31.	Indeks Pembangunan Manusia (Secara Komposit) Kota Bogor Tahun 2005-2023	45
Gambar 2.32.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor dan Wilayah Perbandingan Tahun 2010-2023	46
Gambar 2.33.	Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor Tahun 2025-2045	46
Gambar 2.34.	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Bogor dan Wilayah Perbandingan Tahun 2021-2023	47
Gambar 2.35.	Rata-rata Lama Sekolah di Jabodetabek, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2010-2022	48
Gambar 2.36.	Proyeksi Rata-rata Lama Sekolah di Kota Bogor Tahun 2023-2025	49
Gambar 2.37.	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bogor dan Wilayah Perbandingan Tahun 2021-2023	49
Gambar 2.38.	Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Bogor dan Wilayah Perbandingan Tahun 2021-2023	50
Gambar 2.39.	Klassen Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Kabupaten/ Kota sekitarnya, tahun 2023	51
Gambar 2.40.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor Tahun 2010-2023	51
Gambar 2.41.	Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor Tahun 2025-2045 (Persen)	52
Gambar 2.42.	Indeks Keluarga Sehat Kota Bogor dan Jawa Barat Tahun 2018-2022.....	53
Gambar 2.43.	Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kota Bogor Tahun 2015-2022.....	53
Gambar 2.44.	Perkembangan Penyakit HIV/AIDS di Kota Bogor Tahun 2016-2022	54
Gambar 2.45.	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC di Kota Bogor Tahun 2015-2022.....	55
Gambar 2.46.	Indeks Ketimpangan Gender di Kota Bogor Tahun 2018-2022.....	56
Gambar 2.47.	Indeks Pembangunan Gender di Jabodetabek, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, Tahun 2010-2022	57
Gambar 2.48.	Indeks Pemberdayaan Gender di Jabodetabek, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, Tahun 2010-2022	58
Gambar 2.49.	Rumah Tangga yang Akses Terhadap Hunian Yang Layak dan Terjangkau Kota Bogor dengan Wilayah Perbandingan (Persen)	59
Gambar 2.50.	Klassen Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi PDRB 17 Sektor Lapangan Usaha Kota Bogor, tahun 2023.....	63
Gambar 2.51.	Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Berlaku Kota Bogor dan Wilayah Perbandingan Tahun 2010-2022	64
Gambar 2.52.	Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Konstan tahun 2010 Kota Bogor dan Wilayah Perbandingan Tahun 2010-2022.....	64
Gambar 2.53.	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kota Bogor dan Wilayah Perbandingan Tahun 2010-2022.....	66
Gambar 2.54.	Proyeksi PDRB per Kapita Kota Bogor Tahun 2025-2045 (Ribu Rupiah)	66
Gambar 2.55.	Pengeluaran per Kapita Kota Bogor dan Wilayah Perbandingan Tahun 2010-2023	67
Gambar 2.56.	Realisasi Investasi Kota Bogor Tahun 2014-2022.....	68

Gambar 2.57.	Lima (5) Realisasi Investasi Jawa Barat Triwulan IV 2022 Pada Wilayah DeTaBek.....	68
Gambar 2.58.	Indeks Daya Saing Digital Kota Bogor 2023 Berdasarkan Indikator.....	72
Gambar 2.59.	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018-2021.....	73
Gambar 2.60.	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Wilayah Kota Bogor Tahun 2020 dan 2021.....	74
Gambar 2.61.	Rasio Kewirausahaan Kota Bogor dan Wilayah Perbandingan Tahun 2017 - 2023.....	76
Gambar 2.62.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022 di Wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.....	80
Gambar 2.63.	Proporsi Pekerja yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kota Bogor dan Wilayah Perbandingan Tahun 2017 - 2023.....	81
Gambar 2.64.	Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2018-2022.....	82
Gambar 2.65.	Persentase Jalan Berkondisi Mantap Tahun 2022-2023 di Kota Bogor.....	84
Gambar 2.66.	Elemen <i>Smart City</i>	89
Gambar 2.67.	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (Persen).....	91
Gambar 2.68.	Klasen Nilai Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Kabupaten/ Kota sekitarnya, tahun 2023.....	97
Gambar 2.69.	Perkembangan <i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR) dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2011-2023.....	98
Gambar 2.70.	Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor Tahun 2020-2023.....	100
Gambar 2.71.	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bogor Tahun 2019-2023.....	102
Gambar 2.72.	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bogor dan Daerah Sekitarnya Tahun 2022.....	102
Gambar 2.73.	Indeks Pelayanan Publik Kota Bogor dan sekitarnya Tahun 2023.....	103
Gambar 2.74.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Bogor Tahun 2019-2023.....	104
Gambar 2.75.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Bogor dan Sekitarnya Tahun 2023.....	104
Gambar 2.76.	Refleksi Pembangunan Kota Bogor 2005-2025.....	109
Gambar 2.77.	Jumlah Indikator Setiap Misi Pada Renstra Periode 2005-2009.....	110
Gambar 2.78.	Rekapitulasi Ketercapaian Renstra Kota Bogor 2005-2009.....	111
Gambar 2.79.	Persentase Capaian Seluruh Indikator Renstra Kota Bogor 2005-2009 Pada Masing-Masing Misi.....	111
Gambar 2.80.	Jumlah Indikator Setiap Misi Pada RPJMD Periode 2010-2014.....	112
Gambar 2.81.	Rekapitulasi ketercapaian RPJMD Kota Bogor 2010-2014.....	113
Gambar 2.82.	Persentase capaian seluruh indikator RPJMD Kota Bogor 2010-2014 pada masing-masing misi.....	113
Gambar 2.83.	Jumlah Indikator Setiap Misi Pada RPJMD Kota Bogor 2015-2019.....	114
Gambar 2.84.	Rekapitulasi Ketercapaian RPJMD Kota Bogor 2015-2019.....	115
Gambar 2.85.	Persentase Capaian Seluruh Indikator RPJMD Kota Bogor 2015-2019 Pada Masing-Masing Misi.....	115
Gambar 2.86.	Jumlah Indikator Setiap Misi Pada RPJMD Kota Bogor 2019-2024.....	117
Gambar 2.87.	Rekapitulasi Ketercapaian RPJMD Kota Bogor 2019-2024.....	118

Gambar 2.88.	Persentase Capaian Seluruh Indikator RPJMD Kota Bogor 2019-2024 Pada Masing-Masing Misi.....	118
Gambar 2.89.	Proyeksi Piramida Penduduk Kota Bogor Tahun 2022, 2025, 2030, 2035, 2040, dan 2045.....	125
Gambar 2.90.	Peta Kebutuhan Air Kota Bogor Tahun 2021 dan 2045	129
Gambar 2.91.	Ketersediaan Air Kota Bogor.....	129
Gambar 2.92.	Status Daya Dukung Air Tahun 2021 dan 2045.....	130
Gambar 2.93.	Daya Dukung Air Tahun 2021 dan 2045.....	130
Gambar 2.94.	Jumlah Perkembangan Pelanggan PLN Tahun 2014 – 2022.....	131
Gambar 2.95.	Jumlah Sarana Kesehatan Kota Bogor Tahun 2022	134
Gambar 2.96.	Tema pengembangan WP di Provinsi Jawa Barat (Termasuk Kota Bogor)	138
Gambar 2.97.	Peta Wilayah Administrasi Kota Bogor Berdasarkan Permendagri No.107 Tahun 2014.....	141
Gambar 2.98.	Pola Ruang Kota Bogor.....	142
Gambar 2.99.	Rencana Pola Ruang Kota Bogor Berdasarkan Revisi RTRW Kota Bogor 2011-2031.....	143
Gambar 2.100.	Wilayah Pengembangan Kota Bogor.....	144
Gambar 2.101.	Pusat Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor Berdasarkan Revisi RTRW Kota Bogor 2011-2031	146
Gambar 2.102.	Penetapan Kawasan Strategis Kota Bogor Berdasarkan Revisi RTRW Kota Bogor 2011-2031	152
Gambar 3.1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Domestik Kota Bogor Tahun 2016 – 2023.....	182
Gambar 3.2.	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak (Persen)	195
Gambar 3.3.	Total Penggunaan Ruang Kegiatan Tenaga Multimedia Bogor Green Room Tahun 2022	196
Gambar 3.4.	Indeks Risiko Bencana Indonesia Menurut Wilayah Tahun 2015-2022	197
Gambar 3.5.	Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun) Kota Bogor 2019-2023.....	198
Gambar 3.6.	Indeks Kualitas Air Tahun 2022.....	199
Gambar 3.7.	Indeks Kualitas Udara Tahun 2022.....	199
Gambar 3.8.	Isu Global	200
Gambar 3.9.	Isu Nasional.....	203
Gambar 3.10.	Isu Regional Kawasan Jawa-Bali	206
Gambar 3.11.	Isu Strategis Provinsi Jawa Barat	207
Gambar 4.1.	Visi RPJPN 2025-2045.....	217
Gambar 4.2.	8 Misi Pembangunan Negara Indonesia 2025-2045.....	219
Gambar 4.3.	Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045	220
Gambar 4.4.	Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045.....	222
Gambar 4.5.	Alur Perumusan Visi Kota Bogor Tahun 2025-2045.....	223
Gambar 4.6.	Elemen Pendukung Kota Bogor Sebagai Kota Sains Kreatif	225
Gambar 6.1.	Keterkaitan RPJP Daerah dengan Dokumen Nasional	275
Gambar 6.2.	Hierarki Kerangka Kerja Logis RPJP Daerah – Rencana Pembangunan Turunannya.....	276
Gambar 6.3.	Kerangka Pengendalian RPJP Daerah 2025-2045	277

BAB 1. PENDAHULUAN



**RPJPD Kota Bogor
2025-2045**

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa dokumen perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah untuk 1 (tahun). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor tahun 2005 – 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor No. 7 tahun 2009, telah berakhir masa berlakunya pada tahun 2025, sehingga perlu disusun dokumen RPJPD Kota Bogor Tahun 2025 – 2045 untuk perencanaan pembangunan 20 (duapuluh) tahun selanjutnya di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Bogor.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu dilakukan perencanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan, yang dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan, agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka 1 (satu) tahun.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Penyusunan RPJPD, dokumen RPJPD ini menjadi penting dan strategis karena keberadaannya sangat dibutuhkan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah. RPJPD menjadi koridor dan landasan dalam penyusunan tahapan pembangunan lima tahunan maupun tahunan. Penyusunan RPJPD dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen RPJPD, yaitu:

- a. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.
- b. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- c. Pendekatan Holistik-Tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- d. Pendekatan Integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- e. Pendekatan Spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan RPJPD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2024. Prinsip penyusunan RPJPD ini adalah:

1. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Perencanaan Pembangunan Daerah mengintegrasikan Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional;
6. Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7. Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*times*), yang disingkat SMART.

1.2. Dasar Penyusunan

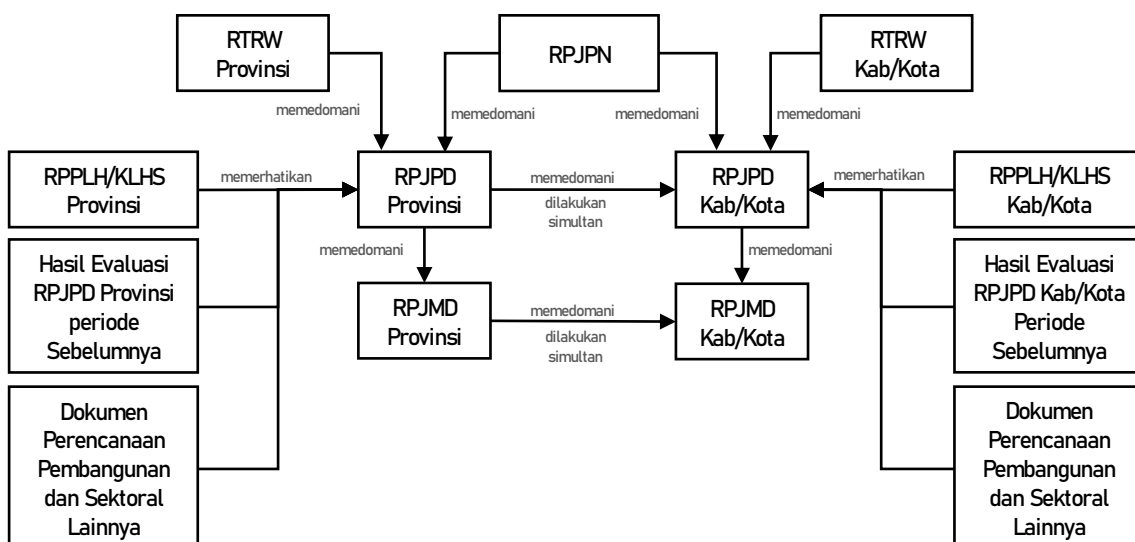
Dalam Proses Penyusunan RPJP Kota Bogor Tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
10. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor. 600.11.2/8755/Bangda tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD ke dalam Dokumen RPJPD/ RPJMD;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; dan
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031.

1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Keterkaitan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 Provinsi/Kabupaten/Kota dengan dokumen lainnya dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 1.1. Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya

Berdasarkan Gambar 1.1 bahwa RPJPD merupakan dokumen induk sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun, yang menjabarkan kehendak masyarakat yang merupakan hasil integrasi dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan regional dan sektoral. Dengan kata lain, fungsi RPJPD adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi dan segenap warga masyarakat menuju pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab. RPJPD dibuat untuk menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen lainnya, dan juga dijadikan “acuan” sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Rencana yang termuat di dalam RPJPD merupakan rencana jangka panjang dari semua aspek pembangunan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan penyusunan dokumen RPJPD Kota Bogor 2025-2045 yakni untuk memberikan gambaran tentang arah pembangunan Kota Bogor dua puluh (20) ke depan dalam upaya mendukung pencapaian tujuan pembanguna nasional dn untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2045, adalah:

- a. Tersusunnya gambaran umum daerah dan kinerja pembangunan periode 2005-2022;
- b. Tersusunnya tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik;
- c. Tersusunnya pengembangan pusat pertumbuhan dan arahan kebijakan kewilayahan Tahun 2025-2045;
- d. Tersusunnya perumusan masalah dan isu strategis daerah;
- e. Tersusunnya visi dan misi daerah; dan
- f. Tersusunnya arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB 1. PENDAHULUAN

Memuat sekurang-kurangnya latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan hubungan antar dokumen (RPJPD dan dokumen rencana lainnya).

BAB 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat sekurang-kurangnya:

1. Aspek Geografi dan Demografi
Menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumberdaya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Kesejahteraan Ekonomi yaitu Menjelaskan karakteristik kesejahteraan Masyarakat dari perspektif ekonomi.
 - b. Kesejahteraan Sosial Budaya Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya.
3. Aspek Daya Saing
 - a. Daya Saing Ekonomi Daerah, menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan.
 - b. Daya Saing SDM, menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor pegerak perekonomian daerah.
 - c. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah, menjelaskan kondisi fasilitas/ infrastruktur di daerah.
 - d. Daya Saing Iklim Investasi, menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah.
4. Aspek Pelayanan Umum
Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung

jawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025
Menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD 2025-2045.
6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi dan penduduk usia tua.
 - b. Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan 2045 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari Kementerian Lembaga (K/L) terkait.
7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah
Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis sesuai regulasi yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah

BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini berisi tentang permasalahan yang disimpulkan dari Bab II. Selanjutnya akan diuraikan isu strategis daerah yang disimpulkan dari isu strategis sesuai konteks (global, nasional, dan regional), permasalahan dominan, dan potensi daerah.

1. Permasalahan
Menguraikan tentang permasalahan utama yang merupakan factor penghambat yang mengikat dan apabila ditangani dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan.
2. Isu Strategis Daerah
Memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Bagian ini menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

BAB 4. VISI DAN MISI DAERAH

Memuat sekurang kurangnya:

1. Visi daerah Tahun 2025-2045
Visi daerah adalah kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan Tahun 2045.
2. Misi daerah Tahun 2025-2045
Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.

BAB 5. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Bab ini akan dijelaskan terkait dengan arah kebijakan yang merupakan tahapan capaian pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Selain itu, akan dijelaskan sasaran pokok yang merupakan rincian pernyataan kinerja yang menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah.

1. Arah kebijakan

Merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah meliputi:

- a. Arah Kebijakan Periode 2025-2029
- b. Arah Kebijakan Periode 2030-2034
- c. Arah Kebijakan Periode 2035-2039
- d. Arah Kebijakan Periode 2040-2045

yang sejalan dengan arah kebijakan dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas Tahun 2045, serta sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah.

2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 Tahun 2025-2045

Merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD Tahun 2025-2045 dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 memuat arah pembangunan, arah kebijakan transformasi daerah, dan indikator utama pembangunan sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

BAB 6. PENUTUP

Memuat salah satunya tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



RPJPD Kota Bogor
2025-2045

Kota Bogor menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan di wilayah Jawa Barat. Keberagaman budaya, sumber daya alam yang melimpah, dan lokasinya yang strategis di antara kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung sehingga memiliki potensi besar untuk menjadi pusat kesejahteraan masyarakat dan inovasi. Namun demikian, Kota Bogor juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar dapat mencapai visi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dari masalah urbanisasi yang cepat hingga perlunya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, penting bagi Kota Bogor untuk merumuskan rencana pembangunan jangka panjang yang komprehensif dan terarah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2045 menjadi panduan utama bagi pemerintah dan pemangku kepentingan di Kota Bogor untuk merancang strategi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Dalam RPJMD ini, gambaran umum kondisi Kota Bogor akan menjadi landasan penting untuk memahami tantangan, peluang, dan arah pembangunan yang diinginkan. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum kondisi daerah dengan cakupan tujuh aspek, yakni: (1) Aspek geografi dan demografi; (2) Aspek kesejahteraan masyarakat; (3) Aspek daya saing; (4) Aspek pelayanan umum; (5) Evaluasi hasil RPJPD Tahun 2025-2045; (6) Tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik; dan (7) Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kondisi geografi dan demografi Kota Bogor merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Bentuk geografi yang tidak cukup luas dan terbatas, namun memiliki dinamika demografi yang terus berubah, termasuk pertumbuhan penduduk yang cepat dan pola migrasi yang kompleks membentuk wajah Kota Bogor saat ini dan proyeksi masa depannya. Melalui analisis yang cermat dan proses konsultasi yang inklusif dengan berbagai pemangku kepentingan, RPJPD 2025-2045 diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi. Dengan demikian, strategi pembangunan yang dirumuskan dapat berfokus pada upaya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup penduduk, serta pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

2.1.1. Geografi

Aspek geografi menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan KLHS serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim. Relevansi aspek geografi dengan Kota Bogor digunakan untuk melihat potensi dan risiko serta kondisi terkini permasalahan yang meliputi letak geografis; peran dan fungsi; kondisi geologi, topografi, tata guna lahan dan iklim; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); daya dukung penyediaan pangan dan air; potensi sumber daya alam; risiko bencana; serta risiko lingkungan hidup.

2.1.1.1. Posisi Strategis Kota Bogor

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106°43'30"BT – 106°51'00"BT dan 6°30'30"LS – 6°41'00"LS. Kota Bogor berada pada posisi yang strategis dari segi pengembangan wilayah karena berada di tengah wilayah kabupaten Bogor serta dekat dengan Provinsi DKI Jakarta. Akses transportasi yang sangat memadai baik transportasi berbasis rel, bus maupun kendaraan pribadi menjadikan akses dari Kota Bogor ke Provinsi DKI Jakarta dan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat menjadi

lebih mudah. Jarak Kota Bogor dengan DKI Jakarta kurang lebih 60 kilometer dan dengan Kota Bandung kurang lebih 120 kilometer. Aksesibilitas yang mudah dan keterkaitan yang erat antar penduduk di Kota Bogor dengan wilayah sekitarnya sangat strategis dalam mendukung perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, pariwisata, transportasi, dan komunikasi serta industri. Posisi Kota Bogor berada di tengah-tengah Kabupaten menjadikan Kota Bogor sangat mudah dijangkau dari DKI Jakarta dan wilayah Jabodetabek lainnya.

Kota Bogor memiliki luas wilayah sebesar 111,38 km² yang terdiri atas 6 kecamatan dan 68 kelurahan, 623 RW, dan 2.712 RT. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Bogor Selatan yang mencakup 27,38% dari luas Kota Bogor. Sedangkan wilayah dengan luas paling kecil adalah Kecamatan Bogor Tengah yang mencakup 7,51% dari luas Kota Bogor. Secara karakteristik wilayah Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Tengah Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Tanah Sareal lebih mempunyai corak sebagai wilayah urban yang dicirikan dengan infrastruktur lebih lengkap, menjadi pusat bisnis dan ekonomi, pusat layanan pendidikan dan kesehatan, serta aksesibilitas yang lebih mudah (Tabel 2.1).

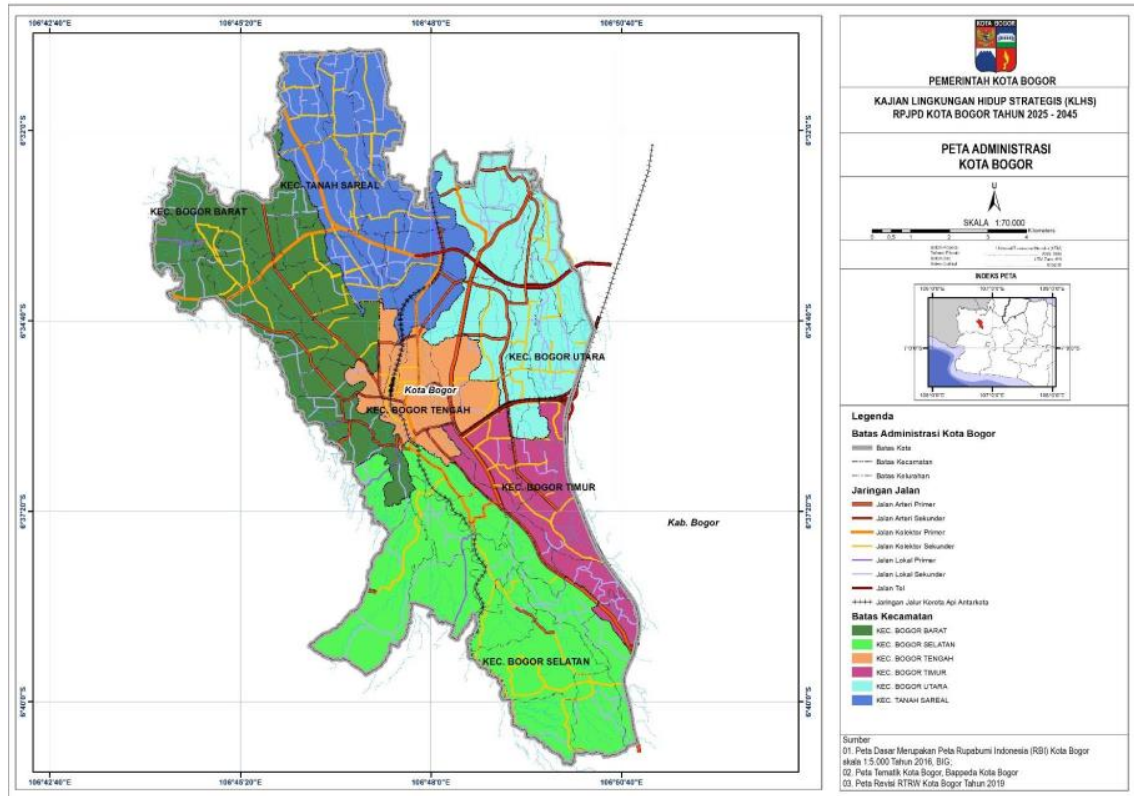
Tabel 2.1. Luas dan Pembagian Wilayah Administrasi Kota Bogor

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
1	Bogor Barat	23,31	20,93
2	Bogor Selatan	30,50	27,38
3	Bogor Tengah	8,37	7,51
4	Bogor Timur	10,48	9,41
5	Bogor Utara	18,12	16,27
6	Tanah Sareal	20,60	18,50
Jumlah		111,38	100,00

Sumber: BPS Kota Bogor Tahun 2022

Sementara wilayah Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan karakteristik rural masih cenderung lebih dominan yang dicirikan diantaranya oleh jaringan jalan kecil, fasilitas perekonomian, kesehatan dan pendidikan lebih terbatas. Walaupun demikian, perkembangan kawasan perumahan tidak hanya terjadi di wilayah timur tetapi juga berkembang ke wilayah barat. Secara umum luas wilayah Kota Bogor relatif terbatas dan secara administratif Kota Bogor dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Bogor, sehingga memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor;
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Kecamatan Ciomas, dan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Cijeruk, dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.



Sumber: KLHS RPJPD Kota Bogor

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Bogor

2.1.1.2. Peran dan Fungsi Kota Bogor

Mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) No 60 tahun 2020 tentang tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur terdapat dua kawasan perkotaan yaitu Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan sekaligus sebagai Kawasan Strategis Nasional. Kota Bogor dalam hal ini masuk ke dalam kawasan perkotaan di sekitarnya. Berdasarkan struktur ruang, Kota Bogor paling tidak menjadi penyeimbang perkembangan kawasan perkotaan inti dengan fungsi utama meliputi;

- 1) pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan;
- 2) pusat perdagangan dan jasa skala nasional dan regional;
- 3) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
- 4) pusat pelayanan pendidikan tinggi;
- 5) pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
- 6) pusat kegiatan pariwisata; dan
- 7) pusat kegiatan pertemuan, pameran, serta sosial dan budaya.

Adapun dari sisi pola ruang, Kota Bogor memiliki beberapa fungsi sebagai kawasan lindung dan juga kawasan budidaya. Pada kawasan budidaya, Kota Bogor termasuk zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai daya dukung lingkungan tinggi, tingkat pelayanan prasarana dan sarana tinggi, berpotensi dikembangkan untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi. Zona tersebut terdiri atas;

- 1) kawasan peruntukan permukiman teratur dengan kepadatan tinggi dan/ atau permukiman dengan kepadatan yang dikendalikan;
- 2) kawasan peruntukan pemerintahan kabupaten, kota, dan/atau kecamatan;
- 3) kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
- 4) kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;
- 5) kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
- 6) kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, regional, dan lokal;
- 7) kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional;
- 8) kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang skala nasional dan regional;
- 9) kawasan peruntukan industri;
- 10) kawasan peruntukan pengembangan sistem logistik terpadu (multimoda);
- 11) kawasan peruntukan pertemuan, pameran, dan sosial budaya; dan/ atau
- 12) kawasan peruntukan budi daya perikanan skala nasional dan regional

Sebagai salah satu kawasan hulu dalam tata ruang jabodetabekpunjur, Kota Bogor dalam pengembangannya perlu mempertimbangkan tersedianya daerah-daerah resapan air berupa waduk, ruang terbuka hijau dan lain-lain yang mampu menampung limbah air permukaan. Sementara dalam sisi infrastruktur untuk konektivitas terdapat upaya untuk peningkatan pemanfaatan jalur KA yang menghubungkan Kota Bogor dengan DKI Jakarta serta peningkatan jaringan jalan yang menghubungkan Citayam Depok dengan jalan lingkaran luar Jakarta (JORR) akan meningkatkan interaksi antara DKI Jakarta dengan Kota Bogor. Peningkatan aksesibilitas antara Jakarta dengan Bogor harus dimanfaatkan oleh Kota Bogor sebagai peluang membangun kesalingtergantungan dengan meningkatkan kemampuan pelayanan di bidang sosial ekonomi.

Dalam lingkup Bogor Raya, Kota Bogor akan tetap menjadi pusat pelayanan sosial ekonomi, pusat layanan transportasi dan pusat perdagangan khususnya terhadap wilayah-wilayah Kabupaten Bogor yang berbatasan langsung dengan Kota Bogor. Mengingat hal tersebut maka dalam perencanaan fasilitas pelayanan terutama di kawasan pinggiran penduduk kawasan pinggiran perlu diperhatikan serta akses menuju fasilitas dari kawasan pinggiran. Dalam hal utilitas, Kota Bogor memiliki ketergantungan kepada Kabupaten Bogor dalam hal penyediaan sumber air dan TPA. Agar kebutuhan akan sumber air serta lahan untuk TPA dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kebutuhan penduduk Kota Bogor maka dalam merencanakan sistem utilitas kota, perlu adanya kerjasama antara pemerintah Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor.

2.1.1.3. Kondisi Geologi, Topografi, Tata Guna Lahan dan Iklim di Kota Bogor

1. Geologi

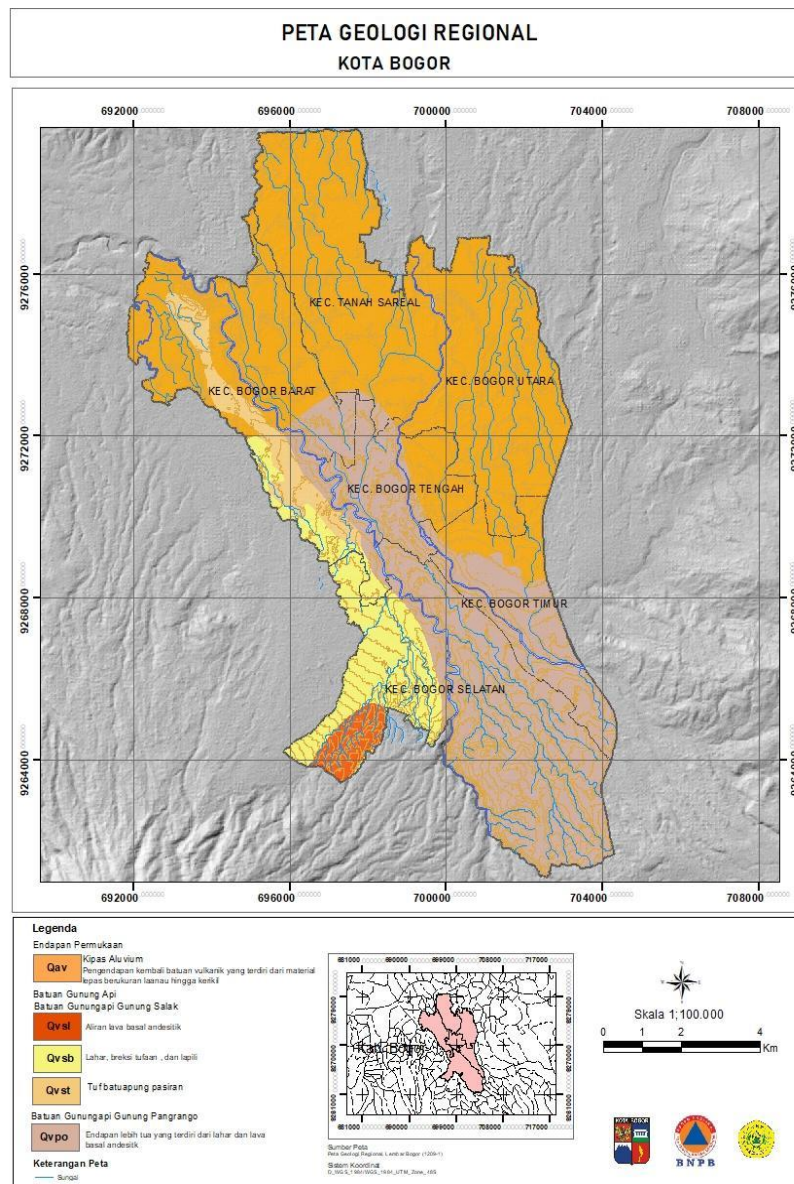
Karakteristik Kota Bogor yang dekat dengan wilayah gunung berapa berpengaruh terhadap kondisi geologi. Berdasarkan aspek geologi, secara umum Kota Bogor ditutupi oleh batuan vulkanik. Mengacu kepada Menurut A.C. Efendi et.al (1998) Kota Bogor secara geologi tersusun umumnya oleh produk batuan vulkanik dari Gunung Gede Pangrango dan Gunung Salak serta endapan alluvium yang membentuk bentang alam kipas (Aluvial Fans). Bagian barat Kota Bogor didominasi oleh Endapan Lebih Tua yang terdiri dari lahar dan lava dengan kandungan andesit basaltic (Qvpo). Batuan ini berasal dari Gunung Pangrango. Bagian timur disusun oleh batuan yang berasal dari Gunung Salak, terdiri dari lahar, breksi tufan, dan lapilli (Qvsl), aliran lava basal (qvsl), dan tuf batuapung pasir (Qvst). Bagian utara didominasi oleh kipas alluvium yang merupakan pengendapan kembali

dari batuan vulkanik, terdiri dari material endapan dengan ukuran lanau hingga kerikil (Qav) (Gambar 2.2).

Tabel 2.2. Luas wilayah Kota Bogor berdasarkan jenis batuan

No	Jenis Batuan	Luas (ha)
1	Batuan Gunung Api Pangrango	3.338,88
2	Batuan Gunung Api Salak	1.812,90
3	Breksi dan Lava Gunung Kencana dan Limo	49,42
4	Formasi Bojonmanik	42,09
5	Formasi Jatiluhur	39,21
6	Kipas Aluvium	5.855,92
Total		11.138,42

Sumber: RTRW Kota Bogor 2011 – 2031

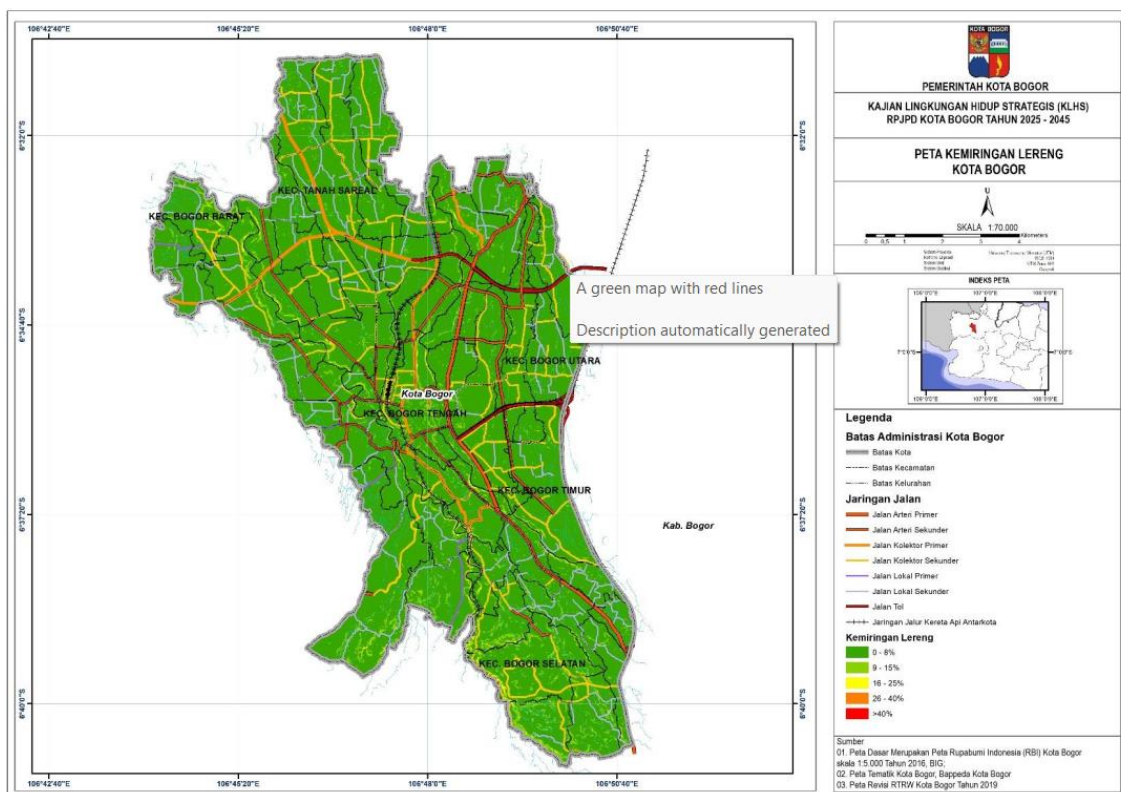


Sumber: RTRW Kota Bogor 2011 – 2031

Gambar 2.2. Peta Geologi Regional Kota Bogor

2. Topografi

Secara topografi, Kota Bogor mempunyai wilayah dengan kontur berbukit dan bergelombang dengan ketinggian bervariasi, ketinggian minimum 190 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan ketinggian maksimum 330 mdpl. Sebagian besar wilayah Kota Bogor memiliki lahan datar dengan kemiringan berkisar 0–2 persen, untuk luasan lahan datar seluas 1.763,94 hektar dan tersebar di enam kecamatan. Seluas 8.091,19 hektar merupakan lahan landai dengan kemiringan berkisar 2–15 persen, seluas 1.109,92 hektar merupakan lahan agak curam dengan kemiringan 15–25 persen, seluas 765,21 hektar merupakan lahan curam dengan kemiringan 25–40 persen dan lahan sangat curam seluas 119,74 hektar dengan kemiringan lebih dari 40 persen. Mengacu kepada kondisi topografi tersebut, Kecamatan Bogor Selatan merupakan daerah di Kota Bogor yang tergolong sangat rawan terhadap bahaya longsor, karena mempunyai daerah dengan kemiringan lebih dari 40 persen atau sangat curam sehingga daerah tersebut sangat rawan terhadap bahaya longsor.



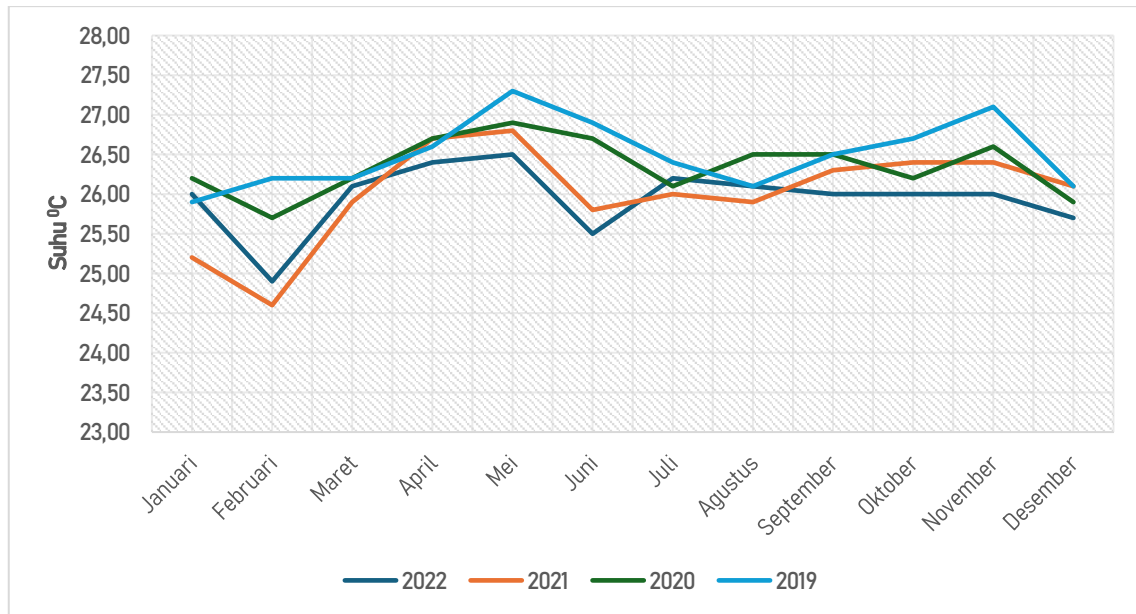
Sumber: RTRW Kota Bogor 2011 – 2031

Gambar 2.3. Peta Kemiringan Lereng Kota Bogor

3. Iklim

Iklim berpengaruh besar terhadap aktivitas manusia. Oleh karena itu informasi tentang faktor dan variasi iklim sangat diperlukan untuk berbagai kegiatan dan perencanaan. Kota Bogor memiliki kondisi iklim yang bervariasi dengan rata – rata suhu udara di Kota Bogor sepanjang tahun 2022 adalah 25,5 – 26,5°C. Suhu minimum yang terjadi pada tahun 2022 adalah 19,2 – 21°C dan suhu maksimum sebesar 32,8 – 34,7°C. Selama empat tahun terakhir (2019 – 2022) rata – rata suhu di Kota Bogor berkisar antara 24,60 – 27,30°C. Suhu minimum biasanya terjadi di bulan Juni dan suhu tertinggi biasanya terjadi di bulan Mei. Secara umum berdasarkan data terlihat adanya trend variabilitas suhu dalam empat tahun terakhir. Kondisi suhu merupakan salah satu isu yang penting terkait dengan perubahan iklim jangka panjang. Walaupun Kota Bogor bukan merupakan wilayah

yang berada di kawasan pesisir tetapi peningkatan suhu ekstrim bisa berpengaruh terhadap aktivitas penduduk di Kota Bogor di masa mendatang.



Sumber: BPS Kota Bogor Tahun 2023

Gambar 2.4. Rata - Rata Suhu di Kota Bogor Tahun 2019 - 2022

Kota Bogor terkenal dengan julukan kota hujan. Hal ini sesuai dengan data mengenai curah hujan dan hari hujan di Kota Bogor. Rata-rata hari hujan di Kota Bogor adalah 18 hari hujan per bulan selama empat tahun terakhir. Curah hujan berkisar antara 25 - 500 mm. Tantangan terkait dengan iklim diantaranya adalah variabilitas iklim yang semakin meningkat di masa mendatang baik curah hujan ekstrem, kekeringan serta fenomena iklim lainnya seperti *el nino* dan *la nina*. Kondisi ini perlu diantisipasi di masa mendatang terutama berkaitan dengan ketahanan air dan kewaspadaan bencana.

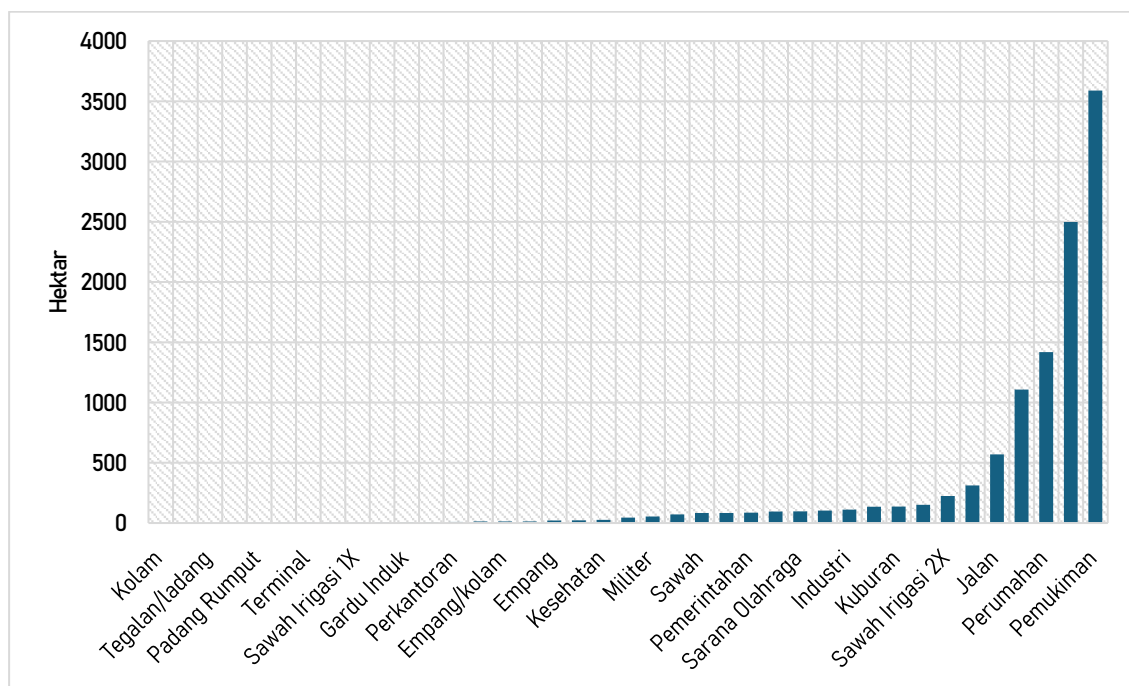
Tabel 2.3. Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan di Kota Bogor

Bulan	Curah Hujan di Stasiun Pengamatan Klimatologi Bogor Menurut Bulan (mm)							
	Jumlah hari hujan				Jumlah Curah hujan			
	2022	2021	2020	2019	2022	2021	2020	2019
Januari	30	18	14	19	107	304	208	288
Februari	23	20	18	21	150	487	337	277
Maret	28	20	19	21	113	233	293	231
April	29	17	19	20	317	505	271	671
Mei	25	16	15	13	229	510	292	312
Juni	27	17	5	10	464	311	30	138
Juli	29	8	7	5	358	116	64	53
Agustus	31	16	4	6	385	400	42	170
September	29	19	7	7	354	317	88	152
Oktober	28	22	17	13	492	567	327	382
November	28	17	16	14	321	184	207	330
Desember	28	20	16	24	224	279	262	553

Sumber: BPS Kota Bogor Tahun 2022

4. Tata Guna Lahan

Kota Bogor merupakan wilayah perkotaan di Jabodetabek yang paling kecil luas wilayahnya dibandingkan Kota Depok dan Kota Bekasi. Kondisi ini menyebabkan pola penggunaan lahan di Kota Bogor juga terbatas. Dari total luas lahan sebesar 11.138,42 hektar, sebagian besar lahan yang ada di Kota Bogor merupakan area terbangun. Kawasan permukiman dan perumahan di Kota Bogor secara total sebesar 5.007,23 hektar atau 44,95% persen. Luas lahan yang berupa kebun dan semak belukar sebesar 3.606,04 hektar (32,37%), lahan industri seluas 111,74 hektar (1%), perdagangan dan jasa seluas 246,88 hektar (2,08%). Lahan lainnya masih berupa hutan kota seluas 51,60 hektar (0,43%), kebun raya seluas 72,12 hektar (0,61%), serta tempat pemakaman umum seluas 137,95 hektar (1,16%), danau/situ seluas 19,36 hektar (0,16%), sungai seluas 1,10 hektar serta sempadan sungai seluas 1,07 hektar. Adapun luas sawah di Kota Bogor relatif terbatas dengan luas 313,1 hektar (2,8%).



Sumber: RTRW Kota Bogor Tahun 2011 – 2031

Gambar 2.5. Luasan Lahan Berdasarkan Penggunaan di Kota Bogor

Mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bogor, paling tidak terdapat dua arahan utama yaitu pengembangan pola ruang dan struktur ruang. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor, terhadap penggunaan ruang dalam RTRW, selama periode 2015 – 2019 ketaatan terhadap tata ruang di Kota Bogor sudah sangat baik, artinya setiap proses pembangunan fisik dan pengembangan aktivitas perekonomian di Kota Bogor sudah mengacu kepada arahan penggunaan ruang dalam RTRW. Adapun pada tahun 2020 – 2022, indikator kinerja dalam tata ruang disesuaikan menjadi persentase realisasi rencana struktur ruang dan realisasi rencana pola ruang. Berdasarkan data pada tabel dapat dilihat bahwa realisasi untuk rencana struktur ruang mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir walaupun realisasinya masih belum optimal. Adapun untuk realisasi dari pola ruang nilainya sudah lebih baik dengan persentase pada tahun 2022 mencapai 38,61%. Presentase realisasi pola ruang yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pengembangan aktivitas masyarakat pada kawasan yang ditetapkan dalam RTRW sudah semakin baik.

Tabel 2.4. Indikator RTRW di Kota Bogor Tahun 2015-2022

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	90	99,77	98,9	99,74	99,84	-	-	-
2	Realisasi Rencana Struktur Ruang* (%)	-	-	-	-	-	9,7	26,01	26,05
3	Realisasi Rencana Pola Ruang* (%)	-	-	-	-	-	17,8	30,93	38,61

Sumber: Bappeda Kota Bogor Tahun 2023

2.1.1.4. Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perhitungan IKLH merupakan upaya mengurangi laju kerusakan lingkungan di Kota Bogor dengan pemulihan kualitas lingkungan. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH di Kota Bogor terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU).

Tabel 2.5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Bogor Tahun 2019 – 2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Indeks Kualitas Air (%)	51,67	56,33	64,72	51,39
Indeks Kualitas Udara (%)	81,76	80,09	99,35	98,36

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.5, Indeks Kualitas Air di Kota Bogor pada tahun rentang 2019-2022 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2022 menurun menjadi 51.39 dan termasuk ke dalam status mutu pencemaran ringan. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air juga harus bersinergi dengan program dan kegiatan pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Hasil *monitoring* Indeks Kualitas Udara Kota Bogor pada tahun 2019-2022 termasuk ke dalam kategori baik ($70 \leq x < 90$). Status mutu udara dilakukan dengan menghitung rata-rata konsentrasi parameter SO₂ (Sulfur Dioksida) dan NO₂ (Nitrogen Dioksida) tahunan sesuai Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

2.1.1.5. Daya Dukung Pangan dan Air

Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Pangan, air dan energi dipilih sebagai variabel untuk mengkuantifikasi Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH).

1. Daya Dukung Penyediaan Bahan Pangan

Kota bogor merupakan daerah perkotaan dengan luas kawasan yang terbatas. Selain itu Kota Bogor bukan menjadi daerah produsen pertanian, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Meskipun demikian, kondisi daya dukung pangan dibutuhkan sebagai *baseline* awal dalam menentukan kebijakan terkait dengan ketahanan pangan. Guna melihat tingkat kebutuhan pangan maka dihitung kebutuhan pangan berdasarkan jumlah penduduk yang dibandingkan dengan ketersediaan pangan. Secara umum selisih ketersediaan pangan di Kota Bogor adalah defisit untuk seluruh wilayah kecamatan. Ketersediaan energi pangan dalam jumlah besar ditemukan di

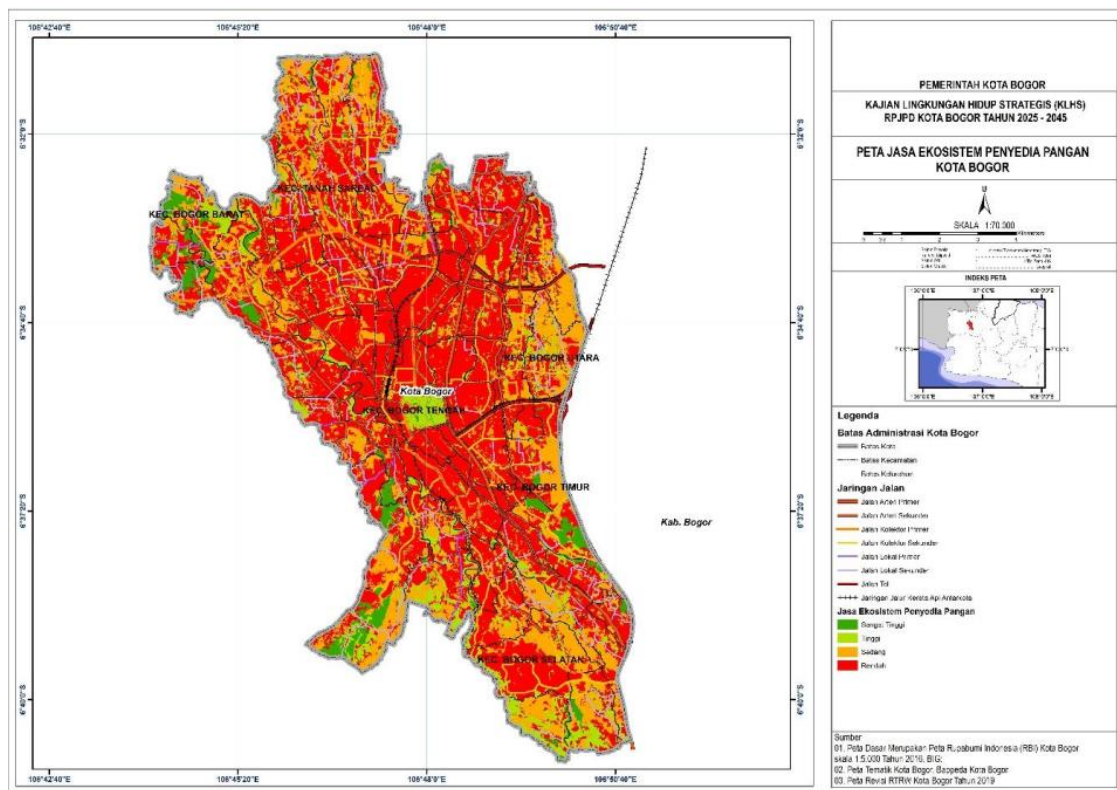
Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan yaitu mencapai 8.000 Juta Kkal/tahun. Kebutuhan pangan terbesar ditemukan di Kecamatan Bogor Barat yaitu 91.673 juta Kkal sedangkan terendah ditemukan di Kecamatan Bogor Tengah sebesar 37.769 juta Kkal. Adapun selisih ketersediaan pangan terbesar terdapat di Kecamatan Bogor Barat dan Tanah Sereal mencapai 80.000 juta Kkal.

Tabel 2.6. Kondisi Daya Dukung Pangan Kota Bogor

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Pangan (Juta Kkal)	Ketersediaan Pangan (Juta Kkal)	Selisih Ketersediaan Pangan (Juta Kkal)
Bogor Barat	233.637	91.673	8.477	-83.196
Bogor Selatan	204.030	80.056	8.073	-71.984
Bogor Tengah	96.258	37.769	-	-37.769
Bogor Timur	104.327	40.935	3.318	-37.617
Bogor Utara	186.724	73.266	775	-72.491
Tanah Sereal	218.094	85.575	3.052	-82.522

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bogor 2020 – 2045

Secara umum jasa ekosistem penyediaan pangan di Kota Bogor termasuk kategori rendah karena Bogor bukan merupakan sentra produksi dengan keterbatasan lahan. Meskipun demikian, wilayah dengan luas jasa ekosistem penyediaan pangan yang paling besar ada di Bogor Barat dan di Bogor Selatan. Penyediaan pangan di Kota Bogor secara mandiri tidak dapat dilakukan karena neraca pangan di Kota Bogor defisit dimana ketersediaan lebih rendah daripada kebutuhan. Oleh karena itu kepastian penyediaan pangan dari daerah lain yang masuk ke Kota Bogor perlu dipastikan keberlanjutannya.



Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031

Gambar 2.6. Peta Jasa Ekosistem Pangan di Kota Bogor

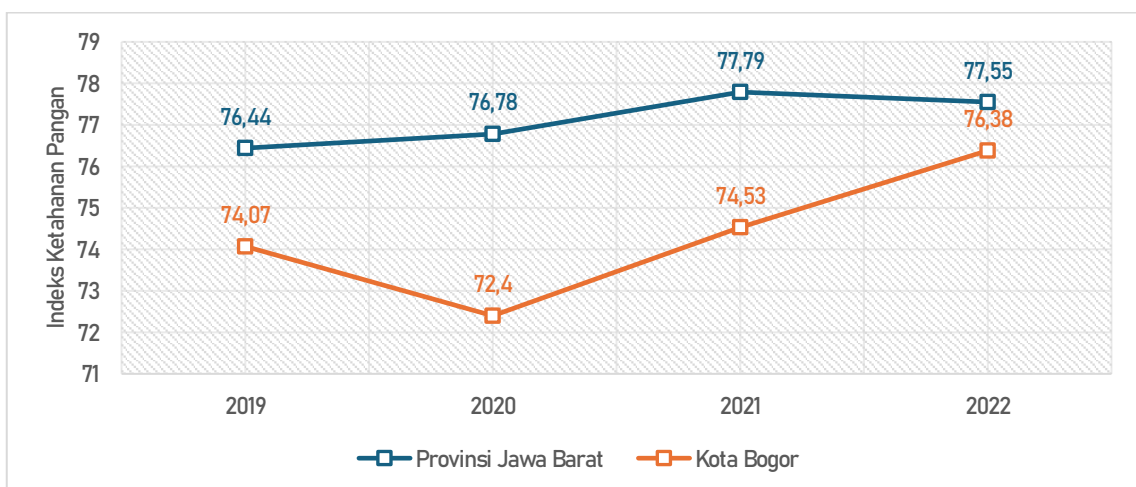
Tabel 2.7. Status Daya Dukung Pangan Terhadap Ambang Batas di Kota Bogor

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Ambang Batas Pangan (Jiwa)	Status Ambang Batas Pangan (Jiwa)	Status Daya Dukung Pangan
Bogor Barat	233.637	21.605	-212.032	Terlampai
Bogor Selatan	204.030	20.574	-183.456	Terlampai
Bogor Tengah	96.258	-	-96.258	Terlampai
Bogor Timur	104.327	8.456	-95.871	Terlampai
Bogor Utara	186.724	1.975	-184.749	Terlampai
Tanah Sareal	218.094	7.779	-210.315	Terlampai

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bogor 2020 – 2045

Keberlanjutan pasokan pangan dari luar sangat penting karena status daya dukung pangan Kota Bogor yang rendah. Berdasarkan jumlah penduduk dan ambang batas pangan di setiap kecamatan di Kota Bogor maka diperoleh bahwa seluruh kecamatan telah memiliki status daya dukung pangan terlampaui dengan nilai terlampaui terbesar terdapat di Kecamatan Bogor Barat. Berdasarkan prediksi kebutuhan pangan tahun 2045 terbesar ditemukan di Kecamatan Bogor Barat yaitu 91.673 juta Kkal sedangkan terendah ditemukan di Kecamatan Bogor Tengah sebesar 93.654 juta Kkal. Peningkatan dari tahun 2021 – 2045 sebesar 1.981 juta Kkal. Kondisi lingkungan yang semakin dinamis, penurunan luasan lahan pertanian serta semakin terbatasnya daerah sentra pertanian di sekitar Kota Bogor menjadi tantangan berat dalam penyediaan pangan 20 tahun ke depan. Upaya kerjasama antar daerah dan inovasi-inovasi lainnya di bidang pangan perlu terus didorong guna mengantisipasi hal tersebut.

Pemerintah Kota Bogor melalui peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor yang berupaya mengkaji isu ketahanan pangan dan pertanian untuk memunculkan isu strategis yang akan dijadikan bahan penentu kebijakan. Beberapa hal tersebut diantaranya melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat, peningkatan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan komitmen produk pertanian dan perikanan dalam menghadapi persaingan global, peningkatan kemampuan SDM pertanian dan perikanan, peningkatan penerapan teknologi yang berwawasan lingkungan, pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan Kota Bogor.



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2023 (diolah)

Gambar 2.7. Indeks Ketahanan Pangan Kota Bogor dan Jawa Barat Tahun 2019 – 2022

Selain dari konteks daya dukung untuk penyediaan pangan, aspek pangan juga dapat dilihat dari indikator ketahanan pangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Berdasarkan Gambar 2.7 Indeks Ketahanan Pangan Kota Bogor mengalami peningkatan sejak tahun 2020-2022, dengan nilai tertinggi pada tahun 2022 sebesar 76.38 atau meningkat sebesar 1.85 poin. Meskipun demikian, indeks ini masih lebih rendah daripada indeks Provinsi Jawa Barat.

2. Daya Dukung Penyediaan Air

Daya dukung air di Kota Bogor dilakukan melalui analisis antara kebutuhan dan ketersediaan air di wilayah tersebut. Kebutuhan air dihitung berdasarkan kebutuhan standar layak untuk kebutuhan sehari-hari. Perhitungan ini mencakup kebutuhan air untuk rumah tangga, kebutuhan non-domestik dan lahan pertanian serta memperhatikan faktor kehilangan air selama pemanfaatan air secara domestik dan non-domestik. Berdasarkan hasil analisis terhadap kebutuhan air, diketahui bahwa Kecamatan Bogor Selatan merupakan kecamatan yang mempunyai kebutuhan air paling tinggi mencapai 29 juta m³ per tahun. Hal ini karena secara populasi penduduk Kec. Bogor Barat adalah yang paling besar diantara kecamatan lain. Selain itu kebutuhan air yang besar diantaranya untuk kebutuhan non domestik adan adanya kehilangan air yang tinggi.

Tabel 2.8. Kebutuhan Air di Kota Bogor Tahun 2045

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Domestik (m ³ /Tahun)	Kebutuhan Air Non Domestik (m ³ /Tahun)	Kehilangan Air (m ³ /Tahun)	Kebutuhan Air Untuk Lahan (m ³ /Tahun)	Total Kebutuhan Air (m ³ /Tahun)
Bogor Barat	233.637	12.791.626	3.837.488	2.494.367	8.786.319	27.909.799
Bogor Selatan	204.030	11.170.643	3.351.193	2.178.275	12.733.319	29.433.430
Bogor Tengah	96.258	5.270.126	1.581.038	1.027.674	119.933	7.998.770
Bogor Timur	104.327	5.711.903	1.713.571	1.113.821	3.643.664	12.182.959
Bogor Utara	186.724	10.223.139	3.066.941	1.993.512	5.721.953	21.005.546
Tanah Sareal	218.094	11.940.647	3.582.194	2.328.426	6.613.468	24.464.734

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bogor 2020 – 2045

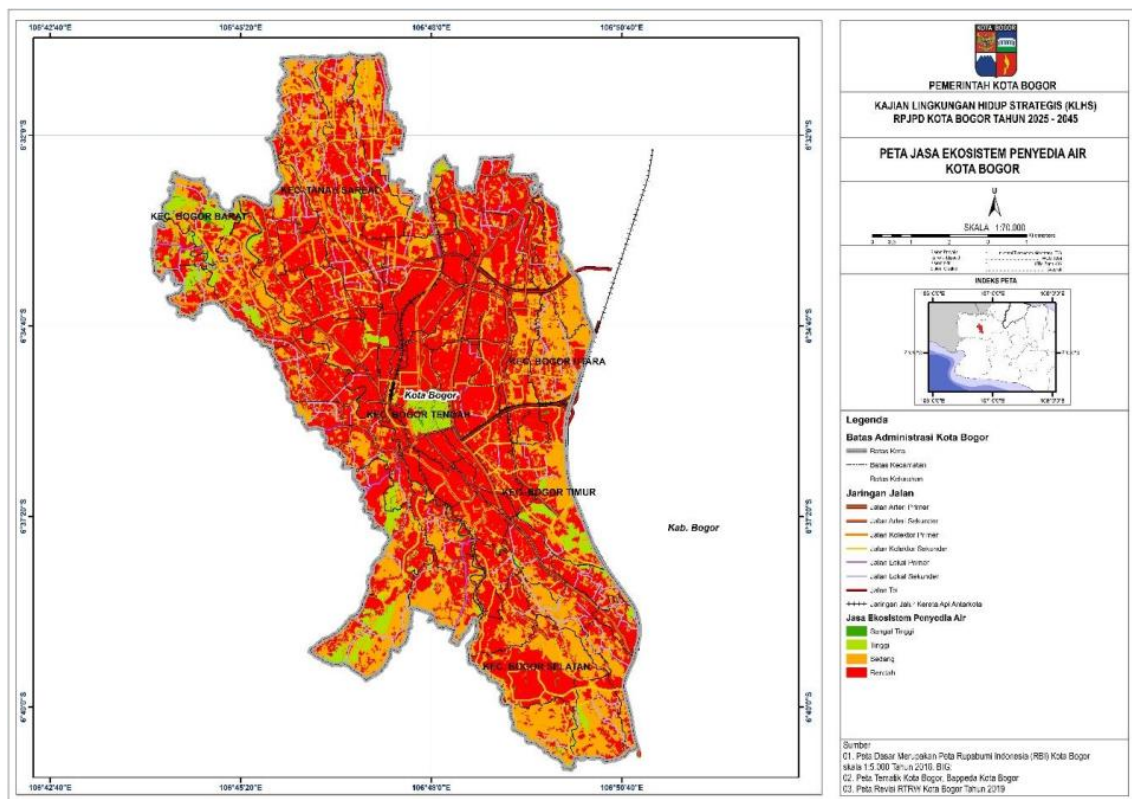
Berdasarkan hasil pemodelan, pada tahun 2045 total kebutuhan air di Kota Bogor sebesar 175.439 ribu m³/tahun atau meningkat sebesar 42,63% dari kondisi saat ini. Pada tahun 2045 Kecamatan Bogor Selatan memiliki jumlah kebutuhan air terbesar dibandingkan kecamatan lainnya yaitu 39.938.396 m³/tahun kemudian diikuti oleh Kecamatan Bogor Barat sebesar 39.616.841 m³/tahun. Kebutuhan air terendah terdapat di Kecamatan Bogor Tengah sebesar 12.777.964 m³/tahun. Berdasarkan hasil analisis daya dukung air terhadap ambang batas diketahui bahwa status daya dukung air tahun 2021 secara keseluruhan di Kota Bogor masih belum terlampaui. Kondisi ini berbeda dengan prediksi daya dukung air pada tahun 2045. Pertambahan penduduk sampai tahun 2045 berbanding lurus dengan kebutuhan air domestik dan non domestik. Secara umum status daya dukung air sampai tahun 2045 sudah terlampaui. Hanya Kecamatan Bogor Selatan yang masih belum terlampaui. Penurunan kualitas air dan kuantitas air di masa mendatang akan menjadikan tantangan penyediaan air yang sangat berat di tahun 2045. Upaya konservasi air perlu dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah secara bersama-sama. Pemerintah memastikan ketersediaan sumber air, sementara masyarakat menggunakan air dengan hemat dan tepat sesuai kebutuhan.

Tabel 2.9. Status Daya Dukung Air Terhadap Ambang Batas Tahun 2045

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m ³ /thn)	Tahun 2021		Tahun 2045	
			Total Kebutuhan Air (m ³ /Tahun)	Selisih Ketersediaan Air (m ³ /Tahun)	Total Kebutuhan Air (m ³ /Tahun)	Selisih Ketersediaan Air (m ³ /Tahun)
1	Bogor Barat	33.368.579,70	27.909.798,89	5.458.780,81	39.616.840,85	-6.248.261
2	Bogor Selatan	42.120.077,12	29.433.429,65	12.686.647,48	39.938.395,74	2.181.681
3	Bogor Tengah	11.690.708,47	7.998.770,43	3.691.938,04	12.777.964,03	-1.087.256
4	Bogor Timur	16.472.101,29	12.182.959,14	4.289.142,15	17.408.425,59	-936.324
5	Bogor Utara	23.532.314,84	21.005.545,82	2.526.769,02	30.345.045,68	-6.812.731
6	Tanah Sareal	28.215.325,56	24.464.733,65	3.750.591,91	35.353.034,35	-7.137.709
Total		155.399.107	122.995.238	32.403.869	175.439.706	-20.040,59

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bogor 2020 – 2045

Salah satu upaya untuk memastikan kesediaan air adalah melalui upaya konservasi ekosistem penyediaan air bersih. Secara umum jasa ekosistem penyediaan air di Kota Bogor sangat bervariasi dengan sebaran mayoritas berada pada kondisi rendah. Ketersediaan air bersih ini sangat dipengaruhi oleh kondisi bentang alam dan penggunaan lahan. Meskipun terdapat potensi curah hujan yang sangat tinggi tetapi perlu dikelola dengan sistem penyediaan air agar tidak kelebihan saat musim penghujan dan kekurangan di musim kemarau. Sebagian besar jasa ekosistem penyedia air bersih dengan kelas sangat tinggi ditemukan di Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Bogor Selatan.



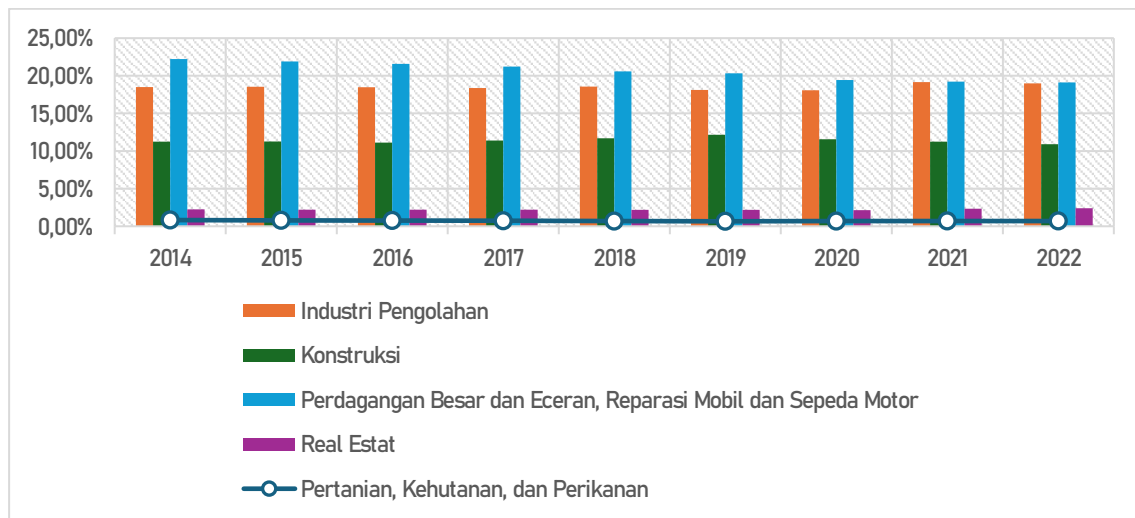
Sumber: RTRW Kota Bogor 2011 – 2031

Gambar 2.8. Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air di Kota Bogor

2.1.1.6. Potensi Sumber Daya Alam

1. Kondisi Pertanian

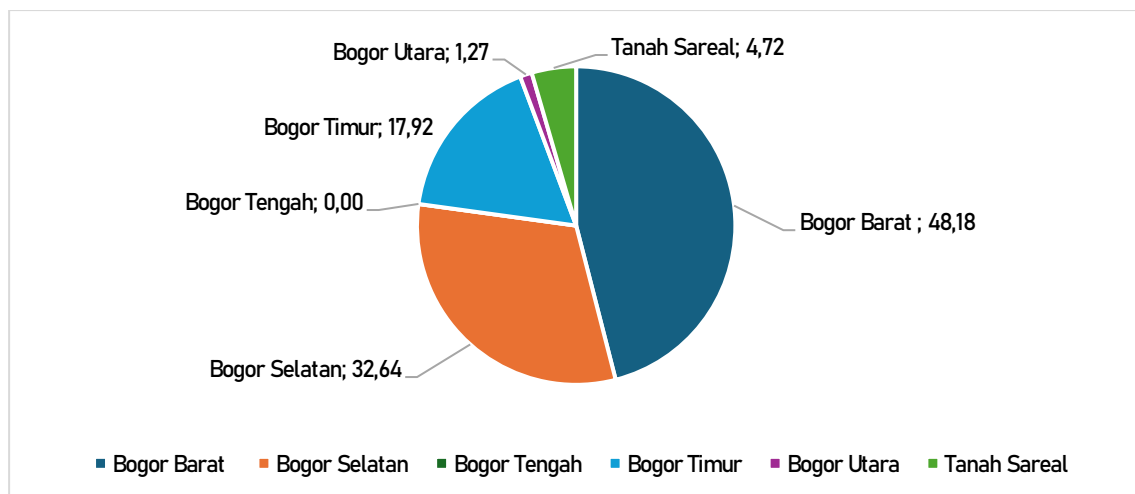
Kondisi sektor pertanian di Kota Bogor yang diindikasikan seperti Gambar di bawah ini, terlihat bahwa selama sembilan (9) tahun terakhir memiliki kontribusi berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki persentase kontribusi terhadap PDRB yang sangat kecil apabila dibandingkan dengan sektor dominan seperti Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta Real Estat.



Sumber: BPS Kota Bogor, 2023 (diolah)

Gambar 2.9. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dibanding Kontribusi Sektor Lain terhadap PDRB di Kota Bogor Tahun 2014 – 2022

Rendahnya persentase kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan disebabkan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (pemukiman, fasilitas umum transportasi, infrastruktur publik, dll) di Kota Bogor yang semakin tinggi. Hal tersebut berimplikasi kepada produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian yang kehidupannya sangat tergantung pada lahannya. Lahan pertanian (sawah) di Kota Bogor hingga saat ini tercatat hanya 321 hektar.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, 2023 (diolah)

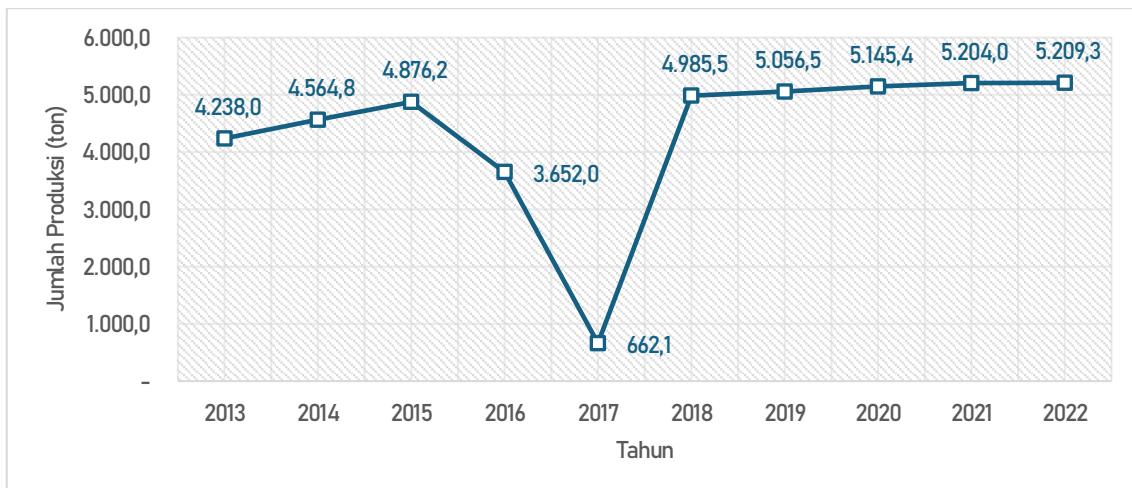
Gambar 2.10. Sebaran Lahan Sawah di Kota Bogor Per Kecamatan

Selain itu, mengacu Gambar 2.10 di atas bahwa persentase sebaran lahan sawah di Kota Bogor hanya menyisakan di Kecamatan Bogor Barat seluas 158 hektar, Kecamatan Bogor Selatan seluas 101 hektar, Kecamatan Bogor Timur seluas 57 hektar, Kecamatan Tanah Sereal seluas 3 hektar, dan Kecamatan Bogor Utara seluas 1 hektar. Sedangkan, Kecamatan Bogor Tengah sudah tidak memiliki area persawahan karena cenderung lahan telah digunakan untuk kegiatan aktivitas perekonomian (ruko, toko, bangunan lainnya).

2. Kondisi Perikanan

Perikanan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sektor perikanan menyediakan sumber pangan protein yang penting untuk masyarakat. Meskipun persentase sektor ini terhadap PDRB Kota Bogor tidak terlalu tinggi, namun dengan meningkatnya kegiatan penangkapan ikan, budidaya, dan pengolahan produk perikanan, sektor ini dapat juga memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan Masyarakat Kota Bogor.

Kegiatan produksi perikanan merupakan bagian dari industri yang di dalamnya termasuk kegiatan mendapatkan dan mengolah hasil laut dan hasil perikanan lain. Hasil produksi perikanan berasal dari kegiatan penangkapan di laut dan perairan umum, serta kegiatan budidaya di tambak, kolam, sawah, jaring apung maupun budidaya laut. Akan tetapi, wilayah Kota Bogor tidak memiliki hasil produksi perikanan laut dilihat dari kondisi geografisnya yang tidak memiliki wilayah lautan.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2023 (diolah)

Gambar 2.11. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Kota Bogor Tahun 2013 – 2022

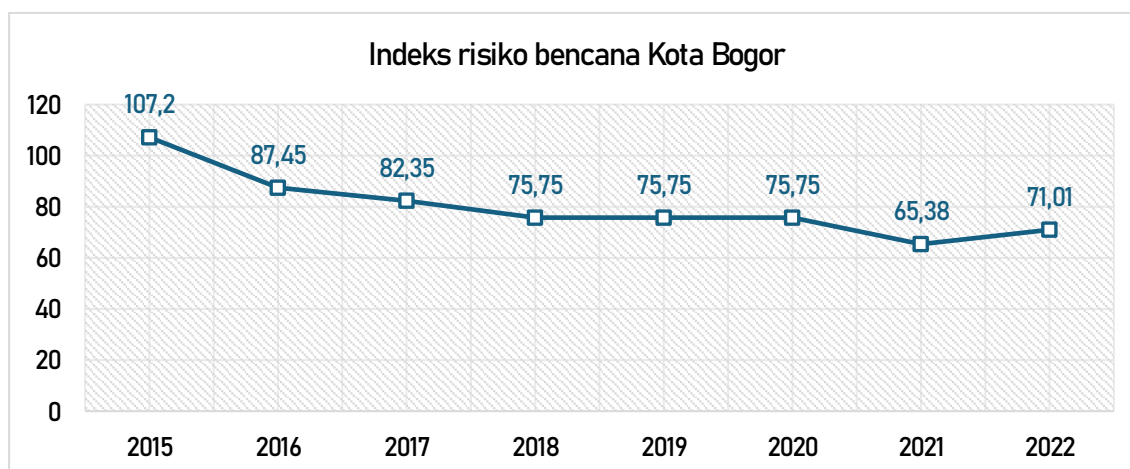
Berdasarkan Gambar di atas, produksi perikanan budidaya di Kota Bogor selama 10 tahun terakhir memiliki tren yang berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Anomali terjadi pada tahun 2016 dan 2017 dimana produksi perikanan budidaya di kedua tahun tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan. Selama 10 tahun terakhir, jumlah produksi terkecil terjadi di tahun 2017 dengan jumlah produksi hanya sebesar 662,1 ton. Akan tetapi, di tahun 2018 kembali terjadi peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya yang signifikan dengan peningkatannya mencapai 4.323,41 ton dalam kurun waktu hanya 1 tahun. Jumlah produksi perikanan budidaya semakin meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2022 mencapai 5.209,3 ton dan menjadi jumlah produksi tertinggi selama 10 tahun terakhir di Kota Bogor.

2.1.1.7. Risiko Bencana

Secara umum Kota Bogor tidak lepas dari berbagai potensi bencana yang ada baik bencana yang berkaitan dengan aktivitas manusia (antropogenik) seperti banjir dan kebakaran tetapi juga dengan berbagai bencana alam lainnya seperti tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi dan letusan gunung berapi. Oleh karena itu dalam merencanakan pembangunan 20 tahun ke depan diperlukan adanya pembangunan yang berwawasan kebencanaan sehingga infrastruktur dan masyarakat menjadi resilien terhadap potensi bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) melakukan kajian terhadap risiko bencana yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan.

Berdasarkan hasil kajian, Kota Bogor secara umum selama periode 2015 – 2022 berada pada kelas risiko sedang. Pada level Provinsi Jawa Barat, kelas risiko yang ada di provinsi hanya ada risiko tinggi dan sedang. Nilai risiko bencana di Kota Bogor cenderung semakin menurun dari tahun ke tahun yang artinya ini menunjukkan ada upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor untuk memastikan Kota Bogor aman siap terhadap bencana yang ada.

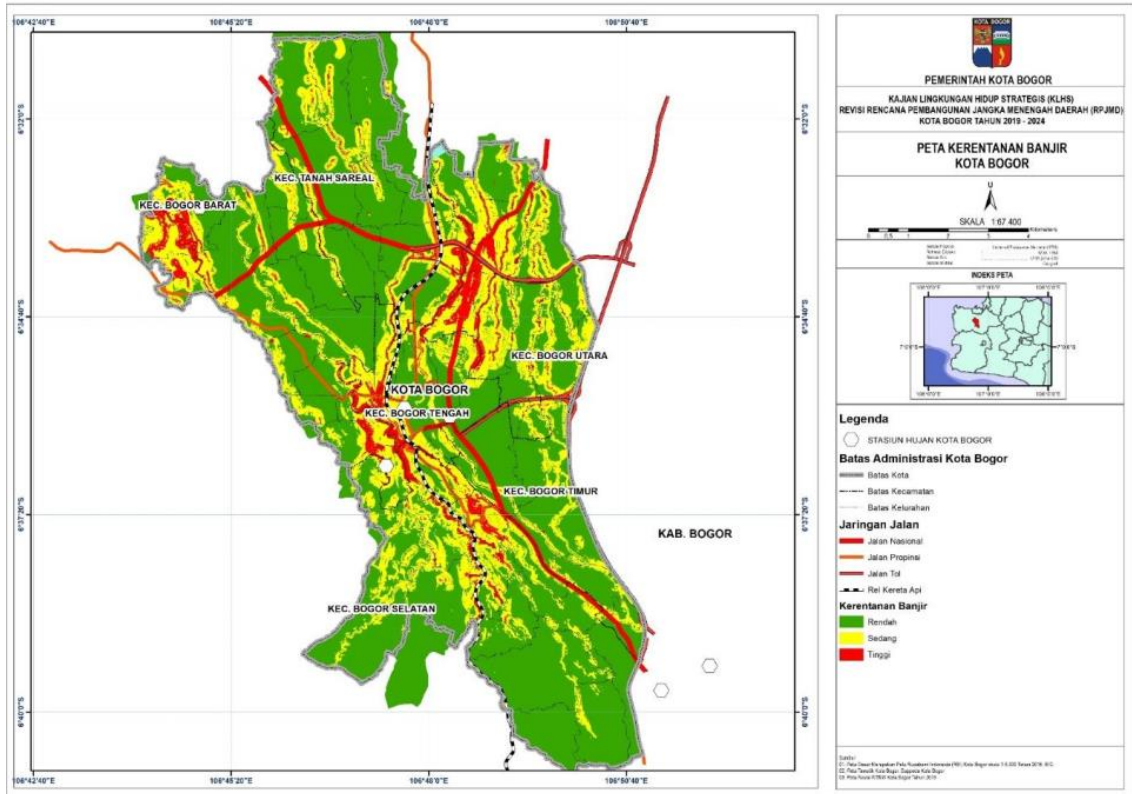


Sumber: Publikasi Indeks Risiko Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Nasional

Gambar 2.12. Indeks Risiko Bencana Kota Bogor Tahun 2015 – 2022

1. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kota Bogor yang memiliki cakupan area terbangun yang cukup luas serta dilewati oleh aliran sungai mempunyai kerentanan terhadap bencana banjir. Wilayah dengan luas kerentanan banjir yang tinggi sebagian besar terdapat di Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Bogor Barat. Sedangkan wilayah dengan kerentanan rendah yang paling luas terdapat di Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Tanah Sareal. Potensi variabilitas cuaca di masa mendatang dan kurangnya ruang terbuka hijau di masing-masing lokasi berpotensi memperparah kerentanan tersebut.



Sumber: RTRW Kota Bogor 2011 – 2031

Gambar 2.13. Peta Kerentanan Banjir Kota Bogor

Berdasarkan data kerentanan terhadap banjir dari RTRW Kota Bogor, terdapat 596,82 Ha wilayah di Kota Bogor yang masuk dalam klasifikasi tinggi. Berikut merupakan data dan peta terkait kerentanan terhadap banjir di Kota Bogor. Sementara wilayah dengan kerentanan banjir sedang mencapai 3.373,43 hektar. Secara umum lebih banyak wilayah yang potensi banjir rendah di Kota Bogor.

Tabel 2.10. Kerentanan Banjir per Kecamatan di Kota Bogor

No	Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
1	Bogor Barat	1.441,50	712,44	177,61	2.331,55
2	Bogor Selatan	2.127,53	817	105,52	3.050,05
3	Bogor Tengah	435,2	326,38	75,1	836,67
4	Bogor Timur	824,29	221,17	2,53	1.048,00
5	Bogor Utara	827,18	820,03	164,94	1.812,14
6	Tanah Sareal	1.512,47	476,41	71,14	2.060,01
Total		7.168,16	3.373,43	596,82	11.138,42

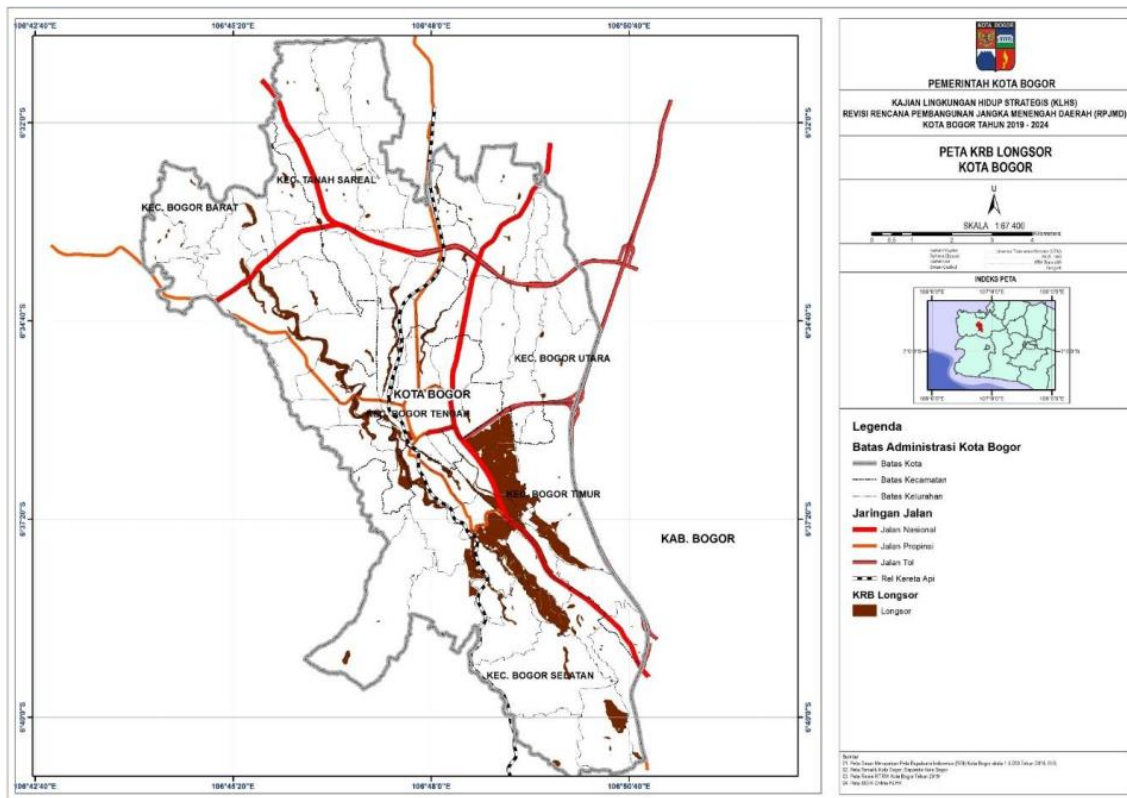
Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031

2. Kawasan Rawan Bencana Longsor / Gerakan Tanah

Berdasarkan data Revisi RTRW Kota Bogor Tahun 2011 -2031 terdapat Kawasan rawan longsor seluas 806,79 ha, Wilayah dengan luas rawan longsor yang paling besar ada di wilayah Bogor Selatan disusul wilayah Bogor Timur. Kedua wilayah ini cenderung berbukit. Sedangkan wilayah dengan kerentanan rendah terhadap gerakan tanah adalah wilayah Bogor Utara dan Tanah Sareal Potensi Gerakan tanah perlu diwaspadai terutama pada saat musim pengujan. Selain itu Upaya mitigasi secara teknis maupun non teknis di masing-masing wilayah rawan Gerakan tanah diperlukan.

Tabel 2.11. Kawasan Rawan Longsor di Kota Bogor

No	Kecamatan	Rawan Longsor (ha)
1	Bogor Barat	137,5
2	Bogor Selatan	287,42
3	Bogor Tengah	59,77
4	Bogor Timur	284,2
5	Bogor Utara	16,87
6	Tanah Sareal	21,03
Total		806,79



Sumber: RTRW Kota Bogor 2011 – 2031

Gambar 2.14. Peta Kawasan Rawan Longsor di Kota Bogor

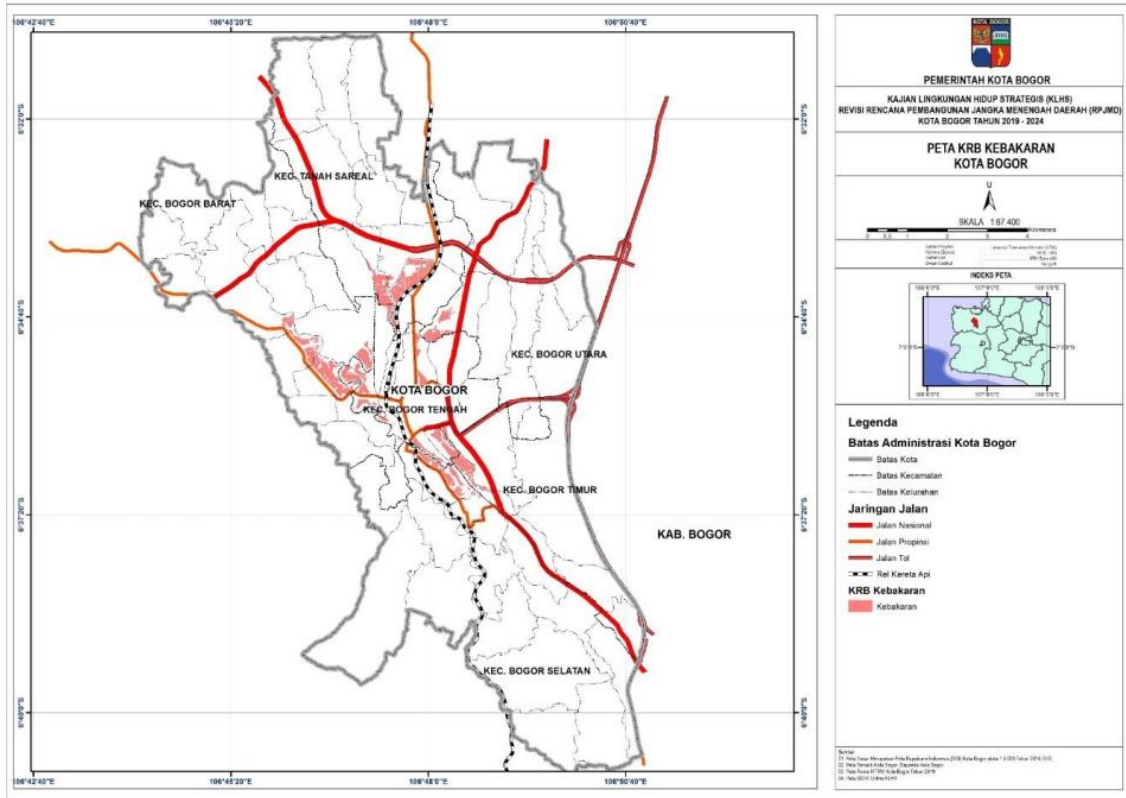
3. Kawasan Rawan Kebakaran

Berdasarkan data Revisi RTRW Kota Bogor Tahun 2011 -2031 terdapat Kawasan rawan kebakaran seluas 252,89 ha. Wilayah dengan luas rawan kebakaran yang paling besar ada di wilayah Bogor Barat disusul Tanah Sareal. Sedangkan wilayah dengan kerentanan rendah terhadap Kebakaran adalah wilayah Bogor Utara dan Bogor Timur. Potensi terjadinya kebakaran terutama berada pada wilayah yang mempunyai kepadatan bangunan yang cukup tinggi.

Tabel 2.12. Kawasan Rawan Kebakaran di Kota Bogor

No	Kecamatan	Rawan Kebakaran (ha)
1	Bogor Barat	64,99
2	Bogor Selatan	21,82
3	Bogor Tengah	59,9

No	Kecamatan	Rawan Kebakaran (ha)
4	Bogor Timur	18,66
5	Bogor Utara	19,26
6	Tanah Sareal	68,26
Total		252,89



Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031

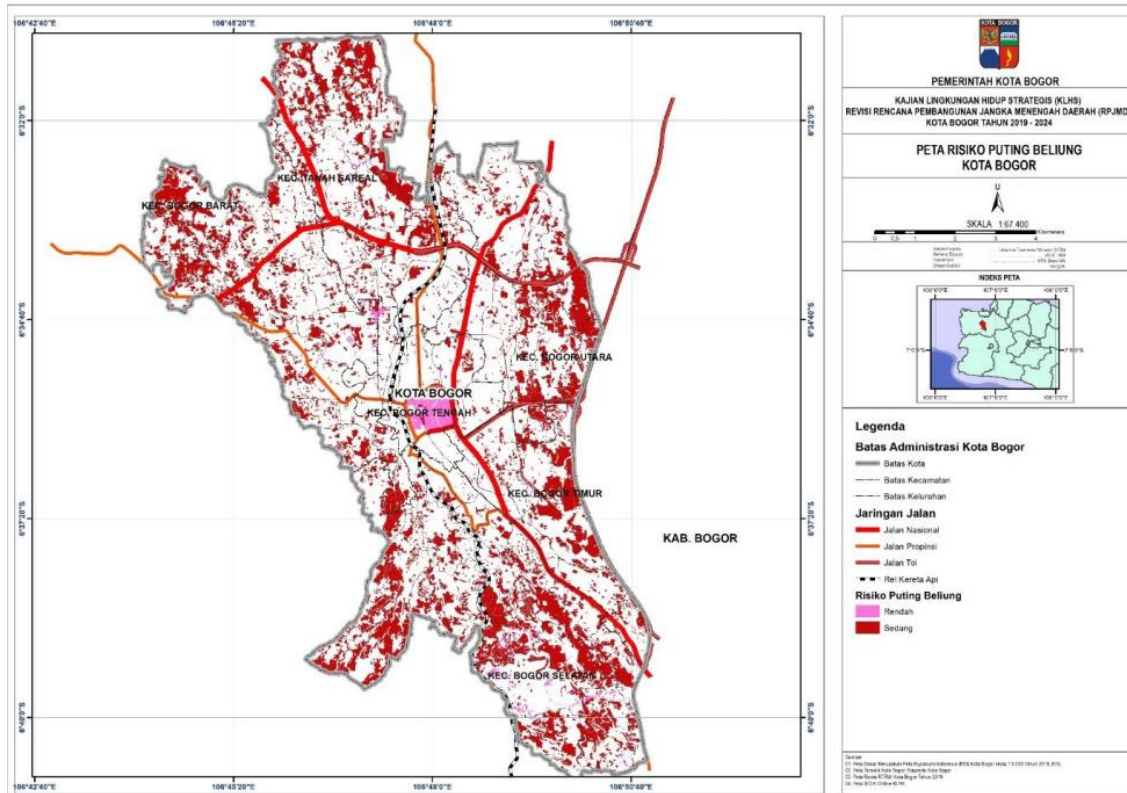
Gambar 2.15. Peta Kawasan Rawan Kebakaran di Kota Bogor

4. Kawasan Rawan Puting Beliung

Wilayah dengan kerentanan terhadap cuaca ekstrem (puting beliung) tersebar di hampir seluruh wilayah di Kota Bogor. Kerentanan yang paling rendah berada di Kecamatan Bogor Tengah. Antisipasi terhadap cuaca ekstrem perlu dilakukan dengan melakukan *update* terhadap informasi cuaca dan sosialisasi kepada masyarakat.

Tabel 2.13. Kawasan Rawan Puting Beliung di Kota Bogor

No	Kecamatan	Resiko Puting Beliung (ha)		
		Rendah	Sedang	Total
1	Bogor Barat	10,38	593,19	603,57
2	Bogor Selatan	33,85	953,42	987,27
4	Bogor Timur	11,99	250,74	262,73
5	Bogor Utara	8,45	443,64	452,09
6	Tanah Sareal	13,47	532,5	545,97
Total		180,79	2.822,47	3.003,26



Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031

Gambar 2.16. Peta Kawasan Rawan Puting Beliung di Kota Bogor

5. Kawasan Rawan Bahaya Gunung Api

Wilayah rawan bahaya gunung api paling banyak berada di Keacmaan Bogor Selatan dan Bogor Barat yang dekat dengan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kelurahan dengan wilayah paling luas untuk potensi bahaya gunung api adalah Kelurahan Situ Gede.

Tabel 2.14. Kawasan Rawan Bahaya Gunung Api di Kota Bogor

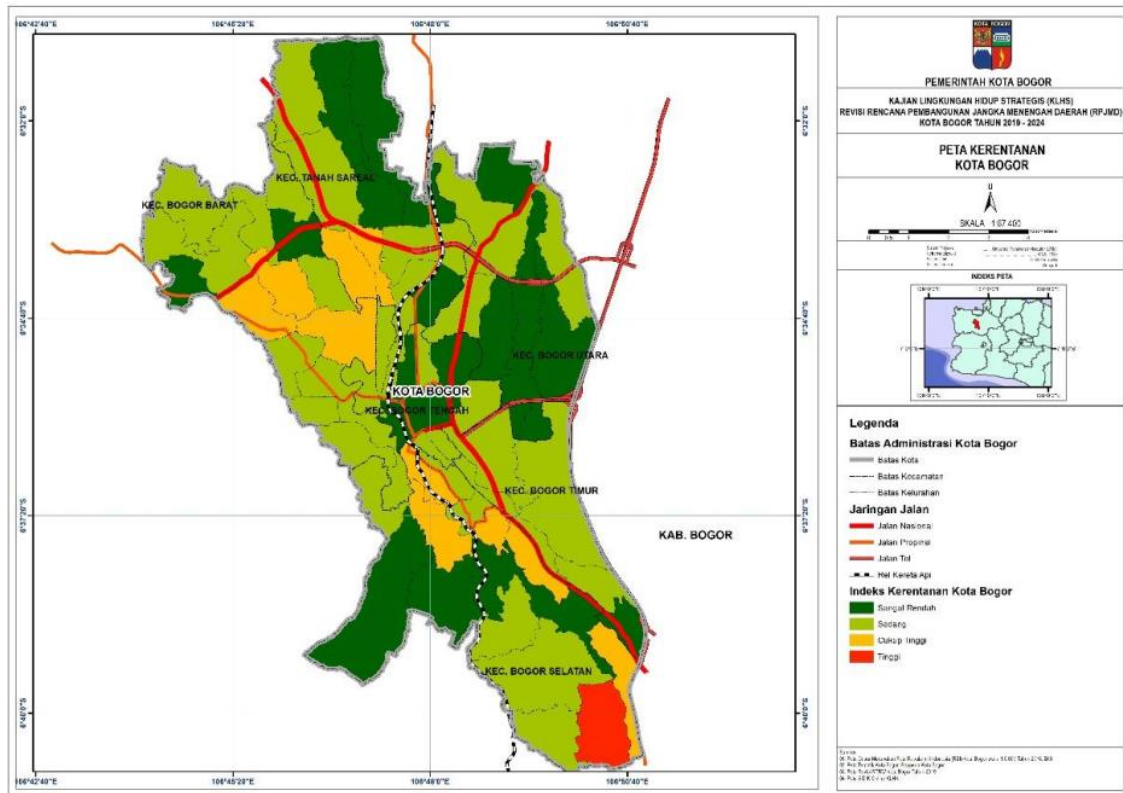
No	Kelurahan	Luas (ha)
1	Situgede	50,29
2	Pasir Jaya	49,39
3	Balumbangjaya	46,49
4	Semplak	38,02
5	Ranggamekar	34,07
6	Bubulak	31,08
7	Cipaku	29,18
8	Menteng	25,95
9	Pamoyanan	25,65
10	Margajaya	25,17
11	Empang	24,92
12	Sindangbarang	24,48
13	Gunungbatu	23,07
14	Panaragan	20,8
15	Cilendek Barat	19,93

No	Kelurahan	Luas (ha)
16	Batutulis	16,83
17	Kertamaya	16,69
18	Kebonkalapa	16,16
19	Genteng	14,63
20	Loji	14,47
21	Rancamaya	13,79
22	Paledang	9,24
23	Lawanggintung	2,83
Total		573,13

6. Adaptasi Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan fenomena yang nyata dan akan semakin berdampak ke depan. Oleh karena itu Kota Bogor juga perlu terus melakukan adaptasi baik secara struktural maupun non struktural untuk memastikan bahwa ketahanan iklim bisa terus dipertahankan. Berdasarkan data Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan yang dirilis oleh KLHK pada tahun 2018, diketahui bahwa nilai indeks kapasitas adaptasi (IKA) terhadap perubahan iklim di Kota Bogor adalah 0,6960 dari nilai tertinggi 1. Nilai ini menunjukkan bahwa kemampuan Kota Bogor dalam menghadapi dampak perubahan iklim baik berupa kekeringan dan banjir berada pada level/tingkatan sedang. Sedangkan untuk nilai indeks kerentanan dan sensitivitas (IKS) di Kota Bogor terhadap perubahan iklim adalah 0,4980 dari nilai tertinggi 1, artinya tingkat kerentanan masyarakat dan lingkungan terhadap adanya perubahan iklim jika terjadi kekeringan dan banjir berada pada level sedang.

Kerentanan (*Vulnerability*) menggambarkan sejauh mana sistem tersebut dapat mentolerir suatu perubahan atau penyimpangan (dalam kaitannya dengan perubahan iklim). Apabila perubahan/penyimpangan sudah melewati *batas toleransi dari sistem* maka sistem menjadi rentan karena perubahan iklim. Kerentanan dapat direpresentasikan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi, yang selanjutnya dinyatakan dengan indeks sensitivitas dan keterpaparan. Kota Bogor memiliki empat klasifikasi tingkat kerentanan yaitu kerentanan sangat rendah, sedang, cukup tinggi, dan kerentanan tinggi. Jumlah kelurahan yang berada pada kerentanan sangat rendah berjumlah 19 kelurahan, untuk kelurahan yang berada pada kerentanan sedang berjumlah 38 kelurahan, untuk kelurahan yang berada pada kerentanan cukup tinggi berjumlah 10 kelurahan, dan untuk yang berada pada kerentanan tinggi berjumlah 1 kelurahan yaitu Kelurahan Bojongsuka.



Sumber: KLHS RPJPD Kota Bogor Tahun 2020 - 2045

Gambar 2.17. Peta Kerentanan terhadap Perubahan Iklim di Kota Bogor

2.1.1.8. Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

1. Risiko Timbulan Sampah

Permasalahan sampah merupakan permasalahan yang akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk di masa mendatang. Keterbatasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bisa menyebabkan masalah ketika volume sampah semakin meningkat. Apalagi Kota Bogor sangat bergantung kepada TPA yang berada di wilayah Kabupaten Bogor yaitu TPA Galuga dan nantinya TPA Nambo. Oleh karena itu upaya – upaya proaktif untuk mengurangi sampah dari sumbernya perlu terus dipertahankan. Keberadaan bank sampah, TPS3R dan berbagai program pengurangan sampah merupakan suatu keharusan yang perlu dilakukan di masa mendatang. Pada tahun 2020, timbulan sampah di Kota Bogor mencapai 266.505 ton per tahun. Potensi timbulan sampah terbesar terdapat di Kecamatan Bogor Barat sebesar 59.694 ton/tahun. Sedangkan timbulan sampah terkecil dari seluruh kecamatan yang terdapat di Kota Bogor adalah Kecamatan Bogor Tengah sebesar 24.594 ton/tahun. Berdasarkan hasil analisa pada tahun 2045 prediksi timbulan sampah di Kota Bogor secara total mencapai 746.893 ton/ tahun atau meningkat sebesar 180%. Kondisi ini tentu akan sangat mengkhawatirkan apabila penanganan sampah yang dilakukan masih belum ada inovasi dan masyarakat tidak diajak berperan aktif karena dengan pola pengelolaan TPA Galuga seperti sekarang jumlah sampah tersebut tidak akan tertampung.

Tabel 2.15. Potensi Timbulan Sampah di Kota Bogor

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)
Bogor Barat	233.637	59.694
Bogor Selatan	204.030	52.130
Bogor Tengah	96.258	24.594
Bogor Timur	104.327	26.656
Bogor Utara	186.724	47.708
Tanah Sareal	218.094	55.723

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bogor 2020 – 2045

2. Risiko Timbulan Air Limbah

Salah satu permasalahan lingkungan lainnya yang dihadapi di wilayah perkotaan adalah terkait dengan air limbah. Air limbah bisa berasal dari domestik (rumah tangga) maupun dari sektor lainnya seperti jasa dan industri. Paramater pencemar pada limbah cair yang dianalisis dalam kajian ini adalah Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), total nitrogen (TN) dan total posfor (TP). Dasar analisis perhitungan terhadap parameter pencemar limbah cair berdasarkan jumlah penduduk sehingga diperoleh bahwa Kecamatan Bogor Barat memiliki potensi yang besar dibandingkan kecamatan lain dalam menghasilkan limbah cair. Pada tahun 2020 beban pencemar di Kecamatan Bogor Barat merupakan yang terbesar untuk semua parameter. Sedangkan Kecamatan Bogor Tengah memiliki tingkat potensi beban pencemar lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya. Berdasarkan hasil analisis pada tahun 2045 rata-rata peningkatan beban pencemar untuk masing – masing parameter adalah 2,29%. Peningkatan ini perlu diantisipasi terutama karena kualitas air akan semakin menurun di masa mendatang jika tidak dilakukan upaya pencegahan.

Tabel 2.16. Potensi Beban Pencemar dengan Parameter BOD, COD, TN dan TP

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	BOD (Kg/Tahun)	COD (Kg/Tahun)	Total Nitrogen (Kg/Tahun)	Total Posfor (Kg/Tahun)
Bogor Barat	233.637	4.519.708	8.664.195	1.935.799	324.055
Bogor Selatan	204.030	3.946.960	7.566.249	1.690.491	282.990
Bogor Tengah	96.258	1.862.111	3.569.632	797.546	133.510
Bogor Timur	104.327	2.018.206	3.868.862	864.401	144.702
Bogor Utara	186.724	3.612.176	6.924.473	1.547.102	258.986
Tanah Sareal	218.094	4.219.028	8.087.798	1.807.018	302.496

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bogor 2020 – 2045

3. Emisi Gas Rumah Kaca Kota Bogor

Salah satu penyebab adanya perubahan iklim adalah emisi gas rumah kaca yang semakin meningkat, informasi mengenai Gas Rumah Kaca diperlukan untuk memetakan sektor–sektor mana yang menjadi penyumbang GRK di Kota Bogor. Sehingga nantinya dapat dilakukan upaya mitigasi pengurangan GRK pada sektor – sektor tersebut. Berdasarkan hasil inventarisasi GRK di Kota Bogor, pada tahun 2022 total emisi GRK adalah 2.870.822,84 ton CO₂e . Nilai ini mengalami peningkatan sekitar 6,27% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 2.701.324,46 ton CO₂e . Jumlah emisi CO₂e dan persentase dari masing–masing sektor adalah sebagai berikut:

- a. Sektor energi adalah sekitar 2.634.695,51 ton CO₂e atau sekitar 91,77% dari total emisi

- b. Sektor peternakan dan pertanian adalah sekitar 12.110,93 ton CO₂e atau sekitar 0,42% dari total emisi
- c. Sektor limbah adalah sekitar 224.016,40 ton CO₂e atau sekitar 7,80% dari total emisi.

Hasil perhitungan total emisi dari tahun 2013–2022 menunjukkan rata-rata kenaikan emisi GRK di Kota Bogor adalah 2,50 per tahun. Emisi GRK Kota Bogor dari tahun 2013–2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Adanya tren kenaikan emisi CO₂e khususnya di sektor energi dari tahun ke tahun salah satunya bersumber dari adanya kenaikan jumlah penggunaan listrik dari tahun 2013 hingga tahun 2022 dengan rata-rata kenaikan sekitar 6,1% per tahun. Selain itu, jumlah penggunaan BBM dan penggunaan bahan bakar untuk keperluan rumah tangga juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dari konteks pertumbuhan ekonomi hal ini merupakan sesuatu yang positif karena artinya aktivitas perekonomian terus berjalan dan bisa meningkatkan kesejahteraan penduduk. Namun demikian dalam jangka panjang dampak negatif dari penggunaan energi ini perlu dikurangi baik dari hulu melalui penggunaan sumber listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT) atau di hilir (masyarakat) melalui upaya penghematan penggunaan energi agar efisien.

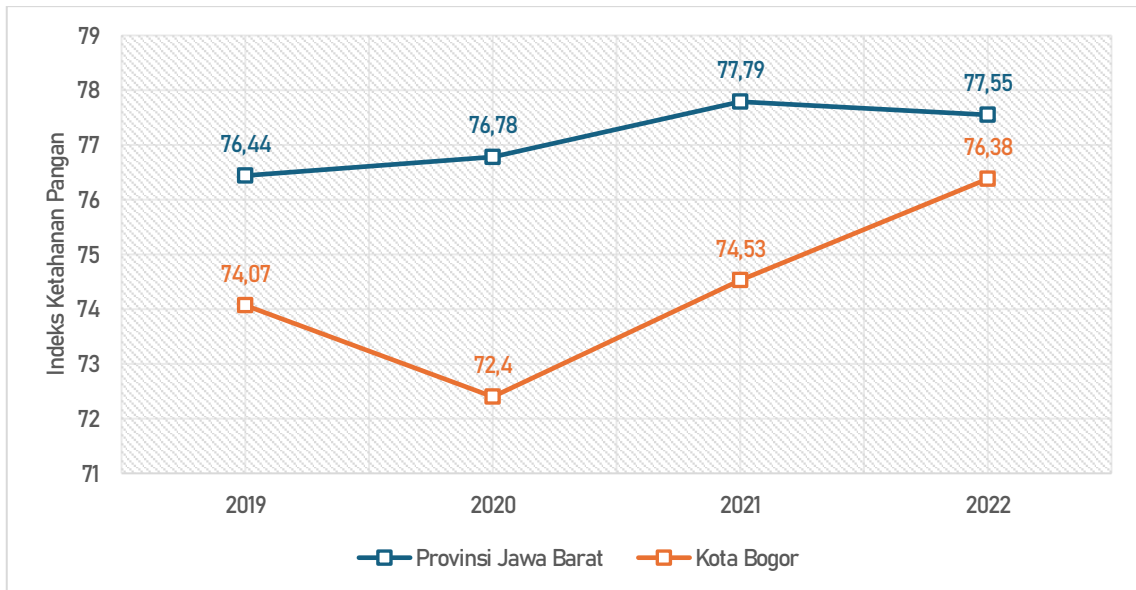
Tabel 2.17. Total Emisi CO₂e di Kota Bogor Tahun 2013 – 2022

Tahun	Sektor Energi (ton)	Sektor Peternakan dan Pertanian (ton)	Sektor Limbah (ton)	Total Emisi CO ₂ e (ton)
2013	2.110.180,92	11.943,32	208.559,75	2.330.683,99
2014	2.149.794,82	13.313,57	209.702,27	2.372.810,66
2015	2.059.429,55	10.792,64	214.674,63	2.284.896,82
2016	2.153.186,65	11.045,60	219.535,83	2.383.768,08
2017	2.193.730,02	11.610,09	228.717,16	2.434.057,27
2018	2.254.624,31	12.560,21	236.818,09	2.504.002,61
2019	2.472.669,78	12.521,92	234.756,93	2.719.948,63
2020	2.224.809,18	12.401,73	231.015,07	2.468.225,97
2021	2.467.400,25	12.320,93	221.603,28	2.701.324,46
2022	2.634.695,51	12.110,93	224.469,40	2.870.822,84

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bogor 2025 – 2045

2.1.1.9. Ketahanan Pangan

Pemerintah Kota Bogor melalui peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor yang berupaya mengkaji isu ketahanan pangan dan pertanian untuk memunculkan isu strategis yang akan dijadikan bahan penentu kebijakan. Beberapa hal tersebut diantaranya melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat, peningkatan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan komitmen produk pertanian dan perikanan dalam menghadapi persaingan global, peningkatan kemampuan SDM pertanian dan perikanan, peningkatan penerapan teknologi yang berwawasan lingkungan, pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan Kota Bogor.



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2023 (diolah)

Gambar 2.18. Indeks Ketahanan Pangan Kota Bogor dan Jawa Barat Tahun 2019 – 2022

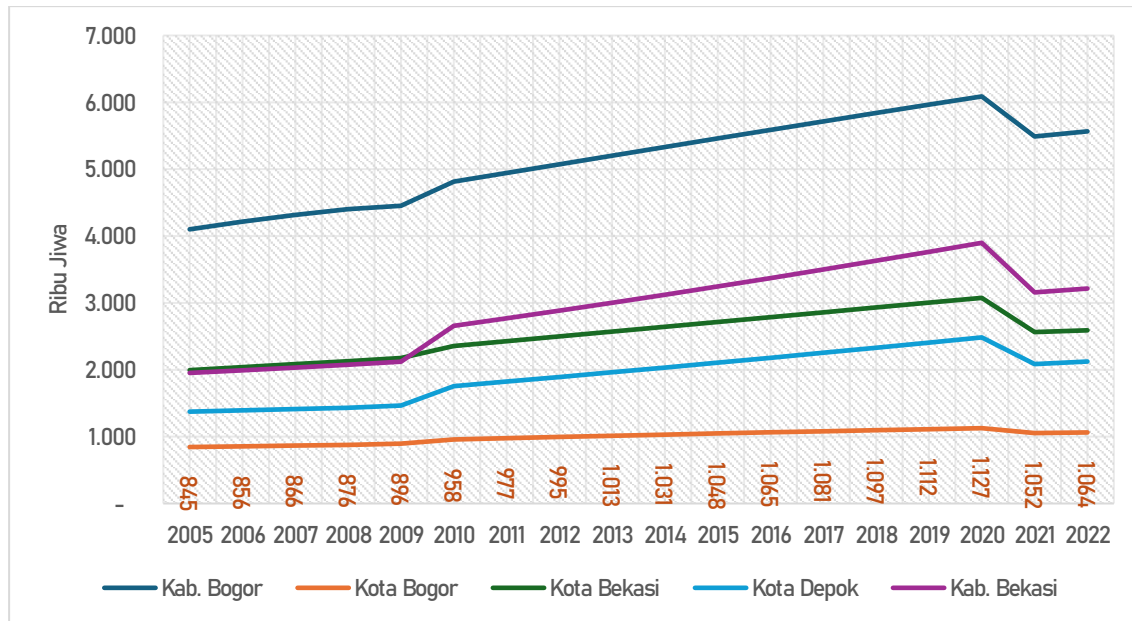
Selain dari konteks daya dukung untuk penyediaan pangan, aspek pangan juga dapat dilihat dari indikator ketahanan pangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Berdasarkan Gambar 2.18 Indeks Ketahanan Pangan Kota Bogor mengalami peningkatan sejak tahun 2020–2022, dengan nilai tertinggi pada tahun 2022 sebesar 76.38 atau meningkat sebesar 1.85 poin. Meskipun demikian, indeks ini masih lebih rendah daripada indeks Provinsi Jawa Barat.

2.1.2. Demografi

Aspek demografi dapat menjadi pertimbangan pemerintah Kota Bogor dalam merancang kebijakan yang lebih responsif, efektif, dan berkelanjutan untuk mempromosikan kesejahteraan dan kemajuan seluruh masyarakat. Beberapa variabel untuk menjelaskan aspek demografi diantaranya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; kepadatan penduduk; penduduk berdasarkan jenis kelamin; serta rasio ketergantungan.

2.1.2.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk

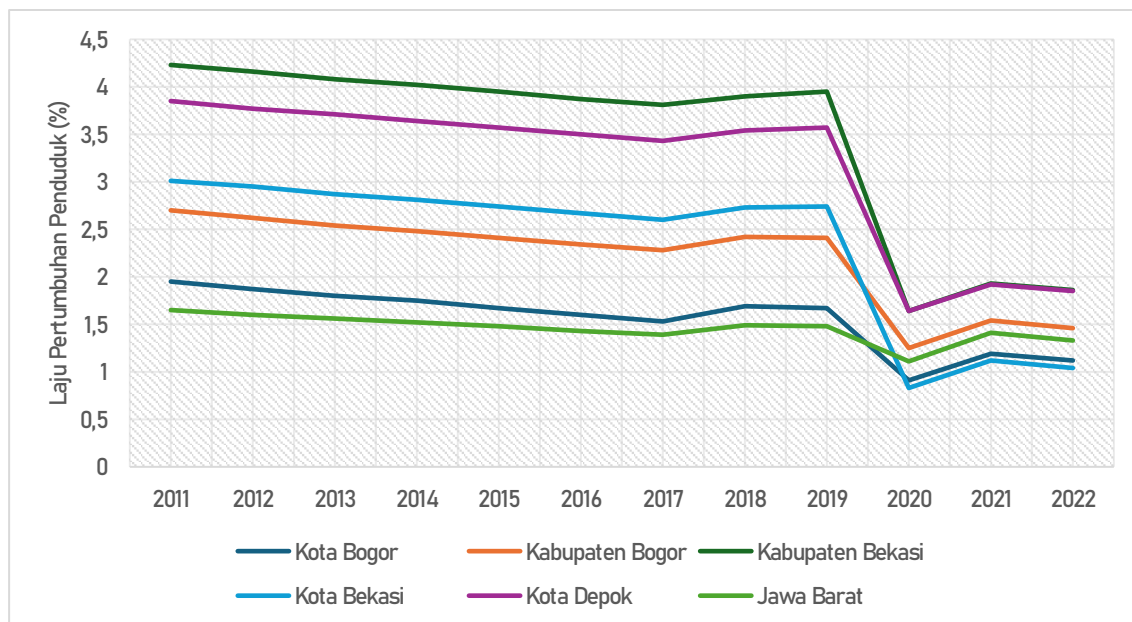
Kependudukan merupakan salah satu bagian penting yang menjadi perhatian dalam proses perencanaan, karena penduduk merupakan subjek utama dalam proses pembangunan. Oleh karena itu proses perencanaan fasilitas penunjang dan pembuatan sistem layanan seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, perumahan, aksesibilitas, lapangan pekerjaan, ruang terbuka, dan berbagai kebutuhan lainnya akan sangat bergantung kepada jumlah penduduk dan proyeksinya di masa mendatang. Dalam dua dekade terakhir (2005–2022) jumlah penduduk Kota Bogor meningkat sekitar 26% dari 845 ribu penduduk pada tahun 2005 menjadi 1.063.513 jiwa penduduk pada tahun 2022, terdiri dari 539.250 jiwa laki-laki dan 524.263 jiwa perempuan. Laju pertumbuhan penduduk selama periode tersebut sekitar 1,4% per tahun merupakan yang terendah dibandingkan wilayah lainnya. Apabila dibandingkan dengan wilayah Jabodetabek, Kota Bogor merupakan wilayah dengan penduduk paling sedikit diantara Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 2.19. Jumlah Penduduk Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2005 – 2022

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) menggambarkan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Tingkat laju pertumbuhan penduduk memiliki dampak terhadap ekonomi, lingkungan, dan sumber daya suatu wilayah. Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor banyaknya imigran yang datang, tingginya tingkat fertilitas, dan rendahnya tingkat mortalitas. Pada tahun 2011, LPP tertinggi berada di Kabupaten Bekasi yaitu sebesar 4,23% hingga tahun 2022 Kabupaten Bekasi masih menjadi wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi. Selain Kabupaten Bekasi, wilayah lainnya di Jabodetabek dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi adalah Kota Depok. Pada tahun 2011 LPP Kota Depok sebesar 3,85%, sedangkan pada tahun 2022 LPP menjadi sebesar 1,85%.

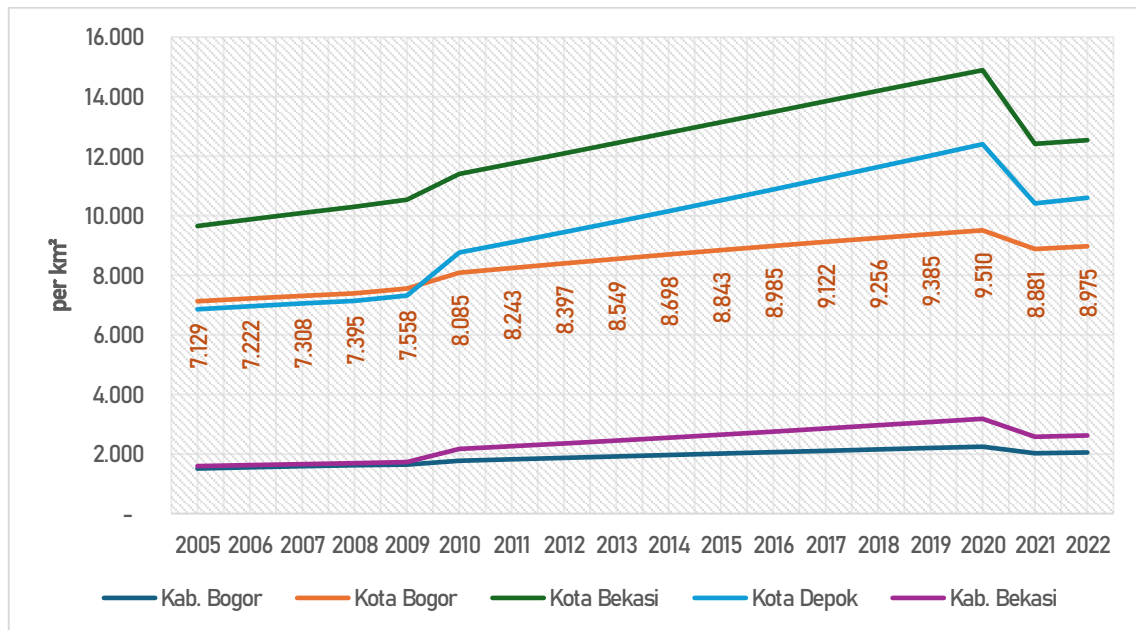


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 2.20. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2011 – 2022

Adapun untuk Kota Bogor laju pertumbuhan penduduknya merupakan yang rendah di wilayah Jabodetabek. Pada tahun 2011 pertumbuhan penduduk Kota Bogor sebesar 1,95% per tahun dan menurun menjadi 1,12% per tahun pada tahun 2022. Pada tahun 2022 laju pertumbuhan penduduk Kota Bogor hanya sedikit lebih tinggi dari Kota Bekasi. Laju pertumbuhan penduduk Kota Bogor walaupun tergolong rendah di Jabodetabek tetapi masih lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat selama periode 2011 – 2019. Setelah tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk Kota Bogor menjadi lebih rendah daripada provinsi.

Penduduk yang semakin bertambah berimplikasi terhadap rasio ketersediaan ruang untuk menopang aktivitas penduduknya. Apabila mengacu kepada perkembangan data kepadatan penduduk. Secara umum kepadatan penduduk di wilayah Jabodetabek semakin meingkat dari tahun ke tahun. Wilayah kabupaten seperti Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor tingkat kepadatan penduduknya secara keseluruhan lebih rendah daripada Kota Bogor karena luas wilayah kedua kabupaten tersebut cukup besar. Kota Bogor berada di tengah – tengah dengan rata-rata tingkat kepadatan penduduk sebesar 8.419 jiwa / km² selama periode tahun 2005 – 2022. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Bekasi.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 2.21. Kepadatan Penduduk Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya, Tahun 2005 – 2022

2.1.2.2. Komposisi Penduduk

1. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Apabila dilihat dari jenis kelamin, rata-rata jumlah penduduk laki-laki di Jabodetabek, Kabupaten Bogor, dan Provinsi Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan perempuan. Rata-rata jumlah populasi laki-laki lebih tinggi sebesar 2,68% dibandingkan perempuan. Hal ini sejalan dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022 bahwa rasio jenis kelamin penduduk Indonesia mencapai 102,2 yang artinya, dalam setiap populasi berisi 100 orang perempuan dan sekitar 102 orang laki-laki. Perubahan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin ini bertujuan untuk memudahkan analisis demografi dan perencanaan pembangunan berdasarkan pemberdayaan gender, analisis ketenagakerjaan, dan dinamika sosial.

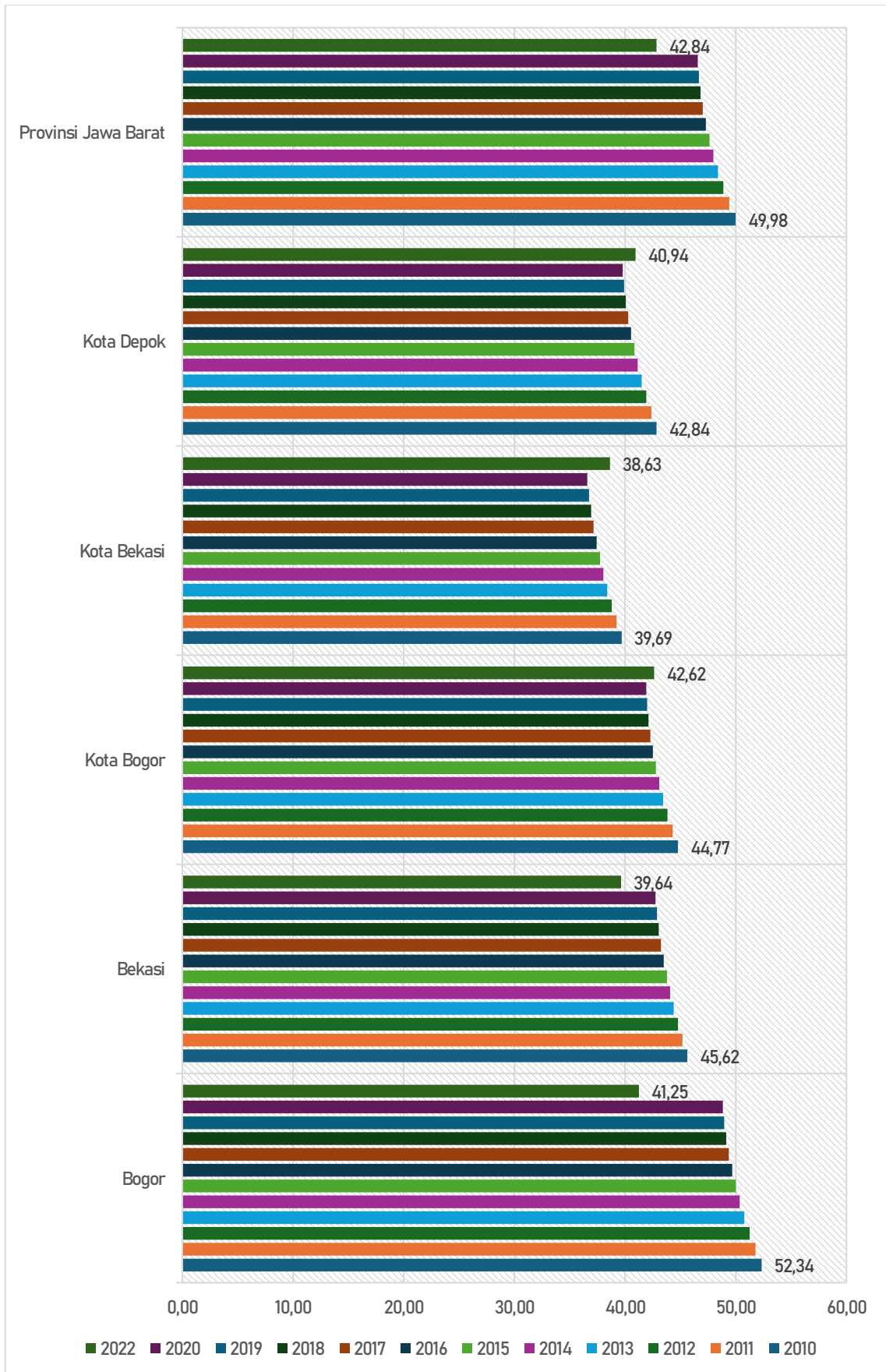
Rasio jenis kelamin di Kota Bogor sebesar 103, artinya dari 103 penduduk laki-laki, terdapat 100 jiwa penduduk perempuan. Pada wilayah Kota Bogor, penduduk berjenis kelamin laki-laki relatif turun sebesar 4,8% dan perempuan sebesar 4,9%. Pada Kota Depok penduduk relatif turun sebesar 14% pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Di Kota Tangerang mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2018 ke tahun 2020 yang mana penduduk laki-laki turun sebesar 13,9% dan perempuan turun sebesar 12,5%. Sedangkan di Bekasi penduduk jenis kelamin laki-laki dan perempuan mengalami penurunan sekitar 12% dari tahun 2018-2021. Penurunan tertinggi dirasakan oleh Kabupaten Bogor yang memiliki penduduk terbesar. Di Kota Jakarta, penurunan hanya dialami oleh jenis kelamin perempuan yaitu sebesar 0,8%. Sedangkan laki-laki justru mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,9%. Kabupaten Bogor mengalami penurunan tertinggi yaitu sebesar 19,2% untuk penduduk jenis kelamin laki-laki dan 19,9% untuk jenis kelamin perempuan. Tingginya angka penurunan ini berkaitan dengan luasnya wilayah Kabupaten Bogor yang mencakup hingga lebih dari 400 desa/kelurahan. Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan tingkat penurunan jumlah penduduk yang cukup rendah yaitu sebesar 1,8% untuk jenis kelamin laki-laki dan 2,4% untuk jenis kelamin Perempuan tersaji dalam Tabel 2.18.

Tabel 2.18. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Jabodetabek, Kabupaten Bogor, dan Jawa Barat Tahun 2012 – 2022.

Kota/ Kabupaten	Jenis Kelamin	Tahun										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bogor	Laki-laki	510.884	514.797	523.479	532.018	540.288	548.196	555.995		529.236	533.774	539.25
	Perempuan	493.947	498.222	507.241	515.904	524.399	532.813	540.833		513.834	518.585	524.263
DKI Jakarta	Laki-laki	5.042.874	5.023.454	5.069.925	5.115.357	5.159.683	5.202.815	5.244.690	5.285.321	5.334.781	5.362.748	5.375.869
	Perempuan	4.948.914	4.946.494	5.005.385	5.062.567	5.117.945	5.171.420	5.222.939	5.272.489	5.227.307	5.282.028	5.304.082
Kota Depok	Laki-laki	930.12	990.281	1.025.784	1.061.889	1.098.473	1.135.539	1.173.102	1.210.887	1.038.056	1.052.652	1.071.173
	Perempuan	905.837	971.901	1.007.724	1.044.211	1.081.340	1.118.974	1.157.231	1.195.929	1.018.279	1.033.283	1.052.176
Tangerang	Laki-laki	980.326	997.398	1.021.298	1.045.113	1.068.606	1.091.787	1.114.613		959.009	966.808	975.709
	Perempuan	938.23	954.998	978.596	1.001.992	1.025.100	1.048.104	1.070.691		936.477	945.106	954.847
Bekasi	Laki-laki	1.240.796	1.297.988	1.333.772	1.369.600	1.405.380	1.441.137	1.476.810			1.291.982	1.304.296
	Perempuan	1.207.495	1.272.409	1.308.736	1.345.200	1.381.830	1.418.493	1.455.090			1.272.959	1.285.961
Kab. Bogor	Laki-laki	2.564.119	2.663.423	2.728.381	2.792.900	2.856.530	2.920.288	2.983.278	2.410.405	2.789.738	2.820.924	2.859.683
	Perempuan	2.425.820	2.538.674	2.602.768	2.666.800	2.730.860	2.794.721	2.857.629	2.288.877	2.637.330	2.668.612	2.707.155
Jawa Barat	Laki-laki	22.666.168	23.004.158	23.345.033	23.680.927	24.011.261	24.335.331	24.652.609	24.962.701	24.508.885	24.758.980	25.067.226
	Perempuan	21.882.263	22.336.641	22.684.635	23.028.642	23.368.128	23.702.496	24.031.252	24.354.011	23.765.277	24.023.422	24.338.582

2. *Dependency Ratio* (Rasio Ketergantungan)

Aspek demografi lainnya yang dapat dianalisis adalah Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*) yaitu angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Selama 10 tahun terakhir 2010 – 2022 angka *dependency ratio* di Kota Bogor rata – rata sebesar 42,97. Secara *trend* untuk nilainya cenderung menurun karena meningkatnya usia penduduk pada usia produktif. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, nilai rasio ketergantungan Kota Bogor lebih kecil. Adapun jika dibandingkan dengan daerah sekitar, Kota Bogor berada di bawah Kota Bekasi dan Kota Depok tetapi berada di atas Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 2.22. Dependency Ratio Kota Bogor dan wilayah sekitarnya, Tahun 2010 – 2022

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2025-2045 juga memberikan perhatian mendalam terhadap aspek kesejahteraan masyarakat, mengintegrasikan dimensi ekonomi dan sosial budaya. Dalam perspektif ekonomi, RPJPD Kota Bogor bertujuan untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memastikan distribusi manfaatnya merata di seluruh lapisan masyarakat. Pemikiran ini diperkuat dengan pendekatan sosial budaya, di mana rencana pembangunan menciptakan fondasi kuat untuk penguatan identitas lokal, pelestarian warisan budaya, dan pengembangan keterlibatan sosial. Dengan menggagas kesejahteraan melalui keseluruhan spektrum ekonomi dan nilai-nilai budaya, RPJPD Kota Bogor bertujuan untuk membentuk sebuah kota yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga kaya akan keberagaman sosial budaya, menciptakan lingkungan yang inklusif dan berdaya saing untuk seluruharganya.

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

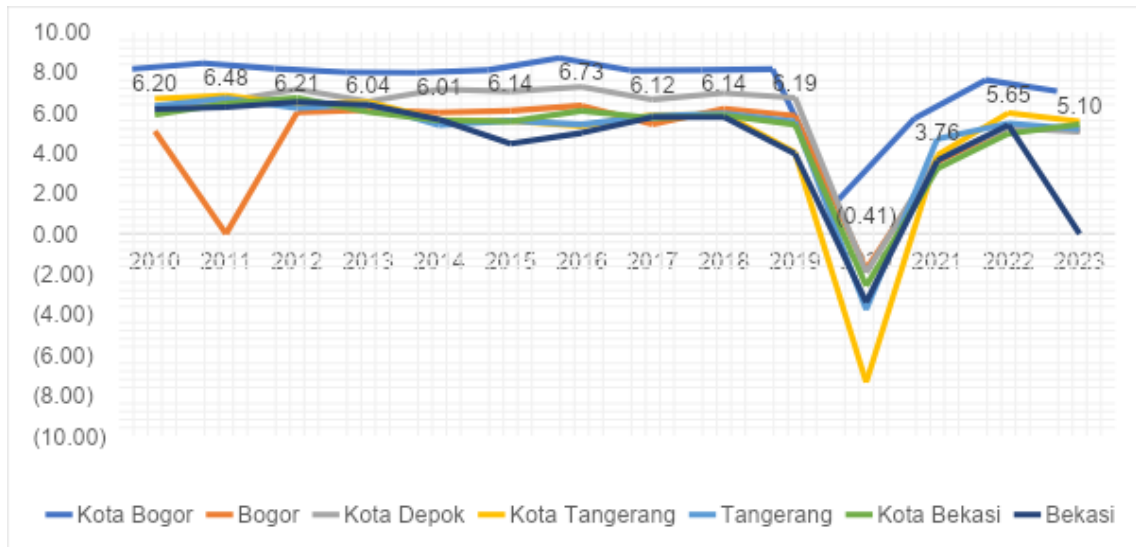
Kesejahteraan ekonomi menunjukkan kondisi Masyarakat Kota Bogor melalui perspektif ekonomi. Indikator-indikator yang akan disajikan dalam sub bab kesejahteraan masyarakat diantaranya: Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Indeks Gini, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi sebagai indikator pembangunan ekonomi di suatu wilayah dalam hal ini dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2010. Berdasarkan PDRB atas harga konstan Kota Bogor didapatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2010 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Tahun 2010 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,20 persen, sedangkan tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor hanya 5,10 persen. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan dalam 13 tahun terakhir.

Laju pertumbuhan Kota Bogor sempat mengalami nilai negatif di tahun 2020, yaitu pertumbuhan ekonomi turun sebesar 0,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Bogor pada saat itu mengalami penurunan, salah satu penyebabnya diduga adalah kondisi Covid-19 yang menyebabkan semua sektor perekonomian mengalami hambatan.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi wilayah pembandingnya memang tidak jauh berbeda. Setiap wilayah mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020, bahkan mencapai angka negatif. Hal ini diakibatkan adanya krisis ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19 dimana arus perekonomian mengalami hambatan dalam beberapa hal. Namun pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor berada pada posisi ke-2 yaitu sebesar 5,65 persen setelah Kota Tangerang yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,98 persen. Apabila dibandingkan dengan capaian Kota Bogor tahun 2022, maka telah terjadi penurunan sebesar 0,55 persen. Hal ini menjadikan Kota Bogor (5,10) menjadi urutan kelima setelah Kota Tangerang (5,57); Kota Bekasi (5,43); Tangerang (5,18); dan Bogor (5,11). Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor beserta wilayah pembandingnya dapat dilihat pada Gambar 2.23.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Gambar 2.23. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Wilayah Pemandang Tahun 2010-2023

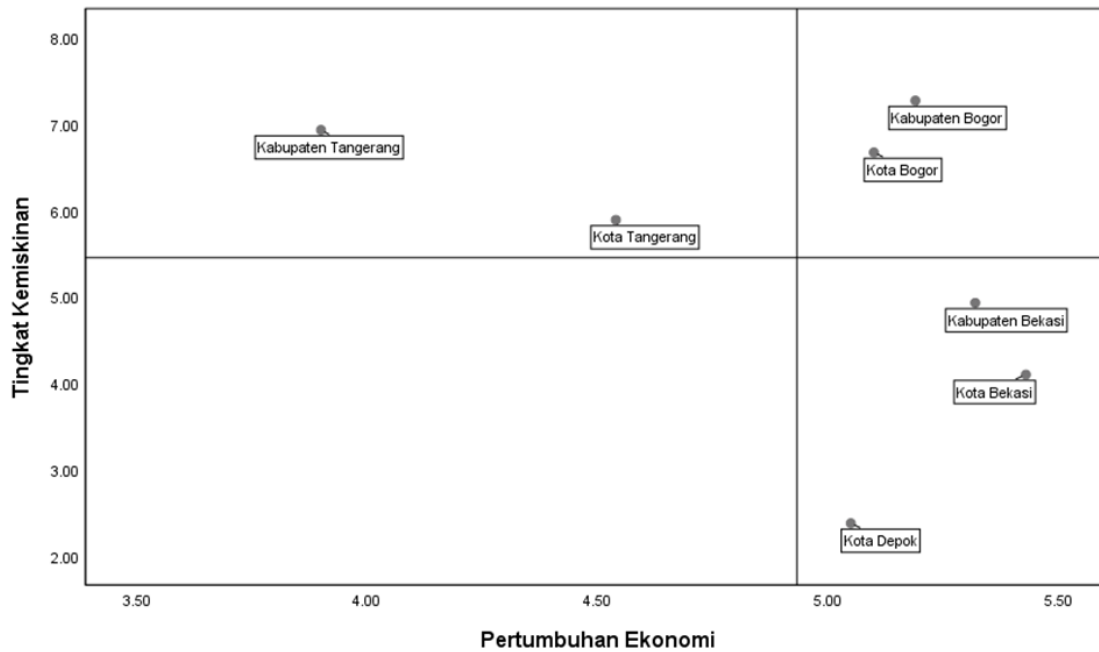
2.2.1.2. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah pusat maupun daerah. Kemiskinan itu sendiri mengukur standar hidup masyarakat yang rendah yang tercermin dari tingkat pendapatan yang rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dan peningkatan kesejahteraan. Berbagai faktor melatarbelakangi terjadinya kemiskinan, diantaranya akibat dorongan faktor internal maupun eksternal. Minimnya tingkat pendidikan, keterampilan, dan relasi, serta minimnya akses pada sumber daya yang tidak berimbang semakin memperparah ketidakmerataan distribusi pendapatan. Namun hal yang paling menakutkan tetapi nyata terjadi yaitu adanya lingkaran setan kemiskinan. Vicious Circle of Poverty atau lingkaran setan kemiskinan menunjukkan serangkaian kekuatan yang saling memengaruhi sehingga menimbulkan banyak permasalahan untuk mencapai pembangunan yang lebih tinggi. Dengan minimnya pendapatan, tabungan menjadi rendah dan kekurangan modal, serta ketertinggalan dalam persaingan pasar. Pada akhirnya, produktivitas rendah serta berlanjut pada pendapatan yang rendah dan seterusnya berulang secara melingkar. Oleh karena itu, penurunan tingkat kemiskinan secara terus menerus masih menjadi prioritas bagi pemerintah pusat maupun daerah, tidak terkecuali bagi Kota Bogor.

Pertumbuhan ekonomi diyakini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Namun demikian, pengaruh tersebut dapat saja berbeda antara wilayah, dimana keadaan distribusi pendapatan, jumlah penduduk, dan urbanisasi memiliki kaitan penting dalam menentukan hubungan pertumbuhan ekonomi dengan penurunan tingkat kemiskinan (Hasan dan Quibria, 2002). Terdapat 2 (dua) kemungkinan hubungan dimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan, terutama di daerah perdesaan yang banyak terdapat kantong-kantong kemiskinan. Sebaliknya, kemiskinan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Jonaidi, 2012).

Gambar 2.24 menunjukkan hubungan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi Kota Bogor serta kabupaten/kota sekitarnya di tahun 2023. Kota Bogor jika dibandingkan kabupaten/ kota lainnya memiliki laju pertumbuhan ekonomu yang cukup tinggi. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor berada di bawah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor. Namun demikian, jika disandingkan dengan tingkat kemiskinannya, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor

merupakan 2 (dua) kabupaten/kota yang juga memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bogor belum dapat mendorong penurunan tingkat kemiskinannya. Hal ini juga dapat terjadi akibat masih belum meratanya tingkat pendapatan antar kalangan masyarakat Kota Bogor.

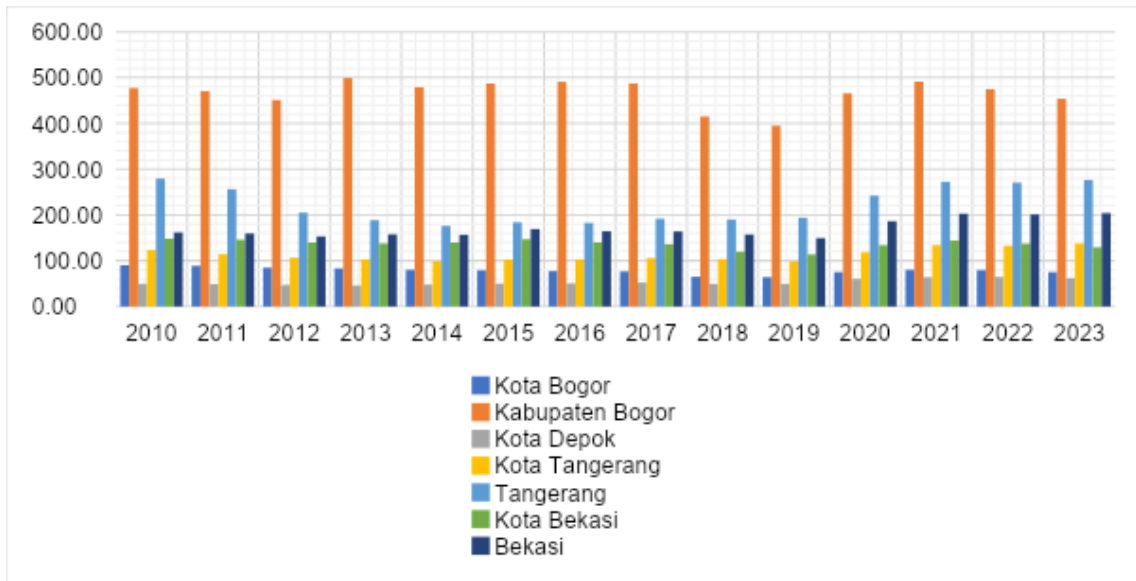


Sumber : BPS Jawa Barat dan BPS Banten, 2024

Gambar 2.24. Klasen Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Kabupaten/Kota sekitarnya, tahun 2023

Berdasarkan Gambar 2.23 terlihat bahwa perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Bogor selama tahun 2010 hingga 2023 berfluktuasi. Demikian halnya dengan perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Bogor juga cukup fluktuatif, dimana tahun 2023 mencapai angka 75 ribu jiwa. Dalam kurun waktu 128 tahun ini, jumlah penduduk miskin paling rendah berada di tahun 2019 yaitu sebanyak 63,97 ribu jiwa, namun penurunan ini tidak berlanjut melainkan meningkat kembali di tahun 2020 hingga 2022 yang salah satu faktornya karena pandemi Covid-19 dan masa pemulihan yang belum optimal.

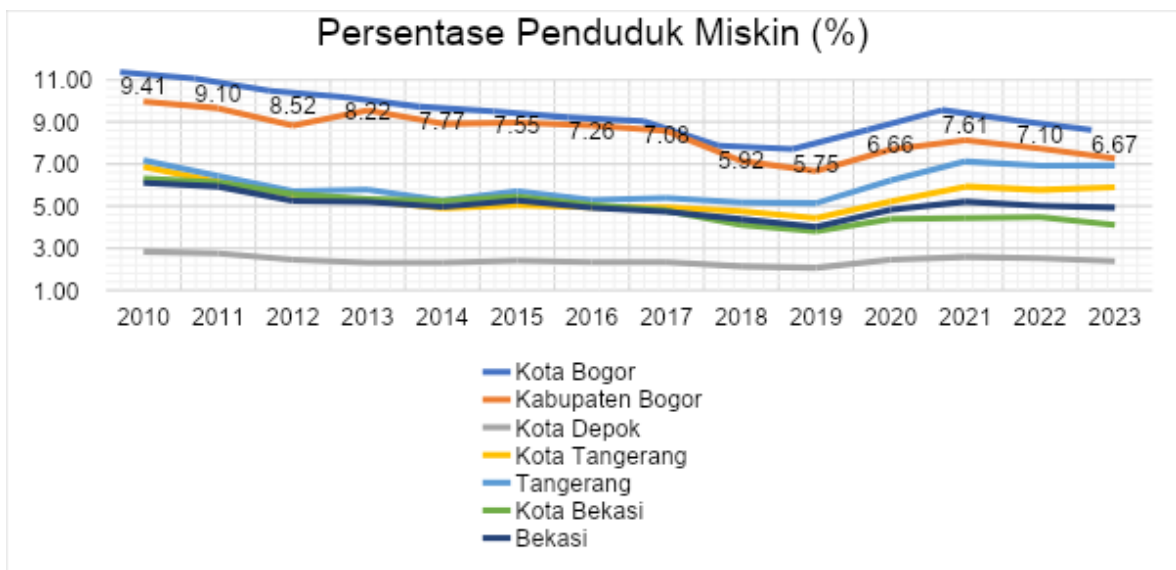
Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kota Bogor menempati posisi ke-2 dengan jumlah penduduk miskin terendah. Jumlah penduduk miskin yang paling sedikit diantara 7 wilayah kota/kabupaten tersebut dimiliki oleh Kota Depok, yaitu sebanyak 61,95 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin terbanyak pada tahun 2022 dimiliki oleh Kabupaten Bogor yaitu sebanyak 453,76 ribu jiwa.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Gambar 2.25. Jumlah Penduduk Miskin Kota Bogor dan Wilayah Pemandang Tahun 2010-2023

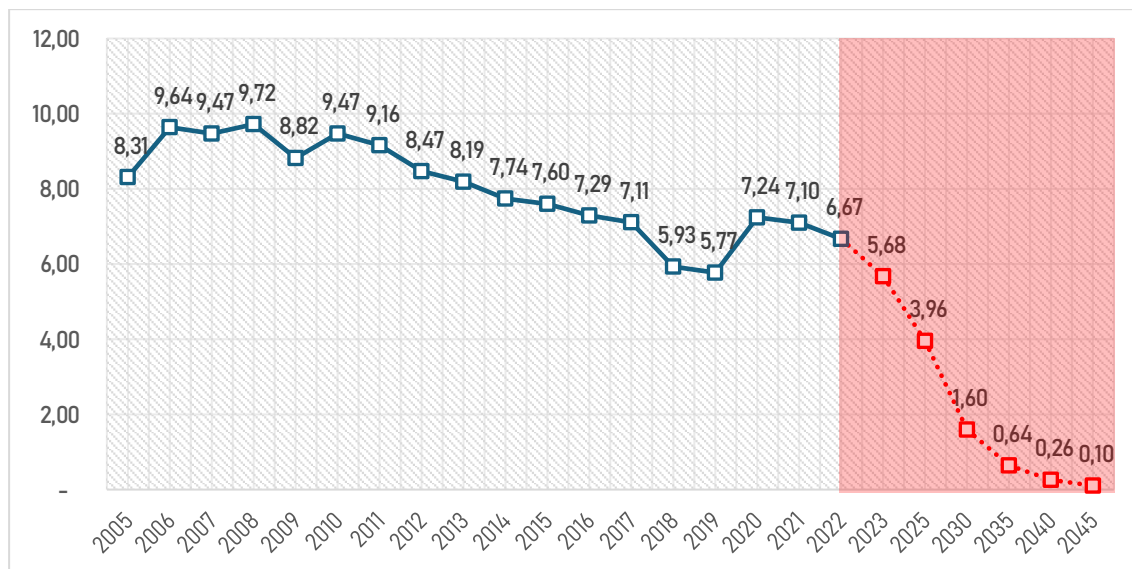
Meskipun demikian, selain melihat jumlah penduduk miskin harus diperhatikan juga melalui indikator persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin Kota Bogor di tahun 2023 sebanyak 6,67 persen. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2010 sebesar 9,41 persen. Apabila dibandingkan *year-on-year* (y-o-y) maka persentase penduduk miskin tahun 2023 menurun sebesar 0,43 persen dari tahun 2022. Penurunan persentase penduduk miskin ini mengindikasikan bahwa Kota Bogor telah berhasil dan berkomitmen mengurangi jumlah penduduk miskin, diantara pertumbuhan penduduk yang ada. Posisi persentase jumlah penduduk miskin tahun 2023 terendah dimiliki oleh Kota Depok yaitu sebesar 2,38 persen. Selanjutnya disusul oleh Kota Bekasi (4,10); Kabupaten Bekasi (4,93); Kota Tangerang (5,89); Kota Bogor (6,67); Kabupaten Tangerang (6,93); dan Kabupaten Bogor (7,27).



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Gambar 2.26. Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kota Bogor dan Wilayah Pemandang Tahun 2010-2023

Tingkat kemiskinan sebagai salah satu indikator makroekonomi diharapkan terus mengalami penurunan kedepannya. Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan Kota Bogor selama tahun 2005–2022 memiliki tren yang menurun. Namun pada saat pandemi Covid-19 terjadi, Tingkat kemiskinan meningkat hingga 7,24 persen dan kembali menurun hingga tahun 2022 sebesar 6,67 persen. Di tahun 2023, Tingkat kemiskinan diproyeksikan menurun kembali menjadi 5,56 dan terus menurun hingga di tahun 2025 menjadi sebesar 3,87 persen. Jangka panjang di tahun 2045, Tingkat kemiskinan Kota Bogor diproyeksikan akan semakin rendah hingga mendekati angka nol persen, yaitu sebesar 0,1 persen.



Sumber: BPS Kota Bogor, 2023 (diolah)

Gambar 2.27. Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kota Bogor Tahun 2025–2045 (Persen)

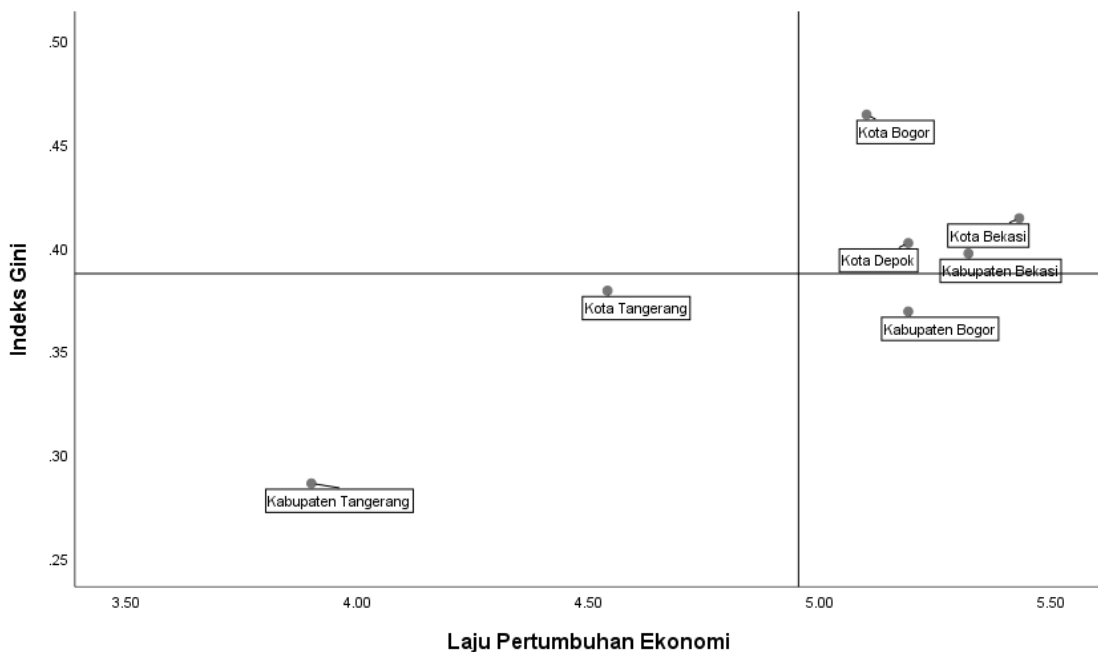
2.2.1.3. Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila Indeks Gini bernilai 0 berarti pemerataan pendapatan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan pendapatan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Selama beberapa decade terakhir, pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah menjadi fokus pemerintah Indonesia sebagai indikator kemajuan ekonomi. Hal ini juga tidak terkecuali bagi kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, termasuk Kota Bogor dan beberapa kabupaten/ kota lainnya yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, perkembangan perekonomian daerah yang mengesankan tersebut tidak disertai dengan pemerataan distribusi pendapatan. Kemajuan ekonomi tersebut lebih banyak dinikmati masyarakat berpendapatan tinggi dibandingkan masyarakat berpendapatan rendah, sehingga ketimpangan pendapatan masih tinggi dan cenderung meningkat.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan terdapat keterkaitan antara pemerataan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi. Kumara (2015) menunjukkan bahwa kualitas dari pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari kemampuannya untuk memperbaiki indikator kesejahteraan masyarakat, seperti ketimpangan pendapatan. Namun demikian, seringkali terdapat *trade off* antara pemerataan

pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum optimal. Gambar 2.28 menunjukkan perbandingan hubungan antara ketimpangan pendapatan (indeks gini) dan pertumbuhan ekonomi Kota Bogor dan kabupaten/ kota sekitarnya tahun 2022. Kota Bogor, merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi bersama dengan Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor. Akan tetapi, Kota Bogor jika dibandingkan 4 kabupaten/ kota tersebut menjadi kota yang memiliki indeks gini paling tinggi dan berada pada kuadran kanan atas. Pada kuadran kanan atas tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kota Bogor masih belum dapat pemeratakan ketimpangan pendapatan yang ada. Sehingga gap pendapatan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah masih cukup tinggi. Harapan kedepannya, dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Bogor, ketimpangan pendapatan juga akan semakin kecil.



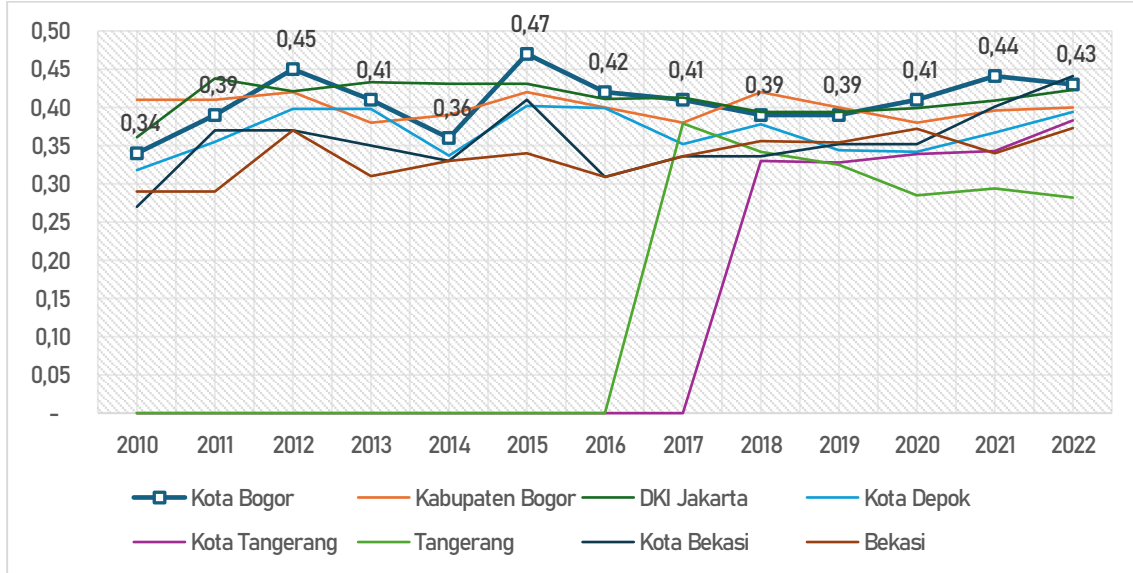
Sumber : BPS Jawa Barat dan BPS Banten, 2024

Gambar 2.28. Klasen Indeks Gini dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Kabupaten/ Kota sekitarnya, tahun 2023

Berdasarkan Gambar 2.28 dapat dilihat bahwa kondisi ketimpangan pendapatan di Kota Bogor tahun 2022 sebesar 0,43 (ketimpangan moderat), dimana angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu sebesar 0,34, meskipun berada dalam kategori ketimpangan yang sama yaitu ketimpangan moderat. Indeks Gini Kota Bogor dari tahun 2010-2022 mengalami fluktuasi, dimana ketimpangan pendapatan terbesar terjadi di tahun 2015 yaitu sebesar 0,47 sedangkan ketimpangan paling rendah terjadi di tahun 2010 yaitu sebesar 0,34. Namun melihat perkembangan Indeks Gini yang berada pada kategori ketimpangan moderat, pemerintah Kota Bogor harus dapat memperhatikan distribusi pendapatan Masyarakat Kota Bogor agar dapat menurunkan Indeks Gini menjadi berada dalam ketimpangan yang rendah, bahkan hingga tidak terdapat lagi ketimpangan pendapatan diantara penduduknya.

Jika dibandingkan dengan indeks gini wilayah kota/kabupaten sekitarnya, Kota Bogor memiliki indeks gini dengan posisi terendah ke-7 pada tahun 2022. Indeks Gini tahun 2022 yang paling rendah dimiliki oleh Kabupaten Tangerang yaitu sebesar 0,28 disusul dengan Kabupaten Bekasi, Kota

Tangerang, Kota Depok, Kabupaten Bogor dan DKI Jakarta. Diantara wilayah-wilayah ini hanya Kabupaten Tangerang yang memiliki indeks gini lebih rendah dari 0,3 dimana hal ini menunjukkan bahwa hannya Kabupaten Tangerang yang memiliki tingkat ketimpangan pendapatan masyarakatnya rendah. Selain Kabupaten Tangerang, wilayah lain memiliki tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat pada tahun 2022 yang bersifat moderat, termasuk Kota Bogor.

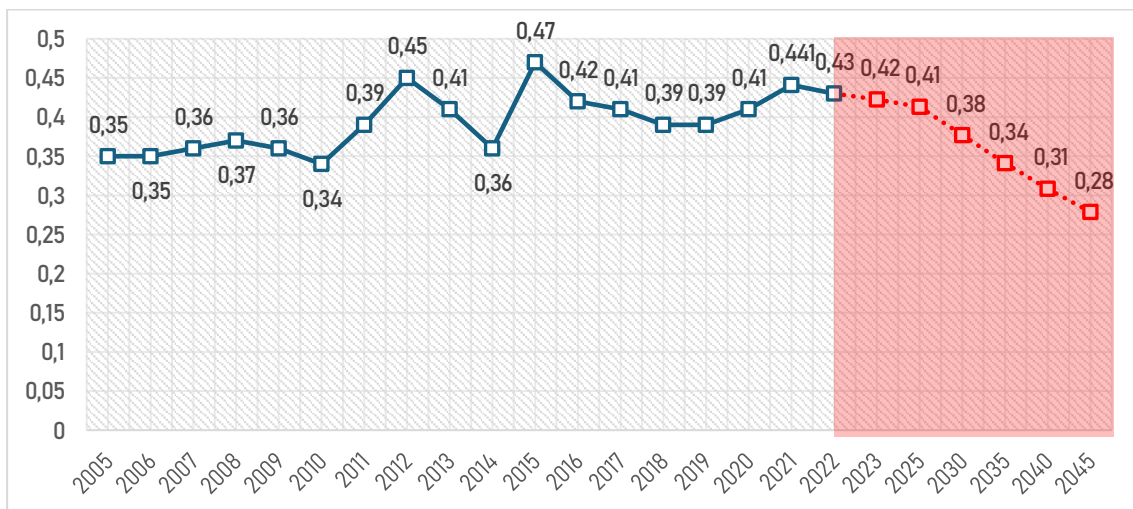


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Keterangan: *Indeks Gini Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang tahun 2010-2017 Not Available (NA)

Gambar 2.29. Indeks Gini Kota Bogor dan Wilayah Pemanding tahun 2010-2022

Selanjutnya sebagaimana disajikan pada Gambar 2.30, terlihat bahwa Indeks Gini Kota Bogor selama tahun 2005-2022 cenderung berfluktuasi dan semakin timpang. Pada tahun 2005 capaian indeks gini sebesar 0,35 dan di tahun 2022 mencapai 0,43. Meskipun demikian, jika melihat tren tahun 2015-2022 bahwa Pemerintah Kota Bogor berhasil menurunkan ketimpangan dari 0,47 menjadi 0,43 bahkan dengan terendah di periode tersebut sebesar 0,39 pada tahun 2018 dan 2019. Maka bukan tidak mungkin, indeks gini diproyeksikan akan terus mengalami penurunan hingga akhir tahun 2045 menjadi hanya sebesar 0,28.

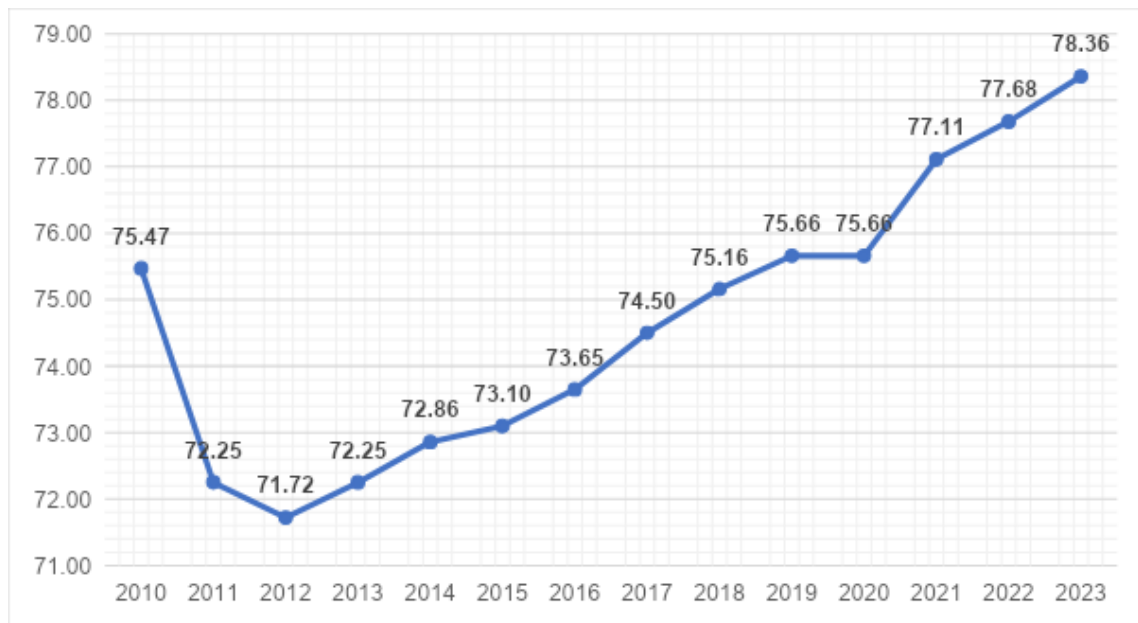


Sumber: BPS Kota Bogor, 2023 (diolah)

Gambar 2.30. Proyeksi Indeks Gini Kota Bogor Tahun 2025-2045

2.2.1.4. Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah yang direpresentasikan oleh 3 (tiga) dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana masyarakat/penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Dengan pengukuran IPM terdapat 2 (dua) manfaat yang diperoleh, diantaranya adalah: 1) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); dan 2) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/Negara. Berdasarkan Gambar 2.31, IPM Kota Bogor memiliki tren yang terus meningkat sejak tahun 2005-2022. Penurunan IPM hanya terjadi di tahun 2010-2012 saja. Pada tahun 2013-2022 mengalami peningkatan pesat hingga capaian di tahun 2022 sebesar 77,17 menjadi skor IPM yang pernah di capai Kota Bogor. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, maka IPM tahun 2022 mengalami kenaikan 1.06 poin indeks. Kota Bogor terus berupaya untuk meningkatkan skor IPM demi mewujudkan peradaban manusia yang semakin maju dan memiliki penghidupan layak.

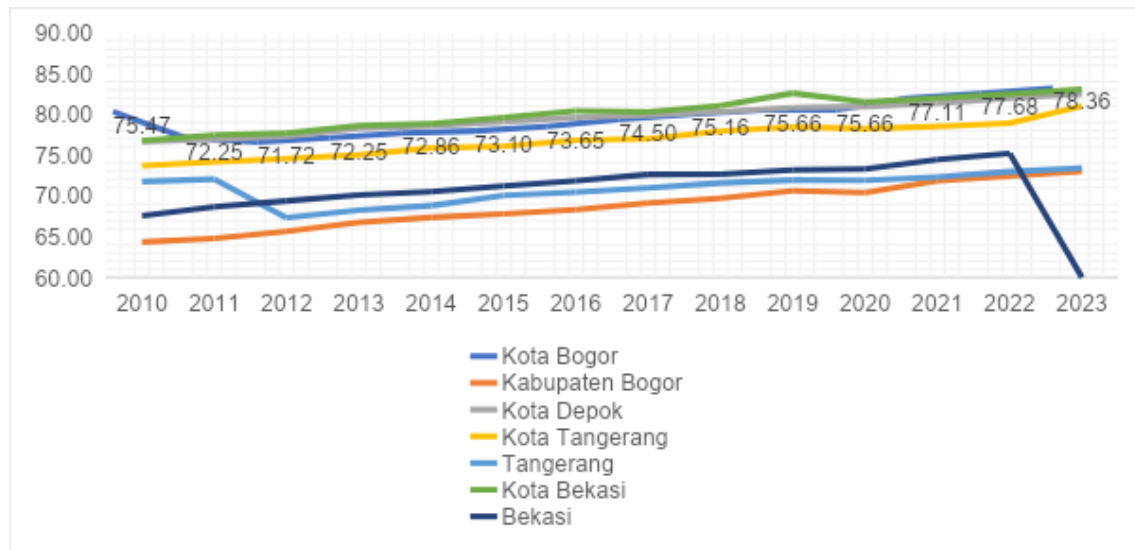


Sumber: BPS Kota Bogor Tahun 2023

Gambar 2.31. Indeks Pembangunan Manusia (Secara Komposit) Kota Bogor Tahun 2005-2023

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran atas ketercapaian Pembangunan manusia berdasarkan komponen dasar kualitas hidup dimana pengkategorian status IPM yaitu bernilai 35 – 54,9 masuk dalam kategori “rendah”, nilai 55 – 69,9 masuk dalam kategori “sedang”, nilai 70 – 79,9 masuk dalam kategori “tinggi”, dan nilai 80 – 100 masuk dalam kategori “sangat tinggi”. IPM Kota Bogor tahun 2023 sebesar 78,36 dimana angka ini lebih besar jika dibandingkan tahun 2010 yaitu sebesar 75,47. Meskipun demikian, IPM Kota Bogor ini masih berada dalam status IPM yang tinggi (70 – 79,9). IPM Kota Bogor selama 12 tahun terakhir paling rendah berada di tahun 2012 sebesar 71,72. Nilai IPM Kota Bogor yang berada di rentang status IPM tinggi menunjukkan bahwa penduduk Kota Bogor dapat mengakses dengan baik hasil pembangunan Kota Bogor dalam memperoleh kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Dengan kata lain, Kota Bogor telah berhasil dalam upaya membangun kualitas hidup penduduknya. Pada tahun 2023, nilai IPM Kota Bogor berada di posisi ke-

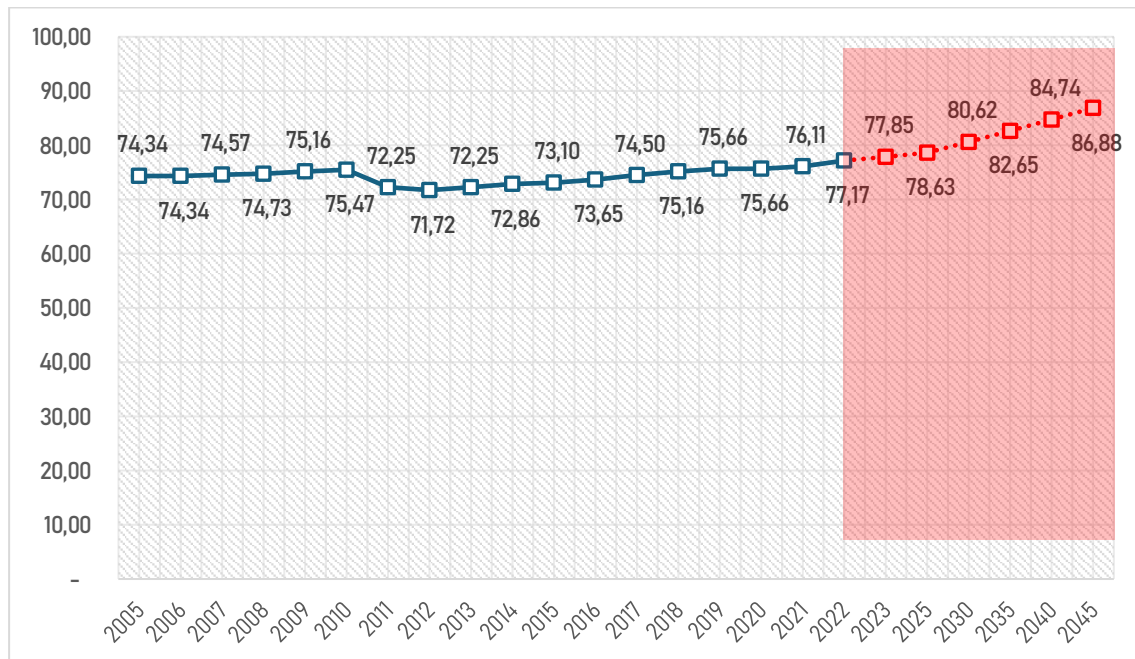
4 jika dibandingkan dengan wilayah kota/kabupaten sekitarnya. Nilai IPM yang lebih besar dibandingkan Kota Bogor secara beurutur dari yang paling tinggi dimiliki oleh Kota Bekasi (83,06); Kota Depok (82,53); dan Kota Tangerang (80,98). Lain halnya dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang, nilai IPM yang dimiliki pada tahun 2022 masih lebih rendah dibandingkan IPM Kota Bogor.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Gambar 2.32. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2010-2023

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan memiliki nilai yang terus meningkat yang menunjukkan semakin baiknya indikator ini. Pada tahun 2005, IPM Kota Bogor sebesar 74,34 dan terus meningkat hingga tahun 2023 sebesar 78,36. Pada tahun 2045 IPM Kota Bogor diproyeksikan sebesar 86,88 dan hingga akhir 2045 mencapai 86,88.



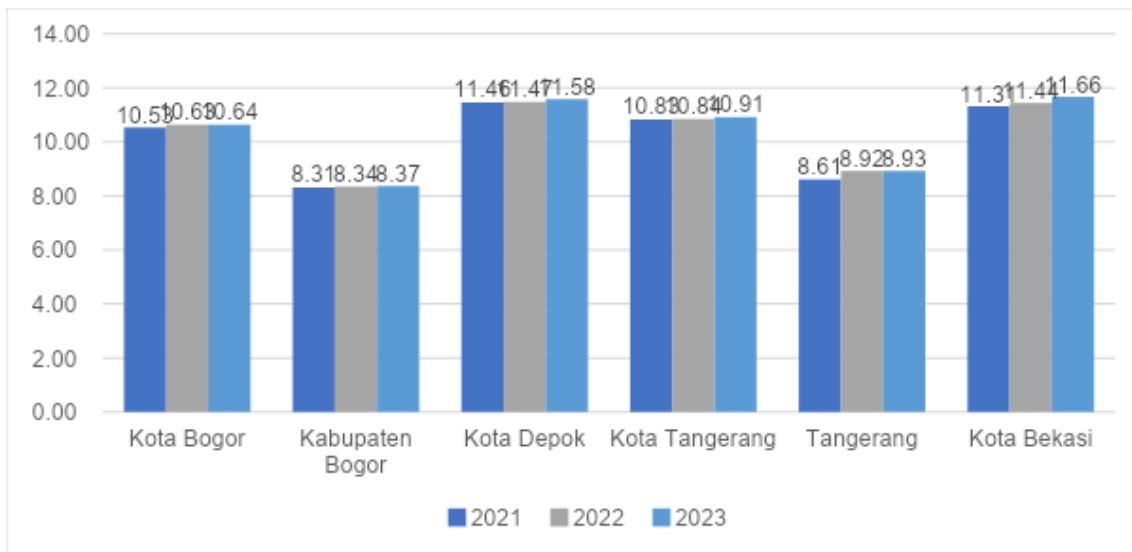
Sumber: BPS Kota Bogor, 2023 (dialah)

Gambar 2.33. Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor Tahun 2025-2045

Menurut BPS (2023), sejak tahun 2010, IPM dihitung menggunakan metode baru. Komponen IPM metode baru mempertimbangkan Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Per Kapita. Beberapa komponen penyusun akan diuraikan di bawah ini.

1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

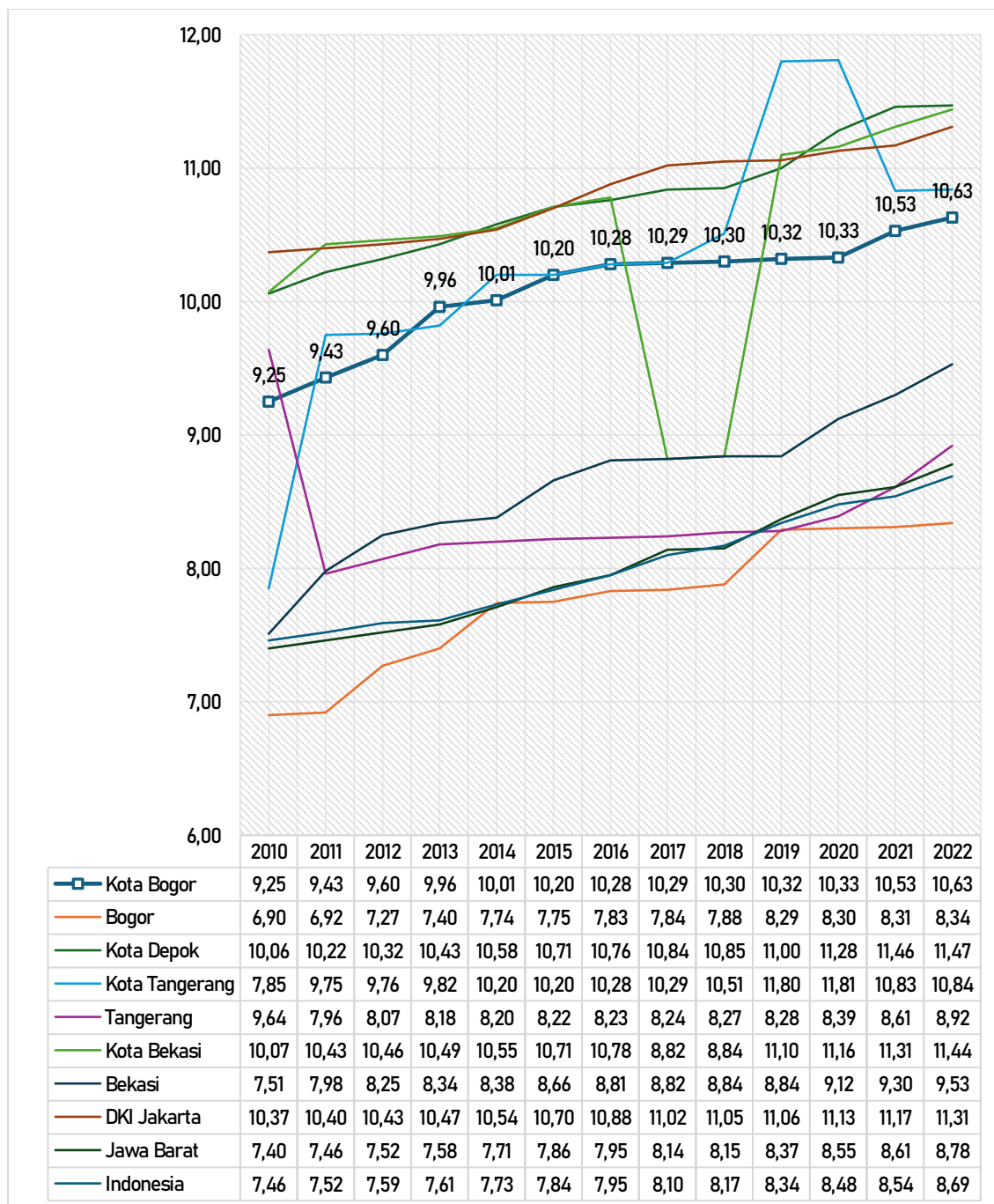
Rata-rata Lama Sekolah merupakan indikator yang menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani suatu pendidikan formal. Capaian RLS Kota Bogor tahun 2023 sebesar 10,64 tahun dengan peningkatan hanya sebesar 0,01 tahun dibandingkan capaian tahun 2022. RLS Kota Bogor tahun 2023 menempati posisi ke-empat jika dibandingkan dengan wilayah pembanding seperti Kota Bekasi (11,66); Kota Depok (11,58); dan Kota Tangerang (10,91).



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah)

Gambar 2.34. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2021-2023

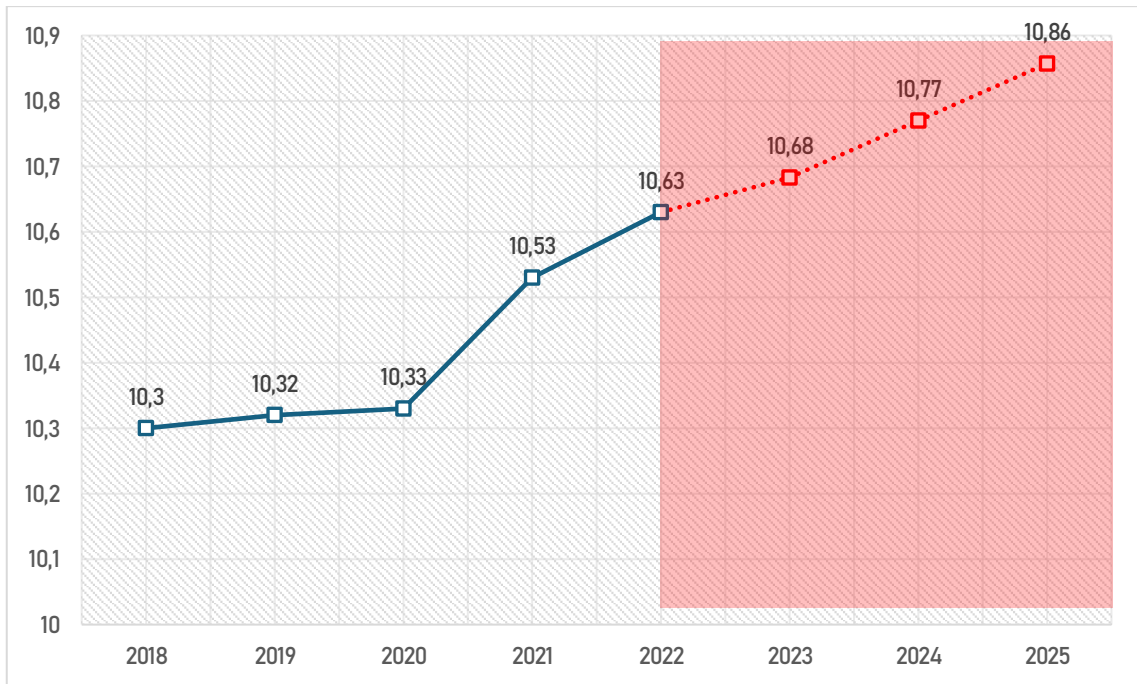
Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai RLS dihitung mulai dari usia 25 tahun dikarenakan pada umumnya penduduk usia 25 tahun ke atas tidak bersekolah kembali. Angka RLS Kota Bogor adalah yang tertinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Indonesia seperti yang terlihat pada gambar dibawah, akan tetapi jika dibandingkan dengan wilayah di Jabodetabek maka nilai RLS Kota Bogor tahun 2022 berada dibawah Kota Depok, Kota Bekasi, DKI Jakarta serta Kota Tangerang. Rata-rata RLS di Kota. Bogor pada periode 2010-2022 sebesar 10,09 tahun yang artinya penduduk di Kota Bogor yang berusia 25 tahun secara rata-rata telah mengenyam pendidikan hingga kelas 10 SMA.



Sumber: BPS, 2023

Gambar 2.35. Rata-rata Lama Sekolah di Jabodetabek, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2010-2022

Data RLS Kota Bogor selama tiga belas tahun memperlihatkan tren yang meningkat, hal ini didukung dari data pada Gambar 2.35 yang memperlihatkan nilai RLS Kota Bogor selalu meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan selama periode waktu 2010–2022 sebesar 1,17 persen. Berdasarkan proyeksi yang dilakukan hingga tahun 2025 menunjukkan bahwa RLS Kota Bogor terus meningkat hingga 10,86 tahun. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, maka proyeksi RLS tahun 2025 mendekati kelas 11 pada tingkat sekolah menengah atas. Hal ini merupakan nilai yang cukup baik bila dibandingkan dengan nilai RLS Jawa Barat yang hanya mencapai 8,78 tahun dan nilai RLS secara nasional sebesar 8,69 tahun pada tahun 2022 (Gambar 2.29).

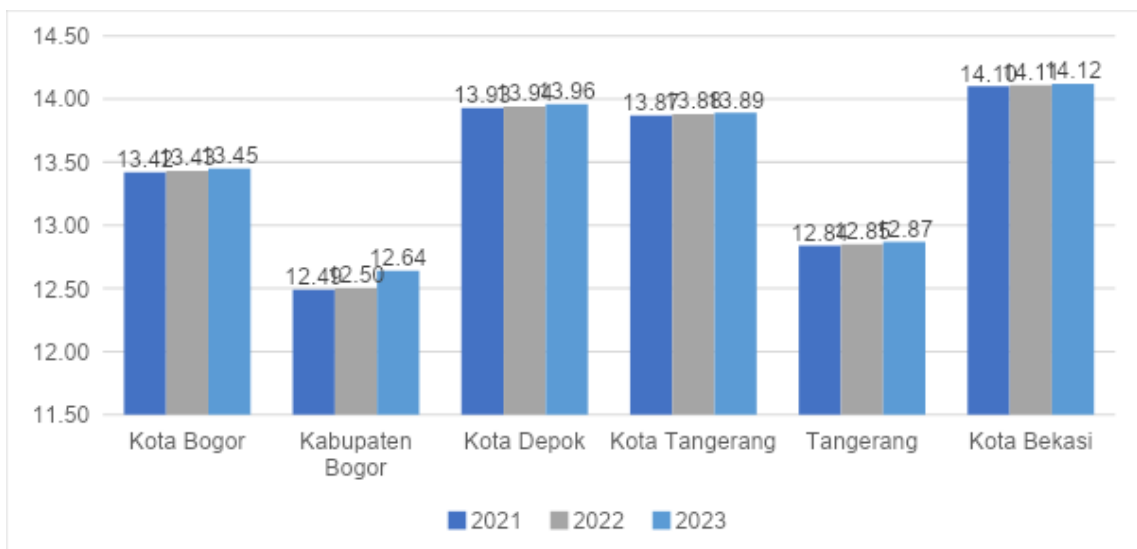


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah)

Gambar 2.36. Proyeksi Rata-rata Lama Sekolah di Kota Bogor Tahun 2023-2025

2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Capaian HLS Kota Bogor tahun 2023 sebesar 13,45 tahun dengan peningkatan sebesar 0,02 tahun dari tahun 2022. HLS Kota Bogor tahun 2023 menempati posisi ke-empat jika dibandingkan dengan wilayah pembanding seperti Kota Bekasi (14,12); Kota Depok (13,96); dan Kota Tangerang (13,89).

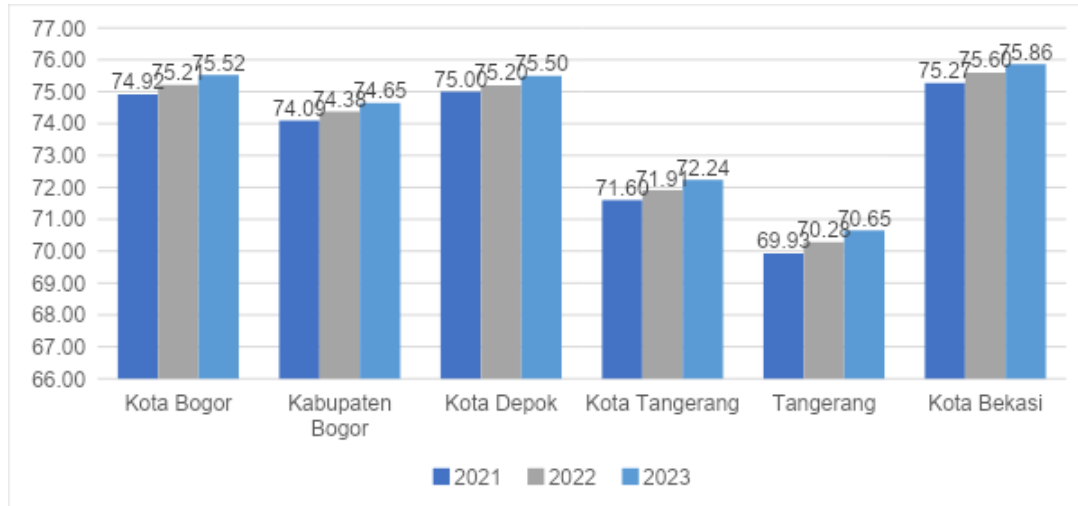


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah)

Gambar 2.37. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2021-2023

3. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian (mortalitas) pada masa tertentu yang cenderung tidak berubah terlalu dinamis di masa mendatang. Menurut BPS (2023), UHH adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Semakin tinggi UHH maka semakin baik kesempatan hidup di kota tersebut. UHH menjadi sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya. Capaian UHH Kota Bogor tahun 2023 sebesar 75,52 tahun dengan peningkatan 0,31 tahun dibandingkan capaian tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan wilayah lain, maka UHH Kota Bogor menempati posisi kedua setelah Kota Bekasi (75,86 tahun).



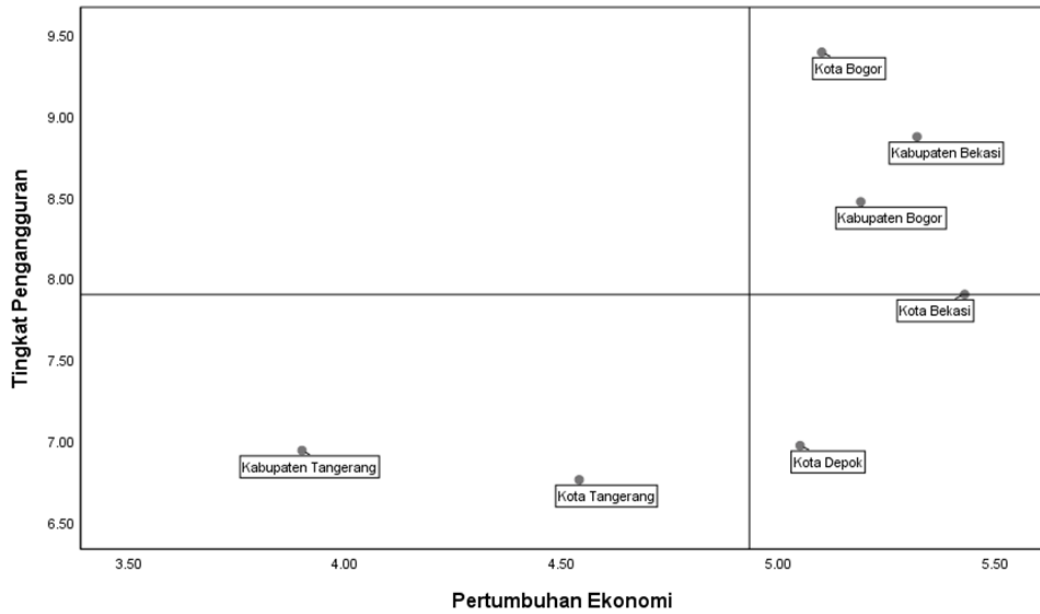
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah)

Gambar 2.38. Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2021-2023

2.2.1.5. Pengangguran

Pengangguran telah lama menjadi permasalahan ekonomi di level pusat sampai level daerah. Tingginya tingkat pengangguran berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang semakin rendah. Berdasarkan teori klasik, masalah pengangguran dapat diatasi dengan market clearing, penyesuaian harga dan upah di pasar bebas, hingga kondisi full employment tercapai. Akan tetapi, pada kenyataannya upah dan harga cenderung lambat dalam melakukan penyesuaian akibat adanya guncangan ekonomi. Oleh karena itu, seringkali kondisi full employment tidak dapat tercapai.

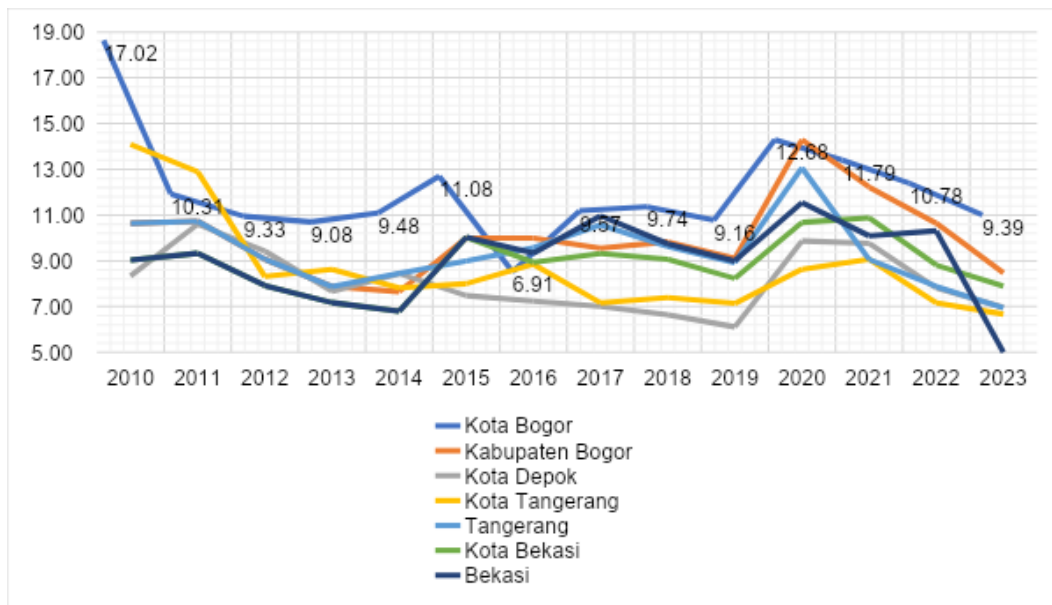
Teori lainnya, yaitu teori Keynes menyatakan bahwa pengangguran dapat diatasi melalui peningkatan permintaan agregat. Dimana untuk meningkatkan permintaan agregat, maka perlu didorong kinerja sector-sektor ekonomi untuk meningkatkan output. Dengan demikian, tenaga kerja akan lebih banyak diserap dan pengangguran menurun. Hal ini juga didukung dengan konsep Hukum Okun, dimana terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Gambar 2.39 menunjukkan klasterisasi hubungan antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi Kota Bogor serta Kabupaten/ kota lainnya di tahun 2023. Terlihat bahwa, Kota Bogor memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. Bahkan jika dibandingkan kabupaten/ kota lainnya, tingkat pengangguran Kota Bogor merupakan yang tertinggi. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kota Bogor untuk semakin serius dalam menetapkan kebijakan yang pro pada penciptaan lapangan kerja, kemudahan berusaha agar penurunan tingkat pengangguran dapat terus dilakukan.



Sumber : BPS Jawa Barat dan BPS Banten, 2024

Gambar 2.39. Klasen Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Kabupaten/ Kota sekitarnya, tahun 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja pada suatu daerah/ wilayah tertentu. Dengan kata lain, TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya suplai tenaga kerja. Berdasarkan Gambar 2.40, perkembangan TPT Kota Bogor cenderung mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga 2023. Hal ini menunjukkan kondisi yang relatif baik, dimana tahun 2010 TPT Kota Bogor sebesar 17,02 persen menjadi hanya sebesar 9,39 persen pada tahun 2023. Semakin rendah angka TPT menunjukkan bahwa pemerintah telah mampu menurunkan tingkat pengangguran diantara penduduk pada usia angkatan kerja.

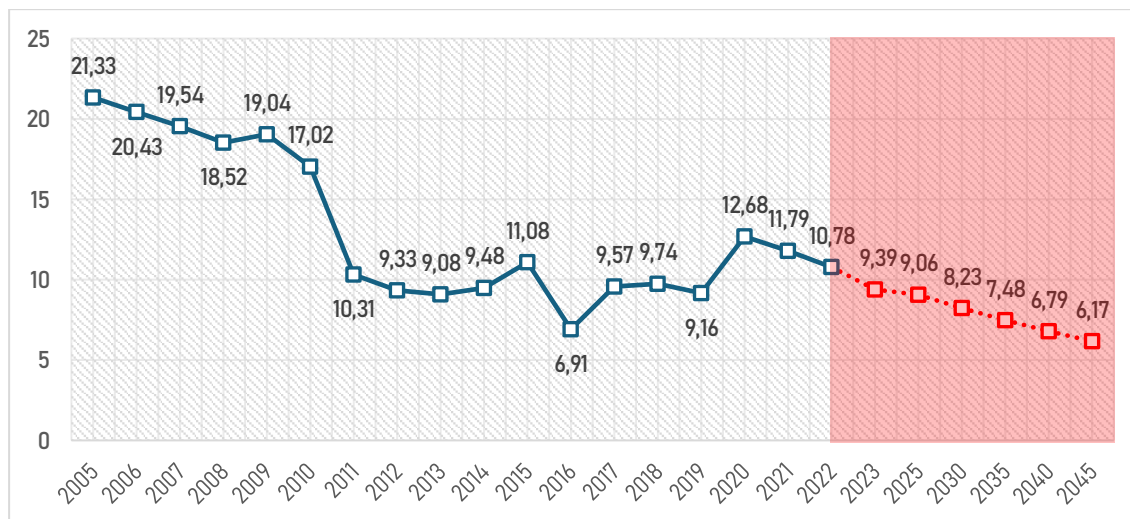


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Gambar 2.40. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor Tahun 2010-2023

Jika dibandingkan dengan wilayah kota/kabupaten lain di sekitarnya, tingkat pengangguran terbuka Kota Bogor menduduki posisi terakhir atau memiliki tingkat pengangguran terbuka paling tinggi diantara wilayah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bogor masih perlu memperhatikan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran di wilayahnya. Posisi persentase tingkat pengangguran terbuka terendah dimiliki oleh Kota Tangerang (6,67 persen); Kabupaten Tangerang (6,94 persen); Kota Depok (6,97 persen); Kota Bekasi (7,90 persen); Kabupaten Bogor (8,47 persen); dan Kota Bogor (9,39 persen).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan kondisi kesehatan indikator ketenagakerjaan. TPT ini, diharapkan juga terus mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa tenaga kerja telah terserap dengan baik di lapangan. Pada awal tahun 2005, TPT Kota Bogor sangat tinggi yaitu sebesar 21,33 persen dan cukup berfluktuasi selama periode tahun 2005-2022. Angka terendah TPT selama periode waktu tersebut yaitu sebesar 6,91 persen di tahun 2016 dan pada akhir tahun 2022 mencapai angka sebesar 10,78 persen. Hingga akhir 2045, TPT Kota Bogor diproyeksikan terus mengalami penurunan hingga mencapai 6,17 persen.



Sumber: BPS Kota Bogor, 2023 (diolah)

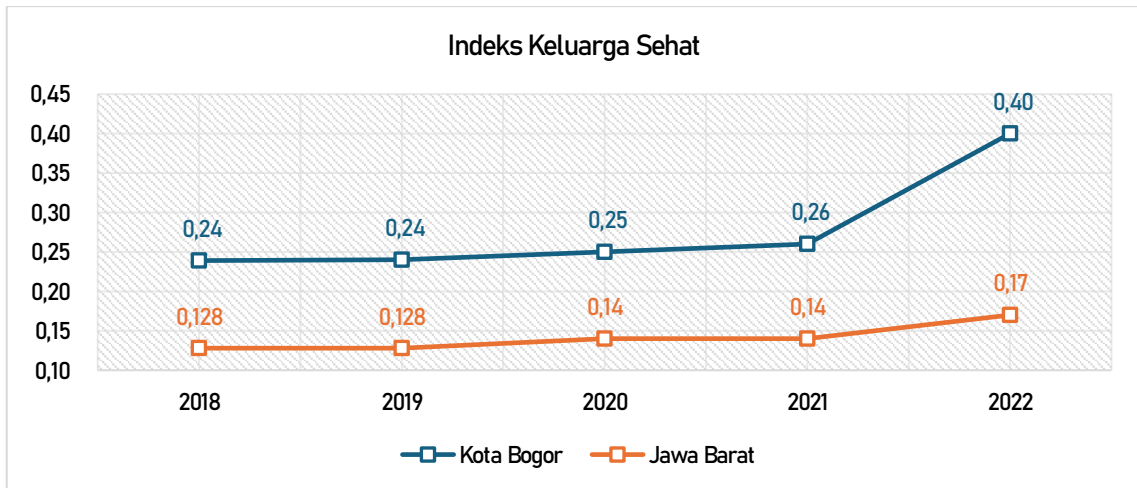
Gambar 2.41. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor Tahun 2025-2045 (Persen)

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

Kesejahteraan sosial budaya menunjukkan gambaran umum mengenai kondisi Masyarakat dari perspektif sosial budaya. Indikator-indikator yang disajikan dalam sub bab Kesejahteraan Sosial Budaya yaitu Indeks Keluarga Sehat (IKS), Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

2.2.2.1. Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur Kesehatan Masyarakat dimana pada IKS terdapat 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial dan lingkungan keluarga. Dengan meningkatkan kualitas hidup dan praktik hidup sehat di keluarga, maka Kesehatan individu dan keluarga secara keseluruhan akan meningkat. Nilai IKS dikategorikan dalam 3 kelompok yaitu Keluarga Sehat jika nilai IKS > 0,8; Keluarga Pra Sehat jika nilai IKS berada diantara 0,5 – 0,8; dan Keluarga Tidak Sehat jika nilai IKS < 0,5 sebagaimana tersaji dalam Gambar 2.42.



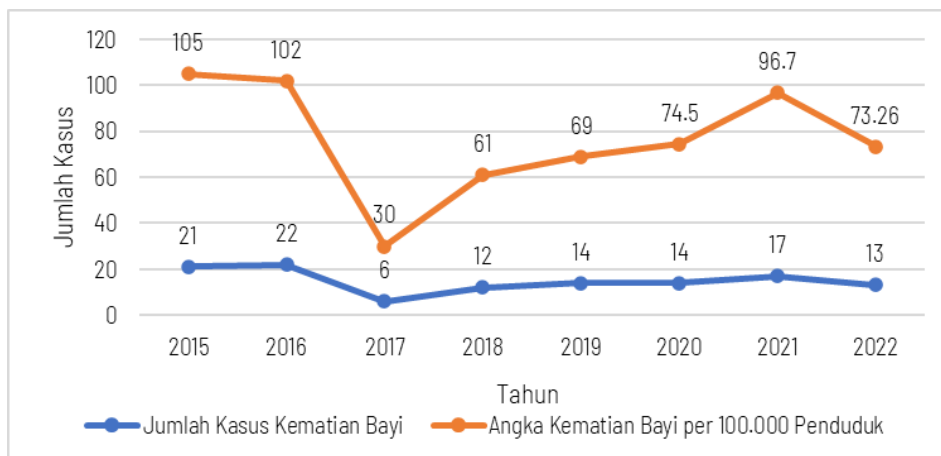
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor, 2022

Gambar 2.42. Indeks Keluarga Sehat Kota Bogor dan Jawa Barat Tahun 2018-2022

Nilai IKS Kota Bogor dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 terlihat mengalami peningkatan di tahun 2022. IKS Kota Bogor tahun 2018 sebesar 0,24 sedangkan tahun 2022 sebesar 0,40. Nilai IKS ini meningkat namun jika dikelompokkan ke dalam kategori IKS maka kondisi rata-rata kesehatan keluarga di Kota Bogor berada dalam kategori Keluarga Tidak Sehat. Hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah dalam penyediaan serta kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Kota Bogor. Meskipun begitu, jika dibandingkan dengan nilai IKS Provinsi Jawa Barat, maka nilai IKS Kota Bogor masih lebih tinggi.

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) merupakan indikator yang meliputi jumlah kematian ibu karena kehamilan, persalinan dan masa nifas pada 100.000 kelahiran hidup dalam satu wilayah pada kurun waktu tertentu. Angka Kematian Ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan sewaktu ibu melahirkan dan masa nifas. Menurut definisi WHO, kematian ibu adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera.



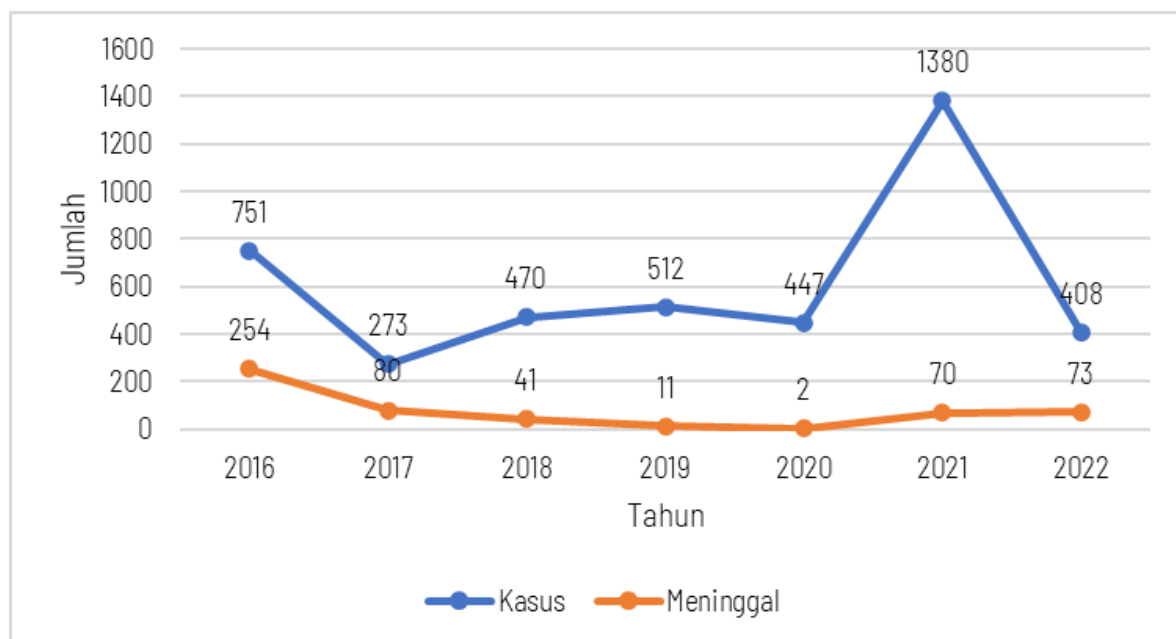
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2022 (diolah)

Gambar 2.43. Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kota Bogor Tahun 2015-2022

Berdasarkan Gambar 2.43 di atas, terlihat bahwa angka kematian ibu di Kota Bogor masih berfluktuasi. Pada tahun 2022, AKI di Kota Bogor mencapai 13 kasus atau 73,26 per 100.000 penduduk. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2021 dan lebih rendah dibandingkan dengan AKI di level nasional sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Berikut ini adalah gambaran perkembangan Angka Kematian Ibu di Kota Bogor. Menurut data Dinas Kesehatan Kota Bogor (2022), kematian ibu di Kota Bogor disebabkan oleh perdarahan dan infeksi sebanyak 4 orang (30,77%); penyakit lain-lain sebanyak 2 orang (15,38%); gangguan hipertensi 1 orang (7,69%); kelainan jantung dan pembuluh darah 1 orang (7,69%); dan gangguan cerebrovaskular 1 orang (7,69%).

2. Insidensi HIV/AIDS

Acquired Immunodeficiency Syndrome atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (disingkat AIDS) adalah sekumpulan gejala dan infeksi/sindrom yang timbul karena menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV. *Human Immunodeficiency Virus* (atau disingkat HIV) yaitu virus yang memperlemah kekebalan pada tubuh manusia. Penemuan kasus HIV/AIDS di Kota Bogor sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain berhubungan dengan aktivitas penemuan baik melalui survei maupun VCT yang dilakukan di Puskesmas, Rumah Sakit, Lembaga Pemasarakatan (LP) Paledang kelas II Kota Bogor dan LSM.



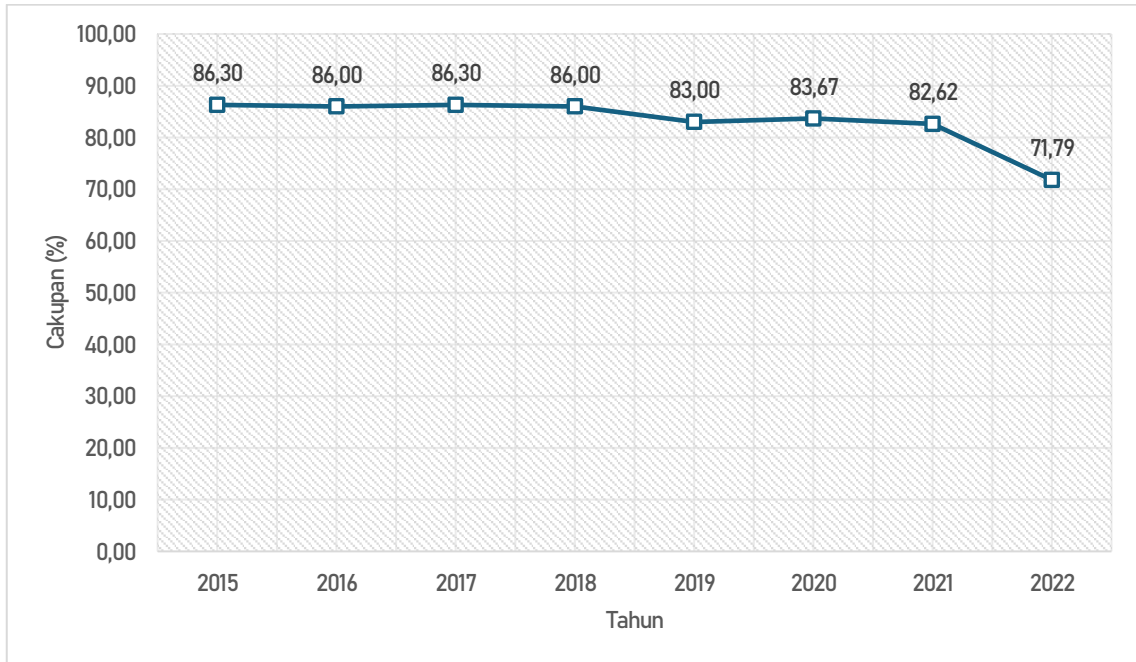
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor, 2022 (diolah)

Gambar 2.44. Perkembangan Penyakit HIV/AIDS di Kota Bogor Tahun 2016–2022

Berdasarkan Gambar 2.44 di atas, kasus HIV/AIDS berfluktuasi dengan kasus tertinggi terjadi saat tahun 2021 atau meningkat sebanyak 933 kasus dari tahun 2020. Apabila dilihat pada tahun 2022, maka ditemukan jumlah kasus baru HIV positif sebanyak 408 kasus meningkat dibanding tahun 2021 ditemukan 333 orang, dengan proporsi jenis kelamin Laki-laki (80,9%) lebih tinggi dibanding Perempuan (19,1%). Kasus positif HIV tertinggi terdapat pada kelompok umur 25 hingga 49 tahun sebesar 287 kasus (70,3%), sedangkan kasus terendah sebesar 1,5% atau 6 kasus pada kelompok umur kurang dari 4 tahun. Dari 408 kasus baru yang ditemukan, 316 kasus mendapatkan pengobatan ARV (77%). Sedangkan untuk angka kematian karena HIV/AIDS pada tahun 2022 di Kota Bogor berjumlah 73 orang.

3. Insendensi TBC

Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB (*Mycobacterium Tuberculosis*). Sebagian besar kuman TB menyerang bagian paru-paru manusia, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Sumber penularan adalah pasien TB BTA positif. Berikut angka kesembuhan dan keberhasilan pengobatan tuberkulosis menunjukkan treatment success rate dari penderita TBC di Kota Bogor. Berikut rincian Angka Kesembuhan dan Keberhasilan Pengobatan TB (%) Di Kota Bogor Tahun 2015-2022.



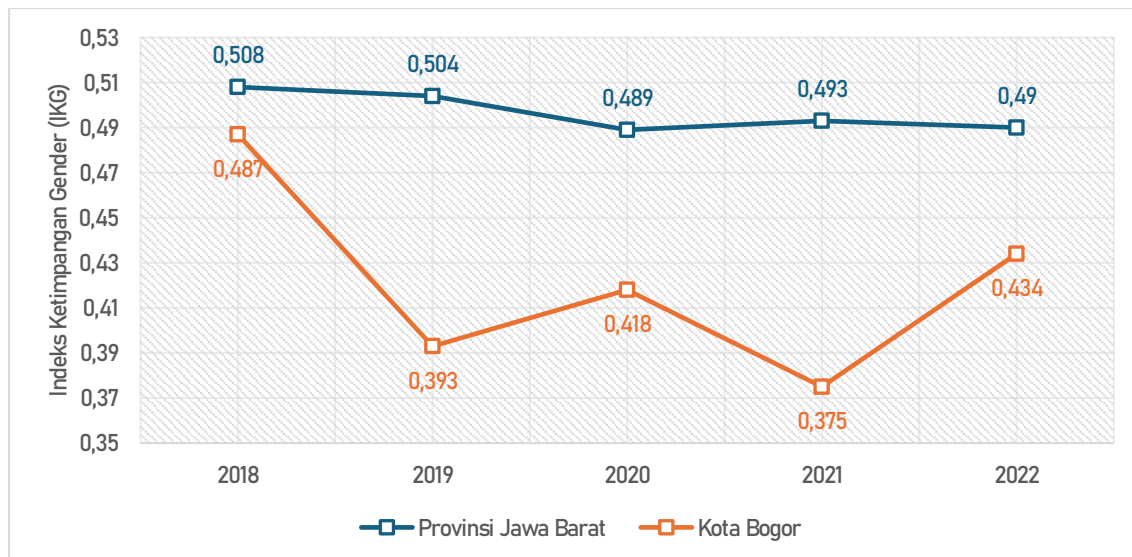
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor, 2022 (diolah)

Gambar 2.45. Angka Keberhasilan Pengobatan TBC di Kota Bogor Tahun 2015-2022

Berdasarkan Gambar di atas, terjadi penurunan angka keberhasilan penanganan TBC di Kota Bogor tetapi hal ini tidak menjadi indikasi buruk, karena jumlah kasus TBC yang terjadi di Kota Bogor terus menurun diantaranya: 2020 (3.833 kasus); 2021 (1.191 kasus); dan 2022 (1.074 kasus).

2.2.2.2. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan dideteksi melalui dua indikator yaitu indeks ketimpangan dan indeks pembangunan gender. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan dampak negatif atau kerugian yang timbul dari kurangnya kesetaraan gender terhadap pencapaian pembangunan. Indeks ini terdiri dari tiga aspek utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan partisipasi dalam pasar kerja. Indikator yang digunakan dalam menghitung indeks ketimpangan gender meliputi andil persalinan di luar fasilitas kesehatan, persentase wanita berusia 15-49 tahun yang menikah dan melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun, persentase populasi dengan pendidikan setidaknya SMA, persentase laki-laki dan perempuan di lembaga parlemen, serta proporsi angkatan kerja dalam populasi usia kerja. Indeks ini memiliki sistem skor dengan rentang skala 0 hingga 1, dengan skor 0 menunjukkan ketimpangan gender yang sangat lebar dan skor 1 menunjukkan tercapainya kesetaraan.



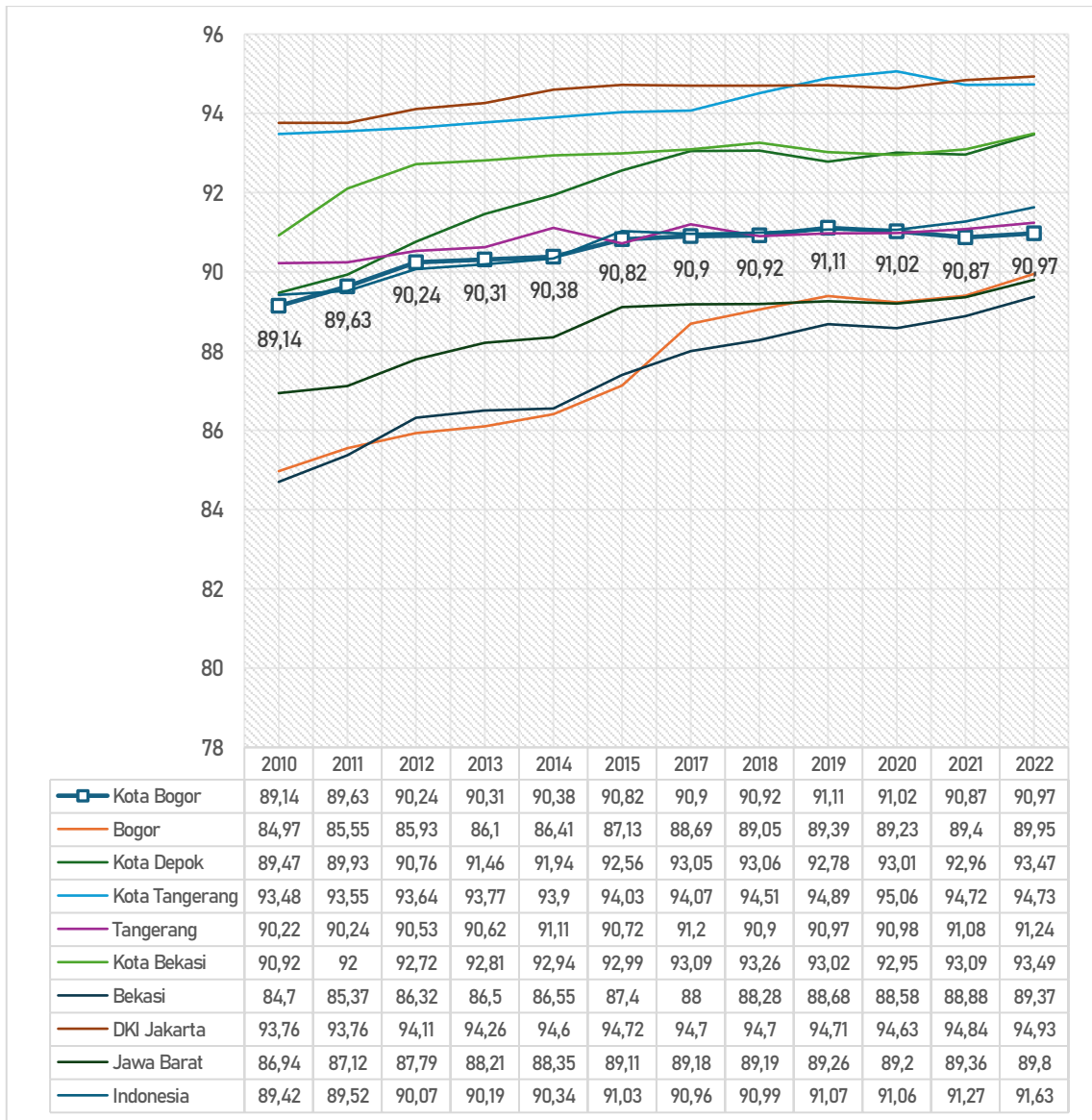
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah)

Gambar 2.46. Indeks Ketimpangan Gender di Kota Bogor Tahun 2018-2022

Berdasarkan Gambar 2.46, IKG di Kota Bogor mengalami fluktuasi, terlebih di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,059 menjadi 0,434 dibandingkan tahun 2021. Kenaikan ini berarti ketimpangan gender di Kota Bogor semakin memburuk. Padahal, IKG di Provinsi Jawa Barat menunjukkan perbaikan dengan turun sebesar 0,003 menjadi 0,49 di tahun 2022. Kondisi Kota Bogor lebih buruk dalam ketimpangan dibandingkan dengan Kabupaten Bogor yang memiliki IKG sebesar 0,588 pada tahun 2022.

Indeks Pembangunan Gender merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM laki-laki. Dengan demikian, IPG dapat mengukur tingkat ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia. Interpretasi IPG yaitu semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100 maka semakin setara Pembangunan antara Perempuan dengan laki-laki. Namun jika semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100 maka semakin terjadi ketimpangan Pembangunan antara Perempuan dan laki-laki.

Secara nasional, capaian IPG Indonesia pada tahun 2022 sebesar 91,63, nilai ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai IPG di Provinsi Jawa Barat maupun Kota Bogor. Walaupun nilai IPG Kota Bogor lebih rendah dibandingkan secara nasional, namun masih lebih tinggi dari Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 90,97 pada tahun 2022 yang berarti pemerataan pembangunan antara perempuan dan laki-laki sudah cukup baik di Kota Bogor. Apabila dibandingkan dengan nilai IPG di Kabupaten Bogor pada tahun 2022, maka nilai IPG Kota Bogor masih lebih tinggi, namun jika dibandingkan dengan wilayah lain di Jabodetabek, maka Kota Bogor menempati urutan keenam (Gambar 2.41).



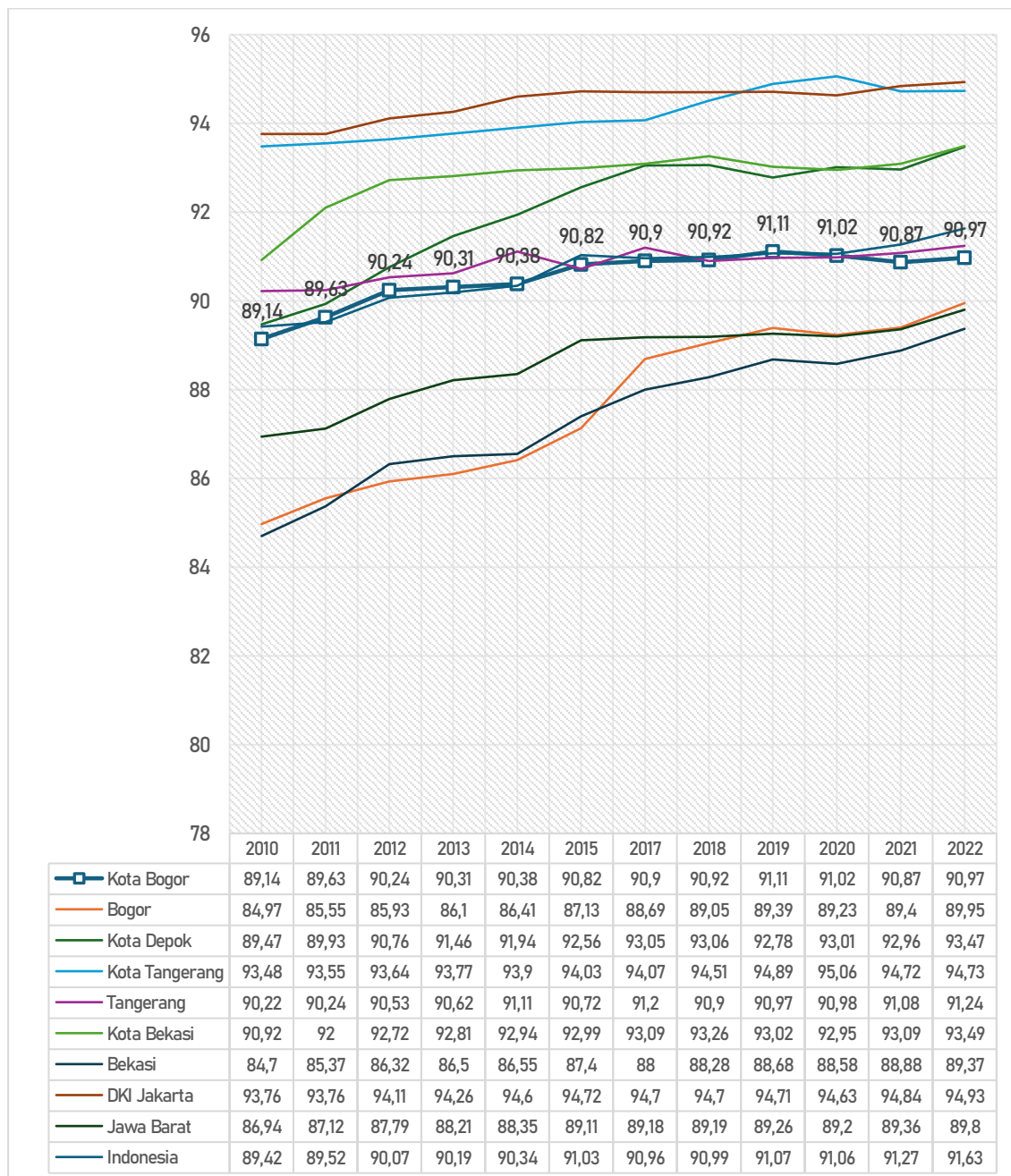
Sumber: BPS, 2023

Gambar 2.47. Indeks Pembangunan Gender di Jabodetabek, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, Tahun 2010-2022

Berdasarkan analisis tren, maka IPG Kota Bogor memiliki tren yang cenderung menurun seperti yang terlihat pada Gambar 2.47. Hal ini disebabkan nilai IPG yang sempat menurun pada tahun 2021 dengan pertumbuhan yang negatif yaitu 0,16 persen. Selama lima tahun, rata-rata pertumbuhan IPG Kota Bogor sebesar 0,01 persen. Berdasarkan peramalan data yang dilakukan dari tahun 2023 hingga 2025, maka nilai IPG menunjukkan penurunan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender, sehingga IDG dapat digunakan untuk mengukur pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. IDG dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan, khususnya bidang ekonomi dan politik. Dengan meningkatkan partisipasi perempuan, maka akan tercipta keadilan dan kesetaraan gender yang lebih baik. Selain itu, IDG juga dapat membantu dalam memantau kemajuan yang dicapai dalam mencapai kesetaraan gender.

Dimensi keterwakilan perempuan di parlemen diukur dengan indikator proporsi keterwakilan perempuan dan laki-laki di parlemen. Dimensi pengambilan keputusan diukur dengan indikator proporsi perempuan dan laki-laki dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi. Dimensi distribusi pendapatan diukur dari upah buruh laki-laki dan perempuan non pertanian. Status pencapaian indeks pemberdayaan gender berdasarkan BPS dapat dikelompokkan menjadi rendah ($IDG < 50$); sedang ($50 \leq IDG < 60$); tinggi ($60 \leq IDG \leq 80$); sangat tinggi ($IDG > 80$). Pada tahun 2022, nilai IDG Kota Bogor sebesar 90,97 yang termasuk dalam kategori tinggi artinya peran perempuan di Kota Bogor dalam kehidupan ekonomi dan politik cukup besar. Berdasarkan Gambar 2.48 di bawah, nilai IDG di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat dan Indonesia berada pada kategori tinggi karena memiliki nilai diatas 80.

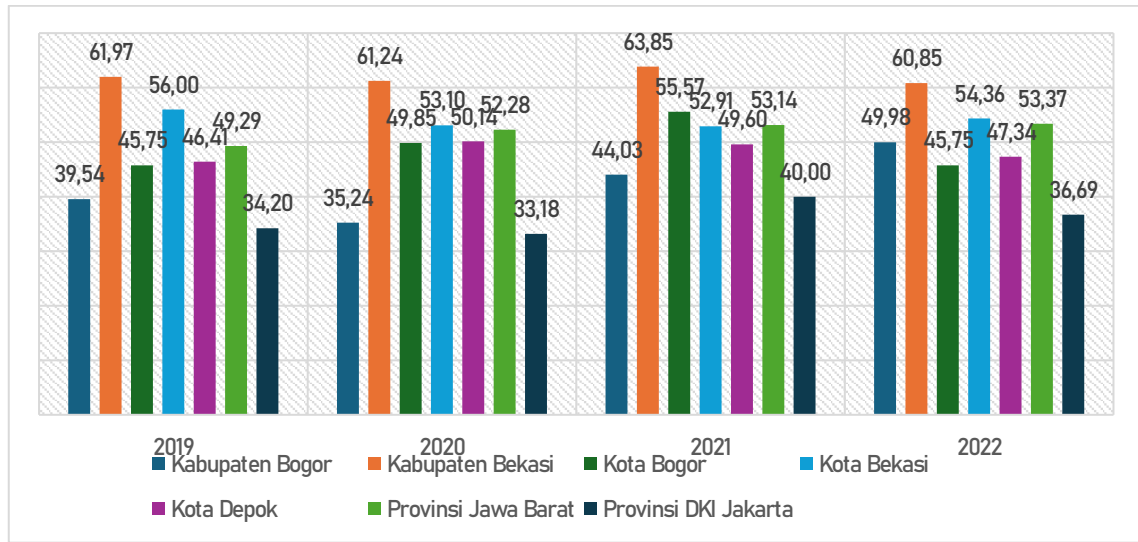


Sumber: BPS, 2023

Gambar 2.48. Indeks Pemberdayaan Gender di Jabodetabek, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, Tahun 2010-2022

2.2.2.3. Rumah Tangga Layak

Pada Gambar 2.49 disajikan akses hunian yang layak dan terjangkau di wilayah Kota Bogor dengan beberapa wilayah pembanding, terlihat bahwa Kota Bogor di tahun 2022 memiliki persentase yang rendah sebesar 45,75 persen dibandingkan Kota Depok dan Kota Bekasi sebagai pembanding wilayah perkotaan. Selain itu, capaian Kota Bogor tercatat selalu lebih rendah dibandingkan dua kota tersebut dan hanya di tahun 2021 memiliki nilai lebih tinggi sebesar 55,57 persen. Capaian Kota Bogor tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -9,82 persen dibandingkan tahun 2021. Artinya, wilayah Kota Bogor kurang mengakomodir penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang layak dan terjangkau bagi penduduk.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (2023)

Gambar 2.49. Rumah Tangga yang Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Kota Bogor dengan Wilayah Pembanding (Persen)

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Terdapat empat (4) indikator yang dapat menggambarkan aspek daya saing daerah, yakni: (1) daya saing ekonomi daerah yang menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan, (2) daya saing SDM yang menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah, (3) daya saing fasilitas/ infrastruktur wilayah yang menjelaskan kondisi fasilitas/ infrastruktur di daerah, dan (4) daya saing iklim daerah yang menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan investasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah. Indeks ekonomi hijau Indonesia memberikan hasil adanya peningkatan dan sinergitas antarpilar, seperti pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) rata-rata 6,1 hingga 6,5 persen per tahun hingga tahun 2050, serta laju penurunan intensitas emisi hingga 68 persen di tahun 2045. Adanya perhitungan indeks ekonomi hijau ini baiknya dapat diadopsi oleh seluruh kota/kabupaten di Indonesia. Kota Bogor walaupun belum memiliki perhitungan secara detail tentang indeks ekonomi hijau, namun jika dilihat dari indikator yang ada, maka terdapat peningkatan dari setiap pilar.

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Daya saing ekonomi daerah didekati dengan beberapa indikator seperti indeks ekonomi inklusif, indeks ekonomi hijau dan jumlah UMKM yang mencerminkan jumlah wirausaha di suatu daerah. Indeks ekonomi inklusif Kota Bogor dan kota pembandingan lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah, sedangkan indeks ekonomi hijau hanya mengukur pada tingkat nasional. Indeks Ekonomi Hijau Indonesia menghitung skor Indonesia dalam transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau dengan melihat perbandingan kemajuan dari indikator terhadap nilai minimal dan target maksimal, yang ingin dicapai.

Terdapat 15 indikator dalam *Green Economy Index* (GEI) Indonesia, yang mencakup tiga pilar, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang mencerminkan pembangunan ekonomi hijau. Pilar ekonomi terdiri atas enam indikator, antara lain, intensitas emisi, intensitas energi, dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita. Pilar sosial mencakup empat indikator, yakni tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, pilar lingkungan meliputi lima indikator, yaitu tutupan lahan, lahan gambut terdegradasi, penurunan emisi, sampah terkelola, dan energi baru terbarukan.

2.3.1.1. Lapangan Usaha Unggul dan Potensial

Nilai PDRB Kota Bogor atas dasar harga berlaku pada 2023 mencapai 57.003,76 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 4.089,16 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2022, yang mencapai 52.914,60 miliar rupiah. Kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh peningkatan produksi pada banyak seluruh kategori usaha dan juga faktor inflasi harga.

Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Kota Bogor didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; Konstruksi; serta Jasa Keuangan dan Asuransi. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memiliki nilai terbesar dalam PDRB tahun 2023 di Kota Bogor. Sektor unggulan kedua terbesar yaitu industri pengolahan. Sektor lapangan usaha potensial adalah sektor transportasi dan pergudangan serta jasa keuangan dan asuransi.

Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga berlaku, pada PDRB atas dasar harga konstan juga memiliki nilai terbesar pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta industri pengolahan. Kota Bogor dikenal sebagai kota jasa, sehingga tidak heran jika sektor perdagangan menjadi yang paling besar nilainya dalam PDRB baik PDRB atas dasar harga berlaku dan konstan.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bogor pada 2023 mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan 2022. Pertumbuhan ekonomi yang lambat tersebut dipengaruhi oleh penurunan produksi di beberapa lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Bogor 2023 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 37,06 triliun rupiah. Angka tersebut naik sebesar 1,80 triliun rupiah dari 35,26 triliun rupiah pada 2022.

Tabel 2.19. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bogor Tahun 2014–2023 Berdasarkan Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Kategori	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	241.575,71	253.951,95	269.243,76	280.254,86	2.937.00,7	305.493,20	317.861,00	337.588,40	373.750,86	386.770
Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Industri Pengolahan	5.393.074,47	5.998.600,6	6.538.497,43	7.064.824,32	7.840.380,2	8.370.600,10	8.298.889,61	9.256.855,50	10.045.536,00	10.658.480
Pengadaan Listrik dan Gas	1.960.761,41	1.925.046,85	1.970.649,85	1.949.764,98	1.917.407,3	1.925.050,10	1.840.664,00	2.072.324,40	2.365.294,98	2.381.770
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	28.821,37	31.953,59	36.037,1	40.954,36	46.135,5	50.770,90	57.628,30	64.440,20	70.046,50	84.330
Konstruksi	3.280.102,82	3.647.802,34	3.937.651,67	4.381.382,34	4.937.626,3	5.615.544,00	5.306.735,70	5.429.667,40	5.769.602,94	6.652.460
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.476.574,46	7.088.063,38	7.643.843,99	8.168.746,73	8.697.451,7	9.388.980,40	8.919.697,20	9.287.189,20	10.109.475,60	10.961.340
Transportasi dan Pergudangan	3.151.053,52	3.776.163,74	4.210.072,72	4.638.128,31	5.252.716,1	5.985.705,32	5.743.779,00	5.741.132,20	6.538.056,65	7.624.700
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.294.452,08	1.421.383,4	1.586.007,85	1.749.963,32	2.008.792,5	2.199.470,40	2.269.202,60	2.351.864,80	2.706.181,20	2.797.200
Informasi dan Komunikasi	1.284.855,52	1.521.416,21	1.710.356,52	1.967.765,18	2.063.111,8	2.157.434,00	2.947.044,50	2.907.944,90	3.004.885,92	3.203.250
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.975.033,74	2.145.643,26	2.475.163,85	2.748.406,76	3.075.475,1	3.346.217,51	3.325.974,30	3.486.572,51	3.727.399,41	3.823.050
Real Estat	653.307,73	716.268,71	782.754,92	846.549,44	919.284,1	1.010.806,60	984.525,60	1.129.313,10	1.263.588,43	1.289.360
Jasa Perusahaan	593.665,21	675.244,69	746.138,04	799.337,68	890.568,6	1.046.281,00	935.529,42	939.524,90	1.105.062,70	1.118.700
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	880.975,97	955.878,4	1.019.031,66	1.080.886,89	1.174.496,7	1.239.619,00	1.202.430,41	1.270.505,30	1.241.162,13	1.275.170
Jasa Pendidikan	798.190,62	907.452,16	997.674,59	1.072.300,65	1.266.508,7	1.435.963,50	1.619.798,50	1.721.282,70	1.908.968,76	1.965.060
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	318.087,37	374.124,9	425.778,6	490.454,37	558.376,94	641.408,90	663.087,20	781.427,10	863.525,64	897.620
Jasa Lainnya	816.656,4	925.906,78	1.051.908,75	1.198.753,54	1.318.988,5	1.478.412,20	1.479.016,80	1.548.012,00	1.822.060,72	1.884.480
Jumlah	29.147.188,4	32.364.901,00	35.400.811,30	38.478.473,7	42.261.020,7	46.197.757,10	45.911.864,10	48.325.644,60	52.914.598,40	57.003.760

Sumber: BPS Kota Bogor 2023

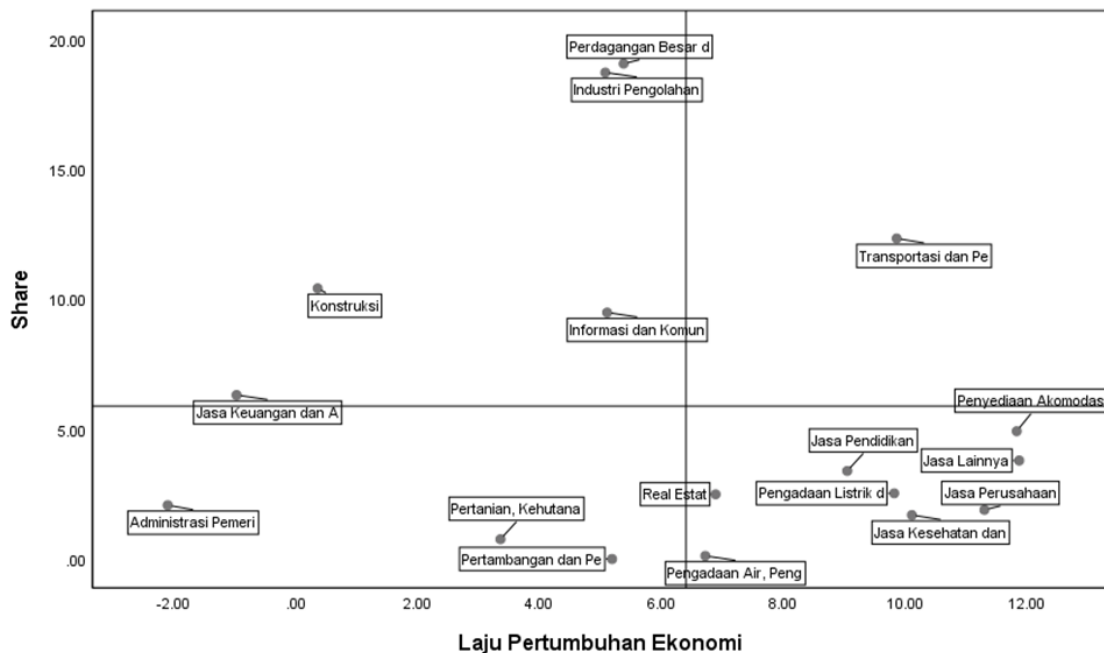
Tabel 2.20. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Tahun Dasar=2010) Kota Bogor Tahun 2014–2023 Berdasarkan Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Kategori	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	220.689,88	225.137,69	230.145,03	233.033,72	238.277,20	239.771,40	245.164,10	258.713,80	267.405,73	275.950
Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Industri Pengolahan	4.564.569,82	4.843.786,77	5.109.363,13	5.351.637,97	5.737.431,30	6.065.723,10	6.015.391,84	6.283.630,90	6.602.998,62	6.864.580
Pengadaan Listrik dan Gas	1.025.049,18	898.231,83	903.130,58	831.948,74	808.244,40	771.588,30	725.407,20	813.132,22	893.010,19	869.600
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	25.940,03	27.361,22	28.518,60	29.203,05	30.703,90	32.725,60	36.051,00	39.770,90	42.443,50	47.060
Konstruksi	2.696.289,52	2.848.754,78	3.011.149,21	3.237.681,86	3.493.782,50	3.829.210,20	3.604.700,20	3.659.258,00	3.672.500,88	4.094.470
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.367.108,86	5.650.090,63	5.972.855,53	6.306.048,04	6.494.415,50	6.744.719,90	6.210.448,40	6.379.299,80	6.722.524,91	6.973.020
Transportasi dan Pergudangan	2.637.721,22	2.893.357,49	3.133.215,64	3.366.504,80	3.622.762,60	3.933.690,10	3.850.155,50	3.961.652,00	4.352.348,40	4.744.100
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.059.403,07	1.119.753,25	1.209.844,24	1.304.027,34	1.422.342,40	1.503.114,80	1.530.332,90	1.550.682,62	1.734.174,05	1.825.380
Informasi dan Komunikasi	1.270.614,21	1.506.674,81	1.692.958,81	1.919.815,29	2.095.540,80	2.253.816,00	3.047.811,20	3.182.270,70	3.344.926,07	3.563.350
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.606.764,74	1.676.548,86	1.847.070,71	1.951.351,83	2.083.321,70	2.187.588,80	2.214.258,50	2.245.471,00	2.223.681,42	2.246.720
Real Estat	525.977,17	555.976,80	601.018,99	639.844,81	684.186,50	736.540,90	719.168,81	821.058,20	877.629,11	896.550
Jasa Perusahaan	477.357,37	516.834,82	560.209,59	590.797,04	632.731,10	691.035,50	617.578,20	598.727,40	666.389,86	673.100
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	643.234,24	660.730,22	675.927,01	683.605,54	697.658,80	726.854,50	721.132,20	746.399,20	730.750,28	745.610
Jasa Pendidikan	656.814,29	718.858,00	772.597,46	826.602,02	887.107,40	967.826,80	1.041.697,50	1.096.423,00	1.195.603,40	1.241.040
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	279.823,32	313.143,35	341.269,24	381.436,63	434.265,60	479.727,41	485.700,00	540.877,00	595.552,79	606.700
Jasa Lainnya	777.953,83	843.363,78	912.977,72	1.001.432,26	1.050.802,90	1.131.796,10	1.097.744,80	1.195.107,70	1.336.930,80	1.388.120
Jumlah	23.835.310,80	25.298.604,30	27.002.251,50	28.654.971,00	30.413.574,60	32.295.729,40	32.162.742,40	33.372.476,40	35.258.870,00	37.055.360

Sumber: BPS Kota Bogor 2023

Implikasi bagi keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah yaitu kemampuan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata. Selain itu, penting juga untuk mengetahui sektor dalam wilayah yang paling berkontribusi pada pembangunan yang terlihat dari distribusi PDRB. Distribusi PDRB menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor yang memiliki peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

Gambar 2.50 menunjukkan klasterisasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi PDRB 17 sektor lapangan usaha Kota Bogor di tahun 2023. Sebagai salah satu kota jasa, sektor transportasi dan pergudangan menjadi satu-satunya sektor dengan laju pertumbuhan di atas rata-rata sektor lainnya dan distribusi (kontribusi) yang tinggi juga (kuadran kanan atas). Sektor ini merupakan sektor yang prospektif untuk dikembangkan di Kota Bogor, dimana pada beberapa masa yang akan datang sektor tersebut masih/ akan berpotensi untuk menjadi sektor unggulan Kota Bogor (Panjaitan et al, 2023). Sektor lainnya seperti penyediaan akomodasi, jasa perusahaan, jasa pendidikan, pengadaan listrik, pengadaan air, real estate, dan jasa lainnya juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun *share* masih rendah.

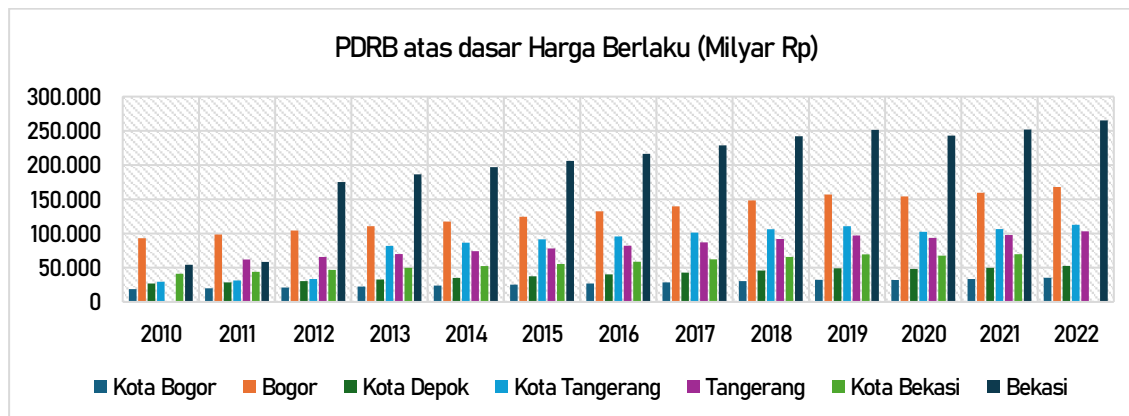


Sumber : BPS Jawa Barat dan BPS Banten, 2024

Gambar 2.50. Klasen Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi PDRB 17 Sektor Lapangan Usaha Kota Bogor, tahun 2023

Perkembangan PDRB Kota Bogor atas dasar harga berlaku dapat dibandingkan dengan wilayah kota/kabupaten di sekitarnya. Dalam hal ini PDRB Kota Bogor atas dasar harga berlaku dibandingkan dengan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Selama periode 2010-2022, PDRB atas dasar harga berlaku di Kota Bogor cenderung mengalami peningkatan setiap tahun dari Rp 13.909 miliar pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp 52.914,6 miliar pada tahun 2022. Meskipun perkembangan PDRB Kota Bogor cenderung mengalami peningkatan, namun nilai ini masih rendah dibandingkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku di beberapa wilayah. Hal ini seperti dapat dilihat pada tahun 2022, nilai PDRB Kota Bogor berada pada posisi ke-6 (paling kecil) diantara wilayah pembandingnya. Pada tahun 2022, nilai PDRB atas dasar harga berlaku yang tertinggi secara berurutan yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota

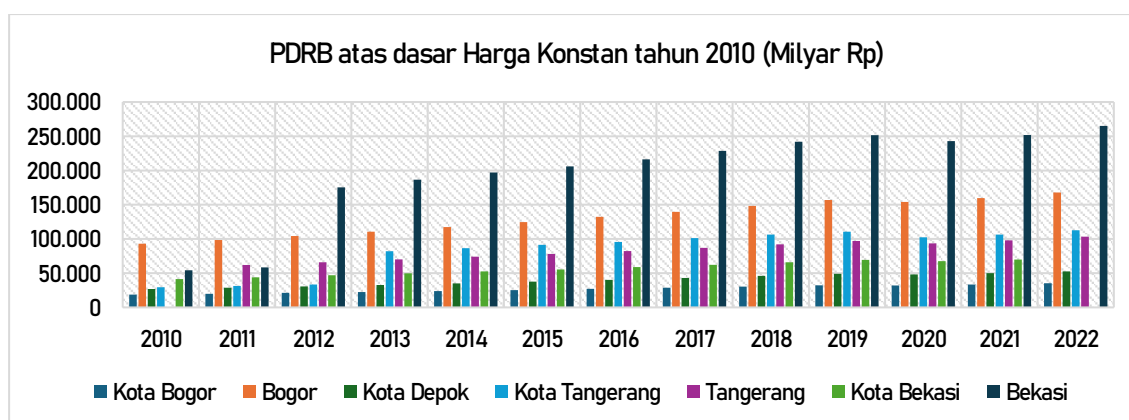
Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Depok dengan nilai masing-masing, Rp 367.573 milyar, Rp 267.744 milyar, Rp 182.211 milyar, Rp 160.168 milyar, dan Rp 81.167 milyar. Perkembangan PDRB atas harga berlaku kota Bogor beserta wilayah pembandingnya dapat dilihat pada Gambar 2.51.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Gambar 2.51. Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Berlaku Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2010-2022

Hal yang sama juga terjadi pada perhitungan PDRB atas dasar harga konstan yang cenderung mengalami peningkatan dari mulai tahun 2010 hingga 2022, kecuali tahun 2020. Pada tahun 2010, PDRB atas dasar harga konstan Kota Bogor adalah sebesar Rp 18.720,98 miliar dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi Rp 35.258,87 miliar. Di tahun 2020 sempat mengalami penurunan dari Rp 32.295,72 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 32.083,51 miliar tahun 2020. Meskipun perkembangan PDRB Kota Bogor atas dasar harga konstan cenderung mengalami peningkatan, namun nilai ini masih rendah dibandingkan nilai PDRB atas dasar harga konstan di beberapa wilayah. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2022, nilai PDRB Kota Bogor berada pada posisi ke-2 diantara wilayah pembandingnya. Nilai PDRB atas dasar harga konstan yang tertinggi secara berurutan yaitu, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor dengan nilai masing-masing secara berurutan yaitu Rp 265.131 milyar, Rp 167.966 milyar. Wilayah-wilayah lain seperti Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Depok memiliki nilai PDRB atas dasar harga konstan yang lebih rendah dibandingkan Kota Bogor pada tahun 2022. Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan Kota Bogor dan wilayah pembandingnya dapat dilihat pada Gambar 2.45.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Gambar 2.52. Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Konstan tahun 2010 Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2010-2022

Akomodasi makanan dan minuman menyumbang sebesar 4,9 persen pada PDRB Kota Bogor tahun 2023. Rasio penyediaan makanan dan minuman terhadap PDRB Kota Bogor dari tahun ke tahun cenderung stabil pada kisaran 4 hingga 5 persen. Pada tahun 2023 rasio penyediaan makanan dan minuman sebesar 4,9 persen lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022. Akomodasi makanan dan minuman menjadi salah satu sumber potensial untuk pemasukan pendapatan daerah karena banyaknya usaha makanan dan minuman yang tumbuh di Kota Bogor. Hal ini perlu terus didorong oleh pemerintah daerah agar menjadi salah satu sektor unggulan pendapatan daerah Kota Bogor.

Tabel 2.21. Rasio Akomodasi Makanan dan Minuman Tahun 2014–2023 (persen)

PDRB	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	4,44	4,39	4,48	4,55	4,75	4,76	4,94	4,87	5,11	4,91
PDRB Atas Dasar Harga Konstan	4,44	4,43	4,48	4,55	4,68	4,65	4,76	4,65	4,92	4,93

Sumber: BPS Kota Bogor 2023

Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2008) merumuskan ekonomi kreatif sebagai upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui kreativitas dengan iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Definisi yang lebih jelas disampaikan oleh UNDP (2008) yang merumuskan bahwa ekonomi kreatif merupakan bagian integratif dari pengetahuan yang bersifat inovatif, pemanfaatan teknologi secara kreatif, dan budaya.

Rumusan ekonomi kreatif menurut UNDP (2008) Lingkup kegiatan dari ekonomi kreatif dapat mencakup banyak aspek. Departemen Perdagangan (2008) mengidentifikasi setidaknya 14 sektor yang termasuk dalam ekonomi kreatif, yaitu: (1) Periklanan, (2) Arsitektur, (3) Pasar barang seni, (4) Kerajinan (handicraft), (5) Desain, (6) Fashion, (7) Film, video, dan fotografi, (8) Permainan interaktif, (9) Musik, (10) Seni pertunjukan, (11) Penerbitan dan percetakan, (12) Layanan komputer dan piranti lunak, (13) Radio dan televisi, dan (14) Riset dan pengembangan,

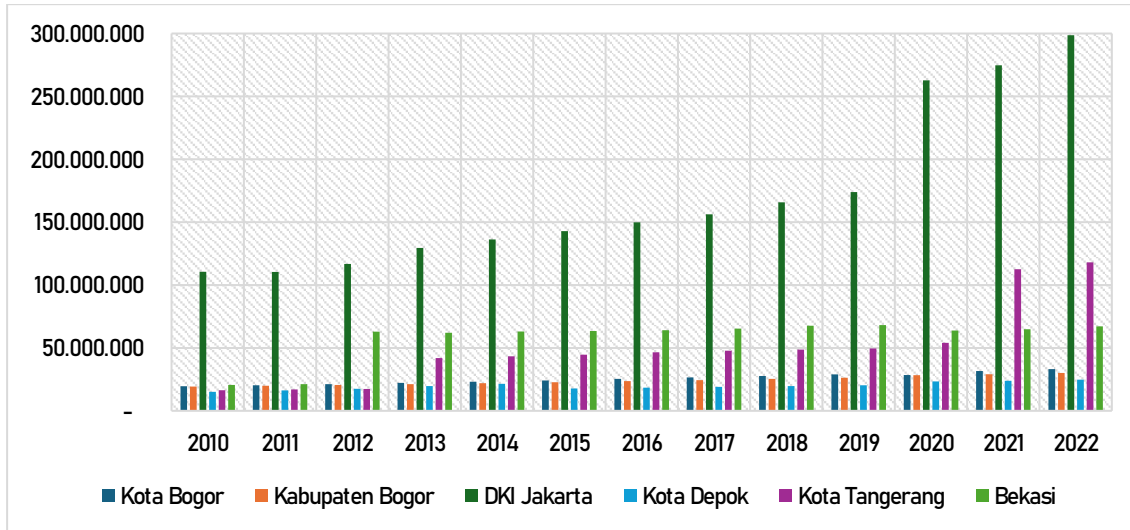
Ada tiga sub sektor unggulan bagi Kota Bogor yang bisa dipilih, yakni Kuliner, Kriya dan Fashion. Perkembangan industri kreatif khususnya bidang feysen dan kuliner di Kota Bogor tidak dapat dipungkiri akibat dari berkembangnya pariwisata di Kota Bogor. Pengembangan industri unggulan dan ekonomi kreatif diharapkan dapat memfasilitasi pelaku industri kreatif, industri kecil dan UMKM baik dalam pengembangan kapasitas sumberdaya pelaku, maupun mengembangkan fasilitas pendukung seperti permodalan, sentra industri kecil menengah dan lain-lain. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri unggulan dan ekonomi kreatif ini adalah terancamnya keberlangsungan usaha pelaku industri akibat produk impor.

2.3.1.2. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

PDRB per kapita menunjukkan pertumbuhan ekonomi penduduk suatu wilayah dan digunakan sebagai parameter makro dalam mengevaluasi pertumbuhan ekonomi rata-rata individu di suatu wilayah. Selain itu, PDRB per kapita juga menjadi komponen utama untuk menghitung indeks ketimpangan antarwilayah yaitu Indeks Williamson. Dengan demikian, tingginya keragaman PDRB per kapita antarwilayah secara tidak langsung menunjukkan adanya disparitas pendapatan antarwilayah. PDRB per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang dihitung dengan membagi antara PDRB dengan jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu.

PDRB Per kapita Kota Bogor dan wilayah pembandingnya dapat dilihat pada Gambar 2.53, dimana PDRB per kapita ini menunjukkan PDRB atas harga konstan per kepala atau per satu orang penduduk.

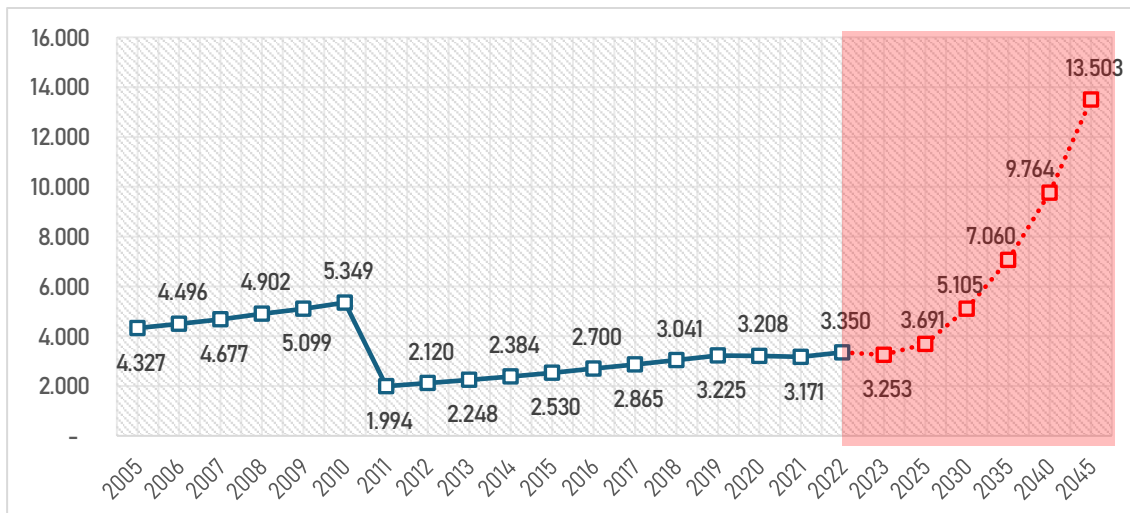
Pada tahun 2010, PDRB per kapita sebesar Rp 19.540.161, meningkat menjadi Rp 33.153.210 per orang pada tahun 2022. Selama 12 tahun terakhir PDRB per kapita Kota Bogor cenderung mengalami peningkatan kecuali tahun 2020, yang sempat turun menjadi Rp 28.449.910 per orang dari Rp 29.040.798 per orang di tahun 2019. Meskipun memiliki pertumbuhan PDRB per kapita yang cenderung meningkat. Namun pada tahun 2022 PDRB per kapita Kota Bogor berada pada posisi ke-5, setelah DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang dengan nilai PDRB per kapita secara berurutan masing-masing sebesar Rp 298.630.000, Rp 118.113.195, Rp 67.108.423, Rp 34.920.972, dan Kota Bogor sebesar Rp 33.153.210.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Gambar 2.53. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kota Bogor dan Wilayah Pemanding Tahun 2010-2022

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat Kota Bogor. PDRB per kapita diharapkan memiliki nilai yang terus meningkat. Pada tahun 2005, PDRB per kapita Kota Bogor mencapai 4.327 juta rupiah dan menurun di tahun 2022 sebesar 3.350 juta rupiah. Namun demikian, hingga akhir 2045 PDRB per kapita Kota Bogor diproyeksikan akan terus meningkat hingga mencapai 13.503 juta rupiah.



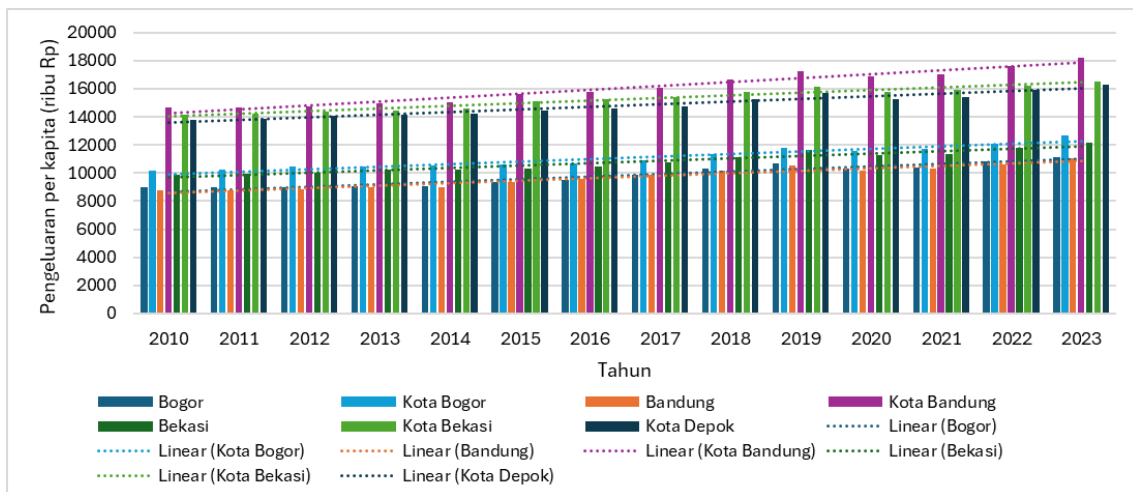
Sumber: BPS Kota Bogor, 2023 (diolah)

Gambar 2.54. Proyeksi PDRB per Kapita Kota Bogor Tahun 2025-2045 (Ribu Rupiah)

2.3.1.3. Pengeluaran Per Kapita

Gambar 2.55 menunjukkan pengeluaran per kapita di Kota Bogor dan beberapa wilayah pembanding. Ditemukan tren pendapatan per kapita yang terus meningkat dari ketujuh daerah yang diamati. Selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2023 tersebut, terlihat bahwa Kota Bandung secara konsisten menjadi daerah dengan pengeluaran per kapita tertinggi. Sementara itu, Kabupaten Bandung ditemukan menjadi daerah dengan pengeluaran per kapita terendah pada kurun waktu tersebut.

Kota Bogor sendiri secara konsisten menunjukkan tingkat pengeluaran per kapita yang selalu lebih rendah dibandingkan rata-rata dari ketujuh daerah. Selama kurun waktu tersebut, rata-rata pengeluaran per kapita Kota Bogor sebesar Rp11.087.000 dengan pengeluaran per kapita tertinggi dan terendah sebesar Rp12.656.000 (2023) dan Rp10.148.000 (2010). Jika dibandingkan dengan Kabupaten Bogor, pengeluaran per kapita di Kota Bogor selalu menunjukkan angka yang lebih tinggi. Namun demikian, hal tersebut tidak serta merta menunjukkan bahwa masyarakat Kota Bogor memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.



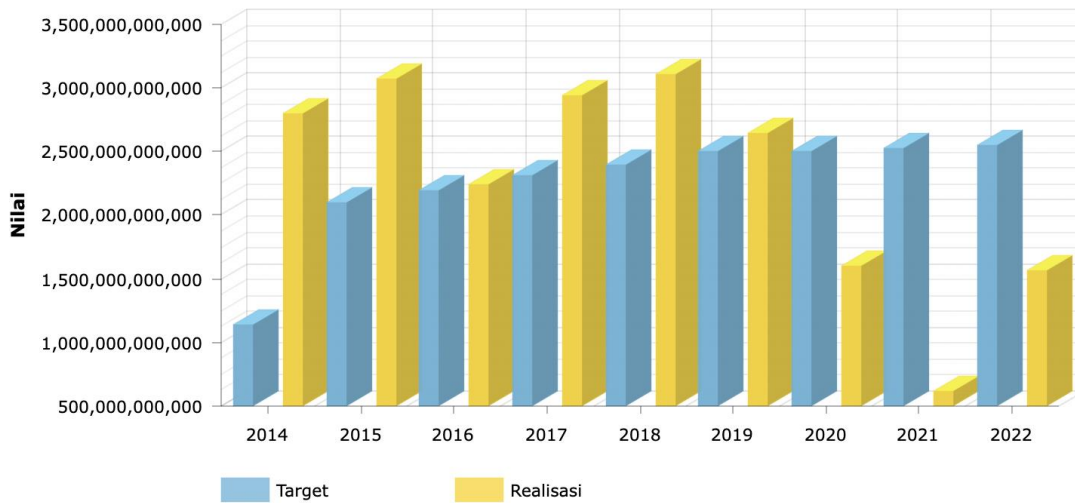
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah)

Gambar 2.55. Pengeluaran per Kapita Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2010-2023

2.3.1.4. Investasi

Realisasi investasi di Kota Bogor cenderung berfluktuasi selama periode 2014-2022, namun memiliki kecenderungan selalu berada diatas target investasi kecuali pada tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan iklim investasi turun untuk semua sektor dan wilayah tidak terkecuali Kota Bogor, begitu pula pada tahun 2021. Pada tahun 2022, walaupun belum mencapai target yang diinginkan, namun realisasi investasi berada diatas tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pada tahun 2022 masih berada pada kondisi peralihan dari adanya pandemi menjadi bebas dari pandemi.

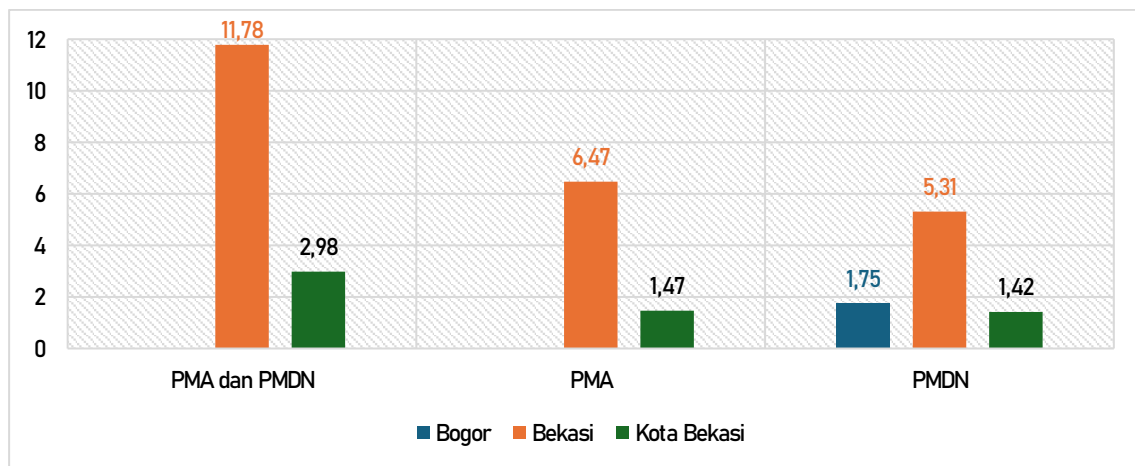
REALISASI INVESTASI



Sumber: DPMPTSP Kota Bogor, 2023

Gambar 2.56. Realisasi Investasi Kota Bogor Tahun 2014-2022

Secara kumulatif, investasi di Kota Bogor belum masuk pada daftar lima daerah dengan nilai investasi tertinggi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022. Pada triwulan IV tahun 2022, provinsi Jawa Barat membukukan investasi baik pada penanaman modal asing maupun dalam negeri sebesar 46,2 triliun rupiah mengalahkan Provinsi DKI Jakarta yang hanya sebesar 34 triliun rupiah. Apabila dibandingkan dengan wilayah DeTaBek, maka Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi menjadi yang terbesar kedua dan ketiga dalam realisasi investasi di Provinsi Jawa Barat baik untuk penanaman modal asing maupun dalam negeri. Selanjutnya Kabupaten Bogor sebagai daerah yang bersebelahan dengan Kota Bogor unggul pada peringkat keempat untuk investasi PMDN.



Sumber: Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2022

Gambar 2.57. Lima (5) Realisasi Investasi Jawa Barat Triwulan IV 2022 Pada Wilayah DeTaBek

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Tabel 2.22. Indikator Urusan Penanaman Modal di Kota Bogor Tahun 2019-2022

Tahun	Uraian		
	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Jumlah Investor	Jumlah perizinan yang dikeluarkan
2019	2.641.381.312.523	1347	1409
2020	1.603.215.590.165	1060	6473
2021	618.472.107.486	1604	6987
2022	1.571.444.371.677	2748	141

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Berdasarkan Tabel 2.22 diatas jumlah investor yang berinvestasi di Kota Bogor pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yakni mencapai 2748 investor. Adapun jumlah nilai investasi baik yang bersumber dari dalam negeri maupun asing trennya berfluktuatif yakni dari tahun 2018-2021 mengalami penurunan, namun meningkat kembali pada tahun 2022 dan mencapai Rp1.571.444.371.677,-. Jumlah perizinan yang dikeluarkan oleh DPMPSTP menunjukkan tren fluktuatif, karena pada tahun 2021 mengeluarkan 6987 izin lalu turun menjadi hanya 141 izin di tahun 2022.

2.3.1.5. Ekonomi Inklusif

Indeks ekonomi inklusif merupakan salah satu indikator untuk menggambarkan daya saing ekonomi daerah yakni alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan baik pada level nasional, provinsi maupun kabupaten. Indeks pembangunan ekonomi inklusif diukur melalui tiga aspek yaitu aspek ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Kriteria penilaian indeks ekonomi inklusif yang digunakan untuk menilai suatu provinsi atau kota/kabupaten adalah (Maryam, et al, 2022):

1. Jika besarnya indeks yang dicapai 1-3 maka termasuk dalam kategori tidak memuaskan
2. Jika besarnya indeks yang dicapai 4-7 maka termasuk dalam kategori memuaskan
3. Jika besarnya indeks yang dicapai 8-10 maka termasuk dalam kategori sangat memuaskan.

Tabel 2.23. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2011-2021

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Bogor	5,47	5,98	5,60	5,68	5,68	5,77	5,82	5,94	5,99	5,86	5,98
Bogor	5,01	5,65	5,13	5,21	5,34	5,48	5,59	5,57	5,78	5,54	5,71
Bekasi	5,42	6,03	5,60	5,66	5,74	5,9	5,93	5,97	6,14	5,91	6,17
Kota Bekasi	5,68	6,34	5,89	5,92	5,72	5,85	5,81	5,93	6,01	5,90	5,96
Kota Depok	5,62	6,18	5,64	5,8	5,78	5,87	5,97	5,93	5,99	5,90	6,13
Tangerang	5,02	5,61	5,22	5,27	5,31	5,43	5,5	5,61	5,65	5,55	5,73
Kota Tangerang	5,34	5,87	5,48	5,51	5,55	5,6	5,6	5,81	5,80	5,71	6,01
Jawa Barat	4,99	4,94	5,28	5,45	5,69	5,89	5,96	6,02	6,18	5,63	6,02

Berdasarkan Tabel 2.23 diketahui bahwa indeks pembangunan ekonomi inklusif Kota Bogor selama periode 2011 hingga 2021 berada pada kategori memuaskan. Nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif Kota Bogor dari tahun 2011 hingga 2021 berfluktuasi dengan nilai paling tinggi pada tahun 2019 sebesar 5,99 dan nilai kedua tertinggi pada tahun 2021 yaitu 5,98. Nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif Kota Bogor pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Bogor,

Kota Bekasi dan Kabupaten Tangerang. Nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif yang tinggi disebabkan oleh tingginya nilai pada tiga pilar pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif. Pada tahun 2021, nilai PDRB per kapita Kota Bogor meningkat dibandingkan tahun 2020 serta nilai indeks pembangunan manusia juga meningkat pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh sebab itu nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif Kota Bogor lebih tinggi pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya dan memiliki tren yang meningkat.

2.3.1.6. Daya Saing Digital

Indeks Daya Saing Digital tahun 2023 dihitung atas tiga sub indeks yaitu input, output dan penunjang. Masing-masing sub indeks terdiri dari tiga pilar, sehingga terdapat Sembilan pilar yang membentuk indeks daya saing digital. Berikut merupakan daftar indikator dari indeks daya saing digital tahun 2023 berdasarkan East venture (2023):

1. Input

- a) Sumberdaya Manusia
 - (1) Jumlah mahasiswa berkemampuan digital
 - (2) Pertumbuhan mahasiswa berkemampuan digital
 - (3) Jumlah dosen program studi terkait digitalisasi
 - (4) Jumlah program studi terkait digitalisasi
 - (5) Indeks literasi digital
- b) Penggunaan TIK
 - (1) Rasio penduduk yang memiliki handphone
 - (2) Rasio rumahtangga yang memiliki komputer
 - (3) Rasio penduduk yang memiliki akses internet
 - (4) Rasio penduduk yang mengakses internet dari rumah
 - (5) Rasio penduduk yang mengakses internet dari kantor
 - (6) Rasio penduduk yang mengakses internet dari sekolah
 - (7) Rasio penduduk yang mengakses internet dengan laptop
 - (8) Rasio penduduk yang mengakses internet dengan handphone
- c) Pengeluaran untuk TIK
 - (1) Rasio rumahtangga yang memiliki pengeluaran untuk TIK
 - (2) Pengeluaran rata-rata rumahtangga untuk TIK
 - (3) Balas jasa dan upah pekerja sektor informasi dan komunikasi
 - (4) Balas jasa dan upah pekerja sektor informasi dan komunikasi per kapita

2. Output

- a) Perekonomian
 - (1) PDRB sektor informasi dan komunikasi
 - (2) Kontribusi PDRB sektor informasi dan komunikasi
 - (3) Pertumbuhan PDRB sektor informasi dan komunikasi
 - (4) PDRB sektor perdagangan, penunjang angkutan, pos dan kurir
 - (5) Kontribusi PDRB sektor perdagangan, penunjang angkutan, pos dan kurir
 - (6) Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, penunjang angkutan, pos dan kurir
 - (7) PDRB sektor jasa keuangan
 - (8) Kontribusi PDRB sektor jasa keuangan

- (9) Pertumbuhan PDRB sektor jasa keuangan
 - b) Kewirausahaan dan Produktivitas
 - (1) Rasio pekerja yang menggunakan internet dalam pekerjaan utama
 - (2) Rasio pekerja yang menggunakan internet dalam pekerjaan untuk komunikasi
 - (3) Rasio pekerja yang menggunakan internet dalam pekerjaan untuk promosi
 - (4) Rasio pekerja yang menggunakan internet dalam pekerjaan untuk via media sosial
 - (5) Rasio pekerja yang menggunakan internet dalam pekerjaan untuk penjualan via website/E-commerce
 - (6) Pinjaman menggunakan teknologi finansial
 - c) Ketenagakerjaan
 - (1) Jumlah tenaga kerja sektor terkait digitalisasi
 - (2) Rasio tenaga kerja sektor terkait digitalisasi
 - (3) Pertumbuhan tenaga kerja sektor terkait digitalisasi
 - (4) Jumlah tenaga kerja golongan rentan digitalisasi (indikator terbalik)
 - (5) Rasio tenaga kerja golongan rentan digitalisasi (indikator terbalik)
 - (6) Pertumbuhan tenaga kerja golongan rentan digitalisasi (indikator terbalik)
3. Penunjang
- a) Infrastruktur
 - (1) Tingkat gangguan listrik (indikator terbalik)
 - (2) Rasio desa yang mendapat sinyal kuat dan sangat kuat
 - (3) Rasio desa yang mendapat sinyal 3G
 - (4) Rasio desa yang mendapat sinyal 4G
 - (5) Rasio rumahtangga dengan sambungan telepon tetap
 - b) Keuangan
 - (1) Indeks inklusi keuangan (komposit)
 - (2) Jumlah agen laku pandai
 - (3) Adopsi e-wallet sebagai metode pembayaran
 - c) Regulasi dan Kapasitas Pemerintah Daerah
 - (1) Angka partisipasi kasar SMA/SMK
 - (2) Angka partisipasi kasar DI-SI
 - (3) Pertumbuhan angka harapan hidup
 - (4) Penurunan tingkat kemiskinan (indikator terbalik)

Berdasarkan tabel indeks daya saing digital di bawah, terlihat bahwa Kota Bogor pada tahun 2023 menempati urutan ke 22 dari 157 kota/kabupaten dengan skor sebesar 51. Peringkat dan skor Kota Bogor masih lebih rendah dibandingkan dengan Kota Depok dan Kota Bekasi yang menempati urutan ke 5 dan 8, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Bogor yang hanya menempati urutan ke-69.

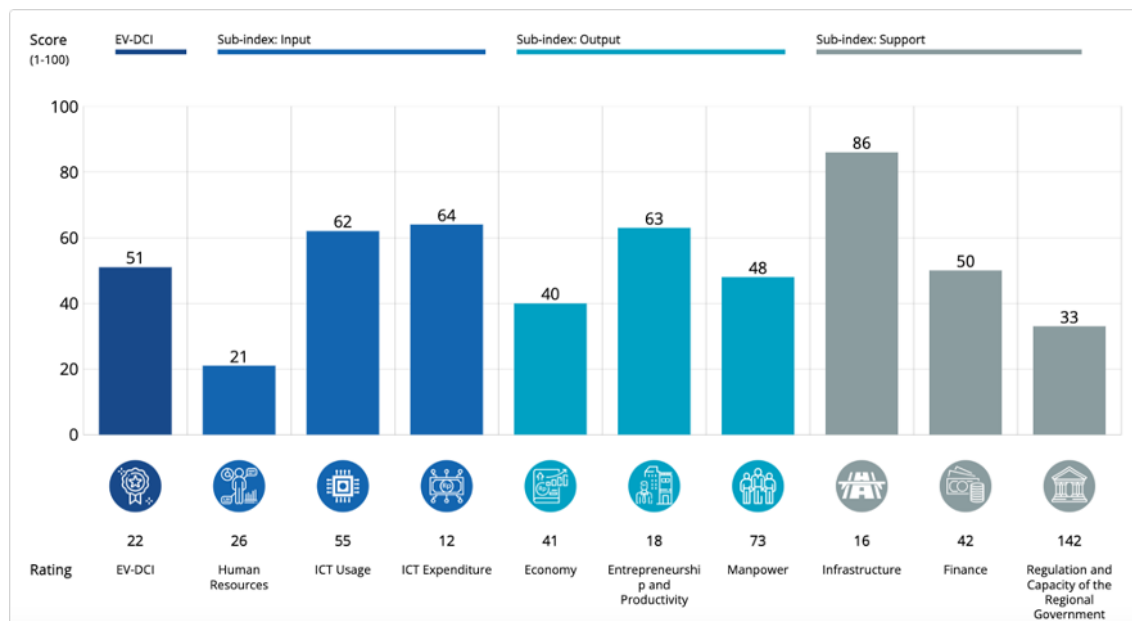
Peringkat Kota Bogor pada tahun 2023 menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang berhasil menempati urutan ke-11 dengan skor sebesar 54,4. Dalam perjalanannya, indeks daya saing digital Kota Bogor mulai tahun 2020 hingga 2023 memiliki nilai yang semakin meningkat kecuali pada tahun 2023 memiliki nilai yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan ada beberapa indikator yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.24. Indeks Daya Saing Digital Kota Bogor dan Daerah Sekitarnya Tahun 2020-2023

Kota/Kabupaten	2020		2021		2022		2023	
	Skor	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor	Peringkat
Kota Bogor	44,1	16	52,6	20	54,4	11	51	22
Bogor	43,4	18	45,1	60	46	58	44,1	69
Bekasi	41,7	29	47	47	46	56	45,7	57
Kota Bekasi	49,5	6	61,5	3	60,3	4	55,8	8
Kota Depok	49,8	5	58,4	7	59,5	5	58	5
Tangerang	40,9	38	45,6	57	46	57	44,2	67
Kota Tangerang	49,2	7	57,8	8	53	19	52,9	16

Sumber: East Venture 2023

Berdasarkan indikator yang dihitung dalam indeks daya saing digital, pada indikator input pengeluaran untuk TIK memiliki skor yang tertinggi dan sumberdaya manusia memiliki skor yang terendah. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada indikator input penggunaan TIK memiliki skor yang paling tinggi. Pada indikator output, kewirausahaan dan produktivitas memiliki skor tertinggi, sedangkan perekonomian memiliki skor yang terendah. Pada tahun 2022, pada indikator output, ketenagakerjaan yang memiliki skor terendah. Pada indikator penunjang, infrastruktur menempati posisi pertama dengan skor 86, sedangkan regulasi dan kapasitas pemerintah daerah merupakan yang terendah. Hal ini berbeda pada tahun 2022 dimana keuangan menjadi bagian dari indikator penunjang yang memiliki skor paling rendah.



Sumber: East Venture 2023

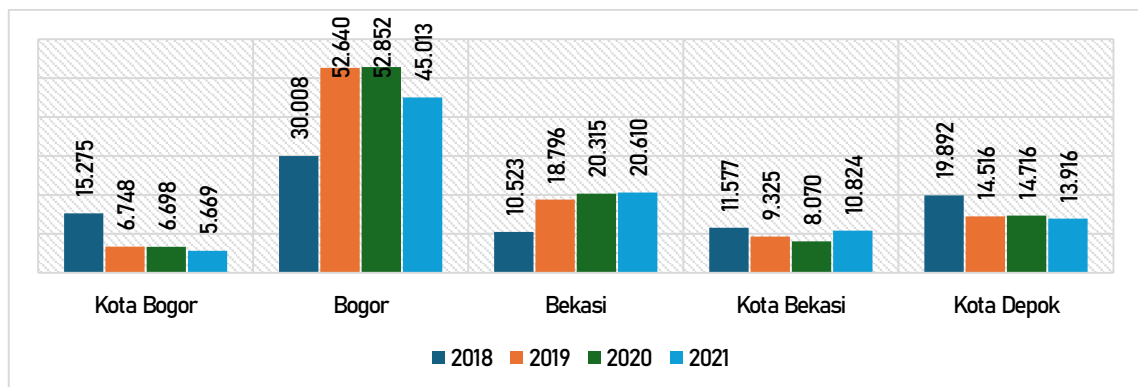
Gambar 2.58. Indeks Daya Saing Digital Kota Bogor 2023 Berdasarkan Indikator

2.3.1.7. Produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Koperasi dan BUMD

Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Bogor memiliki kecenderungan yang menurun sejak tahun 2019 hingga 2021. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah UMKM di Kabupaten Bogor yang memiliki jumlah cukup tinggi sejak tahun 2019, walaupun pada tahun 2021 menurun. Banyaknya jumlah UMKM di Kabupaten Bogor disebabkan Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki UMKM terbanyak.

Pemerintah Kota Bogor berupaya untuk meningkatkan jumlah UMKM dengan berbagai cara diantaranya adalah bekerjasama dengan pelaku usaha besar, bekerjasama dalam hal memasarkan produk UMKM dengan pusat perbelanjaan yang ada di Kota Bogor, membantu dalam memperoleh sertifikasi halal bagi UMKM yang bergerak di bidang usaha makanan, minuman, dan kosmetik, mengadakan berbagai kegiatan pelatihan seperti kewirausahaan, *digital marketing*, desain, teknologi dan pemasaran. Saat ini produk UMKM Kota Bogor telah dipasarkan tidak hanya di dalam negeri melainkan juga sudah merambah dunia internasional seperti Jepang, Korea dan Selandia Baru.

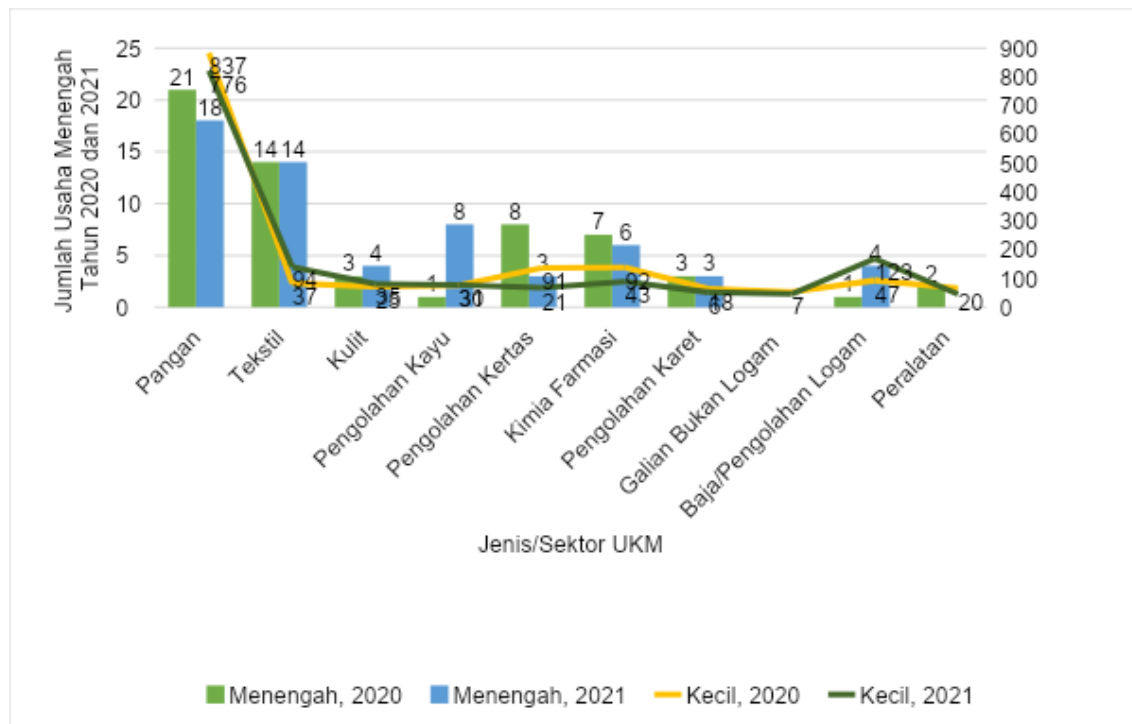
Pada tahun 2021 jumlah UMKM sedikit berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi yang menyebabkan banyak warga yang tinggal di rumah dan bekerja dari rumah, sehingga banyak warga yang menawarkan produk yang dihasilkan dari usaha rumahan melalui pemanfaatan teknologi digital. Hal ini dilakukan untuk menjaga jarak dari orang sekitar serta lebih efisien karena dapat mengurangi mobilitas. Strategi lain yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor untuk meningkatkan jumlah UMKM dengan merapihkan lokasi yang akan digunakan sebagai tempat pemasaran produk UMKM.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Gambar 2.59. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018-2021

Gambar 2.59, dalam hal ini menunjukkan bahwa industri kecil dan menengah di Kota Bogor selama tahun 2020 mengalami peningkatan di tahun 2021. Pada dua periode pengamatan tersebut, terlihat bahwa untuk industri kecil didominasi oleh industri pangan, dengan share masing-masing sebesar 69,51 persen dan 68,73 persen pada tahun 2020 dan 2021. Sementara itu, untuk industri menengah, juga ditemukan dominasi oleh industri pangan, meskipun pangsaanya tidak sebesar pada industri kecil. Proporsi industri pangan menengah pada tahun 2020 dan 2021 secara berurutan sebesar 35 persen dan 30 persen. Untuk keseluruhan total industri kecil dan menengah ditemukan bahwa pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan negatif (pengurangan jumlah usaha) sebesar -5,93 persen. Penurunan jumlah usaha tersebut ditemukan terjadi pada usaha skala kecil dari 1.204 usaha pada tahun 2020 menjadi 1.129 pada tahun 2021, sementara jumlah usaha menengah tidak berubah.



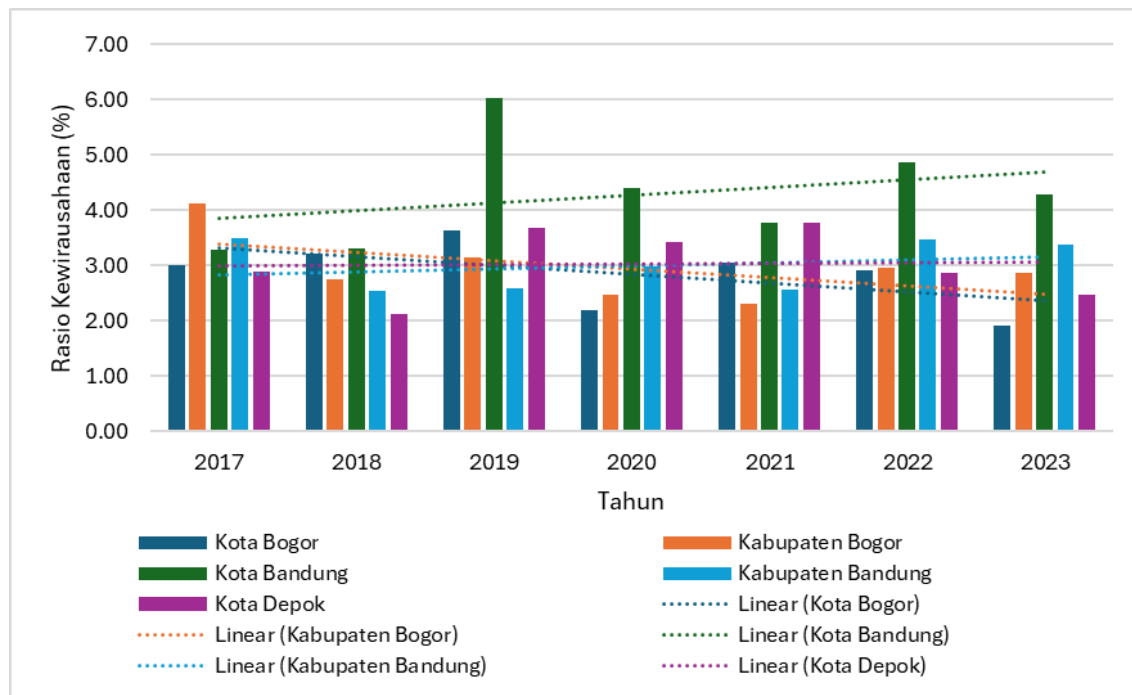
Sumber: Open Data Kota Bogor (2024)

Gambar 2.60. Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Wilayah Kota Bogor Tahun 2020 dan 2021

Di tahun 2022, terlihat bahwa UMKM di Kota Bogor kembali mengalami peningkatan dari segi jumlah secara keseluruhan. Berdasarkan persebaran wilayahnya, diketahui bahwa Sebagian besar UMKM berada di Kecamatan Bogor Selatan yang mencapai 21,89 persen dari keseluruhan jumlah UMKM di Kota Bogor. Sementara itu, Kecamatan Tanah Sareal menjadi kecamatan dengan jumlah UMKM paling rendah di Kota Bogor. Sejalan dengan temuan pada Gambar 2.60, pada Tabel 2.25 juga terlihat bahwa di seluruh kecamatan, komposisi UMKM-nya didominasi oleh sektor makanan. Dalam hal ini, sebagian besar UMKM pangan berada di wilayah Kecamatan Tanah Sareal.

Tabel 2.25. Sebaran UMKM di Kota Bogor Tahun 2022

Wilayah	Jumlah UMKM	Makanan	Pangan	Gas	Kendaraan	Kerajinan	Fashion	Kantin Sekolah	Kuliner	Otomotif	Pendidikan	PKL	Teknologi Internet	Rumah/Warung Makan	Agrobisnis	Minuman	Jasa	Kesehatan	Warung Sembako	Lainnya
Bogor Selatan	2.088	174	5	5	1	87	29	0	58	3	2	0	9	32	0	11	22	2	1	1.647
Bogor Timur	1.027	45	6	0	0	15	19	0	32	4	0	0	2	6	3	3	4	1	0	887
Bogor Tengah	2.213	172	9	1	0	16	30	0	40	1	2	1	6	20	1	3	3	5	0	1.903
Bogor Barat	1.649	225	20	2	2	58	39	0	71	3	0	1	6	28	c	16	23	7	2	1.141
Bogor Utara	1.725	148	7	0	2	40	33	2	67	1	1	2	6	10	7	13	24	3	2	1.357
Tanah Sareal	834	230	16	2	1	59	31	0	0	1	2	0	7	22	2	14	25	2	2	351
Total	9.536	994	63	10	6	275	181	2	268	13	7	4	36	118	18	60	101	20	7	7.286



Sumber: BPS Kota Bogor, BPS Kab. Bogor, BPS Kota Bandung, BPS Kab. Bandung, BPS Kota Depok (2024, diolah)

Gambar 2.61. Rasio Kewirausahaan Kota Bogor dan Wilayah Pemandang Tahun 2017 - 2023

Rasio kewirausahaan dihitung dengan menjumlahkan total penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu dengan status pekerjaan utama berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan kemudian dibagi dengan jumlah angkatan kerja. Gambar 2.61 menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2023, rasio kewirausahaan Kota Bogor mengalami tren menurun. Penurunan rasio kewirausahaan juga ditemukan pada Kabupaten Bogor, sementara Kota Depok dan Kabupaten Bandung menunjukkan tren stagnan. Hanya Kota Bandung yang menunjukkan peningkatan rasio kewirausahaan pada kurun waktu tersebut.

Rata-rata rasio kewirausahaan di Kota Bogor pada kurun waktu tersebut sebesar, 2,85 persen. Artinya, hanya ada sebesar 285 orang wirausahawan dari 1000 orang penduduk Kota Bogor yang termasuk dalam angkatan kerja. Rasio kewirausahaan Kota Bogor tertinggi dan terendah masing-masing sebesar 3,63 persen dan 1,92 persen, yang masing-masing terdapat di tahun 2019 dan 2023. Menurunnya rasio kewirausahaan di Kota Bogor perlu menjadi perhatian bagi pemerintah mengingat makin tingginya kebutuhan terhadap lapangan kerja seiring dengan meningkatnya penduduk usia produktif yang masuk dalam angkatan kerja. Ketersediaan lapangan kerja tersebut salah satunya dapat diperluas melalui peningkatan rasio kewirausahaan di Kota Bogor. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Bogor dapat melakukan *benchmarking* terhadap upaya yang dilakukan di Kota Bandung yang secara konsisten menunjukkan rasio kewirausahaan paling tinggi dengan tren meningkat. Upaya tersebut ditujukan untuk meningkatkan iklim wirausaha dan kemudahan melakukan usaha di Kota Bogor.

2.3.1.8. Ekspor Barang dan Jasa

Dibandingkan dengan beberapa kota pembanding yang dianalisis dalam laporan, terlihat bahwa Kota Bogor secara konsisten menjadi kota dengan *share* ekspor terhadap PDRB ADHB paling rendah kedua setelah Kota Bekasi selama periode 2013 - 2022. Dalam hal ini, *share* ekspor Kota Bogor dan

Bekasi bernilai negatif terhadap PDRB ADHB tahun pengamatan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2022, baik Kota Bogor maupun Kota Bekasi lebih banyak melakukan impor dibandingkan ekspor. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi pemerintah kedua kota, mengingat tingginya impor yang dilakukan menunjukkan bahwa ada potensi pasar yang makin lama makin besar namun belum dapat dipenuhi oleh produksi lokal, Pengembangan industri maupun usaha berorientasi ekspor maupun substitusi impor dapat perlu makin diperhatikan.

Tabel 2.26. Share Net Ekspor terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2013 – 2022

Wilayah	Share Net Ekspor terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Persen)									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bogor	-46,26	-46,75	-49,74	-49,70	-52,12	-51,64	-50,28	-46,06	-42,66	-42,67
Kabupaten Bogor	1,38	1,55	0,82	1,94	2,99	3,87	4,36	8,07	9,90	9,84
Kota Tangerang	9,56	15,49	17,23	18,03	17,61	15,23	13,36	-2,29	-3,24	4,47
Kabupaten Tangerang	16,88	21,02	22,35	2,32	2,58	2,85	3,26	3,11	4,86	5,76
Kota Bekasi	-61,10	-61,08	-60,79	-60,31	-59,42	-59,36	-59,60	-55,14	-50,30	-49,39
Kabupaten Bekasi	35,69	34,92	34,06	32,22	32,62	32,03	32,33	37,51	37,76	37,00

Sumber: BPS Kota Bogor, BPS Kabupaten Bogor, BPS Kota Tangerang, BPS Kabupaten Tangerang, BPS Kota Bekasi, BPS Kabupaten Bekasi

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan pondasi pembangunan perekonomian daerah karena terlibat dalam menghubungkan kebutuhan akan tenaga kerja dengan sektor-sektor produktif dalam perekonomian. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Salah satu upaya peningkatan SDM saat ini lebih difokuskan pada pemberian kesempatan seluasluasnya kepada penduduk untuk mengecap pendidikan. Oleh sebab itu pemerintah berusaha secara konsisten berupaya meningkatkan SDM melalui jalur pendidikan.

Keterlibatan sumber daya manusia dapat langsung berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Daya saing sumber daya manusia didekati dengan beberapa indikator seperti indeks pendidikan, rata-rata lama sekolah, indeks pembangunan literasi masyarakat, daya serap tenaga kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan angka ketergantungan.

2.3.2.1. Pendidikan

Indeks pendidikan adalah cerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indeks pendidikan mencerminkan pembangunan manusia di suatu wilayah yang diukur melalui indeks pembangunan manusia (IPM). Indikator yang digunakan untuk mengukur indeks pendidikan adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sebelumnya indikator yang digunakan adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, namun mengikuti perhitungan yang dilakukan oleh BPS dalam menghitung komponen pembentuk IPM pada aspek pendidikan, maka angka melek huruf telah diganti menjadi harapan lama sekolah.

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal (BPS 2015). Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur

tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Harapan Lama Sekolah dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Pada tahun 2022 di Kota Bogor persentase penduduk yang masih sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun (kelompok usia SD/MI) sebesar 99,95 persen, kelompok umur 13-15 tahun (kelompok usia SMP/MTs) sebesar 94,82 persen, kelompok umur 16-18 tahun (kelompok usia SMA/MA) sebesar 64,79 persen. Masih terdapat penduduk yang tidak/belum pernah bersekolah pada kelompok usia jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs). Sebanyak 0,05 persen penduduk usia 7-12 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah dan 5,18 persen pada kelompok usia 13-15 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah.

Berdasarkan data indeks pendidikan pada Tabel 2.27, diketahui bahwa indeks pendidikan Kota Bogor pada tahun 2022 merupakan yang tertinggi ketiga setelah Kota Bekasi dan Kota Depok yaitu sebesar 72,74. Semakin tinggi nilai indeks pendidikan, maka semakin baik kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan pondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Secara umum, nilai indeks pendidikan Kota Bogor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2010 hingga 2022 dengan tren yang meningkat.

Tabel 2.27. Indeks Pendidikan di Wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi Tahun 2010-2022

Wilayah	Indeks Pendidikan												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bogor	63,41	64,34	65,28	66,81	67,33	68,35	70,41	71,44	71,50	71,62	71,68	72,38	72,74
Bogor	51,55	52,50	54,53	57,11	58,60	58,68	59,57	60,66	60,82	62,27	62,33	62,39	62,52
Bekasi	54,31	56,72	58,21	59,53	60,51	62,02	63,34	64,48	65,72	65,80	66,76	67,39	68,18
Kota Bekasi	67,26	69,09	69,41	71,64	72,04	72,80	73,35	73,96	75,19	75,86	76,09	76,87	77,33
Kota Depok	68,11	68,68	69,04	71,53	72,21	73,31	74,37	74,66	74,78	75,31	76,27	76,89	76,96

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Tren indeks pendidikan yang meningkat dapat dioptimalkan dengan menjalankan beberapa strategi yaitu melalui jalur pendidikan formal maupun informal. Jalur pendidikan formal dapat ditingkatkan dengan peningkatan infrastruktur pendidikan serta penuntasan program wajib belajar yang diusung oleh pemerintah pusat. Sementara itu jalur pendidikan informal dapat dilakukan melalui pembangunan jalur alternatif sebagai akselerator yaitu dengan membuka program kejar Paket A, Paket B dan Paket C. Sementara strategi lain yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan anggaran belanja pemerintah pada pos pendidikan, sehingga dapat pemeratakan dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan memberikan beasiswa kepada masyarakat yang tidak dapat mengakses fasilitas pendidikan.

2.3.2.2. Literasi Masyarakat

Indeks pembangunan literasi masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Indeks pembangunan literasi masyarakat diperlukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional RI Tahun 2020-2024. Terdapat tujuh unsur pembangunan literasi masyarakat yaitu:

1. Pemerataan layanan perpustakaan
2. Ketercukupan koleksi perpustakaan
3. Ketercukupan tenaga perpustakaan
4. Tingkat kunjungan masyarakat per hari
5. Jumlah perpustakaan ber-SNP
6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/promosi
7. Anggota perpustakaan

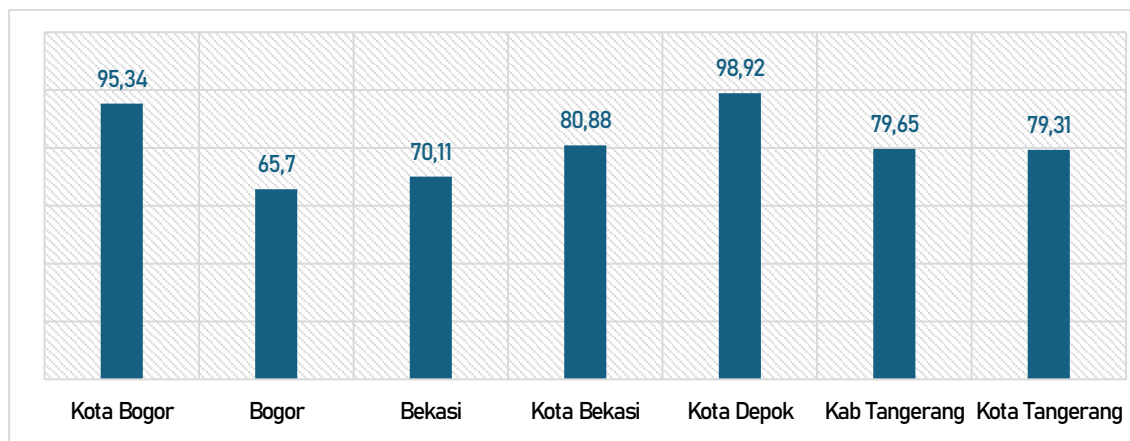
Berdasarkan agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategis pembangunan nasional, maka yang berkaitan dengan pembangunan perpustakaan, literasi dan pembudayaan kegemaran membaca adalah agenda ke-4 (empat), yaitu "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan" dengan sasaran strategis, yaitu (Perpustakaan Nasional, 2020):

1. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, melalui revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, dan kerjasama antar warga, mencakup: pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa.
2. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter, melalui:
 - a. Peningkatan budaya literasi, mencakup: (i) pengembangan budaya gemar membaca; (ii) pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi; (ii) peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial;
 - b. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi, mencakup: (i) pengembangan mitra perpustakaan (library supporter); (ii) pengembangan inovasi sosial yang didukung dari pendanaan filantropi.

Indeks pembangunan literasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang diturunkan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi masyarakat dan menyediakan akses terhadap masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam literasi. Peningkatan literasi masyarakat dilakukan melalui kunjungan ke perpustakaan, oleh karena itu perpustakaan memiliki strategi agar peningkatan literasi dapat terwujud. Program perpustakaan dan literasi merupakan strategi dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan ditandai dengan meningkatnya nilai berbudaya literasi. Maka dimensi pembangunan bidang perpustakaan dibangun dalam dua dimensi yaitu peningkatan kegemaran membaca masyarakat dan pembangunan literasi masyarakat, yang diukur melalui: (1) ketersediaan infrastruktur layanan perpustakaan yang cukup; (2) ketersediaan bahan bacaan yang berkualitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia; (3) ekstensifikasi dan perluasan akses layanan perpustakaan di seluruh wilayah dalam upaya menjamin ketersediaan dan pemerataan koleksi bahan perpustakaan di semua jenis perpustakaan di seluruh

wilayah Indonesia; (4) ketersediaan dan pemerataan tenaga perpustakaan. baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan dan seluruh wilayah Indonesia; (5) kampanye dan promosi perpustakaan dan keterlibatan masyarakat di perpustakaan. Melalui pengembangan dan pembinaan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran yang integrative, komprehensif, tematik, dan spasial diharapkan akan terwujud pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia serta perwujudan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan sehingga terbentuk masyarakat yang perpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

Berdasarkan Gambar 2.49 dapat terlihat bahwa indeks literasi masyarakat di Kota Bogor merupakan kedua yang tertinggi pada tahun 2022 setelah Kota Depok yaitu sebesar 95,34. Hal ini berarti literasi masyarakat di Kota Bogor telah cukup baik bila dibandingkan dengan wilayah lain seperti Kabupaten Bogor yang hanya memiliki nilai 65,7, dan Kabupaten Bekasi dengan nilai sebesar 70,11.

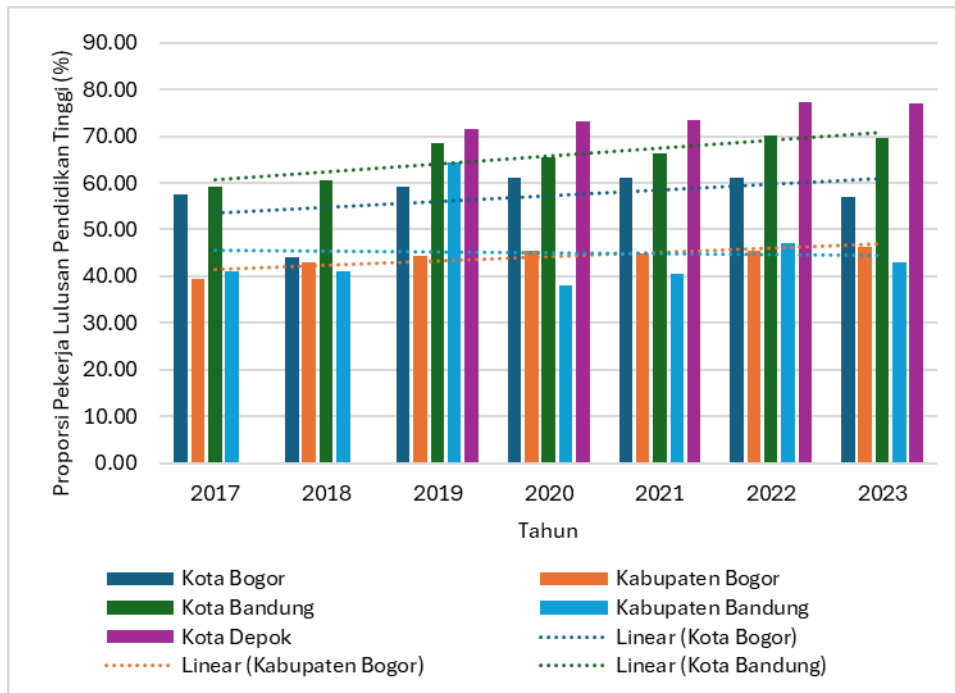


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah)

Gambar 2.62. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022 di Wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi

2.3.2.3. Kualitas Pendidikan Pekerja

Proporsi pekerja berkualifikasi pendidikan tinggi dihitung dengan menjumlahkan total penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu dengan tingkat pendidikan terakhir sekolah menengah atas/kejuruan dan perguruan tinggi dan kemudian dibagi dengan jumlah pekerja. Gambar 2.63 menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2023, proporsi pekerja berkualifikasi pendidikan tinggi di Kota Bogor maupun empat wilayah lainnya mengalami tren menurun. Selama lima tahun terakhir, Kota Depok menunjukkan proporsi pekerja berkualifikasi pendidikan tinggi tertinggi dibandingkan keempat daerah lain.



Sumber: BPS Kota Bogor, BPS Kab. Bogor, BPS Kota Bandung, BPS Kab. Bandung, BPS Kota Depok

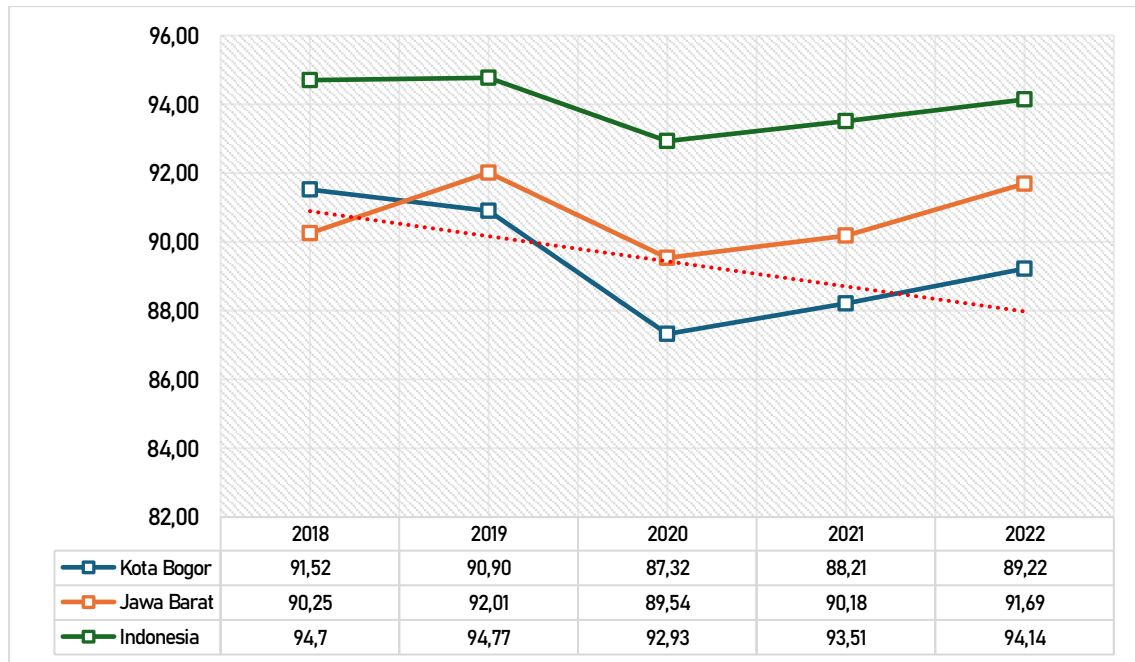
Gambar 2.63. Proporsi Pekerja yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kota Bogor dan Wilayah Pemandang Tahun 2017 - 2023

Rata-rata proporsi pekerja berkualifikasi pendidikan tinggi Kota Bogor selama tujuh terakhir sebesar 57,26 persen. Hal tersebut berarti bahwa hanya sekitar 5.726 orang pekerja berkualifikasi pendidikan tinggi untuk setiap 10.000 orang total pekerja di Kota Bogor. Rata-rata Kota Bogor tersebut jauh tertinggal dibanding Kota Depok dengan rata-rata sebesar 74,42 persen maupun Kota Bandung dengan rata-rata sebesar 65,65 persen. Dalam hal ini, upaya peningkatan kualitas pekerja harus dilakukan, mengingat kualitas pekerja merupakan salah satu faktor utama penentu produktivitas. Terlebih lagi, Kota Bogor merupakan salah satu kota yang kemudian masuk sebagai wilayah aglomerasi dengan peluang pengembangan dan prospek ekonomi yang tinggi. Jika pekerja di Kota Bogor memiliki kualifikasi pendidikan tinggi yang makin besar, hal tersebut tentu akan mendorong daya saing pekerja Kota Bogor.

2.3.2.4. Tenaga Kerja

Pada Gambar 2.64, terlihat bahwa daya serap tenaga kerja di Kota Bogor adalah yang terendah bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia di tahun 2022. Daya serap tenaga kerja tahun 2022 di Kota Bogor sebesar 89,22 persen, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya sebesar 88,21 persen, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 91,52 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 adalah masa pemulihan pasca pandemi Covid-19, sehingga dibutuhkan beberapa penyesuaian untuk kembali kepada kondisi semula.

Berdasarkan analisis tren yang dilakukan seperti tampak pada Gambar 2.64, bahwa daya serap tenaga kerja mengalami tren penurunan. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 daya serap tenaga kerja menurun cukup tajam. Pada tahun 2021 dan 2022 daya serap tenaga kerja kembali meningkat seiring dengan kondisi perekonomian yang semakin membaik di semua sektor.



Sumber: BPS, 2023

Gambar 2.64. Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2018-2022

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Berdasarkan data pada Tabel 2.23, TPAK Kota Bogor pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dan juga merupakan nilai TPAK kedua tertinggi setelah Kabupaten Bekasi yaitu sebesar 64,81. Nilai TPAK Kota Bogor memiliki tren yang meningkat walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 karena adanya pandemi, namun kembali meningkat pada tahun 2021 hingga 2023. Tingginya nilai TPAK mencerminkan bahwa penawaran tenaga kerja di Kota Bogor cukup tinggi untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tabel 2.28. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi tahun 2018-2023

Wilayah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bogor	63,11	63,68	60,81	61,77	64,21	64,81
Bogor	62,75	65,41	62,65	62,55	63,75	64,22
Bekasi	61,43	64,02	64,23	65,87	65,41	65,00
Kota Bekasi	65,23	65,66	64,74	64,76	65,33	64,65
Kota Depok	62,51	64,96	63,96	62,62	63,35	62,76
Tangerang	63,01	66,07	65,43	63,94	67,05	
Kota Tangerang	63,01	64,95	64,97	64,52	66,08	

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

2.3.2.5. Ketergantungan Penduduk

Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun) (BPS, 2020). Rasio Ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Semakin tinggi persentase Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif. Sebaliknya, jika semakin rendah persentase Rasio Ketergantungan, maka semakin rendah pula beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk usia non produktif.

Penduduk muda atau penduduk yang berusia dibawah 15 tahun dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih bergantung kepada orang tua atau orang lain yang menanggung nya. Demikian pula penduduk berusia 65 tahun atau lebih dianggap tidak produktif lagi karena sudah melewati masa pensiun kerja. Penduduk berusia 15 sampai 64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif dan memiliki potensi ekonomi dalam pembangunan.

Pada Tabel 2.29 angka ketergantungan menunjukkan bahwa nilai angka ketergantungan Kota Bogor dari tahun 2010 hingga 2022 mengalami penurunan, namun apabila dibandingkan dengan Kabupaten Bogor, maka angka ketergantungan Kota Bogor masiih lebih tinggi. Turunnya angka ketergantungan berarti beban penduduk usia produktif untuk menanggung usia non produktif semakin rendah. Pada tahun 2022, angka katergantungan Kota Bogor sebesar 42,62 yang artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kota Bogor mempunyai beban tanggungan sebanyak 42 hingga 43 jiwa penduduk non produktif. Turunnya angka ketergantungan berarti kesejahteraan masyarakat semakin meningkat sebagai dampak dari kemajuan pembangunan sosial ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan untuk terus mengurangi nilai angka katergantungan dengan pengendalian jumlah penduduk dan membuka lapangan kerja, perbaikan fasilitas kesehatan, serta perbaikan pendapatan masyarakat.

Tabel 2.29. Angka Ketergantungan Menurut Wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, Tahun 2018-2023

Kabupaten/ Kota	Angka Ketergantungan Menurut Kab/Kota												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bogor	52,34	51,78	51,25	50,77	50,35	50,00	49,67	49,37	49,14	48,96	48,83	-	41,25
Bekasi	45,62	45,18	44,77	44,39	44,06	43,78	43,49	43,24	43,04	42,88	42,75	-	39,64
Kota Bogor	44,77	44,29	43,83	43,43	43,08	42,78	42,51	42,28	42,11	41,99	41,91	-	42,62
Kota Bekasi	39,69	39,23	38,79	38,39	38,04	37,73	37,43	37,15	36,93	36,74	36,58	-	38,63
Kota Depok	42,84	42,37	41,91	41,50	41,14	40,84	40,54	40,28	40,07	39,91	39,78	-	40,94
Tangerang	47,00	46,58	46,19	45,86	45,61	45,42	45,26	45,13	45,06	45,00	44,91	-	-
Kota Tangerang	39,81	39,44	39,09	38,79	38,54	38,34	38,14	37,97	37,84	37,72	37,58	-	-

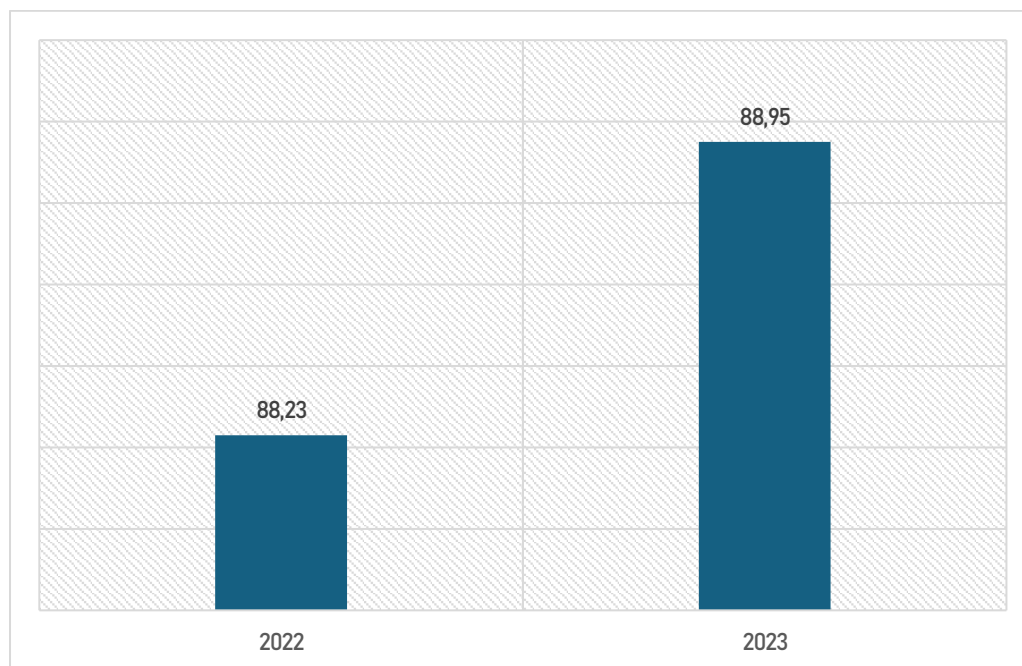
2.3.3. Daya Saing Infrastruktur

Jalan merupakan urat nadi perekonomian karena jalan menghubungkan pusat-pusat produksi menuju pusat-pusat distribusi. Jalan memiliki keistimewaan karena aksesnya langsung masuk ke wilayah tempat tinggal, dapat mengakselerasi kecepatan dan mengurangi waktu tempuh,

mempunyai pilihan-pilihan alternatif rute yang sangat banyak, serta tidak diperlukan biaya untuk menggunakannya. Daya saing fasilitas/ infrastruktur wilayah Kota Bogor didekati dengan beberapa indikator seperti panjang jalan menurut tingkat kewenangan pemerintah dan persentase panjang jalan menurut kondisi jalan.

2.3.3.1. Kemantapan Jalan

Jalan merupakan salah satu bagian infrastruktur yang memiliki arti penting dalam konektivitas antar wilayah. Jalan mantap merupakan jalan kota dalam kondisi baik dan sedang. Berdasarkan gambar dibawah, jalan berkondisi mantap pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 88,95 persen. Hal ini disebabkan karena adanya upaya pemerintah dalam merawat serta membangun jalan.



Sumber: Dinas PUPR Kota Bogor 2023

Gambar 2.65. Persentase Jalan Berkondisi Mantap Tahun 2022–2023 di Kota Bogor

Kondisi jalan baik dan sedang di Kota Bogor yang meningkat persentasenya pada tahun 2023 dikarenakan adanya jalan yang dibangun, ditingkatkan, direkonstruksi dan dipelihara oleh Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2023. Berdasarkan data yang ada pada tabel dibawah, panjang jalan yang dibangun yaitu 425 meter, ditingkatkan kualitasnya sehingga berada pada kondisi yang baik sepanjang 3.034 meter dan panjang jalan yang dipelihara sebesar 548.057 meter.

Tabel 2.30. Panjang Jalan Menurut Jenis Output di Kota Bogor Tahun 2023 (meter)

Dibangun	Ditingkatkan	Direkonstruksi	Dipelihara
425	3.034	18.545	548.057

2.3.3.2. Konektivitas Antar Wilayah

Berdasarkan dari kewenangannya pada tahun 2022 sekitar 821.401 km menjadi kewenangan Kota Bogor dan sisanya menjadi kewenangan negara serta provinsi yang menghubungkan antarprovinsi seperti Provinsi DKI Jakarta dan Banten. Berdasarkan Tabel 2.31, tren panjang jalan yang diampu oleh Kota Bogor memiliki tren meningkat setiap tahunnya.

Tabel 2.31. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kota Bogor (km)

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Negara	29.020	29.019	29.019	29.019
Provinsi	10.510	10.508	8.989	9.559
Kabupaten/Kota	758.910	758.912	820.963	821.401,84
Jumlah	798.430	798.439	858.971	859.979,84

Sumber: BPS Kota Bogor, 2023

Upaya perbaikan kualitas jalan menjadi perhatian oleh Pemerintah Kota Bogor, karena kualitas jalan sangat memengaruhi waktu tempuh dan keselamatan. Kondisi jalan berdasarkan Tabel 2.32 di Kota Bogor dalam kategori sedang sebanyak 48,7 persen pada tahun 2022, akan tetapi masih terdapat jalan dengan kondisi rusak walaupun dalam persentase yang kecil yaitu 2,12 persen. Kondisi jalan yang masih rusak perlu untuk segera diperbaiki agar perjalanan menjadi lebih lancar. Selama periode tahun 2019 hingga 2022, tren kondisi jalan yang baik cenderung menurun dan hal ini perlu segera diperbaiki. Sementara itu, kondisi jalan yang sedang mengalami tren peningkatan setiap tahunnya sedangkan kondisi jalan rusak mengalami tren penurunan yang mengindikasikan semakin sedikitnya kondisi jalan yang rusak di Kota Bogor.

Tabel 2.32. Persentase Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Bogor Tahun 2019-2022

Status	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Baik	48,91%	48,91%	40,02%	39,53%
Sedang	40,99%	40,99%	48,19%	48,70%
Rusak	10,10%	10,10%	2,15%	2,12%
Rusak Ringan	0,00%	0,00%	9,65%	9,65%

Sumber: BPS Kota Bogor, 2023

Transit Oriented Development (TOD) menurut Calthorpe (1993) adalah sebuah komunitas bangunan mix-used yang mendorong masyarakat untuk tinggal dan beraktivitas di area kawasan yang memiliki fasilitas transportasi umum dan menurunkan kebiasaan masyarakat mengendarai mobil pribadi. Untuk kasus di Indonesia, pengembangan TOD berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2017 yaitu membagi tiga tipologi kawasan berorientasi transit: TOD skala kota, TOD skala sub kota dan TOD skala lingkungan. Kawasan TOD skala kota berada pada kawasan pusat kegiatan kota, karakteristik kawasan sebagai pusat perekonomian, titik simpul memiliki pergantian moda dengan intensitas tinggi seperti stasiun dan terminal. Kawasan dengan tipologi skala kota dicirikan kawasan dilayani dan melayani transportasi umum dalam kota, antar daerah kabupaten/kota dan melayani pergerakan Provinsi. Kawasan TOD skala sub kota merupakan kawasan sub pelayanan kota dan cenderung berada di dekat batas terluar administrasi kota. TOD sub kota memiliki karakteristik sebagai fungsi pusat perekonomian sekunder, dilayani transportasi umum memiliki kecenderungan sebagai feeder dengan intensitas sedang hingga tinggi. TOD skala lingkungan merupakan kawasan yang berada pada kawasan pusat pelayanan lingkungan sebagai fungsi pusat perekonomian lokal, kawasan ini melayani dan dilayani transportasi umum dengan lingkup dalam kota dan sebagai penghubung kawasan luar administrasi kota.

Kota Bogor memiliki rencana pembangunan TOD berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021. Pada pasal 9 ayat (9) huruf f strategi untuk peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan dilakukan dengan mengembangkan konsep TOD pada titik pertemuan antar moda. Pada pembangunan titik transit konsep TOD Kota Bogor juga memperhatikan prasarana *park and ride* yang dijelaskan pada pasal 22 ayat 1 huruf b. Kawasan TOD Kota Bogor dikategorikan kedalam kawasan campuran. Kota Bogor mengkategorikan kawasan TOD menjadi 3 tipe skala yang terdiri dari TOD skala kota, TOD skala subkota dan TOD skala lingkungan. Lokasi rencana pengembangan kawasan TOD skala kota adalah titik transit Stasiun Bogor dan Terminal Baranangsiang, sedangkan Terminal Bubulak, Stoplet Sukaresmi, Stoplet Tanah Baru, Stoplet Mulyaharja, dan Stoplet Kertamaya sebagai pengembangan TOD skala pelayanan sub kota. Kota Bogor menjadikan kawasan TOD sebagai kawasan strategis kota sebagai sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi pada pasal 66. Pasal 69D menjelaskan rencana perwujudan jaringan transportasi yang perlu didukung dengan kawasan dengan konsep TOD di Kota Bogor, antara lain menjadikan Stasiun Bogor menjadi pusat transit sebagai perwujudan rencana jalur kereta api jarak jauh Bogor-Sukabumi-Yogyakarta, pembangunan Stoplet Sukaresmi sebagai kawasan terintegrasi dengan terminal dan stasiun kereta api khusus perkotaan, rencana pembangunan stasiun LRT di kawasan Baranangsiang, dan pembangunan angkutan umum berbasis rel di Kota Bogor.

Arah pengembangan kawasan transit berdasarkan hasil penelitian Pramata (2023) membagi hasil analisis berdasarkan tipologi aksesibilitas kawasan transit, tipologi kawasan berdasarkan ketersediaan fasilitas dan tingkat kesesuaian TOD dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.33. Tipologi Pengembangan TOD Kawasan Transit Kota Bogor

Lokasi	Tipologi Aksesibilitas	Tipologi Ketersediaan Fasilitas	Tipologi Kesesuaian TOD	Luas Kawasan Terbangun	Pengembangan Kawasan Transit
Stasiun Bogor Paledang	Sedang	Tinggi	Rendah-Sedang	62,29	<i>Redevelopment Site</i>
Terminal Baranangsiang	Tinggi	Sedang	Rendah-Sedang	61,35	<i>Redevelopment Site</i>
Terminal Bubulak	Sedang	Sedang	Rendah-Sedang	19,43	<i>Infill Development Site</i>
Stoplet Sukaresmi	Sedang	Rendah	Rendah-Sedang	29,36	<i>Infill Development Site</i>
Stoplet Kertamaya	Rendah	Rendah	Rendah	13,50	<i>New Growth Area</i>
Stoplet Tanah Baru	Rendah	Rendah	Rendah	21,01	<i>New Growth Area</i>
Stoplet Mulyaharja	Rendah	Rendah	Rendah	16,13	<i>New Growth Area</i>

Sumber: Pramata, 2023

Berdasarkan tabel diatas, Kawasan transit Stasiun Bogor-Paledang dan Terminal Baranangsiang dikategorikan pengembangan dengan kategori *redevelopment site*, dimana kategori diinterpretasikan memiliki kawasan dengan tipologi kesesuaian sedang-tinggi, ditunjang dengan keberadaan fasilitas tipologi sedang-tinggi dan tutupan lahan terbangun >60%. Kawasan diarahkan dengan penataan kembali terhadap perancangan konsep TOD dan penambahan fungsi baru pada kawasan dengan memperimbangan kondisi lingkungan serta peraturan yang berlaku.

Terminal Bubulak dan rencana Stoplet Sukaresmi menjadi rencana kawasan transit potensial di Kota Bogor yang dikategorikan tipologi pengembangan *infill development site*. Kawasan memiliki karakteristik dengan kategori kesesuaian sedang-rendah akan tetapi tidak ditunjang dengan luas lahan terbangun <60% dan memiliki tipologi ketersediaan fasilitas rendah. Tipologi pengembangan

diarahkan pada pemanfaatan persil kosong/terbengkalai di antara persil tanah terbangun dengan membuat kegiatan baru dan zona intensitas bangunan pada kawasan penunjang konsep TOD.

Tipologi pengembangan *new growth area* dikategorikan pada tiga rencana stoplet yaitu: rencana kawasan transit Stoplet Kertamaya, rencana kawasan transit Stoplet Tanah Baru dan rencana kawasan transit Stoplet Mulyaharja. Pengembangan *new growth area* digunakan kawasan stoplet dalam tahap rencana yang memiliki kategori ketersediaan fasilitas dan kesesuaian TOD rendah. Tingkat kesesuaian konsep TOD tipologi rendah diinterpretasikan kawasan transit belum ideal dengan konsep TOD. Tipologi pengembangan *new growth area* mengarahkan kawasan membangun pada lahan kosong dengan kemudahan akses ke kawasan transit dengan ditunjang dengan *feeder* dan fasilitas pendukung mobilitas penduduk.

2.3.3.3. Telekomunikasi

Dalam menjalankan pemerintahan terutama pada urusan komunikasi dan informatika, pemerintah daerah perlu melakukan digitalisasi agar dapat mewujudkan kinerja instansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, dan meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat digunakan untuk mengukur usaha pemerintah mencapai digitalisasi yang baik.

Tabel 2.34. Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Bogor Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Cakupan Layanan Telekomunikasi	100	100	100	100
Persentase keterbukaan informasi publik	100	98	77,5	79,80
Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon dalam 3 bulan terakhir	NA	NA	NA	97,34
Persentase Rumah Tangga kepada Akses Laptop dan Komputer	NA	NA	NA	28,33
Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Telepon Rumah	NA	NA	NA	4,19
Proporsi Individu yang meguasai/memiliki telepon genggam (%)	NA	79,97	79,97	84,77
Proporsi Individu yang terlayani <i>mobile broadband</i> (%)	NA	72,02	72,02	81,49
Proporsi Individu yang menggunakan internet (%)	NA	72,02	72,02	81,49

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, 2023

Berdasarkan Tabel diatas secara keseluruhan cakupan layanan telekomunikasi di Kota Bogor mencapai 100 persen. Adapun, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan ke pengguna. Nilai SPBE Kota Bogor pada tahun 2021 sebesar 3.11 dengan predikat baik. Namun demikian, tahun 2022 mengalami penurunan nilai sebesar 0.36 poin menjadi hanya 2.75 dengan predikat baik. Selain itu, persentase keterbukaan informasi publik Kota Bogor telah mencapai 79.80 persen pada tahun 2022, namun belum mencapai target 100 persen seperti yang ditargetkan.

Selanjutnya, peningkatan penggunaan telepon seluler (*handphone*) cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon kabel/rumah. Telepon rumah semakin jarang digunakan dan cenderung ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kepemilikan telepon rumah dan meningkatnya kepemilikan telepon seluler. Secara umum jumlah rumah tangga yang masih menggunakan telepon rumah hanya sebesar 4.19 persen di tahun 2022. Pada saat ini masyarakat cenderung memilih telepon seluler karena praktis, dapat dibawa bepergian kemana-

mana dan lebih bersifat pribadi. Selain itu pula tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain. Pada tahun 2022 persentase penduduk Kota Bogor berumur 5 tahun ke atas yang menguasai/memiliki telepon seluler (HP) dalam 3 bulan terakhir mencapai 97.34 persen. Sedangkan rumah tangga yang mempunyai akses terhadap komputer dan laptop pada tahun 2022 sebesar 28.33 persen dari total penduduk di Kota Bogor. Kemudian, di tahun 2022 untuk proporsi telepon genggam, *mobile broadband*, dan pengguna internet mengalami kenaikan daripada tahun 2021.

2.3.3.4. Pemanfaatan Energi

1. Listrik

Berdasarkan data PLN Cabang Bogor jumlah pelanggan energi listrik di Kota Bogor tahun 2022 mencapai 1,389,587 pelanggan dengan daya tersambung sebesar 2,659,761,246 VA serta energi yang terjual sebesar 286,481.698 kwh. Dengan jumlah pelanggan tertinggi berasal dari kawasan/ rayon Bogor Kota sebesar 300,054 pelanggan.

Tabel 2.35. Daya Tersambung dan Jumlah Pelanggan Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang PLN Kota Bogor Menurut Kawasan/ Rayon di Kota Bogor Tahun 2022

Kawasan/ Rayon	Daya Tersambung (VA)	Jumlah Pelanggan
Cipayung	277.566.170	215.130
Bogor Timur	381.788.302	222.142
Pakuan	922.078.080	475
Bogor Kota	417.387.675	300.054
Bogor Barat	288.719.466	212.805
Leuwiliang	205.505.197	254.375
Jasinga	166.716.356	184.606
Jumlah	2.659.761.246	1.389.587

Sumber: PLN Cabang Bogor, 2023

Tabel 2.36. Daya terpasang, Produksi dan Distribusi PT.PLN Menurut Kecamatan di Kota Bogor

Cabang PLN	Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di Kota Bogor (KWh)									
	Daya Terpasang		Produksi Listrik		Listrik Terjual		Dipakai Sendiri		Susut/Hilang	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Cipayung	34.008.800	33.438	0	5.360.144	384.070.126	4.864.074	2.709.224	47.834	41.961.875	448.236
Bogor Timur	186.788.290	184.459	0	41.965.780	556.111.559	38.730.430	3.099.233	289.938	59.846.225	2.945.413
Pakuan	258.507.175	168.194	0	168.689.294	604.940.553	168.689.294	3.529.701	0	70.932.582	0
Bogor Kota	104.931.149	249.584	0	62.427.328	429.332.895	57.088.579	2.142.802	469.330	60.824.353	4.869.418
Bogor Barat	208.845.880	105.138	0	19.501.074	351.092.159	17.109.321	1.987.368	150.109	51.875.274	2.241.644
Leuwiliang	158.058.070	0	0	0	256.910.044	0	1.723	0	58.369.622	0
Jasinga	180.289.000	0	0	0	2.456.769.644	0	3.911.590	0	1.071.692.507	0

Sumber : PLN Cabang Bogor ; Di Kutip dari Kota Bogor Dalam Angka 2023

Source Url : <https://bogorkota.bps.go.id/indicator/7/278/1/daya-terpasang-produksi-dan-distribusi-pt-pln-persero-pada-cabang-ranting-pln-menurut-kecamatan-di-kota-bogor.html>

Access Time : May 6, 2024, 12:05 am

2.3.3.5. Smart City

Kota cerdas merupakan konsep yang harus dikembangkan bersama-sama dan disesuaikan dengan tujuan dan misi pembangunan, kebutuhan, serta kondisi Kota Bogor. Pengembangan kota cerdas diharapkan tidak hanya menjadi sebuah program dan branding sesaat, tetapi dapat menjadi jembatan menuju pengembangan dan pembangunan kota yang berkelanjutan (*self sustain development*). Kota cerdas yang dibangun pada prinsipnya berbasis pada potensi lokal sebagai keunggulan dan identitas daerah yang akan menjadi sumber energi baru untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing, serta mampu menjadikan Kota Bogor sebagai pusat pertumbuhan bagi daerah (*hinterland*) sekitarnya. Selain itu, kebijakan kota cerdas juga harus dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan inovasi di seluruh sendi kehidupan masyarakat. Desain struktur *smart city* Kota Bogor yang akan dibangun melingkupi enam dimensi sebagai berikut:



Gambar 2.66. Elemen *Smart City*

Smart Governance

Pemerintah Kota Bogor sudah menerapkan aspek Smart Governance dengan baik. Dengan mengakses <http://kotabogor.go.id/> masyarakat mampu mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan. Informasi berita kota bogor, transparansi anggaran daerah, profil wilayah kota bogor, aspirasi warga kota bogor, hingga pelayanan kota bogor. Dalam setiap menu yang tersedia, terdapat percabangan informasi lagi, seperti pelayanan kota bogor yang di dalamnya terdapat informasi tentang kependudukan dan pencatatan sipil (pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk), segala jenis perizinan, mulai dari pajak, retribusi daerah hingga ketenagakerjaan. Semua informasi mengenai persyaratan, alur dan prosesnya juga disediakan dalam web tersebut. Tidak hanya itu, sistem pengaduan masyarakat, pelacak lokasi kota bogor, bahkan hingga informasi kota mengenai hotel, akomodasi, agenda kota bogor, maupun kuliner juga tersedia.

Smart Branding

Kota Bogor akan terus berupaya untuk meningkatkan daya saing dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Smart branding dilakukan pada beberapa indikator :

- a) Membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata
- b) Membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis daerah
- c) Membangun dan memasarkan wajah kota

Smart Economy

Smart economy dalam Smart City dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini. Ekonomi cerdas merupakan pendekatan pemecahan masalah ekonomi daerah dengan membuka akses informasi yang luas sehingga meningkatkan peluang warga untuk melakukan aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien dengan mereduksi biaya operasional lebih minimal, lebih produktif dan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Pengembangan ekonomi cerdas di Kota Bogor pun akan dilakukan suatu upaya untuk mengurangi resiko dalam sistem pembayaran yang semakin hari cenderung semakin meningkat.

Smart Living

Sasaran dari *smart living* sebagai salah satu dimensi Smart City adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien. Inisiatif pembangunan Smart Living diantaranya dapat dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut:

- a) Harmonisasi tata ruang wilayah
- b) Mewujudkan prasarana kesehatan
- c) Menjamin ketersediaan sarana transportasi

Smart Society

Sasaran dari *smart society* dalam *Smart City* adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi. Sasaran dari *smart society* tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga elemen di dalam *smart society*, yaitu komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*), dan sistem keamanan (*security*).

Smart Environment

Smart environment dilakukan melalui:

- a) Mengembangkan program proteksi lingkungan
- b) Mengembangkan tata kelola sampah dan limbah
- c) Mengembangkan tata kelola energi yang bertanggungjawab

Dalam upaya Kota Bogor membangun Smart City, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika melalui surat Nomor: 265 Kominfo/DJAI/AI.01.05/05/2017 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Assessment Gerakan Menuju 100 Smart City menilai Kota Bogor telah memiliki Kesiapan Daerah Cerdas atau *Smart City Readiness*. Terdapat beberapa elemen utama dalam kesiapan daerah cerdas, yaitu potensi alam (*nature*); struktur daerah (*structure*); infrastruktur (*infrastructure*); suprastruktur (*superstructure*); dan budaya (*culture*). *Smart City Readiness* difokuskan kepada 3 elemen saja yaitu Struktur, Infrastruktur, dan Suprastruktur.

- a) Struktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM) pelaksana (people) dan penerima manfaat Smart City, penyiapan sumber daya anggaran, dan sumber daya tata kelola dan tata pamong;
- b) Infrastruktur, pembangunan infrastruktur pendukung Smart City yang meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur digital atau TIK, dan infrastruktur sosial untuk kepentingan umum;
- c) Suprastruktur, penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata-laksana pelaksanaan pembangunan *Smart City*.

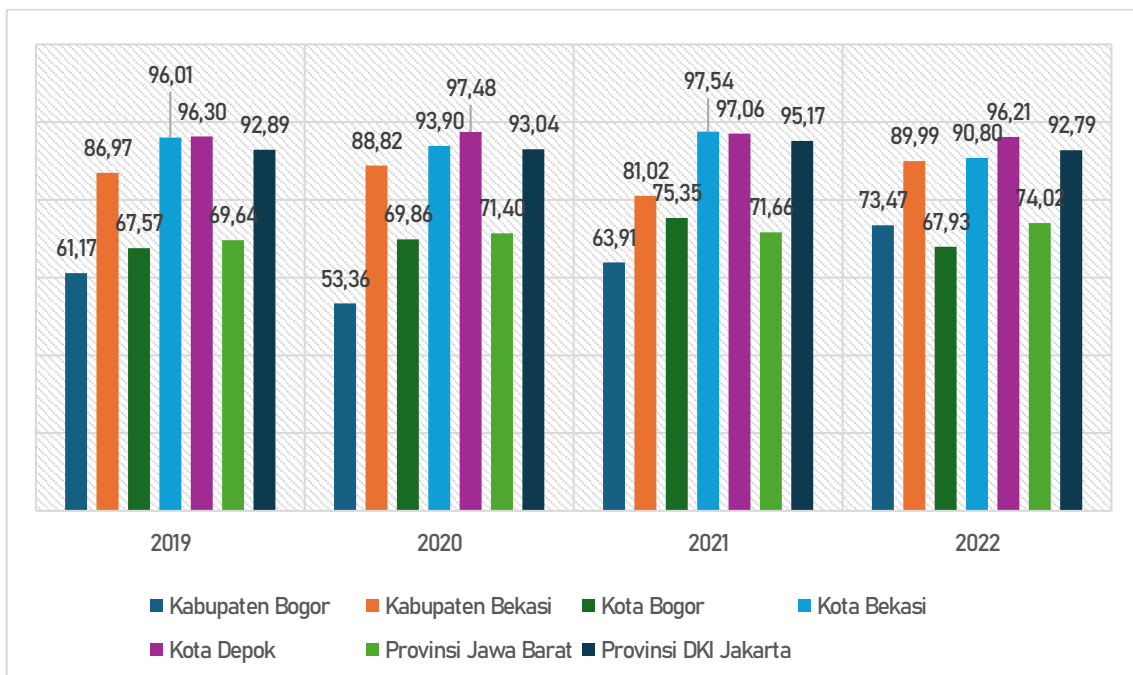
Berdasarkan data yang diperoleh, level kematangan *smart city* Kota Bogor sejak tahun 2020 hingga 2023 berada pada level *integrative* (Diskominfo Kota Bogor 2023). Level *integrative* adalah level 3 dalam tatanan parameter kematangan *smart city*. Pada level *integrative* telah tercapai beberapa hal untuk tiga bagian yaitu *smart economy*, *smart society* dan *smart environment*. Pada level *smart economy* telah tercapai pertumbuhan ekonomi tinggi, dukungan layanan TIK yang mulai memperlihatkan kolaborasi antar sistem. Pada bagian *smart society* telah tercapai kehidupan sosial layak, aman dan nyaman dan bagian *smart environment* telah tercapai lingkungan yang layak huni dengan permasalahan lingkungan yang menerapkan prinsip *tolerable*.

2.3.3.6. Pemenuhan Utilitas Dasar

Pemenuhan utilitas dasar tercermin dari beberapa hal seperti sanitasi, sampah dan air. Utilitas dasar menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, sebab tanpa utilitas dasar, masyarakat tidak dapat memiliki kehidupan yang layak, nyaman dan aman. Sistem sanitasi adalah cara pengumpulan, pembuangan, dan pengolahan kotoran manusia dan hewan (feses dan urine) yang aman serta limbah lainnya, seperti sampah dan limbah industri berbahaya. Sistem ini dibuat untuk menciptakan serta menjaga lingkungan, baik itu tanah, air, maupun udara, agar tetap bersih dan higienis. Dengan lingkungan yang bersih, tubuh pun akan menjadi lebih sehat. Pengelolaan sampah juga merupakan hal utama dalam mencapai kehidupan yang sehat selain sistem sanitasi, serta ketahanan air menjadi kunci penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

2.3.3.7. Akses Sanitasi Aman

Pada Gambar 2.67 terlihat bahwa untuk kategori perkotaan, Kota Bogor selalu memiliki capaian terendah dibandingkan dengan Kota Bekasi dan Kota Depok. Angka capaian Kota Bogor tahun 2022 hanya sebesar 67,93 persen, padahal dua wilayah perkotaan lainnya yang sebagai pembanding memiliki nilai > 90 persen. Hal ini berarti rumah tangga di Kota Bogor masih belum optimal dalam mengakses mengenai sarana prasarana sanitasi yang layak.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (2023)

Gambar 2.67. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (Persen)

2.3.3.8. Pengelolaan Persampahan

Permasalahan sampah terus menjadi persoalan yang dihadapi kota-kota di Indonesia khususnya di Kota Bogor. Timbulan sampah merupakan tempat penumpukan sampah yang ditangani oleh pemerintah atau perusahaan swasta. Timbunan sampah ini dapat terdiri dari beberapa tipe seperti timbunan sampah terbuka atau tertutup. Pengelolaan timbunan sampah harus memenuhi standar lingkungan yang ketat untuk memastikan bahwa sampah tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan. Sampah dapat digolongkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Untuk mengurangi timbulan sampah di masyarakat maka diperlukan usaha dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Pemerintah Kota Bogor telah berupaya optimal untuk menangani masalah sampah agar dapat tertangani dengan baik dan berdampak baik bagi lingkungan secara berkelanjutan.

Tabel 2.37. Pengelolaan Sampah di Kota Bogor Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	77,04	84,81	88,85	89,15
Timbulan sampah yang ditangani (%)	75,37	77,20	81,00	81,32
Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	6,26	7,61	7,85	7,80
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	55,29	55,45	58,59	64,29
Tertindakannya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	77,04	77,20	81,19	81,39

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, 2023

Berdasarkan tabel diatas, persentase jumlah sampah yang tertangani setiap tahunnya relatif meningkat dan mencapai 89,15 persen di tahun 2022. Hal ini dikarenakan selalu ada penambahan armada pengangkut sampah. Adapun jumlah TPS 3R pada tahun 2022 sebanyak 28 unit, namun jumlah sampah diolah melalui 3R hingga tahun 2022 baru mencapai 7,89 persen. TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*) melakukan pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos agar lebih efektif dan efisien dengan kapasitas tamping 5 m³ per unit.

Pada tahun 2022, timbulan sampah di Kota Bogor mencapai 659,653 ton/hari dengan volume sampah yang terangkut ke TPAS sebesar 536,403 ton/hari. Artinya, masih ada 18,68 persen timbulan sampah yang belum tertangani. Untuk indeks kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah di Kota Bogor mengalami peningkatan di tahun 2022 dengan masing-masing sebesar 5,7% dan 0,2%. Capaian kedua indikator tersebut telah mencapai target yang ditetapkan.

Kondisi eksisting pengelolaan sampah di Kota Bogor masih perlu penanganan yang optimal melalui kebijakan dan kerjasama berbagai level. Adanya kesepakatan berbagai pihak dalam pengelolaan sampah, baik dari pemerintah yang memfasilitasi alat maupun tempat pengelolaan (meningkatkan kuantitas dan kualitas TPS dan TPA), lembaga atau komunitas dan RT/RW yang memberikan edukasi, *reward* dan wadah bagi masyarakat dalam proses pengelolaan sampah, hingga masyarakat yang turut serta dalam pengelolaan sampah baik secara mandiri maupun kelompok (bank sampah). Pengelolaan sampah yang berjalan semestinya selalu mengutamakan pada sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*).

Timbulan sampah juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan bagi pemerintah Kota Bogor untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Timbulan sampah merupakan volume sampah yang

dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu. Potensi timbulan sampah di Kota Bogor dihitung berdasarkan distribusi jumlah penduduk dalam setiap kecamatan dalam satu tahun. Berikut data potensi timbulan sampah di Kota Bogor berdasarkan kecamatan.

Tabel 2.38. Potensi Timbulan Sampah di Kota Bogor Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)
Bogor Barat	233.637	59.694
Bogor Selatan	204.030	52.130
Bogor Tengah	96.258	24.594
Bogor Timur	104.327	26.656
Bogor Utara	186.724	47.708
Tanah Sareal	218.094	55.723

Sumber: Laporan Antara KLHS RPJPD, 2023

2.3.3.9. Ketahanan air

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang keberadaannya sangat mudah mengalami kerusakan, baik karena faktor alam seperti kemarau berkepanjangan maupun akibat perilaku konsumsi dan konservasi yang tidak optimal. Fauzi (2010) menjelaskan bahwa alokasi air merupakan masalah ekonomi untuk menentukan bagaimana suplai air yang tersedia harus dialokasikan kepada pengguna atau calon pengguna.

Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, yakni satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan. SPAM JP diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran. Syarat SPAM JP meliputi :

1. Kuantitas Air Minum yang dihasilkan paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
2. Kualitas Air Minum yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kontinuitas pengaliran Air Minum selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.

Berdasarkan Tabel 2.39 persentase akses air bersih jaringan perpipaan Kota Bogor dari tahun ke tahun semakin meningkat kecuali pada tahun 2019 mengalami penurunan, namun pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 89,1 persen. Semakin tinggi persentase akses air jaringan perpipaan, maka semakin banyak masyarakat di Kota Bogor yang dapat mengakses air bersih. Peningkatan akses terhadap air minum yang aman pada air perpipaan memiliki beberapa alasan, yaitu pertama air sumur sebagai sumber air minum terbesar bagi penduduk mengalami penurunan kualitas dan kuantitas akibat peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, kedua kontaminasi air perpipaan relatif lebih kecil dibandingkan dengan air sumur dan sumber-sumber lain, ketiga pencapaian akses terhadap air perpipaan sangat rendah.

Tabel 2.39. Persentase Akses Air Bersih Jaringan Perpipaan Kota Bogor Tahun 2014-2021

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Air Bersih (%)	78,4	82,79	85,85	88,73	90,22	75,73	77,33	89,1

Sumber: LKPJ KMJ WaliKota Tahun 2021

Air bersih adalah air yang secara fisik terlihat jernih dan tidak berbau yang digunakan untuk keperluan sehari-hari serta dimasak untuk dijadikan air minum. Air bersih merupakan salah satu jenis sumber daya berbasis yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari dan memenuhi persyaratan (Permenkes, 2017). Batasan-batasan sumber air yang bersih dan aman, antara lain :

1. Bebas dari kontaminasi kuman atau bibit penyakit.
2. Bebas dari substansi kimia yang berbahaya dan beracun.
3. Tidak berasa dan tidak berbau.
4. Dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan domestik rumah tangga.
5. Memenuhi standar minimal yang ditentukan oleh WHO (World Health Organization) atau Departemen Kesehatan RI.

Persentase akses air bersih Kota Bogor mengalami penurunan dari tahun ke tahun selama periode 2015 hingga 2022 seperti yang terdapat pada Tabel 2.40. Pada tahun 2015 persentase air bersih di Kota Bogor sebesar 82 persen, namun tahun 2022 menurun menjadi 68,68 persen. Penyebab menurunnya akses air bersih di Kota Bogor dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti semakin banyaknya penduduk di perkotaan sehingga kebutuhan akan air terus meningkat, distribusi air tawar yang semakin meningkat dan semakin maraknya pencemaran air. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk menjaga ketersediaan air bersih antara lain tidak membuang sampah pada saluran air, membuat tempat penampungan hujan, menanam pohon dan menghemat air.

Tabel 2.40. Persentase Akses Air Bersih Kota Bogor Tahun 2014-2022

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Air Bersih (%)	NA	82	86,92	90,55	91,98	92,83	76,98	68,49	68,68

Sumber: Diskominfo Kota Bogor 2023

Penyedia air perpipaan diselenggarakan oleh perusahaan air minum daerah. Kota Bogor memiliki perusahaan air minum daerah (PDAM) yang bernama Perumda Tirta Pakuan. Pada tahun 2022 jumlah pelanggan air minum sebanyak 173.768 lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah air yang disalurkan sebanyak 42 juta m³ yang dibagi kedalam tujuh zona.

Tabel 2.41. Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Zona Pelayanan di Kota Bogor Tahun 2021-2022

Zona	Pelanggan		Air Disalurkan (m ³)		Nilai (Rp)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Zona 1	20.577	15.499	4.334.778	3.856.254	24.924.756.000	22.443.881.800
Zona 2	4.525	6.416	1.054.841	1.069.906	4.813.280.500	4.829.854.400
Zona 3	48.327	38.244	12.809.198	11.599.228	81.420.816.900	72.189.768.400
Zona 4	83.925	66.486	20.090.479	18.062.361	122.652.528.200	112.222.910.600
Zona 5	4.684	4.887	1.082.268	1.114.974	5.909.876.200	6.061.165.500
Zona 6	7.617	7.982	1.716.353	1.792.951	8.063.124.400	8.530.833.700
Zona 7	-	36.054	-	5.126.990	-	33.157.044.900
Kota Bogor	169.655	173.768	41.087.917	42.622.664	247.784.382.200	259.435.459.300

Sumber: BPS Kota Bogor 2023

Berdasarkan Tabel 2.41 diatas, zona pelayanan air Perumda Tirta Pakuan memiliki tujuh zona dengan jumlah pelanggan terbanyak pada tahun 2022 berada pada zona 4. Hal ini dikarenakan pada zona 4 mencakup sebagian besar wilayah di Kota Bogor dibandingkan zona lainnya. Namun terdapat penurunan jumlah pelanggan pada zona 4 dibandingkan tahun sebelumnya. Menurunnya jumlah pelanggan air pada Perumda Tirta Pakuan disebabkan beberapa hal seperti seperti keberadaan sumber air lain, berlangganan PDAM mahal, pendapatan, serta layanan PDAM seperti air yang berbau, biaya pasang mahal dan air sering tidak mengalir pada jam-jam tertentu.

Tabel 2.42. Zona Pelayanan Perumda Pakuan Tirta Bogor

Zona Pelayanan	Sumber Air	Wilayah Pelayanan
Zona 1	IPA Rancamaya & Mata Air Tangkil	a) Sebagian Kecamatan Bogor Selatan b) Sebagian Besar Kecamatan Bogor Timur
Zona 2	Mata Air Bantar Kambing	Sebagian Besar Kecamatan Bogor Selatan
Zona 3	IPA Cipaku	a) Sebagian Besar Kecamatan Bogor Tengah b) Sebagian Kecamatan Bogor Barat
Zona 4	IPA Dekeng	a) Sebagian Besar Kecamatan Tanah Sareal b) Sebagian Kecamatan Bogor Utara c) Sebagian Besar Kecamatan Bogor Barat d) Sebagian Kecamatan Bogor Tengah
Zona 5	IPA Palasari & Mata Air Palasari	Sebagian Besar Kecamatan Bogor Selatan
Zona 6	Mata Air Kota Batu	a) Sebagian Besar Kecamatan Bogor Selatan b) Sebagian Kecamatan Bogor Barat
Zona 7	IPA Katulampa	a) Sebagian Kecamatan Bogor Timur b) Sebagian Besar Kecamatan Bogor Utara

Sumber: PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Pembangunan ekonomi suatu daerah berkaitan erat dengan potensi ekonomi dan karakteristik daerah. Potensi ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari nilai investasi. Nilai investasi yang ditanamkan dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Investasi yang baik dilihat dari kondisi iklim investasi yang tercermin salah satunya dalam indeks kerukunan umat beragama dan indeks daya saing daerah serta indeks inovasi daerah.

Penanaman modal atau investasi sangat ditentukan oleh beragam faktor diantaranya adalah faktor keamanan, kondisi politik dan sosial. Pemerintah daerah berperan untuk menjaga kondisi tersebut agar tercipta iklim investasi yang kondusif. pemerintah merupakan fasilitator dan dinamisator bagi berkembangnya investasi. Salah satu produk peraturan pemerintah pusat yang dapat digunakan di berbagai daerah adalah UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

2.3.4.1. Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pada tahun 2022, Kota Bogor memiliki skor IDSD sebesar 3,42 dan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai IDSD Provinsi Jawa Barat sebesar 3,64. (Tabel 2.43). Akan tetapi, nilai IDSD Kota Bogor merupakan peringkat ketiga tertinggi di Provinsi Jawa Barat setelah Kota Bandung dan Kota Bekasi. Nilai pada komponen ekosistem inovasi di pilar 11 yaitu pilar dinamisme bisnis sebesar 5 dan merupakan skor

tertinggi diantara pilar yang lainnya. Pilar dinamisme bisnis merupakan pilar yang menggambarkan kemudahan melakukan bisnis yang dilihat melalui administrasi dan budaya kewirausahaan. Indikator yang digunakan dalam pilar ini adalah biaya untuk memulai usaha, waktu untuk memulai usaha dan tingkat pemulihan insolvensi. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Bogor yang memiliki nilai IDSD tahun 2022 hanya sebesar 3,24 lebih rendah dari Kota Bogor.

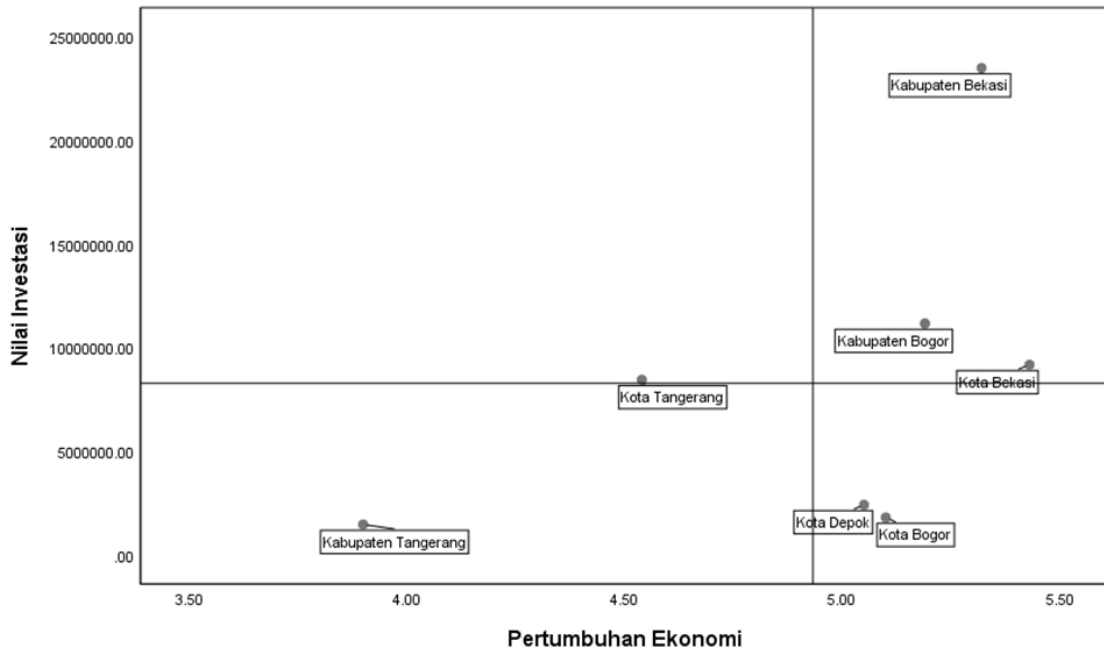
Tabel 2.43. Nilai IDSD Jabodetabek dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Wilayah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bogor	4,03	5,68	2,92	3,06	3,42
Bogor	5,541	8,52	3,67	3,7	3,24
Kota Depok	0	2,97	3,44		-
Kota Tangerang	0	0	2,59		-
Tangerang	0	0	0	-	3,45
Kota Bekasi	3,477	1,59	2,73		3,46
Bekasi	3,369	0	0	0,763	-
DKI Jakarta	-	-	3,18	3,962	4,01
Jawa Barat	5,04	11,76	4,18	4,136	3,64

Sumber: BRIN, 2023

Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi indikator keberhasilan suatu wilayah, dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat menjadi motor pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi, tentunya tidak dapat terlepas dari modal baik modal fisik, sosial, dan lainnya. Dukungan investasi merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan stok modal. Peningkatan stok modal akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Tidak hanya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), namun Penanaman Modal Asing (PMA) juga menjadi hal yang perlu untuk ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan barang modal, bahan baku, dan komponen substitusi impor, barang jadi dan barang setengah jadi guna menciptakan kesempatan usaha dan lapangan kerja yang semakin luas (Sukirno, 2004).

Gambar 2.68 menunjukkan klasterisasi hubungan nilai investasi (PMDN dan PMA) Kota Bogor serta kabupaten/ kota lainnya tahun 2023. Jika dibandingkan kabupaten/ kota lainnya, walaupun pertumbuhan ekonomi Kota Bogor cukup tinggi, namun nilai investasi yang masuk ke Kota Bogor merupakan yang paling rendah. Dengan melihat potensi yang dimiliki Kota Bogor seperti telah dilalui jalan tol serta jalan-jalan arteri primer dalam kondisi baik, jumlah industri kecil menengah (IKM) yang tersebar di seluruh kecamatan Kota Bogor dengan variasi kegiatan industri, dan potensi pengembangan wisata tematik yang mampu memberikan nilai tambah dalam aktivitas ekonomi. Kota Bogor dapat terus dikembangkan dan dipromosikan untuk dapat menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan visi Kota Bogor dalam RPJPD 2025-2045, Kota Bogor akan menjadi Kota Sains Kreatif, Maju, dan Berkelanjutan yang tentunya memerlukan modal, yaitu investasi.



Sumber : BPS Jawa Barat, BPS Banten, dan BKPM, 2024

Gambar 2.68. Klasen Nilai Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Kabupaten/ Kota sekitarnya, tahun 2023

2.3.4.2. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Kontribusi PMTB Kota Bogor terhadap PDRB ADHB merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 34,62 persen pada tahun 2023. Apabila dilihat pada tabel dibawah, kontribusi PMTB Kota Bogor dari tahun 2013 hingga 2023 cenderung berfluktuasi dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2017 sebesar 35,68 persen. Semakin tinggi kontribusi PMTB mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi semakin baik. Hal ini dikarenakan salah satu faktor pembentuk pertumbuhan ekonomi adalah investasi yang merupakan salah satu indikator dalam PMTB dalam pembentukan PDRB.

Tabel 2.44. Share PMTB terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2013 – 2022

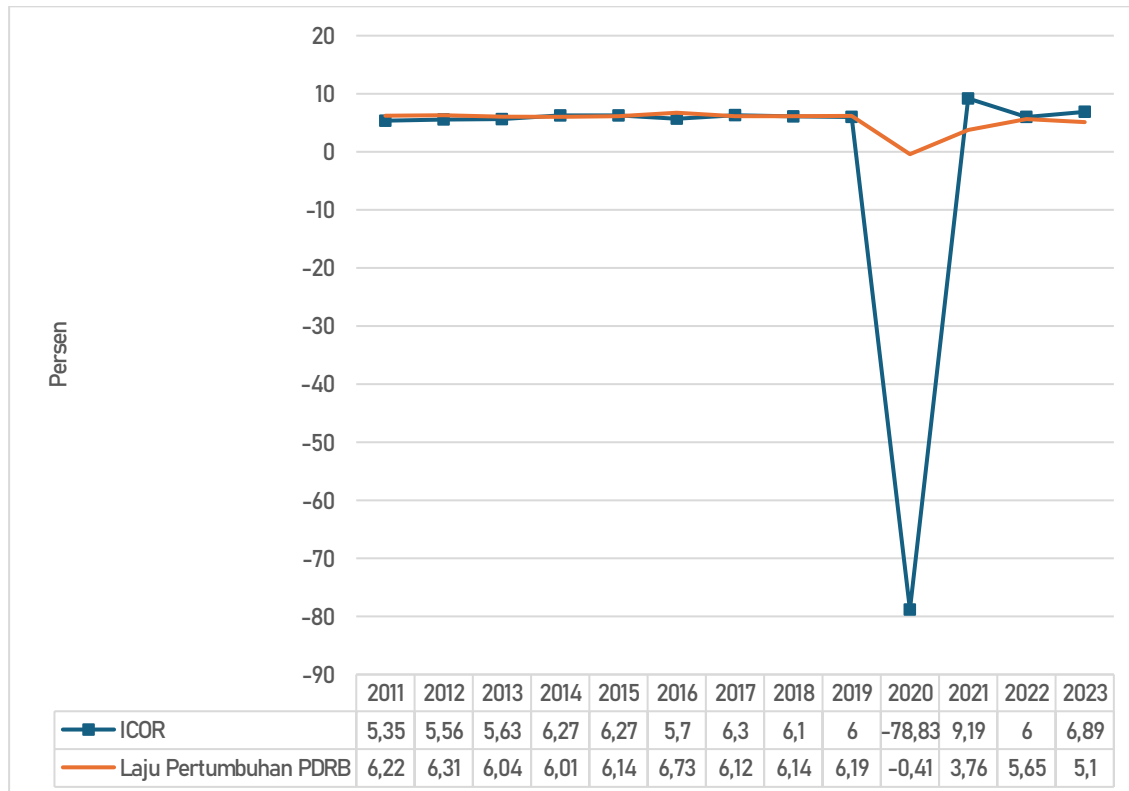
Wilayah	Share PMTB terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Persen)										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bogor	31,03	34,25	36,11	35,65	35,68	34,44	34,22	31,92	34,01	32,96	34,62
Kabupaten Bogor	22,24	22,71	22,97	22,29	21,82	22,24	22,00	20,60	21,51	21,02	21,17
Kota Tangerang	27,58	27,68	27,64	27,27	28,36	29,99	31,14	37,58	38,65	34,86	33,84
Kabupaten Tangerang	19,96	20,91	21,34	4,92	4,01	3,81	3,35	3,02	3,19	3,08	27,03
Kota Bekasi	31,35	33,34	33,98	34,99	35,65	36,80	37,88	35,11	35,06	33,79	33,92
Kabupaten Bekasi	19,75	21,44	22,29	22,68	22,70	23,31	22,98	20,30	21,65	21,55	21,73

Sumber: BPS Kota Bogor, BPS Kabupaten Bogor, BPS Kota Tangerang, BPS Kabupaten Tangerang, BPS Kota Bekasi, BPS Kabupaten Bekasi

2.3.4.3. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan parameter makroekonomi yang menunjukkan rasio investasi modal/ kapital terhadap output yang dihasilkan dengan menggunakan investasi yang dimiliki. Kapital dapat diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam untuk digunakan secara terus menerus dalam kegiatan produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah". Angka ICOR menunjukkan besarnya input yang dibutuhkan untuk meningkatkan setiap 1 unit output. Gambar 2.69 menunjukkan perkembangan nilai ICOR dan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor selama tahun 2011-2023. Pergerakan ICOR dan laju pertumbuhan ekonomi relatif sejalan, dimana pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor bernilai negatif sebagai dampak pandemi Covid-19 dengan nilai -0.41% . Begitu pula dengan ICOR Kota Bogor pada tahun yang sama juga bernilai negatif dengan nilai -78.83 . Hal ini disebabkan menurunnya jumlah output dibandingkan periode sebelumnya sebagai akibat pandemi Covid-19 yang menurunkan hampir seluruh sektor produksi. Penurunan ini bukan disebabkan karena berkurangnya kapital yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, namun lebih disebabkan karena adanya kebijakan pembatasan dalam kegiatan produksi yang menurunkan kapasitas produksinya.

Semakin efisien suatu perekonomian maka semakin rendah nilai ICORnya yang berarti semakin sedikit penambahan kapital yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 unit output. Pada tahun 2021 nilai ICOR Kota Bogor mengalami peningkatan yang relatif tinggi dibanding tahun 2020 yang mencapai 9.19. Selanjutnya, nilai ICOR cenderung berfluktuasi dan pada tahun 2023 nilai ICOR Kota Bogor mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dari investasi di Kota Bogor mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Sumber : BPS Kota Bogor, 2024

Gambar 2.69. Perkembangan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2011-2023

2.3.4.4. Iklim Demokrasi

Demokrasi saat ini menjadi sebuah wacana yang hampir diterima sebagai suatu konsep ideal di seluruh negara. Berdasarkan Fukuyama (2018) pada tahun 1970 hanya ada sekitar 35 negara demokrasi, sedangkan pada tahun 2000-In, jumlah negara demokrasi mencapai 120. Penambahan negara demokrasi terbanyak berasal dari negara-negara bekas Uni Soviet, Eropa Timur dan negara-negara lain bekas penganut paham komunis. Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi di dunia memiliki indeks demokrasi untuk mengukur kondisi demokrasi yang terjadi.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bertujuan untuk mengetahui dan menilai secara reguler apakah kondisi demokrasi Indonesia bergerak menuju negara demokrasi atau sebaliknya. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indikator ini didapatkan melalui kompilasi berbagai fenomena terkait demokrasi yang terjadi di suatu daerah. Pengukuran IDI bersumber dari nilai demokrasi yang didapat pada tingkat provinsi di Indonesia.

Pengukuran IDI mencakup tiga aspek yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan dan aspek kapasitas lembaga demokrasi. Berdasarkan tabel di bawah diketahui bahwa Provinsi Jawa barat memiliki nilai untuk setiap aspek pada IDI cukup tinggi, hal ini memperlihatkan bahwa iklim demokrasi yang terjadi di Jawa Barat sudah cukup baik.

Tabel 2.45. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023 Menurut Aspek

Wilayah Provinsi	Aspek Kebebasan		Aspek Kesetaraan		Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Jawa Barat	89,71	90,61	72,99	82,61	77,93	77,05

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Pada perhitungan nilai IDI, terdapat aspek kesetaraan yang dapat dicerminkan dari jumlah laki-laki dan perempuan yang menduduki kursi parlemen. Pada tahun 2022 jumlah anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) secara keseluruhan berjumlah 50, angka ini tidak berubah hingga tahun 2023, akan tetapi komposisi jumlah laki-laki dan perempuan mengalami perubahan. Pada tahun 2022, jumlah anggota DPRD perempuan sebanyak 11 orang, sedangkan pada tahun 2023 bertambah menjadi 12 orang dengan tingkat pendidikan terbanyak yaitu sarjana strata satu. Bertambahnya jumlah perempuan dalam anggota dewan menunjukkan tingkat kesetaraan gender yang semakin baik dalam iklim demokrasi.

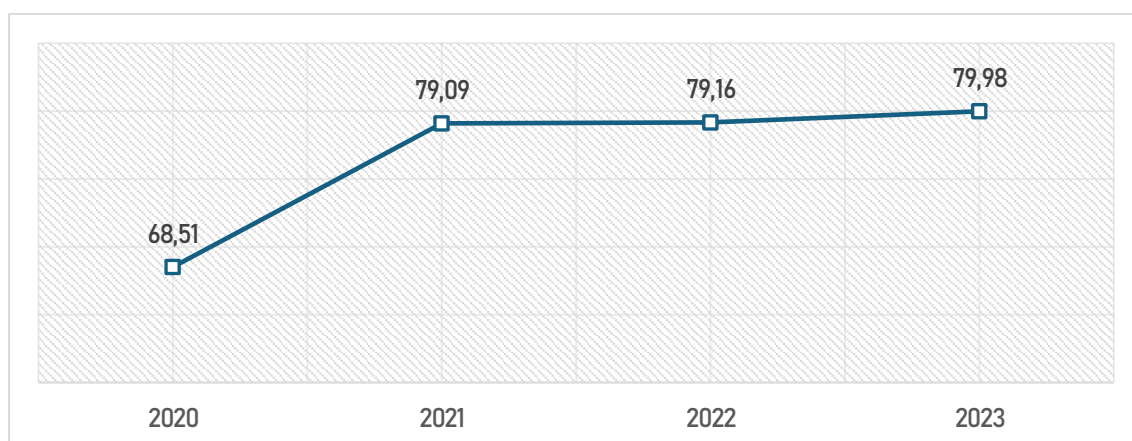
Tabel 2.46. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Bogor

Pendidikan	Jenis Kelamin					
	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
SMA	7	7	2	2	9	9
D3	0		0		0	
S1	21	19	5	5	27	27
S2	11	11	4	4	14	14
S3	0	2	0		0	
Total	39	38	11	12	50	50

Sumber: BPS Kota Bogor, 2023

2.3.4.5. Kerukunan Umat Beragama

Indeks kerukunan umat beragama (KUB) merupakan sebuah survei yang mengukur tingkat kerukunan umat masyarakat dalam beragama di Indonesia. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) atau juga dikenal dengan Indeks Kerukunan Kota Bogor merupakan sebuah indikator penilaian kerukunan, toleransi, dan kerja sama antarmasyarakat di Kota Bogor yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Komponen penilaian IKUB didasarkan dari tiga dimensi. Dimensi pertama yakni dimensi kerja sama, dimensi toleransi dan dimensi kesetaraan. Indeks kerukunan umat beragama Kota Bogor memiliki nilai yang terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020 nilai indeks kerukunan umat beragama sebesar 68,51 dan pada tahun berikutnya nilai yang diperoleh semakin tinggi. Pada tahun 2023, pengukuran indeks kerukunan ini dilakukan dengan melakukan survei (data primer) ke 401 responden di enam kecamatan se-Kota Bogor selama bulan September-November. Hasilnya capaian Indeks Kerukunan Kota Bogor 2023 mengalami peningkatan dari 2022 yakni dari 79,16 menjadi 79,98. Selain itu, skor Indeks terendah yakni di Kecamatan Bogor Utara dengan poin 76. Diharapkan upaya menjaga Marwah Kota Bogor sebagai “Kota Toleran” dapat terus diupayakan, khususnya melalui perumusan kebijakan/regulasi seperti Peraturan Wali Kota (Perwali) dan Peraturan Daerah (Perda) yang berlandaskan semangat *leadership*, toleransi, dan berkolaborasi dengan para tokoh masyarakat hingga pemuka agama. Meningkatnya nilai indeks kerukunan umat beragama berarti semakin baik toleransi antar umat beragama di Kota Bogor.



Sumber: Kesbangpol 2023

Gambar 2.70. Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor Tahun 2020-2023

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan salah satu unsur penting dalam keberlangsungan tata kelola yang baik di Kota Bogor. Aspek pelayanan umum difokuskan untuk melayani berbagai kepentingan publik yang dapat didekati melalui reformasi birokrasi, pelayanan publik, sistem pemerintahan berbasis elektronik dan inovasi daerah.

Pertama, reformasi birokrasi dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Tujuan lainnya dalam reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Kedua, pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap negara dan memperkuat ikatan sosial antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, pelayanan publik yang baik juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif.

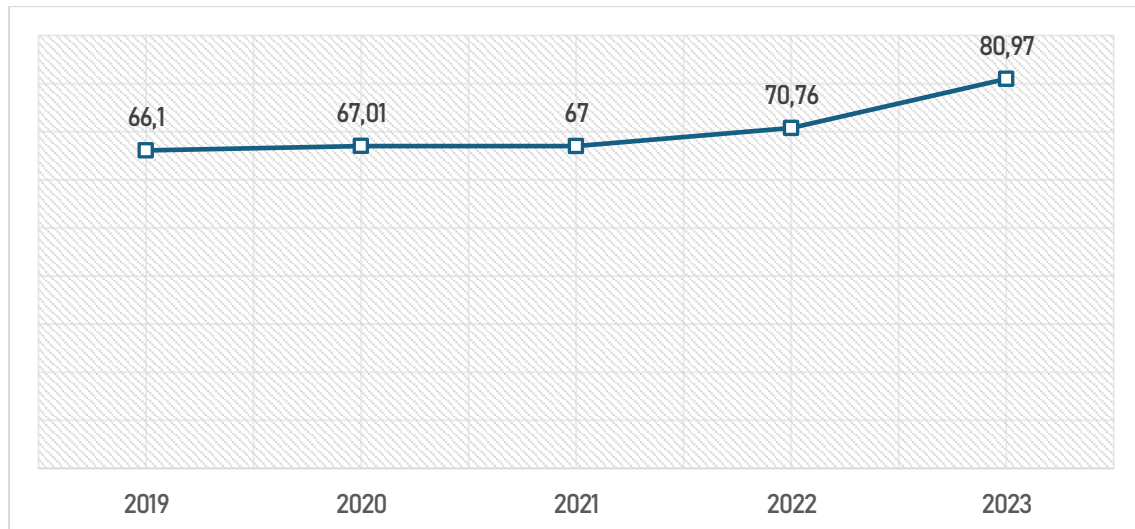
Ketiga, sistem pemerintahan berbasis elektronik ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Keempat, inovasi daerah dinilai berdasarkan indeks inovasi daerah yang berlandaskan pada Pasal 373 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa “dalam rangka pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berprestasi”. Landasan hukum lain dalam mendukung pengukuran indeks inovasi daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah dan Permendagri Nomor 104 tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah. Oleh karena itu, masing-masing bagian dalam pelayanan umum akan dijelaskan lebih lanjut pada narasi di bawah ini.

2.4.1. Reformasi Birokrasi

Aspek pelayanan umum merupakan salah satu fondasi utama dari pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kota Bogor. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan umum menjadi salah satu prioritas utama dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Dalam RPJPN 2025-2045, terdapat delapan (8) agenda pembangunan yang kemudian dijabarkan menjadi 17 arah pembangunan, salah satunya terkait pelayanan publik yakni “Mewujudkan Transformasi Tata Kelola” yang mencakup berbagai aspek pelayanan umum.

Reformasi birokrasi Kota Bogor dari tahun 2019 hingga 2023 terus mengalami perubahan menuju ke arah yang lebih baik yang dicerminkan melalui nilai dan peringkat indeks reformasi birokrasi. Berdasarkan gambar di bawah, indeks reformasi birokrasi Kota Bogor pada tahun 2019 hanya sebesar 66,01 dan selama tiga tahun yaitu tahun 2019 hingga 2021 predikat indeks reformasi birokrasi Kota Bogor adalah B. Kemudian pada tahun 2022, indeks reformasi birokrasi Kota Bogor meningkat menjadi 70,76 dengan predikat BB dan puncaknya pada tahun 2023, indeks reformasi birokrasi meningkat menjadi 80,97 dengan predikat A dan merupakan capaian terbaik selama rentang waktu 2019-2023.

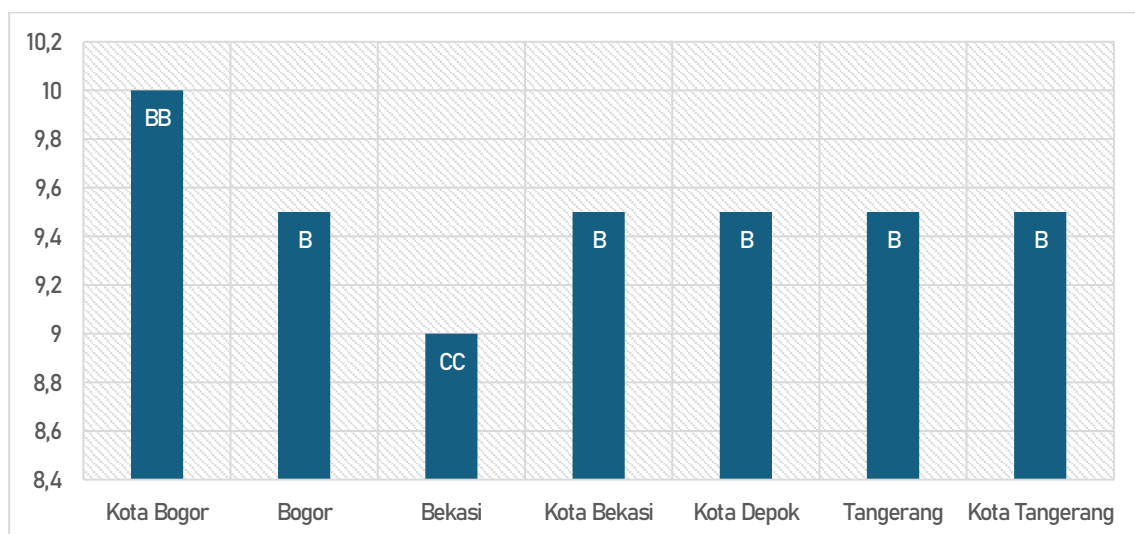


Sumber: Kemenpan-RB 2023

Gambar 2.71. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bogor Tahun 2019–2023

Indeks reformasi birokrasi yang semakin baik untuk Kota Bogor mengindikasikan bahwa masyarakat telah secara langsung merasakan adanya manfaat dari reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah kota. Namun, pemerintah Kota Bogor diharapkan dapat terus berfokus pada efisiensi, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat yang salah satu upayanya dilakukan lewat transformasi berbasis digital agar dapat mempertahankan capaian indeks reformasi birokrasi.

Apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya yang merupakan bagian dari Jawa Barat dan berdekatan dengan wilayah Kota Bogor, maka indeks reformasi birokrasi Kota Bogor tahun 2022 merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kota atau kabupaten lainnya. Predikat indeks reformasi birokrasi Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang adalah B, sedangkan Kabupaten Bekasi memperoleh predikat paling rendah yaitu CC dibandingkan kota dan kabupaten lainnya.



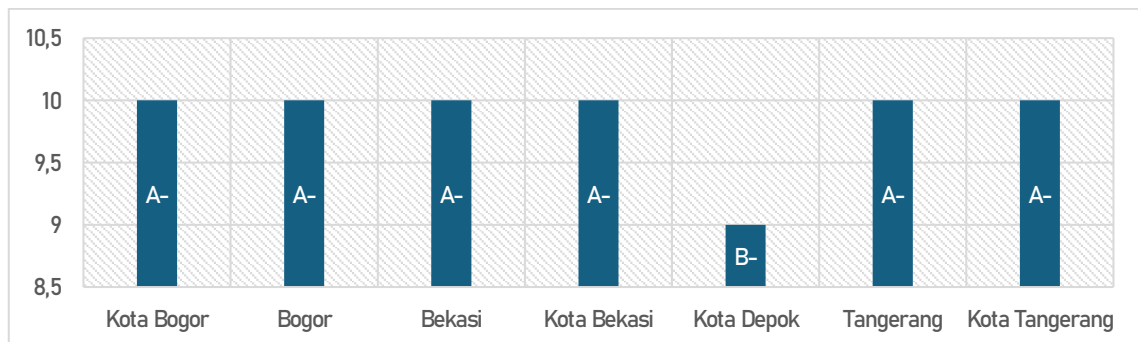
Sumber: Kemenpan-RB 2023

Gambar 2.72. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bogor dan Daerah Sekitarnya Tahun 2022

2.4.2. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah salah satu aspek yang kerap kali menjadi perhatian bagi para pimpinan daerah. Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme sdm, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan).

Indeks pelayanan publik Kota Bogor berada pada peringkat A- begitu pula dengan daerah di kota atau kabupaten lainnya di Jawa Barat yang berdekatan dengan Kota Bogor juga memperoleh peringkat A- pada tahun 2023 kecuali Kota Depok yang memperoleh peringkat B- berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 795 Tahun 2023 tentang hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di kementerian, lembaga, pemerintahan daerah dan BUMN tahun 2023.



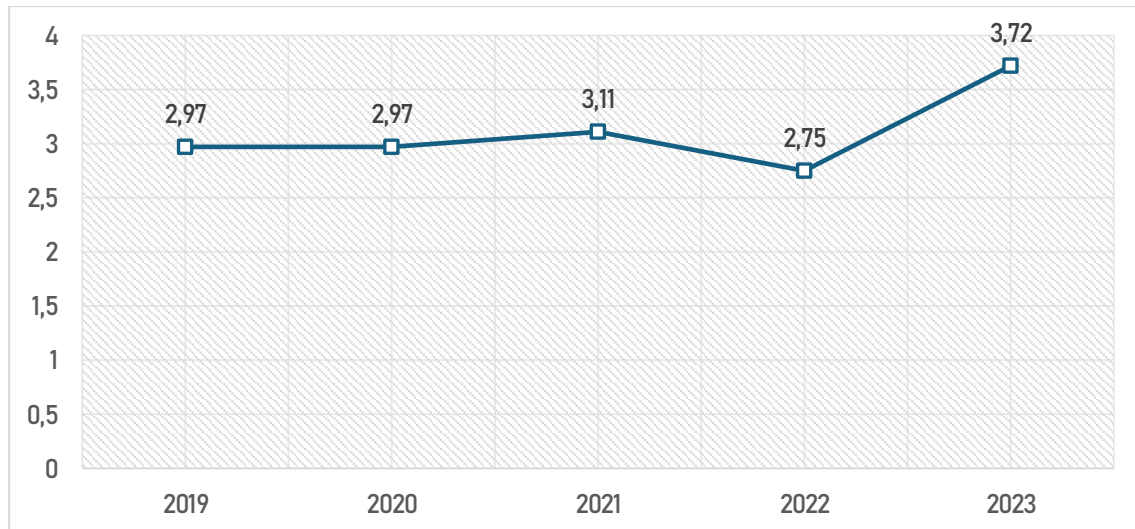
Sumber: Kemenpan-RB 2023

Gambar 2.73. Indeks Pelayanan Publik Kota Bogor dan sekitarnya Tahun 2023

Pelayanan publik di Kota Bogor memerlukan penguatan pada seluruh aspek agar dapat menjadi lebih baik dan mendapatkan peringkat A. Penguatan yang dapat dilakukan berupa penguatan pelayanan publik dengan mengandalkan teknologi informasi. Hal tersebut diharapkan dapat menjadikan pelayanan publik semakin efisien dan efektif.

2.4.3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan ke pengguna. Nilai SPBE Kota Bogor pada tahun 2019 dan 2020 memiliki nilai yang sama yaitu 2,97. Pada tahun 2021 sebesar nilai SPBE meningkat menjadi 3.11 dengan predikat baik. Namun demikian, tahun 2022 mengalami penurunan nilai sebesar 0.36 poin menjadi hanya 2.75 dengan predikat baik. Nilai SPBE meningkat kembali pada tahun 2023, nilai SPBE meningkat menjadi 3,72 dengan predikat sangat baik. Nilai SPBE yang semakin meningkat mencerminkan bahwa layanan pemerintah Kota Bogor telah banyak memanfaatkan teknologi digital dan *big data* sehingga sistem pemerintahan telah banyak yang terintegrasi. Hal inilah yang diharapkan dari adanya penilaian SPBE di setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

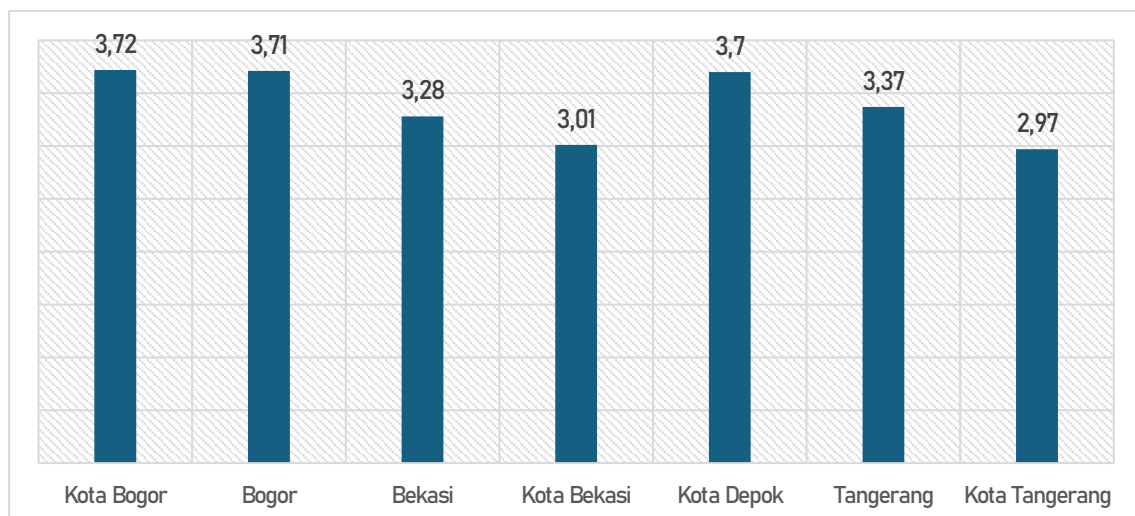


Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dan Kemenpan-RB 2023

Gambar 2.74. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Bogor Tahun 2019–2023

Apabila dibandingkan dengan daerah lain, nilai SPBE Kota Bogor tahun 2023 merupakan yang tertinggi dengan wilayah di sekitarnya. Wilayah yang mendapat predikat sangat baik untuk nilai SPBE seperti Kota Bogor adalah Kabupaten Bogor dan Kota Depok dengan nilai SPBE masing-masing 3,71 dan 3,70, sedangkan daerah lainnya hanya memperoleh predikat baik. Nilai SPBE terkecil yaitu pada daerah Kota Tangerang sebesar 2,97.

Daerah yang memiliki nilai SPBE cukup kecil perlu untuk mendorong transformasi digital agar tidak tertinggal dengan daerah lainnya. Dampak yang dapat timbul apabila SPBE kurang diterapkan ialah pengambilan keputusan oleh *stakeholder* menjadi kurang akurat, tidak adanya kesinambungan antara instansi pusat dan daerah, kualitas layanan publik yang kurang serta timbulnya kesenjangan karena minimnya perhatian akan pentingnya SPBE. Untuk meningkatkan nilai SPBE, maka dapat dilakukan dengan mewujudkan tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien, mewujudkan layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna, penyelenggaraan infrastruktur SPBE yang terintegrasi, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia SPBE.



Sumber: Kemenpan-RB 2023

Gambar 2.75. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Bogor dan Sekitarnya Tahun 2023

2.4.4. Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Tabel 2.47, Kota Bogor memiliki indeks inovasi daerah sebesar 56,48 dan termasuk dalam kategori inovatif, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 69,15 dengan kategori sangat inovatif. Bentuk inovasi daerah yang dilakukan diantaranya adalah inovasi tata publik pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Nilai indeks inovasi daerah di Provinsi Jawa Barat khususnya wilayah Jabodetabek yang tertinggi adalah Kabupaten Bogor dengan nilai sebesar 87,59.

Tabel 2.47. Nilai Indeks Inovasi Daerah Jabodetabek dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022

Kota/ Kabupaten/ Provinsi	Nilai/ Kategori	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
Kota Bogor	Nilai	30.640	5,162	57,8	56,48
	Kategori	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Inovatif	Inovatif
Bogor	Nilai	36.870	13.144	72,46	87,59
	Kategori	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif
Kota Depok	Nilai	200	1.754	41,52	48,74
	Kategori	Kurang inovatif	Sangat inovatif	Inovatif	Inovatif
Kota Tangerang	Nilai	-	10.762	62,7	53,23
	Kategori	Belum mengisi data	Sangat inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif
Tangerang	Nilai	100	2.274	41,16	54,7
	Kategori	Kurang inovatif	Sangat inovatif	Inovatif	Inovatif
Kota Bekasi	Nilai	11.170	4.669	51,74	66,26
	Kategori	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Inovatif	Sangat inovatif
Bekasi	Nilai	130	-	23,92	52,14
	Kategori	Kurang inovatif	-	Kurang inovatif	Inovatif
DKI Jakarta	Nilai	51.870	10.532	56,8	60,51
	Kategori	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif
Jawa Barat	Nilai	59.350	6,88	62,82	69,15
	Kategori	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023

2.4.5. Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh KPK sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Survei melibatkan tiga sumber data, yaitu sumber internal yang merupakan pegawai di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, serta sumber eksper atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman, dan lain lain. Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah tersebut. Terdapat tiga kategori nilai SPI, antara lain:

1. Rentan untuk nilai SPI yang berada di rentang 0 – 72,9;
2. Waspada untuk nilai SPI yang berada di rentang 73 – 77,9;
3. Terjaga untuk nilai SPI yang berada di rentang 78 – 100.

Berdasarkan Tabel 2.48, Kota Bogor di tahun 2023 memiliki nilai SPI sebesar 76,18 dan termasuk ke dalam kategori waspada. Di sisi lain, Kota Bogor memiliki nilai tertinggi dibandingkan daerah lain seperti Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Nilai tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yang hanya sebesar 69,60. Sejalan dengan hal tersebut, Kota Bogor menempati posisi tertinggi kedua untuk nilai SPI tahun 2023 di Provinsi Jawa Barat sedangkan daerah yang memiliki nilai SPI tertinggi adalah Kota Sukabumi sebesar 77,01. Selama tahun 2021 – 2023 nilai SPI cenderung fluktuatif namun selalu berada di kategori waspada. Bentuk tindakan pemerintah Kota Bogor dalam menindaklanjuti hasil SPI tahun 2022 adalah sosialisasi anti korupsi, adanya rencana pendidikan anti korupsi yang berlangsung dari mulai usia dini sehingga kurikulum pelajaran bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, serta pembinaan dan pendampingan pemerintah kota Bogor terhadap aparaturnya juga telah berlangsung sehingga dari tingkat terbawah hingga ke dinas dan instansi lainnya dapat bersama mencegah tindak pidana korupsi.

Tabel 2.48. Nilai Survei Penilaian Integritas Bodetabek dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023

Kota/ Kabupaten/ Provinsi	Nilai/ Kategori	Tahun		
		2021	2022	2023
Kota Bogor	Nilai	75,22	73,06	76,18
	Kategori	Waspada	Waspada	Waspada
Bogor	Nilai	71,74	64,27	69,44
	Kategori	Rentan	Rentan	Rentan
Kota Depok	Nilai	74,53	73,21	73,53
	Kategori	Waspada	Waspada	Waspada
Kota Tangerang	Nilai	76,91	71,3	74,13
	Kategori	Waspada	Rentan	Waspada
Tangerang	Nilai	73,13	71,67	73,86
	Kategori	Waspada	Rentan	Waspada
Kota Bekasi	Nilai	75,38	69,58	68,26
	Kategori	Waspada	Rentan	Rentan
Bekasi	Nilai	67,97	67,95	68,04
	Kategori	Rentan	Rentan	Rentan
Jawa Barat	Nilai	77,54	75,67	69,60
	Kategori	Waspada	Waspada	Rentan

Sumber: Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA) KPK, 2024

2.4.6. Kualitas Kebijakan

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengaturan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) digunakan sebagai indeks komposit dalam penilaian Reformasi Birokrasi di seluruh instansi pemerintah. Pada IKK terdapat dua dimensi yang dinilai, yakni Dimensi Perencanaan Kebijakan dan Dimensi Evaluasi Kebijakan. Pengukuran IKK dilakukan terhadap seluruh kebijakan Kementerian/ Lembaga/ Daerah yang

implementasinya telah berusia lebih dari 1 tahun. Pengukuran dilakukan setiap 2 tahun sekali, dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi serta untuk memberikan kesempatan bagi Kementerian/ Lembaga/ Daerah dilakukannya perbaikan-perbaikan terhadap hasil pengukuran. Berdasarkan data dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pemerintah Kota Bogor baru mengikuti IKK pada tahun 2023 dengan capaian nilai 65,00 termasuk ke dalam kategori baik. Sementara itu, Kabupaten Bogor meraih nilai IKK sebesar 90,53 termasuk ke dalam kategori sangat baik dan menjadi daerah dengan nilai IKK tertinggi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023. Di sisi lain, capaian nilai IKK Provinsi Jawa Barat tahun 2023 sebesar 87,36 dan termasuk ke dalam kategori sangat baik.

2.4.7. Kemandirian Daerah

Kemandirian suatu daerah dapat diukur dengan seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya dengan kemampuan keuangan daerah. Hal ini dikarenakan pelaksanaan program pembangunan daerah di berbagai bidang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Daerah yang mampu memperkecil tingkat ketergantungannya kepada pemerintah pusat dapat dikatakan sebagai daerah yang mandiri. Kemandirian suatu daerah dapat tercermin melalui indikator rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan rasio kapasitas fiskal daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling potensial dalam memperbesar porsi PAD. Pajak memainkan peran yang penting dalam menghasilkan penerimaan untuk menjalankan berbagai aktivitas dalam perekonomian. Rasio pajak daerah terhadap PDRB menggambarkan proporsi pendapatan pajak yang diperoleh oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan nilai total produk domestik bruto yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan pajak untuk membiayai berbagai program pembangunan, layanan publik, dan infrastruktur di tingkat daerah. Semakin tinggi nilai rasionya maka semakin besar kontribusi pajak daerah terhadap perekonomian wilayah tersebut. Hal tersebut menunjukkan tingkat kemandirian finansial dan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2.49. Nilai Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Bodetabek dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2023 (persen)

Kota/ Kabupaten/ Provinsi	Tahun									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bogor	1,292	1,231	1,265	1,444	1,403	1,493	1,109	1,170	1,408	1,575
Bogor	0,748	0,765	0,825	0,889	0,898	0,946	0,787	0,987	0,969	0,971
Kota Depok	1,131	1,275	1,282	1,441	1,304	1,435	1,349	1,572	1,690	1,667
Kota Tangerang	0,959	0,941	0,955	1,051	0,961	1,093	1,460	0,992	-	-
Tangerang	-	1,139	1,189	1,544	1,475	1,538	1,254	1,416	1,802	2,014
Kota Bekasi	1,319	1,456	1,475	1,672	1,737	1,808	1,614	1,688	1,832	1,795
Bekasi	0,489	0,563	0,559	0,545	0,542	0,605	0,613	0,590	0,574	0,602
Jawa Barat	0,992	0,959	1,896	1,345	1,861	0,924	0,818	0,855	0,889	0,835

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, Kabupaten Bogor Dalam Angka, Kota Depok Dalam Angka, Kota Tangerang Dalam Angka, Kabupaten Tangerang Dalam Angka, Kota Bekasi Dalam Angka, Kabupaten Bekasi Dalam Angka, dan Jawa Barat Dalam Angka (diolah)

Berdasarkan Tabel 2.49 terlihat bahwa rasio pajak daerah terhadap PDRB Kota Bogor berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat selama tahun 2014 hingga 2023. Jika dibandingkan dengan wilayah lain, nilai rasio Kota Bogor pada tahun 2023 masih lebih kecil dibandingkan wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Akan tetapi, rasio pajak daerah terhadap PDRB Kota Bogor secara keseluruhan lebih besar dibandingkan Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Kota Bogor sudah cukup baik.

Tabel 2.50. Nilai Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Bodetabek dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2023

Kota/ Kabupaten/ Provinsi	Nilai/ Kategori	Tahun								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bogor	Nilai	0,43	0,50	1,74	2,064	1,811	1,168	1,808	1,434	1,817
	Kategori	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi
Bogor	Nilai	0,25	0,31	6,24	5,148	5,563	4,343	6,209	1,984	2,110
	Kategori	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
Kota Depok	Nilai	1,19	1,35	2,81	2,741	2,544	2,521	3,400	2,625	2,481
	Kategori	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Kota Tangerang	Nilai	0,65	0,89	4,08	3,913	4,223	1,899	4,487	2,003	1,847
	Kategori	Sedang	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
Tangerang	Nilai	0,61	0,62	5,10	6,120	4,318	7,509	4,811	1,648	1,785
	Kategori	Sedang	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi
Kota Bekasi	Nilai	0,53	0,68	4,87	4,349	6,916	5,873	6,448	1,505	1,658
	Kategori	Sedang	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi
Bekasi	Nilai	0,69	0,75	5,26	4,524	4,409	4,686	4,888	1,688	1,662
	Kategori	Sedang	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi
Jawa Barat	Nilai	0,27	0,30	2,86	3,150	3,171	4,676	3,602	2,546	2,456
	Kategori	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (2015-2023)

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah. Berdasarkan Tabel 2.50, rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kota Bogor pada tahun 2023 masih lebih kecil dibandingkan wilayah Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kota Tangerang. Selama tahun 2015 hingga 2023, rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kota Bogor memiliki tren yang berfluktuasi. Secara keseluruhan, Kota Bogor memiliki rasio Kapasitas Fiskal Daerah terkecil jika dibandingkan dengan wilayah Bodetabek. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kota Bogor masih perlu ditingkatkan kembali.

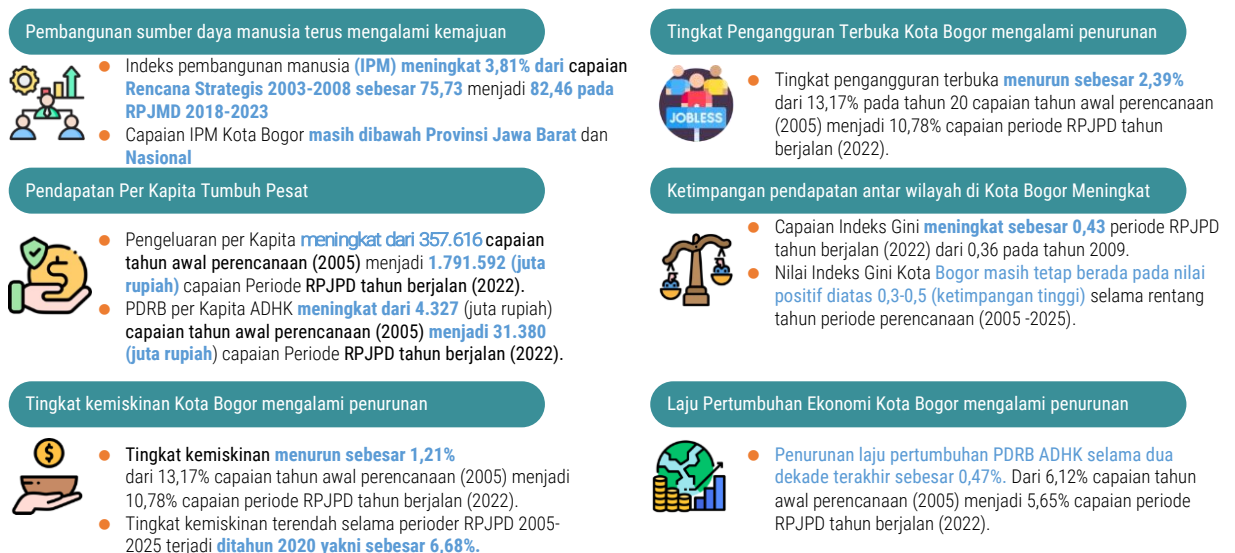
2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Dalam upaya mewujudkan visi Kota Bogor, pembangunan di daerah Kota Bogor telah mencapai kemajuan yang berarti. Perwujudan pencapaian pembangunan penuh dengan perubahan yang kompleks karena kondisi regional, nasional dan global yang cukup dinamis. Meskipun pencapaian pembangunan ini telah menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bogor untuk mempercepat kemajuan daerah, namun masih terdapat beberapa tantangan yang harus ditangani untuk memastikan bahwa kemajuan ini akan terus berlanjut.

Keberhasilan pembangunan ini juga tidak terlepas dari arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD Kota Bogor tahun 2005-2025 yang berhasil diterjemahkan ke dalam pembangunan 5 (lima) tahunan dalam dokumen RPJMD dan dioperasionalkan dalam pembangunan tahunan dalam dokumen RKPD. Selain itu, keberhasilan pembangunan ini juga dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor, seperti kepemimpinan, tata kelola pemerintahan yang adaptif, stabilitas politik dan keamanan, ketersediaan sumber daya.

2.5.1. Refleksi Pembangunan

Ditengah proses pembangunan yang terus dilakukan selama dua dekade Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor tahun 2005-2025 telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang pembangunan. Berbagai strategi dan kebijakan pembangunan yang diimplementasikan dalam empat tahapan RPJMD sebelumnya juga telah diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang bermuara pada “Kota Jasa yang Nyaman dengan Masyarakat Madani dan Pemerintah Amanah” sesuai dengan visi RPJPD Kota Bogor 2005-2025. Pembangunan di Kota Bogor telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan penyediaan infrastruktur yang memadai, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi kemiskinan. Pemerintah Kota Bogor terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara lebih merata untuk seluruh penduduk dan daya saing dalam setiap aspek pembangunan.



Gambar 2.76. Refleksi Pembangunan Kota Bogor 2005-2025

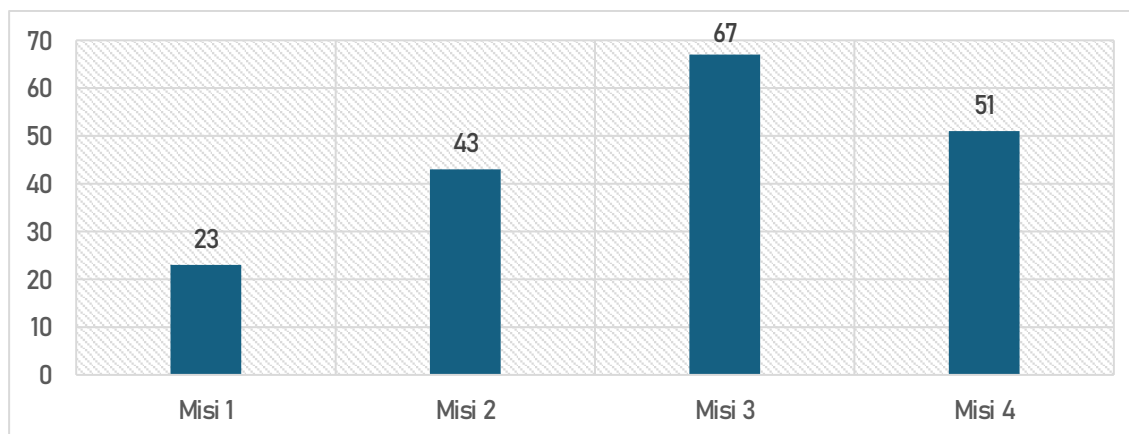
2.5.1. Evaluasi Pencapaian RPJMD Periode Tahun 2005 – 2025

2.5.1.1. Renstra 2005–2009

Pada Renstra 2005–2009, Kota Bogor mengusung visi “Kota Jasa yang Nyaman dengan Masyarakat Madani dan Pemerintah Amanah”. Pelaksanaan Renstra 2005–2009 ini merupakan tahap pertama dalam mencapai target-target pembangunan jangka Panjang yang tertuang di dalam RPJPD 2005–2024. Upaya untuk mewujudkan visi ini dijabarkan melalui empat misi pembangunan jangka menengah, yaitu:

1. Misi 1 : Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan titik berat pada jasa yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.
2. Misi 2 : Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.
3. Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan berketerampilan.
4. Misi 4 : Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum.

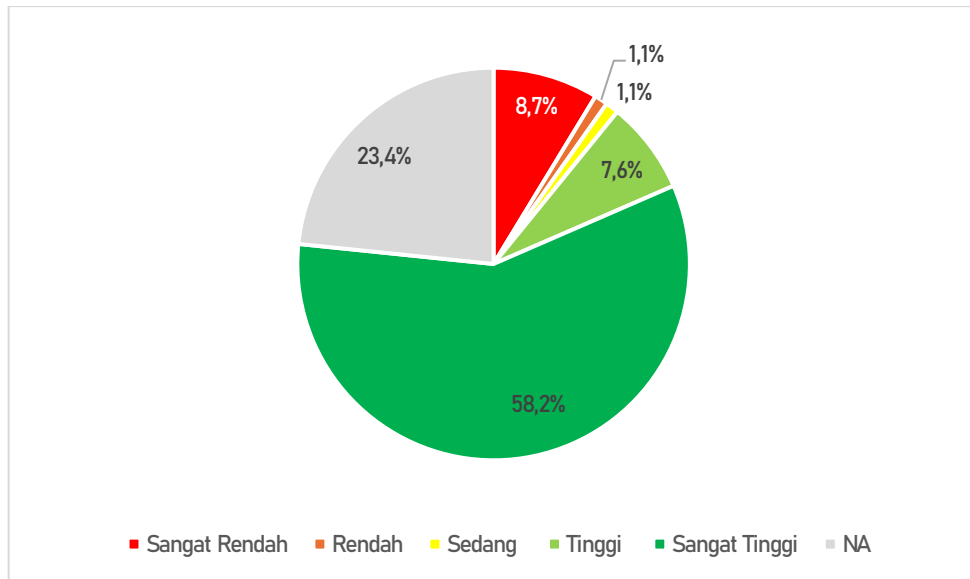
Selanjutnya, keempat misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran. Terdapat sebanyak 38 (tiga puluh delapan) tujuan dan 62 (enam puluh dua) sasaran yang ada dalam Renstra 2005–2009. Ketercapaian dari misi ini dilakukan dengan mengukur indikator kinerja tujuan dan sasaran. Terdapat sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) indikator tujuan dan sasaran yang melekat. Selengkapnyanya disajikan sebagai berikut.



Gambar 2.77. Jumlah Indikator Setiap Misi Pada Renstra Periode 2005–2009

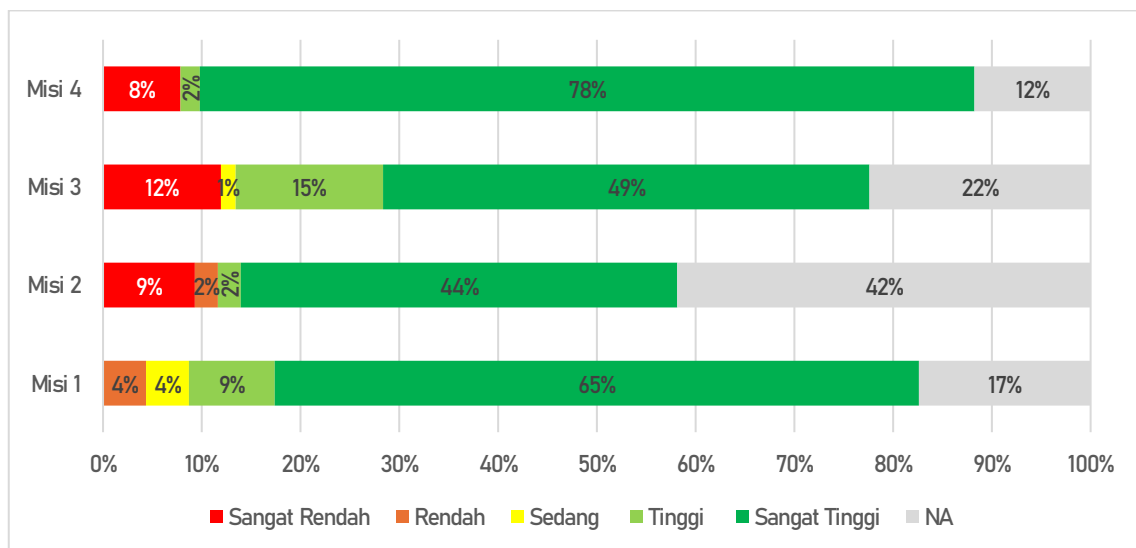
Di antara keempat misi yang ada di Renstra Kota Bogor tahun 2005–2009, misi 3 merupakan misi yang paling banyak jumlah indikator kinerja tujuan dan sasaran, dengan jumlah total indikator yaitu 67 indikator. Sementara ketiga misi yang lain, yaitu: misi 1 (23 indikator), misi 2 (43 indikator), dan misi 4 (51 indikator). Adapun total jumlah indikator adalah 184 indikator.

Jika ditinjau dari jumlah total 184 indikator pada seluruh misi, maka bisa diperoleh kesimpulan bahwa sekitar 107 indikator (58,2%) masuk dalam kategori pencapaian kinerja sangat tinggi (warna hijau tua), 14 indikator (7,6%) masuk dalam kategori pencapaian tinggi (warna hijau muda), masing-masing 2 indikator (1,1%) masuk dalam kategori rendah dan sedang. Namun, masih ada 16 indikator (8,7%) yang status pencapaian kinerjanya sangat rendah (warna merah), serta masih ada 43 indikator (23,4%) yang data capaian kinerjanya tidak tersedia (NA, berwarna abu-abu). Rekapitulasi ketercapaian Renstra Kota Bogor 2005–2009 berdasarkan indikator kinerja dapat dilihat selengkapnyanya pada gambar berikut ini.



Gambar 2.78. Rekapitulasi Ketercapaian Renstra Kota Bogor 2005-2009

Ditinjau dari persentase capaian seluruh indikator Renstra Kota Bogor 2005-2009 pada masing-masing misi sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.79 dapat diketahui bahwa misi dengan pencapaian paling baik berhasil dicapai oleh misi 4 yaitu “Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum”. Misi 4 tersebut memiliki capaian indikator kinerja berstatus sangat tinggi yaitu 78%, indikator kinerja berstatus tinggi 2%, namun masih ada 8% indikator kinerja berstatus sangat rendah. Pada misi 1 “Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan titik berat pada jasa yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada”, indikator kinerja yang berstatus sangat tinggi dan tinggi masing-masing adalah 65% dan 9%. Sedangkan misi 2 “Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan”, dan misi 3 “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan berketerampilan”, indikator kinerja yang berstatus sangat tinggi masih kurang dari 50%, yaitu masing-masing 44% dan 49%, namun di antara keempat misi pada Renstra Kota Bogor periode 2005-2009 tersebut, misi 3 yang capaian indikator kinerja berstatus sangat rendah masih cukup banyak, yakni 12%.



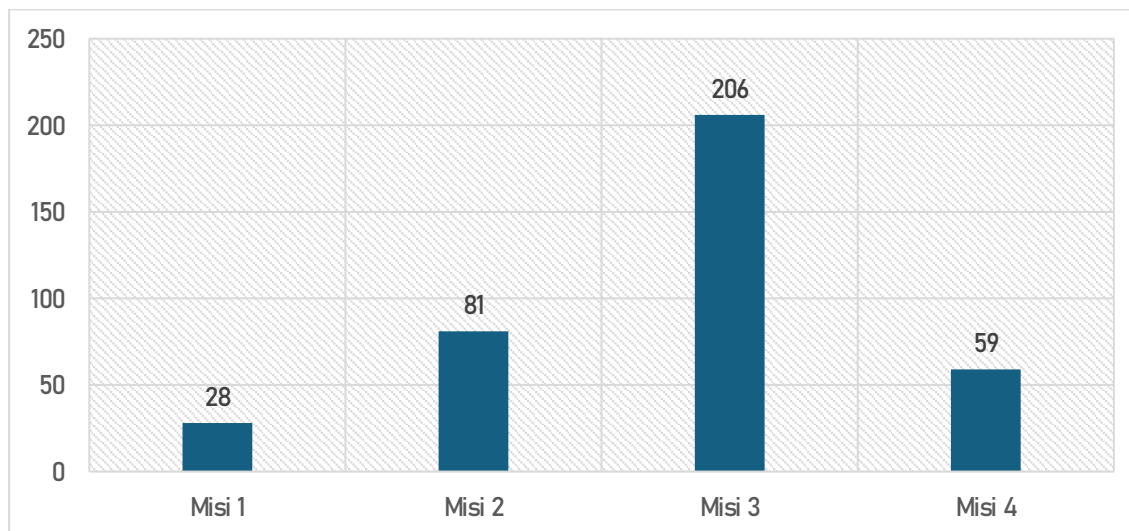
Gambar 2.79. Persentase Capaian Seluruh Indikator Renstra Kota Bogor 2005-2009 Pada Masing-Masing Misi.

2.5.1.2. RPJMD 2010–2014

Pada RPJMD periode 2010–2014, visi yang diusung oleh Kota Bogor adalah “Kota perdagangan dengan sumberdaya manusia produktif dan pelayanan prima”. Pelaksanaan RPJMD periode 2010–2014 ini merupakan tahap kedua dalam mencapai target-target pembangunan Jangka Panjang yang tertuang di dalam RPJPD 2005–2024. Upaya untuk mewujudkan visi ini dijabarkan melalui empat misi pembangunan jangka menengah, yaitu:

1. Misi 1: Mengembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada kegiatan jasa perdagangan.
2. Misi 2: Mewujudkan kota yang bersih dengan sarana prasarana transportasi yang berkualitas.
3. Misi 3: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan penekanan pada penuntasan wajib belajar 12 tahun, serta peningkatan kesehatan dan keterampilan masyarakat.
4. Misi 4: Peningkatan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.

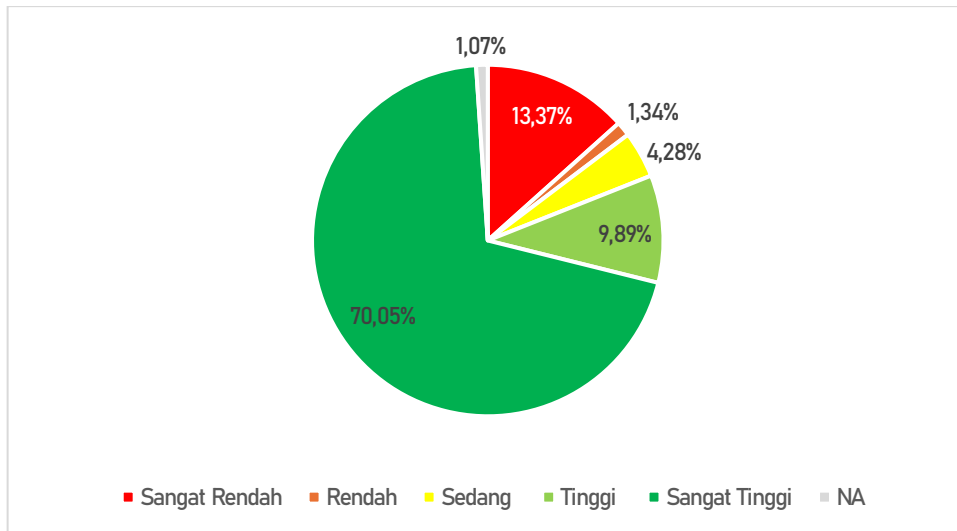
Selanjutnya, keempat misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran. Terdapat sebanyak 30 (tiga puluh) tujuan dan 47 (empat puluh tujuh) sasaran yang ada dalam RPJMD periode 2010–2014. Ketercapaian dari misi ini dilakukan dengan mengukur indikator kinerja tujuan dan sasaran. Terdapat sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) indikator tujuan dan sasaran yang melekat. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 2.80. Jumlah Indikator Setiap Misi Pada RPJMD Periode 2010–2014

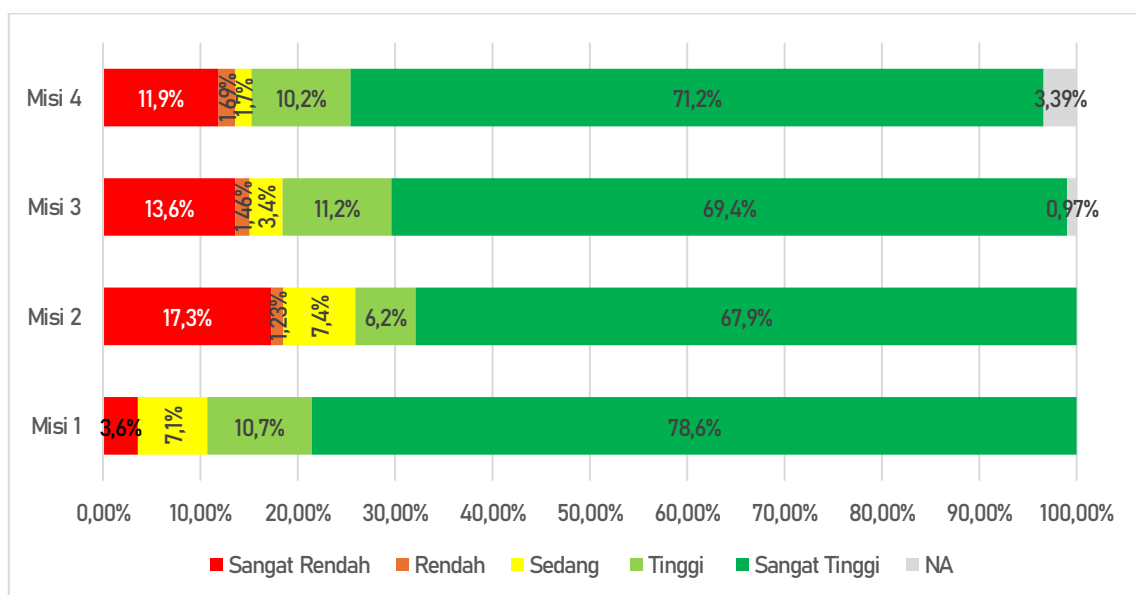
Di antara keempat misi yang ada di RPJMD Kota Bogor tahun 2010–2014, misi 3 merupakan misi yang paling banyak jumlah indikator kinerja tujuan dan sasaran, dengan jumlah total indikator yaitu 206 indikator. Sementara ketiga misi yang lain, yaitu: misi 1 (28 indikator), misi 2 (81 indikator), dan misi 4 (59 indikator). Adapun total jumlah indikator adalah 374 indikator.

Jika ditinjau dari jumlah total 374 indikator pada seluruh misi, maka bisa diperoleh kesimpulan bahwa sekitar 262 indikator (70,05%) masuk dalam kategori pencapaian kinerja sangat tinggi (warna hijau tua), 37 indikator (9,89%) masuk dalam kategori pencapaian tinggi (warna hijau muda). Indikator kinerja berstatus pencapaian sedang dan rendah, masing-masing berjumlah 16 indikator (4,28%) dan 5 indikator (1,34%). Namun, masih ada 50 indikator (13,37%) yang status pencapaian kinerjanya sangat rendah (warna merah). Rekapitulasi ketercapaian RPJMD Kota Bogor 2010–2014 berdasarkan indikator kinerja dapat dilihat selengkapnya pada gambar berikut ini.



Gambar 2.81. Rekapitulasi ketercapaian RPJMD Kota Bogor 2010-2014

Ditinjau dari persentase capaian seluruh indikator RPJMD Kota Bogor 2010-2014 pada masing-masing misi sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.82 dapat diketahui bahwa misi dengan pencapaian paling baik berhasil dicapai oleh misi 1 yaitu “Mengembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada kegiatan jasa perdagangan”. Misi 1 tersebut memiliki capaian indikator kinerja berstatus sangat tinggi yaitu 78,57%, indikator kinerja berstatus tinggi 10,71%, serta indikator kinerja berstatus sedang 7,14%, namun masih ada 3,57% indikator kinerja berstatus sangat rendah. Pada misi 4 “Peningkatan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat”, indikator kinerja yang berstatus sangat tinggi dan tinggi masing-masing adalah 71,19% dan 10,17%. Misi 3 “Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan penekanan pada penuntasan wajib belajar 12 tahun, serta peningkatan kesehatan dan keterampilan masyarakat” dan Misi 2 “Mewujudkan kota yang bersih dengan sarana prasarana transportasi yang berkualitas”, indikator kinerja yang berstatus sangat tinggi, yaitu masing-masing 69,42% dan 67,90%, namun di antara keempat misi pada RPJMD Kota Bogor periode 2010-2014 tersebut, misi 2 yang capaian indikator kinerja berstatus sangat rendahnya masih cukup banyak, yakni 17,28%.



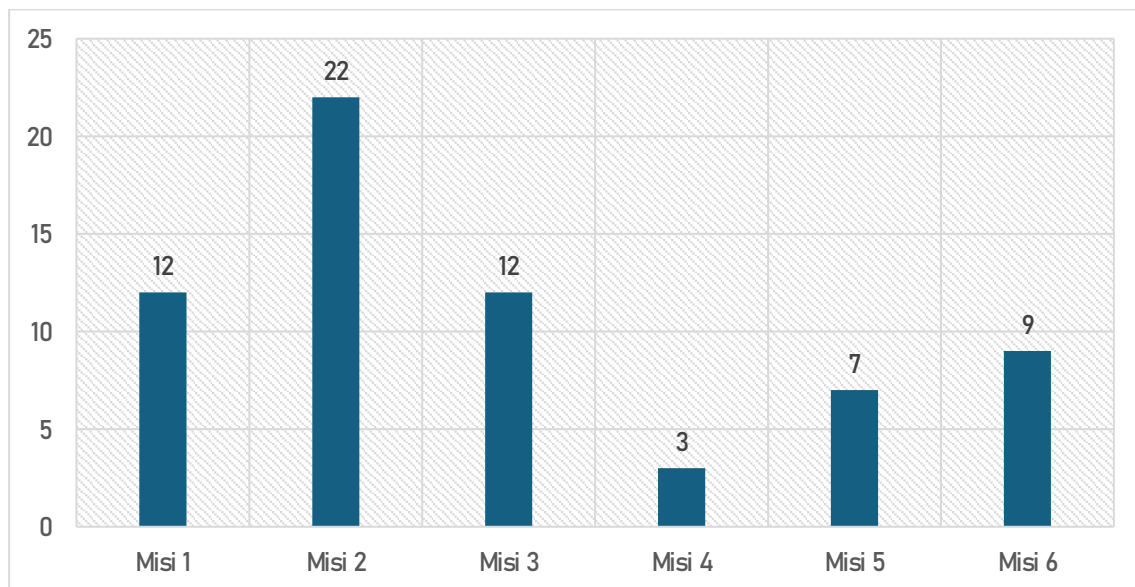
Gambar 2.82. Persentase capaian seluruh indikator RPJMD Kota Bogor 2010-2014 pada masing-masing misi

2.5.1.3. RPJMD 2015-2019

Kota Bogor mengusung visi “Kota Bogor yang nyaman, beriman dan transparan” pada periode RPJMD 2015-2019. Pelaksanaan RPJMD 2015-2019 merupakan tahap ketiga dalam mencapai target-target pembangunan jangka Panjang. Upaya untuk mewujudkan visi ini dijabarkan melalui tujuh misi pembangunan jangka menengah yaitu:

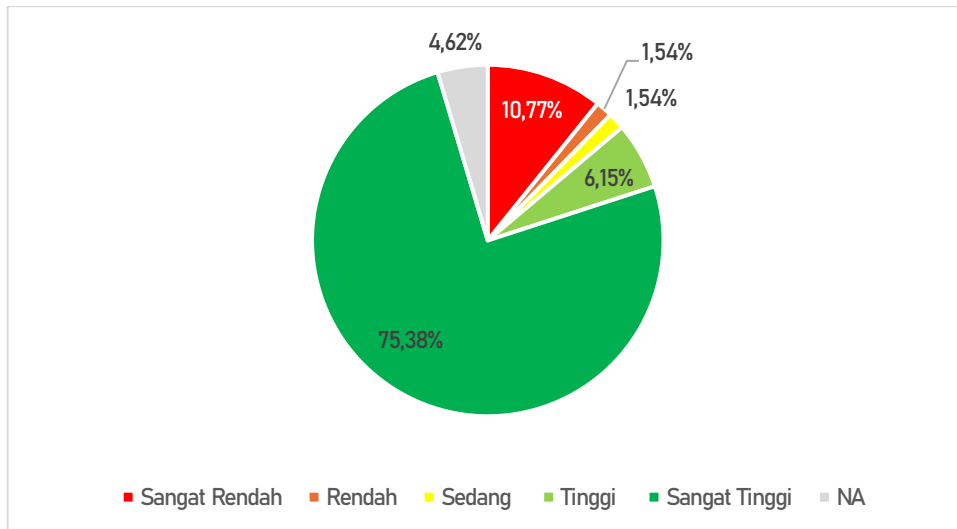
1. Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi
2. Mewujudkan Bogor sebagai Kota Sehat dan makmur
3. Mewujudkan Bogor sebagai kota yang berwawasan lingkungan
4. Mewujudkan Bogor sebagai Kota yang berorientasi pada kepariwisataan dan ekonomi kreatif
5. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan transparan
6. Mengokohkan Peran Moral Agama dan Kemanusiaan Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani

Selanjutnya, misi dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran. Terdapat sebanyak 6 (enam) tujuan dan 24 sasaran yang ada dalam RPJMD. Ketercapaian dari misi ini dilakukan dengan mengukur indikator kinerja tujuan dan sasaran. Terdapat sebanyak 65 indikator tujuan dan sasaran yang melekat. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut ini.



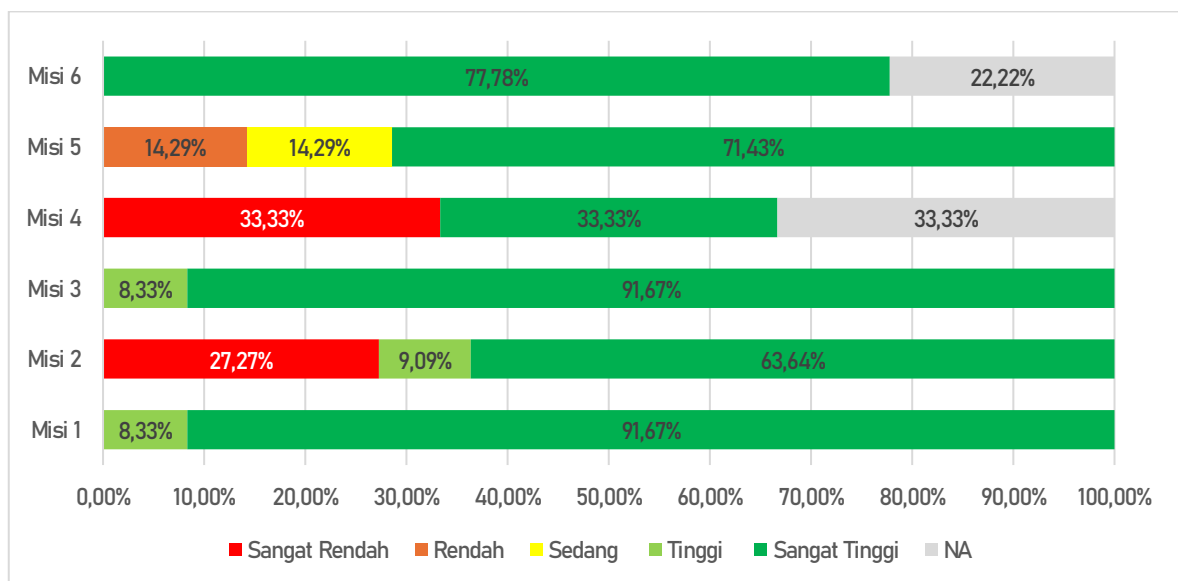
Gambar 2.83. Jumlah Indikator Setiap Misi Pada RPJMD Kota Bogor 2015-2019

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat pencapaian periode RPJMD 2015-2019 relatif tinggi. Pencapaian indikator sasaran berstatus sangat tinggi 76,92 persen mengindikasikan bahwa upaya pencapaian visi lebih baik dibandingkan RPJMD periode sebelumnya yaitu 71,51 persen berstatus capaian sangat tinggi. Proporsi terbesar kedua dan ketiga yaitu indikator berstatus sangat rendah yaitu 9,23 persen dan indikator berstatus tinggi yaitu 6,15 persen. Pada periode RPJMD 2015-2019 masih terdapat indikator dengan status NA yakni sebesar 4,62 persen. Berikut adalah hasil rekapitulasi ketercapaian RPJMD Kota Bogor 2015-2019.



Gambar 2.84. Rekapitulasi Ketercapaian RPJMD Kota Bogor 2015-2019

Ditinjau berdasarkan capaian seluruh indikator RPJMD Kota Bogor 2015-2019 pada masing-masing misi sebagaimana dilihat pada Gambar 2.85 dapat diketahui bahwa misi dengan pencapaian paling baik berhasil dicapai oleh misi satu dan tiga yaitu 1) Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi dan 2) Mewujudkan Bogor sebagai kota yang berwawasan lingkungan. Keduanya memiliki capaian indikator kinerja 91,67 persen yang berstatus sangat tinggi. Sementara sisanya sebesar 8,33 persen berstatus capaian tinggi. Adapun misi yang memiliki capaian dengan status sangat rendah terbesar adalah misi keempat “Mewujudkan Bogor sebagai Kota yang berorientasi pada kepariwisataan dan ekonomi kreatif” yakni sebesar 33,33% dan misi kedua “Mewujudkan Bogor sebagai Kota Sehat dan makmur” yakni sebesar 27,27%. Indikator dengan status ketercapaian pada periode ini diantaranya adalah indeks gini ratio, angka kemiskinan, Tingkat Pengangguran terbuka, dan Jumlah wirausahawan ekonomi kreatif yang produktif. Pada periode ini masih terdapat indikator dengan capaian NA yakni pada misi keempat sebesar 33,33% dan misi keenam sebesar 22,22%. Berikut adalah hasil capaian indikator RPJMD Kota Bogor 2015-2019.



Gambar 2.85. Persentase Capaian Seluruh Indikator RPJMD Kota Bogor 2015-2019 Pada Masing-Masing Misi

Misi pertama berbunyi “Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi”. Fokus utama pada misi pertama yaitu pemerintah Kota Bogor mendorong pengelolaan kota yang lebih efisien, transparan dan partisipatif menjadi potensi *enabler smart city*. Pertumbuhan penduduk Kota Bogor yang semakin meningkat sementara memiliki luas kota yang terbatas sehingga menimbulkan berbagai persoalan di antaranya adalah kesenjangan sosial, kemacetan, kemiskinan, masalah kesehatan dan berbagai persoalan lainnya. Kondisi ini menuntut Pemerintah Daerah untuk menghadirkan solusi dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki melalui implementasi *smart city*. Pada berbagai kota di dunia, konsep *smart city* telah menstimulasi peran aktif masyarakat dalam pembangunan sehingga terjadi interaksi yang lebih dinamis dan erat antara Pemerintah Daerah dengan warga kota. Hal ini sekaligus menggeser pola pemerintahan menjadi *citizen centric* dan *stakeholders centric*. Hal ini juga dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas masyarakat dalam menunjang visi misi Kota Bogor sehingga membawa Kota Bogor memperoleh penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* di tahun 2020.

Misi kedua berbunyi “Mewujudkan Bogor sebagai Kota Sehat dan Makmur”. Fokus utama pada misi kedua ini adalah i) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; ii) Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor, dan iii) Terwujudnya stabilitas perekonomian masyarakat. Kota Bogor berhasil menunjukkan kinerja yang baik dalam meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat ditunjukkan dengan peningkatan angka usia harapan hidup sebesar 73,41 tahun pada tahun 2019, meningkat dibandingkan kondisi awal RPJMD tahun 2015 yaitu 72,58 tahun. Kota Bogor perlu meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hingga tahun 2019, diketahui bahwa ketimpangan kesejahteraan Kota Bogor semakin tinggi ditunjukkan dengan indeks gini yang terus meningkat yaitu 0,41 di tahun 2019, angka tersebut meningkat drastis dibandingkan kondisi awal RPJMD sebesar 0,34. Selanjutnya, Kota Bogor juga dianggap berhasil dalam menjaga stabilitas perekonomian masyarakat ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang berada di atas capaian Provinsi Jawa Barat dan nasional.

Misi ketiga berbunyi “Mewujudkan Bogor sebagai kota yang berwawasan lingkungan”. Fokus utama pada misi ini adalah mempertahankan kualitas daya dukung lingkungan dan daya tampung ruang Kota Bogor ditunjukkan dengan indikator i) Persentase pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budidaya yang sesuai RTRW, ii) Persentase ketercapaian Rencana Struktur Ruang; iii) Indeks Kualitas Air, dan iv) Indeks Kualitas Udara. Keempat indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pada misi ketiga ini pemerintah juga secara konsisten terus memantapkan Infrastruktur. Diketahui bahwa infrastruktur menjadi pondasi dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan infrastruktur yang baik diharapkan mampu meningkatkan efisiensi logistik, memperlancar transportasi dan meningkatkan daya saing produk-produk lokal. Pembangunan infrastruktur dapat memperkuat konektivitas antar pusat perekonomian, kawasan strategis perdagangan dan pariwisata. Kedepan Kota Bogor perlu menyusun grand desain pembangunan infrastruktur yang terintegrasi agar memastikan bahwa pembangunan infrastruktur telah sejalan dengan pembangunan sektor-sektor lainnya.

Misi keempat yaitu “Mewujudkan Bogor sebagai Kota yang berorientasi pada kepariwisataan dan ekonomi kreatif”. Fokus utama misi keempat adalah meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menunjang perekonomian masyarakat. Diketahui bahwa pariwisata dan Ekraf menjadi salah satu pondasi utama perekonomian Kota Bogor. Kota Bogor memiliki posisi strategis karena berada didekat Ibukota Indonesia serta Ibukota Provinsi Jawa sehingga berpotensi dalam mengembangkan pembangunan di bidang jasa pelayanan dan pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kunjungan wisatawan yang terus meningkat. Pada tahun 2019, jumlah kunjungan wisatawan

sebanyak 9.160.885 kunjungan, meningkat drastis sebesar 131,71 persen dibandingkan kondisi awal RPJMD tahun 2015.

Misi kelima yaitu “Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan transparan”. Fokus pada misi kelima ini adalah mewujudkan birokrasi pemerintah yang berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, serta mampu melayani publik secara prima. Keberhasilan misi kelima dinilai berdasarkan indikator i) Indeks Kepuasan Masyarakat; ii) Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; iii) Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; iv) Indeks Reformasi Birokrasi; v) Opini BPK; vi) Level maturitas SPIP; dan vii) Indeks Kepuasan Masyarakat. Sebagian besar indikator tersebut berstatus capaian sangat baik. Hanya dua indikator yang berstatus sedang dan rendah yaitu i) Indeks Reformasi Birokrasi dan ii) Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi.

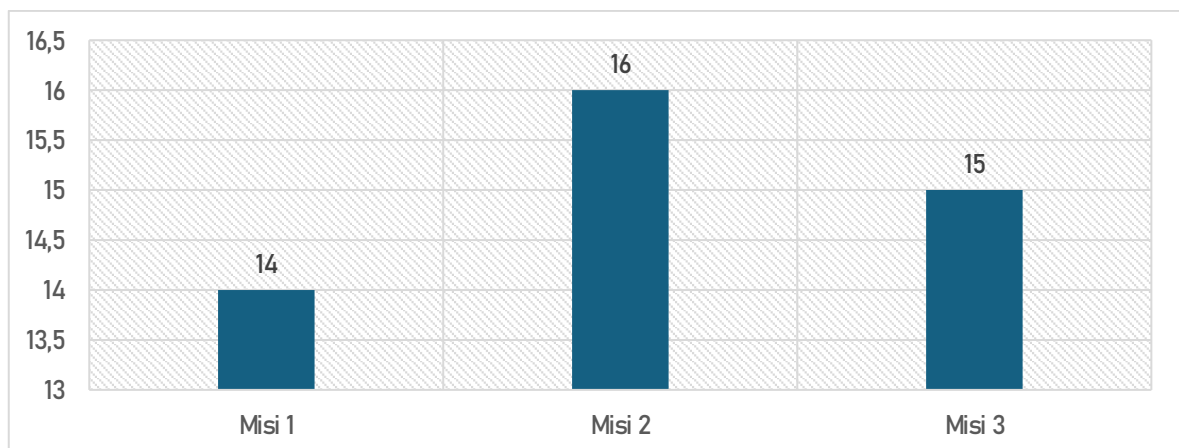
Misi terakhir yaitu “Mengokohkan Peran Moral Agama dan Kemanusiaan Untuk Mewujudkan Masyarakat Madan”. Fokus utama pada misi keenam adalah mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebhinekaan. Keberhasilan misi kelima dinilai berdasarkan indikator i) Indeks Rasa Aman; ii) Indeks Toleransi; iii) Angka kriminalitas; iv) Prevalensi HIV/AIDS; v) Persentase penurunan kasus narkoba; vi) Persentase penanganan bencana yang sesuai waktu tanggap; vii) Persentase deteksi dini permasalahan intoleransi; viii) Persentase pencegahan dan penanganan terjadinya konflik SARA; dan ix) Persentase tingkat kemudahan mendirikan tempat ibadah. Dari Sembilan indikator tersebut, delapan di antaranya (89,9 persen) berstatus capaian sangat tinggi dan hanya terdapat satu indikator dengan status capaian sangat rendah yaitu prevalensi HIV/AIDS.

2.5.1.4. RPJMD 2019-2024

Kota Bogor mengusung visi “Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga” pada periode RPJMD 2019-2024. Pelaksanaan RPJMD 2019-2024 merupakan tahap keempat dalam mencapai target-target pembangunan jangka Panjang. Upaya untuk mewujudkan visi ini dijabarkan melalui tujuh misi pembangunan jangka menengah yaitu:

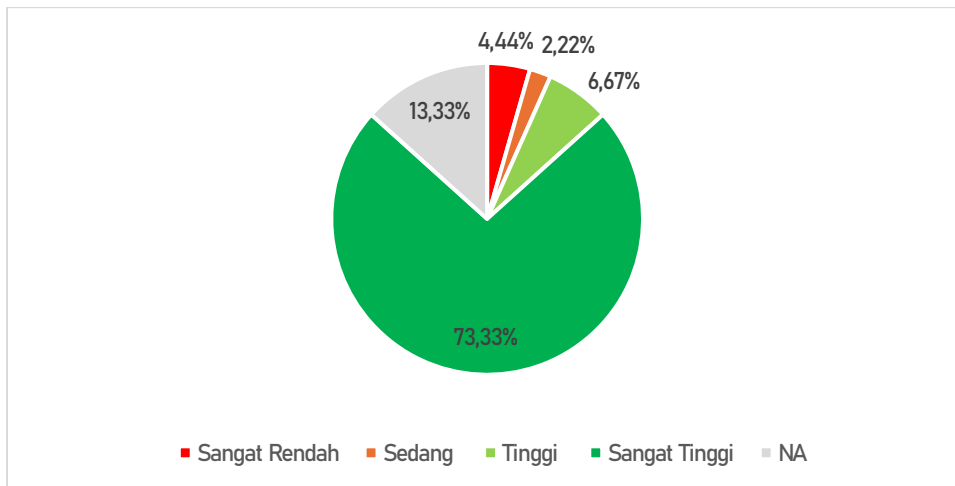
1. Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat
2. Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas
3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Ketiga misi selanjutnya dijabarkan kedalam 5 (lima) tujuan dan 17 sasaran. Ketercapaian dari misi ini dilakukan dengan mengukur indikator kinerja tujuan dan sasaran. Terdapat sebanyak 45 indikator tujuan dan sasaran yang melekat. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut ini.



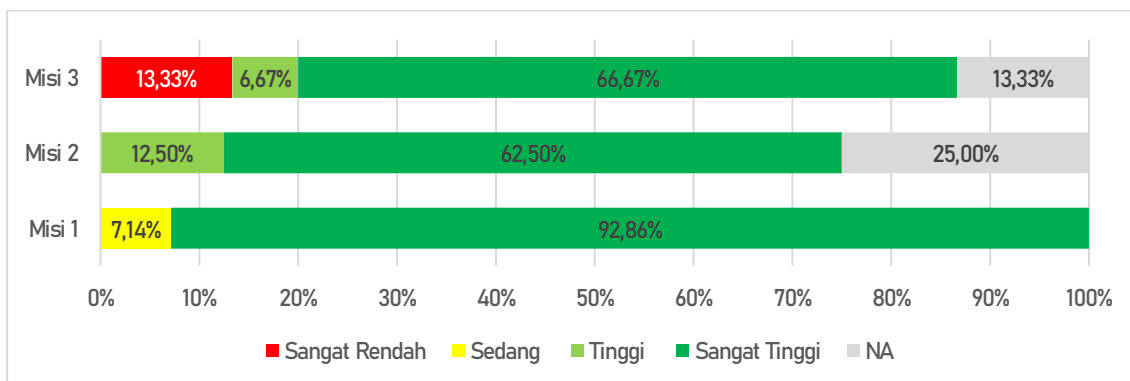
Gambar 2.86. Jumlah Indikator Setiap Misi Pada RPJMD Kota Bogor 2019-2024

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat pencapaian periode RPJMD 2019–2024 menjadi yang tertinggi di antara RPJMD periode sebelumnya. Pencapaian indikator sasaran berstatus sangat tinggi 73,33 persen mengindikasikan bahwa upaya pencapaian visi tidak lebih baik dibandingkan RPJMD periode sebelumnya yaitu 76,92 persen berstatus capaian sangat tinggi pada periode 2015–2019. Angka capaian ini lebih baik jika dibandingkan dengan capaian pada periode 2010–2014 yakni sebesar 70,05 persen. Pada periode ini masih terdapat indikator dengan capaian sangat rendah yakni sebesar 4,44 persen, capaian dengan status sedang 2,22 persen, dan 6,67 persen indikator berstatus capaian tinggi. Berikut adalah rekapitulasi capaian indikator pada RPJMD Kota Bogor periode 2019–2024.



Gambar 2.87. Rekapitulasi Ketercapaian RPJMD Kota Bogor 2019–2024

Ditinjau berdasarkan capaian seluruh indikator RPJMD Kota Bogor 2019–2024 pada masing-masing misi sebagaimana dilihat pada Gambar 2.88 dapat diketahui bahwa misi dengan pencapaian paling baik berhasil dicapai oleh misi pertama yaitu mewujudkan Kota Bogor yang Sehat. Misi pertama memiliki capaian indikator kinerja 92,86 persen yang berstatus sangat tinggi. Peringkat kedua diraih oleh misi ketiga dengan pencapaian indikator sebesar 66,67 persen berstatus sangat tinggi. Adapun misi kedua, hanya sebesar 62,5 persen saja yang berstatus sangat tinggi. Pada periode ini masih terdapat indikator dengan status capaian sangat rendah yakni pada misi ketiga sebesar 13,33%. Indikator dengan status capaian sangat rendah tersebut adalah indikator indeks gini ratio dan angka kemiskinan. Kedua indikator tersebut juga ketercapaiannya berstatus sangat rendah pada RPJMD periode 2015–2019. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dan kemiskinan masih menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kota Bogor. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 2.88. Persentase Capaian Seluruh Indikator RPJMD Kota Bogor 2019–2024 Pada Masing–Masing Misi

Misi pertama yaitu “Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat”. Kesehatan menjadi salah satu prioritas utama dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Fokus utama pada misi pertama ini adalah mewujudkan masyarakat Kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas. Penciri keberhasilan pada misi pertama ini adalah melalui pencapaian Indeks Kesehatan dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks Kesehatan Kota Bogor diketahui terus menunjukkan kinerja yang meningkat mencapai 83,28, meningkat dibandingkan kondisi sebelumnya yaitu sebesar 81,86. Adapun untuk indikator Indeks kualitas lingkungan hidup Kota Bogor menunjukkan angka sebesar 58,597. Kontributor utama pembentuk IKLH adalah indeks kualitas air dan indeks kualitas udara yaitu masing-masing memiliki poin sebesar 51,39 dan 98,36.

Misi Kedua berbunyi “Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas”. Diyakini bahwa daerah dengan kualitas SDM yang unggul akan mengantarkan pada kesuksesan pada setiap bidang pembangunan. Skill (keterampilan) dan pendidikannya dapat mempengaruhi daya saing SDM (Dessler, et al, 2004). Todaro dan Smith (2015) memperkuat argumentasi tersebut dan mendapati bahwa pendidikan merupakan salah satu pilar penting untuk mendorong peningkatan produktivitas. Semakin tinggi keterampilan dan tingkat pendidikan di suatu daerah maka semakin tinggi pula daya saing SDM di daerah tersebut. Ditinjau berdasarkan capaian seluruh indikator pada misi kedua sebagian besar menunjukkan kinerja yang sangat baik yaitu sebesar 62,5 persen.

Terakhir yaitu misi ketiga yang berbunyi “Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera”. Sama dengan periode sebelumnya, Kota Bogor berhasil meningkatkan kinerjanya. Meski perekonomian Kota Bogor sempat berkontraksi akibat Pandemi Covid 19, namun pemerintah daerah cukup cepat beradaptasi dan merespon dengan serangkaian strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi. Hingga akhirnya, perekonomian berangsur pulih dan terkoreksi di tahun 2022 yaitu pertumbuhannya menjadi 5,56 persen. Diketahui bahwa Kota Bogor mengandalkan sektor pariwisata dan jasa sebagai penggerak utama perekonomian. Keduanya menjadi sektor yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia belakangan ini. BPS mengumumkan telah terjadinya penurunan yang begitu tajam jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yaitu mencapai 99,83%. *World Tourism Organization (UNWTO)* yaitu sebuah organisasi pariwisata dunia menyebutkan bahwa Asia Pasifik menjadi wilayah yang pariwisatanya terdampak paling parah karena paling pertama dilanda Pandemi. Akan tetapi, Kota Bogor dinilai berhasil melalui masa-masa yang sulit tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan jangka panjang (RPJPD) 2005-2025, dapat disampaikan beberapa Rekomendasi terkait kelanjutan pembangunan yang dirasa penting. Beberapa rekomendasi yang diberikan antara lain:

1. yang dicanangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang selama dua decade yang lalu antara lain: RPJPD mendatang perlu dibuat secara lebih kuantitatif dari sisi bahwa sasaran pokok yang dirumuskan perlu diturunkan ke dalam seperangkat indikator yang terukur dan dilengkapi dengan target, baik target lima tahunan maupun target akhir 2045.

Tantangan dari penyusunan RPJPD secara lebih kuantitatif ini adalah bahwa di satu sisi RPJPD ini merupakan dokumen rencana pembangunan yang paling makro dibanding rencana pembangunan yang lain karena horizonnya yang berjangka panjang, namun di sisi lain harus terukur secara kuantitatif sementara keterukuran relatif mudah dibuat untuk substansi yang sifatnya mikro atau meso. Inilah tantangannya dari menyusun RPJPD secara kuantitatif. Hal yang dapat dilakukan oleh tim penyusun di antara adalah dengan mengupayakan seoptimal mungkin penyusunan indikator-indikator yang terintegrasi (*integrated indicators*) dengan indikator-indikator yang telah ada dalam sistem

penyelenggaraan pemerintahan daerah, misalnya indikator-indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada peraturan tersebut telah dimuat banyak sekali indikator bagi setiap level pemerintahan (level provinsi dan kabupaten/kota) serta untuk masing-masing urusan pemerintahan, baik indikator pada level output maupun indikator pada level outcome. Jika indikator pada RPJPD Kota Bogor mendatang hendak diintegrasikan dengan indikator-indikator evaluasi ini misalnya, maka tentunya yang lebih tepat adalah menggunakan indikator-indikator level outcome sehingga aras makronya tetap didapat namun juga terukur.

2. RPJPD mendatang perlu mempertahankan prestasi yang ditorehkan oleh RPJPD 2005-2025 dalam hal nilai realisasi kinerja "Sangat Tinggi" untuk seluruh periode lima tahunan yang diraih oleh dua indikator yaitu PDRB dan jumlah penduduk. Kinerja "Sangat Tinggi" pada dua indikator tersebut berbuah indikator makro yaitu PDRB per Kapita Kota Bogor yang tumbuh lebih pesat dibandingkan dengan provinsi dan nasional.
3. Untuk mempertahankan kinerja pencapaian target PDRB ini, hal yang perlu dicamkan adalah tiga faktor pendorong utama dari tumbuhnya PDRB yaitu kontribusi subsektor jasa dan industri pengolahan, meningkatnya konsumsi akhir rumah tangga, dan meningkatnya investasi. Kontribusi subsektor jasa dan industri pengolahan perlu dijaga sedemikian rupa agar dapat tumbuh secara harmonis (misalnya melalui tumbuhnya UMKM yang dapat menjadi destinasi wisata dan produknya kemudian diserap oleh wisatawan), dan tidak berjalan dengan saling berlawanan antara kedua sektor ini.

Untuk mempertahankan kinerja pengendalian jumlah penduduk, hal yang perlu dijaga adalah pengendalian natalitas dan migrasi masuk. Kota Bogor memang tidak dapat diisolasi sepenuhnya dari migrasi masuk khususnya dari daerah-daerah *hinterland* Kota Bogor, namun tentunya dapat dituangkan strategi-strategi yang jitu pada RPJPD berikutnya untuk setidaknya memastikan bahwa para pendatang tidak menambah beban Kota Bogor dari sisi angka kemiskinan dan angka pengangguran.

4. RPJPD mendatang perlu memberikan perhatian ekstra terhadap pencapaian IPM. Mengingat tingkat kemiskinan menjadi salah satu yang teridentifikasi sebagai faktor penghambat ketercapaian IPM, apalagi kemiskinan adalah isu strategis yang berulang dan terdapat di seluruh RPJMD pada periode 2005-2025, maka RPJPD berikutnya perlu menuangkan kebijakan percepatan pengentasan kemiskinan yang cepat dan tepat sasaran, serta memiliki database yang akurat serta *up-to-date*, guna meminimalkan risiko salah penerima bantuan.

Dari sisi indikator pendidikan, perhatian ekstra perlu diberikan pada angka Rata-rata Lama Sekolah. Upaya-upaya ekstra perlu dituangkan untuk menekan angka putus sekolah SMP dan SMA serta mengintensifkan program kejar paket A, paket B dan paket C.

Dari sisi indikator kesehatan, beberapa variabel yang memiliki hubungan terhadap Angka Harapan Hidup dapat lebih diperhatikan lagi, seperti persentase penolong persalinan medis, jumlah dokter, persentase angka kesakitan, keadaan lingkungan perumahan dan penyediaan air bersih sehingga peningkatan AHH di Kota Bogor lebih signifikan di tahun yang akan datang. Penyediaan air bersih menjadi isu yang penting dalam waktu-waktu

mendatang ketika krisis iklim dan lingkungan hidup menjadi ancaman yang nyata di masa depan.

5. RPJPD Kota Bogor mendatang perlu memberikan penekanan pada upaya-upaya untuk memperbaiki kinerja indikator-indikator makro khususnya IPM, persentase penduduk miskin, laju pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran per kapita. Meskipun secara angka masih lebih baik dibanding capaian provinsi dan nasional, namun secara pertumbuhan (membandingkan antara angka tahun 2005 dan 2022) masih relatif tertinggal dibanding pertumbuhan yang dicapai oleh provinsi dan nasional.
6. Keselarasan empat RPJMD Kota Bogor (periode 2005-2009, 2010-2014, 2015-2019, dan 2019-2024) terhadap RPJPD yang sudah cukup baik perlu dipertahankan pada RPJPD berikutnya. Oleh karena itu, perumusan sasaran pokok dan arah pembangunan RPJPD berikutnya perlu mempertimbangkan juga kemungkinan penjabarannya pada tujuan dan sasaran RPJMD. Selain itu, RPJPD berikutnya juga perlu mempertahankan kesesuaiannya (atau kontekstualitasnya) dengan kondisi dan dinamika lingkungan. Jika RPJPD tetap kontekstual, maka niscaya RPJMD-nya akan selaras dengan RPJPD tersebut.
7. Indikator-indikator yang dinilai merupakan indikator yang penting namun kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi adalah i) penyediaan lapangan kerja; ii) penanganan sampah; iii) peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter; serta iv) peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Khusus mengenai peningkatan partisipasi masyarakat ini, jika kinerjanya ditingkatkan maka akan mempengaruhi kinerja pembangunan secara signifikan sebagaimana hasil yang didapatkan melalui SEM (*Structural Equation Model*).

Hal-hal yang bersifat positif yang perlu dipertahankan atau ditingkatkan untuk pembangunan Kota Bogor ke depan adalah karakter kota Bogor sebagai kota taman yang hijau yang ekonominya digerakkan oleh sektor akomodasi dan wisata, UMKM, sektor kreatif dan sektor-sektor jasa lainnya. Adapun hal-hal yang bersifat negatif dan perlu diatasi atau diantisipasi dalam pembangunan Kota Bogor ke depan adalah kepadatan dan kemacetan, pengangguran, kemiskinan, angkot, dan keberadaan PKL.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Proyeksi Demografi

Secara umum proyeksi jumlah penduduk di Kota Bogor pada tahun 2045 meningkat menjadi 1,2 juta orang, dimana tahun 2023 jumlah penduduk Kota Bogor 1,08 juta orang. Jika dilihat dari kondisi jumlah penduduk saat ini, maka rata-rata laju pertumbuhan penduduk di tahun 2045 sebesar 0,83 persen. Peningkatan jumlah penduduk merupakan suatu hal positif karena dengan jumlah penduduk yang besar tersebut dapat dijadikan sebagai subjek pembangunan, perekonomian akan berkembang bila jumlah tenaga kerjanya banyak. Namun, peningkatan jumlah penduduk juga dapat menjadi suatu hal negatif dimana terjadi kepadatan penduduk yang tidak terkendali sehingga mengakibatkan dampak buruk terhadap lingkungan seperti semakin terbatasnya sumber daya pokok, tidak tercukupinya fasilitas sosial dan kesehatan, juga tidak tercukupinya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang ada.

Tabel 2.51. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Bogor

Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (000 Orang)				
	2025	2030	2035	2040	2045
1.070,72	1.083,78	1.110,51	1.137,71	1.170,25	1.201,72

Sumber: BPS Kota Bogor Tahun 2023 (diolah)

Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk Kota Bogor, terlihat bahwa angka *sex ratio* semakin menurun. Tahun 2023, *sex ratio* Kota Bogor sebesar 102,67 namun di tahun 2045 diperkirakan hanya mencapai 99,74. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk perempuan. Dengan karakteristik penduduk bekerja saat ini lebih didominasi oleh laki-laki maka rendahnya proporsi penduduk laki-laki menyebabkan produktivitas dalam bekerja akan rendah dan akan menyebabkan penurunan pada pendapatan. Hal ini dapat menjadi perhatian melalui peningkatan peran perempuan dalam aktivitas perekonomian di Kota Bogor.

Tabel 2.52. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Bogor

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Ribu Orang)	Proyeksi Penduduk (Ribu Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	542,41	548,33	559,78	571,16	586,15	600,08
Perempuan	528,31	535,45	550,74	566,54	584,10	601,64
Rasio	102,67	102,41	101,64	100,82	100,35	99,74

Sumber: BPS Kota Bogor Tahun 2023 (diolah)

Berdasarkan komposisi umur, tahun 2045 proporsi terbesar masih berada di usia produktif. Penduduk usia produktif memiliki peran krusial dalam perkembangan wilayah. Peran ini melibatkan kontribusi ekonomi, sosial, dan kultural yang dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan wilayah. Tahun 2045, penduduk usia produktif mencapai 806,28 ribu orang. Penduduk usia produktif cenderung memiliki potensi ekonomi yang tinggi, dimana mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan, membuka usaha kecil dan menengah, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah.

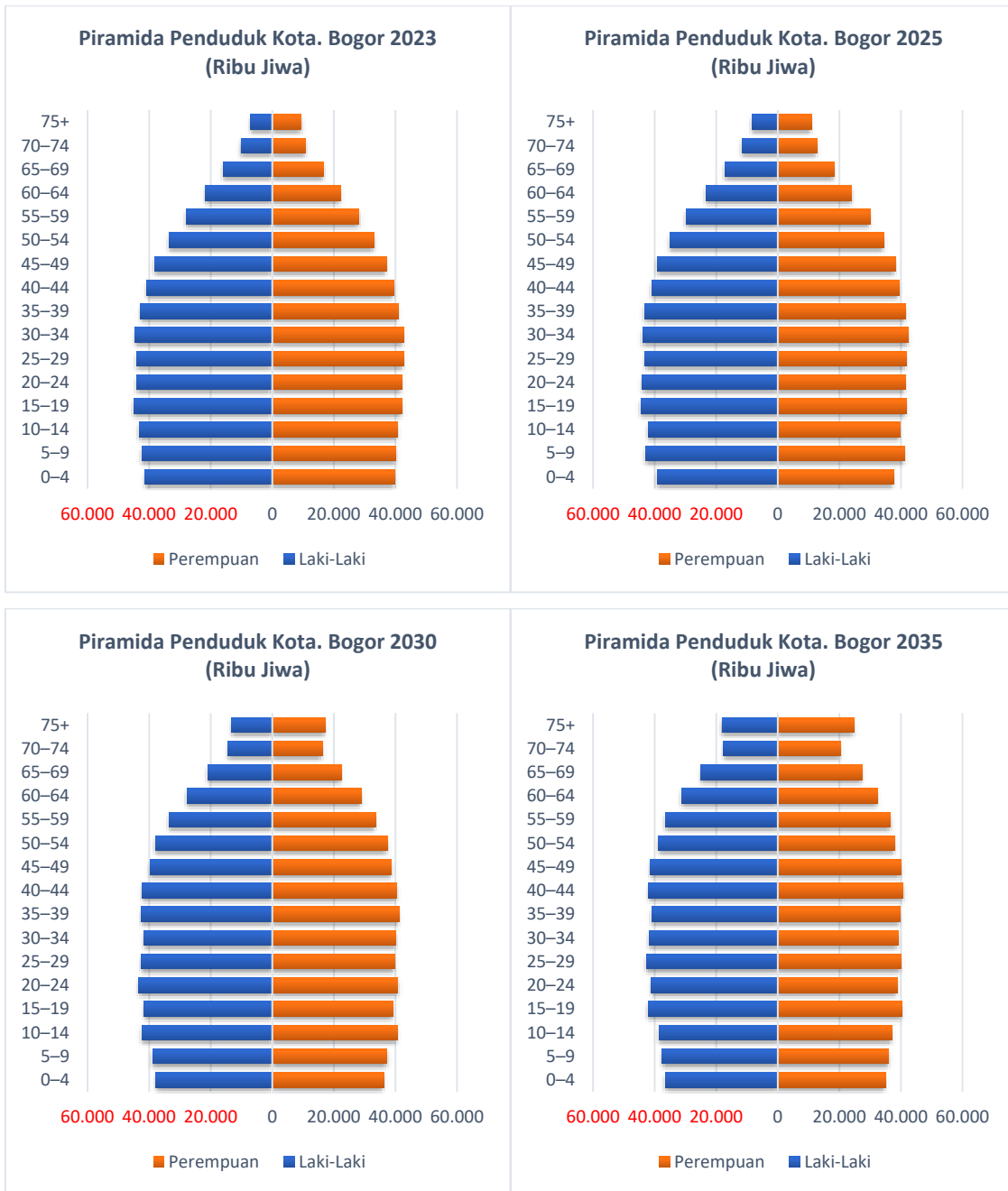
Tabel 2.53. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Bogor

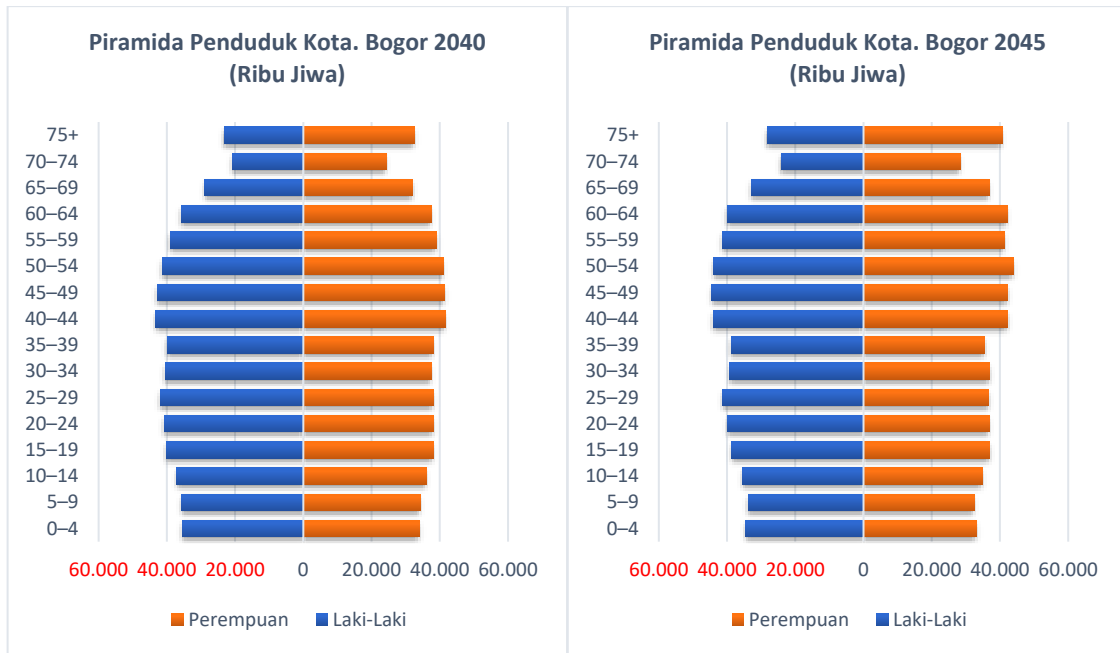
Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (000 Orang)	Proyeksi Penduduk (000 Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 Tahun	247,47	242,79	232,99	220,51	212,59	204,35
15-64 Tahun	753,25	761,87	773,06	784,10	795,54	806,28
>65 Tahun	70,01	79,12	104,47	133,11	162,13	191,09

Sumber: BPS Kota Bogor Tahun 2023 (diolah)

Mengacu kepada data dari BPS, pada tahun 2022 jumlah penduduk laki-laki dan perempuan didominasi oleh laki-laki dengan jumlah sebanyak 537.740 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 523.200 jiwa. Apabila dibedakan berdasarkan rentang umur, maka baik laki-laki maupun perempuan paling banyak berada pada rentang umur 15 hingga 39 tahun. Artinya pada tahun 2022, penduduk di Kota Bogor baik perempuan maupun laki-laki berada pada usia produktif dengan usia relatif masih muda. Secara keseluruhan jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) di Kota Bogor mencapai 70,28%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Bogor mengalami bonus demografi karena perbandingan usia produktif lebih besar dibandingkan usia non produktif.

Dampak positif adanya bonus demografi adalah jumlah penduduk usia kerja yang tinggi dan dapat diserap oleh pasar kerja sehingga total output dapat meningkat dan tersedianya sumberdaya manusia dalam pembangunan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan. Tingginya jumlah usia produktif, maka pemerintah Kabupaten Bogor perlu menyediakan fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, layanan publik dan lapangan kerja sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sangat dibutuhkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Namun demikian dalam 20 tahun ke depan pergeseran struktur usia penduduk di Kota Bogor menuju ke arah piramida stasioner. Bentuk piramida ini menunjukkan jumlah penduduk usia muda hampir seimbang dengan penduduk usia tua. Hal ini terjadinya biasanya dikarenakan tingkat kelahiran dan kematian rendah sehingga jumlah dan pertumbuhan penduduknya relatif tetap. Menuju kepada kondisi ini maka Kota Bogor perlu mempersiapkan infrastruktur dasar yang cukup baik dan sistem jaminan sosial yang kuat sebagai antisipasi adanya *aging communities* di masa mendatang.





Sumber: BPS Kota Bogor Tahun 2023 (diolah)

Gambar 2.89. Proyeksi Piramida Penduduk Kota Bogor Tahun 2022, 2025, 2030, 2035, 2040, dan 2045

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, piramida penduduk Kota Bogor tahun 2040 juga 2045 bertransformasi dari bentuk yang ekspansif menjadi piramida stasioner, dimana jumlah penduduk usia muda hampir seimbang dengan jumlah penduduk usia tua. Hal ini disebabkan karena tingkat kelahiran dan kematian rendah sehingga jumlah dan pertumbuhan penduduknya relatif tetap. Proporsi penduduk ini perlu menjadi perhatian karena baik usia muda, usia produktif maupun usia tua memiliki jumlah yang seimbang sehingga segala fasilitas public baik fisik maupun pelayanan yang berkaitan dengan pengembangan penduduk harus diperhatikan oleh pemerintah Kota Bogor untuk semua level usia.

2.6.2. Kebutuhan Sarana dan Prasarana

2.6.2.1. Rumah/ Tempat Tinggal

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang selain berfungsi sebagai tempat berteduh dan melakukan kegiatan sehari-hari dalam keluarga, juga berperan besar dalam pembentukan karakter keluarga. Pembangunan perumahan dan permukiman utamanya di kawasan perkotaan seperti Kota Bogor selalu menghadapi permasalahan pertanahan, terlebih di daerah perkotaan terkait ketersediaan lahan yang terbatas. Aktivitas kota yang semakin meluas dan koneksi infrastruktur transportasi yang semakin baik mendorong pengembangan pertumbuhan penduduk mengarah pada wilayah pinggiran kota. Pertambahan penduduk yang terus meningkat mengindikasikan bahwa perkembangan penduduk menyebar ke arah pinggiran kota (sub-urban) sehingga sebagai konsekuensinya adalah terjadi perubahan penggunaan lahan di perkotaan. Keterbatasan lahan kosong di perkotaan menjadikan daerah pinggiran kota menjadi alternatif pemecahan masalah.

Saat ini lahan untuk perumahan di Kota Bogor semakin terbatas dan belum semua rumah tangga memiliki rumah sendiri. Oleh karena itu perencanaan untuk kebutuhan permukiman perlu didukung dengan proyeksi kebutuhan rumah/ tempat tinggal bagi penduduk. Mengacu kepada perhitungan pada SNI kebutuhan kavling untuk tempat tinggal dengan asumsi anggota KK 5 orang, namun

demikian berdasarkan data kependudukan Kota Bogor, anggota keluarga yang ada di Kota Bogor rata – rata sekitar 4 orang sehingga perhitungan disesuaikan dengan mengacu kepada kondisi yang ada di Kota Bogor. Proyeksi dalam RPJPD untuk kebutuhan rumah / tempat tinggal disajikan dalam satuan unit rumah. Penyediaan unit rumah untuk kawasan perkotaan dapat hunian tidak bertingkat (rumah tapak) atau hunian bertingkat (rumah susun). Proyeksi kebutuhan unit rumah/ tempat tinggal didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54. Proyeksi Kebutuhan Rumah/ Tempat Tinggal di Kota Bogor

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.070.720	1.083.780	1.110.510	1.137.710	1.170.249	1.201.721
Proyeksi Kebutuhan Rumah	302.463	306.153	313.703	321.387	330.579	339.469

Sumber: Data penduduk Long Form Sensus Penduduk 2020 (diolah)

Tahun 2023, dengan jumlah penduduk Kota Bogor sebanyak 1.070.720 jiwa maka dibutuhkan tempat tinggal sebanyak 302.463 unit, dengan asumsi rata-rata penghuni dalam 1 KK adalah 4 orang. Tahun 2025, dibutuhkan sekitar 306.153 unit rumah/ tempat tinggal di Kota Bogor. Dalam 20 tahun ke depan, kebutuhan rumah/ tempat tinggal menjadi sekitar 339.469 unit.

2.6.2.2. Air Bersih

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 yang dimaksud dengan “air” adalah media air untuk keperluan sanitasi, yang meliputi parameter fisika, biologi, dan kimia, yang dapat berupa parameter wajib dan parameter tambahan. Standar mutu kesehatan air untuk keperluan kebersihan digunakan tidak hanya untuk mencuci makanan, piring, dan pakaian, tetapi juga untuk menjaga kebersihan diri, seperti mandi dan menggosok gigi. Selain itu, air juga dapat digunakan sebagai air baku untuk air minum.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “air” dalam pengertian ini adalah semua air yang berada di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan bumi, air tanah, air hujan, dan air laut. Air permukaan mengacu pada semua air yang ada di permukaan tanah. Air tanah adalah air yang berada di bawah lapisan tanah atau permukaan bumi. Sumber air adalah lokasi atau wadah air alami dan buatan yang berada di atas, atau di bawah permukaan bumi.

Air bersih menjadi sarana terpenting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat karena air merupakan media penularan berbagai penyakit, terutama penyakit lambung. Kebutuhan air minum rata-rata 5 liter per hari, dan secara keseluruhan, kebutuhan air rumah tangga di Indonesia adalah sekitar 60 liter per hari. Air bersih penting tidak hanya untuk konsumsi dan kebersihan manusia, tetapi juga untuk produksi barang industri. Air bersih merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan.

Air bersih merupakan sumber daya terpenting bagi manusia untuk bertahan hidup sehari-hari. Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia dan salah satu poin penting dalam Tujuan pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Oleh karena itu, pilar pembangunan lingkungan hidup perlu didukung. Secara umum setiap rumah tangga harus mempunyai persediaan air bersih yang memenuhi kebutuhan rumah tangga. Untuk itu lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan jaringan air minum sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis peraturan/ perundang-undangan yang berlaku, khususnya

yang berkaitan dengan tata cara perencanaan umum jaringan air minum pada lingkungan perumahan di perkotaan.

Penyediaan air bersih harus diperhatikan secara matang dalam perencanaan dan pengembangan kawasan perkotaan seperti di Kota Bogor. Perencanaan dan pembangunan kota membutuhkan prakiraan air bersih. Proyeksi infrastruktur dan pasokan air bersih didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.55.

Tabel 2.55. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Berdasarkan Kebutuhan Kota Bogor, Tahun 2023-2045

Proyeksi Kebutuhan Air Bersih						
Tahun	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk	1.070.720	1.083.780	1.110.510	1.137.710	1.170.249	1.201.721
Kebutuhan Air Domestik						
Sambungan rumah (190 ltr/org/hr)	203.436.800	205.918.200	210.996.900	216.164.900	222.347.385	228.327.022
Hidran Umum (30 ltr/org/hr)	32.121.600	32.513.400	33.315.300	34.131.300	35.107.482	36.051.635
Jumlah Air Domestik	235.558.400	238.431.600	244.312.200	250.296.200	257.454.867	264.378.658
Kebutuhan Air Non-Domestik						
Fasilitas Pendidikan (ltr/hr)						
TK (ltr/unit/hr)	8.566	8.670	8.884	9.102	9.362	9.614
SD	6.692	6.774	6.941	7.111	7.314	7.511
SLTP	2.231	2.258	2.314	2.370	2.438	2.504
SMU	2.231	2.258	2.314	2.370	2.438	2.504
Fasilitas Kesehatan						
RS/Poliklinik (2000 ltr/unit/hr)	428.288	433.512	444.204	455.084	468.100	480.688
Puskesmas	463.979	469.638	481.221	493.008	507.108	520.745
Fasilitas Ibadah						
Langgar/ Masjid Warga (500 ltr/unit/hr)	2.355.584	2.384.316	2.443.122	2.502.962	2.663.584	2.663.584
Masjid Kecamatan (800 ltr/unit/hr)	7.138	7.225	7.403	7.585	8.071	8.071
Masjid Kelurahan	28.553	28.901	29.614	30.339	32.286	32.286
Fasilitas Perdagangan						
Pasar (12.000 ltr/unit/hr)	2.676.800	2.709.450	2.776.275	2.844.275	3.026.800	3.026.800
Jumlah Air Non-Domestik	5.980.060	6.053.002	6.202.291	6.354.205	6.727.501	6.754.306
Jumlah Air Domestik dan Non-Domestik	241.538.460	244.484.602	250.514.491	256.650.405	264.182.368	271.132.964
Kebocoran Air (20%)	48.307.692	48.896.920	50.102.898	51.330.081	52.836.474	54.226.593
Hydrant (10%)	24.153.846	24.448.460	25.051.449	25.665.041	26.418.237	27.113.296
Kebutuhan Air Bersih (ltr/hari)	313.999.999	317.829.982	325.668.838	333.645.527	343.437.079	352.472.853
Kebutuhan Air Bersih (ltr/detik)	3.634	3.679	3.769	3.862	3.975	4.080

Sumber: Long Form Sensus Penduduk 2020, diolah

Agar terwujudnya sarana air bersih maka diperlukan adanya pengelola sarana yang dapat mengoperasikan dan memelihara sarana tersebut dengan baik. Dengan adanya sarana dan prasarana air bersih ini dapat dipergunakan dengan baik agar menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proyeksi kebutuhan air bersih Kota Bogor berdasarkan jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Bogor, Tahun 2023–2045

Uraian	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Air					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.070.720	1.083.780	1.110.510	1.137.710	1.170.249	1.201.720
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (ltr/hari)	313.999.999	317.829.982	325.668.838	333.645.527	343.437.079	352.472.853
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (ltr/detik)	3.634	3.679	3.769	3.862	3.975	4.080

Sumber: Long Form Sensus Penduduk 2020, diolah

Dalam rangka mengetahui daya dukung air di Kota Bogor dilakukan melalui analisis antara kebutuhan dan ketersediaan air di setiap wilayah. Kebutuhan air dihitung berdasarkan kebutuhan standar layak untuk kebutuhan sehari-hari. Perhitungan ini mencakup kebutuhan air untuk rumah tangga, kebutuhan non-domestik dan lahan pertanian serta memperhatikan faktor kehilangan air selama pemanfaatan air secara domestik dan non-domestik. Total kebutuhan air di Kota Bogor dapat dilihat pada Tabel 2.57, dimana Kecamatan Bogor Selatan membutuhkan jumlah air terbesar dibandingkan kecamatan lainnya yaitu 29.433.430 m³/tahun, kemudian diikuti oleh Kecamatan Bogor Barat sebesar 27.909.799 m³/tahun dan Kecamatan Tanah Sereal sebesar 24.464.734 m³/tahun. Sementara kebutuhan air terendah terjadi di Kecamatan Bogor Tengah sebesar 7.998.770 m³/tahun. Dari Tabel 2.56 tersebut dilihat juga bahwa kebutuhan air domestik terbesar sejalan dengan jumlah penduduk terbesar yakni di Kecamatan Barat sedangkan kebutuhan air untuk lahan terbesar terjadi di Kecamatan Bogor Selatan.

Tabel 2.57. Kebutuhan Air di Kota Bogor Tahun 2021

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Domestik (m ³ /Tahun)	Kebutuhan Air Non-Domestik (m ³ /Tahun)	Kehilangan Air (m ³ /Tahun)	Kebutuhan Air Untuk Lahan (m ³ /Tahun)	Total Kebutuhan Air (m ³ /Tahun)
Kec. Bogor Barat	233.637	12.791.626	3.837.488	2.494.367	8.786.319	27.909.799
Kec. Bogor Selatan	204.030	11.170.643	3.351.193	2.178.275	12.733.319	29.433.430
Kec. Bogor Tengah	96.258	5.270.126	1.581.038	1.027.674	119.933	7.998.770
Kec. Bogor Timur	104.327	5.711.903	1.713.571	1.113.821	3.643.664	12.182.959
Kec. Bogor Utara	186.724	10.223.139	3.066.941	1.993.512	5.721.953	21.005.546
Kec. Tanah Sareal	218.094	11.940.647	3.582.194	2.328.426	6.613.468	24.464.734

Sumber: Dinas KLHS (2023)

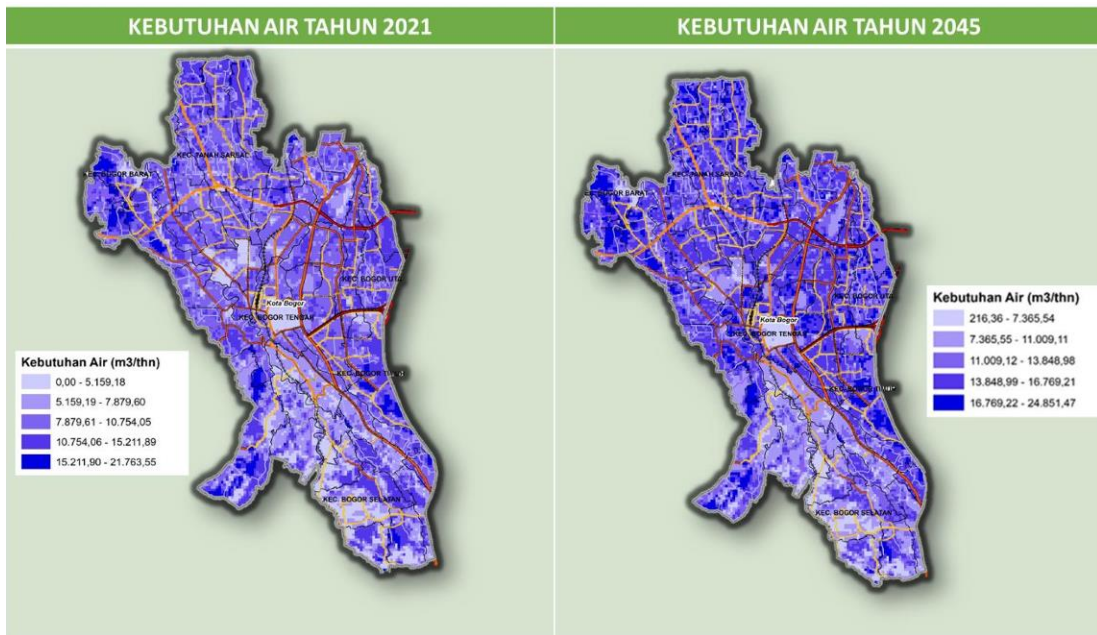
Bagaimana kebutuhan air Kota Bogor di tahun 2045, menurut hasil proyeksi Dinas KLHS (2023), total kebutuhan air di Kota Bogor tahun 2045 sebesar 175.439 ribu m³/tahun, Kecamatan Bogor Selatan memiliki jumlah kebutuhan air terbesar dibandingkan kecamatan lainnya yaitu 39.938.396 m³/tahun kemudian diikuti oleh Kecamatan Bogor Barat sebesar 39.616.841 m³/tahun. Sedangkan kebutuhan air terendah terdapat di Kecamatan Bogor Tengah sebesar 12.777.964 m³/tahun (Tabel 2.58).

Tabel 2.58. Proyeksi Kebutuhan Air Kota Bogor Berdasarkan Kecamatan Tahun 2045

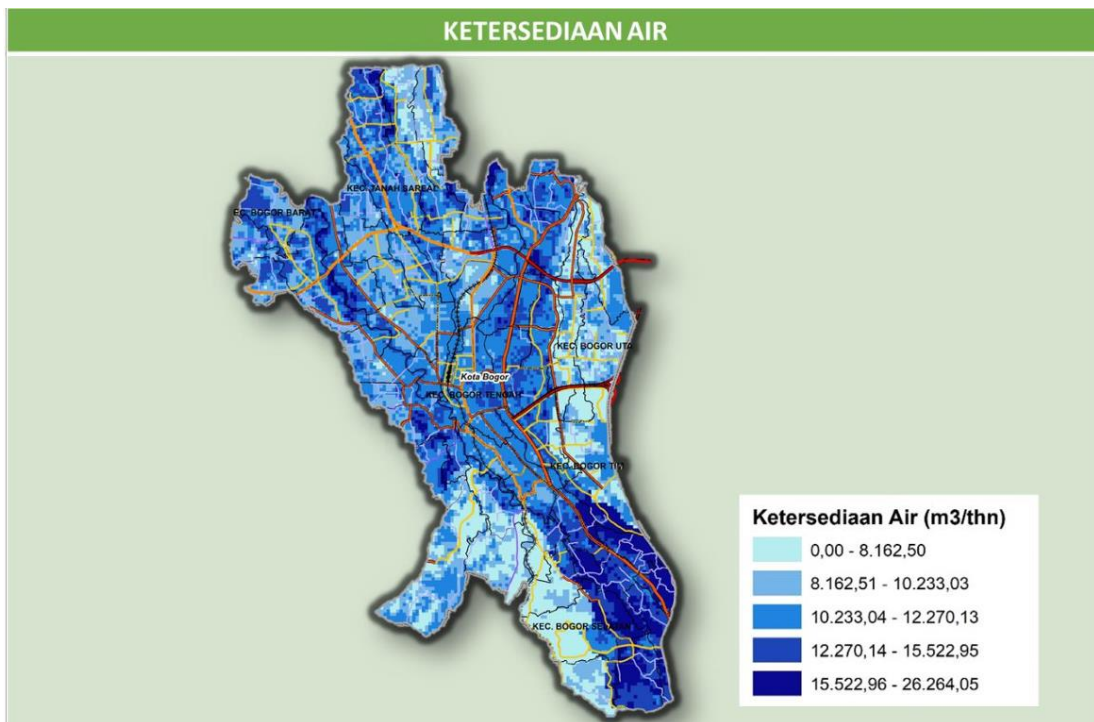
Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Domestik (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air Non Domestik (m ³ /tahun)	Kehilangan Air (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air untuk Lahan (m ³ /tahun)	Total Kebutuhan Air (m ³ /tahun)
Bogor Barat	238.685	20.622.423	6.186.727	4.021.372	8.786.319	39.616.841
Bogor Selatan	210.618	18.197.376	5.459.213	3.548.488	12.733.319	39.938.396

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Domestik (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air Non Domestik (m ³ /tahun)	Kehilangan Air (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air untuk Lahan (m ³ /tahun)	Total Kebutuhan Air (m ³ /tahun)
Bogor Tengah	97.997	8.466.911	2.540.073	1.651.048	119.933	12.777.964
Bogor Timur	106.565	9.207.199	2.762.160	1.795.404	3.643.664	17.408.426
Bogor Utara	190.628	16.470.296	4.941.089	3.211.708	5.721.953	30.345.046
Tanah Sereal	222.498	19.223.790	5.767.137	3.748.639	6.613.468	35.353.034

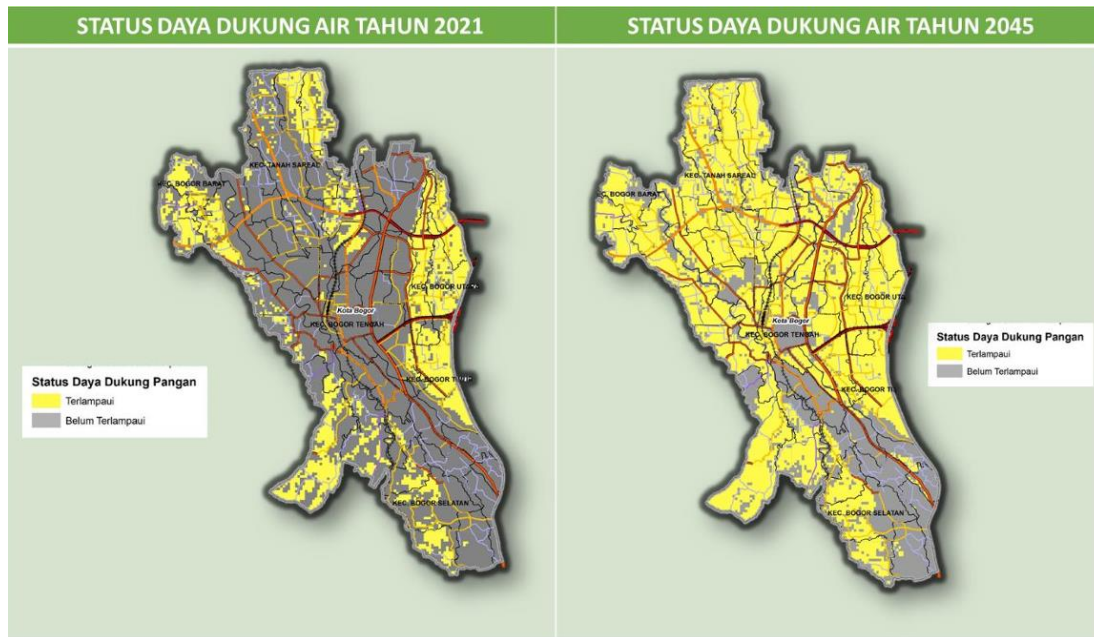
Sumber: KLHS (2023)



Gambar 2.90. Peta Kebutuhan Air Kota Bogor Tahun 2021 dan 2045

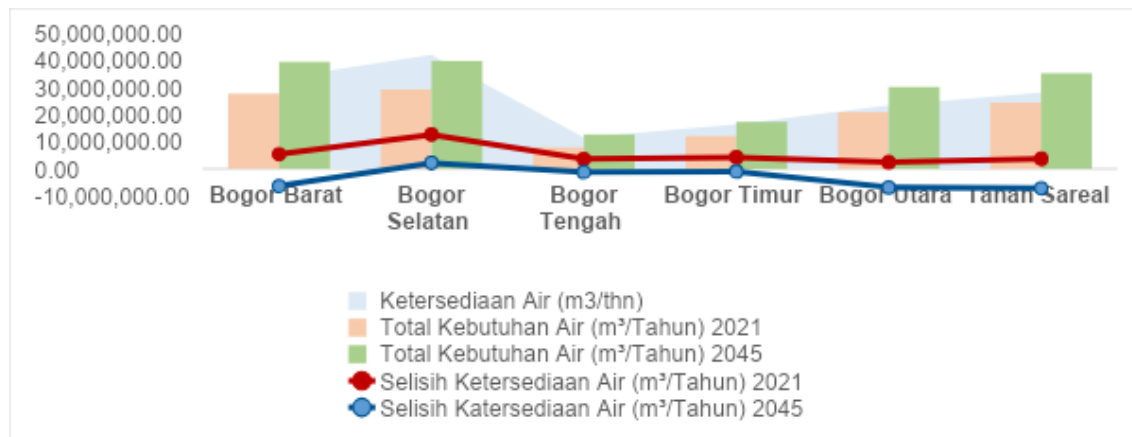


Gambar 2.91. Ketersediaan Air Kota Bogor



Gambar 2.92. Status Daya Dukung Air Tahun 2021 dan 2045

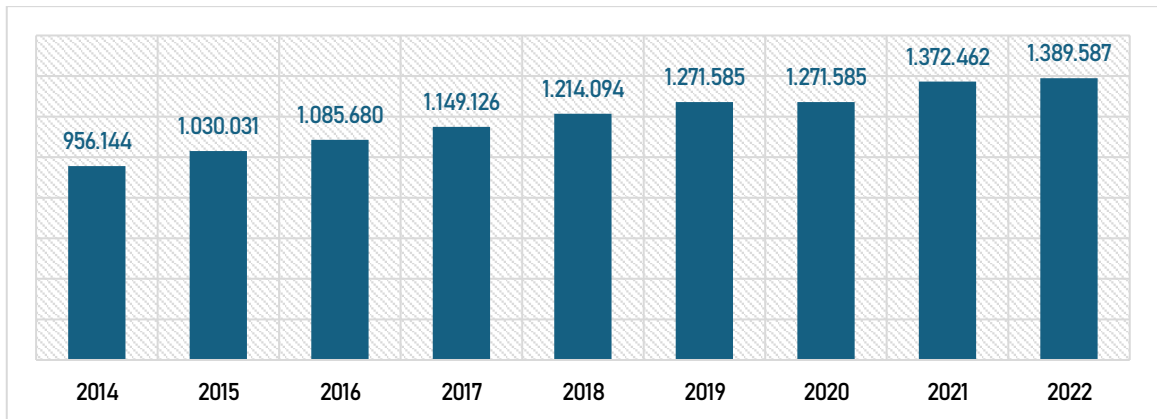
Status daya dukung air sampai tahun 2045 di Kota Bogor sudah memenuhi untuk semua Kecamatan yang ada di Kota Bogor kecuali Kecamatan Bogor Selatan. Hal ini juga dipengaruhi oleh total kebutuhan air terbanyak ada di Kecamatan Bogor Selatan sebesar 39.938.395,74 m³/tahun, namun ketersediaan air pada Kecamatan Bogor Selatan juga yang terbesar pada data yang tersedia saat ini, sehingga perlu menjadi perhatian dari pemerintah Kota Bogor untuk menjawab permasalahan kebutuhan air pada tahun 2045.



Gambar 2.93. Daya Dukung Air Tahun 2021 dan 2045

2.6.2.3. Energi/ Listrik

Jumlah pelanggan PLN Kota Bogor tahun 2014 – 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.94. Jumlah pelanggan PLN Kota Bogor setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan akan listrik juga meningkat. Jumlah pelanggan PLN Kota Bogor tahun 2022 sebanyak 1.389.587 pelanggan dengan kebutuhan listrik sebesar 2,659,761,246 VA. Meskipun tahun 2022 jumlah pelanggan mengalami peningkatan, tetapi kebutuhan listrik di tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 2,729,221,464 VA atau menurun sebesar 69,460,218 VA.



Gambar 2.94. Jumlah Perkembangan Pelanggan PLN Tahun 2014 – 2022

Tabel 2.59. Daya Tersambung dan Jumlah Pelanggan Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting Kota Bogor Menurut Kawasan/Rayon

Cabang PLN	Daya Tersambung (VA)		Jumlah Pelanggan	
	2021	2022	2021	2022
Cipayung	283.469.980	277.566.170	214.345	215.130
Bogor Timur	391.527.320	381.788.302	220.252	222.142
Pakuan	433.790.595	922.078.080	298.347	475
Bogor Kota	291.402.619	417.387.675	210.292	300.054
Bogor Barat	208.845.880	288.719.466	252.998	212.805
Leuwiliang	158.058.070	205.505.197	175.751	254.375
Jasinga	962.127.000	166.716.356	477	184.606
Total	2.729.221.464	2.659.761.246	1.372.462	1.389.587

Perkembangan kebutuhan listrik di Kota Bogor akan terus meningkat di masa mendatang seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan aktivitas yang ada di masyarakat. Saat ini teknologi yang digunakan oleh masyarakat sudah menjadi kebutuhan utama dan melekat dengan gaya hidup penduduk sehingga kebutuhan listrik per kapita akan semakin meningkat. Rasio elektrifikasi Kota Bogor saat ini sudah mencapai angka 99%. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan listrik di Kota Bogor sudah cukup terpenuhi. Namun demikian dengan peningkatan konsumsi listrik dan pertambahan jumlah penduduk di Kota Bogor diperlukan adanya proyeksi terhadap kebutuhan listrik sampai dengan 20 tahun ke depan. Perhitungan kebutuhan listrik mencakup untuk kebutuhan domestik rumah tangga dan non domestik yaitu untuk kebutuhan sarana prasarana penunjang untuk aktivitas sosial ekonomi dan penerangan jalan.

Tabel 2.60. Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kota Bogor, Tahun 2023-2045

Tahun	Perkiraan Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah/ KK (1 rumah/ KK = 4 jiwa)	Kebutuhan Domestik (kWh)	Kebutuhan Non Domestik (kWh)		Total Kebutuhan (kWh)
				Sosial Ekonomi (20%)	Penerangan Jalan (20%)	
2023	1.070.720	267.680	240.912.000	48.182.400	48.182.400	337.276.800
2025	1.083.780	270.945	243.850.500	48.770.100	48.770.100	341.390.700
2030	1.110.510	277.628	249.864.750	49.972.950	49.972.950	349.810.650
2035	1.137.710	284.428	255.984.750	51.196.950	51.196.950	358.378.650
2040	1.170.249	292.562	263.306.025	52.661.205	52.661.205	368.628.435
2045	1.201.721	300.430	270.387.225	54.077.445	54.077.445	378.542.115

2.6.2.4. Persampahan

Kota Bogor memiliki permasalahan sampah yang perlu masih menjadi perhatian khusus. Meskipun dari tahun 2016 hingga 2022 jumlah produksi sampah Kota Bogor terus mengalami penurunan dari tahun 2016 sebanyak 2.225.49 ton/hari menjadi 744.46 ton/hari ditahun 2022. Jumlah produksi sampah terkecil yaitu pada tahun 2020 sebesar 567 ton/hari kemudian mengalami kenaikan lagi di tahun 2021 hingga 2022. Bila dibandingkan wilayah sekitarnya, produksi sampah Kota Bogor masih lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kabupaten Bekasi.

Tabel 2.61. Jumlah Produksi Sampah Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya, Tahun 2016-2022

Wilayah	Jumlah Produksi Sampah Per Hari (Ton)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jawa Barat	20.969,27	20.969,27	22.772,92	24.490,56	25.333,00	15.735,36	24.000
Kota Bogor	2.225,49	991,93	1.069,41	620,55	567	719,72	744,46
Kota Bekasi	4.804,77	2.387,08	2.858,6	2.060,7	1.923	1.500,77	1.830,63
Kota Depok	3.901,4	1.844,3	2.272,07	1.469,77	1.516	1.418,87	na
Kab Bogor	2.229,42	1.511,15	1.716,8	2.914,65	2.977	971,59	na
Kab Bekasi	1.464,87	1.228,6	1.600,71	2.590,00	2.258	1.193,76	2.250,35

Sumber: Open data Jabar, 2023

Dari total sampah yang ada, saat ini baru 70% sampah yang dapat diangkut ke pembuangan sampah akhir. Komposisi sampah berdasarkan sumber sampah terbanyak berasal dari sampah rumah tangga (62,44%), perniagaan (19,48%), fasilitas publik (6,17%), pasar (4,89%), Kawasan (2,84%), Perkantoran (3,25%) dan lainnya (0,93%). Dalam pengelolaan sampah, Kota Bogor mengirim sampah setiap harinya ke TPA Galuga. Pada tahun 2022 jumlah sampah dari Kota Bogor yang masuk ke TPA Galuga mencapai 195.787,10 ton dan sisanya sekitar 75.940 ton tidak masuk TPA. Kota Bogor sudah memiliki fasilitas Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R) sebanyak 10 TPS3R yang tersebar di beberapa wilayah Kota Bogor. Selain itu juga terdapat 10 Bank Sampah Unit (BSU) yang juga tersebar di beberapa wilayah. Sampah yang terkelola di TPS3R dan Bank Sampah Unit sekitar 35 ribu ton/tahun. Peningkatan jumlah penduduk Kota Bogor berdampak pada jumlah sampah yang semakin bertambah, sehingga pengelolaan sampah di Kota Bogor menjadi isu yang semakin mendesak. Peningkatan jumlah sampah perlu didukung dengan adanya inovasi teknologi pengolahan sampah karena lahan yang semakin terbatas. Introduksi teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan perlu di inisiasi (PLTSa). Perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah perlu terus dilakukan melalui edukasi formal maupun internal.

Tabel 2.62. Fasilitas Pengelolaan Persampahan Kota Bogor

Nama Fasilitas	Sampah terkelola (kg/thn)	Nama Fasilitas	Sampah terkelola (ton/thn)
TPS 3R Tunas Rancamaya	755	BSU Marllin	333
TPS 3R Benteng Hijau	1.591	BSU Sedap Malam	89
TPS 3R Cibadak	2.251	BSU Cendana Loji	19
TPS 3R Griya Katulampa	1.216	BSU Narabas	129
TPS 3R Kembang Setaman (Bukit Cimanggu City)	5.604	BSU Azalea	200
TPS 3R Melati (Warban 5)	7.073	BSU Baskom Grika	41

Nama Fasilitas	Sampah terkelola (kg/thn)	Nama Fasilitas	Sampah terkelola (ton/thn)
TPS 3R Rangka Mekar	4.462	BSU Cendana cimanggu	62
TPS 3R Taruna Kompos	2.916	BSU Bangkit	235
TPS 3R Asri Bubulak (Griya Wanakarya)	5.780	BSU Situ Bagar/ FARMING BHAGAR	12
TPS 3R Ceremai Cipaku	3.208	BSU Gede	241
Total	34.856	Total	1.361

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang perlu ditangani apalagi di perkotaan. Keberadaan lahan yang terbatas untuk Tempat Pembuangan Akhir akan menjadi masalah apabila penanganan sampah tidak dilakukan secara komprehensif dari sumber/ penghasil sampah. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan sampah diperlukan adanya informasi mengenai potensi timbulan sampah yang akan dihasilkan selama periode 20 tahun ke depan. Kota Bogor saat ini sudah bekerjasama dengan Kabupaten Bogor untuk pengelolaan TPA Galuga dan juga bekerjasama dengan Provinsi untuk TPA Regiona Nambo. Perhitungan proyeksi timbulan sampah mengacu kepada data sampah harian di Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dapat dilihat pada Tabel 2.63.

Tabel 2.63. Proyeksi Timbulan Sampah Kota Bogor Tahun 2023-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.070.720	1.083.780	1.110.510	1.137.710	1.170.249	1.201.721
Proyeksi Timbulan Sampah (ton/tahun)	284.632	288.103	295.209	302.440	311.090	319.456

Sumber: Long Form Sensus Penduduk 2020

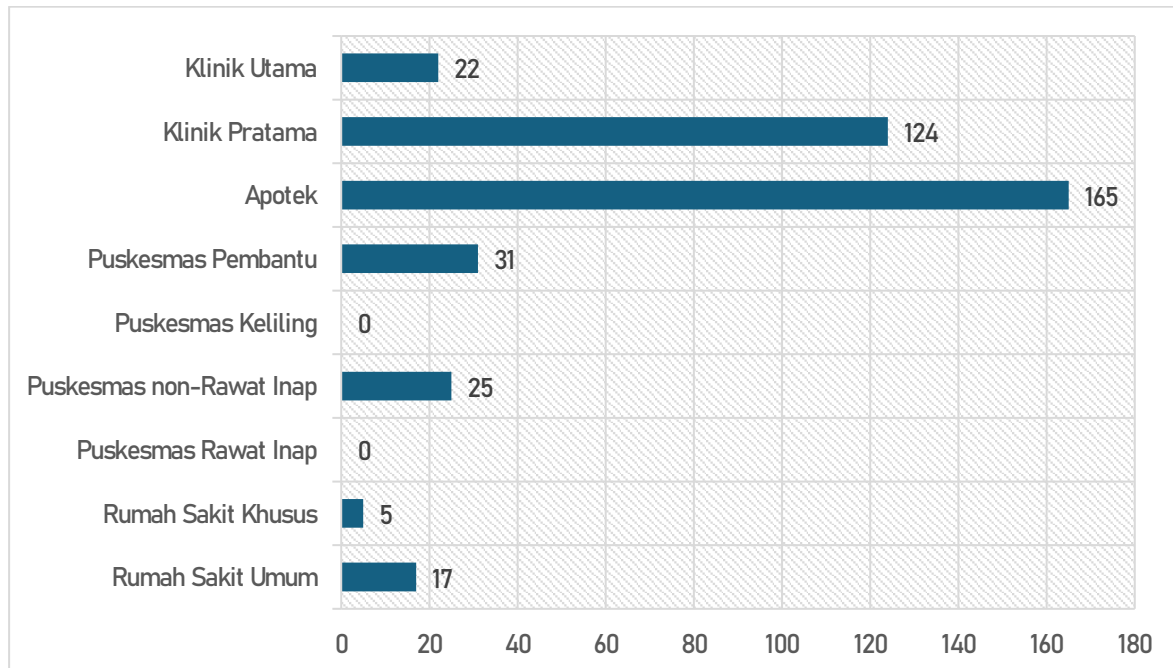
2.6.2.5. Fasilitas Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2018 menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang wajib disediakan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat dan menekan laju pertumbuhan penduduk. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan tergantung pada jumlah penduduk yang dilayani. Perhitungan kebutuhan fasilitas kesehatan ini mengacu pada dokumen SNI nomor 03-1733 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Perkotaan. Jenis fasilitas kesehatan yang dibutuhkan antara lain:

1. Posyandu, berfungsi memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-anak usia balita;
2. Puskesmas, berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyembuhan penyakit, pemeliharaan kesehatan, dan pencegahan penyakit;
3. Puskesmas pembantu, berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil; dan

4. Apotek, berfungsi untuk melayani penduduk dalam pengadaan obat-obatan, baik untuk penyembuhan maupun pencegahan. Kemudian untuk jumlah sarana kesehatan Kota Bogor tahun 2022 digambarkan pada Gambar 2.95.



Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kota Bogor 2023

Gambar 2.95. Jumlah Sarana Kesehatan Kota Bogor Tahun 2022

Pada tahun 2022, jumlah rumah sakit umum di Kota Bogor berjumlah 22 rumah sakit terdiri dari 17 rumah sakit umum dan 5 rumah sakit khusus. Jumlah Puskesmas di Kota Bogor berjumlah 25 Puskesmas non rawat inap. Tahun 2021 di Kota Bogro terdapat 7 Puskesmas yang melayani Rawat Inap, namun di tahun 2022 Puskemas di Kota Bogor sudah tidak melayani rawat inap. Kota Bogor juga memiliki 31 Puskesmas Pembantu yang tersebar di seluruh Kecamatan Kota Bogor. Jumlah penduduk Kota Bogor tahun 2022 sebanyak 1.063.513, ratio Puskesmas terhadap jumlah penduduk di Kota Bogor pada Tahun 2022 adalah 1 : 42.541, yang artinya 1 puskesmas melayani 42.541 penduduk, rasio ini masih belum ideal dimana perbandingan yang ideal yaitu 1 : 30.000 penduduk. Selain Rumah sakit dan Puskesmas, Kota Bogor juga memiliki sarana Kesehatan lainnya yaitu 22 Klinik Utama, 124 Klinik Pratama dan 165 Apotek.

Proyeksi kebutuhan sarana kesehatan tahun 2023 – 2045 Kota Bogor dilakukan dengan mengacu pada SNI 03-1733-1989 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota terkait Kebutuhan Sarana Kesehatan. Berikut merupakan kebutuhan sarana kesehatan jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk pendukung yang ada.

Tabel 2.64. Jenis Fasilitas (Sarana/Prasarana Kesehatan)

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standar (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min (m ²)	Luas Lahan Min (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1	Posyandu	1.250	36	60	0,048	500	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan	Dapat bergabung dengan balai warga atau sarana hunian/ rumah
2	Balai Pengobatan Warga	2.500	150	3001	0,12	1.000 m ²	Di Tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan	Dapat bergabung dalam lokasi balai warga
3	BKIA/ Klinik Bersalin	30.000	1.500	3.000		4.000 m ²	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	
4	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	150	300	0,006	1.500 m ²	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kelurahan
5	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	420	1.000	0,008	3.000 m ²	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan
6	Tempat Praktek Dokter	5.000	18		-	1.500 m ²	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	Dapat bersatu dengan rumah tinggal/ tempat usaha/ apotik
7	Apotik/ Rumah Obat	30.000	120	250	0,025	1.500 m ²	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	

Sumber: Data penduduk Long Form Sensus Penduduk 2020 (diolah)

Berdasarkan aturan tersebut, maka kebutuhan sarana Kesehatan di Kota Bogor dapat diproyeksi berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Kota Bogor. Sebagai contoh interpretasi proyeksi Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan, pada tahun 2022 terdapat kondisi existing sebanyak 32 unit.

Proyeksi kebutuhan Puskesmas Pembantu tahun 2023 sebanyak 223, sehingga jika dilihat dari kondisi existing tahun 2022 sebanyak 32 maka pada tahun 2023 dibutuhkan tambahan sarana puskesmas pembantu sebanyak 191 unit. Begitu juga untuk tahun-tahun berikutnya. Jika dilihat berdasarkan hasil proyeksi maka tahun 2045 dibutuhkan sekitar 250 unit Puskesmas Pembantu. Berdasarkan data ini maka diharapkan pemerintah Kota Bogor dapat meningkatkan sarana kesehatan sesuai kebutuhan penduduknya. Interpretasi ini sama halnya dengan hasil proyeksi untuk Tempat Praktek Dokter/ Poliklinik dimana hasil proyeksi tahun 2023 - 2045 kebutuhan sarana

Kesehatan tersebut lebih besar dari sarana yang sudah ada, sehingga diperlukan adanya penambahan.

Kondisi yang berbeda ditunjukkan oleh hasil proyeksi Puskesmas dan Balai Pengobatan Lingkungan, juga hasil proyeksi Apotek. Proyeksi kebutuhan kedua sarana kesehatan ini ternyata lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sarana yang sudah ada, sehingga pemerintah Kota Bogor tidak perlu melakukan penambahan sarana Kesehatan Puskesmas dan Poliklinik.

Terdapat beberapa sarana kesehatan yang belum diketahui jumlahnya pada tahun 2022, seperti Posyandu, Balai Pengobatan Warga dan Klinik Bersalin. Namun, proyeksi kebutuhannya untuk tahun 2023-2045 dapat dilihat pada Tabel 2.65.

Tabel 2.65. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2022-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.060.940	1.070.720	1.083.780	1.110.510	1.137.710	1.170.249	1.201.720
Proyeksi Fasilitas Kesehatan							
Posyandu	NA	857	867	888	910	936	961
Balai Pengobatan Warga	NA	428	434	444	455	468	481
BKIA/ Klinik Bersalin	NA	223	226	231	237	244	250
Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	32	223	226	231	237	244	250
Puskesmas dan Balai Pengobatan Lingkungan	24	9	9	9	9	10	10
Tempat Praktek Dokter/ Poliklinik	45	214	217	222	228	234	240
Apotek	49	36	36	37	38	39	40

Sumber: Long Form Sensus Penduduk 2020, diolah

2.6.2.6. Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kunci dari kemajuan suatu bangsa. Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting dalam membangun sumber daya manusia. ketersediaan fasilitas pendidikan diharapkan dapat mendorong kemudahan masyarakat Kota Bogor dalam mengakses pengetahuan Kota Bogor.

Tabel 2.66. Jumlah Sekolah Dasar, Menengah dan Tinggi di Kota Bogor, Tahun 2013-2022

Tahun	MI	SD	SMP	MTS	MA	SMA	SMK	Perguruan Tinggi
2013	56	286	117	38	16	49	85	11
2014	56	285	116	38	16	52	93	11
2015	56	301	110	38	16	52	96	11
2016	56	329	162	42	16	68	98	12
2017	61	324	163	45	16	69	105	12
2018	61	267	121	45	17	54	102	12
2019	61	269	121	45	17	54	102	12
2020	61	273	125	45	17	56	102	12
2021	60	276	128	46	17	55	103	12
2022	60	280	128	49	19	55	103	12

Sumber: BPS Kota Bogor, 2023

Tahun 2022 jumlah Sekolah tingkat Dasar Kota Bogor sebanyak 340 sekolah yang terdiri dari 280 Sekolah Dasar (SD) dan 60 Madrasah Ibtidaiyah (MI). Jumlah sekolah tingkat pertama sebanyak 177 sekolah yang terdiri dari 128 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 49 Madrasah Tsanawiyah (MTS). Jumlah Sekolah tingkat atas sebanyak 177 sekolah yang terdiri dari 55 Sekolah Menengah Atas (SMA), 19 Madrasah Aliyah (MA) serta 103 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Jumlah perguruan tinggi di Kota Bogor sebanyak 12 Universitas. Dalam kurun waktu 2013 hingga 2022 jumlah sekolah di Kota Bogor terus mengalami peningkatan di setiap jenjang.

Tabel 2.67. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.060.940	1.070.720	1.083.780	1.110.510	1.137.710	1.170.249	1.201.720
Proyeksi Fasilitas Pendidikan							
TK	NA	857	867	888	910	936	961
SD/ MI	340	669	677	694	711	731	751
SMP/ MTs	177	223	226	231	237	244	250
SMA/ MA/ SMK	177	223	226	231	237	244	250

Sumber: Long Form Sensus Penduduk 2020, diolah

Dengan demikian, proyeksi kebutuhan SD/ MI tahun 2023 sebanyak 669 sehingga jika dilihat dari kondisi existing tahun 2022 sebanyak 340 maka pada tahun 2023 dibutuhkan tambahan sarana SD/ MI sebanyak 329 unit. Begitu juga untuk tahun-tahun berikutnya. Jika dilihat berdasarkan hasil proyeksi maka tahun 2045 dibutuhkan sekitar 751 unit SD/ MI. Berdasarkan data ini maka diharapkan pemerintah Kota Bogor dapat meningkatkan sarana pendidikan sesuai kebutuhan penduduknya. Interpretasi ini sama halnya dengan hasil proyeksi untuk SMP/ MTs dan SMA/ MA/ SMK dimana hasil proyeksi tahun 2023 - 2045 kebutuhan sarana pendidikan tersebut lebih besar dari sarana yang sudah ada, sehingga diperlukan adanya penambahan. Terdapat sarana pendidikan yang belum diketahui jumlah sarannya pada tahun 2022 yaitu TK.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

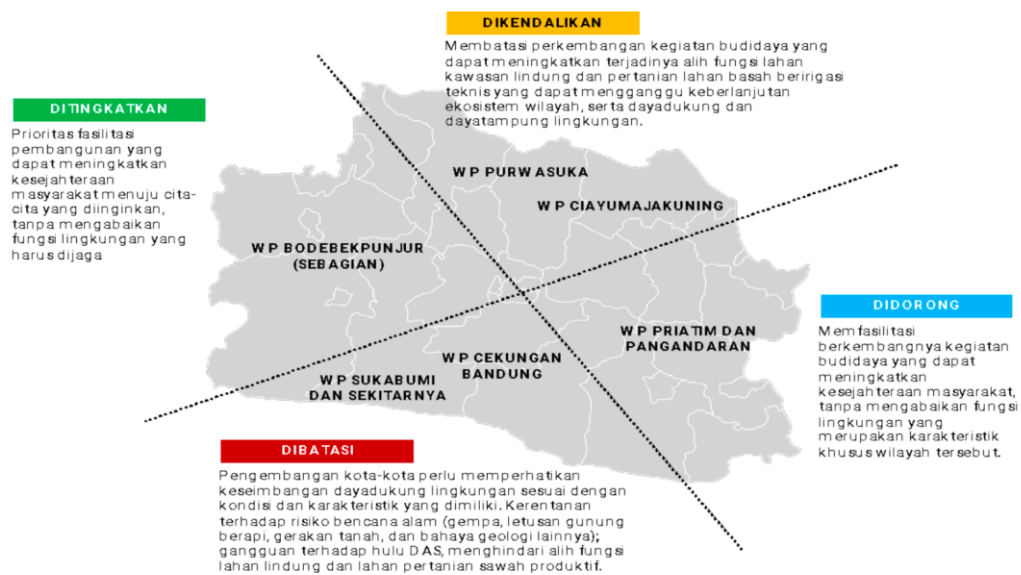
2.7.1. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah Kota Bogor dalam perspektif Nasional

Rencana struktur ruang dalam RTRWN yang diterdiri dari sistem perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, dan sistem jaringan sumber daya alam, diuraikan pada RTRW Kota. Untuk Kasus Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek (termasuk Kota Bogor) sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008, disebutkan bahwa penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur mempunyai peran sebagai acuan bagi penyelenggaraan pembangunan yang berkaitan dengan upaya konservasi air dan tanah, upaya menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, penanggulangan banjir, dan pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Sementara, fungsinya sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam penyelenggaraan penataan ruang secara terpadu di Kawasan Jabodetabekpunjur, melalui kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Wilayah Jabodetabek (termasuk didalamnya Kota Bogor) diarahkan mejadi aglomerasi wilayah perkotaan Jakarta dengan fungsi konektivitas keseimbangan pertumbuhan terpadu. Arah Kebijakan secara nasional ini menekankan pentingnya kolaborasi antara kota-kota di wilayah Jabodetabek, (termasuk Kota Bogor), untuk menciptakan ekosistem perkotaan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Fokus utamanya adalah pada peningkatan konektivitas, baik dalam hal transportasi maupun infrastruktur lainnya, untuk memfasilitasi mobilitas penduduk, barang, dan jasa antar kota-kota di wilayah tersebut. Kota Bogor, dengan posisinya yang strategis dan potensi ekonomi serta sumber daya alamnya, diharapkan dapat berperan sebagai pusat pertumbuhan alternatif yang membantu mengurangi tekanan perkotaan di Jakarta. Melalui pengembangan infrastruktur yang terintegrasi, Kota Bogor diarahkan menjadi tujuan investasi baru yang menarik serta menawarkan kualitas hidup yang lebih baik bagi penduduknya. Selain itu, dalam konteks keseimbangan pertumbuhan terpadu, penting bagi Kota Bogor untuk menjaga harmoni antara pembangunan perkotaan dan pelestarian lingkungan serta warisan budayanya. Perlindungan terhadap lahan hijau, pengelolaan air yang berkelanjutan, dan pelestarian situs-situs bersejarah.

2.7.2. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah Kota Bogor dalam perspektif Provinsi

Dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Barat salah satu pendekatan yang dilakukan dalam pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat ialah pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan. pendekatan kewilayahan ini mengacu pada terminologi wilayah pengembangan (WP) sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (RTRWP Jawa Barat) yang salah satunya menetapkan Kota Bogor dimasukkan dalam lingkup kewilayahan Bodebekpunjur dengan fungsi kewilayahan sebagai pengembangan kawasan perkotaan di wilayah daerah provinsi dengan fungsi dan peran Kawasan di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jabodetabekpunjur serta antisipasi terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, meliputi daerah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok dan sebagian Wilayah di Kabupaten Cianjur



Sumber : Perda Jawa Barat No.9 Tahun 2022

Gambar 2.96. Tema pengembangan WP di Provinsi Jawa Barat (Termasuk Kota Bogor)

Arah Pengembangan WP Bodobekpunjur (Termasuk Kota Bogor) diarahkan untuk melengkapi fasilitas pendukung pusat kegiatan lokal (PKL); mengembangkan infrastruktur strategis, mengembangkan perdagangan jasa, industri non polutan, dan industri kreatif serta pariwisata. selanjutnya investasi padadat modal yang efisien lahan, air baku, energi, teknologi tinggi, dan non polutif. Pengendalian pemanfaatan lahan dikawasan konservasi, dan peningkatan SDM.

Arah Kebijakan WP Bodebekpunjur

FOKUS	ARAH KEBIJAKAN
Pusat Pertumbuhan	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan di WP Bodebekpunjur diarahkan pada upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan wilayah serta pertumbuhan ekonomi, mengembangkan pusat pertumbuhan baru yang merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi digital, serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif.
SDM	Pengembangan SDM berdaya saing global (talenta global) serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di WP Bodebekpunjur diarahkan dengan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pendidikan vokasi, meningkatkan kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan kerja, meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang inklusif, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta mengembangkan sistem perlindungan sosial.
Infrastruktur	Pengembangan infrastruktur pendukung diarahkan pada upaya melengkapi fasilitas pendukung PKL; meningkatkan kualitas layanan infrastruktur termasuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara terintegrasi, efisien, merata, serta adaptif terhadap bencana.
Ekonomi	Pembangunan perekonomian diarahkan pada upaya menciptakan perluasan lapangan pekerjaan; mendorong investasi yang efisien lahan, air baku, energi, teknologi tinggi dan non polutif; mendorong pembangunan industri padat karya dan penyerapan tenaga lokal; meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa sektor perekonomian; meningkatkan produktivitas, daya saing dan pengembangan IKM/UMKM; meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal; meningkatkan produksi dan distribusi pangan; meningkatkan stabilitas daerah; membangun kolaborasi dan kemitraan dengan swasta, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi.
Lingkungan	Pengembangan infrastruktur pendukung diarahkan pada upaya melengkapi fasilitas pendukung PKL; meningkatkan kualitas layanan infrastruktur termasuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara terintegrasi, efisien, merata, serta adaptif terhadap bencana.

Arahan pembangunan infrastruktur strategis dari perspektif Pemerintah Pusat dituangkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Berdasarkan arahan tersebut Kota Bogor secara infrastruktur akan dilakukan pengembangan Jalan dan Jembatan, peningkatan jaringan jalur perkotaan/light rail transit (LRT) terintegrasi di Jakarta-Bogor serta Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Bogor- Sukabumi (termasuk elektrifikasi).

Telaah Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah di Kota Bogor

Menurut Gulo (2015), pusat pertumbuhan merupakan salah satu alternatif untuk menggerakkan dan memacu pembangunan. Pertumbuhan wilayah juga dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat dengan di bangunnya jaringan jalan baru, sebagaimana diungkapkan Rui et.al (2013), bahwa pertumbuhan jaringan jalan semakin meningkat manakala pusat-pusat kegiatan semakin banyak.

Pertumbuhan pusat kegiatan itu sendiri terlihat dari perubahan pola penggunaan lahannya. Menurut Kumalasari (2015), penggunaan lahan mempengaruhi pergerakan lalu lintas. Transportasi dan tata guna lahan berhubungan sangat erat, Bau (2013) menyebutnya sebagai satu land-use transport system. Sistem transportasi yang tidak baik akan menghalangi aktivitas tata guna lahan. Sebaliknya, transportasi yang tidak melayani suatu tata guna lahan akan menjadi sia-sia, tidak termanfaatkan.

Berpegang pada prinsip bahwa rencana tata ruang adalah perwujudan ruang dari rencana pembangunan jangka panjang daerah maka tujuan penataan ruang Kota Bogor diturunkan dari visi pembangunan kota yang telah disebutkan. Selain berpegang pada RPJPD, perumusan tujuan penataan ruang juga mempertimbangkan berbagai aspek seperti hasil analisis penataan ruang Kota Bogor mengenai kondisi internal dan kebijakan pengembangan kota sebelumnya, isu-isu strategis dan peran serta fungsi kota yang dikembangkan pada Kota Bogor untuk jangka waktu 20 tahun.

Berdasarkan Permendagri No.107 Tahun 2014 tujuan penataan ruang Kota Bogor yaitu “Mewujudkan Ruang Kota Bogor sebagai Kota Jasa dan Permukiman dengan tetap Mempertahankan Ciri Khasnya sebagai Kota Pusaka yang Berwawasan Lingkungan”. Penataan Kota Bogor dilakukan pada luas administrasi kota Bogor sebesar 11.138 Hektar. Dalam mewujudkan Kota Jasa dan Permukiman, terdapat beberapa hal yang dilakukan Kota Bogor dalam penataan ruang, yaitu:

- 1) Mewujudkan pusat pertumbuhan baru di 4 wilayah pelayanan melalui pengembangan guna campuran
- 2) Mengembangkan rumah vertikal dan horizontal, serta rumah terstruktur dan rumah swadaya/kampung
- 3) Meningkatkan kualitas permukiman kumuh secara terpadu baik fisik maupun sosial ekonomi melalui perbaikan lingkungan, penyediaan prasarana dan sarana, peremajaan, dan perbaikan kawasan
- 4) Mengembangkan perumahan vertikal dengan KDB rendah pada kawasan PPK, Sub PPK, simpul-simpul TOD, jalan arteri dan kolektor yang sudah memenuhi kriteria teknis, kawasan perumahan padat tidak teratur yang direvitalisasi, dan permukiman padat sekitar sempadan sungai
- 5) Mengembangkan perumahan baru yang dilengkapi dengan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

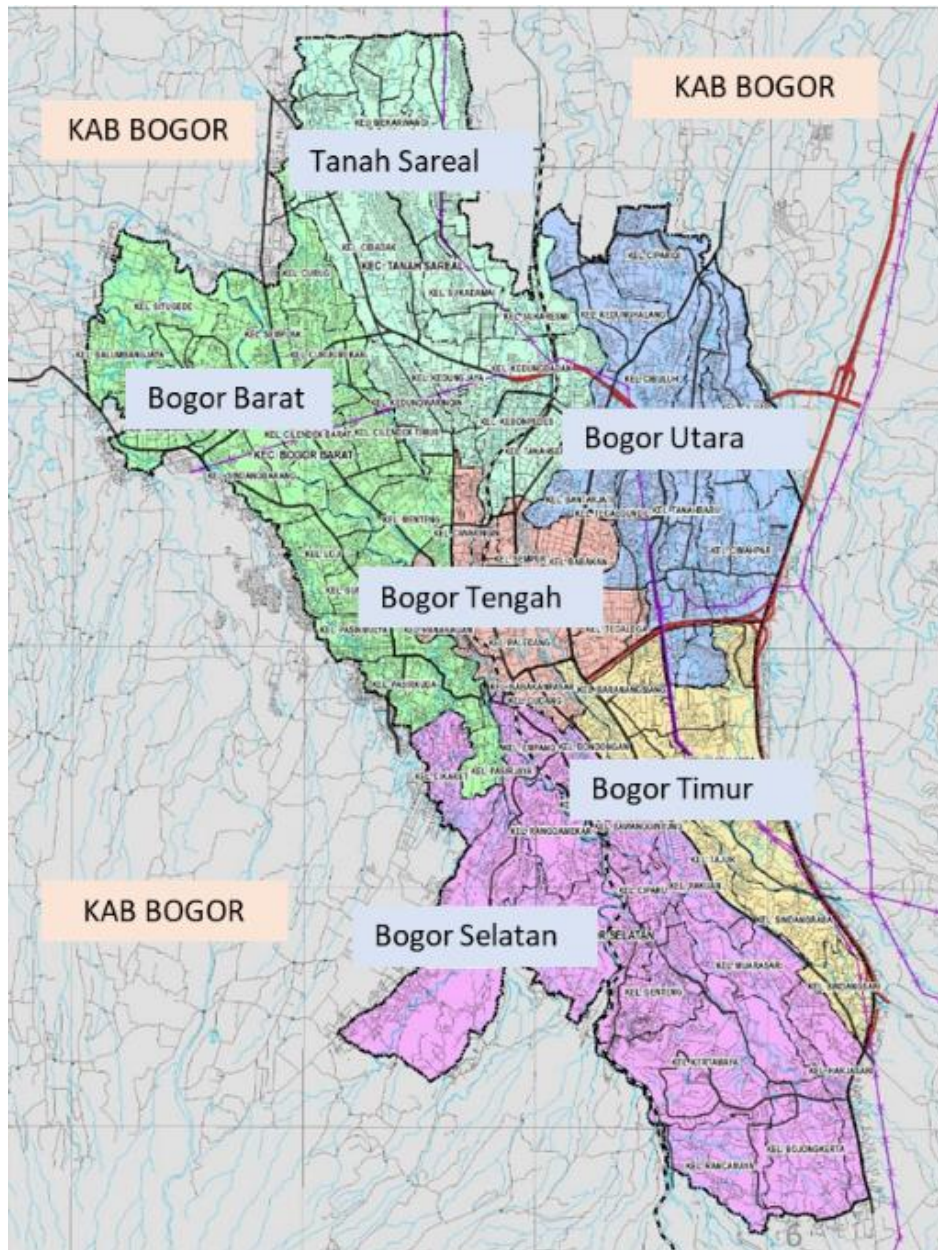
Selain itu, perwujudan Kota Pusaka melalui perencanaan tata ruang kota dilakukan melalui:

- 1) Pelestarian kawasan dan bangunan cagar budaya
- 2) PPK sebagai sebagai pusat kota lama (kawasan pusaka) diarahkan untuk mempertahankan dan meremajakan kegiatan perdagangan dan jasa yang ada, pusat perkantoran, dan RTH skala kota
- 3) Menetapkan kawasan pusaka sebagai kawasan strategis kota

Penataan ruang kota yang berwawasan lingkungan harus dapat memperhatikan keberlanjutan agar penciptaan ruang kota dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang hingga generasi di masa yang

akan datang. Perwujudan Kota Berkelanjutan dalam penataan ruang kota dilakukan melalui hal sebagai berikut:

- 1) Pengembangan transportasi umum
- 2) Pengembangan transportasi ramah lingkungan dan pedestrian
- 3) Mengembangkan infrastruktur dan bangunan hijau
- 4) Mengembangkan ruang terbuka hijau
- 5) Menata kawasan situ dan sungai
- 6) Memperketat KDB



Gambar 2.97. Peta Wilayah Administrasi Kota Bogor Berdasarkan Permendagri No.107 Tahun 2014

Kebijakan penataan ruang merupakan arah tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota, sedangkan strategi penataan ruang adalah penjabaran dari kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

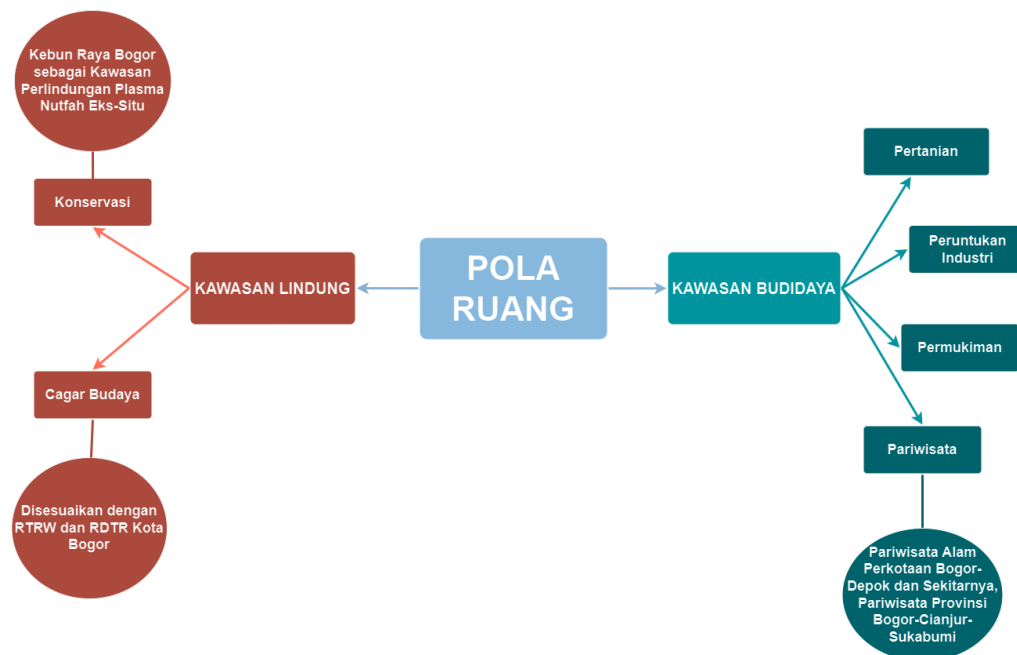
Melihat definisi dari kebijakan penataan ruang yang disebutkan sebelumnya maka kebijakan penataan ruang dirumuskan dengan kriteria:

- a. Mengakomodasi kebijakan penataan ruang nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku untuk Kota Bogor
- b. Arahannya jelas, realistis dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan
- c. Mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul pada masa yang akan datang
- d. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

2.7.3. Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Kota

Kebijakan pengembangan wilayah dalam perspektif kota adalah strategi dan rencana yang dibuat oleh pemerintah kota untuk mengatur pertumbuhan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya di wilayah Kota Bogor. Tujuan utama dari kebijakan pengembangan wilayah ini adalah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup penduduk, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang di seluruh wilayah.

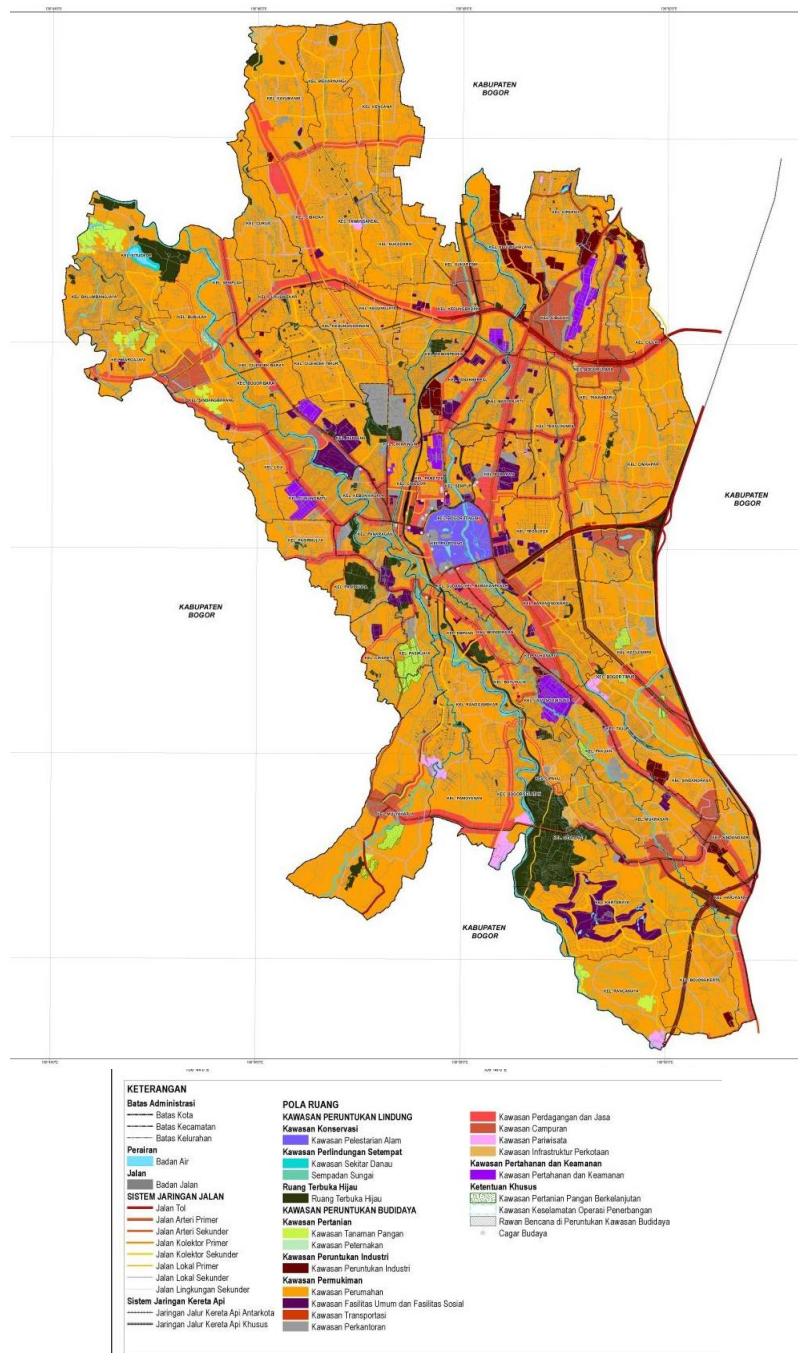
2.7.3.1. Pusat-Pusat Permukiman



Gambar 2.98. Pola Ruang Kota Bogor

Apabila dilihat dari RTRW provinsi, Provinsi Jawa Barat memiliki arahan dari struktur ruang yang akan berkaitan dengan pengembangan struktur ruang kabupaten/kota di dalamnya. Beberapa arah pemanfaatan yang terkait dengan struktur ruang di Kota Bogor antara lain ditunjukkan pada Gambar 2.99. Kawasan Lindung pada pola ruang Kota Bogor terdiri dari Kawasan lindung setempat, Kawasan konservasi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kawasan perlindungan setempat terdiri dari Sempadan Sungai dan Sempadan sekitar danau, situ atau waduk. Kawasan konservasi Kota Bogor yaitu Kebun Raya Bogor. Ruang Terbuka Hijau (RTH) terdiri dari Rimba kota (hutan penelitian Darmaga), Taman kota serta taman lingkungan, TPU dan jalur hijau. Kawasan Budidaya dalam rencana pola ruang Kota Bogor sebagai berikut:

- Kawasan pertanian
- Kawasan peruntukan industri
- Kawasan pariwisata
- Kawasan perumahan
- Kawasan perdagangan dan jasa
- Kawasan perkantoran
- Kawasan fasilitas umum dan sosial
- Kawasan transportasi
- Kawasan infrastruktur perkotaan
- Kawasan campuran
- Kawasan pertahanan dan keamanan

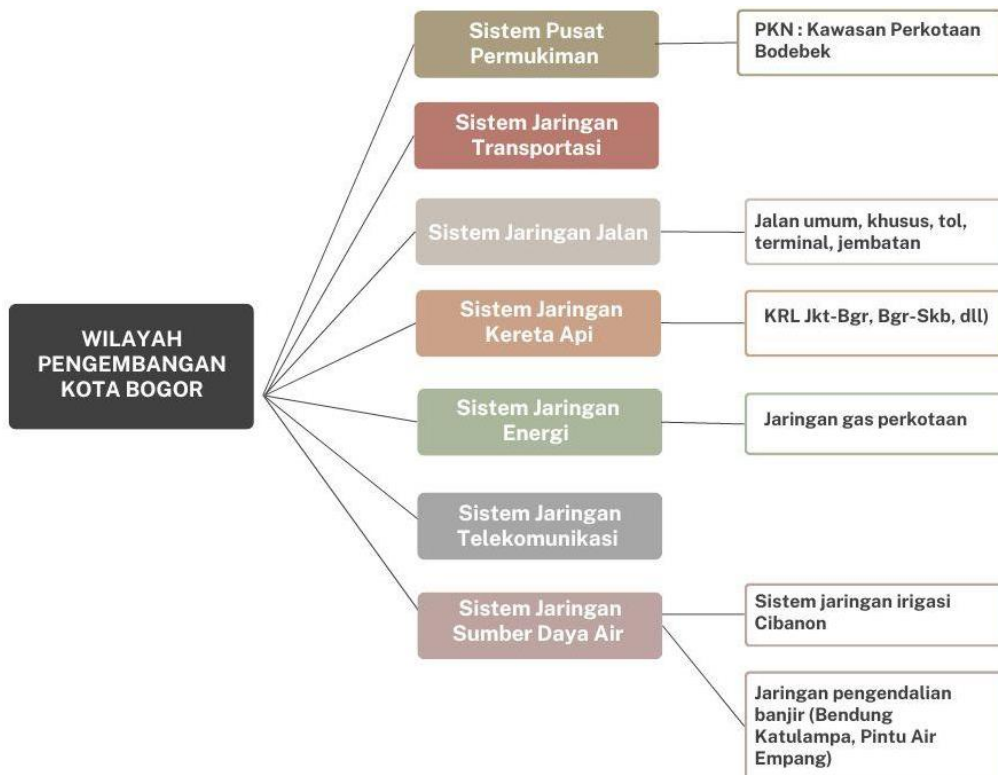


Gambar 2.99. Rencana Pola Ruang Kota Bogor Berdasarkan Revisi RTRW Kota Bogor 2011-2031

2.7.3.2. Wilayah Pengembangan (WP)

Kota Bogor termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan (WP) Bodebekpunjur. Bersama Kota Depok dan Bekasi, Kota Bogor diarahkan sebagai kota terdepan ibukota Negara yang merupakan bagian dari pengembangan KSN Jabodetabekpunjur untuk mendorong pengembangan PKN kawasan perkotaan Jabodetabek, menjadi simpul pelayanan dan jasa perkotaan, serta mengembangkan sektor perdagangan, jasa dan industri padat tenaga kerja; - Kabupaten Bogor dan Bekasi diarahkan menjadi kawasan penyangga dalam sistem PKN kawasan perkotaan Jabodetabek, serta untuk mengembangkan sektor industri ramah lingkungan dan hemat penggunaan air tanah, tidak mengakibatkan alih fungsi lahan di Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non logam untuk mendukung pembangunan di Bodebekpunjur; - Kawasan Puncak di Kabupaten Bogor - Cianjur diarahkan pada kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan lindung di KSN Jabodetabekpunjur. Sebagai bagian dari WP Bodebekpunjur, sektor unggulan dan potensial wilayahnya meliputi Agroforestri, pariwisata, industri manufaktur, perikanan, perdagangan, jasa, pertambangan, agribisnis dan agrowisata.

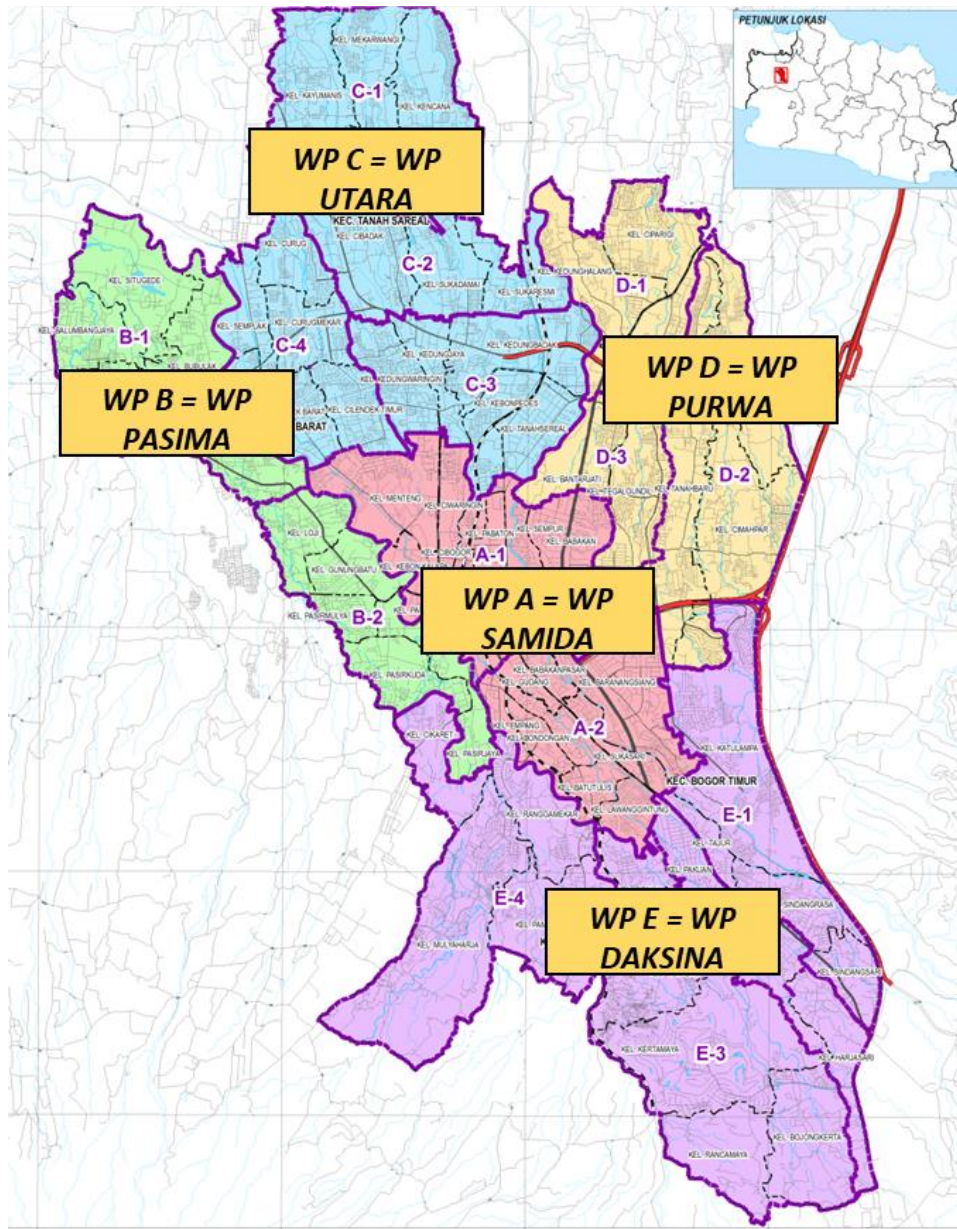
Beberapa fokus dalam wilayah pengembangan Kota Bogor, seperti pada pengembangan sistem pusat permukiman terdapat pengembangan pada PKN yaitu kawasan perkotaan Bodebek. Kemudian terdapat pengembangan sistem jaringan transportasi, terdapat pengembangan sistem jaringan jalan yaitu di jalan umum, khusus, tol, terminal, dan jembatan. Selain itu, terdapat pengembangan sistem jaringan kereta api yaitu KRL Jkt-Bgr, Bgr-Skb, dll. Pada sistem jaringan energi terdapat pengembangan jaringan gas perkotaan, pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dan sistem jaringan sumber daya air pada sistem jaringan irigasi Cibanon serta jaringan pengendalian banjir (Bendung Katulampa, pintu air Empang).



Gambar 2.100. Wilayah Pengembangan Kota Bogor

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031, wilayah Kota Bogor terbagi ke dalam lima Wilayah Pengembangan (WP) yaitu:

- a. WP Samida meliputi seluruh Kecamatan Bogor Tengah (Kelurahan Babakan, Kelurahan Babakan Pasar, Kelurahan Cibogor, Kelurahan Ciwaringin, Kelurahan Gudang, Kelurahan Kebon Kalapa, Kelurahan Pabaton, Kelurahan Paledang, Kelurahan Panaragan, Kelurahan Sempur, dan Kelurahan Tegalega), sebagian Kecamatan Bogor Barat (Kelurahan Menteng), sebagian Kecamatan Bogor Selatan (Kelurahan Empang, Kelurahan Bondongan, Kelurahan Batutulis, dan Kelurahan Lawanggintung), dan sebagian Kecamatan Bogor Timur (Kelurahan Baranangsiang dan Kelurahan Sukasari);
- b. WP Pasima meliputi sebagian Kecamatan Bogor Barat (Kelurahan Balungbangjaya, Kelurahan Bubulak, Kelurahan Gunungbatu, Kelurahan Loji, Kelurahan Margajaya, Kelurahan Pasir Jaya, Kelurahan Pasirkuda, Kelurahan Pasir Mulya, Kelurahan Sindangbarang, dan Kelurahan Situgede);
- c. WP Utara meliputi sebagian Kecamatan Bogor Barat (Kelurahan Cilendek Barat, Kelurahan Cilendek Timur, Kelurahan Curug, Kelurahan Curug Mekar, dan Kelurahan Semplak) dan seluruh Kecamatan Tanah Sareal (Kelurahan Cibadak, Kelurahan Kayumanis, Kelurahan Kebon Pedes, Kelurahan Kedung Badak, Kelurahan Kedungjaya, Kelurahan Kedungwaringin, Kelurahan Kencana, Kelurahan Mekarwangi, Kelurahan Sukadamai, Kelurahan Sukaresmi, dan Kelurahan Tanah Sareal);
- d. WP Purwa meliputi seluruh Kecamatan Bogor Utara (Kelurahan Bantarjati, Kelurahan Cibuluh, Kelurahan Ciluar, Kelurahan Cimahpar, Kelurahan Ciparigi, Kelurahan Kedunghalang, Kelurahan Tanahbaru, dan Kelurahan Tegalgundil); dan
- e. WP Daksina meliputi sebagian Kecamatan Bogor Selatan (Kelurahan Bojongkerta, Kelurahan Cikaret, Kelurahan Cipaku, Kelurahan Genteng, Kelurahan Harjasari, Kelurahan Kertamaya, Kelurahan Muarasari, Kelurahan Mulyaharja, Kelurahan Pakuan, Kelurahan Pamoyanan, Kelurahan Rancamaya, dan Kelurahan Ranggamekar) dan sebagian Kecamatan Bogor Timur (Kelurahan Katulampa, Kelurahan Sindangrasa, Kelurahan Sindangsari, dan Kelurahan Tajur).



Gambar 2.101. Pusat Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor Berdasarkan Revisi RTRW Kota Bogor 2011-2031

Penetapan WP dimaksudkan untuk mendistribusikan pelayanan kegiatan kepada masyarakat serta mengurangi pergerakan penduduk ke pusat kota. Berdasarkan pertimbangan di atas maka pembagian Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor direncanakan sebagai berikut:

Tabel 2.68. Pembagian Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor

No	Wilayah Pelayanan (WP)	Lokasi Pusat	Fungsi Pusat	Skala Pelayanan	Rencana Jumlah Penduduk (jiwa)	Ket.
1	WP Samida (WP A)	Kawasan Pemerintahan & Perkantoran & Komersial di sekitar Kebun Raya (Pusat Kota Lama)	Pusat Kota Sub-Pusat Kota (Pusat WP A)	Seluruh Kota, WP	273.811	-

No	Wilayah Pelayanan (WP)	Lokasi Pusat	Fungsi Pusat	Skala Pelayanan	Rencana Jumlah Penduduk (jiwa)	Ket.
2	WP Pasima (WP B)	Daerah Bubulak-Sindangbarang	Sub Pusat Kota (Pusat WP B)	WP	186.424	Melayani penduduk perbatasan
3	WP Utara (WP C)	Daerah Yasmin-Pasar TU Kemang	Sub Pusat Kota (Pusat WP C)	WP	456.499	-
4	WP Purwa (WP D)	Daerah Warung Jambu-Jl. Adnawijaya	Sub Pusat Kota (Pusat WP D)	WP	295.188	-
5	WP Daksina (WP E)	Daerah Tajur & sekitar rencana akses Toll Ciawi-Sukabumi- Inner Ring Road	Sub Pusat Kota (Pusat WP E)	WP	324.509	Melayani penduduk perbatasan

Sumber: Perda Kota Bogor No.6 Tahun 2021, Bappeda Kota Bogor

Arahan pengembangan setiap Wilayah Pelayanan (WP) sebagai berikut. Adapun arah pemanfaatan ruang WP Kota Bogor terlampir pada Tabel 2.69.

1. PPK sebagai sebagai pusat kota lama (kawasan pusaka) diarahkan untuk mempertahankan dan meremajakan kegiatan perdagangan dan jasa yang ada, pusat perkantoran, dan RTH skala kota;
2. Sub PPK Pasima sebagai pusat WP Pasima diarahkan sebagai pusat pertumbuhan baru dengan kegiatan utama jasa akomodasi, perdagangan dan pengembangan TOD Bubulak;
3. Sub PPK Utara sebagai pusat WP Utara diarahkan sebagai kawasan perkotaan baru dengan kegiatan utama perdagangan jasa dan pasar induk;
4. Sub PPK Purwa sebagai pusat WP Purwa diarahkan sebagai gerbang kota melalui pengembangan kawasan campuran dengan kegiatan utama perdagangan, jasa akomodasi, perkantoran dan wisata kuliner;
5. Sub PPK Daksina sebagai pusat WP Daksina diarahkan sebagai wilayah perkembangan ekonomi terbatas, dengan kegiatan utama sentra otomotif, wisata belanja, *Meeting - Incentive - Convention - and Exhibition (MICE)*, jasa akomodasi dan ekowisata; dan
6. PL pada masing-masing SWP akan dilengkapi dengan sarana prasarana skala lingkungan

Tabel 2.69. Indikasi Program Pengembangan Wilayah Pelayanan

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
1	WP Samida		
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Samida (WP A) dan proses legalisasi	WP Samida (WP A)	Kem ATR/BPN, DPUPR
2	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Sub WP Samida (WP A)	Sub WP Samida (WP A)	DPUPR
3	Penataan Kawasan <i>Transit Oriented Development (TOD)</i> Kota Bogor	TOD Stasiun Bogor	Kem PUPR, Kem Perhubungan, PT KA DISHUB, DPUPR, BAPPEDA, DISPERUMKIM,

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
		TOD Baranangsiang	Kem PUPR, Kem Perhubungan, PT KAI DISHUB, DPUPR, BAPPEDA, DISPERUMKIM,
4	Pengembangan RTH skala kota	PPK WP Samida (WP A)	DISPERUMKIM
5	Pengembangan RTNH skala kota	PPK WP Samida (WP A)	DISPERUMKIM
6	Peremajaan kawasan permukiman padat tidak teratur	Kel Panaragan, Kel Paledang, Kel Babakan Pasar, Kel Gudang, Kel Empang, Kel Tegalega dan Kel Sempur	Kem PUPR, Diskimrum Jabar, DISPERUMKIM, DPUPR, BAPPEDA
7	Penataan fasilitas minimum pusat kota yang telah ada	WP Samida (WP A)	Kem PUPR, Diskimrum Jabar, DISPERUMKIM, DPUPR, BAPPEDA
8	Penataan Pusat Lingkungan A1, A2	Kelurahan Kebon Kalapa, Sukasari	DPUPR, DPMPTSP, BAPPEDA, DISHUB
9	Penataan sektor informal (PKL)	WP Samida (WP A)	DINAS KUMKM
II	WP Pasima		
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Pasima (WP B) dan proses legalisasi	WP Pasima (WP B)	DPUPR
2	Penyusunan Rencana rinci Kawasan Pusat WP Pasima (WP B)	Sub PPK WP Pasima (WP B)	DPUPR
3	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Sub WP Pasima (WP B)	Sub Pusat WP Pasima (WP B)	DPUPR
4	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) Skala Kota/ Regional	Kawasan TOD Skala Kota	DPUPR
5	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota	DPUPR
6	Penyusunan Rencana Peluang Investasi dan kerjasama pembangunan Sub PPK WP Pasima (WP B)	Sub PPK Pasima (WP B): Terminal Bubulak, sekitar Sindangbarang	
7	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Pasima (WP B) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Pasima (WP B) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Sub PPK Pasima (WP B): Terminal Bubulak, sekitar Sindangbarang	DPUPR, BAPPEDA, DISPERUMKIM
8	Pembangunan RTH skala WP	Sub PPK Pasima (WP B): Terminal Bubulak, sekitar Sindangbarang	DLH, DISPERUMKIM
9	Pembangunan Pusat Lingkungan B1 dan B2	Kelurahan Balungbang Jaya, Gunungbatu	DPUPR, DPMPTSP, BAPPEDA, DISHUB
III	WP Utara		
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Utara (WP C) dan proses legalisasi	WP Utara (WP C)	DPUPR
2	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Pusat WP Utara (WP C)	Yasmin – Pasar TU Kemang	DPUPR
3	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Sub WP Pasima (WP C)	Sub Pusat WP Utara (WP C)	DPUPR

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
4	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) Skala Kota/Regional	Kawasan TOD Skala Kota	DPUPR
5	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota	DPUPR
6	Penyusunan Rencana Peluang Investasi dan kerjasama pembangunan di Sub PPK C	Sub PPK Utara 9WP C): Yasmin–Pasar TU Kemang	
7	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Utara (WP C) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Utara (WP C) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Sub PPK Utara 9WP C): Yasmin–Pasar TU Kemang	DPUPR, BAPPEDA, DISPERUMKIM
8	Pembangunan RTH skala WP	WP Utara (WP C)	DLH, DISPERUMKIM
9	Pembangunan Pusat Lingkungan C1, C2, C3, C4	Kelurahan Mekarwangi, Sukadamai, Kebonpedes, Cilendek Barat	DPUPR, DPMPSTP, BAPPEDA, DISHUB
IV	WP Purwa		
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Purwa (WP D) dan proses legalisasi	WP Purwa (WP D)	Kem ATR/BPN, DPUPR
2	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Pusat WP Purwa (WP D)	Sub PPK D, Warung Jambu– Jalan Adnawijaya	DPUPR
3	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Sub WP Purwa (WP D)	Sub Pusat WP Purwa (WP D)	DPUPR
4	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) Skala Kota/Regional	Kawasan TOD Skala Kota	DPUPR
5	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota	DPUPR
6	Penyusunan RTBL koridor Jalan Raya Bogor–Jakarta	Koridor Bogor–Jakarta	DPUPR, DISPERUMKIM
7	Penataan kawasan Simpang Pomad–perbatasan kota	Simpang Pomad–Perbatasan kota	DPUPR, DISPERUMKIM
8	Penyusunan rencana peluang investasi dan kerjasama pembangunan Sub PPK WP Purwa (WP D)	WP Purwa	
9	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Purwa (WP D) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Purwa (WP D) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Sub PPK D, Warung Jambu– Jalan Adnawijaya	DPUPR, BAPPEDA, DISPERUMKIM
10	Pembangunan RTH skala WP	WP Purwa (WP D)	DLH, DISPERUMKIM
11	Pembangunan Pusat Lingkungan D1, D2, D3 dan D4	Kelurahan Kedunghalang, Ciluar, Cimahpar, Tegalgundil	DPUPR, DPMPSTP, BAPPEDA, DISHUB
V	WP Daksina		
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Daksina (WP E) dan proses legalisasi	WP Daksina (WP E)	DPUPR
2	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Pusat WP Daksina (WP E)	Jalan Raya Tajur dan sekitar akses Tol Ciawi– Sukabumi– <i>Inner Ring Road</i>	DPUPR

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
3	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Sub WP Daksina (WP E)	Sub Pusat WP Dasina (WP E)	DPUPR
4	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) Skala Kota/ Regional	Kawasan TOD Skala Kota	DPUPR
5	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota	DPUPR
6	Penataan kawasan perbatasan Simpang Jalan Tajur – Jalan Raya Ciawi Sukabumi	Simpang Jalan Tajur–Jalan Raya Ciawi Sukabumi	DPUPR, DISPERUMKIM
7	Penyusunan RTBL Koridor <i>Inner Ring Road</i>	Koridor <i>Inner Ring Road</i>	DPUPR, DISPERUMKIM
8	Penyusunan rencana peluang investasi dan kerjasama pembangunan Sub PPK WP Daksina	Jalan Raya Tajur dan sekitar akses Tol Ciawi – Sukabumi – <i>Inner Ring Road</i>	
9	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Daksina (WP E) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Daksina (WP E) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Jalan Raya Tajur dan sekitar akses Tol Ciawi – Sukabumi – <i>Inner Ring Road</i>	DPUPR, BAPPEDA, DISPERUMKIM
10	Pembangunan RTH skala WP	WP Daksina	DLH, DISPERUMKIM
11	Pembangunan Pusat Lingkungan E1, E2, E3, E4	Kelurahan Katulampa, Cipaku, Kertamaya, Mulyaharja	DPUPR, DPMPTSP, BAPPEDA, DISHUB

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2024

2.7.3.3. Kawasan Strategis Kota Bogor

Kawasan strategis yang direncanakan tidak terbatas hanya kepada kawasan strategis kota namun juga kawasan strategis nasional sebagaimana tertuang dalam RTRWN dan Kawasan strategis provinsi sebagaimana tertuang dalam RTRWP Jawa Barat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 yang menjadi dasar dalam penetapan RTRWN, kawasan strategis nasional terkait dengan Kota Bogor adalah kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur, dengan kriteria kepentingan adalah ekonomi. Kota Bogor sebagai bagian dari kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur termasuk dalam wilayah perencanaan kawasan strategis ini.

Tabel 2.70. Rencana Strategis Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Barat

Rencana Strategis Nasional	Rancangan RTRW Provinsi Jawa Barat
Jalan Tol Bogor Ring Road	Jalan Tol Bogor Ring Road
Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi	Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi
	Rencana fungsi Jalan RTRW Provinsi
Terminal Tipe A	Pembangunan/rehabilitasi terminal tipe A
Rencana Double Track Bogor – Sukabumi	Rencana Double Track Bogor – Sukabumi
Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit- (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi	Rencana pengembangan jaringan dan layanan KA perkotaan Metropolitan Bodebekkarpur (Cibubur-Bogor)
Rencana Pembangunan Transit Oriented Development (TOD),	
Angkutan Massal berbasis Bus Jabodetabek	

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 – 2042, Kota Bogor disebutkan masuk dalam wilayah provinsi Bodebekpunjur yang dijadikan sebagai pengembangan Kawasan

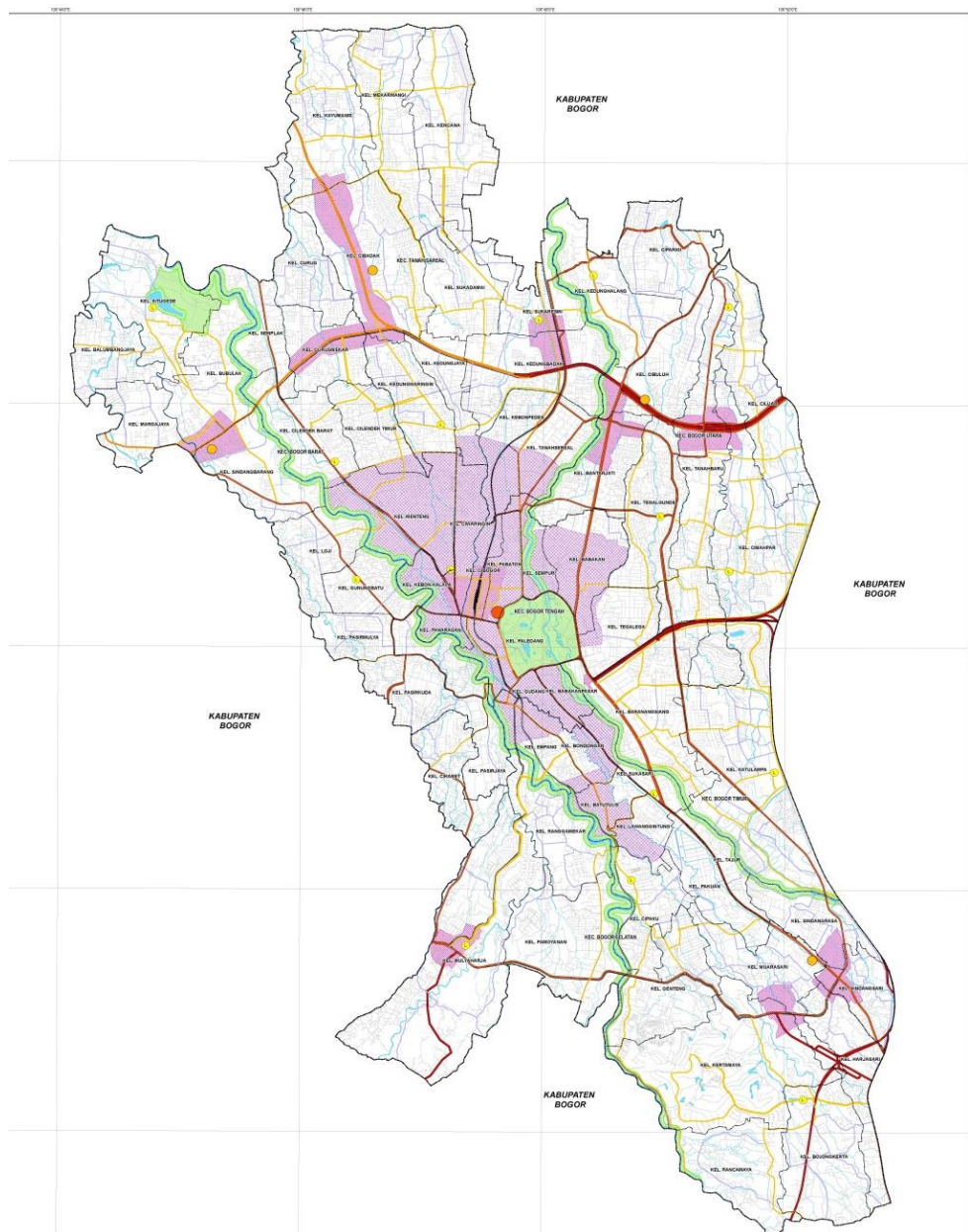
Perkotaan di Wilayah Daerah Provinsi dengan kesetaraan fungsi dan peran Kawasan di KSN Jabodetabekpunjur serta antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah di Jawa Barat. Fokus pengembangan yang akan dilakukan adalah dengan Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi diarahkan sebagai kota terdepan ibukota Negara yang merupakan bagian dari pengembangan KSN Jabodetabekpunjur untuk mendorong pengembangan PKN kawasan perkotaan Jabodetabek, menjadi simpul pelayanan dan jasa perkotaan, serta mengembangkan sektor perdagangan, jasa dan industri padat tenaga kerja.

Beberapa proyek strategis nasional (PSN) juga dilakukan di wilayah Kota Bogor, mulai dari pembangunan jalan tol hingga integrasi angkutan massal. Bappeda Kota Bogor menyebutkan, paling tidak terdapat empat pembangunan PSN yang dilakukan di Kota Bogor, yaitu pembangunan dua jalan tol (Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi) dan Bogor Outer Ring Road (BORR)), pembangunan kereta api ringan atau *Light Rail Transit* (LRT) hingga Kota Bogor, serta pembangunan jalur ganda atau *doubletrack* kereta api Bogor-Sukabumi. Pada tahun 2023, dilaporkan telah selesai terbangun satu dari empat PSN tersebut, yaitu tol Bocimi yang terhubung dengan tol Jagorawi dan kemudian berlanjut di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. PSN lainnya yaitu pembangunan layanan LRT dari Cibubur hingga terhubung ke Kota Bogor. Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mewacanakan untuk melanjutkannya pada tahun 2024. Terakhir yaitu pembangunan jalur ganda KA Bogor-Sukabumi beserta jembatan layang atau skybridge yang menghubungkan Stasiun Bogor dengan Stasiun Paledang yang ditargetkan akan selesai pada akhir Januari untuk *doubletrack* dan Februari untuk *skybridge*.

Lebih lanjut, Kota Bogor terpilih menjadi *pilot project* National Urban Development Project (NUDP) atau proyek pembangunan perkotaan nasional oleh pemerintah pusat. Proyek tersebut bertujuan meningkatkan perencanaan dan pemrograman pembangunan kota yang terpadu serta penyusunan prioritas program investasi modal. Pencapaian tujuan NUDP ini diukur dengan tiga indikator utama, yaitu tersusunnya strategi nasional pembangunan infrastruktur perkotaan, tersusunnya rencana dan program pembangunan perkotaan terpadu serta keterpaduan antara kerangka perencanaan investasi dan penganggaran.

Selanjutnya, penetapan kawasan strategis kota yang ditetapkan dalam RTRW Kota Bogor ini didasarkan kepada kriteria fungsi kawasan terbagi menjadi tiga yaitu kawasan strategis lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi.

- a. Kawasan strategis lingkungan yang meliputi: i) kawasan Kebun Raya dan sekitarnya, ii) Kawasan Situgede dan hutan Cifor, dan iii) sempadan sungai Ciliwung dan Cisadane.
- b. Kawasan strategis sosial budaya yang meliputi: i) Kawasan perdagangan lama di Pasar Bogor, Pecinan di Suryakencana dan Kampung Arab di Empang, ii) Kawasan Istana Batu Tulis dan sekitarnya, iii) Kawasan Perumahan berarsitektur khas di taman Kencana.
- c. Kawasan strategis ekonomi yang meliputi: i) kawasan pasar Kebon Kembang dan sekitarnya, dan ii) pusat Wilayah Pelayanan (WP)/subpusat pelayanan kota.



Gambar 2.102. Penetapan Kawasan Strategis Kota Bogor Berdasarkan Revisi RTRW Kota Bogor 2011-2031

2.7.4. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah

Arah Kebijakan Kewilayahan dalam RPJPN 2025-2045 yang menjadi bahan masukan bagi penyusunan RPJPD Kota Bogor diacu pada dua hal yaitu arah kebijakan kewilayahan terkait isu perkotaan dan arah kebijakan wilayah Jawa. Wilayah Jawa berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 56,5 persen pada tahun 2022. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi, Wilayah Jawa berpotensi tumbuh rata-rata sekitar 5,9-6,5 persen per tahun, dengan kontribusi Wilayah pada kisaran 48,3 persen pada tahun 2045. Pada tahun 2045, sebagian besar Wilayah Jawa akan menjadi kawasan perkotaan, yang diproyeksikan menjadi tempat tinggal bagi kurang lebih 70 persen penduduk di Wilayah Jawa. Kawasan strategis aglomerasi penduduk tersebut menjadi suatu kekuatan market yang sangat potensial dan menjadi demand generator bagi kawasan lainnya. Aglomerasi penduduk juga memungkinkan terjadinya diversifikasi aktivitas ekonomi secara signifikan, dengan aktivitas ekonomi penumpu utama di kawasan perkotaan adalah sektor jasa (*tertiary sector*).

Kawasan perkotaan menjadi tempat interaksi multikultural yang harus diiringi dengan penguatan ketahanan sosial. Signifikansi peran kawasan perkotaan dan pesatnya aktivitas ekonomi perkotaan tersebut perlu diperkuat dan didukung, dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta dengan menguatkan ketahanan kawasan perkotaan terhadap bencana dan perubahan iklim. Dalam konsep kawasan strategis, kawasan fungsional perkotaan di Jawa tumbuh secara generik menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu megapolitan, metropolitan, dan pusat aglomerasi.

Wilayah Jawa diarahkan menjadi wilayah “Megalopolis yang unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan”, melalui 5 (lima) prioritas yang salah satunya sangat terkait dengan Kota Bogor adalah penuntasan RDTR kabupaten/kota, perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim, terutama pada kawasan-kawasan perkotaan dan kawasan strategis.

Dalam mendukung Transformasi Ekonomi, Wilayah Jawa diarahkan sebagai koridor “Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi” yang diupayakan melalui berbagai kebijakan. Kebijakan yang dapat terkait dengan pengembangan Kota Bogor ke depan antara lain adalah:

- Pengembangan kawasan strategis industri Serang-Tangerang (klaster industri pengolahan material/metalurgi, pengolahan petrokimia, pengolahan perikanan, dan industri orientasi ekspor), kawasan strategis industri Bekasi - Karawang-Subang dan Jawa Utara (klaster industri *consumer goods* dan *general manufacture*). Walaupun tidak masuk ke dalam klaster secara langsung, namun keberadaan kawasan-kawasan strategis tersebut akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan Kota Bogor saat ini maupun di masa yang akan datang.
- Pengembangan Konsep Hub Kebudayaan dan Industri Kreatif (Cultural Hub and Creative Industry (CCI)) juga perlu diadopsi dalam pengembangan pariwisata melalui penyelenggaraan *Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions* (MICE) di wilayah-wilayah perkotaan.
- Pengembangan kawasan perkotaan yang memiliki potensi urban & health/medical tourism seperti Megapolitan Jakarta-Bandung, Megapolitan Surabaya-Malang, dan Metropolitan Semarang.
- Pengembangan perkotaan (mengacu kepada konsep IKN) yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan antara lain penyediaan akses layanan publik yang inklusif, pengembangan urban farming, penggunaan *Internet of Things* (IoT), pengembangan Transit Oriented Development (TOD) dan transportasi hijau, penerapan *smart city* dan ekonomi sirkuler, serta peningkatan *creative financing*.
- Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.
- Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif dan global (*global city*), yaitu pada megapolitan Jakarta-Bandung, megapolitan Surabaya-Malang, dan metropolitan Semarang, serta pada pusat-pusat aglomerasi yaitu Cirebon, Cilacap, Solo, Madiun, Kediri, dan Jember.

Selain arah kebijakan kewilayahan yang mendukung Transformasi Ekonomi, arah kebijakan kewilayahan terkait perkotaan dan Kota Bogor pada transformasi lain adalah pada Arah Kebijakan Landasan Transformasi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Arah kebijakan ekologi difokuskan pada pengendalian polusi, penguatan kebijakan lingkungan, peningkatan pemanfaatan energi

terbarukan, serta peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana. Arah kebijakan ekologi terkait antara lain adalah (i) Peningkatan pemantauan kualitas pengelolaan lingkungan hidup terutama pada kualitas udara yang masih rendah di Provinsi DKI Jakarta dan kualitas air di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi DI Yogyakarta; dan (ii) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup termasuk mitigasi risiko pada wilayah perkotaan. Untuk arah kebijakan untuk mendukung ketahanan sumber daya air terpadu, yang terkait dan menjadi perhatian adalah Normalisasi sungai yang melintas di tengah perkotaan.

2.7.4.1. Arah Kebijakan Terkait Perkotaan

Salah satu arah kebijakan Transformasi Ekonomi yang terkait dengan perkotaan adalah Perkotaan sebagai pusat Pertumbuhan Ekonomi. Peran perkotaan dengan berbagai fasilitas yang telah tersedia, sangat diharapkan dapat mendorong wilayah-wilayah di sekitarnya mendapat dampak positif dari sebuah perkembangan. Pada proses perkembangannya, RPJPN 2025-2045 memperhatikan bahwa hubungan aglomerasi kota-kota besar menjadi metropolitan dapat memiliki peran yang sangat signifikan. Pengembangan wilayah metropolitan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sehingga dapat menjadi hub ekonomi nasional dan global, termasuk pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai superhub ekonomi sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan.

Perkotaan yang responsif terhadap pertumbuhan penduduk mengantisipasi perkiraan peningkatan persentase penduduk wilayah perkotaan di Indonesia, yaitu sebesar 72,9 persen pada tahun 2045, diperlukan tata kelola pembangunan termasuk dalam pembangunan perkotaan yang dapat mengimbangi tuntutan peningkatan kualitas pelayanannya. Tingkat kompleksitas di Wilayah Metropolitan (WM) seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya memerlukan tata kelola yang lebih andal. Arah kebijakan pembangunan perkotaan difokuskan untuk mendorong pembangunan perkotaan yang lebih terstruktur terutama untuk mengelola urbanisasi, menjadikan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan, serta sebagai pusat pertumbuhan dan penggerak ekonomi Kawasan sekitarnya. Penanganan yang tepat sehingga penduduk menjadi pendorong utama yang positif bagi pembangunan.

Posisi Kota Bogor sebagai bagian dari kawasan Jabodetabekpunjur tentu sangat berkaitan dengan arah kebijakan di atas. Integrasi sistem transportasi dengan mobilitas yang tinggi di kawasan Jabodetabekpunjur jika tidak disikapi dan antisipasi dengan baik hanya akan mendatangkan dampak negative terhadap mobilitas internal di Kota Bogor. Begitu pun dengan upaya menjadikan Kota Bogor sebagai kota layak huni, inklusif, dan berbudaya, yang diimbangi dengan upaya mendorong kota hijau dan berketahanan. Perwujudan kota maju dengan mengedepankan kesejahteraan melalui penerapan compact city, serta pengembangan kelembagaan dan regulasi pengelolaan perkotaan, menjadi arahan yang dapat dijadikan acuan bagi Kota Bogor di masa yang akan datang. Sedangkan dalam rangka Pembangunan IKN sebagai Superhub Ekonomi, secara langsung Kota Bogor tidak memiliki keterkaitan, namun secara prinsip dan konsep pengembangan, seperti halnya menuju wilayah yang berdaya saing dan inovatif, tetap dapat menjadi acuan untuk diterapkan.

Oleh karena itu perlu ditegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan perkotaan difokuskan untuk mendorong pembangunan perkotaan yang lebih terstruktur terutama untuk mengelola urbanisasi, menjadikan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan, serta sebagai pusat pertumbuhan dan penggerak ekonomi kawasan sekitarnya. Pembangunan perdesaan dan perkotaan dilaksanakan secara terpadu dengan mempertimbangkan peran strategis masing-masing kawasan.

Pengembangan wilayah metropolitan, kota besar dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat pertumbuhan yang terutama memenuhi standar pelayanan perkotaan berdasarkan prinsip layak huni, inklusif dan berbudaya; hijau dan berketahanan; serta maju menyejahterakan.

Pusat-pusat pertumbuhan wilayah dibangun dalam rangka menopang pembangunan Indonesia sebagai negara Nusantara dengan mempertimbangkan dinamika global, nasional, dan lokal. Kawasan pusat pertumbuhan yang dikembangkan diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi dan nilai tambah, serta perluasan lapangan kerja dengan menerapkan ekonomi hijau dan biru. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan RPJPN 2025-2045 difokuskan pada sentra dan kawasan berbasis potensi unggulan daerah yang didukung oleh kawasan perkotaan. Dalam hal ini yang dapat berkaitan dengan pengembangan Kota Bogor ke depan yaitu (i) kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pusat pengembangan industri dan jasa pariwisata; dan (ii) kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan, jasa, dan perdagangan.

2.7.4.2. Arah Kebijakan Sarana dan Prasarana Kota Bogor

Dalam mewujudkan RPJPN 2025-2045, Kota Bogor masih memiliki tantangan dalam pengembangan sarana dan prasarana yaitu layanan infrastruktur dasar yang belum menyeluruh dan masih terbatas. Maka dari itu, diperlukan peningkatan aksesibilitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar lainnya melalui:

1. Pemenuhan jumlah dan peningkatan kualitas rumah tinggal serta lingkungannya yang layak huni bagi keluarga, terutama bagi korban bencana dan korban relokasi.
2. Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal melalui program pengembangan dan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Rumah Susun Sewa (Rusunawa).
3. Peremajaan Kota Bogor terutama pada kawasan permukiman padat tidak teratur seperti Kel Panaragan, Kel Paledang, Kel Babakan Pasar, Kel Gudang, Kel Empang, Kel Tegalega dan Kel Sempur.
4. Pembangunan dan peningkatan jaringan transmisi untuk pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif.
5. Pengembangan dan perluasan jaringan distribusi serta retikulasi untuk meningkatkan daerah pelayanan air siap minum dan air bersih.
6. Peningkatan komitmen daerah dalam penyediaan layanan pengelolaan sampah dengan berorientasi ekonomi sirkuler dan nilai ekonomis melalui pembentukan Dewan Sekretariat bersama pengelolaan sampah regional, pengembangan pengelolaan sampah skala lingkungan berbasis komunitas dengan metode 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*), metode bank sampah, dan metode kemitraan pengolahan.

2.7.4.3. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Kota Bogor

Pusat-pusat pertumbuhan wilayah dibangun dalam rangka menopang Pembangunan Indonesia sebagai negara Nusantara dengan mempertimbangkan dinamika global, nasional, dan lokal. Kawasan pusat pertumbuhan yang dikembangkan diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi dan nilai tambah (*value added*), serta memperluas lapangan kerja dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau (*green economy*) dan ekonomi biru (*blue economy*). Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah difokuskan pada sentra dan kawasan berbasis potensi unggulan daerah yang didukung oleh kawasan perkotaan, meliputi: (1) sentra pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan sebagai pusat produksi; (2) kawasan industri unggulan sebagai pusat pengolahan sumber daya alam; (3) kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pusat perkembangan

industry dan jasa pariwisata; serta (4) kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan, jasa, dan perdagangan.

Arah kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, dalam tahap perencanaan dilakukan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan kebijakan pembangunan wilayah dan dinamika pasar. Dalam tahap Pembangunan, diarahkan pada: (1) Pembangunan sentra produksi berbasis komoditas unggulan, kawasan industri pengolahan serta kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggidengan mempertimbangkan kesiapan lahan, keterkaitan kawasan dengan *hinterland*, serta manajemen rantai nilai dan rantai pasok; (2) percepatan Pembangunan infrastruktur dalam dan luar kawasan dengan menekankan pada prinsip sinergi sumber pendanaan dari APBN dan non-APBN; (3) penyediaan SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia usaha; dan (4) penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan.

Tabel 2.71. Indikasi Program Transportasi

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
I	Studi dan Kajian		
1	Kajian pola distribusi dan pola perjalanan	Kota Bogor	DISHUB
2	Penyusunan <i>database</i> jaringan jalan	Kota Bogor	DPUPR
3	Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian (RIP)	Kota Bogor	DISHUB
4	Sistem Informasi sarana dan prasarana angkutan umum	Kota Bogor	DISHUB
II	Jaringan Jalan		
A	Penetapan fungsi jalan	Kota Bogor	DPUPR
B	Peningkatan Jalan		
1	Jalan kolektor sekunder	Jalan Pajajaran Jalan KS Tubun Jalan Letjen Ibrahim Adjie Jalan Mayjen Ishak Djuarsa Jalan Pangeran Shogiri Jalan Tumenggung Wiradiredja; Jalan Parung Banteng Jalan Kayumanis-Citebut Jalan Cibeureum Jalan Kaptan Yusuf Jalan Cipaku Jalan Warung Nangka Jalan Mandala Ciluar	DPUPR DPUPR DPUPR DPUPR DPUPR DPUPR DPUPR DPUPR DPUPR DPUPR DPUPR DPUPR
2	Jalan Lokal	Tersebar di Kota Bogor	DPUPR
3	Perbaikan geometrik simpang	Simpang Jalan Tentara Pelajar – Jalan Johar Simpang Jalan Tentara Pelajar – Jalan Manunggal Simpang Jalan R. Saleh Bustaman – Jalan Pahlawan Simpang Jalan Pomad – Jalan KS. Tubun	DPUPR DPUPR DPUPR DPUPR

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
		Simpang Jalan Raya Pemda – Jalan KS Tubun (Talang)	DPUPR
		Simpang Jalan Arteri Tol Lingkar Bogor – Jalan KS. Tubun	DPUPR
		Simpang Jalan Pajajaran – Jalan KS Tubun – Jalan Adhawijaya (Warung Jambu)	DPUPR
		Simpang Jalan Raya Pajajaran – Jalan Lodaya – Jalan Salak	DPUPR
		Simpang Jalan Raya Pajajaran – Jalan Pangrango	DPUPR
		Simpang Tol Lingkar Bogor – Jalan Pangeran Sogiri	DPUPR
		Simpang Ahmad Syam – Cimahpar	DPUPR
		Simpang Jalan Ahmad Syam – Jalan Tol Jagorawi (Kampung Sawah)	DPUPR
4	Pembangunan persimpangan tidak sebidang	Persimpangan Jalan RE Martadinata	DPUPR
		Persimpangan Jalan MA Salmun	DPUPR
		Persimpangan Jalan Kebon Pedes	DPUPR
		Persimpangan Jalan Kapten Muslihat	DPUPR
		Jalan arteri, kolektor dan lokal lainnya	DPUPR
5	Peningkatan Jembatan	Jembatan sungai Ciliwung di Jalan Ahmad Yani	DPUPR
		Jembatan sungai Ciliwung di Jalan KH Sholeh Iskandar	DPUPR
		Jembatan sungai Ciliwung di Jalan Otto Iskandardinata	DPUPR
		Jembatan sungai Ciliwung Jalan Jalak Harupat	DPUPR
C	Pembangunan jalan		
1	Pengembangan jalan tol		
a	Pembangunan akses konektivitas ke jalan tol	Akses konektivitas ke Jalan Tol Lingkar Bogor (BoRR)	Kementerian PUPR, DPUPR, BUMN, swasta
		Akses konektivitas ke Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi)	Kementerian PUPR, DPUPR, BUMN, swasta
2	Pembangunan jalan non tol		
a	Pembangunan jalan arteri primer	Jalan Arteri paralel dengan jalan tol lingkar bogor ruas Ciluar Kedunghalang (Jalan R2)	Kementerian PUPR, DPUPR, BUMN, swasta

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
b	Pembangunan jalan arteri sekunder	Jalan R3 Parungbanteng – Wangun	Kementrian PUPR, DPUPR, BUMN, swasta
		Jalan Bogor <i>Inner ring Road</i>	Kementrian PUPR, DPUPR, BUMN, swasta
		Pembangunan jalan di sisi jalan tol Jagorawi di WP Daksina	Kementrian PUPR, DPUPR, BUMN, swasta
		Pembukaan akses jalan poros barat timur dan utara selatan di WP Utara dan WP Purwa	Kementrian PUPR, DPUPR, BUMN, swasta
c	Pembangunan jalan kolektor sekunder	Rencana ruas jalan: Jalan KH Soleh Iskandar (dekat pertigaan Jalan Raya Semplak) – Kel Kencana – Jambu Dipa (Kab. Bogor)	DPUPR
		Rencana ruas jalan: Jalan Raya Semplak- Jalan KH Sholeh Iskandar – Kel Mekarwangi – Jalan Citebut (Citebut Barat, Kab Bogor)	DPUPR
		Rencana ruas jalan: Jalan KH Sholeh Iskandar – Bukit Cimanggu Villa – Jalan Citebut Raya	DPUPR
		Rencana ruas jalan: Stasiun Sukaesmi – Jalan Raya Pemda (Kedung Halang)	DPUPR
		Rencana ruas jalan Stasiun Sukaesmi -- Jalan Kemang – Kedung Halang (Sholeh Iskandar)	DPUPR
		Rencana ruas jalan: Jalan Bukit Cimanggu Villa – Kel Mekarwangi	DPUPR
		Rencana ruas jalan: Jalan Perdana Raya – kel Kencana	DPUPR
		Rencana ruas jalan: Jalan Sukaraja (samping sungai Ciluar) – Perum Pondok Aren – Jalan Tanah Baru	DPUPR
		Rencana ruas jalan: Jalan Adnawijaya – Jalan P Asogiri – Jalan Sukaraja (samping sungai Ciluar)	DPUPR
		Rencana ruas jalan: Jalan Ahmad Sobana – Jalan P Shogiri – samping jalan Toll Jagorawi	DPUPR
		Rencana ruas jalan: Jalan R3 – Kampung Cokondang – samping	DPUPR

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
		jalan Toll Jagorawi – Jalan Katulampa	
		Rencana ruas jalan tembus Menteng Asri – Jl. Tentara Pelajar	DPUPR
		Rencana ruas jalan akses Bogor Inner Ring Road ke Lingkar Luar Bogor	DPUPR
		Rencana ruas jalan akses Bogor Inner Ring Road ke Tol Bocimi	DPUPR
		Rencana ruas jalan alternatif Situ Gede	DPUPR
		Rencana ruas jalan dibawah jalur listrik tegangan tinggi	DPUPR
d	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Tersebar di Kota Bogor	DPUPR
3	Optimalisasi fungsi bagian-bagian jalan pada ruang manfaat jalan (rumaja), ruang milik jalan (rumija), dan ruang pengawasan jalan (ruwasja)	Semua WP	DPUPR
4	Pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan di luar badan jalan)	Semua WP	DPUPR
5	Pengembangan prasarana dan sarana kendaraan tidak bermotor (jalan pejalan kaki dan jalur khusus sepeda)		
a	Pembangunan sarana dan prasarana kendaraan tidak bermotor	Jalan Mayor Oking	DPUPR
		Jalan MA Salmun	DPUPR
		Jalan Merdeka	DPUPR
		Jalan RE Martadinata	DPUPR
		Jalan Paledang	DPUPR
		Jalan Kapten Muslihat	DPUPR
		Jalan KS Tubun	DPUPR
		Jalan KH Sholeh Iskandar	DPUPR
		Jalan KH Abdullah Bin Nuh	DPUPR
		Jalan Brigjen Saptaji	DPUPR
		Jalan Dr. Sumeru	DPUPR
		Jalan Mawar	DPUPR
		Jalan Sempak	DPUPR
		Jalan Ir. H. Djuanda	DPUPR
		Jalan Jenderal Sudirman	DPUPR
		Jalan Jenderal Ahmad Yani	DPUPR
		Jalan Dadali	DPUPR

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
		Jalan Jalak Harupat	DPUPR
		Jalan Pemuda	DPUPR
		Jalan Suryakencana	DPUPR
		Jalan Siliwangi	DPUPR
		Jalan Pajajaran	DPUPR
		Jalan Otto Iskandardinata	DPUPR
		Jalan Adnawijaya	DPUPR
		Jalan Ahmad Sobana	DPUPR
		Jalan Ahmad Syam	DPUPR
		Jalan lokal kawasan komersial dan kepadatan tinggi	DPUPR
		Stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit, lokasi menuju angkutan umum	DPUPR
b	Jembatan penyeberangan orang	Jalan arteri dan kolektor	DPUPR
c	<i>Underpass</i> penyeberangan orang	Sekitar Kebun Raya Bogor, TOD	DPUPR
d	<i>Skywalk</i>	Air Mancur – Jl. Pajajaran	DPUPR
		Jl. Suryakencana – Terminal Baranangsiang	DPUPR
		Kawasan TOD	DPUPR
III	Terminal		
1	Revitalisasi terminal penumpang Baranangsiang sebagai terminal penumpang Tipe A	Terminal Baranangsiang	Kemenuh
2	Pembangunan akses tidak sebidang antara Terminal Baranangsiang dan Jalan Tol Jagorawi	Terminal Baranangsiang/Tol Jagorawi	Kemenuh, DPUPR, DISHUB
3	Pembangunan terminal di Kelurahan Tanah Baru yang terintegrasi dengan Stasiun kereta ringan	Kelurahan Tanah Baru	DPUPR, DISHUB
4	Pembangunan terminal di Kelurahan bubulak sebagai <i>transfer point</i> yang terintegrasi dengan stasiun kereta ringan	Kelurahan Bubulak	DPUPR, DISHUB
5	Pembangunan terminal di Kelurahan Sukaesmi yang terintegrasi dengan Stasiun kereta api dan stasiun kereta ringan	Kelurahan Sukaesmi	DPUPR, DISHUB
6	Pembangunan fasilitas integrasi antar moda di Kawasan TOD	Kawasan TOD	DPUPR, DISHUB
7	Penyediaan terminal di kawasan perbatasan perbatasan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Wilayah Perbatasan	DPUPR, DISHUB
8	Peningkatan sarana pendukung terminal	Seluruh Terminal	DPUPR, DISHUB
9	Revitalisasi terminal agribisnis	Kelurahan Rancamaya	DPUPR, DISHUB
10	Pembangunan terminal barang	Kelurahan Tanah Baru	DPUPR, DISHUB
IV	Parkir		
1	Pembangunan gedung parkir dan atau pelataran parkir	Pusat-pusat kegiatan	DISHUB
		PPK	DISHUB
		Sub PPK	DISHUB

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
		Kawasan pengembangan TOD	DISHUB
		Terminal Penumpang	DISHUB
		Stasiun KA	DISHUB
		Kawasan Istana Bogor/Kebun Raya Bogor	DISHUB
		Kawasan pasar Bogor	DISHUB
		Kawasan perbatasan/pintu masuk kota	DISHUB
2	Pembangunan prasarana " <i>park and ride</i> "	Kawasan pengembangan TOD	DPUPR, DISHUB
		Kawasan Suryakencana	DPUPR, DISHUB
		Kawasan perbatasan/pintu masuk kota	DPUPR, DISHUB
3	Pembatasan fasilitas parkir dalam ruang milik jalan	Seluruh jalan	DISHUB
4	Perluasan fasilitas parkir yang sudah tidak memadai baik perluasan secara vertikal maupun horizontal	Pusat-pusat kegiatan dan fasilitas umum lainnya	DISHUB
		Pool bis wisata Baranangsiang	DISHUB
5	Penetapan ketentuan penyediaan parkir serta rasio ruas parkir bagi semua kegiatan yang menimbulkan bangkitan kegiatan	Kota Bogor	DISHUB
V	Angkutan Umum Massal		
1	Pengembangan angkutan umum massal dalam kota	Koridor angkutan umum massal	DISHUB
2	Pengembangan angkutan umum massal yang terintegrasi dengan wilayah Kabupaten Bogor	Koridor angkutan umum massal	DISHUB
3	Pengembangan angkutan umum massal yang terintegrasi dengan DKI Jakarta	Bogor – Jabodetabek dan Bandara Soekarno Hatta	DISHUB
4	Program pengaturan kembali (<i>re-routing</i>) angkutan umum	Route angkutan perkotaan	DISHUB
5	Peningkatan manajemen operasional dan kinerja pelayanan angkutan	Kota Bogor	DISHUB
6	Penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan	Kota Bogor	DISHUB
7	Penggunaan angkutan umum berbahan bakar gas	Kota Bogor	DISHUB
8	Penggunaan angkutan umum tenaga listrik	Kota Bogor	DISHUB
VI	Jaringan Lintas		
1	Penetapan rute jaringan lintas	Kota Bogor	DISHUB
2	Peningkatan kualitas jaringan lintas	Kota Bogor	DISHUB
3	Pembatasan beban sumbu maksimal	Kota Bogor	DISHUB
VII	Pelayanan Angkutan Wisata dalam Kota		
1	Penetapan rute angkutan wisata	Kota Bogor	DISHUB, DISPARBUD
2	Pengembangan dan penyediaan pelayanan angkutan wisata dalam kota sebagai bagian pelayanan penunjang promosi pariwisata yang menghubungkan lokasi wisata dan kawasan pusaka	Kota Bogor	DISHUB, DISPARBUD

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
3	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada lokasi transit angkutan wisata	Kota Bogor	DISHUB, DPUPR
VIII	Pelayanan Angkutan Sekolah Dalam Kota		
1	Penetapan rute angkutan sekolah	Kota Bogor	DISHUB, DISDIK
2	Pengembangan dan penyediaan pelayanan angkutan sekolah sebagai bagian penerapan rute aman selamat sekolah dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh siswa dari/ke sekolah	Kota Bogor	DISHUB, DISDIK
3	Penataan koridor/rute pelayanan secara efektif yang mengintegrasikan sekolah-sekolah yang berdampak kemacetan	Kota Bogor	DISHUB
IX	Pedestrian/ Jalur pejalan kaki		
1	Kajian pengembangan prasarana pejalan kaki	Kota Bogor	DPUPR
2	Kajian pengembangan jalur khusus sepeda	Kota Bogor	DPUPR
3	Pembuatan DED prasarana pejalan kaki	Tersebar di Kota Bogor	DPUPR, DISHUB
4	Pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan bagi pejalan kaki dan pesepeda		
a	Pembangunan prasarana dan sarana pejalan kaki	Jalan-jalan arteri dan kolektor	DPUPR, DISHUB
		Jalan-jalan lokal di kawasan komersial dan kawasan perumahan kepadatan tinggi	DPUPR, DISHUB
		Stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit, dan sarana ibadah	DPUPR, DISHUB
		Lokasi menuju dan dari halte angkutan umum	DPUPR, DISHUB
b	Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki yang ada	Menyebar di Kota Bogor	DPUPR
c	Pembangunan perlintasan tidak sebidang untuk pejalan kaki dan sepeda	Menyebar di Kota Bogor	DPUPR
d	Pembangunan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki	Menyebar di Kota Bogor	DPUPR
5	Menyediakan prasarana dan sarana bagi pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas	Menyebar di Kota Bogor	DPUPR
6	Penataan pedestrian	PPK	DPUPR
7	Pembangunan pedestrian	Sub-PPK Pusat-pusat kegiatan	DPUPR
8	Penyediaan jalur khusus kendaraan tidak bermotor / sepeda	Menyebar di Kota Bogor	DPUPR
X	Jaringan Kereta Api		
1	Peningkatan jalur kereta api <i>commuter line</i> Bogor - Jakarta	Jalur KA Bogor - Jakarta	DISHUB, PT KAI
a	Peningkatan jalur kereta api Bogor Sukabumi	Jalur KA Bogor - Sukabumi	DISHUB, PT KAI
b	Pembangunan jalur kereta ringan dalam kota	- Sukaesmi - Bubulak - Stasiun Bogor - Mulyaharja - Kertamaya - Wangun	DISHUB, PT KAI

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
		- Baranangsiang - Tanah Baru	
2	Pembangunan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan kereta ringan dalam kota yang terintegrasi dengan LRT Cawang – Bogor	Sepanjang jalur kereta ringan Kota Bogor	Kementerian Perhubungan, DISHUB
3	Pengembangan simpul/stasiun kereta ringan	- Tanah Baru - Sukaresmi - Bubulak - Kertamaya - Mulyaharja - Baranangsiang - Wangun	DISHUB, PT KAI
4	Penataan Stasiun Kereta Api Bogor dan sekitarnya sebagai kawasan TOD	Stasiun Bogor dan Sekitarnya	Kementerian Perhubungan, DISHUB
5	Penataan Stasiun Kereta Api Bogor Paledang dan sekitarnya	Paledang	Kementerian Perhubungan, DISHUB
6	Revitalisasi Stasiun Kereta Api Batutulis	Batutulis	Kementerian Perhubungan, DISHUB
7	Pembangunan Stasiun Kereta Api Genteng	Genteng	Kementerian Perhubungan, DISHUB
8	Pembangunan Kawasan TOD yang teritegrasi dengan jalur kereta api ringan	- Tanah Baru - Sukaresmi - Bubulak - Stasiun Bogor - Mulyaharja - Kertamaya	DISHUB, PT KAI

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2024

Tabel 2.72. Indikasi Program Perwujudan Jaringan Prasarana Kota

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
I	Pengembangan Sistem Jaringan Energi Listrik		
1	Pengembangan sistem jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan jaringan dan gardu listrik	Seluruh kota	PLN
2	Peningkatan pelayanan jaringan listrik ke seluruh wilayah kota		
a	Peningkatan kapasitas listrik di daerah yang sudah terlayani	Seluruh kota	PLN
b	Peningkatan jangkauan pelayanan ke wilayah-wilayah baru yang belum terlayani.	Seluruh kota	PLN
3	Peningkatan instalasi jaringan listrik	Seluruh kota	PLN

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
4	Pengembangan sistem pengamanan untuk mengurangi jumlah kehilangan energi listrik	Seluruh kota	PLN
5	Pengembangan sistem jaringan/transmisi tenaga listrik bawah tanah	Kawasan pembangunan baru yang tersebar di seluruh kota	PLN
6	Peningkatan jumlah cadangan penyediaan energi Listrik	Seluruh kota	PLN
7	Pengembangan energi alternatif yang berasal dari hasil pengolahan sampah, tenaga matahari, biogas, maupun sumber energi terbarukan lainnya untuk mengantisipasi kendala pasokan energi listrik	Seluruh kota	PLN
II Pengembangan Sistem Jaringan Gas			
1	Peningkatan pelayanan sambungan rumah tangga maupun sambungan untuk kawasan fungsional kota lainnya	Seluruh kota	PT. PGN
2	Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas untuk kendaraan bermotor	Seluruh kota	PT. PGN
3	Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji	Seluruh kota	PT. PGN
4	Pengembangan sistem keamanan jaringan gas	Seluruh kota	PT. PGN
III Sistem Jaringan Telekomunikasi			
1	Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sistem kabel dan sistem nirkabel	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor	Dinas Kominfo, Telkom
2	Pengembangan dan perluasan jaringan internet	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor	Dinas Kominfo, Telkom
3	Pengembangan jaringan teknologi informasi bagi lembaga-lembaga pemerintah daerah, sekolah, dan Masyarakat	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor	Dinas Kominfo, Telkom
4	Penetapan dan penggunaan menara telekomunikasi secara bersama oleh para operator layanan telekomunikasi untuk sistem nirkabel	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor	Dinas Kominfo
5	Peningkatan sistem teknologi telekomunikasi pada kawasan budidaya	Kawasan peruntukan perumahan dan permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, serta pelayanan umum	Dinas Kominfo
6	Pengembangan jaringan kabel bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan utilitas kota lainnya	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor	DPUPR
7	Membangun tower Bersama	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor	Dinas Kominfo
8	WIFI Publik	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor	Dinas Kominfo

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
9	Pengembangan <i>micro cell</i>	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor	Dinas Kominfo
10	Pengembangan jaringan internet pemerintah daerah	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor	Dinas Kominfo
IV Sistem Jaringan Sumber Daya Air			
1	Kerjasama pengelolaan sumberdaya air Lintas Provinsi	Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane	PSDA Prov, BBWS
2	Kerjasama pengelolaan sumberdaya air lintas kabupaten/kota	Sungai Cipakancilan	PSDA Prov, BBWS
		Sungai Cibalok	PSDA Prov, BBWS
		Sungai Ciangke	PSDA Prov, BBWS
		Sungai Ciomas	PSDA Prov, BBWS
		Sungai Cigede	PSDA Prov, BBWS
3	Peningkatan pengelolaan wilayah sungai di wilayah kota	Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane	DPUPR, BBWS
4	Pemeliharaan jaringan irigasi	WP Pasima, WP Purwa, WP Daksina	DPUPR
5	Normalisasi sungai	Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane	DPUPR
6	Pembangunan sumur resapan di perumahan	Sesuai hasil kajian	DPUPR
7	Pembangunan kolam retensi pada lokasi yang memiliki potensi genangan	Sesuai hasil kajian	DPUPR
8	Perlindungan/pelestarian sumber air baku (sungai, situ, danau, air tanah, dan mata air)	Kota Bogor	DPUPR, DINAS LH
9	Peningkatan kualitas air	Kota Bogor	DPUPR, DINAS LH
10	Pencegahan pencemaran air	Kota Bogor	DPUPR, DINAS LH
V Sistem Jaringan Air Minum			
A Penyediaan Air Minum Sistem Jaringan Perpipaan			
1	Penyediaan jaringan air baku untuk air minum		
a	Peningkatan pemenuhan kebutuhan unit sambungan rumah tambahan	- Zona 1 - Zona 2 - Zona 3 - Zona 4 - Zona 5 - Zona 6	
b	Peningkatan target pelanggan		
	1) 12.000 SR per tahun	Kota Bogor	
	2) 15.000 SR per tahun	Kota Bogor	
c	Peningkatan distribusi air bersih	Dari IPA Dekeng ke <i>Reservoir</i> Pajajaran	DPUPR
		Dari IPA Cipaku ke <i>Reservoir</i> Cipaku	DPUPR

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
d	Pembangunan dan peningkatan jaringan transmisi air bersih	Dari Mata Air Tangkil ke <i>Reservoir</i> Rancamaya	DPUPR
		Dari Mata Air Bantar Kambing ke <i>Reservoir</i> Cipaku	DPUPR
		Dari Mata Air dan IPA Palasari ke <i>Reservoir</i> Palasar	DPUPR
		Dari Mata Air Kota Batu ke <i>Reservoir</i> Kota Batu	DPUPR
		<i>Intake</i> Ciherang Pondok ke instalasi pengolahan Dekeng	DPUPR
2	Peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat		
a	Pembangunan SPAM	SPAM Katulampa Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur	Perumda Tirta Pakuan
		SPAM Palasari Desa Palasari, Kabupaten Bogor	Perumda Tirta Pakuan
		SPAM Cikereteg (kapasitas 240 L/dt) Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan	Perumda Tirta Pakuan
b	Pembangunan IPA Cikereteg	Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan	
c	Optimalisasi IPA Dekeng I dan uprating IPA Dekeng II	Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan	
d	Pengoperasian dan uprating <i>intake</i> Cipaku	Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan	
e	Pengadaan dan pemasangan pipa by <i>pass reservoir</i> Cipaku	Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan	
3	Pembangunan <i>reservoir</i>	<i>Reservoir</i> Bantarkambing Kapasitas 2.000 m ³	DPUPR
		<i>Reservoir</i> Jabaru Kapasitas 3.000 m ³	DPUPR
		<i>Reservoir</i> Merdeka Kapasitas 5.000 m ³	DPUPR
		<i>Reservoir</i> Cikereteg Kapasitas 3.000 m ³	DPUPR
a	Penggantian jaringan perpipaan yang sudah lama/usang	Kota Bogor	Perumda Tirta Pakuan
4	Pengembangan dan perluasan jaringan distribusi dan retikulasi untuk meningkatkan daerah pelayanan air bersih dan air minum		
a	Pengembangan Jaringan Retikulasi	Kota Bogor	
b	PB MBR	Kota Bogor	
5	Penurunan tingkat kehilangan air dari produksi dan dari distribusi		
a	Perbaikan sistem distribusi	Kota Bogor	
b	Pembangunan DMA	Kota Bogor	
c	Penggantian Meter Induk	Kota Bogor	
d	Tera Meter Air	Kota Bogor	
6	Peningkatan kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan untuk Masyarakat		

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
a	Pemeliharaan Instalasi Produksi, Bangunan Instalasi dan ME (Biaya)	Kabupaten dan Kota Bogor	
b	Pengadaan dan Pemasangan <i>Scada System</i>	Kelurahan Genteng dan Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan	
B	Penyediaan Air Minum Sistem Jaringan Bukan Perpipaan		
1	Pemanfaatan mata air dengan debit kecil, sumur dalam dan sumur dangkal kolektif pada daerah-daerah yang tidak terjangkau layanan PDAM Tirta Pakuan	Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Tanah Sareal, dan Kecamatan Bogor Barat	DPUPR,DLH
2	Perluasan pelayanan sistem jaringan bukan perpipaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air minum	Kota Bogor	DPUPR
3	Pengembangan fasilitas penampungan air skala lingkungan	Kota Bogor	DPUPR
4	Membangun SPAM berbasis masyarakat di daerah yang memiliki potensi air tanah	Kota Bogor, Terutama di daerah yang tidak mendapatkan layanan PDAM. Prioritas Daerah Pelayanan Non-PDAM	DPUPR
a	Konservasi dan pengembangan area sumber air baku secara berkelanjutan	Kota Bogor	Perumda Tirta Pakuan
b	Pembukaan peluang bagi pihak swasta dalam penyediaan dan pengelolaan air minum kota	Kota Bogor, terutama di daerah yang tidak/belum mendapatkan layanan PDAM	DPUPR
c	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber air minum terutama pada sumber-sumber mata air yang berada di dalam perumahan	Kota Bogor, terutama di daerah yang tidak/belum mendapatkan layanan PDAM	DPUPR
VI	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		
1	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) komunal pada kawasan permukiman kepadatan tinggi dan kawasan perumahan	Di kawasan permukiman kepadatan tinggi dan kawasan perumahan	DPUPR
2	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kelurahan Kayumanis	DPUPR
3	Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara dan kawasan permukiman	DPUPR
4	Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Terpusat (SPALD-T) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Setempat (SPALD-S)	Kawasan dengan kepadatan < 200 jiwa/ha, diarahkan ke WP Daksina	DPUPR
5	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Setempat (SPALD-S) dan sarana prasarannya	Kawasan dengan kepadatan >200 jiwa/ha, diarahkan ke WP Samida dan WP Purwa	DPUPR
6	Pengembangan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)	Kota Bogor	DPUPR
7	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga sungai	Seluruh Kota Bogor	DPUPR, DINKES

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
	dan lingkungan sekitarnya dari pencemaran		
8	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penerapan sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah	Seluruh Kota Bogor	DPUPR, DINKES
9	Pembuatan Rencana Induk Air Limbah Domestik yang dilengkapi dengan rencana detil (DED)	Seluruh kota Bogor	BAPPEDA, DPUPR
10	Penetapan sanksi bagi pencemar badan air	Seluruh Kota Bogor	DPUPR
VII Persampahan			
1	Membentuk sekretariat bersama pengelolaan sampah regional	Kota Bogor dan Kabupaten Bogor	DLH
2	Optimalisasi dan pemeliharaan fungsi TPA	TPA Galuga	DLH
3	Pemanfaatan TPA Regional Nambo sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah terpadu	TPA Regional Luna (Lulut dan Nambo)	DLH
4	Peningkatan kualitas pengelolaan serta sarana dan prasarana TPA	Persiapan dukungan pada TPA Luna (Lulut dan Nambo)	DLH
5	Pembangunan dan optimalisasi SPA pada kawasan sarana prasarana umum terpadu Ciluar	Ciluar	DLH
6	Pengembangan pengelolaan sampah skala lingkungan berbasis komunitas dengan metode 3R (<i>Reuse, Reduce, Recycle</i>) melalui pembangunan TPS 3R	Kota Bogor	DLH, DINKES, DPPMPA
7	Pengembangan pengelolaan sampah skala lingkungan berbasis komunitas dengan metode bank sampah	Kota Bogor	DLH
8	Pembuatan tempat pengelolaan sampah terpadu skala lingkungan	Diutamakan disetiap kawasan perumahan baru	DLH
9	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan persampahan kota	Kota Bogor	DLH, DINKES, DPPMPA
10	Pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya (rumah tangga) dan terintegrasi dengan sistem pengangkutannya	Masing-masing kelurahan	DLH
11	Pengembangan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan pemerintah dalam pengelolaan persampahan	Kota Bogor	DLH, swasta
12	Membangun ITF (<i>Intermediate Treatment Facilities</i>)	Kota Bogor	DLH, swasta
VIII Pengembangan Sistem Jaringan Drainase			
1	Penanganan drainase primer	S. Cisindangbarang, S. Carampulung, S.Ciomas dan anak sungainya, S. Cidepit, S.Cipinanggading, S.Cibeureum, S.Cinangka,	Kementerian PUPR, DPUPR

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
		S.Cisadane Hulu, Jl.Cipaku, S.Ciawi, S.Cipaku, S.Ciliwung, S.Ciseuseupan, S.Ciluar, S.Cibeuleut, S.Cimahpar, S. Cikerti, S.Cibuluh, S.Ciparigi, S.Ciliwung, Jl. Pajajaran, Jl. Otista, S.Cipakancilan, S.Cibuluh, Jl.Raya Baru, Kali Kayang, S.Cigede kulon, S.Cimanggis.	
2	Penanganan drainase sekunder	Anak sungai cisindangbarang, Jalan Jakarta - Bogor, Jalan lingkaran luar, Jl.raya Bogor Jakarta, S.Cikaret, Jl.Dr.Semeru, Cikubang, Jl.Cibeureum, Rancamaya, Jl. Durian raya, Jl.Rd.Hanafiah, Jl.Rd.Konyong, Jl.Tanah Baru, Jl.Pangeran Sugiri, Jl. Sudirman, Jl.Sawojajar, Jl.Surya Somantri, Jl.Pengadilan, Cibuluh, Jl.A.Adnawijaya, Jl.Martadinata, Jl. Kedung Badak, Jl.Parung, Jl.Kemang, Mekarsari.	Kementerian PUPR, DPUPR
3	Penanganan drainase tersier	Kel. Balumbang, Semplak, Situ Gede, Kel.Loji, Jl.Gunung Batu, Jel.Menteng, Cilendek, Pabuaran, Ranggamekar, Rancamaya, Cipaku, Bojonegara, Katulampa, Desa Cibuluh, Tanah Baru, Bantarsari, Jl. roda, Tegal gundil, baranangsiang, sukaresmi, Kedung Badak, Parung, Kel.Kencana, drainase lokal.	Kementerian PUPR, DPUPR
4	Pengamanan kawasan sekitar jaringan drainase makro dari kegiatan pembangunan	Kawasan sempadan sungai	DPUPR, BBWS
5	Menata ulang fungsi jaringan irigasi yang telah berubah fungsi menjadi saluran drainase	Kota Bogor	DPUPR, PSDA PROV
6	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase	Kota Bogor	DPUPR
7	Normalisasi sungai dan saluran	Kota Bogor	DPUPR
8	Revitalisasi sempadan sungai sesuai dengan fungsinya	Kawasan Sempadan Sungai	DPUPR, BBWS, DLH, DISPERUMKIM
9	Optimalisasi/rehabilitasi saluran drainase primer	Saluran induk Ciliwung Katulampa, Saluran Cibalok, Saluran Bantarjati (Cibagolo), Saluran induk Cisadane Empang	
10	Sertifikasi kepemilikan danau dan situ-situ kecil, misalnya dengan sertifikat BPN	Di setiap situ di seluruh wilayah Kota Bogor	
11	Mengamankan embung - embung dan situ yang telah ada dari pendangkalan dan pembangunan fisik	Di setiap situ di seluruh wilayah Kota Bogor	DPUPR, BBWSSCC, PSDA Prov
12	Pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah-daerah rawan genangan dan rawan banjir	Kecamatan Bogor Utara; dan Kecamatan Tanah Sareal	DPUPR, DISPERUMKIM
13	Pembangunan sumur resapan, kolam retensi dan/atau detensi dengan konsep <i>zero run off, eco drainage</i> , dan <i>Low impact development</i>	Kota Bogor	DPUPR
IX	Jaringan Prasarana Kota Terpadu		

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
1	Menyusun rencana pengembangan jaringan prasarana kota terpadu	Kota Bogor	DPUPR
2	Mengembangkan jaringan prasarana bawah tanah terpadu	Kota Bogor	DPUPR

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2024

Rancangan teknis sebagaimana dipaparkan di atas, diharapkan dapat menjadi strategi dalam mewujudkan pusat pertumbuhan baru dan pengembangan koridor pusat yang terpadu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, diantaranya: (1) Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan baik PPK, Sub PPK maupun PL dalam kota dan Wilayah Kabupaten Bogor; (2) Pengaturan pengembangan kawasan budi daya mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan; (3) Pengembangan ruang kota yang kompak, efisien, dan berkelanjutan; serta (4) Pembangunan jalan-jalan alternatif/jalan tembus untuk mengurangi beban kapasitas jalan di pusat-pusat kota dan dalam rangka menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru di wilayah pinggiran.

BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH



RPJPD Kota Bogor
2025-2045

Bab ini akan menguraikan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan Kota Bogor untuk periode 2005–2023. Pembentukan isu-isu strategis di Kota Bogor didasarkan atas beberapa komponen yang telah dianalisis terkait hasil pembangunan yang ada di periode sebelumnya, seperti, telaah atas dokumen RPJMN 2020 – 2025, RPJPN 2025 – 2045, RPJMN 2020 – 2024, dokumen RPD Provinsi Jawa Barat 2023 – 2026, dokumen RPJPD Kota Bogor 2005 – 2025, dokumen RPJMD Kota Bogor 2020 – 2024, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), isu global, nasional, regional.

3.1. Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *“gap expectation”* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan kinerja pembangunan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Beberapa permasalahan yang disampaikan merupakan kondisi yang menjadi fokus pelaksanaan pembangunan yang perlu diperhatikan, yakni terkait permasalahan pembangunan sumber daya manusia (SDM) permasalahan Pembangunan ekonomi, permasalahan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta permasalahan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pembangunan daerah Kota Bogor ke depan diharapkan mampu berkembang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana potensi yang terkandung di dalamnya. Rumusan permasalahan terpilah kedalam empat dimensi yaitu i) sosial budaya, ii) infrastruktur dan lingkungan, iii) ekonomi dan iv) tatakelola.

3.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

3.1.1.1. Aspek Geografi

Permasalahan aspek geografi meliputi rawan bencana, kualitas lingkungan hidup, energi fosil, dan sistem pangan. Struktur geologi Kota Bogor yang kompleks menjadikan wilayah Kota Bogor rawan terhadap bencana alam.

Relatif masih tingginya risiko bencana, hal ini disebabkan diantaranya belum optimalnya penanggulangan bencana. Belum optimalnya penanggulangan bencana diantaranya pada aspek kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta pengembangan sistem pemulihan pasca bencana. Pada masa yang akan datang, tantangan kebencanaan akan semakin tinggi sebagai dampak dari perubahan iklim.

Relatif masih rendahnya kualitas lingkungan hidup disebabkan oleh masih tingginya pencemaran sungai dan laut, pencemaran udara di perkotaan, kapasitas dan teknologi pengelolaan sampah yang masih terbatas, serta berkurangnya kualitas tutupan lahan. Pencemaran sungai semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan aktivitas perkotaan di sektor industri dan rumah tangga, hal ini disebabkan oleh terbatasnya partisipasi masyarakat dan sektor industri dalam pengelolaan sampah dan limbah, pengendalian dan pengawasan masih rendah, serta teknologi pengelolaan sampah dan limbah yang belum optimal. Pencemaran udara di perkotaan disebabkan oleh kegiatan transportasi dan industri, serta pengelolaan sampah masih menggunakan sistem pembakaran yang tidak sempurna dan kebijakan Reduce, Reuse & Recycle (3R) yang belum efektif.

Relatif masih tingginya emisi gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global, disebabkan masih rendahnya upaya-upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil, penggunaan pupuk kimia, masih adanya pembakaran sampah, dan proses industri yang menghasilkan emisi gas rumah kaca.

Masih rentannya sistem pangan terhadap perubahan faktor internal dan eksternal. Hal ini disebabkan oleh proses produksi pangan belum mencukupi kebutuhan masyarakat, stok cadangan pangan belum terpenuhi, perubahan iklim yang berdampak pada turunnya produksi dan produktivitas tanaman pertanian, meningkatnya gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) maupun banjir dan kekeringan, pengembangan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim belum optimal, implementasi *Research & Development*, sistem logistik dan distribusi belum tertata dengan baik sehingga belum dapat menjangkau wilayah rentan pangan serta masih tingginya ketergantungan konsumsi pangan beras. Terlebih lagi keterbatasan Kota Bogor dalam hal lahan pertanian.

3.1.1.2. Aspek Demografi

Permasalahan demografi Kota Bogor diantaranya mencakup penambahan penduduk, kualitas SDM, penduduk usia tua, dan tingkat urbanisasi.

Laju penambahan penduduk yang relatif masih cukup tinggi disebabkan oleh masih tingginya angka migrasi dan tingkat kelahiran. Pertambahan penduduk berimplikasi terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, meningkatnya kebutuhan pangan, energi, air bersih, hunian yang layak, serta sarana dan prasarana wilayah perkotaan dan perdesaan dalam jangka panjang serta meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam dan ruang, untuk memenuhi kebutuhan hunian dan aktivitas penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk juga berdampak pada tingginya aktivitas lalu lintas orang, barang dan jasa, yang perlu ditopang dengan optimalisasi konektivitas wilayah.

3.1.2. Aspek Sosial Budaya

Pembangunan sosial dan budaya membuat masyarakat setempat mampu mengembangkan berbagai inovasi yang sangat berguna bagi kehidupan masyarakat. Selain munculnya inovasi, pembangunan sosial dan budaya juga bermanfaat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat setempat. Selanjutnya, pembangunan sosial dan budaya akan berguna juga bagi pembangunan suatu wilayah. Pembangunan sosial budaya adalah upaya pemenuhan kebutuhan sosial serta budaya dalam masyarakat. Pembangunan sosial budaya adalah proses perubahan dalam bidang sosial dan budaya, yang direncanakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

Pembangunan sosial dan budaya dilakukan untuk membangun dan memperbaiki berbagai faktor yang menyokong kelangsungan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, hiburan dan sebagainya. Dengan dilakukannya pembangunan sosial dan budaya, masyarakat diharapkan bukan hanya memperoleh kualitas hidup yang lebih baik, namun juga bisa mendukung pembangunan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi selalu menjadi agenda utama setiap pemerintahan daerah, tanpa menyadari bahwa pembangunan sosial dan budaya juga sama penting dengan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Kota Bogor, sebagai bagian dari Republik Indonesia, juga bertanggung jawab atas pembangunan sosial dan budaya yang terjadi pada masyarakatnya. Selain itu, Kota Bogor, dalam pembangunan yang kini tengah berjalan, juga melaksanakan pembangunan sosial dan budaya bersama-sama dengan berjalannya pembangunan di bidang lainnya. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Kota Bogor dalam

bidang sosial dan budaya yang perlu diperhatikan pemerintah agar pembangunan wilayah dapat terwujud.

1. Kualitas dan akses Pendidikan yang belum merata

Kualitas pendidikan menjadi tolak ukur kualitas suatu individu, rata-rata lama sekolah di Kota Bogor mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 – 2022. Hal ini menunjukkan kondisi yang baik, dimana pada tahun 2022 jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan formal rata-rata 10,68 tahun, dimana laki-laki memiliki angka rata-rata lama sekolah 11,03 tahun dan Perempuan memiliki angka rata-rata lama sekolah 10,23 tahun. Jika dibandingkan dengan wilayah lain di sekitarnya, rata-rata lama sekolah di Kota Bogor masih relative rendah dibandingkan dengan Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tangerang. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.1. Namun angka rata-rata lama sekolah Kota Bogor menunjukkan bahwa target Pendidikan utama selama 9 tahun bagi penduduk Kota Bogor tercapai dengan baik.

Tabel 3.1. Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2018 – 2022 (Tahun)

Rata-rata lama sekolah (Tahun)	2018		2019		2020		2021		2022	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Kota Bogor	10,69	9,90	10,70	9,91	10,73	9,93	10,96	10,12	11,03	10,23
Bogor	8,72	7,28	8,94	7,65	8,93	7,71	8,94	7,79	8,96	8,00
Kota Depok	11,31	10,39	11,59	10,42	11,60	10,70	11,81	10,84	11,82	11,15
Kota Tangerang	-	-	11,01	10,27	11,02	10,41	11,22	10,42	11,23	10,43
Tangerang	-	-	8,77	7,57	8,88	7,71	9,04	7,95	9,31	8,28
Kota Bekasi	11,77	10,86	11,78	10,87	11,86	10,92	11,98	11,11	12,06	11,43
Bekasi	9,47	8,34	9,48	8,35	9,76	8,62	9,77	8,82	9,79	9,07
Jawa Barat	8,6	7,71	8,83	7,9	8,97	8,11	8,98	8,23	9,1	8,48

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Kota Bogor memiliki angka harapan lama sekolah pada tahun 2022 rata-rata 13,44 tahun dimana laki-laki 13,35 tahun dan Perempuan 13,52 tahun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 dimana laki-laki 13,14 tahun dan Perempuan 13,42 tahun. Angka harapan lama sekolah ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Berdasarkan Tabel 3.2, angka harapan lama sekolah di Kota Bogor masih lebih rendah dibandingkan dengan Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tangerang.

Tabel 3.2. Harapan Lama Sekolah Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2018 – 2022 (Tahun)

Harapan lama sekolah (tahun)	2018		2019		2020		2021		2022	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Kota Bogor	13,14	13,42	13,15	13,43	13,16	13,5	13,28	13,51	13,35	13,52
Bogor	12,73	12,38	12,74	12,39	12,75	12,42	12,76	12,43	12,77	12,50
Kota Depok	13,89	13,99	13,90	14,00	13,91	14,02	13,92	14,05	13,94	14,06
Kota Tangerang	-	-	13,83	13,85	13,84	13,86	13,86	13,88	13,87	13,89
Tangerang	-	-	12,82	12,75	12,83	12,76	12,84	12,81	12,86	12,82
Kota Bekasi	14,20	13,72	14,21	13,99	14,30	14,00	14,31	14,10	14,32	14,11
Bekasi	12,99	13,07	13,00	13,08	13,02	13,11	13,09	13,12	13,1	13,14
Jawa Barat	12,44	12,52	12,45	12,55	12,5	12,56	12,59	12,68	12,6	12,72

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup individu. Tingginya permintaan jasa pendidikan menuntut tersedianya penyelenggara pendidikan yang makin bermutu. Untuk itu perlu didukung dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga pengajar yang memadai. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) juga merupakan salah satu indikator tercapainya pembangunan dalam bidang pendidikan di suatu wilayah. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM membantu menilai sejauh mana akses pendidikan merata di masyarakat, memastikan bahwa sebanyak mungkin individu dapat mengakses pendidikan pada berbagai tingkat adalah kunci untuk mengembangkan SDM yang seimbang dan berpotensi tinggi. Melalui APM, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat memantau dan meningkatkan akses pendidikan, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM di suatu wilayah. Begitu juga dengan Kota Bogor, APM dapat mendukung pertumbuhan ekonomi karena mempersiapkan tenaga kerja yang lebih terdidik dan terampil.

APM Kota Bogor tahun 2022 untuk jenjang SD/MI/Paket A sebesar 99,95 dimana angka ini masih lebih rendah dibandingkan Kota Bekasi, namun lebih tinggi dibandingkan dengan APM Provinsi Jawa Barat yang hanya sebesar 98,37. Namun jika dilihat untuk jenjang SMP/MTS/ Paket B terlihat bahwa APM Kota Bogor sebesar 76,16 dimana angka ini paling rendah dibandingkan dengan wilayah lain, termasuk jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. APM Kota Bogor untuk jenjang SMA/MA/ Paket C sebesar 62,38 menunjukkan bahwa kondisi ini lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, namun jika dibandingkan dengan wilayah lain angka ini masih lebih rendah dibandingkan Kota Depok, Kota Bekasi. Untuk jenjang perguruan tinggi, APM Kota Bogor sebesar 31,58 angka ini dua kali lipat dari APM Provinsi Jawa Barat, namun lebih rendah dibandingkan dengan Kota Depok dan Kota Bekasi. APM Kota Bogor dan wilayah lain di sekitarnya dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Angka Partisipasi Murni Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2022

Angka partisipasi murni (APM)	SD/ MI/Paket A	SMP/ MTS/Paket B	SMA/ MA/Paket C	Perguruan Tinggi
Kota Bogor	99,95	76,16	62,38	31,58
Bogor	95,92	84,43	48,44	23,15
Kota Depok	95,86	79,55	76,44	32,34
Kota Tangerang	-	-	-	-
Tangerang	-	-	-	-
Kota Bekasi	99,97	86,37	70,53	31,59
Bekasi	97,58	81,83	61,75	20,51
Jawa Barat	98,37	82,88	58,58	17,44

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. APK dapat digunakan untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan, menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu, dan sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang

bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. Tahun 2022, APK Kota Bogor untuk jenjang SD/MI/Paket A sudah lebih dari 100, hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan pada jenjang tersebut sudah mampu memfasilitasi kebutuhan Pendidikan. APK Kota Bogor untuk jenjang SMP/MTS/ Paket B sebesar 82, angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kota Depok. Begitu juga halnya jika dibandingkan dengan APK Provinsi Jawa Barat sebesar 93,46 tahun 2022. Begitu juga APK Kota Bogor untuk jenjang SMA/MA/Paket C yang masih berada pada angka 80,82 dimana angka ini masih tertinggal oleh Kota Bekasi dan Kota Depok yang sudah mencapai lebih dari angka 100. Meskipun demikian, APK Kota Bogor untuk jenjang SMA/MA/Paket C masih lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 78,86. Untuk jenjang perguruan tinggi, APK Kota Bogor sebesar 41,77 dimana angka ini memang masih di bawah Kota Bekasi dan Kota Depok, namun dua kali lipat dari Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3.4. Angka Partisipasi Kasar Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2022

Angka partisipasi kasar (APK)	SD/MI/Paket A	SMP/MTS/Paket B	SMA/MA/Paket C	Perguruan Tinggi
Kota Bogor	100,98	82	80,82	41,77
Bogor	105,03	97,78	66,54	25,96
Kota Depok	100,54	86,47	101,06	42,85
Kota Tangerang	-	-	-	-
Tangerang	-	-	-	-
Kota Bekasi	110,21	91,3	105,12	42,92
Bekasi	106,88	88,52	93,13	30,78
Jawa Barat	104,55	93,46	78,86	22,11

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Dalam Upaya Menuju Indonesia Emas tahun 2045 peran literasi sangat penting terutama bagi Gen Z. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia pada Tahun 2045, tentu akan sangat berbeda dengan Indonesia hari ini. Dimana persaingan akan sangat ketat, teknologi semakin canggih dan sosial budaya semakin bebas. Sedangkan, pada saat ini cukup banyak Gen Z yang terlibat dalam kriminalitas, narkoba, pergaulan seks bebas, kenakalan remaja dan putus sekolah. Padahal, Kota Bogor memiliki bonus demografi dengan jumlah Gen Z yang cukup banyak sebagai potensi pembangunan. Table X menunjukkan bahwa tahun 2022, IPLM Kota Bogor cukup tinggi yaitu sebesar 95,34 dimana angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan IPLM Kota Depok sebesar 98,92. Namun IPLM Kota Bogor masih lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat yang hanya 72,73. IPLM ini merupakan indeks yang merangkum indikator-indikator yaitu UPLM1 (Pemerataan Layanan Perpustakaan), UPLM2 (Pemerataan Koleksi Perpustakaan), UPLM3 (Pemerataan Tenaga Perpustakaan), UPLM4 (Tingkat Kunjungan Pemustaka), UPLM5 (Perpustakaan Ber-SNP), UPLM6 (Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan), dan UPLM7 (Jumlah Pemustaka).

Tabel 3.5. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2022

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	UPLM1	UPLM2	UPLM3	UPLM4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	IPLM
Kota Bogor	0,0016	1,6579	0,0032	0,2522	3,3755	0,6426	0,7404	95,34

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	UPLM1	UPLM2	UPLM3	UPLM4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	IPLM
Bogor	0,001	1,1914	0,0017	0,2328	2,1227	0,3838	0,6653	65,7
Kota Depok	0,0023	1,5746	0,001	0,6057	3,1694	0,1423	1,4292	98,92
Kota Bekasi	0,0019	1,0908	0,0026	0,9183	2,7943	0,3586	0,4952	80,88
Bekasi	0,001	1,2947	0,003	0,2444	2,2433	0,4433	0,6782	70,11
Jawa Barat	0,0024	1,4898	0,0024	0,4277	2,1987	0,2767	0,6934	72,73

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

2. Belum optimalnya Upaya peningkatan pelayanan dan akses Kesehatan Masyarakat

Harapan Hidup merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. Angka Harapan Hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya di suatu wilayah, termasuk dalam hal ini Kota Bogor. Tabel 3.6 menunjukkan UHH Kota Bogor dan wilayah sekitarnya berdasarkan jenis kelamin. Tahun 2022, UHH laki-laki di Kota Bogor sebesar 72,25 tahun dan Perempuan sebesar 75,96 tahun. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Kota Bekasi dan Kota Depok, namun masih lebih tinggi dibandingkan UHH Provinsi Jawa Barat, dimana laki-laki sebesar 71,77 tahun dan perempuan sebesar 75,48 tahun. Dalam rencana Pembangunan suatu wilayah, UHH dapat dijadikan acuan pemerintah dalam mengadakan program pembangunan, kesehatan, dan program sosial lainnya seperti kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 3.6. Usia Harapan Hidup Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2017- 2022

Usia harapan hidup	Laki-laki						Perempuan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bogor	71,06	71,27	71,47	71,74	72,02	72,25	74,86	75,06	75,25	75,44	75,65	75,96
Bogor	68,69	68,85	69,01	69,24	69,52	69,72	72,61	72,77	72,91	73,06	73,25	73,54
Kota Depok	72,12	72,25	72,4	72,61	72,87	73,08	76,03	76,16	76,29	76,42	76,6	76,91
Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tangerang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Bekasi	72,73	72,86	73,01	73,22	73,48	73,7	76,5	76,63	76,67	76,71	76,89	77,18
Bekasi	71,35	71,5	71,62	71,81	71,99	72,17	75,14	75,25	75,39	75,50	75,63	75,87
Jawa Barat	70,58	70,76	71,03	71,3	71,57	71,77	74,42	74,62	74,81	75,00	75,19	75,48

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Indeks kesehatan dapat menunjukkan kondisi pelayanan publik di bidang kesehatan. Indeks kesehatan Kota Bogor mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2018-2022. Namun, di tahun 2022 indeks kesehatan Kota Bogor masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan Kota Bekasi dan Kota Depok. Meskipun demikian, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3.7. Indeks Kesehatan Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2018- 2022

Indeks Kesehatan	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bogor	81,86	82,17	82,48	82,8	83,28
Bogor	78,25	78,48	78,72	79,02	79,46
Kota Depok	83,34	83,55	83,75	84,03	84,49

Indeks Kesehatan	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Tangerang	-	-	-	-	-
Tangerang	-	-	-	-	-
Kota Bekasi	84,25	84,45	84,63	84,91	85,35
Bekasi	82,20	82,40	82,58	82,78	83,14
Jawa Barat	81,02	81,31	81,6	81,89	82,34

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi salah satu program sosial yang masih dibutuhkan masyarakat. Hal ini untuk memudahkan setiap warga negara mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Fasilitas JKN bagi masyarakat merupakan langkah penting yang dilakukan pemerintah dalam menyediakan fasilitas jaminan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase pemilik BPJS menurun baik penerima bantuan iuran maupun non-penerima bantuan, namun kepemilikan jamkesda, asuransi swasta dan perusahaan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu lebih memperhatikan atas terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi Masyarakat, dalam hal kesehatan.

Tabel 3.8. Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2018- 2022

Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan (Persen)	BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran		BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran		Jamkesda, Asuransi Swasta, Perusahaan	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Kota Bogor	40,08	37,01	35,67	34,13	10,12	13,54
Bogor	24,95	28,84	28,40	27,65	9,49	7,91
Kota Depok	22,87	26,04	53,24	49,42	10,17	10,02
Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-
Tangerang	-	-	-	-	-	-
Kota Bekasi	16,61	16,88	42,93	41,48	30,90	18,30
Bekasi	24,60	30,26	34,08	34,02	46,57	34,56
Jawa Barat	30,46	32,53	25,88	23,77	12,13	9,51

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Beberapa kasus di bidang kesehatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah yaitu masih tingginya kasus HIV, dimana secara kumulatif hingga September 2022 terdapat sebanyak 6.058 kasus HIV dan sebanyak 1.865 kasus AIDS. Penanganan kasus HIV harus bersifat holistik dan melibatkan pendekatan multidisiplin. Kerja sama antara penyedia layanan kesehatan, konselor, dan dukungan masyarakat menjadi kunci untuk memberikan perawatan yang efektif dan mendukung individu yang hidup dengan HIV. Selain kasus HIV, penanganan kasus TBC di Kota Bogor masih harus menjadi perhatian. Tahun 2022, Kota Bogor peringkat kedua kasus TBC tertinggi di Provinsi Jawa Barat, yaitu mengalami peningkatan mencapai 300 persen dari data tahun 2021.

3. Daya saing tenaga kerja yang perlu ditingkatkan

Tenaga kerja yang berdaya saing memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan wilayah. Kemampuan tenaga kerja untuk bersaing dalam pasar global dan memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi lokal sangat memengaruhi perkembangan suatu wilayah. Tahun 2023, Tingkat pengangguran terbuka Kota Bogor sebesar 9,39 persen dimana angka ini masih lebih tinggi dibandingkan wilayah di sekitarnya, begitu juga jika dibandingkan dengan Jawa Barat. Namun angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tenaga kerja berdaya saing cenderung lebih produktif sehingga dapat membantu meningkatkan output dan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi wilayah. Tenaga kerja yang berdaya saing dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap industri lokal. Mereka dapat menjadi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan sektoral. Dengan berkontribusi pada pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, tenaga kerja berdaya saing dapat membantu meningkatkan perekonomian lokal. Hal ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi tingkat pengangguran.

4. Perlindungan bagi kelompok rentan termasuk ibu dan anak yang perlu ditingkatkan

Perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk ibu dan anak, merupakan prioritas penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Kelompok ini sering kali lebih rentan terhadap berbagai risiko, baik secara kesehatan maupun sosial. Berdasarkan data dari data.kotabogor.go.id menyatakan bahwa jumlah kekerasan terhadap Perempuan di Kota Bogor pada tahun 2022 terdiri dari kekerasan fisik sebanyak 23 kasus, kekerasan psikis sebanyak 11 kasus, kekerasan seksual sebanyak 5 kasus, kekerasan verbal sebanyak 1 kasus, kekerasan ekonomi sebanyak 3 kasus, KGBO sebanyak 6 kasus dan kasus lainnya sebanyak 15 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap perlu mengupayakan bahwa Perempuan menjadi pelayanan perlindungan public yang diprioritaskan. Begitu juga kasus kekerasan terhadap anak, berdasarkan data dari dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga November 2022 kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bogor terdiri dari 12 kasus menimpa anak laki-laki dan 33 kasus menimpa anak Perempuan. Oleh karena itu, kasus kekerasan pada anak harus menjadi perhatian semua pihak. Apalagi, Kota Bogor memiliki cita-cita sebagai kota layak anak. Tentu, keamanan bagi anak-anak menjadi hal utama dan prioritas.

Angka difabel (atau disabilitas) dan ketahanan sosial saling terkait dalam konteks inklusi sosial dan perlindungan terhadap kelompok yang mungkin lebih rentan secara sosial dan ekonomi. Angka difabel mencerminkan sejauh mana masyarakat menciptakan lingkungan yang inklusif bagi individu dengan disabilitas. Ketahanan sosial melibatkan membangun masyarakat yang tidak hanya tahan terhadap tekanan dan risiko, tetapi juga inklusif terhadap berbagai kelompok, termasuk difabel. Berdasarkan data tercatat bahwa pada tahun 2022 terdapat 44 orang cacat tubuh, 3 orang cacat netra, 9 orang cacat mental dan 13 cacat lainnya yang terdapat di Kota Bogor. Hal ini menuntut pemerintah memberi perhatian dalam peningkatan akses difabel terhadap sarana dan prasarana publik, seperti akses terhadap Pendidikan dan pelatihan, akses terhadap pelayanan kesehatan dan rehabilitas, keterlibatan dalam Angkatan kerja, perlindungan terhadap diskriminasi dan kekerasan, akses terhadap infrastruktur dan layanan umum, serta kesejahteraan mental dan emosional.

Ketahanan sosial Kota Bogor dapat dilihat juga dari rasio ketergantungan atau usia produktif dibandingkan dengan usia non produktif. Tahun 2022, rasio ketergantungan di kota Bogor sebesar 42,62 persen dimana angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika

dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat, angka ketergantungan di Kota Bogor sedikit lebih rendah, namun jika dibandingkan dengan wilayah di sekitarnya maka angka ketergantungan Kota Bogor paling tinggi.

5. Peran pemuda dan Perempuan dalam pembangunan perlu dioptimalkan

Peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan adil. Keterlibatan dan kontribusi aktif dari kedua kelompok ini memberikan dampak positif terhadap aspek ekonomi, sosial, dan politik masyarakat. Pemuda seringkali diidentifikasi sebagai sumber energi, kreativitas, dan inovasi. Partisipasi aktif mereka dalam pembangunan dapat membawa gagasan segar dan solusi baru untuk tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Begitu juga dengan perempuan, merupakan kontributor ekonomi yang signifikan. Perempuan terlibat dalam berbagai sektor, baik formal maupun informal, dan seringkali menjadi tulang punggung keluarga. Peningkatan partisipasi perempuan di tingkat keputusan, baik di sektor publik maupun swasta, membawa perspektif yang beragam dan mendukung kebijakan yang lebih inklusif.

Perempuan memegang peran penting sebagai pendukung inklusi gender. Pemberdayaan perempuan dan pemberlakuan prinsip kesetaraan gender mendukung pembangunan yang lebih adil. Peran Perempuan dalam Pembangunan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG dapat menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender Kota Bogor tahun 2022 sebesar 90,97 dimana angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat, namun jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya masih lebih rendah dibandingkan Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kota Depok.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik serta IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan Keputusan. Idg Kota Bogor tahun 2022 sebesar 72,56 dimana angka ini lebih besar dibandingkan dengan wilayah lain di sekitar Kota Bogor, namun masih di bawah Kota Depok. IDG Kota Bogor juga lebih tinggi dibandingkan dengan IDG Provinsi Jawa Barat.

Peran pemuda dalam pembangunan kota Bogor, atau di mana pun, memiliki dampak yang signifikan dalam menciptakan kota yang berkelanjutan, dinamis, dan inklusif. Berikut adalah beberapa peran kunci pemuda dalam pembangunan kota Bogor.

1) Inovasi dan Kreativitas

Pemuda seringkali membawa inovasi dan kreativitas dalam pemikiran mereka. Dalam konteks pembangunan kota, ide-ide segar dan solusi kreatif dari pemuda dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lingkungan yang inovatif, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk kota.

2) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Pemuda memiliki potensi untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Melibatkan pemuda dalam perencanaan perkotaan dapat memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan mereka tercermin dalam kebijakan dan proyek pembangunan.

3) Pemuda sebagai Tenaga Kerja

Pemuda menyumbang pada tenaga kerja kota Bogor. Dengan memberikan peluang kerja dan pelatihan keterampilan kepada pemuda, kota dapat memanfaatkan potensi ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

4) Pemberdayaan Ekonomi dan Kewirausahaan

Mendorong pemberdayaan ekonomi pemuda dan kewirausahaan membantu menciptakan lapangan kerja lokal dan merangsang pertumbuhan ekonomi di kota. Inisiatif seperti pelatihan kewirausahaan dan dukungan untuk start-up lokal dapat memberikan dampak positif.

5) Pendidikan dan Keterampilan

Pemuda adalah agen perubahan pendidikan. Memberikan akses yang baik dan berkualitas kepada pemuda untuk pendidikan dan pengembangan keterampilan membantu menciptakan basis yang kuat untuk perkembangan kota Bogor.

6) Pemuda sebagai Agen Perubahan Sosial

Pemuda seringkali menjadi agen perubahan sosial yang efektif. Mereka dapat terlibat dalam kegiatan sukarela, kampanye lingkungan, dan upaya sosial lainnya yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

7) Partisipasi dalam Kegiatan Budaya dan Seni

Pemuda dapat memainkan peran penting dalam melestarikan dan mempromosikan warisan budaya dan seni lokal. Mereka dapat mengorganisir acara seni dan budaya yang memperkaya kehidupan kota dan membangun identitas yang kuat.

8) Teknologi dan Inovasi Digital

Pemuda sering kali lebih terampil dalam teknologi dan inovasi digital. Mendorong penggunaan teknologi dalam pembangunan kota, seperti solusi pintar dan e-governance, dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan masyarakat.

9) Pemberdayaan Komunitas

Pemuda dapat berperan dalam pemberdayaan komunitas. Mereka dapat membantu membangun kebersamaan, memfasilitasi dialog antarkomunitas, dan mendukung proyek-proyek pembangunan berkelanjutan.

10) Advokasi Lingkungan dan Keberlanjutan

Pemuda seringkali memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi. Mereka dapat menjadi advokat keberlanjutan lingkungan, membantu mendorong kebijakan dan praktik yang ramah lingkungan di kota Bogor.

Dengan memberikan dukungan dan peluang kepada pemuda, kota Bogor dapat memanfaatkan potensi generasi muda untuk menciptakan lingkungan yang berkembang dan berdaya saing. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan pemuda sendiri adalah kunci untuk mencapai pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif.

6. Citra Kota Bogor sebagai Kota Pusaka dan Sains bertaraf nasional belum dimanfaatkan secara optimal

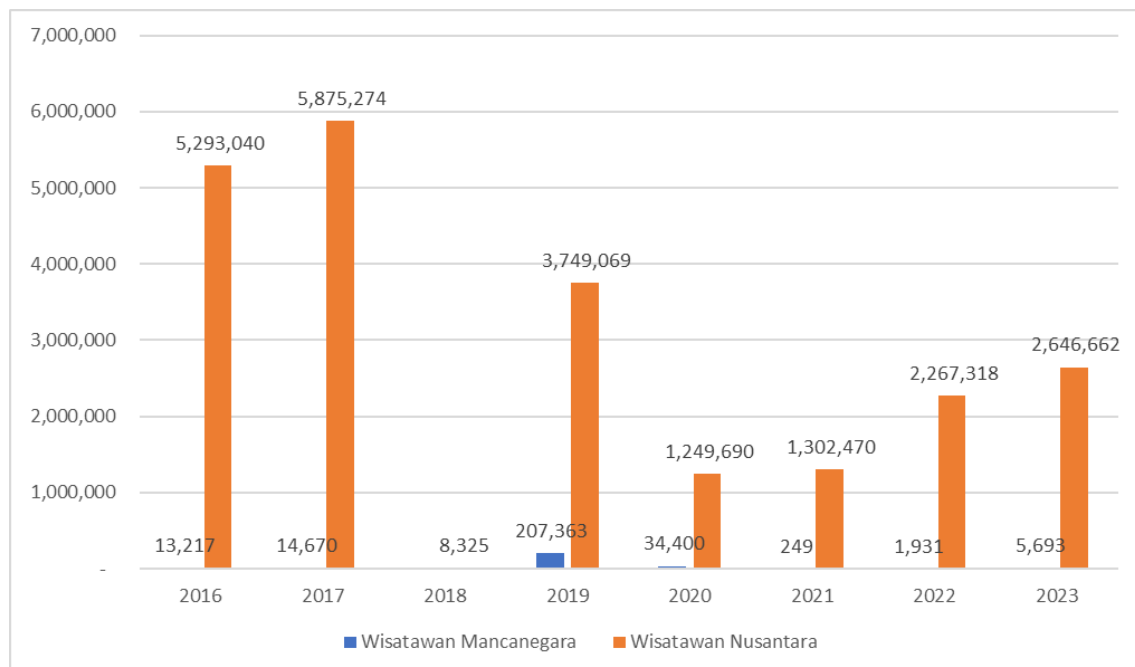
Kota Bogor merupakan Kota yang memiliki potensi cagar budaya di wilayah Jawa Barat. Data Kemendikbud (2023) mencatat bahwa jumlah cagar budaya Kota Bogor sebanyak 25 unit dimana 22 berupa bangunan dan 3 berupa situs. Jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, Kota Bogor memiliki jumlah cagar budaya yang relatif banyak, hal ini dapat menjadi penguat Kota Bogor sebagai kota pusaka.

Selain sebagai kota pusaka, Kota Bogor juga memiliki identitas sebagai kota ilmu pengetahuan atau kota sains. Kota Bogor sebagai kota ilmu pengetahuan sudah tercetus pada masa pemerintahan Hindia Belanda, dimana saat itu Kota Bogor dipilih menjadi pusat keperluan penelitian dan riset terutama penelitian terkait pertanian, perkebunan, kehutanan dan peternakan. Pada masa itu terdapat laboratorium riset kimia dan uji coba kehutanan, yaitu Land Plantentuin, yangs ekarang menjadi Kebun Raya Bogor. Kota Bogor menjadi kota pusat penelitian tidak hanya berkaitan dangan botani, namun juga berkaitan dengan penelitian kesehatan manusia dan ternak.

3.1.3. Aspek Perekonomian

3.1.3.1. Bogor Sebagai Tujuan Wisata dan MICE Ibukota

Kemudahan akses dari Kota Bogor ke Ibukota menjadikan Kota Bogor sebagai salah satu destinasi favorit untuk pariwisata. Selain itu, Kota Bogor tidak jarang dipilih sebagai tempat penyelenggaraan berbagai acara *Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition* (MICE). Berkembangnya Kota Bogor sebagai Mice City (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*) memberi dampak positif terhadap perekonomian Kota Bogor melalui peningkatan kunjungan wisatawan, peningkatan penggunaan infrastruktur dan fasilitas, peningkatan pengeluaran dan belanja, serta promosi destinasi wisata.



Sumber: BPS Jawa Barat

Gambar 3.1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Domestik Kota Bogor Tahun 2016 – 2023

Berdasarkan gambar di atas, dapat terlihat bahwa kunjungan wisatawan ke objek wisata di Kota Bogor didominasi oleh wisatawan nusantara. Selama tahun 2016 – 2023 perkembangan kunjungan wisatawan di Kota Bogor memiliki tren yang berfluktuasi. Pasca pandemi Covid-19, geliat ekonomi mulai kembali di Kota Bogor. Dengan lokasi Kota Bogor yang secara geografis dekat dengan Jakarta sebagai Ibu Kota negara, sehingga banyak mendapat keuntungan secara ekonomi dari Jakarta. Ada tiga keunggulan perhotelan di Kota Bogor, yaitu: keunggulan geografis, kuliner, dan jarak tempuh dekat dari Jakarta.

Bisnis Hotel di kota Bogor sangat dipengaruhi oleh para tamu dari kota Jakarta. Para tamu yang datang dari Jakarta ke kota Bogor kebanyakan untuk melakukan kegiatan MICE dengan asal dari berbagai Instansi, baik perusahaan maupun pemerintahan. Hampir semua hotel di kota Bogor yang mempunyai *meeting room* yang memadai dan saling berebut pangsa pasar MICE terutama dari pemerintah. Pangsa pasar MICE-*government* terutama dari Kementerian dan Lembaga Negara merupakan penyumbang terbesar dalam kegiatan MICE di hotel-hotel di kota Bogor. Pemerintah menjadikan kota Bogor sebagai tujuan utama penyelenggaraan kegiatan MICE adalah karena jarak yang dekat, akses yang mudah dijangkau, dapat menghemat biaya dan menghemat waktu.

Selain sebagai tujuan utama MICE, Kota Bogor juga menjadi tujuan pariwisata favorit masyarakat sekitar Kota Bogor. Kota Bogor memiliki pusat kuliner yang unik dan khas membuat masyarakat sekitar Kota Bogor gemar menghabiskan akhir pekan untuk berkunjung ke Bogor hanya untuk menikmati kuliner. Keunggulan lain dari kota Bogor adalah mempunyai suhu udara yang sejuk antara 23°C – 26°C dikarenakan dekat dengan pegunungan. Hal ini semakin menambah keunggulan kota Bogor untuk selalu dipilih menjadi tempat penyelenggaraan MICE oleh *Government*. Adapun pangsa pasar MICE-*government* yang paling banyak melakukan kegiatan di kota Bogor adalah hampir semua Kementerian dan Lembaga Negara.

2.6.1.1. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sumberdaya Ekonomi Potensial

Berdasarkan data laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor dibandingkan dengan wilayah lain seperti Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi dapat dikatakan sudah cukup baik. Terlihat pada tahun 2020, capaian laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor menjadi yang paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya walaupun tetap bernilai negatif yaitu sebesar -0.41 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Bogor sudah cukup berhasil mengatur laju pertumbuhan ekonominya di situasi Covid-19. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan PDRB ADHK kota Bogor mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5.10%. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah pada tahun 2023 adalah Sektor pengadaan listrik dan gas mengalami kontraksi yaitu sebesar -2,62 persen.

Tabel 3.9. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2023

Wilayah	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha												
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bogor	6,22	6,31	6,04	6,01	6,14	6,73	6,12	6,14	6,19	-0,41	3,76	5,65	5,10
Kabupaten Bogor	5,86	6,01	6,14	6,01	6,09	5,84	5,92	6,19	5,85	-1,76	3,55	5,25	5,19
Kota Tangerang	7,39	7,07	6,52	5,15	5,37	5,34	5,88	4,95	4,02	-7,36	3,90	5,98	5,57
Kabupaten Tangerang	6,75	6,17	6,41	5,37	5,60	5,41	5,82	5,80	5,56	-3,76	4,70	5,47	5,18
Kota Bekasi	6,45	6,74	6,04	5,61	5,56	6,09	5,73	5,86	5,41	-2,58	3,22	4,96	5,43
Kabupaten Bekasi	6,60	6,53	6,23	5,88	4,46	4,84	5,68	6,02	3,95	-3,39	3,62	5,30	5,32

Sumber: BPS Jawa Barat, BPS Banten

Berdasarkan Tabel 3.10, dapat terlihat bahwa struktur perekonomian Kota Bogor tahun 2016 – 2022 didominasi oleh beberapa sektor lapangan usaha antara lain, sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; sektor Industri pengolahan; sektor Transportasi dan pergudangan; serta sektor konstruksi. Meskipun sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memiliki tren yang menurun setiap tahunnya, sektor ini merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kota Bogor selama tahun 2016 – 2022.

Tabel 3.10. Struktur Perekonomian Kota Bogor Tahun 2016 – 2022

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	0,85	0,81	0,78	0,74	0,76	0,78	0,76
2	Pertambangan dan penggalan	-	0	0	0	0	-	-
3	Industri pengolahan	18,92	18,54	18,86	18,56	18,56	18,83	18,73
4	Pengadaan listrik dan gas	3,34	2,88	2,66	2,5	2,28	2,44	2,53
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,12	0,12
6	Konstruksi	11,15	11,22	11,49	11,87	11,15	10,96	10,42
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	22,12	21,85	21,35	20,91	19,39	19,12	19,07
8	Transportasi dan pergudangan	11,6	11,66	11,91	12,2	12,04	11,87	12,34
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	4,48	4,52	4,68	4,66	4,77	4,65	4,92
10	Informasi dan komunikasi	6,27	6,65	6,89	6,99	9,47	9,54	9,49
11	Jasa keuangan dan asuransi	6,84	6,76	6,85	6,78	6,94	6,73	6,31
12	Real estat	2,23	2,22	2,25	2,28	2,26	2,46	2,49
13	Jasa perusahaan	2,07	2,05	2,08	2,14	1,87	1,79	1,89
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan	2,5	2,05	2,29	2,25	2,24	2,24	2,07
15	Jasa pendidikan	2,86	2,37	2,92	3,04	3,23	3,29	3,39
16	Jasa kesehatan dan kegiatan	1,26	2,86	1,43	1,49	1,51	1,62	1,69
17	Jasa lainnya	3,38	3,47	3,46	3,48	3,42	3,58	3,79
PDRB		100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil analisis LQ terdapat 14 sektor yang menjadi sektor basis serta diharapkan tetap menjadi basis ekonomi Kota Bogor di masa yang akan datang. Sektor basis terbesar yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, dan sektor jasa seperti sektor perusahaan, keuangan, transportasi, kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor pengadaan listrik dan gas memiliki nilai LQ terbesar dengan nilai sebesar 6.89, hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut menjadi sektor penggerak utama Kota Bogor dengan daya saing yang tinggi di wilayah Jawa Barat. Hal ini sebagai akibat dari adanya pengelolaan fasilitas listrik dan jaringan gas alam di Kota Bogor. Keberadaan pelayanan dan pengelolaan energi listrik Kota Bogor menghasilkan daya listrik sebesar 2,147,779 VA dan tersambung kepada pelanggan bukan hanya penduduk Kota Bogor namun juga wilayah lain di Jawa Barat dengan jumlah sebesar 1,149,126 pelanggan, salah satu yang terbesar di Jawa Barat. Di samping itu, Kota Bogor juga adalah kota yang telah memiliki jaringan gas alam sehingga Kota Bogor menjadi pemasok untuk 22,690 pelanggan dengan total volume gas yang tersalurkan sebesar 358,120,226 m³ (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor, 2019).

Di sisi lain, masih terdapat 3 sektor non basis di Kota Bogor antara lain, sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan; sektor Pertambangan & Penggalan; dan sektor Industri Pengolahan. Khusus bagi sektor

Industri Pengolahan, Kota Bogor memang tidak memiliki keunggulan karena sektor tersebut disumbang oleh pemerintahan kabupaten/kota lain di wilayah Jawa Barat. Sektor tersebut merupakan sektor usaha yang membutuhkan lahan yang relatif lebih luas sehingga cenderung tidak berkembang di wilayah perkotaan. Terkhusus untuk Sektor Industri Pengolahan Provinsi Jawa Barat memang memiliki kawasan-kawasan yang merupakan sentra industri. Dari total 145 kawasan industri berdasarkan data Kementerian perindustrian, tercatat terdapat 50 kawasan industri terletak di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah terbanyak dan terbesar di Kabupaten Bekasi (21 lokasi) dan Kabupaten Karawang (18 lokasi).

Tabel 3.11. Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Kota Bogor

Sektor Lapangan Usaha	Nilai LQ	Keterangan
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	0,11	Non Basis
Pertambangan & Pengecilian	-	Non Basis
Industri Pengolahan	0,44	Non Basis
Pengadaan Listrik dan Gas	6,89	Basis
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	1,31	Basis
Konstruksi	1,31	Basis
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1,32	Basis
Transportasi & Pergudangan	2,6	Basis
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,82	Basis
Informasi & Komunikasi	1,55	Basis
Jasa Keuangan & Asuransi	2,59	Basis
Real Estate	1,72	Basis
Jasa Perusahaan	4,39	Basis
Adm Pemerintah, Pertahanan & Jamsos	1,28	Basis
Jasa Pendidikan	1,17	Basis
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2	Basis
Jasa Lainnya	1,7	Basis

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan tabel di bawah dapat terlihat profil pertumbuhan sektor ekonomi di Kota Bogor. Terdapat permasalahan yaitu belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya ekonomi potensial di Kota Bogor terlihat masih adanya 4 sektor yang berada di kuadran IV yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan; sektor Pertambangan & Pengecilian; sektor Jasa Keuangan & Asuransi; serta sektor Adm Pemerintah, Pertahanan & Jamsos. Sektor-sektor tersebut menunjukkan pertumbuhan yang lambat dengan daya saing yang kurang baik. Selain itu terdapat 4 sektor yang berada di kuadran III yaitu sektor Industri Pengolahan; sektor Transportasi & Pergudangan; sektor Informasi & Komunikasi; serta sektor Jasa Perusahaan yang memiliki pertumbuhan baik namun daya saingnya kurang baik. Diperlukan strategi agar sektor-sektor tersebut dapat dikembangkan agar lebih berdaya saing.

Tabel 3.12. Profil Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kota Bogor

Sektor Lap Usaha	PP	PPW	Kuadran
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	-1,046	-1,04	IV
Pertambangan & Pengecilian	-5,812	-	IV
Industri Pengolahan	1,549	-1,92	III

Sektor Lap Usaha	PP	PPW	Kuadran
Pengadaan Listrik dan Gas	-0,036	4,4	II
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	-2,86	4,12	II
Konstruksi	-5,915	0,82	II
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	-1,238	1,16	II
Transportasi & Pergudangan	5,637	-1,23	III
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5,829	0,55	I
Informasi & Komunikasi	0,637	-0,98	III
Jasa Keuangan & Asuransi	-6,149	-0,28	IV
Real Estate	-1,102	2,54	II
Jasa Perusahaan	7,282	-1,44	III
Adm Pemerintah, Pertahanan & Jamsos	-7,242	-0,31	IV
Jasa Pendidikan	-2,662	6,25	II
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,365	4,29	I
Jasa Lainnya	4,619	1,79	I

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.1.3.2. Masih Tingginya Ketimpangan Ekonomi

Adanya ketimpangan ekonomi di suatu wilayah berdasarkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Kesenjangan pembangunan ekonomi Kota Bogor dapat dilihat dari ketimpangan distribusi pendapatan penduduk yang masih cukup tinggi. Ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan tersebut dapat menciptakan kesenjangan sosial. Berdasarkan dokumen RPJMD Kota Bogor 2019–2024, kondisi ketimpangan sosial di Kota Bogor terlihat dari pemenuhan kebutuhan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi keluarga miskin yang belum maksimal serta kesempatan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya masih sangat timpang dibandingkan dengan keluarga pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan antar golongan masyarakat Kota Bogor masih cukup tinggi. Dengan demikian, hal ini berarti pembangunan bidang ekonomi yang dilakukan hingga kini masih belum dapat mengungkit pendapatan masyarakat bawah.

Tabel 3.13. Gini Ratio Tahun 2011 – 2022

Wilayah	Gini Ratio												
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bogor	0,39	0,45	0,45	0,36	0,47	0,42	0,41	0,39	0,39	0,41	0,44	0,43	0,460
Kabupaten Bogor	0,41	0,42	0,42	0,38	0,42	0,40	0,38	0,42	0,40	0,38	0,40	0,40	0,369
Kota Tangerang	0,31	0,32	0,39	0,37	0,37	0,38	0,34	0,33	0,33	0,34	0,34	0,38	0,379
Kabupaten Tangerang	0,39	0,32	0,34	0,38	0,35	0,32	0,33	0,34	0,33	0,29	0,29	0,28	0,286
Kota Bekasi	0,37	0,37	0,37	0,33	0,41	0,39	0,35	0,34	0,35	0,35	0,40	0,44	0,414
Kabupaten Bekasi	0,33	0,36	0,36	0,33	0,35	0,31	0,34	0,36	0,35	0,37	0,34	0,37	0,397

Sumber: BPS Jawa Barat, BPS Banten

Salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh adalah Koefisien Gini atau *Gini Ratio*. Standar penilaian ketimpangan *Gini Ratio* ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator-Indikator Makro Ekonomi, LPEM- FEUI, 1995):

- a. $GR < 0,4$ dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- b. $0,4 < 0,5$ dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)
- c. $GR > 0,5$ dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Gini ratio Kota Bogor selama tahun 2011 – 2022 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah dan sedang dengan tren yang cenderung berfluktuasi. Meskipun begitu, jika dibandingkan dengan wilayah lain seperti Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi terlihat bahwa secara umum selama tahun 2011 – 2022 *gini ratio* Kota Bogor menjadi angka yang paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Artinya Kota Bogor memiliki ketimpangan ekonomi yang paling tinggi di antara wilayah-wilayah tersebut. Permasalahan ketimpangan salah satunya dipicu oleh produktivitas tenaga kerja Kota Bogor yang masih rendah.

3.1.3.3. Masih Tingginya Angka Pengangguran

Tingginya angka pengangguran menunjukkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah yang kurang memadai serta belum optimalnya pemulihan ekonomi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengawasi dan mengevaluasi perkembangan angka pengangguran dikarenakan indikator tersebut merepresentasikan angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Selama tahun 2010 – 2022, capaian TPT Kota Bogor menunjukkan besaran yang sangat tinggi dengan tren yang fluktuatif. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, selama tahun 2010 – 2022 capaian TPT Kota Bogor selalu lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Jawa Barat dan termasuk ke dalam 3 wilayah dengan TPT tertinggi di Jawa Barat pada tahun 2022. Selain itu, jika dibandingkan dengan wilayah lain seperti Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi terlihat bahwa TPT Kota Bogor secara umum selama tahun 2010 – 2022 menjadi angka yang paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Meskipun begitu, capaian TPT Kota Bogor tahun 2022 sudah berhasil ditekan dari 2 tahun sebelumnya sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi.

Tabel 3.14. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2010 – 2022

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bogor	17,20	10,31	9,33	9,80	9,48	11,08	-	9,57	9,65	9,10	12,68	11,79	10,78
Kabupaten Bogor	10,64	10,73	9,07	7,87	7,65	10,01	-	9,55	9,75	9,06	14,29	12,22	10,64
Kota Tangerang	14,09	12,89	8,31	8,62	7,81	8,00	-	7,16	7,39	7,14	8,63	9,07	7,16
Kabupaten Tangerang	14,01	14,42	11,46	11,94	8,45	9,00	-	10,57	9,63	8,92	13,06	9,06	7,88
Kota Bekasi	12,11	10,51	8,75	9,50	9,36	9,36	-	9,32	9,07	8,23	10,68	10,88	8,81
Kabupaten Bekasi	9,03	10,27	7,78	7,17	6,79	10,03	-	10,97	9,69	8,94	11,54	10,09	10,31

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, BPS Banten

Keterangan: Data tahun 2016 tidak tersedia

Berdasarkan dokumen RPJMD Kota Bogor 2019-2024, pola pertumbuhan inklusif harus diciptakan di Kota Bogor untuk memaksimalkan potensi ekonomi dengan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar kerja yang baik dan ramah keluarga miskin sehingga dapat mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan. Membuka peluang pekerjaan baru merupakan salah satu cara untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kota Bogor mengingat peluang kerja di

sektor-sektor industri pengolahan dan jasa lainnya sangat terbatas. Salah satu isu yang menjadi fokus pemerintah adalah meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah serta sektor ekonomi kreatif untuk bisa berdaya saing kuat dan mampu menciptakan lapangan kerja baru.

3.1.3.4. Produktivitas dan integrasi rantai nilai yang belum optimal

Produktivitas yang rendah dapat menjadi hambatan utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif. Selain itu, integrasi rantai nilai yang belum optimal, seperti keterbatasan koordinasi antara produsen, distributor, dan pengusaha dapat menghambat aliran efisien barang dan informasi dalam sistem ekonomi. Hal tersebut tidak hanya mengakibatkan biaya produksi yang lebih tinggi tetapi juga dapat menurunkan daya saing di pasar global yang semakin terintegrasi.

Tabel 3.15. *Share Net Ekspor terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2013 – 2022*

Wilayah	Share Net Ekspor terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Persen)									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bogor	-46,26	-46,75	-49,74	-49,70	-52,12	-51,64	-50,28	-46,06	-42,66	-42,67
Kabupaten Bogor	1,38	1,55	0,82	1,94	2,99	3,87	4,36	8,07	9,90	9,84
Kota Tangerang	9,56	15,49	17,23	18,03	17,61	15,23	13,36	-2,29	-3,24	4,47
Kabupaten Tangerang	16,88	21,02	22,35	2,32	2,58	2,85	3,26	3,11	4,86	5,76
Kota Bekasi	-61,10	-61,08	-60,79	-60,31	-59,42	-59,36	-59,60	-55,14	-50,30	-49,39
Kabupaten Bekasi	35,69	34,92	34,06	32,22	32,62	32,03	32,33	37,51	37,76	37,00

Sumber: BPS Kota Bogor, BPS Kabupaten Bogor, BPS Kota Tangerang, BPS Kabupaten Tangerang, BPS Kota Bekasi, BPS Kabupaten Bekasi

Produktivitas dan integrasi rantai nilai yang belum optimal di Kota Bogor terlihat dari data *share net ekspor* terhadap PDRB. Komponen *share net ekspor* barang dan jasa Kota Bogor bernilai negatif selama tahun 2013 – 2022. Meskipun *share net ekspor* terhadap PDRB Kota Bogor lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kota Bekasi, komponen ini memiliki nilai yang paling kecil jika dibandingkan dengan wilayah lainnya seperti Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Sementara itu, komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap PDRB Kota Bogor yaitu secara rata-rata nilainya lebih besar dari 30 persen selama tahun 2013 – 2022. Akan tetapi, kontribusi komponen ini di Kota Bogor lebih kecil jika dibandingkan dengan Kota Bekasi. Namun demikian, *share PMTB* terhadap PDRB Kota Bogor yang selalu di atas 30 persen telah menunjukkan cukup besarnya investasi fisik di Kota Bogor selama tahun 2013–2022.

Tabel 3.16. *Share PMTB terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2013 – 2022*

Wilayah	Share PMTB terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Persen)									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bogor	31,03	34,25	36,11	35,65	35,68	34,44	34,22	31,92	34,01	32,96
Kabupaten Bogor	22,24	22,71	22,97	22,29	21,82	22,24	22,00	20,60	21,51	21,02
Kota Tangerang	27,58	27,68	27,64	27,27	28,36	29,99	31,14	37,58	38,65	34,86
Kabupaten Tangerang	19,96	20,91	21,34	4,92	4,01	3,81	3,35	3,02	3,19	3,08
Kota Bekasi	31,35	33,34	33,98	34,99	35,65	36,80	37,88	35,11	35,06	33,79
Kabupaten Bekasi	19,75	21,44	22,29	22,68	22,70	23,31	22,98	20,30	21,65	21,55

Sumber: BPS Kota Bogor, BPS Kabupaten Bogor, BPS Kota Tangerang, BPS Kabupaten Tangerang, BPS Kota Bekasi, BPS Kabupaten Bekasi

3.1.3.5. Penguatan kecukupan dan ketersediaan pangan

Ketersediaan pangan yang mencukupi tidak hanya merupakan prasyarat bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menghasilkan skor komposit terkait kondisi ketahanan pangan suatu wilayah yaitu Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Angka IKP terdiri dari beberapa dimensi penyusun, antara lain ketersediaan pangan, keterjangkauan/ aksesibilitas pangan, serta pemanfaatan pangan. Berdasarkan tabel, tren dari angka IKP dan peringkat ketahanan pangan Kota Bogor cenderung berfluktuasi selama tahun 2018 – 2022. Hal tersebut memiliki arti bahwa penguatan kecukupan dan ketersediaan pangan di Kota Bogor belum optimal dilihat dari kondisi ketahanan pangannya yang belum menunjukkan performa yang baik. Data pada Tabel 3.17 menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir angka IKP tertinggi Kota Bogor tercapai pada tahun 2022 yaitu sebesar 76,38. Akan tetapi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya seperti Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi terlihat bahwa IKP Kota Bogor merupakan yang terendah selama 5 tahun terakhir.

Tabel 3.17. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan Peringkat Ketahanan Pangan Tahun 2018 – 2022

Wilayah	2018		2019		2020		2021		2022	
	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor
Kota Bogor	42	74,37	56	74,07	61	72,4	58	74,53	50	76,38
Kota Tangerang	35	76,84	32	81,53	37	80,37	49	78,88	42	79,08
Kota Bekasi	16	82,5	8	86,85	21	83,04	15	85,2	5	86,79
Kabupaten Bogor	291	67,56	291	69,11	317	66,64	300	68,9	297	68,61
Kabupaten Tangerang	250	71,1	202	75,54	266	72,47	214	76,07	194	77
Kabupaten Bekasi	47	80,65	17	85,01	51	83,86	15	86,29	22	86,15

Sumber: Badan Pangan Nasional

Permasalahan tersebut salah satunya dipicu oleh lahan pertanian di perkotaan yang terus menurun karena dikonversi menjadi lahan pemukiman dan industri. Tantangan dari sisi penyediaan yaitu tingkat ketergantungan pangan dari daerah produsen yang menyebabkan kerentanan terhadap ketidakstabilan pasokan dan harga pangan. Sementara itu, tantangan dari sisi permintaan berasal dari pertumbuhan penduduk yang salah satunya disebabkan oleh arus urbanisasi dan migrasi. Fenomena urbanisasi ini menyebabkan permintaan pangan semakin meningkat di Kota Bogor. Oleh karena itu diperlukan upaya meningkatkan kuantitas serta kualitas komoditas pangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berikut upaya-upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Bogor dalam menghadapi kondisi tersebut. Pertama, menginisiasi program pengembangan pertanian perkotaan yang berkelanjutan dengan melibatkan revitalisasi lahan-lahan terlantar, penerapan praktik pertanian yang ramah lingkungan, dan peningkatan akses petani perkotaan terhadap sumber daya dan teknologi pertanian. Kedua, mendorong diversifikasi sumber pangan dengan mengembangkan sistem pertanian yang lebih beragam, termasuk budidaya tanaman pangan, perikanan, peternakan, dan hortikultura di dalam kota. Ketiga, mengoptimalkan penggunaan lahan pertanian yang tersedia melalui perencanaan tata ruang yang terarah serta pengawasan yang ketat terhadap konversi lahan. Keempat, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani perkotaan dalam hal teknik

pertanian yang modern, manajemen usaha, dan pemasaran produk. Hal ini akan membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas komoditas pangan yang dihasilkan.

Kota Bogor memiliki beberapa jenis pangan yang memiliki tingkat ketersediaan energi di atas kondisi ideal (sudah cukup baik) seperti padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak, serta kacang-kacangan. Potensi ekonomi dari tingginya distribusi pangan dari berbagai daerah perlu mendapat perhatian agar pasokan ketersediaan pangan tetap stabil dan terjaga. Berdasarkan hasil analisis NBM (Neraca Bahan Makanan) 2022, diperoleh beberapa komoditas pangan masih sangat rendah dari segi ketersediaannya yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan sehingga diperlukan adanya terobosan baru pada level terkecil dengan memanfaatkan penyediaan pangan pada level rumah tangga melalui penyediaan sayur-sayuran dan buah-buahan dengan teknik hidroponik maupun akuaponik.

3.1.4. Aspek Tata Kelola

Bidang tata kelola Kota Bogor telah menunjukkan capaian kinerja yang baik. Penyelenggaraan pemerintah berbasis sistem informasi perlu dioptimalkan. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator tata kelola pemerintahan Kota Bogor yang telah mencapai penilaian tinggi namun masih disertai beberapa catatan sehingga dapat ditingkatkan lagi. Salah satu indikator capaian tersebut misalnya indeks (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) SPBE sebesar 3,3. SPBE merupakan indikator penilaian penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat (pengguna SPBE). SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Capaian SPBE Kota Bogor pada tahun 2022 sebesar 3,3 dari 5 yang berarti bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, Kota Bogor masuk dalam predikat baik. Capaian tersebut lebih tinggi dibanding capaian nasional sebesar 2,34 (cukup). Namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian SPBE daerah sekitar, Kota Bogor masih tertinggal. Kota Depok dan Jakarta, pada tahun yang sama berhasil menjadi daerah dengan penerapan SPBE terbaik di Indonesia. Sebagaimana fase implementasi SPBE Nasional, tahun 2022 merupakan fase penguatan layanan SPBE untuk kemudian masuk ke dalam fase implementasi selanjutnya yaitu penguatan infrastruktur SPBE, sehingga dalam hal ini, Kota Bogor juga perlu meningkatkan tata kelola untuk mencapai indeks SPBE yang lebih tinggi di tahun 2023.

Capaian SPBE tahun 2022 sebesar 3,3 tersebut terkonstruksi dari beberapa aspek penilaian yang meliputi: nilai aspek kebijakan internal tata kelola SPBE sebesar 3,4; nilai aspek perencanaan strategis SPBE sebesar 1,7; nilai aspek teknologi informasi dan komunikasi sebesar 2,50; nilai aspek penerapan manajemen SPBE sebesar 1,0. Berdasarkan capaian tersebut, Kota Bogor harus bekerja keras untuk meningkatkan kinerja pada seluruh aspek, terutama pada penerapan manajemen SPBE dan aspek perencanaan strategis SPBE.

Selanjutnya, pada kinerja aparatur dan pelayanan publik, yang dicerminkan melalui nilai akuntabilitas pemerintah lingkup perangkat daerah dan nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat, ditemukan bahwa Kota Bogor mengalami perbaikan capaian dari tahun 2021 ke tahun 2022. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup daerah menunjukkan capaian A (kategori nilai memuaskan dengan kriteria nilai >80-90) pada tahun 2022, meningkat dibanding tahun 2021 dengan capaian BB (kategori nilai sangat baik dengan kriteria nilai >70-80).

1. Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah

Hal yang mempengaruhi tidak maksimalnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi lingkup Inspektorat Daerah Kota Bogor adalah responden yang tidak memahami kriteria dan tata cara pengisian form instrumen pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah tahun 2022, sehingga capaian Hasil survei Kepuasan masyarakat seharusnya mendapatkan nilai 4,30 hanya mendapatkan nilai 3,56 dan pemilihan target nilai yang tinggi untuk Nilai pembangunan Zona Integritas yang seharusnya kategori C (unit kerja melakukan pencaanangan zona integritas) menjadi tidak sesuai dan mendapatkan nilai akhir yang tidak maksimal.

Terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan pemerintah Kota Bogor dalam menghadapi kondisi tersebut. Pertama, memberikan pelatihan kepada responden mengenai kriteria dan prosedur pengisian form instrumen pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah serta sosialisasi secara intensif untuk memastikan pemahaman yang tepat. Kedua, menyediakan panduan dan materi referensi yang jelas dan mudah dipahami mengenai pengisian form instrumen pengukuran agar responden dapat memahami dengan lebih baik tata cara yang harus diikuti. Ketiga, melakukan pembinaan secara berkala kepada responden untuk memastikan pemahaman yang baik tentang proses pengukuran serta melakukan monitoring secara rutin terhadap proses pengisian form. Dengan mengimplementasikan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman responden, meningkatkan kualitas pengisian form instrumen pengukuran, serta meningkatkan capaian nilai survei kepuasan masyarakat.

2. Level Maturitas SPIP

Hal yang mempengaruhi tidak maksimalnya nilai Level Maturitas SPIP adalah tidak terpenuhinya implementasi pada unsur SPIP (Penilaian Risiko, IEPK) yang disebabkan belum terupdate-nya regulasi terkait dengan penilaian risiko dan IEPK, Penilaian risiko tingkat kota belum dilaksanakan dan IEPK belum diimplementasikan dengan optimal.

Berikut beberapa upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Bogor dalam menghadapi kondisi tersebut. Pertama, menginisiasi dan mempercepat pembaruan regulasi terkait penilaian risiko dan Implementasi Efektivitas Pengendalian Kinerja (IEPK). Kedua, mengoptimalkan implementasi IEPK dengan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghambat pelaksanaannya. Ketiga, melakukan sosialisasi kepada seluruh pihak terkait mengenai pentingnya penilaian risiko dan implementasi IEPK dalam meningkatkan kinerja organisasi. Keempat, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penilaian risiko dan implementasi IEPK. Hal tersebut penting dilakukan untuk mengidentifikasi masalah atau ketidaksesuaian yang mungkin muncul. Dengan menerapkan upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat meningkatkan level Maturitas SPIP juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya.

a. Gap Analisis Kompetensi

Berdasarkan Pasal 162 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, pengembangan kompetensi PNS merupakan salah satu mata rantai dalam manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit, artinya harus dilakukan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyebutkan bahwa pengembangan kompetensi 20 paling kurang meliputi pendidikan dan pelatihan (diklat), seminar, kursus, penataran, sekolah kader/pelatihan

kader dan magang. Pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Inspektorat dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Bimbingan Teknis, Seminar dan Diklat Sertifikasi Profesi. Penyelenggaraannya menggunakan kurikulum dan silabus dari lembaga pendidikan pengawasan (Pusdiklatwas BPKP dan lembaga pendidikan lainnya).

Pengembangan kompetensi tersebut bertujuan serta meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan juga sikap (*attitude*) sehingga terwujud profesionalisme aparat pengawas intern pemerintah (APIP). Setelah dilakukan pengembangan kompetensi gap kompetensi mengalami penurunan dari 21,62% menjadi 14,70%. Capaian yang cukup baik tersebut menunjukkan adanya efektivitas dari program pengembangan dibarengi dengan partisipasi aktif dari peserta diklat.

b. Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal “BB”

Ukuran akuntabilitas kinerja dan keandalan sistem manajemen kinerja Perangkat Daerah yang merupakan hasil pencapaian penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah (Audit, Reviu, Evaluasi, Monitoring dan consulting). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2022 memperoleh nilai rata-rata 80,30% dengan predikat “BB” (Sangat Baik), sedangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya memperoleh nilai rata-rata 78,56% dengan predikat “BB” (Sangat Baik). Rekapitulasi hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor adalah sebagai berikut.

Tabel 3.18. Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2021 – 2022

No.	Kategori Nilai	Jumlah PD	
		2021	2022
1	AA (sangat memuaskan)	-	-
2	A (memuaskan)	10	17
3	BB (sangat baik)	17	18
4	B (baik)	8	1
5	CC (dukup/memadai)	1	-
6	C (kurang)	-	-
7	D (sangat kurang)	-	-
Jumlah		36	36

Sumber: Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2022

Tahun 2022 jumlah perangkat daerah yang mendapat nilai SAKIP “BB” ke atas sebanyak 36 perangkat daerah atau sebesar 97,22%. Beberapa catatan berkaitan dengan kelemahan dalam akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*);
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam satu periode perencanaan strategis 2019-2024 belum sustainable karena telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu pada tahun 2021 dan tahun 2022 untuk menyesuaikan perubahan perencanaan pada tingkat Pemerintah Daerah Kota Bogor. Belum ada *monitoring* pencapaian target jangka menengah sampai dengan tahun berjalan.

3. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) serta belum ada analisa didalam LAKIP memuat tentang informasi rencana aksi/upaya perbaikan/penyempurnaan kinerja dalam pencapaian tujuan organisasi (tujuan/sasaran).
4. Sistematika Laporan Kinerja belum disusun sesuai dengan standar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Pelaporan kinerja (LKIP) beberapa perangkat daerah disampaikan/di-*upload* tidak tepat waktu pada esr.menpan.go.id.
6. Dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dan sesuai kriteria 2.
7. Beberapa perangkat daerah belum seluruhnya menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.

Berikut upaya-upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Bogor dalam menghadapi berbagai kondisi tersebut.

1. Perencanaan kinerja menyampaikan informasi mengenai hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas di antara bidang atau fungsi lain yang saling terkait (Crosscutting).
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk periode 2022-2024 harus diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan hingga penetapan tahun 2024.
3. Peningkatan mutu laporan kinerja agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam upaya peningkatan dan penyempurnaan kinerja di masa mendatang, penyesuaian alokasi anggaran, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan datang, serta mendorong perubahan budaya kinerja organisasi.
4. Menyusun Laporan Kinerja dengan kualitas yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Menyampaikan Laporan Kinerja/upload (LKIP) melalui aplikasi esr.menpan.go.id tepat waktu yaitu sebelum tanggal 31 Maret setiap tahunnya.
6. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) sepenuhnya dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
7. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar seluruhnya ditindaklanjuti serta dimanfaatkan untuk perbaikan, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

3.1.5. Infrastruktur

3.1.5.1. Penyediaan utilitas dasar pendukung permukiman yang belum optimal

Dalam pemenuhan infrastruktur dasar di Kota Bogor, tantangan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat, akses terhadap sanitasi layak yang terbatas, dan akses terhadap sumber air minum layak yang belum optimal.

1. Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman disebutkan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi rumah layak huni dan terjangkau adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk dikatakan rumah layak huni maka harus mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, terutama untuk kecukupan minimum luas bangunan juga harus memperhatikan dari jumlah penghuninya.

Data capaian Rasio rumah layak huni dan Cakupan ketersediaan rumah layak huni RPJMD 2020-2024 sudah berstatus tercapai dari target tetapi untuk pemukiman kumuh di kawasan perkotaan di Kota Bogor masih belum tercapai. Permukiman kumuh menjadi salah satu gambaran bahwa penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat belum optimal. Sehingga ke depan perlu ada upaya peningkatan terhadap akses rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat serta penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan.

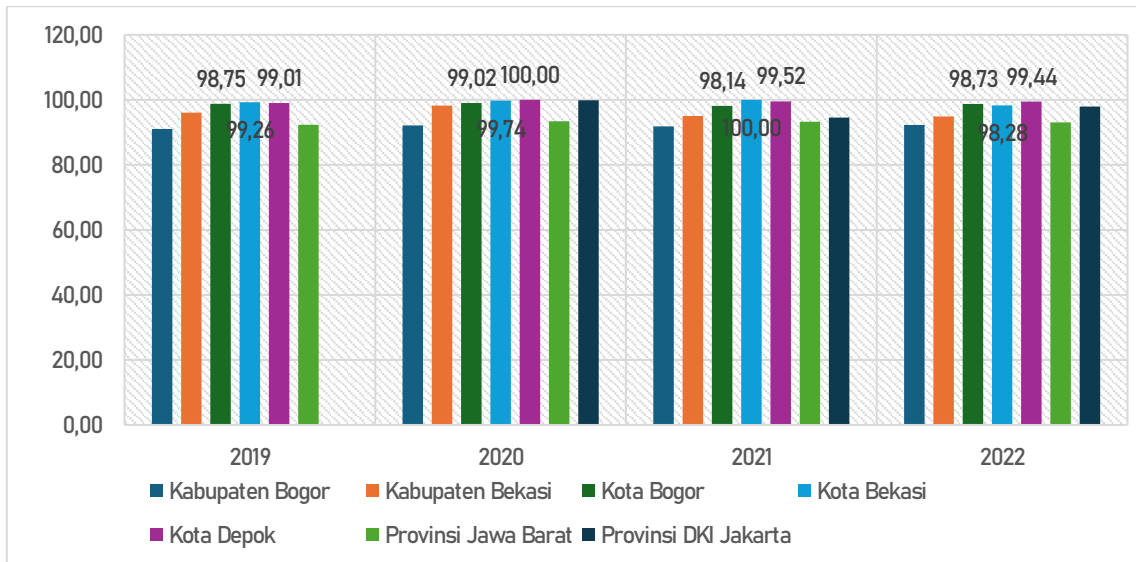
2. Akses Terhadap Sanitasi Layak Terbatas

Komponen rumah tangga dengan akses sanitasi layak adalah salah satu dari empat kriteria rumah layak huni. Menurut Kementerian PUPR, sanitasi layak terdiri dari bangunan sebagai sarana mandi cuci kakus beserta *septic tank* yang layak, saluran pembuangan air kotor, hingga sistem pembuangan air limbah. Sanitasi yang dimaksud dapat berada di dalam rumah, halaman rumah, atau komunal. Asalkan jaraknya yang terjangkau (dekat dari rumah) dan dapat melayani seluruh anggota keluarga. Kota Bogor selalu memiliki capaian terendah dibandingkan dengan Kota Bekasi dan Kota Depok. Angka capaian Kota Bogor tahun 2022 hanya sebesar 67,93 persen, padahal dua wilayah perkotaan lainnya yang sebagai pembanding memiliki nilai > 90 persen. Hal ini berarti rumah tangga di Kota Bogor masih belum optimal dalam mengakses mengenai sarana prasarana sanitasi yang layak.

Belum optimalnya kesehatan dasar dan kesejahteraan anak dilihat dari akses terhadap sanitasi layak yang juga belum optimal. Akses terhadap sanitasi layak menjadi salah satu tantangan utama, selain itu kebutuhan atas akses air minum rumah tangga yang aman dan berkelanjutan juga menjadi tantangan bagi wilayah perkotaan. Ke depan Kota Bogor perlu berupaya untuk melakukan peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar terutama pada sanitasi dan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan.

3. Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak yang Belum Optimal

Rumah tangga dengan akses sumber air minum layak adalah rumah tangga dengan sumber air minum yang memenuhi standar kesehatan dan kualitas air, serta mudah diakses oleh masyarakat. Sumber air minum layak bisa berasal dari air minum dalam kemasan, air isi ulang, mata air terlindungi, sumur terlindungi, sumur bor/pompa, atau pipa. Pada Gambar 3.2, terlihat bahwa persentase rumah tangga di Kota Bogor telah memiliki akses sumber air yang layak dengan capaian Kota Bogor tahun 2022 sebesar 98,73 persen. Angka ini mampu bersaing dengan wilayah perkotaan lainnya seperti Kota Bekasi (98,28%) dan Kota Depok (99,44). Harapannya, Kota Bogor terus dapat meningkatkan persentase akses sumber air yang layak, aman, dan terjangkau sehingga dapat mencapai 100 persen seperti Kota Depok di tahun 2020 dan Kota Bekasi di tahun 2021.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (2023)

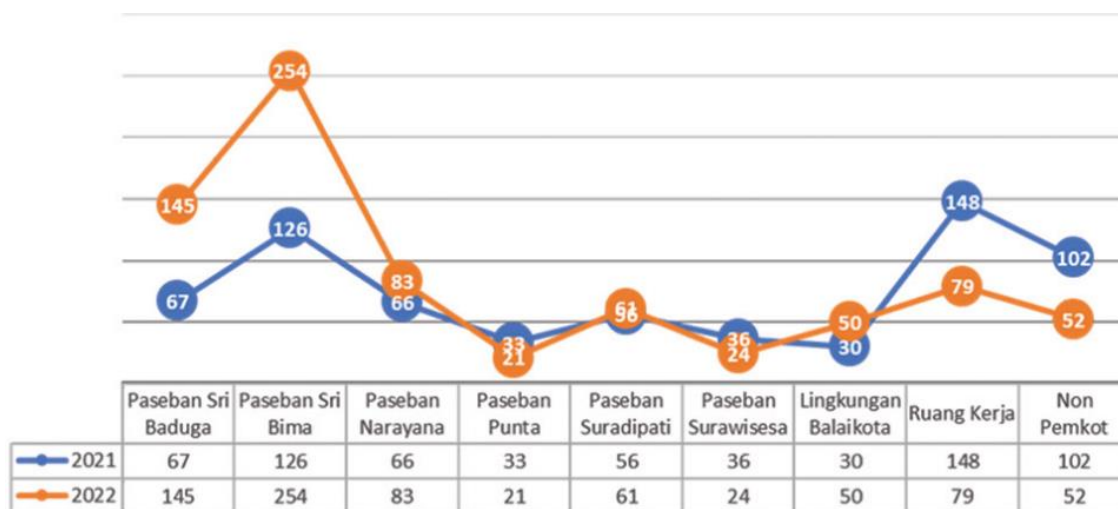
Gambar 3.2. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak (Persen)

Pelayanan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata wajib dilakukan oleh sebab itu perlu upaya yang dilakukan diantaranya percepatan penyediaan air baku dan air minum pada kawasan perkotaan dan pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum yang layak.

3.1.5.2. Belum optimalnya kinerja *smart city*

Konsep *smart city* kota bogor pertama kali disusun tahun 2017 sebagai bagian dari program kepesertaan dalam Gerakan Menuju 100 *Smart City* Indonesia (GM100SCI) dengan 6 (enam) dimensi *smart city platform* GM100SCI yang terdiri dari: *Sector Governance* (6 program), *Economy* (7 program), *Branding* (7 program), *Society* (6 program), *Living* (17 program), dan *Environment* (13 program). Selanjutnya sebagai tahap lanjutan Kota Bogor telah menyiapkan anggaran untuk Menyusun *Masterplan E-Government* (SPBE) dan *Masterplan Smart City 2022-2027* yang bersifat terintegrasi, sinergis, dan inklusif dengan RPJMD, RKPD, Renstra, Gerakan Reformasi Birokrasi, Stranas PK (penanggulangan Korupsi) dan Aspirasi *stakeholders penta-helix smart city*. Kedua *masterplan* saat ini dilaksanakan oleh Bappeda Kota Bogor tahun 2022. Penilaian dari pelaksanaan *smart city* didasarkan pada indeks *smart city* yang mana pada tahun 2019 Kota Bogor memiliki capaian 3.12, tahun 2020 sebesar 3.33, dan tahun 2021 sebesar 3.46. Apabila dilihat, capaian indeks *smart city* Kota Bogor terus mengalami peningkatan.

Salah satu bentuk program Kota Bogor adalah layanan *multimedia green room* yang digunakan sebagai sarana Pemerintah Kota Bogor dalam implementasi konsep *smart city*. Layanan ini memanfaatkan integrasi teknologi informasi yang mampu memfasilitasi kegiatan kedinasan pimpinan daerah, perangkat daerah ataupun *Non Government Organization* (NGO) dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada publik. Penanggungjawab dari layanan multimedia ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika. Hasil pelaksanaan layanan multimedia di Bogor Green Room mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang sebelumnya sebanyak 672 kegiatan menjadi 803 kegiatan pada tahun 2022, kegiatan ini tersebar di 7 Ruang Rapat Lingkungan Balaikota dan Non Lingkungan Balaikota. Meskipun demikian, total penggunaan ruangan kegiatan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 sebagaimana terlihat pada Gambar 3.3.



Sumber: Smart City Kota Bogor (2023)

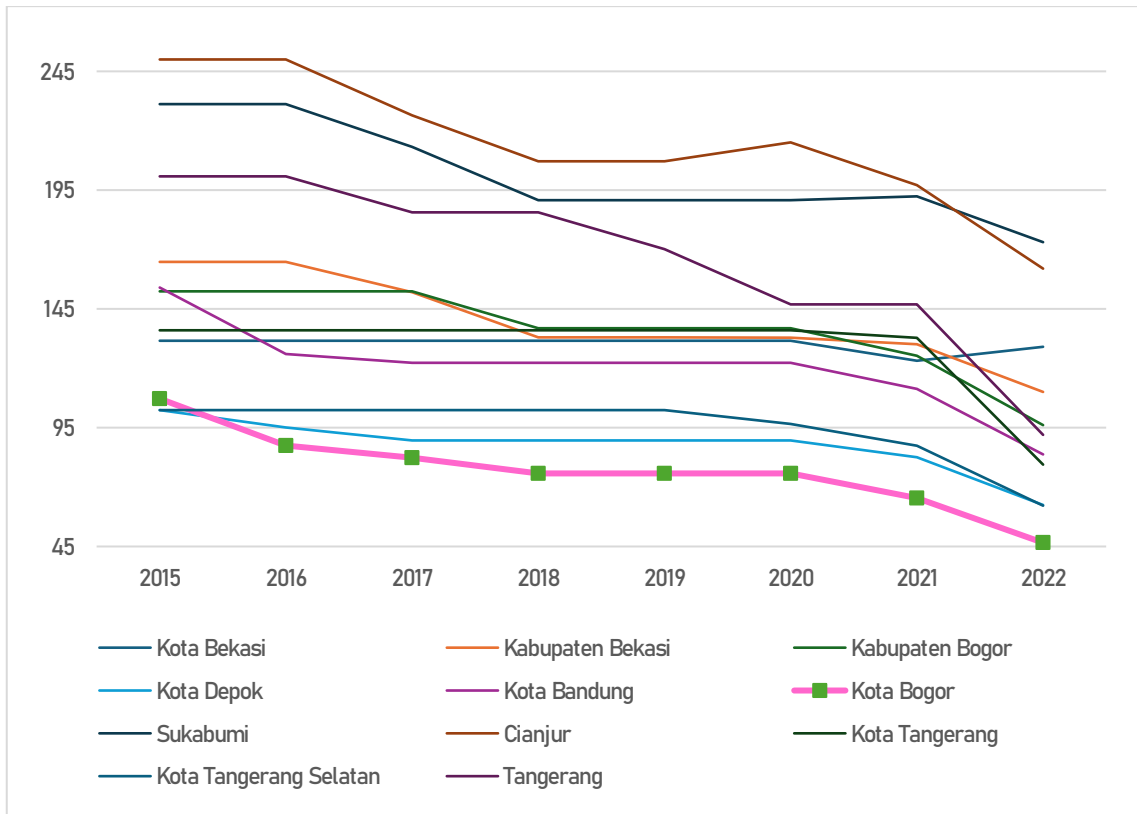
Gambar 3.3. Total Penggunaan Ruang Kegiatan Tenaga Multimedia Bogor Green Room Tahun 2022

Pengembangan *smart city* membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur digital, biaya ini bisa menjadi hambatan bagi pemerintah atau pengembang untuk menerapkan *smart city*. Pengembangan infrastruktur digital yang kuat adalah salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam pengembangan *smart city*. Hal ini meliputi penyediaan akses internet yang cepat dan terjangkau, serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan layanan publik, transportasi, keamanan, dan lain-lain. Selain itu, keberadaan universitas, lembaga riset, dan industri kreatif dapat menjadi pusat inovasi dan pengembangan teknologi baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Bogor. Selain itu, mendorong keterbukaan dan kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil perlu dilakukan. Hal ini memungkinkan pertukaran ide, sumber daya, dan pengalaman untuk menciptakan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan bagi masalah-masalah perkotaan yang kompleks.

3.1.5.3. Kurangnya antisipasi terhadap bencana dan perubahan iklim

Antisipasi terhadap terjadinya bencana alam dan anomali cuaca/iklim dapat dipetakan melalui Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Indeks ini merupakan suatu perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat kebencanaan dengan akibat berupa kerusakan atau kerugian di suatu wilayah. IRBI dihitung secara rutin oleh BNPB sebagai wujud monitoring dan pemantauan di daerah. IRBI disusun dari tiga komponen, yaitu indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana. IRBI Kota Bogor sejak tahun 2015-2022 memiliki tren yang menurun, artinya Kota Bogor relatif aman untuk ditinggali dibandingkan daerah-daerah lain yang memiliki potensi bencana yang cukup tinggi.

Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup tinggi, meskipun berdasarkan data dari BNPB Kota Bogor memiliki tren yang menurun terhadap risiko bencana. Berdasarkan data BNPB, Kota Bogor memiliki risiko sedang-tinggi untuk bencana banjir. Kerugian ekonomi akibat bencana banjir diperkirakan mencapai rata-rata 23,2111 Milyar dengan luas risiko yang terdampak seluas 1.538 ha. Kondisi tersebut diperparah dengan daya dukung hutan dan lahan di kawasan hulu yang mulai menurun sebagai daerah tangkapan air hujan. Sehingga perlu ada upaya kolaborasi dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta menerapkan pencegahan, mitigasi, dan peningkatan kapasitas SDM dalam mengantisipasi bencana dan perubahan iklim.

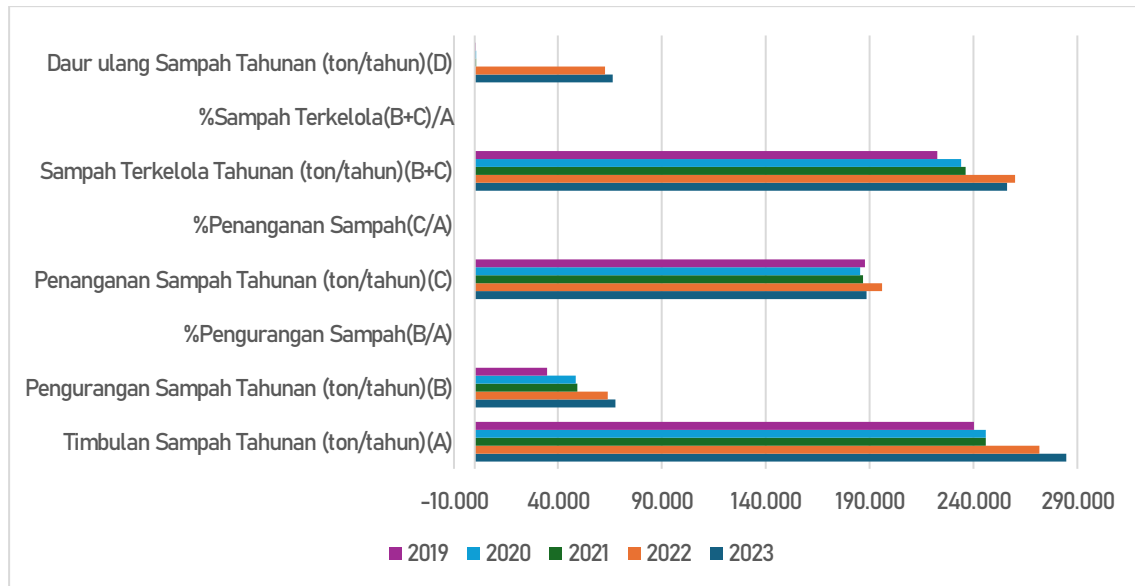


Sumber: INARISK BNPB (2023)

Gambar 3.4. Indeks Risiko Bencana Indonesia Menurut Wilayah Tahun 2015-2022

3.1.5.4. Kinerja pengelolaan sampah yang perlu ditingkatkan

Kinerja pengelolaan sampah Kota Bogor perlu dioptimalkan karena biasanya terdapat hubungan lurus antara jumlah penduduk dengan produksi atau timbulan sampah. Beberapa indikator dipetakan untuk melihat potensi persampahan di Kota Bogor dan kota pembanding lainnya. Pengukuran timbulan sampah diambil dari lokasi pengambilan terpilih, untuk diukur volumenya dan ditimbang beratnya dan diukur komposisinya. Pada Gambar 3.5 disajikan beberapa indikator persampahan Kota Bogor sejak tahun 2019-2022. Keterbatasan data yang disajikan pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK membuat data-data wilayah lain tidak disajikan sebagai pembanding. Terlihat bahwa jumlah timbulan sampah di Kota Bogor setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Walaupun demikian, terlihat pada indikator lainnya yang juga mengalami tren peningkatan untuk mengimbangi produksi sampah tahunan Kota Bogor. Hal ini terlihat pada indikator pengurangan sampah Kota Bogor di tahun 2022 sebesar 23.55 persen atau meningkat 3.48 persen dari 20.07 persen di tahun 2021. Indikator penanganan sampah dan pengelolaan sampah tahun 2022 justru menurun dengan masing-masing sebesar -3.85 persen dan -0.36 persen dibandingkan tahun 2021. Akan tetapi untuk indikator daur ulang sampah tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 62,019.04 ton dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 679.42 ton.



Sumber: SIPSN KLHK (2023)

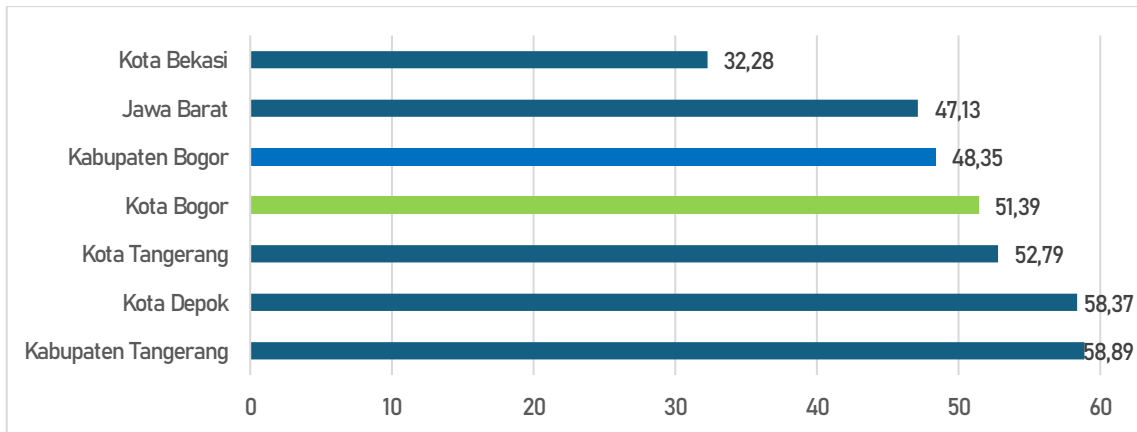
Gambar 3.5. Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun) Kota Bogor 2019–2023

Jumlah timbulan sampah di Kota Bogor yang mengalami peningkatan setiap tahunnya menandakan bahwa kebijakan Reduce, Reuse & Recycle (3R) yang belum efektif. Selain itu, Keberadaan tempat pengolahan sampah di wilayah Kota Bogor menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pengolahan limbah dan belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terpadu pada sumber, TPS, TPA dan pengangkutan dari hulu ke hilir juga menjadi masalah bagi pengelolaan sampah di Kota Bogor. Pasalnya, volume sampah di Kota Bogor dari tahun ke tahun terus bertambah seiring dengan perkembangan kota dan pertumbuhan penduduk. Kedepan perlu adanya peningkatan teknologi terpadu dalam pengelolaan sampah dari hulu-hilir dan berbasis masyarakat serta peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai.

3.1.5.5. Menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan

Kualitas lingkungan suatu wilayah dapat dinilai dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks ini merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Nilai IKLH setiap daerah pasti berbeda dan tergantung berapa banyak komposit yang digunakan. Pada kasus Kota Bogor, IKAL tidak diperhitungkan karena letak geografis yang tidak terdapat laut. Namun demikian, IKA, IKU, dan IKL setiap daerah selalu menjadi perhitungan tetap. Meski demikian, keterbatasan data membuat IKL sulit didapatkan.

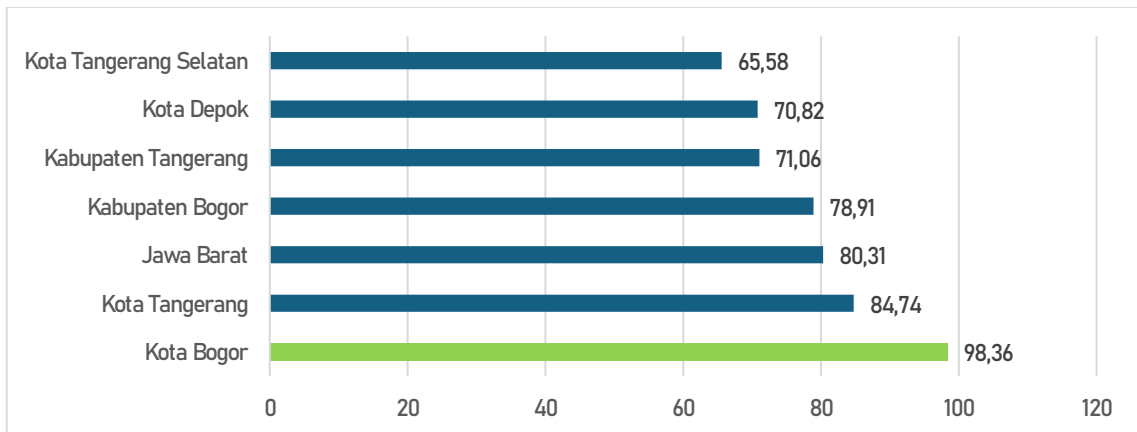
Indeks Kualitas Air (IKA) menjadi tolak ukur bagaimana kualitas air di Kota Bogor. Pada Gambar 3.6 disajikan IKA Kota Bogor pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 51,39 dan meningkat 0,99 poin dari tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan wilayah lain, maka IKA Kota Bogor relatif baik dari IKA Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bogor. Apabila dilihat secara *time series*, maka Kota Bogor sejak tahun 2015–2022 cenderung fluktuatif dengan tren yang meningkat artinya kualitas air di Kota Bogor semakin membaik. IKA Kota Bogor tahun 2016 sebesar 27,33; tahun 2017 (34.44); tahun 2018 (49.67); tahun 2019 (51.67); dan tahun 2020 (56.33).



Sumber: DLH Kota Bogor (2023)

Gambar 3.6. Indeks Kualitas Air Tahun 2022

Selain kualitas air, kualitas udara yang di ukur melalui Indeks Kualitas Udara (IKU) menjadi salah satu komponen yang penting untuk menggambarkan kondisi pencemaran udara di Kota Bogor. Pada Gambar 3.7 disajikan IKU Kota Bogor tahun 2022 dengan nilai sebesar 98,36 atau meningkat 18,27 poin dibandingkan tahun 2020. Apabila dilihat secara *time series*, maka Kota Bogor sejak tahun 2015-2022 cenderung fluktuatif dengan tren yang meningkat. Capaian IKU Kota Bogor tahun 2015 (70.56); tahun 2016 (78.56); tahun 2017 (85.3); tahun 2018 (85.86); tahun 2019 (81.76); dan tahun 2020 (80.09). Jika melihat capaian tahun 2020, maka Kota Bogor memiliki kualitas udara yang paling baik diantara wilayah perbandingan lainnya, tentunya hal ini menjadi keuntungan bagi masyarakat yang ingin hidup di wilayah perkotaan namun tetap dapat memiliki kualitas udara yang prima.



Sumber: DLH Kota Bogor (2023)

Gambar 3.7. Indeks Kualitas Udara Tahun 2022

Menurunnya kualitas lingkungan hidup juga dapat dilihat dari timbulan pencemaran air limbah. Berdasarkan hasil analisis pada tahun 2045 rata-rata peningkatan beban pencemar untuk masing-masing parameter adalah 2,29%. Peningkatan ini perlu diantisipasi terutama karena kualitas air akan semakin menurun di masa mendatang jika tidak dilakukan upaya pencegahan. Aspek keberlanjutan lingkungan menjadi fokus utama dalam pengembangan Kota Bogor ke depan. Upaya yang perlu dilakukan diantaranya pengelolaan limbah yang efisien, penggunaan energi terbarukan, desain bangunan yang ramah lingkungan, pelestarian ruang terbuka hijau dan habitat alami, pengendalian polusi udara melalui kebijakan transportasi ramah lingkungan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup melalui pendidikan sejak dini.

3.2. Isu Strategis

Isu Strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan di Kota Bogor dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan.

A. Isu Global

ISU GLOBAL



Gambar 3.8. Isu Global

1. Geopolitik dan Geoekonomi

Geopolitik dan geoekonomi. Rivalitas dan dominasi negara-negara besar dalam perekonomian dan politik global memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian negara-negara lain dunia. Konflik yang saat ini berlangsung di kawasan Timur Tengah, Eropa Timur, dan Laut Cina Selatan – Indo Pasifik, efeknya dapat merambat secara langsung dan tidak langsung dalam skala global. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong deglobalisasi dimana setiap negara membangun kemandirian dan ketahanan dalam memitigasi risiko keterpaparan dampak potensi krisis yang merambat melalui jalur perdagangan dan keuangan internasional, serta komoditas dalam rantai pasok global. Di tengah tensi geopolitik yang ada, kawasan Indo-Pasifik yang diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berpotensi membuka berbagai peluang yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan luar negeri, menjadi *windows of opportunity* sebagai bagian dari rantai pasok produksi dan perdagangan global.

2. Disrupsi Teknologi Berbasis *Artificial Intelligence* (AI)

Disrupsi teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Ke depan, akan banyak pekerjaan yang dapat tergantikan oleh pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.

3. Urbanisasi Dunia

Menurut data *World Population Prospects (2022)*, populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Porsi lansia di Asia juga meningkat yaitu sebesar 55 persen. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Kebutuhan pangan, energi, dan air akan semakin meningkat pula seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Selain itu, urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyebar ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa.

4. Perdagangan Internasional

Meningkatnya jumlah kelas menengah masyarakat global akan mendorong sisi permintaan produk dan peningkatan perdagangan internasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan peluang pasar ekspor produk dari Provinsi Jawa Barat ke negara-negara potensial. Produk yang berdaya saing serta penguatan sistem logistik yang efisien diperlukan dalam meningkatkan kinerja ekspor Jawa Barat.

5. Perubahan Iklim Global (*Global Warming*)

Tantangan pemanasan global akibat perubahan iklim berdampak pada peningkatan suhu global yang terus meningkat hingga 3,5°C pada skenario *intermediate*, jika tidak ada penurunan emisi GRK yang tinggi pada durasi Tahun 2020-2050. Dampak perubahan iklim ini yang kemudian melahirkan kesepakatan kebijakan global dalam pembangunan rendah karbon untuk menurunkan intensitas emisi pada sektor-sektor tertentu. Keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim dinyatakan melalui *Nationally Determined Contribution (NDC)*. Komitmen ini menjadi dasar bagi Indonesia dalam merancang berbagai kebijakan nasional dalam menurunkan intensitas emisi karbon dalam pembangunan nasional. Terlebih lagi laporan dari *World Meteorological Organization (WMO)* dalam *State of The Climate 2022* menyebutkan bahwa tahun 2022 menempati peringkat ke-6 tahun terpanas (peringkat ke-1). Tahun 2015-2022 menjadi 8 (delapan) tahun terpanas dalam catatan WMO, sehingga perubahan iklim ini menjadi 1 (satu) isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan kedepan.

6. Demografi Global

Proyeksi oleh *Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)*, menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir.

Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (aging population) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Menurut UNDP, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Di Asia dalam 4 (empat) dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Sebanyak 25–30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai.

B. Isu Nasional

ISU NASIONAL



Gambar 3.9. Isu Nasional

1. Perpindahan Ibukota Nusantara (IKN)

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta baik dari sisi konsumsi, impor ekspor perdagangan antar daerah, serta belanja pemerintah pusat di wilayah tersebut. Potensi kehilangan belanja pemerintah pusat ke wilayah DKI diperkirakan mencapai 90 persen dari total keseluruhan belanja. Keterkaitan aktivitas perekonomian yang erat menjadikan perpindahan IKN akan berdampak langsung terhadap kinerja perekonomian Provinsi Jawa Barat. Dampak yang diakibatkan berupa penurunan PDRB sebesar 0,06 persen, serta upah nyata di sektor pertanian.

2. Bonus Demografi

Bonus demografi Indonesia. Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penduduk ke 4 (empat) terbesar di dunia yaitu sebesar 277 juta jiwa dan diproyeksikan pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa. Dengan besarnya jumlah penduduk dapat menjadikan potensi sumber daya pembangunan yang besar jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Selain itu, besarnya jumlah penduduk dapat memberikan potensi tenaga kerja yang besar untuk menunjang sektor-sektor ekonomi potensial menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian dan pariwisata. Namun dengan besarnya penduduk Indonesia saat ini masih terdapat tantangan yaitu kualitas pendidikan yang masih rendah yang dilihat dari capaian rata-rata nilai PISA siswa Indonesia tahun 2018 untuk semua aspek (membaca, matematika dan sains) yaitu sebesar 382,00 dimana capaian tersebut masih dibawah siswa dari negara-negara OECD yaitu sebesar 488,33. Selain itu produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal yaitu sebesar 7.274,9 USD dimana angka tersebut berada dibawah rata-rata kawasan ASEAN. Komposisi struktur penduduk Indonesia masih dapat dioptimalkan, dimana rasio ketergantungan di bawah 50 persen yang diproyeksikan akan berlangsung sekitar 15 (lima belas) tahun ke depan. Dengan penduduk usia produktif yang dominan akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila adanya peningkatan kualitas penduduk usia produktif melalui peningkatan produktivitasnya.

3. Konektivitas dan Infrastruktur Dasar

Konektivitas dan infrastruktur dasar. Terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, konektivitas hinterland (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih perlu ditingkatkan. Rendahnya jangkauan jaringan serat optic sebagai layanan digital yang berkualitas, dan masih belum meratanya jangkauan jaringan internet seluler di daerah terpencil menjadi tantangan nasional. Ke depannya, selain permasalahan tersebut, terdapat beberapa masalah lain yang perlu diatasi seperti lemahnya tata kelola dan koordinasi antar lembaga, kurangnya pendanaan untuk pembangunan infrastruktur termasuk untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun.

Dalam pemenuhan infrastruktur dasar, tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana. Selain itu, pelayanan tenaga listrik belum optimal dan belum berkelanjutan.

4. Perubahan Iklim dan Bencana

Perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta ketahanan bencana. Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan. Kerugian ekonomi akibat bencana perubahan iklim diperkirakan mencapai rata-rata Rp22,8 triliun per tahunnya. Di Indonesia terdapat 18.000 km garis pantai berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, peningkatan musim kemarau yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami penurunan intensitas curah hujan juga berdampak pada meningkatnya potensi kekeringan, ketersediaan air, dan penurunan produksi padi. Kondisi tersebut diperparah dengan daya dukung hutan dan lahan sawah yang diperkirakan akan terus menurun. Selain itu, daya dukung ketersediaan air juga menunjukkan tren menuju kelangkaan khususnya di wilayah Jawa. Adapun, daya dukung ekosistem laut diprediksi akan mengalami kerentanan seiring dengan kerusakan fisik ekosistem pesisir dan laut yang diakibatkan pengelolaan yang tidak berkelanjutan.

5. Ekonomi Hijau dan Biru

Ekonomi hijau dan ekonomi biru. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka transformasi ekonomi dengan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi yang dipersiapkan tidak hanya dalam rangka pemulihan dari pandemi COVID-19 namun juga untuk membawa Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045. Ekonomi hijau merupakan model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan rendah karbon sebagai “tulang punggung” nya. Penerapan ekonomi hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Sementara itu, paradigma ekonomi biru merupakan kerangka pembangunan berkelanjutan untuk membantu menangani isu-isu seperti kesenjangan pembangunan, pengembangan, dan pemerataan kesejahteraan dari sumber daya laut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kelautan, serta pertumbuhan ekonomi.

6. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi dan otonomi daerah. Reformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menimbulkan tren pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan peluang yang lebih besar dari potensi daerah yang ada. Tujuan pemekaran wilayah pada dasarnya untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum dan daya saing daerah. Tren pemekaran wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah alokasi transfer ke daerah yang memiliki peranan stimulan yang lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan dengan PAD. Alokasi transfer ke daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sektor-sektor terkait pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar. Di samping itu perlu adanya peningkatan kualitas belanja yang dilakukan pemerintah daerah dimana kualitas belanja daerah sangat mempengaruhi terhadap pencapaian indikator makro daerah.

C. Isu Regional

Pulau Jawa-Bali diarahkan menjadi pusat pertumbuhan industri berbasis inovasi, riset dan teknologi serta pariwisata dan ekonomi kreatif. Kebijakan kewilayahan tersebut penting untuk Provinsi Jawa Barat yang memang potensi dan kontribusinya bagi nasional cukup besar. Peluang besar Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan arahan tersebut tentunya didukung dengan modalitas yang ada dan adanya perubahan peran Jakarta.



Gambar 3.10. Isu Regional Kawasan Jawa-Bali

1. Perubahan Peran Jakarta Sebagai Kota Global

Perubahan peran Jakarta sebagai kota global akan mempengaruhi Provinsi Jawa Barat secara langsung dan provinsi-provinsi lain di sekitarnya. Sebagai kota global, Jakarta akan menjadi kota yang melayani dan membiayai kegiatan internasional dalam bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan menjadi lokasi kantor pusat perusahaan dan lembaga baik nasional, regional maupun internasional, serta menjadi pusat produksi produk strategis internasional. Perubahan peran tersebut tentunya menciptakan nilai ekonomi yang besar dan akan mempengaruhi daerah sekitarnya. Sebagai penopang perekonomian terbesar nasional, Jawa-Bali masih menjadi magnet bagi SDM berkualitas. Namun demikian, daya saing SDM secara umum masih perlu ditingkatkan terlebih di Provinsi Jawa Barat yang jumlah penduduknya terbesar. Dengan wilayah yang luas, ketersediaan akses pendidikan juga masih belum merata. Selain itu, masih adanya kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan dunia usaha perlu menjadi perhatian ke depannya.

Pulau Jawa-Bali yang merupakan magnet bagi pendatang tentunya sangat rentan terhadap perubahan tatanan sosial budaya yang ada. Didorong dengan kemajuan teknologi informasi menyebabkan pertukaran informasi berlangsung makin cepat sehingga mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat. Provinsi Jawa Barat pun mengalami gejala demikian. Salah satunya ditunjukkan dengan rendahnya persentase penduduk yang pernah terlibat dalam pertunjukan seni, kegiatan organisasi, serta menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat. Ketimpangan wilayah utara-selatan memang sudah berlangsung sejak lama dan akan tetap terjadi ke depannya. Hal tersebut tercermin dari ketersediaan infrastruktur yang lebih baik dan lengkap serta konsentrasi berbagai industri di sepanjang wilayah utara. Ketimpangan tersebut juga terlihat dari angka kemiskinan dan pengangguran yang relatif banyak terkonsentrasi di wilayah selatan.



Gambar 3.11. Isu Strategis Provinsi Jawa Barat

Kondisi demikian juga terjadi di Provinsi Jawa Barat sehingga ke depannya perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi ketimpangan yang sudah berlarut-larut terjadi itu. Perubahan iklim dan bencana alam menjadi hal yang patut menjadi perhatian utama di Pulau Jawa-Bali untuk ke depannya. Tekanan pembangunan dan wilayah yang berada pada ancaman gempa bumi, erupsi gunung berapi, dan tsunami menuntut kesiapsiagaan, mitigasi, peringatan dini, penanganan darurat, dan pemulihan pasca bencana. Kondisi tersebut juga berlaku dalam konteks Provinsi Jawa Barat. Mengantisipasi jumlah penduduk yang makin besar, maka diperlukan tata kelola pemerintahan yang responsif seiring dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi ke depannya. Tuntutan peningkatan kualitas layanan publik yang cepat dan terintegrasi dengan teknologi informasi mutlak menjadi suatu keharusan. Kondisi demikian juga berlaku untuk Provinsi Jawa Barat yang ke depannya juga makin kompleks permasalahan yang dihadapi.

Isu strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dirumuskan berdasarkan permasalahan yang dihadapi sampai dengan tahun 2023, isu pembangunan dalam WJDF, serta tuntutan dan tantangan yang akan dihadapi dalam periode 2025-2045 yang meliputi isu global, nasional, dan regional Jawa Bali. Berdasarkan hal tersebut di atas maka isu strategis Provinsi Jawa Barat untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

2. *Green dan Blue Economy* serta Pembangunan Inklusif

Perekonomian yang berkelanjutan mencakup pergeseran sektor- sektor perekonomian menjadi lebih bersih, pengarusutamaan *green economy* dan *blue economy*. Perekonomian yang bersih atau "*clean economy*" mengacu pada sistem ekonomi yang mengurangi dampak negative terhadap lingkungan, mempromosikan penggunaan sumber daya yang terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi. Ekonomi biru atau "*blue economy*" mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dan kelautan secara berkelanjutan. Ini mencakup pemanfaatan laut, samudra, dan sumber daya yang terkait, sambil mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Sedangkan pembangunan inklusif adalah pembangunan yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan antarkelompok dan wilayah.

3. Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia

Pada tahun 2045, proyeksi jumlah penduduk dan penduduk usia produktif di Provinsi Jawa Barat masih menjadi yang terbesar di Indonesia. Demikian halnya, rasio ketergantungan dan jumlah penduduk usia lanjut cenderung meningkat. Kondisi di atas merupakan tantangan besar bagi Provinsi Jawa Barat untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia melalui perbaikan kualitas kehidupan, penyiapan sumber daya manusia yang produktif (usia dini, anak-anak, dan remaja) serta pelayanan sosial bagi penduduk lanjut usia untuk menyediakan pelayanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mendukung pembangunan inklusif diperlukan karakter sosial budaya yang inklusif. Karakter sosial budaya yang inklusif adalah sosial budaya yang terbuka dan ramah serta saling menghargai. Sosial budaya yang inklusif memiliki peran penting untuk membentuk identitas suatu masyarakat dan individu, serta berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

4. Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar

Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur dasar antara wilayah utara dan selatan Jawa Barat serta antara perkotaan dan perdesaan mengakibatkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan akses layanan dasar masyarakat di wilayah tersebut. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Provinsi Jawa Barat bagian selatan seperti infrastruktur jalan, sumberdaya air dan irigasi, kesehatan, pendidikan, dan digital akan meningkatkan pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah Jawa Barat. Untuk mengurangi kesenjangan wilayah perkotaan dan perdesaan, dibutuhkan akselerasi pembangunan infrastruktur layanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal di wilayah perdesaan. Sementara di wilayah perkotaan, pertumbuhan yang pesat dalam jangka panjang perlu diimbangi dengan layanan infrastruktur fasilitas perkotaan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

5. Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Selain mempercepat aspek pertumbuhan, penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka panjang juga lebih mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dari daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penggunaan bahan baku yang lebih efisien dan terbarukan, serta mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya perekonomian, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya. Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pemanfaatan sumber daya serta kehidupan sosial budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan batas-batas pertumbuhan serta mewujudkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pembangunan jangka panjang.

6. Keberlanjutan Penataan Ruang

Pertumbuhan penduduk dan perekonomian wilayah dalam jangka panjang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan dengan sarana dan prasarannya, peningkatan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, serta energi dan pangan. Pemanfaatan sumber daya alam dan lahan yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan hal tersebut di atas akan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lahan. Pemanfaatan ruang serta upaya pengendaliannya menjadi tantangan dalam memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat menopang pembangunan secara berkelanjutan.

7. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Wilayah Provinsi Jawa Barat yang luas dan jumlah penduduk yang besar merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan daerah yang semakin kompleks. Birokrasi yang terikat dengan seperangkat regulasi juga dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang cepat dan responsif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi dan partisipasi akan menjadi keharusan dalam pengelolaan daerah seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat.

D. Isu Strategis Kota Bogor

1. Citra Bogor sebagai Kota Pusaka dan Sains

Dalam UU No 11 Tahun 2010, cagar budaya didefinisikan sebagai warisan budaya yang berbentuk benda materi seperti Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang memerlukan pelestarian karena memiliki nilai yang penting dalam sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Cagar budaya dapat menjadi simbol identitas suatu wilayah. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat diketahui fungsi cagar budaya penting bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Cagar budaya perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya karena wujudnya berupa benda maupun kawasan yang kemudian akan bisa hilang tergerus waktu atau karena ulah manusia apabila tidak dilindungi. Dalam hal ini, keterlibatan pemerintah dan masyarakat sekitar sangat penting dalam menjaga fungsi cagar budaya agar dapat menjaga warisan budaya yang menjadi tonggak sejarah.

Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan citra Bogor sebagai kota pusaka dan sains:

1) Pengembangan Pariwisata Berbasis Sejarah dan Sains

Mempromosikan Bogor sebagai tujuan pariwisata berbasis sejarah dan sains. Pengembangan dan pemeliharaan tempat-tempat bersejarah, museum, dan situs-situs sains dapat menarik wisatawan dan meningkatkan kunjungan wisata.

2) Peningkatan Infrastruktur Pariwisata

Meningkatkan infrastruktur pariwisata, seperti jalan raya, transportasi umum, dan fasilitas akomodasi, untuk memudahkan wisatawan mengakses dan menjelajahi Bogor.

3) Pembinaan Ekosistem Inovasi dan Riset

Mendorong pembentukan ekosistem inovasi dan riset di Bogor dengan memanfaatkan keberadaan institusi-institusi pendidikan tinggi, pusat penelitian, dan industri yang berorientasi pada sains. Ini dapat mendukung pengembangan teknologi dan inovasi.

4) Promosi Event dan Festival

Menyelenggarakan event dan festival berkala yang menyoroti warisan sejarah dan pencapaian ilmiah di Bogor. Event ini dapat menarik perhatian masyarakat lokal dan wisatawan, serta mempromosikan citra kota.

5) Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset

Mengembangkan kemitraan yang erat dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan riset di Bogor. Ini dapat meningkatkan citra Bogor sebagai pusat ilmu pengetahuan.

6) Pemberdayaan Komunitas Lokal

Melibatkan dan memberdayakan komunitas lokal dalam pelestarian dan pengembangan warisan sejarah dan ilmiah. Inisiatif dari masyarakat dapat memberikan nilai tambah yang signifikan.

7) Edukasi Masyarakat

Melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang warisan sejarah dan ilmiah Bogor. Pendidikan mengenai nilai-nilai budaya dan sains dapat meningkatkan kebanggaan dan penghargaan terhadap identitas kota.

8) Pelibatan Pihak Swasta

Mendorong partisipasi sektor swasta dalam mengembangkan proyek-proyek yang mendukung citra Bogor sebagai kota pusaka dan sains. Investasi swasta dapat memberikan sumber daya finansial dan manajerial yang dibutuhkan.

9) Pengembangan Industri Kreatif

Mendorong pertumbuhan industri kreatif di Bogor, termasuk seni, desain, dan teknologi kreatif. Ini dapat menciptakan lapangan kerja, menghasilkan produk atau layanan yang unik, dan mendukung ekonomi lokal.

10) Penggunaan Teknologi untuk Promosi

Memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk mempromosikan citra Bogor. Kampanye pemasaran online dapat mencapai audiens yang lebih luas dan menarik perhatian generasi muda.

Dengan mengoptimalkan citra Bogor sebagai kota pusaka dan sains, potensi pembangunan ekonomi dan budaya dapat ditingkatkan, memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan daya tarik kota untuk investasi dan pengembangan industri.

2. Optimalisasi Penataan Ruang dan Sistem Permukiman yang Cerdas dan Berkelanjutan

Masalah optimalisasi penataan ruang dan sistem permukiman yang cerdas dan berkelanjutan menjadi semakin mendesak mengingat dua aspek krusial yang terkait: penyediaan utilitas dasar pendukung permukiman yang belum optimal dan belum optimalnya kinerja smart city. Kurangnya pelayanan utilitas dasar seperti air bersih, listrik, dan sanitasi dalam permukiman menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh beberapa daerah, termasuk Kota Bogor. Penyediaan utilitas dasar yang memadai dan menjangkau semua penduduk menjadi hal penting di Kota Bogor, mengingat jumlah penduduk Kota Bogor tahun 2022 mencapai 1.114.018 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,07 persen. Dalam konteks ini, penataan ruang yang cerdas dapat memastikan distribusi yang merata dari utilitas dasar ini, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi disparitas antarwilayah.

Di samping itu, belum tercapainya optimalisasi utilitas dasar dapat juga dipengaruhi oleh kondisi kinerja *smart city* Kota Bogor. Konsep *smart city* (kota cerdas) yang menjadi isu besar di kota-kota besar di seluruh dunia secara global telah menstimulus kota-kota di dunia untuk mendorong peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota dengan pendekatan menggeser pola pemerintahannya menjadi *citizen centric* dan *stakeholders centric* sehingga terjadi interaksi yang lebih dinamis dan erat antara penyedia layanan, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah dengan warga kota. Pola tersebut melahirkan interaksi dua arah yang akan terus berkembang dan berproses sehingga nantinya kota akan menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali serta tangguh dalam merespon perubahan dan tantangan yang baru dengan lebih cepat.

Salah satu dimensi *smart city* Kota Bogor adalah *smart living*. *Smart living* bertujuan untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah Smart City. Dengan mengintegrasikan konsep smart city, pemerintah dapat meningkatkan pemantauan dan pengelolaan utilitas dasar, menciptakan solusi inovatif, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi penataan ruang dan sistem permukiman yang cerdas dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mengatasi ketidakmerataan pelayanan dasar dan meningkatkan kinerja *smart city* guna mencapai kesejahteraan yang lebih merata dalam masyarakat.

3. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Global

Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim global menjadi masalah yang *urgent* di tengah tantangan yang dihadapi oleh berbagai faktor. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan menjadi salah satu solusi utama dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Kendala dalam pemakaian sumber daya energi konvensional tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan. Oleh karena itu, peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan menjadi krusial untuk mengurangi jejak karbon dan menciptakan kota yang berkelanjutan.

Tingkat kesadaran yang masih rendah di kalangan para pihak terhadap perubahan dan kelestarian lingkungan menjadi hambatan serius dalam mewujudkan resiliensi. Diperlukan edukasi yang lebih intensif dan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman akan urgensi perlindungan lingkungan.

Di sisi lainnya, kurangnya antisipasi terhadap bencana dan perubahan iklim menjadi risiko yang perlu segera diatasi. Meskipun Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kota Bogor sejak tahun 2015-2022 memiliki tren yang menurun, artinya Kota Bogor relatif aman. Sebagai upaya untuk mengantisipasi bencana yang akan terjadi maka Kota Bogor juga perlu mengembangkan sistem peringatan dini (*early warning system*), infrastruktur tangguh, dan perencanaan tata kota yang adaptif menjadi langkah penting dalam memitigasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan resiliensi bukan hanya sekadar kebutuhan, tetapi juga merupakan investasi dalam menjaga keberlanjutan kota-kota kita di tengah tantangan bencana dan perubahan iklim global yang semakin kompleks.

4. Sistem Ekonomi Sirkuler Perkotaan

Urgensi sistem ekonomi sirkuler perkotaan semakin penting mengingat beberapa kendala yang perlu segera diatasi. Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan. Hal ini karena jumlah timbulan sampah di Kota Bogor setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dengan meningkatkan kesadaran tersebut, dapat tercipta siklus ekonomi yang lebih efisien dengan meminimalkan limbah dan memaksimalkan daur ulang. Namun, tantangan muncul ketika penyediaan sarana dan prasarana persampahan masih belum optimal akibat terbatasnya lahan. Diperlukan upaya serius dalam meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah perkotaan untuk mendukung transisi menuju sistem ekonomi sirkuler.

Selain itu, kinerja pengelolaan sampah yang perlu ditingkatkan juga menjadi perhatian utama. Penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah yang efektif melibatkan peran aktif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Peningkatan inovasi dalam teknologi pengelolaan sampah, seperti penggunaan metode daur ulang yang lebih efisien dan pengurangan sampah di sumbernya, menjadi langkah penting untuk mencapai tujuan ekonomi sirkuler. Oleh karena itu, sistem ekonomi sirkuler Kota Bogor bukan hanya sebuah konsep, tetapi juga sebuah kebutuhan mendesak untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

5. Infrastruktur dan Sistem Transportasi yang Terintegrasi

Urgensi pembenahan infrastruktur dan sistem transportasi yang terintegrasi semakin terasa, terutama di Kota Bogor, seiring dengan peningkatan volume pengguna kendaraan yang belum diimbangi oleh infrastruktur jalan yang memadai. Masalah ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dengan menghambat laju pertumbuhan bisnis dan mobilitas, tetapi juga menciptakan kemacetan yang merugikan kehidupan sehari-hari masyarakat. Kota Bogor, seperti banyak kota lainnya, menghadapi tantangan mobilitas yang kompleks, yang tidak hanya terbatas pada kepadatan lalu lintas, tetapi juga pada kurangnya integrasi dalam sistem transportasi.

Kemacetan yang terus meningkat bukan hanya menghambat produktivitas, tetapi juga berdampak negatif pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur jalan yang disertai dengan pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi menjadi suatu kebutuhan mendesak. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk merancang solusi yang efektif, seperti peningkatan jaringan transportasi umum, pengembangan jalur sepeda, dan penerapan teknologi *smart city* untuk mengelola arus lalu lintas dengan lebih efisien. Hanya dengan infrastruktur dan sistem transportasi yang terintegrasi, Kota Bogor dapat mengatasi tantangan mobilitasnya dan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan nyaman bagi penduduknya.

6. Menuju Transformasi Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Potensial

Indonesia memiliki cita-cita dan tujuan yang diusung dengan tagline “Indonesia Emas 2045”. Indonesia menargetkan di tahun 2045 dapat menjadi negara maju dan memiliki peluang menjadi lima besar ekonomi dunia. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah pusat telah menekankan pentingnya memanfaatkan peluang dengan menggunakan perencanaan, visi, misi, dan strategi. Indonesia berkesempatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi sebagai salah satu potensi dan peluang untuk mencapai visi Indonesia emas di tahun 2045. Selain itu, salah satu hal pokok yang akan menjadi acuan untuk menggapai visi Indonesia Emas 2045 adalah kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan SDM yang bukan hanya unggul dari segi kuantitas tetapi juga dari segi kualitasnya. Profil Indonesia 2045 menjadi peta jalan (*roadmap*) yang harus diimplementasikan oleh seluruh daerah, termasuk Kota Bogor.

Pemerintah Daerah Kota Bogor secara konsisten melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan cita-cita nasional tersebut. Sejalan dengan misi RPJPD Kota Bogor yaitu mewujudkan perekonomian yang produktif dan inklusif. Produktif memiliki makna pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang tinggi sedangkan inklusif memiliki makna bahwa Pemerintah Daerah Kota Bogor tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga pemerataan ekonomi.

Pemerintah pusat mengarahkan transformasi ekonomi yang berfokus pada peningkatan daya saing internasional yang berkelanjutan. Transformasi ekonomi menjadi prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan. Dalam konteks ini, Kota Bogor akan bertransformasi melalui pengembangan sektor ekonomi potensial. Pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki. Akan tetapi, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi Kota Bogor dalam mencapai target perekonomiannya, antara lain belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya ekonomi potensial, dampak pemindahan ibukota negara terhadap perekonomian Kota Bogor, masih tingginya ketimpangan ekonomi dan angka pengangguran, pemanfaatan IPTEK dan teknologi informasi di bidang ekonomi yang perlu ditingkatkan, produktivitas dan integrasi rantai nilai yang belum optimal, serta penguatan kecukupan dan ketersediaan pangan.

Kota Bogor memiliki persoalan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya ekonomi potensial ditunjukkan dengan adanya 4 sektor yang memiliki pertumbuhan lambat dengan daya saing yang kurang baik pada profil pertumbuhan sektor ekonomi di Kota Bogor. Sektor-sektor tersebut antara lain, sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan; sektor Pertambangan & Penggalian; sektor Jasa Keuangan & Asuransi; serta sektor Adm Pemerintah, Pertahanan & Jamsos. Akan tetapi, jika dilihat dari analisis LQ Kota Bogor menunjukkan bahwa terdapat 14 sektor yang menjadi sektor basis. Sektor basis terbesar yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, dan sektor-sektor jasa seperti sektor perusahaan, keuangan, transportasi, kesehatan dan kegiatan sosial. Selain itu, Kota Bogor juga perlu mempertimbangkan upaya mempersiapkan transformasi di bidang ekonomi dengan mengoptimalkan kinerja UMKM dan ekonomi kreatif di masa mendatang.

Masih tingginya ketimpangan ekonomi dan angka pengangguran menjadi persoalan lain di Kota Bogor mengingat upaya pemerintah daerah yang tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga pemerataan ekonomi. Kota Bogor selama tahun 2011 – 2022 dikategorikan memiliki ketimpangan rendah dan sedang dengan tren yang cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2022, gini ratio Kota Bogor sebesar 0.43. Permasalahan ketimpangan salah satunya dipicu oleh produktivitas tenaga kerja Kota Bogor yang masih rendah. Sementara itu, tingginya angka pengangguran terlihat dari capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bogor selama tahun 2010 – 2022 menunjukkan besaran yang sangat tinggi. Capaiannya selalu lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Jawa Barat dan termasuk ke dalam 3 wilayah dengan TPT tertinggi di Jawa Barat pada tahun 2022. Capaian TPT Kota Bogor pada tahun 2022 yaitu sebesar 10.78 persen. Dalam mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kota Bogor perlu berfokus pada peningkatan daya saing UMKM serta ekonomi kreatif agar mampu menciptakan lapangan kerja baru mengingat peluang kerja di sektor-sektor industri pengolahan dan jasa lainnya masih sangat terbatas.

Persoalan lainnya yaitu produktivitas dan integrasi rantai nilai yang belum optimal di Kota Bogor terlihat dari data *share* net ekspor terhadap PDRB yang bernilai negatif. Selain itu, masih perlunya penguatan kecukupan dan ketersediaan pangan di Kota Bogor. Transformasi ekonomi dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan pengembangan sektor ekonomi potensial yang didukung dengan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan yang berkualitas sehingga memiliki daya saing tinggi. Melalui kemampuan ini, Kota Bogor dapat memecahkan berbagai persoalan khususnya persoalan ekonomi dan mampu menghadapi tantangan di masa depan sebagai rangkaian upaya dalam mencapai cita-cita nasional.

7. Tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif berorientasi pelayanan publik

Wilayah Kota Bogor yang luas dengan jumlah penduduk yang besar merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan daerah yang kian kompleks. Pelaksanaan birokrasi pemerintahan yang terikat dengan seperangkat regulasi juga dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat karena orientasi utama pelaksanaan pemerintahan adalah pelayanan prima kepada masyarakat. Kolaborasi dan partisipasi menjadi dua hal yang harus ada dalam pengelolaan daerah seiring dengan meningkatnya dinamisme kehidupan masyarakat.

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan selalu masuk dan menjadi isu strategis yang dicermati oleh setiap pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025 – 2045, kualitas tata kelola pemerintahan juga menjadi hal yang dicermati dengan seksama. Dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola, dikembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Bidang tata kelola Kota Bogor telah menunjukkan capaian kinerja yang baik. Penyelenggaraan pemerintah berbasis sistem informasi perlu dioptimalkan. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator tata kelola pemerintahan Kota Bogor yang telah mencapai penilaian tinggi namun masih disertai beberapa catatan sehingga dapat ditingkatkan lagi. Salah satu indikator capaian tersebut misalnya indeks (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) SPBE sebesar 3,3. SPBE merupakan indikator penilaian penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat (pengguna SPBE). SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Capaian SPBE Kota Bogor pada tahun 2022 sebesar 3,3 dari 5 yang berarti bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, Kota Bogor masuk dalam predikat baik. Capaian tersebut lebih tinggi dibanding capaian nasional sebesar 2,34 (cukup). Namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian SPBE daerah sekitar, Kota Bogor masih tertinggal. Kota Depok dan Jakarta, pada tahun yang sama berhasil menjadi daerah dengan penerapan SPBE terbaik di Indonesia. Sebagaimana fase implementasi SPBE Nasional, tahun 2022 merupakan fase penguatan layanan SPBE untuk kemudian masuk ke dalam fase implementasi selanjutnya yaitu penguatan infrastruktur SPBE, sehingga dalam hal ini, Kota Bogor juga perlu meningkatkan tata kelola untuk mencapai indeks SPBE yang lebih tinggi di tahun 2023.

BAB 4. VISI DAN MISI DAERAH



RPJPD Kota Bogor
2025-2045

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Perumusan atas Visi, Misi Pembangunan Kota Bogor 20 tahun yang akan datang (2025-2045), telah melalui tahapan analisis dan forum diskusi terbatas melalui Focus Group Discussion (FGD) atas kondisi potensi atau modal dasar, permasalahan, ancaman dan peluang pembangunan Kota Bogor sampai tahun 2023 dan juga telaah pada dokumen pembangunan di level nasional maupu regional. Perumusan visi sebagai suatu pernyataan cita-cita atau impian Kota Bogor di masa depan guna menjamin kelestarian dan tujuan jangka panjang serta dilakukan dengan pendekatan teknokratik dan partisipatif.

4.1. Visi Daerah

Visi Nasional Indonesia

Visi Negara Indonesia Tahun 2025-2045 mengusung Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan sebagai fokus pada aspek utama pembangunan negara.



Gambar 4.1. Visi RPJPN 2025-2045

Nusantara yang Berdaulat:

1. **Ketahanan**: merujuk pada kemampuan suatu negara untuk melindungi dirinya dari ancaman dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan nasional mencakup berbagai aspek, seperti pertahanan militer, keamanan energi, keamanan pangan, serta ketahanan ekonomi dan sosial.
2. **Kesatuan**: merupakan prinsip penting yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat dalam suatu negara. Ini mencakup pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa dalam bingkai identitas nasional yang bersama.
3. **Mandiri**: ekonomi menekankan pentingnya negara untuk mengembangkan kemampuan produksi dan manajemen ekonomi secara mandiri, tanpa terlalu tergantung pada negara

lain. Hal ini termasuk pengembangan industri dalam negeri, kebijakan perdagangan yang cerdas, serta investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi.

4. Aman: merujuk pada kondisi di mana negara terbebas dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat mengganggu stabilitas, kedaulatan, dan keamanan masyarakat. Ini mencakup keamanan dalam arti luas, termasuk keamanan fisik, keamanan ekonomi, keamanan politik, dan keamanan lingkungan.

Nusantara yang Maju:

1. Berdaya: merujuk pada kekuatan dan kemampuan suatu negara untuk mencapai tujuan-tujuan strategis dan menghadapi tantangan-tantangan dengan efektif. Ini mencakup kekuatan ekonomi, politik, pertahanan, dan budaya yang menjadi dasar bagi keberhasilan suatu negara dalam mewujudkan aspirasi dan kepentingannya.
2. Modern: mengadopsi teknologi dan inovasi terkini dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Modernitas ini tidak hanya dalam konteks teknologi, tetapi juga dalam hal cara berpikir, sistem tata kelola, dan nilai-nilai yang mengakomodasi perkembangan zaman.
3. Tangguh: bertahan dan mengatasi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Negara yang tangguh memiliki kekuatan dan ketahanan yang kuat dalam menghadapi berbagai macam tekanan dan krisis, serta mampu bangkit kembali dengan cepat setelah mengalami kesulitan.
4. Inovatif: menciptakan dan mengadopsi ide-ide baru serta teknologi-teknologi terkini untuk meningkatkan kualitas hidup, memperkuat ekonomi, dan memecahkan masalah-masalah kompleks. Negara yang inovatif mendorong perkembangan pengetahuan dan teknologi sebagai landasan bagi pertumbuhan berkelanjutan.
5. Adil: menekankan pentingnya keadilan sosial, ekonomi, dan politik bagi semua warga negara. Negara yang adil memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, serta menegakkan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan distribusi yang merata atas kekayaan dan kesempatan.

Nusantara yang Keberlanjutan:

Konsep pembangunan lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan mencerminkan kesadaran akan pentingnya mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang konsep ini:

1. Pembangunan Ekonomi: pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, di mana semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Pendekatan ini mengutamakan penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, diversifikasi ekonomi, dan pengentasan kemiskinan sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi yang lestari.
2. Pembangunan Sosial: Fokus pada kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup seluruh warga negara. Hal ini meliputi akses yang lebih luas terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, perumahan yang layak, dan kesetaraan gender. Pembangunan sosial yang lestari menempatkan manusia sebagai pusat

pembangunan, memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan adil dan merata.

3. **Pelestarian Lingkungan:** Mengutamakan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Hal ini termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah yang efisien, pelestarian ekosistem alam, dan upaya untuk membangun ketahanan terhadap perubahan iklim. Pembangunan yang lestari memperhitungkan dampak lingkungan dari setiap keputusan pembangunan.

Secara keseluruhan, visi "Negara Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan" mencakup aspirasi untuk membangun negara yang kuat secara politik, ekonomi, dan sosial, sambil memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keberagaman budaya. Implementasi visi Indonesia dijabarkan menjadi "Visi Indonesia Emas 2045" dengan mempertimbangkan modal dasar (kependudukan, modal dasar social-budaya, kekayaan alam serta kekuatan maritim, megatren global, perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya

Misi Nasional



Gambar 4.2. 8 Misi Pembangunan Negara Indonesia 2025-2045

8 Misi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. Kesenambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Visi Regional Provinsi Jawa Barat



Gambar 4.3. Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045

1. Termaju: Tingkat perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya yaitu:
 - Sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil pertanian yang subur, tambang mineral yang kaya, atau potensi pariwisata yang menarik.
 - Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan.

- Investasi dalam infrastruktur yang baik, seperti jaringan transportasi yang modern, energi yang handal, dan akses internet yang luas, dapat meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
 - Memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang terjangkau.
 - Menerapkan kebijakan pembangunan yang efektif dan berorientasi pada hasil, termasuk dalam hal investasi sektor-sektor strategis, pengembangan potensi lokal, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Berdaya Saing Dunia: Memiliki keunggulan kompetitif dalam bidang ekonomi, teknologi dan inovasi, sumberdaya manusia, serta infrastruktur dalam jangka panjang yaitu:
- Keunggulan kompetitif dalam bidang ekonomi mencakup kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah atau kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai faktor, seperti produktivitas yang tinggi, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, akses yang luas terhadap pasar global, serta kebijakan yang mendukung investasi dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang strategis di Provinsi Jawa Barat.
 - Teknologi dan inovasi mampu menciptakan nilai tambah melalui penemuan baru, pengembangan produk dan layanan yang inovatif, serta penerapan teknologi terkini dalam berbagai sektor ekonomi. Ini mencakup investasi dalam riset dan pengembangan, kerjasama antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah, serta dukungan terhadap kewirausahaan dan ekosistem inovasi yang dinamis di Provinsi Jawa Barat.
 - Sumberdaya Manusia mencakup kualitas, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi dan pembelajaran sepanjang hayat, serta pembangunan kemampuan soft skills seperti kepemimpinan, kreativitas, dan kolaborasi.
 - Infrastruktur dalam Jangka Panjang mencakup akses yang lancar terhadap transportasi, energi, komunikasi, dan teknologi informasi, serta fasilitas publik yang berkualitas. Investasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang modern dan efisien menjadi kunci untuk menjaga daya saing suatu negara dalam jangka panjang.
3. Berkelanjutan: Kelestarian sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik, untuk keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang

Untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang di Provinsi Jawa Barat, diperlukan pendekatan yang berkelanjutan dan holistik dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan, praktik pertanian dan industri yang berkelanjutan, pengurangan emisi gas rumah kaca, investasi dalam energi terbarukan, perlindungan habitat alami, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan. Dengan mengutamakan kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, dapat dipastikan bahwa pembangunan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Misi Provinsi Jawa Barat

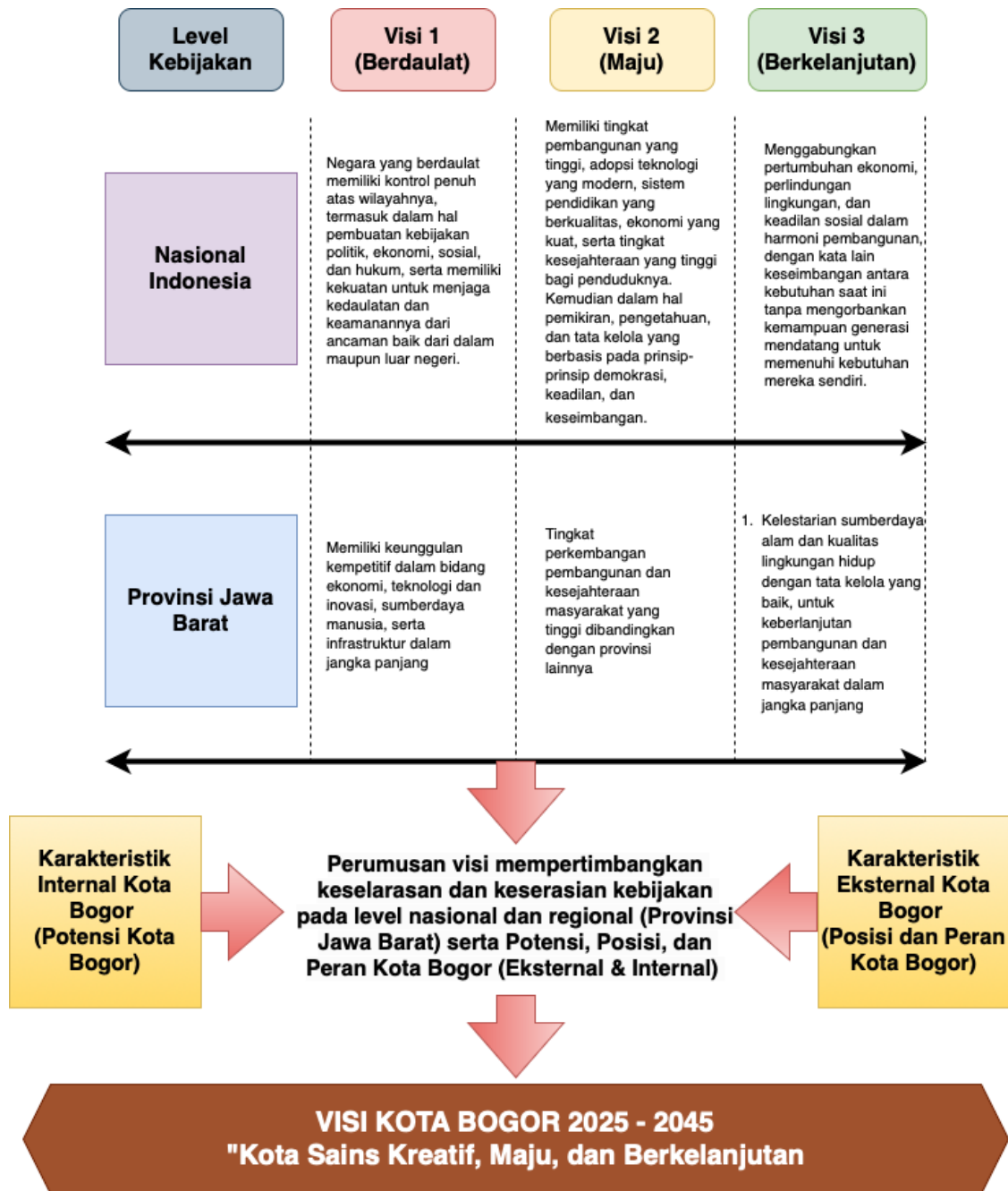


Gambar 4.4. Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045

8 Misi Provinsi Jawa Barat

1. Mengembangkan sumberdaya manusia yang berakhlak dan berdaya saing
2. Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Memperkuat tata kelola yang dinamis, berkualitas, dan inovatif untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas.
4. Mewujudkan provinsi yang bersih dan akuntabel serta menjaga stabilitas ekonomi.
5. Mewujudkan masyarakat yang madani, berbudaya, maju, dan peduli lingkungan dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. Meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.
7. Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas
8. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Berdasarkan visi nasional Indonesia dan Provinsi Jawa Barat, serta mengenali karakteristik potensi wilayah (modal dasar) Kota Bogor kedepan, diperoleh sintesa keterkaitan penerjemaahan visi dan misi nasional serta Provinsi Jawa Barat dengan visi dan misi Kota Bogor kedepan yaitu sebagai berikut:



Gambar 4.5. Alur Perumusan Visi Kota Bogor Tahun 2025-2045

Visi daerah adalah kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan dalam 20 tahun mendatang. Perumusan visi mempertimbangkan keselarasan dan keserasian kebijakan pada level nasional dan regional (provinsi Jawa Barat) serta faktor internal (modal dasar dan kelemahan), faktor eksternal (peluang dan tantangan), menggambarkan nilai-nilai kunci yang perlu dilaksanakan, serta didasarkan pada permasalahan utama dan berbagai isu strategis pembangunan. Berdasarkan hasil analisa berbagai isu-isu tersebut, maka ditetapkan Visi Kota Bogor 2025-2045 yaitu sebagai berikut:

“Kota Sains Kreatif, Maju, dan Berkelanjutan”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pada tahun 2045, Kota Bogor memiliki harapan menjadi salah satu kota sains yang mengandalkan potensi ekonomi kreatif untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan dapat menyamai taraf hidup di negara maju dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Pesatnya perkembangan revolusi digital dalam kehidupan sehari-hari turut mendorong adanya inovasi pada sektor ekonomi yang jauh menjadi lebih efektif dan efisien. Tidak terkecuali di Kota Bogor, hal tersebut menumbuhkan ekonomi berbasis kreatif/inovasi yang dapat meningkatkan perekonomian daerah. Untuk terus mengembangkan ekonomi kreatif, Kota Bogor memiliki modal dan keunggulan dalam aspek sumberdaya manusia, talenta dan pendidikan. Salah satu potensi ekonomi kreatif tinggi di Kota Bogor misalnya berkaitan dengan bidang animasi dan perfilman. Keduanya mungkin dikembangkan dengan baik karena di Kota Bogor terdapat Bogor Creative Center yang dapat memfasilitasi kreativitas masyarakat dalam bidang animasi dan perfilman. Penyokong lainnya untuk mencapai ekonomi kreatif berkaitan dengan adanya berbagai lembaga pendidikan dan penelitian yang mendukung, termasuk keberadaan beberapa perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Selain itu, Kota Bogor juga unggul pada indikator kewirausahaan yang didukung pengembangannya oleh perguruan tinggi melalui inkubator bisnis dan kewirausahaan.

Ekonomi Kota Bogor yang berkembang pesat dengan berbagai *highlight* kemajuan dalam berbagai bidang perlu diimbangi dengan penerapan ekonomi keberlanjutan. Hal ini ditandai dengan terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup serta maraknya bencana alam sebagai dampak perubahan iklim global yang salah satunya diakibatkan aktivitas industri dan perekonomian yang masif. Dengan terus berpegang teguh pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), maka pembangunan ekonomi berkelanjutan Kota Bogor dilakukan dengan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan kelestarian lingkungan hidup dan keadilan sosial.

Visi Kota Bogor 2025-2045 sebagai “Kota Sains Kreatif, Maju, dan Berkelanjutan” dijabarkan sebagai berikut:

1. Kota Bogor sebagai Kota Sains Kreatif

Konsep Kota Sains Kreatif umumnya mengacu pada sebuah kota yang memprioritaskan dan mendorong inovasi, kreativitas, dan kemajuan ilmiah sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam visi ini, kota-kota tersebut berperan sebagai pusat yang menginspirasi, mendukung, dan memberdayakan para pemikir, peneliti, dan pengusaha untuk menciptakan solusi-solusi baru yang membawa dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

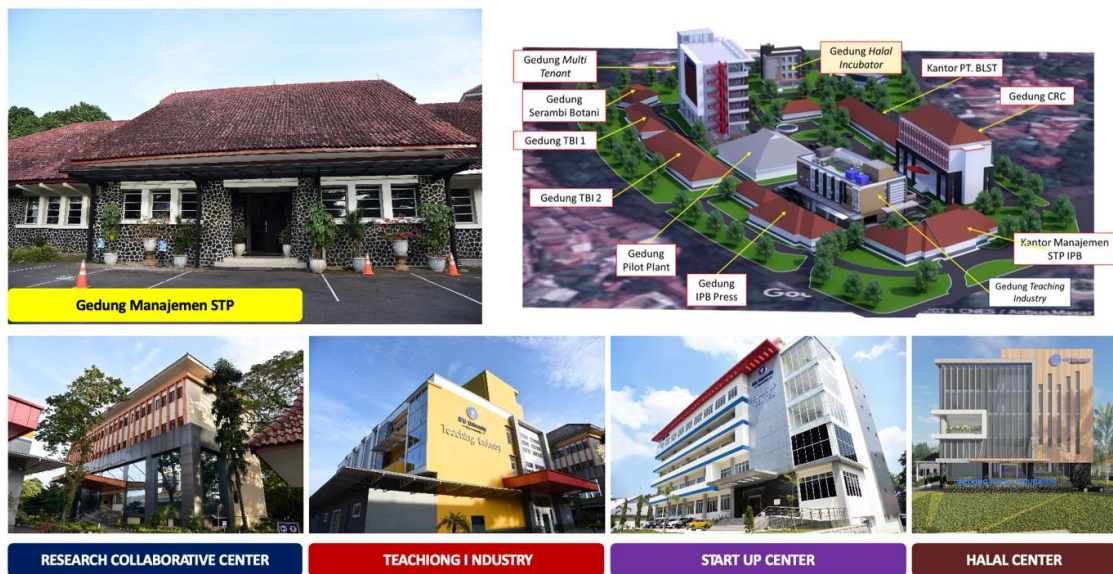
Kota-kota yang mengadopsi konsep ini seringkali berfokus pada menciptakan lingkungan yang mendorong kerjasama antara lembaga-lembaga ilmiah, universitas, industri kreatif, dan bisnis. Mereka menciptakan ruang-ruang kolaboratif, inkubator, dan pusat inovasi untuk memfasilitasi pertukaran ide, penelitian bersama, dan pengembangan produk atau layanan yang inovatif.

Pengembangan Kota Bogor sebagai Kota Sains Kreatif didukung dengan adanya berbagai lembaga penelitian dan perguruan tinggi yang mewadahi dan menunjang perkembangan sains. Langkah ini memastikan adanya akses terhadap pengetahuan dan sumber daya yang diperlukan untuk mendorong inovasi dan penemuan baru.

Selanjutnya, dalam bidang kreativitas, Kota Bogor diunggulkan dengan berbagai potensi yang sudah ada. Selama beberapa tahun terakhir, Kota Bogor telah menunjukkan potensi ekonomi kreatif yang cukup besar, terutama pada subsektor kuliner, kriya, dan fesyen. Potensi ini dapat dimanfaatkan sebagai peluang pengembangan usaha oleh pelaku ekonomi kreatif.

Kreativitas dan inovasi pelaku ekonomi kreatif menjadi kunci dalam menjangkau pasar yang lebih luas dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini. Dengan memanfaatkan platform digital, media sosial, dan teknologi informasi lainnya, mereka dapat meningkatkan visibilitas produk dan layanan mereka serta memperluas jangkauan pasar.

Dengan demikian, ekonomi kreatif Kota Bogor diarahkan untuk terus memegang prinsip kerkeadilan dan berdaya saing menuju masyarakat yang sejahtera, pelayanan publik yang modern, serta sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Hal ini dapat dicapai melalui dukungan dan kolaborasi antara masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian di Kota Bogor. Dengan sinergi yang kuat antara semua pihak, Kota Bogor dapat menjadi pusat inovasi dan kreativitas yang berkelanjutan, memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat lokal dan menyumbang pada pembangunan yang berkelanjutan secara nasional.



Gambar 4.6. Elemen Pendukung Kota Bogor Sebagai Kota Sains Kreatif

Dalam melanjutkan upaya untuk mengembangkan Kota Bogor sebagai Kota Sains Kreatif, beberapa langkah strategis dapat diambil:

- Penguatan Infrastruktur Riset dan Inovasi: Investasi dalam infrastruktur riset dan inovasi seperti laboratorium modern, pusat inovasi, dan inkubator bisnis akan memfasilitasi kolaborasi antara lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan sektor industri. Hal ini akan mempercepat lahirnya ide-ide baru dan produk inovatif.
- Peningkatan Akses Pendidikan dan Pelatihan: Memperluas akses pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri kreatif akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Kota Bogor. Program-program ini dapat mencakup pelatihan keterampilan teknis, manajemen bisnis, dan kewirausahaan.
- Pengembangan Ekosistem Kreatif: Mendorong pertumbuhan ekosistem kreatif dengan menyediakan ruang kerja bersama, galeri seni, pusat pertunjukan, dan pasar kreatif. Hal ini akan memberikan peluang bagi para seniman, desainer, dan pelaku industri kreatif lainnya untuk berkumpul, berkolaborasi, dan memamerkan karya-karya mereka.
- Dukungan Kebijakan dan Regulasi: Membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung perkembangan ekonomi kreatif, termasuk perlindungan hak kekayaan intelektual, insentif pajak, dan fasilitasi perizinan usaha. Kebijakan yang progresif dan ramah-inovasi akan mendorong investasi dan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif.
- Promosi dan Pemasaran Berbasis Teknologi: Memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk mempromosikan produk dan layanan dari sektor ekonomi kreatif Kota Bogor ke pasar lokal, nasional, dan internasional. Hal ini akan membuka peluang ekspansi pasar dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha kreatif.
- Kolaborasi Antar-sektor dan Pihak-pihak Terkait: Mendorong kolaborasi aktif antara sektor publik, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mengembangkan ekonomi kreatif Kota Bogor. Sinergi antara berbagai pihak akan memperkuat upaya bersama untuk mencapai visi Kota Sains Kreatif yang berkelanjutan.

2. Kota Bogor sebagai Kota Maju

Kota Bogor sebagai Kota Maju diwujudkan dalam Kota dengan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi berbasis sains kreatif, masyarakat yang produktif dan kreatif berbasis teknologi serta berdaya saing global, infrastruktur berkualitas (*green and smart infrastructure*) yang terintegrasi dan inklusif, resilien, adaptif dan inovatif. Kota Bogor sebagai *smart city* telah dikembangkan dalam beberapa dimensi, diantaranya:

- 1) *Smart Governance* yang diwujudkan melalui perbaikan pelayanan publik, transparansi, keamanan, dan ketertiban umum;
- 2) *Smart Branding* yang dilakukan melalui penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah secara lokal, nasional, dan global;
- 3) *Smart Economy* melalui berbagai kemudahan untuk meningkatkan peluang usaha, sumber daya dan permodalan;
- 4) *Smart Living* dengan tersedianya lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien;
- 5) *Smart Society* melalui penciptaan ekosistem masyarakat yang humanis, dinamis, produktif, komunikatif, dan interaktif, dan
- 6) *Smart Environment* yang diwujudkan dengan pengendalian polusi, pengelolaan limbah, dan pelestarian alam.

Kota Bogor akan terus dikembangkan menjadi Kota Pintar (*Smart City*) inovatif, tangguh, modern, dan berbudaya dengan mengedepankan pengembangan infrastruktur yang berkualitas (*green and smart infrastructure*) serta sistem transportasi terintegrasi. Hal ini menjadi modal bagi Kota Bogor untuk dapat terus berkembang dan menjamin kemudahan bagi masyarakat Kota Bogor. Selain itu, hal ini dapat menjadi daya tarik bagi Kota Bogor untuk terus mengembangkan perekonomian yang lebih baik dan maju.

3. Kota Bogor sebagai Kota Berkelanjutan

Bogor sebagai salah satu kota di Indonesia yang berkomitmen mendorong pembangunan daerah berkelanjutan berbasis penurunan gas rumah kaca, adaptasi, dan ketahanan pada perubahan iklim. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan daerah yang rendah emisi, meminimalisir dampak negatif pembangunan, dan mereduksi kontribusi kota terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Dalam menjalankan tugas konstitusional membangun Kota Bogor, arah pembangunan perlu diselaraskan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, maju, dan berdaya saing global. Namun demikian, pembangunan yang dilakukan tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup di semua aspek pembangunan.

Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Bogor telah menambah ruang terbuka hijau dengan memperbanyak taman kota, lubang resapan biopori, dan terus mengembangkan desain transportasi ramah lingkungan. Perbaikan layanan transportasi publik terus dilakukan pemerintah Kota Bogor kedepannya sehingga masyarakat nantinya akan nyaman menggunakan transportasi publik. Sehingga, pembangunan yang adil secara sosial dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi masa depan, ekonomi yang tumbuh cepat dan inklusif dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan.

Visi Kota Bogor 2025-2045 perlu dijabarkan lebih lanjut melalui beberapa sasaran misi yang perlu dicapai yaitu (1) Pendapatan per kapita setara negara maju, (2) Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang, (3) Daya saing sumber daya manusia meningkat, dan (4) Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*.

Sasaran pertama, Peningkatan pendapatan per kapita. Sasaran pertama untuk menyamai pendapatan per kapita setara negara maju, dimana pada level nasional ditargetkan sekitar US\$ 23.000 – 30.300 pada tahun 2045 dan masuk dalam lima besar ekonomi di dunia. Kota Bogor memiliki target capaian PDRB per kapita di tahun 2045 sebesar Rp 273,17 – 325,25 juta. Selain itu, peningkatan PDRB per kapita utamanya didorong peningkatan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan sebesar 46,43 – 47,60 % juga didukung dengan Indeks Ekonomi Biru Indonesia yang mencapai 495,56. Dengan kekhasan dan kearifan lokal yang dimiliki Kota Bogor menjadi modal dalam pengembangan sektor industri yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor. Dalam hal ini, pendekatan pengembangan industri yang disesuaikan dengan potensi daerah juga akan dilakukan. Beberapa sentra IKM Kota Bogor yang berpotensi tinggi untuk dikembangkan misalnya alas kaki di Bogor Selatan, kampung batik dan kerajinan, tepung tapioka, pakaian, tape dan sebagainya.

Sasaran kedua adalah Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Sejalan dengan perekonomian yang terus tumbuh dan berkembang, maka kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat Kota Bogor juga terus meningkat. Harapannya, kemiskinan juga akan terus mengalami penurunan, dimana pada level nasional Tingkat kemiskinan di tahun 2045 menuju 0 persen pada kisaran 0,09-0,34 persen. Ketimpangan pendapatan juga akan terus mengalami penurunan dengan rasio gini Kota

Bogor sebesar 0,357 – 0,380.. Semakin berkembangnya ekonomi kreatif dan industri di Kota Bogor juga akan turut meningkatkan kontribusi ekonomi Kota Bogor di level provinsi yang ditunjukkan dengan target kontribusi PDRB Kota Bogor terhadap PDRB Provinsi sebesar 10,77 persen di tahun 2045.

Sasaran ketiga adalah Peningkatan daya saing sumber daya manusia meningkat. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan peningkatan daya saing sumber daya manusia yaitu Indeks Modal Manusia. Indeks ini digunakan sebagai indikator yang mampu menggambarkan kualitas sumberdaya manusia yang terus meningkat dan semakin merata yang dapat ditempuh melalui peningkatan berbagai aktivitas seperti pemerataan pendidikan, pelatihan, pengembangan, sikap dan etos kerja, pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas, serta peningkatan kesehatan masyarakat Kota Bogor. Pada tahun 2045, Kota Bogor ditargetkan memiliki nilai Indeks Modal Manusia sebesar 0,69.

Sasaran keempat adalah Penurunan intensitas emisi GRK menuju *net zero emission*. Sebagai upaya dan komitmen Kota Bogor dalam mendorong Pembangunan berkelanjutan dengan penerapan prinsip ramah lingkungan, Kota Bogor berprinsip untuk menurunkan intensitas emisi GRK. Pada tahun 2045, emisi GRK yang dihasilkan kota Bogor turun menjadi 75,84 persen. Hal ini ditunjukkan sebagai bukti keseriusan dan kontribusi Kota Bogor untuk mendukung *net zero emission* Indonesia pada tahun 2060.

Tabel 4.1. Sasaran Visi Kota Bogor 2025–2045

No	RPJPN 2025–2045				RPJPD PROVINSI 2025–2045				RPJPD KAB/KOTA 2025–2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Sasaran 2025	Sasaran 2045	Sasaran Visi	Indikator	Sasaran 2025	Sasaran 2045	Sasaran Visi	Indikator	Sasaran 2025	Sasaran 2045
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	a. GNI Per Kapita (US\$)	5.500	30.300	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	57,14 – 57,42	273,17 – 325,25	Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB Per Kapita ADHK (Rp Juta Per tahun)	53,23	221,20
		b. Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15		b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	54,65	495,56				
		c. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28		c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	41,15 – 41,38	46,43 – 47,60		c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	18,1	15
										Rasio PDRB Sektor Ekonomi Kreatif	19,18 – 20,26	20,56 – 21,71
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 – 7,0	0,5 – 0,8	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5,35 – 5,85	0,09 – 0,34	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	6,12	2,44
		b. Rasio Gini (indeks)	0,379 – 0,382	0,377 – 0,320		b. Rasio gini (Indeks)	0,419 – 0,425	0,357 – 0,380		Rasio gini (Indeks)	0,41	0,28
		c. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28,5		c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	12,54	10,77		Kontribusi PDRB Kota Bogor terhadap PDRB Provinsi	2,23	2,72
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index(peringkat)	34 (2023)	15 besar	Kerjasama daerah dengan dunia internasional meningkat	Jumlah Kerjasama Internasional	7		Kerjasama daerah dengan dunia internasional meningkat	Jumlah Kerjasama Internasional	NA	30,00
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,54 (2022)	0,73	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,55	0,69	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Pembangunan Manusia	79,15	87,45
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	6,61	75,84	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	5,35	35,21

4.2. Misi Daerah

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh dan Berdaya Saing

Sumber daya manusia memegang peranan krusial dalam kemajuan suatu daerah, melibatkan berbagai pihak seperti pegawai pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat luas. Dalam konteks Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan kualitas SDM dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian pada ketiga elemen ini dalam upaya membangun SDM yang berkualitas di masa depan. Sejalan dengan itu, transformasi masyarakat Kota Bogor tidak hanya mencakup peningkatan kualitas SDM berdasarkan IPM, tetapi juga pengembangan keunggulan dan ketahanan melalui kurikulum pendidikan yang berfokus pada sains, teknologi, seni, dan inovasi. Hal ini juga melibatkan pemerataan sarana kesehatan, pengurangan kemiskinan, pengendalian penyakit, dan sistem perlindungan sosial yang responsif terhadap perubahan global. Diharapkan, SDM yang terbentuk dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, serta berkontribusi pada pembangunan wilayahnya melalui berbagai aktivitas yang mendukung. Pada akhirnya, SDM Kota Bogor diharapkan memiliki pengetahuan dan teknologi terkini yang produktif, kreatif, inovatif, dan mampu bersaing secara global.

2. Mewujudkan Perekonomian yang Produktif dan Inklusif

Perkembangan ekonomi adalah elemen yang sangat penting dalam mencapai visi Kota Bogor sebagai pusat yang kreatif, maju, berkelanjutan, dan berbasis ilmu pengetahuan. Namun, pembangunan ekonomi yang bermutu haruslah terintegrasi dengan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, Kota Bogor berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memprioritaskan manajemen sumber daya lokal dan memanfaatkan pengetahuan, ilmu pengetahuan, inovasi, dan kreativitas yang tinggi. Upaya ini melibatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, yang akan secara langsung berdampak pada peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh serta wilayahnya.

3. Memperkuat Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas, dan Inovatif

Tata kelola pemerintahan merupakan fondasi penting dalam proses pembangunan, terutama dalam mendukung segala bentuk transformasi yang ada. Kota Bogor berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan memiliki dampak terhadap percepatan kualitas pembangunan Kota Bogor secara signifikan. Tata kelola pemerintahan yang dinamis, berkualitas, dan inovatif akan memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat dan menjadi komponen pendorong penting bagi terwujudnya Kota Bogor sebagai kota sains, kreatif, maju dan berkelanjutan.

4. Mewujudkan Kota yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi

Perkuatan stabilitas ekonomi makro Kota Bogor diwujudkan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam tata kelola pemerintahan. Melibatkan peningkatan sistem pengawasan, penerapan standar etika dan integritas, serta partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini upaya penegakan hukum di Kota Bogor yang adil dan efektif, maka ditekankan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, termasuk penindakan terhadap pelanggaran lingkungan, izin, dan kejahatan ekonomi lainnya yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan

sosial. Pengembangan program pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, seperti pengelolaan sampah dan penghijauan kota, serta peningkatan infrastruktur dasar seperti transportasi, air bersih, dan listrik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, juga menjadi prioritas utama bagi pembangunan Kota Bogor kedepannya, yang kemudian melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengawasi program pembangunan.

5. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi

Dorongan diberikan pada pertumbuhan ekosistem kreatif yang inklusif dan beragam, yang melibatkan seniman, desainer, pengembang permainan, dan profesional kreatif lainnya, dengan menyediakan ruang kerja bersama, akses ke modal dan pelatihan, serta mempromosikan kolaborasi lintas-sektor. Peningkatan pendidikan budaya local serta teknologi dan keterampilan digital di kalangan penduduk Kota Bogor dilakukan untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dan peluang di era ekonomi berbasis pengetahuan, termasuk program pelatihan bagi semua kelompok usia. Infrastruktur teknologi diperbaharui untuk mendukung inovasi dan konektivitas digital di seluruh kota, dengan peningkatan jaringan internet dan aksesibilitas perangkat teknologi, serta pendirian pusat-pusat inovasi teknologi. Prinsip-prinsip inklusivitas dan keadilan sosial dipegang teguh dalam setiap tahap pembangunan kota, termasuk akses terhadap layanan dasar, perumahan yang terjangkau, dan kesempatan kerja yang adil.

6. Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Inklusif

Meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif dilakukan dengan menjamin kesetaraan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan jalan raya bagi seluruh masyarakat Kota Bogor. Membangun sistem transportasi publik yang efisien, terpadu, dan terjangkau, termasuk jaringan bus, KRL, LRT yang menghubungkan berbagai wilayah disekitar Jabodetabek. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, meningkatkan mobilitas penduduk, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Fokus pada industri sains dan kreatif, untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah. Pembangunan ruang publik yang ramah lingkungan dan inklusif, seperti taman bermain *dan science technology park* (STP), di seluruh wilayah Kota Bogor bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk dan mempromosikan interaksi sosial. Penguatan infrastruktur kesehatan dan pendidikan dengan membangun pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, sekolah, dan universitas di berbagai wilayah Kota Bogor untuk meningkatkan akses terhadap layanan berkualitas. Perluasan jaringan telekomunikasi dan internet di seluruh wilayah Kota Bogor untuk mendukung konektivitas digital dan akses terhadap informasi dan teknologi. Pembangunan infrastruktur teknologi, seperti pusat data dan laboratorium riset, untuk mendukung industri sains dan kreatif di Kota Bogor. Penerapan prinsip penataan ruang yang berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan Kota Bogor, termasuk pengembangan kawasan hijau, pengendalian pertumbuhan perkotaan, dan mitigasi risiko bencana.

7. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas

Memastikan akses yang merata terhadap sarana prasarana pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, persampahan, dan jalan raya di seluruh wilayah Kota Bogor. Menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pendidikan berkualitas dari tingkat prasekolah hingga perguruan tinggi di seluruh

wilayah Kota Bogor, mencakup pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah, fasilitas pendukung pembelajaran seperti laboratorium, perpustakaan, dan sarana olahraga, serta pengadaan peralatan pendukung pembelajaran digital. Meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dengan membangun pusat kesehatan masyarakat, klinik kesehatan, dan rumah sakit yang terjangkau di berbagai wilayah Kota Bogor, termasuk pelatihan tenaga medis dan penyediaan peralatan medis yang memadai.

8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan

Dalam jangka pendek, pembangunan seringkali dilihat dari mengejar pertumbuhan nilai ekonomi. Namun, dalam jangka panjang, kualitas lingkungan akan menentukan kualitas dan keberlanjutan suatu pembangunan wilayah itu sendiri. Keberlanjutan suatu pembangunan termasuk lingkungan didalamnya menjadi fokus utama agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik, lancar dan sesuai dengan yang diharapkan sehingga dapat mewujudkan keseimbangan antara penggunaan sumber daya alam dan keberlangsungan pembangunan. Kota Bogor berupaya memanfaatkan sumber daya alam secara optimal untuk pembangunan di berbagai sektor dengan tetap menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Upaya ini dilakukan dengan peningkatan kesadaran semua pemangku kepentingan dan melibatkan teknologi terkini. Selain itu, pengembangan sektor energi yang lebih ramah lingkungan maupun pemanfaatan energi baru dan terbarukan, yang sejauh ini belum tereksplorasi, diharapkan dapat mewujudkan peningkatan ekonomi Kota Bogor yang berdaya saing dengan tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan.

BAB 5. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK



RPJPD Kota Bogor
2025-2045

5.1. Arah Kebijakan

Visi dan misi perencanaan pembangunan Kota Bogor dalam periode 20 tahun diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan. Sasaran pokok periode 20 tahun dijabarkan dalam arah kebijakan periode jangka menengah atau 5 (lima) tahunan. Selanjutnya dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi perencanaan pembangunan Kota Bogor maka dijabarkan dengan arah kebijakan periodik yang terbagi menjadi periode I (2025-2029), periode II (2030-2034), periode III (2035-2039), periode IV (2040-2045) sehingga visi Kota Bogor sebagai Kota Sains Kreatif, Maju dan Berkelanjutan dapat terwujud.

A. Arah Kebijakan Kota Bogor Periode I (2025-2029)

Dalam periode I, pembangunan Kota Bogor akan diarahkan pada *“Penguatan fondasi pembangunan dalam mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Sains Kreatif, Maju dan Berkelanjutan”*. Arah kebijakan yang ditetapkan bertujuan mendukung terselenggaranya masing-masing Misi pembangunan Kota Bogor.

Dalam mewujudkan Misi 1 yaitu Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Tangguh dan Berdayasaing, arah kebijakan ditujukan dalam peningkatan kualitas pendidikan bagi sumberdaya manusia di Kota Bogor melalui penumbuhan budaya masyarakat pendukung pengembangan Kota Sains Kreatif. Pada periode ini juga ditujukan pada peningkatan rata-rata lama sekolah wajib pendidikan 13 tahun juga pemerataan pendidikan formal maupun non formal. Pembangunan pendidikan dasar diarahkan sesuai dengan visi daerah diantaranya dengan pengembangan kurikulum sains kreatif. Berikutnya adalah Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi khususnya industri ekonomi kreatif dan jasa serta keterkaitan dengan DUDI; Pendirian lembaga pendidikan yang berorientasi pada *design thinking*. Selain peningkatan kualitas pendidikan, arah kebijakan juga ditujukan pada peningkatan kualitas kesehatan di Kota Bogor melalui pemerataan sarana prasarana kesehatan dan akses kesehatan bagi masyarakat Kota Bogor. Peningkatan kualitas bagi masyarakat kota Bogor juga diarahkan melalui pengendalian penyakit menular seperti TBC, HIV juga percepatan penurunan stunting. Perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal menjadi salah satu arah kebijakan pada periode ini untuk dapat mewujudkan sumberdaya manusia Kota Bogor yang tangguh dan berdaya saing.

Dalam mewujudkan Misi 2, yaitu Mewujudkan perekonomian yang produktif dan inklusif memiliki arah kebijakan fokus pada pemantapan fondasi perekonomian. Penguatan struktur ekonomi khususnya pada sektor-sektor strategis dan potensial Industri jasa berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi fokus pada i) penguatan pengembangan pariwisata dengan Konsep Hub Kebudayaan dan Industri sains Kreatif (*Cultural Hub and Creative Science Industry (CCI)*), ii) peningkatan produktivitas sektor-sektor jasa dan UMKM berbasis produk lokal unggulan, ii) mendorong ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi utama menjadi barometer ekonomi kreatif nasional, dan iii) Memperkuat Kota Bogor sebagai MICE CITY (*Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions*). Berikutnya yaitu peningkatan *up-skilling* dan *re-skilling* SDM industri ekonomi kreatif, pariwisata, serta kemampuan digital; memperkuat pelaksanaan *smart economy* melalui pemanfaatan TI dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing (*city branding*); Industrialisasi koperasi melalui penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi; peningkatan produktivitas BUMD; penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique & high-value economy*), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal guna memperluas kesempatan kerja termasuk pekerja perempuan. Penguatan kapasitas riset dan inovasi terapan berbasis sains dibidang

ekonomi fokus pada i) peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung penelitian terapan, ii) peningkatan kelembagaan dan kualitas SDM peneliti, iii) pengembangan platform diseminasi produk penelitian dan inovasi terapan, iv) inisiasi *innovation valley* Kota Bogor, dan v) penguatan linkages dan kolaborasi lembaga-lembaga penelitian, lembaga pendidikan tinggi, komunitas sains kreatif beserta seluruh elemen pendukung sains kreatif di Kota Bogor- *University Town*. Pengembangan *Transit Oriented Development* (TOD) dan transportasi hijau termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan yang andal, berkelanjutan, dan terintegrasi serta Pengembangan perkotaan yang cerdas, lestari, dan berkelanjutan difokuskan pada penyediaan akses layanan publik yang inklusif, penggunaan *Internet of Things* (IoT), penerapan *smart city* dan ekonomi sirkuler.

Arah kebijakan dalam pencapaian Misi 3, yaitu Menguatkan Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas dan Inovatif fokus pada i) Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan termasuk penyusunan *roadmap* Sains kreatif, ii) Menguatkan Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas dan Inovatif, iii) Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju *smart government*; iv) Reformulasi dan penyempurnaan berbagai kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik; v) Peningkatan kualitas ASN berbasis merit yang berintegritas, inovatif dan profesional; vi) Pembentukan *design council* sebagai lembaga kesatuan pembuat dan penentu kebijakan tata kelola pemerintahan; vii) Penguatan kapasitas masyarakat sipil.

Misi 4, yaitu Mewujudkan Kota yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi diwujudkan melalui i) Penyempurnaan fondasi penataan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. ii) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; iii) Penguatan pengendalian inflasi daerah dan iv) Inisiasi kerjasama multi helix melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, NGO, media massa dan Masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan khususnya dalam sains kreatif.

Misi 5, yaitu Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi ini diwujudkan melalui Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila, penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan, pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan hidup ruang kota, peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air, peningkatan kualitas dan pemenuhan akses sanitasi yang layak, pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*, percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan, pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi, serta perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim.

Misi 6, yaitu Meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif diwujudkan melalui Penyediaan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan

kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan bertaraf global (*global city*), penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri kreatif, penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri, pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi, penyediaan infrastruktur penunjang sains kreatif, pembangunan inkubator bisnis industri kreatif, pengembangan area kreatif dan distrik inovasi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan, serta pengembangan fasilitas sekolah berbasis sains kreatif dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat pertama.

Misi 7, yaitu Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas yang diwujudkan melalui pengembangan perumahan dan permukiman yang layak dan aman, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata, penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja, pelajar, dan mahasiswa; dan pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja, pelajar, dan mahasiswa, pengembangan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan, serta peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah.

Misi 8, yaitu Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang diwujudkan melalui pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis, pengembangan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah, serta penguatan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

B. Arah Kebijakan Kota Bogor Periode II (2030-2034)

Dalam periode II, pembangunan Kota Bogor akan diarahkan pada "*Percepatan ekosistem pembangunan (accelerate ecosystem development)*". Arah kebijakan yang ditetapkan bertujuan mendukung terselenggaranya masing-masing misi pembangunan Kota Bogor. Dalam mewujudkan Misi 1, Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Tangguh dan Berdayasaing, arah kebijakan Kota Bogor dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu melalui penguatan sistem penjaminan mutu dan tata kelola pendidikan daerah. Keterlibatan orang tua, masyarakat dan sekolah dalam pengembangan kecerdasan spiritual, akhlak dan sosial sangat penting bagi peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan juga diarahkan pada penguatan peran pendidikan tinggi dengan memperkuat sistem pembelajaran berbasis outcome dan pendekatan multidisiplin; pemantapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system; pemantapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system; Selain pendidikan, kualitas kesehatan perlu diperhatikan dalam perwujudan misi pembangunan pada periode ini dimana adanya peningkatan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat termasuk pengurangan waktu tunggu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam aspek sosial, pada periode ini tetap berfokus pada pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat terutama kelompok anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan dan penduduk rentan lainnya.

Misi 2, yaitu Mewujudkan Perekonomian yang Produktif dan Inklusif pada periode pembangunan ini dilakukan dengan pengembangan kawasan strategis pariwisata, percepatan pembangunan ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif, peningkatan daya saing produk serta efisiensi usaha, mendorong percepatan smart economy, serta peningkatan ekosistem riset dan inovasi bagi ekonomi kreatif. Berikutnya adalah i) peningkatan daya saing industri konten berbasis hak kekayaan budaya dan intelektual; ii) Peningkatan daya saing industri konten berbasis hak kekayaan budaya dan intelektual; iii) Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif antara lain melalui pembentukan lembaga

pengembangan dan pengelolaan kekayaan intelektual, serta kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat Kota; iv) Peningkatan ekosistem riset dan inovasi terapan berbasis sains kreatif fokus pada i) peningkatan linkage berbagai hasil penelitian dengan dunia industri dan dunia usaha (DUDI), ii) mendorong tumbuhnya startup, ii) pengembangan *teaching industry*, iii) penyelenggaraan event-event (*industry matching* dan *industry sains summit*) berskala nasional dan internasional, dan iv) penguatan *Innovation valley* Kota Bogor dan v) Peningkatan ekosistem riset dan inovasi terapan berbasis sains kreatif fokus pada i) peningkatan linkage berbagai hasil penelitian dengan dunia industri dan dunia usaha (DUDI), ii) mendorong tumbuhnya startup, ii) pengembangan *teaching industry*, iii) penyelenggaraan event-event (*industry matching dan industry sains summit*) berskala nasional dan internasional, dan iv) penguatan *Innovation valley* Kota Bogor. Beberapa kebijakan yang tetap dilaksanakan sebagai lanjutan dari periode sebelumnya yaitu peningkatan up-skilling SDM ekonomi kreatif di Kota Bogor, perluasan jaringan pasar nasional dan global, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif, Penguatan ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique & high-value economy*), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal guna memperluas kesempatan kerja termasuk pekerja perempuan.

Arah kebijakan bagi terwujudnya Misi 3, yaitu mewujudkan tatakelola yang baik pada periode ini mencakup pemantapan implementasi smart government, penciptaan kelembagaan yang kolaboratif, pengaplikasian inovasi daerah; meningkatkan kualitas SDM ASN; optimalisasi pembiayaan serta penyederhanaan regulasi berbasis IT;

Misi 4, yaitu Mewujudkan Kota yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi diwujudkan melalui Penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi serta melanjutkan berbagai kebijakan strategis yaitu i) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; ii) Penguatan pengendalian inflasi daerah dan iii) Inisiasi kerjasama multi helix melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, NGO, media massa dan Masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan khususnya dalam sains kreatif.

Misi 5, yaitu mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi ini diwujudkan melalui penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila, penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan, pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan hidup ruang kota, peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air, peningkatan kualitas dan pemenuhan akses sanitasi yang layak, percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan, pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi, serta perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim.

Misi 6, yaitu meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif yang diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan bertaraf global (*global city*), penyediaan

infrastruktur penunjang aktivitas industri kreatif, penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri, pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi, peningkatan infrastruktur penunjang sains kreatif, peningkatan inkubator bisnis industri kreatif, pengembangan area kreatif dan distrik inovasi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan, sertapeningkatan fasilitas sekolah berbasis sains kreatif mulai dari tingkat dasar hingga tingkat pertama.

Misi 7, mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas yang diwujudkan melalui peningkatan perumahan dan permukiman yang layak dan aman, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata, peningkatan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja, pelajar, dan mahasiswa; dan pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja, pelajar, dan mahasiswa, peningkatan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan, serta pengembangan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Misi 8, yaitu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang diwujudkan melalui akselerasi pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis, peningkatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah, serta peningkatan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

C. Kebijakan Kota Bogor Periode III (2035-2039)

Dalam periode III, pembangunan Kota Bogor akan diarahkan pada *"Pemantapan kinerja pembangunan di segala bidang pembangunan dan ekspansi global (excellent performance development)"*. Arah kebijakan yang ditetapkan bertujuan mendukung terselenggaranya masing-masing misi pembangunan Kota Bogor. Misi 1, pada periode III ini diwujudkan melalui kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan berupa peningkatan daya saing dan prestasi siswa baik di lingkup nasional amupun internasional. Selebihkan kebijakan yang dilakukan merupakan kebijakan yang sama dengan periode sebelumnya seperti pelibatan tri pusat pendidikan dalam pengembangan kecerdasan siswa, penguatan pendidikan dengan fokus pada outcome dan pendekatan multidisiplin, perluasan dan pembudayaan perilaku hidup sehat, pemerataan sarana prasarana kesehatan dan pelayanan yang lebih responsif bagi pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat. Perlindungan sosial tetap menjadi kebijakan dalam pembangunan Kota Bogor, terutama dalam meningkatkan keterampilan dan produktivitas lansia melalui pendidikan sepanjang hayat.

Misi 2, pada periode III diwujudkan dengan arah kebijakan yang sama dengan periode sebelumnya, kecuali beberapa hal yang dirasa perlu ditingkatkanPemantapan pengembangan kawasan pariwisata yang terintegrasi (cultural & heritage tourism, ecotourism, dan industri ekonomi kreatif); Perluasan jaringan pasar domestik dan global serta penguatan kontribusi pada rantai nilai nasional dan global (National and Global Value Chain); Perluasan jaringan pasar domestik dan global serta penguatan kontribusi pada rantai nilai nasional dan global (National and Global Value Chain).

Misi 3, fokus pada berbagai arah kebijakan i) Pemantapan kelembagaan pemerintah yang adaptif, inovatif dan kolaboratif; ii) Pemantapan kelembagaan pemerintah yang adaptif, inovatif dan kolaboratif; iii) Pemantapan kelembagaan pemerintah yang adaptif, inovatif dan kolaboratif; iv) Misi 4, fokus pada berbagai arah kebijakan i) Pemantapan kelembagaan pemerintah yang adaptif, inovatif dan kolaboratif; ii) Pemantapan kelembagaan pemerintah yang adaptif, inovatif dan kolaboratif; iii) Pemantapan kelembagaan pemerintah yang adaptif, inovatif dan kolaboratif dan berbagai arah

kebijakan melanjutkan dari periode sebelumnya; dan berbagai arah kebijakan melanjutkan dari periode sebelumnya

Misi 4, Mewujudkan Kota yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi melanjutkan berbagai kebijakan strategis yaitu i) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; ii) Penguatan pengendalian inflasi daerah dan iii) pemantapan kerjasama multi helix melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, NGO, media massa dan Masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan khususnya dalam sains kreatif.

Misi 5, pada periode ini pembangunan diwujudkan melalui Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila, Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan, Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan, Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang, Pemantapan kualitas lingkungan hidup ruang kota, Pemantapan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air, Pemantapan kualitas dan pemenuhan akses sanitasi yang layak, Perluasan layanan pengelolaan dan pemilahan sampah yang terpadu sejak dari sumber dengan target 100 persen sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi ekonomi sirkuler sirkuler, Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kerjasama dengan daerah-daerah penghasil pangan, Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan, Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi, serta Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim.

Misi 6, yaitu Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang merata dan inklusif diwujudkan melalui Pemantapan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan bertaraf global (*global city*), pemantapan infrastruktur penunjang aktivitas industri kreatif, Pemantapan pengelolaan limbah dan sampah industri, Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi, Pemantapan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemantapan infrastruktur penunjang sains kreatif, Pemantapan inkubator bisnis industri kreatif, Pemantapan area kreatif dan distrik inovasi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan, serta Pemantapan fasilitas sekolah berbasis sains kreatif mulai dari tingkat dasar hingga tingkat pertama.

Misi 7, pada periode ini Misi 7 diwujudkan melalui Pengembangan perumahan dan permukiman yang layak dan aman, Pemantapan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata, Pemantapan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja, pelajar, dan mahasiswa; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja, pelajar, dan mahasiswa, Pemantapan infrastruktur air baku dan

air minum pada kawasan perkotaan, serta Pemantapan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.

Misi 8, yaitu Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan diwujudkan melalui Pemantapan pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis, Pemantapan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah, serta Pengembangan Pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

D. Arah Kebijakan Kota Bogor Periode IV (2040-2045)

Dalam periode IV, pembangunan Kota Bogor akan diarahkan pada *“Perwujudan Bogor sebagai Kota Pusaka Sains bertaraf nasional yang nyaman, maju dan berkelanjutan”*. Arah kebijakan yang ditetapkan pada periode ini sebagai jawaban dari tercapainya misi pembangunan Kota Bogor yaitu, terwujudnya sumber daya manusia Kota Bogor yang tangguh dan berdaya saing, terwujudnya citra Kota Bogor sebagai kota yang nyaman dan berkelanjutan, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang Dinamis, berkualitas, dan inovatif, terwujudnya Kota yang bersih dan akuntabel serta menjaga stabilitas ekonomi, terwujudnya ketahanan sosial, budaya dan ekologi, terwujudnya infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif, terwujudnya sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas, serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Tabel 5.1. Matriks Arah Kebijakan Kota Bogor Periode 2025–2045

Misi	Arah kebijakan			
	1	2	3	4
Mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing	Penyiapan aspek religiusitas, pendidikan inklusif, dan kebudayaan Masyarakat pendukung pengembangan Kota Sains Kreatif			Perwujudan sumber daya manusia Kota Bogor yang tangguh dan berdayasaing
	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat			
	Peningkatan kualitas dan pemerataan sarana prasarana kesehatan primer dan rujukan			
	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan	Peningkatan pemenuhan kualitas pelayanan kesehatan yang berkualitas, responsif dan berkeadilan		
	Peningkatan pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan responsif			
	Pengendalian penyakit menular seperti TBC dan HIV serta percepatan penurunan stunting melalui 1) Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya, ii) Percepatan eliminasi penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit tropis terabaikan, ii) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.			
	Peningkatan rata-rata lama sekolah wajib pendidikan 13 tahun (Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun)	Penguatan sistem penjaminan mutu dan tata kelola pendidikan daerah	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa di kancah nasional dan internasional	
	Pemerataan kualitas pendidikan formal dan non formal difokuskan pada i) peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berstandar nasional; ii) peningkatan literasi dan edukasi melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi; iii) penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, iv) pengembangan kurikulum berbasis sains kreatif	Penguatan pelibatan tri pusat pendidikan (orang tua, masyarakat, dan sekolah) dalam mengembangkan kekuatan spiritual, akhlak, dan kecerdasan sosial		
		Penguatan peran pendidikan tinggi dengan memperkuat sistem pembelajaran berbasis outcome dan pendekatan multidisiplin		
	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi khususnya industri ekonomi kreatif dan jasa serta keterkaitan dengan DUDI	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal, terutama dalam percepatan peningkatan kualifikasi angkatan kerja		
Pemantapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system				

Misi	Arah kebijakan			
	1	2	3	4
		Peningkatan partisipasi lulusan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM) yang berkualitas		
		Pendirian lembaga pendidikan yang berorientasi pada <i>design thinking</i>		
	Pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah melalui perlindungan sosial adaptif dan peningkatan akses layanan dasar	Peningkatan keberdayaan masyarakat miskin melalui program ekonomi produktif dan pendampingan yang intensif		
	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain transformasi akurasi data, perencanaan dan penganggaran, penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas			
	Peningkatan keterampilan dan produktivitas lansia melalui pendidikan sepanjang hayat	Peningkatan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya		
Mewujudkan perekonomian yang produktif dan inklusif	Penguatan struktur ekonomi khususnya pada sektor-sektor strategis dan potensial. Industri jasa berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi fokus pada i) penguatan pengembangan pariwisata dengan Konsep Hub Kebudayaan dan Industri sains Kreatif (Cultural Hub and Creative Scinence Industry (CCI)), ii) peningkatan produktivitas sektor-sektor jasa dan UMKM berbais produk lokal unggulan , ii) mendorong ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi utama menjadi barometer ekonomi kreatif nasional, dan iii) Memperkuat Kota Bogor sebagai MICE CITY (Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions)	Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang mengintegrasikan cultural & heritage tourism, pariwisata sains kreatif, dan industri/ekonomi kreatif	Pemantapan pengembangan kawasan pariwisata yang terintegrasi (<i>cultural & heritage tourism, ecotourism</i> , dan industri ekonomi kreatif)	Perwujudan citra Kota Bogor sebagai kota yang nyaman dan berkelanjutan
		Percepatan pembangunan ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur, pelatihan dan pendampingan, kelembagaan ekonomi, dan pembiayaan		
		Peningkatan daya saing industri konten berbasis hak kekayaan budaya dan intelektual		
		Peningkatan daya saing produk dengan meningkatkan efisiensi dan menciptakan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi		
		Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif antara lain melalui pembentukan lembaga pengembangan dan pengelolaan kekayaan intelektual, serta kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat Kota		
		Inisiasi jaringan pasar nasional dan global	Perluasan jaringan pasar domestik dan global serta	

Misi	Arah kebijakan			
	1	2	3	4
			penguatan kontribusi pada rantai nilai nasional dan global (<i>National and Global Value Chain</i>)	
	Peningkatan up-skilling dan re-skilling SDM industri ekonomi kreatif, pariwisata, serta kemampuan digital			
	Memperkuat pelaksanaan smart economy melalui pemanfaatan TI dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing (city branding)	Mendorong percepatan smart economy Kota Bogor dalam membangun citranya sebagai kota produktif dan berdaya saing (city branding)	Mendorong pemantapan smart economy Kota Bogor dalam membangun citranya sebagai kota produktif dan berdaya saing (<i>city branding</i>)	
	Menumbuhkan kewirausahaan melalui i) Pendidikan dan Pelatihan, ii) Akses terhadap Modal, iii) Menciptakan ekosistem pendukung yang mendorong kewirausahaan, iv) Mendorong inovasi dan penelitian dengan mengedepankan kemitraan antara akademisi, industri, dan pemerintah, v) Memfasilitasi peluang berjejaring dan memberikan akses terhadap pasar, baik dalam negeri maupun internasional.			
	Industrialisasi koperasi melalui penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.			
	Peningkatan produktivitas BUMD			
	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal guna memperluas kesempatan kerja termasuk pekerja perempuan			
	Penguatan kapasitas riset dan inovasi terapan berbasis sains dibidang ekonomi fokus pada i) peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung penelitian terapan, ii) peningkatan kelembagaan dan kualitas SDM peneliti, iii) pengembangan platform diseminasi produk penelitian dan inovasi terapan, iv) inisiasi innovation valley Kota Bogor, dan v) penguatan linkages dan kolaborasi lembaga-lembaga penelitian, lembaga pendidikan tinggi, komunitas sains kreatif beserta seluruh elemen pendukung sains kreatif di Kota Bogor- university town	Peningkatan ekosistem riset dan inovasi terapan berbasis sains kreatif fokus pada i) peningkatan linkage berbagai hasil penelitian dengan dunia industri dan dunia usaha (DUDI), ii) mendorong tumbuhnya startup, iii) pengembangan teaching industry, iii) penyelenggaraan event-event (industry matching dan industry sains summit) berskala nasional dan internasional, dan iv) penguatan Innovation valley Kota Bogor	Pemantapan Kota Bogor sebagai kota sains kreatif dan innovation valley bertaraf nasional	

Misi	Arah kebijakan			
	1	2	3	4
	Mendorong pemanfaatan kebijakan keberlanjutan dengan fokus pada efisiensi energi dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan			
	Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat difokuskan pada i). Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), ii) Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis	Perluasan transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat difokuskan pada i). Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), ii) Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis	Pemantapan transformasi digital pada seluruh sektor strategis	
	Memperkuat pelaksanaan smart economy melalui pemanfaatan TI dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing (<i>city branding</i>)	Mendorong percepatan smart economy Kota Bogor dalam membangun citranya sebagai kota produktif dan berdaya saing (<i>city branding</i>)	Pemantapan smart economy Kota Bogor dalam membangun citranya sebagai kota produktif dan berdaya saing (<i>city branding</i>)	
	Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan kepastian usaha, diarahkan pada (i) Penyusunan regulasi yang ramah investasi; (ii) Peningkatan kemudahan berusaha dan kepastian hukum dalam rangka meningkatkan realisasi investasi; (iii) Peningkatan iklim investasi melalui fasilitasi persetujuan/rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			
	Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi dan kemajuan teknologi	Mengarahkan investasi modal ke sektor-sektor yang mempunyai potensi keuntungan tinggi dan peningkatan produktivitas		
	Penyederhanaan peraturan dan mengurangi hambatan birokrasi yang dapat menghambat investasi modal dan pertumbuhan produktivitas.	Peningkatan kualitas tenaga kerja		
	Peningkatan produktivitas di berbagai sektor perekonomian melalui investasi di bidang teknologi, inovasi, dan infrastruktur			
	Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi jaringan produksi dan distribusi	Peningkatan kerjasama <i>multi helix</i> dalam pembangunan ekonomi Kota Bogor		
	Inisiasi jaringan pasar nasional dan global		Perluasan jaringan pasar domestik dan global serta penguatan kontribusi pada rantai nilai nasional dan	

Misi	Arah kebijakan			
	1	2	3	4
			global (<i>National and Global Value Chain</i>)	
	Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) dan transportasi hijau termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan yang andal, berkelanjutan, dan terintegrasi		Pemantapan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan yang andal, modern dan terintegrasi	
			Pemantapan <i>Transit Oriented Development (TOD)</i> dan transportasi hijau	
	Peningkatan pemenuhan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	Peningkatan penyediaan dan akses rumah layak huni serta optimalisasi lahan terutama untuk penyediaan hunian vertikal		Perwujudan citra Kota Bogor sebagai kota yang nyaman dan berkelanjutan
	Pemantapan kualitas dan pemenuhan utilitas dasar bagi seluruh masyarakat			
	Pengembangan perkotaan yang cerdas, lestari, dan berkelanjutan difokuskan pada penyediaan akses layanan publik yang inklusif, penggunaan Internet of Things (IoT), penerapan <i>smart city</i> dan ekonomi sirkular			
Menguatkan Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas dan Inovatif	Pemantapan kelembagaan yang profesional, tepat fungsi dan berbasis meritokrasi	Pemantapan penciptaan kelembagaan yang kolaboratif melalui kerjasama multi helix melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, NGO, media massa dan Masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan	Pemantapan kelembagaan pemerintah yang adaptif, inovatif dan kolaboratif	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang Dinamis, Berkualitas dan Inovatif
	Peningkatan iklim inovasi daerah	Pengaplikasian berbagai inovasi daerah		
	Penyusunan <i>roadmap</i> sains kreatif			
	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju smart government	Pemantapan implementasi smart government dalam pelayanan publik		
	Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan			
	Reformulasi dan penyempurnaan berbagai kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik			
Peningkatan kualitas ASN berbasis merit yang berintegritas, inovatif dan profesional	Meningkatkan kualitas SDM ASN yang sejahtera, proporsional, dan berkompeten			

Misi	Arah kebijakan			
	1	2	3	4
			Pemantapan kualitas SDM ASN yang semakin berkualitas dan profesional	
	Penguatan penataan kelembagaan yang lincah dan adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah			
	Pembentukan design council sebagai lembaga kesatuan pembuat dan penentu kebijakan tata kelola pemerintahan			
	Penguatan kapasitas masyarakat sipil	Meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat sipil		
Mewujudkan Kota yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi	Penyempurnaan fondasi penataan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman	Penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi		Perwujudan Kota yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi
	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.			
	Penguatan pengendalian inflasi daerah			
	Inisiasi kerjasama <i>multi helix</i> melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, NGO, media massa dan Masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan khususnya dalam sains kreatif	Penguatan kerjasama <i>multi helix</i> dengan jaringan regional, nasional dan global khususnya di bidang sains kreatif		
Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.			Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi
	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.			
	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.			
	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.			
	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.			
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup ruang kota	Pemantapan kualitas lingkungan hidup ruang kota		
	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Pemantapan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.		

Misi	Arah kebijakan			
	1	2	3	4
	Peningkatan kualitas dan pemenuhan akses sanitasi yang layak	Pemantapan kualitas dan pemenuhan akses sanitasi yang layak		
	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.	Perluasan layanan pengelolaan dan pemilahan sampah yang terpadu sejak dari sumber dengan target 100 persen sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi ekonomi sirkuler sirkuler		
	Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kerjasama dengan daerah-daerah penghasil pangan			
	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.			
	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan			
	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.			
	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim			
Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang merata dan inklusif	Penyediaan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan bertaraf global (<i>global city</i>)	Pemantapan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan bertaraf global (<i>global city</i>)	Perwujudan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif	
	Penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri kreatif	Pemantapan infrastruktur penunjang aktivitas industri kreatif		
	Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri	Pemantapan pengelolaan limbah dan sampah industri		
	Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi			
	Pengembangan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif	Pemantapan konektivitas menuju/dari kawasan	

Misi	Arah kebijakan			
	1	2	3	4
			strategis pariwisata dan ekonomi kreatif	
	Penyediaan infrastruktur penunjang sains kreatif	Peningkatan infrastruktur penunjang sains kreatif	Pemantapan infrastruktur penunjang sains kreatif	
	Pembangunan inkubator bisnis industri kreatif	Peningkatan inkubator bisnis industri kreatif	Pemantapan inkubator bisnis industri kreatif	
	Pengembangan area kreatif dan distrik inovasi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan		Pemantapan area kreatif dan distrik inovasi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan	
	Pengembangan fasilitas sekolah berbasis sains kreatif mulai dari tingkat dasar hingga tingkat pertama	Peningkatan fasilitas sekolah berbasis sains kreatif mulai dari tingkat dasar hingga tingkat pertama	Pemantapan fasilitas sekolah berbasis sains kreatif mulai dari tingkat dasar hingga tingkat pertama	
Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas	Pengembangan perumahan dan permukiman yang layak dan aman	Peningkatan perumahan dan permukiman yang layak dan aman	Pengembangan perumahan dan permukiman yang layak dan aman	Perwujudan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas
	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata	Pemantapan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata	
	Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja, pelajar, dan mahasiswa; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja, pelajar, dan mahasiswa	Peningkatan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja, pelajar, dan mahasiswa; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja, pelajar, dan mahasiswa	Pemantapan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja, pelajar, dan mahasiswa; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja, pelajar, dan mahasiswa	

Misi	Arah kebijakan			
	1	2	3	4
	Pengembangan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	Peningkatan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	Pemantapan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	
	Peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah	Pengembangan system pengelolaan sampah yang berkelanjutan	Pemantapan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	
Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis	Akselerasi pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis	Pemantapan pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis	Perwujudan pembangunan berkelanjutan
	Pengembangan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah.	Peningkatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	Pemantapan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	
	Penguatan Pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan	Peningkatan Pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan	Pengembangan Pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan	

5.2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025–2045

Sasaran pokok RPJPD Kota Bogor Tahun 2025–2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025–2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif. Sasaran pokok RPJPD Kota Bogor dirumuskan dari Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Indikator Utama Pembangunan (IUP).

5.2.1. Arah Pembangunan Daerah

Tabel 5.2. Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kota Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dan RPJPN Tahun 2025–2045

No	RPJP Nasional 2025–2045		RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025–2045		RPJPD Kota Bogor 2025–2045	
	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
1	Transformasi Sosial	IE1. Kesehatan untuk Semua	Transformasi Sosial	Pelayanan Kesehatan prima untuk semua	Transformasi Sosial	Pelayanan Kesehatan prima untuk semua
		IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		Pendidikan berkualitas yang merata		Pendidikan Berkualitas yang Merata
		IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif		Ketahanan sosial masyarakat yang berbudaya maju		Perlindungan Sosial yang berkeadilan dan inklusif
2	Transformasi Ekonomi	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas ekonomi daerah.	Transformasi Ekonomi	Penguatan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
		IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau		Penerapan ekonomi hijau, biru dan digital.		Penerapan ekonomi hijau
		IE 6. Transformasi Digital		Pembangunan SDM berdaya saing		Penguatan Transformasi Digital
		IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global		Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global
		IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan		Pengembangan Wilayah Pelayanan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
3	Transformasi Tata Kelola	IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Transformasi Tata Kelola	Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	Transformasi Tata Kelola	Peningkatan Tata kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, Inovatif dan kolaboratif

No	RPJP Nasional 2025-2045		RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045		RPJPD Kota Bogor 2025-2045	
	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	IE 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas
		IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro		Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah		Pengendalian stabilitas ekonomi makro daerah
		IE 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan		Peningkatan kerjasama regional maupun internasional		Peningkatan kerjasama regional maupun internasional
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Peningkatan kerukunan umat beragama dan pemajuan kebudayaan	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Peningkatan kemaslahatan beragama dan Berkebudayaan Maju
		IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender		Peningkatan Kualitas pemuda, keluarga dan kesetaraan gender
		IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas		Peningkatan kualitas lingkungan hidup		Peningkatan kualitas lingkungan hidup
		IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi		Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi
		IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim		Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim

Sasaran pokok RPJPD Kota Bogor berdasarkan Arah Pembangunan disajikan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3. Sasaran Pokok RPJPD Kota Bogor Tahun 2025 – 2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
				Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Pelayanan Kesehatan prima untuk semua	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	76,5	82,78
			Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	10	4
			Prevalensi Stunting	13,5	5
			Penanganan Tuberkulosis:		
			Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	425	76
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90	100
			Prevalensi HIV	31	10
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	96,1	100
2	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan yang merata	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Rata –rata Nilai PISA (Membaca, Matematika dan Sains)		
			Kemampuan Literasi	63,272	80-85
			Kemampuan numerasi	51,464	80-85
			Rata-rata Lama Sekolah	10,65	14,16-15,00
			Harapan Lama Sekolah	13,46	15,90-16,50
3	Meningkatnya daya saing dan kesejahteraan tenaga kerja		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	17,91	34,01
			Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	88,84	95
4	Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat yang berkeadilan dan inklusif	Perlindungan Sosial yang berkeadilan dan inklusif	Tingkat Kemiskinan (%)	6,12	2,44
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	68,36	80,04
			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	3,55	70

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
				Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Berkembangnya Kota Bogor sebagai Mice City (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition)	Penguatan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Pengembangan Pariwisata		
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	4,94	8
			Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	80	210,00
6	Berkembangnya kewirausahaan dan industri kreatif yang berorientasi pertumbuhan yang inklusif	Penguatan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	2	110
			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
			Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian (%)	4,78	20-30
			Proporsi jumlah industri kecil dan menengah (%)	99,71	99,9
			Rasio Kewirausahaan	2,50	9,86
			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	1,8	12,5
			Return on Aset (ROA) BUMD (%)	15,89	20-25
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,11	6,17
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	47,7	62,3
7	Meningkatnya penerapan IPTEKIN dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi daerah		Indeks Inovasi Daerah	57	80-85
8	Meningkatnya efisiensi energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan serta daya saing digital	Penerapan ekonomi hijau	Proporsi EBT dalam bauran energi primer	23	67,91
		Penguatan Transformasi Digital	Indeks Daya Saing Digital	44,1	70-80
9	Meningkatnya produktivitas perekonomian dalam daerah yang terintegrasi dalam rantai nilai nasional dan global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,96	35-40
			Nilai Investasi (PMA dan PMDN)	1,6	32-40
			Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	6	4
			Ekspor Barang dan Jasa (%)	8,7	44,8
10	Terwujudnya infrastruktur yang handal dan sistem transportasi terintegrasi	Pengembangan Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (%)	75,19	100

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
				Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Nilai tingkat kematangan <i>smart city</i>	3,46	4-4,5
11	Terwujudnya kota pintar (<i>smart city</i>)		Indeks Infrastruktur Pilar IDSD	2,25	4-4,5
12	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas Adaptif, Inovatif dan kolaboratif	Indeks Reformasi Hukum	71,8	100
			Indeks Reformasi Birokrasi	83	85-90
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,8	5
			Indeks Pelayanan Publik	4,51	5
13	Terwujudnya pemerintahan yang profesional, bersih dan kolaboratif		Anti Korupsi		
		Nilai hasil survey penilaian integritas (SPI)	73,37	87,89-90,00	
14	Meningkatnya kualitas kebijakan	Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	Indeks Kualitas Kebijakan	55	75-80
			Persentase penurunan angka Kriminalitas		
			Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi (provinsi)	Tinggi
15	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah	Pengendalian stabilitas ekonomi makro daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,4 (2022)	4,6
			Kapasitas fiskal daerah	1,817 (2023)	3
			Tingkat Inflasi (%)	3,36	1,1 – 3,2
16	Meningkatnya kolaborasi kerjasama multi-helix dalam pembangunan segala bidang	Peningkatan kerjasama regional maupun internasional	Jumlah kerjasama nasional dan Internasional bidang sains kreatif	7	NA
17	Meningkatkan kerukunan, kemaslahatan beragama dan Berkebudayaan Maju	Peningkatan kerukunan, kemaslahatan beragama dan Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	NA	66,08 – 66,41
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	79.31	81,68 – 82,32
18	Meningkatnya kualitas pemuda, keluarga dan kesetaraan gender	Peningkatan Kualitas pemuda, keluarga dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73.18	75,81 – 76,05
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.33	1.37
19	Meningkatnya kualitas permukiman yang inklusif dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kualitas Lingkungan Hidup		
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,73	76,12
			Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	8,64	85
			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	79,25	90
			Timbulan Sampah terdaur ulang (%)	7,8	35

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
				Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	Meningkatnya ketahanan pangan, air dan energi daerah	Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi	Konsumsi listrik per kapita	1500	2.670,00
			Prevalensi Ketidakcukupan pangan (%)	4,5	1,39
			Skor pola pangan harapan	80	100
			Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	73,74	100
21	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana Daerah	73	50
			Persentase penurunan emisi GRK (Kumulatif)	5,35	35,21

Tabel...

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Sasaran RPJPD KOTA BOGOR	
		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
TRANSFORMASI SOSIAL				TRANSFORMASI SOSIAL		TRANSFORMASI SOSIAL			
IE1	Kesehatan untuk Semua			Kesehatan untuk Semua			Pelayanan Kesehatan prima untuk semua		
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,4	80	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,29	80,78	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	76,5	82,78
2	Kesehatan Ibu dan Anak			Kesehatan Ibu dan Anak:			2. Kesehatan Ibu dan Anak:		
a.	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	115	16	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	114	15	b. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	10	4
b.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,5	5	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,5	5	c. Prevalensi Stunting	13,5	5
3	Insidensi Tuberkolisis (per 100.000 penduduk)	274	76	Penanganan Tuberkulosis:	91	100	3. Penanganan Tuberkulosis:		
				a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)*			a. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	425	76
				b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)*	91	100	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)*	90	100
							c. Incidence rate HIV/ AIDS	31	10
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)	98	99,5	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	89,31	99,5	4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	96,1	100
IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata			Pendidikan Berkualitas yang Merata			Pendidikan Berkualitas yang Merata		

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025–2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025–2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025–2045	
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Sasaran RPJPD KOTA BOGOR	
		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
5	Hasil pembelajaran			Hasil pembelajaran					
a.	Rata-rata nilai PISA			a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:	22,25 – 24,25	71,81 – 73,81			
	- Membaca	396	485	i) Literasi Membaca	1,70 – 3,70	65,20 – 67,20			
	- Matematika	404	490	ii) Numerasi					
	- Sains	416	487				5. Hasil pembelajaran		
				b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:			Rata –rata Nilai PISA (Membaca, Matematika dan Sains)		
				i) Literasi Membaca	35,55 – 37,55	71,42 – 73,42	a. Kemampuan Literasi	63,272	80–85
				ii) Numerasi	19,34 – 21,34	63,01 – 65,01	b. Kemampuan numerasi	51,464	80–85
b.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,46	12	c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,52 – 9,53	12,05 – 12,09	c. Rata-rata Lama Sekolah	10,65	14,16– 15,00
c.	Harapan lama sekolah	13,37	14,81	d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,87 – 12,88	14,24 – 14,29	d. Harapan Lama Sekolah	13,46	15,90– 16,50
6	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)	33,94	60	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	9,64	9,64 – 14,50	6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	17,91	34,01

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Sasaran RPJPD KOTA BOGOR	
		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
7	Presentasi pekerjaan lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi (%)	61,87	75	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	63,3	75	7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja (%)	88,84	95
IE3	Perlindungan sosial yang adaptif			Perlindungan sosial yang adaptif			Perlindungan Sosial yang berkeadilan dan inklusif		
8	Tingkat kemiskinan (%)	6,0-7,0	0,5-0,8	Tingkat Kemiskinan (%)	5,35 - 5,85	0,09 - 0,34	8. Tingkat Kemiskinan (%)	6,12	2,44
9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	44,1	99,5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	20,27 (2022)	80,04	9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	68,36	80,04
10	Persentasi penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	20	60	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	24	70	10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja (%)	3,55	70
TRANSFORMASI EKONOMI				TRANSFORMASI EKONOMI		TRANSFORMASI EKONOMI		TRANSFORMASI EKONOMI	
IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			Penguatan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi		
11	Rasio PDB industry pengolahan (%)	20,8	28	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	41,15 - 41,38	46,43 - 47,60			
12	Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata			11. Pengembangan Pariwisata		
a.	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,5	8	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	2,88	4,89	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	4,94	8
b.	Devisa Pariwisata (Milliar US Dollar)	18	100	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*	536,6	1.341,50	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	80	210,00

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025–2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025–2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025–2045	
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Sasaran RPJPD KOTA BOGOR	
		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,9	110	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1,84	2,06	12. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	2	110
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			13. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
a.	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,3 (2019)	5	i) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	12,31	20,28	a. Pertumbuhan UMKM (%)	4,78	20-30
				ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	6,3	14	b. Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kota (%)	99,71	99,9
b.	Rasio kewirausahaan (%)	2,9 (Agt 2022)	8	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,5	9,86	c. Rasio Kewirausahaan	2,50	9,86
c.	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,1 (2021)	10	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,8	12,5	d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	1,8	12,5
d.	<i>Return of Asset (ROA) BUMN (%)</i>	3,4	5,6	<i>Return on Aset (ROA) BUMD (%)*</i>	1,62	5,56	<i>e. Return on Aset (ROA) BUMD (%)*</i>	15,89	20-25
15	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5	4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,3 – 7,0	6,1 – 7,1	14. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,11	6,17
16	Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan (%)	55,4	70	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	52,3	62,3	15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	47,7	62,3
17	Tingkat penguasaan IPTEK			Indeks Inovasi Daerah			16. Indeks Inovasi Daerah	57	80-85
a.	Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB)	0,28 (2020)	2,2-2,3						

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Sasaran RPJPD KOTA BOGOR	
		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
b.	Peringkat Index Inovasi Global (peringkat)	75 (2022)	30 besar						
IE5	Penerapan Ekonomi Hijau			Penerapan Ekonomi Hijau			Penerapan ekonomi hijau		
18	Tingkat penerapan ekonomi hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau					
a.	Indeks ekonomi hijau (%)	70,8	90,65	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	61,3	85,05			
b.	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	20	70	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	23,4	67,91	16. Proporsi EBT dalam bauran energi primer	23	67,91
IE6	Transformasi Digital			Transformasi Digital			Penguatan Transformasi Digital		
19	Indeks daya saing digital ditingkat global (peringkat)	51	20 besar	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi*	6,4	8	17. Indeks Daya Saing Digital	44,1	70-80
IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		
20	Biaya logistic (% PDB)	16,9 (2019)	9	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi*	7,88	5	18. Kinerja Investasi		
21	Pembentukan modal tetap bruto (% PDB)	29,8	27,2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	23,6	23,8	a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,96	35-40
							b. Nilai Investasi (PMA dan PMDN) (triliun)	1,6	32-40
							c. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	6	4
22	Ekspor barang dan jasa (% PDB)	26	40	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	26,3	44,8	19. Ekspor Barang dan Jasa (%)	8,7	44,8
IE8	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			Pengembangan Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Sasaran RPJPD KOTA BOGOR	
		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan			Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan					
a.	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,58	48,92	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	24,63%	31,19%	20. Kota maju, inklusif, dan berkelanjutan		
b.	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	64	100	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	56,95	100	a. Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (%)	75,19	100
c.	Persentase Desa Mandiri (%)			Persentase Desa Mandiri (%)	N/A	N/A			
							b. Nilai tingkat kematangan smart city	3,46	4-4,5
							c. Indeks Infrastruktur Pilar IDSD	2,25	4-4,5
TRANSFORMASI TATA KELOLA				TRANSFORMASI TATA KELOLA			TRANSFORMASI TATA KELOLA		
IE9	Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif			Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif			Peningkatan Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas Adaptif, Inovatif dan kolaboratif		
24	Indeks materi hukum	0,25	0,49	Indeks Reformasi Hukum*	90,7	100	21. Indeks Reformasi Hukum*	71,8	100
							22. Indeks Reformasi Birokrasi	83	85-90
25	Indeks system pemerintahan berbasis elektronik	2,34	5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,37 (2022)	5	23. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,8	5
26	Indeks pelayanan publik	3,87	5	Indeks Pelayanan Publik	4,62 (2022)	5	24. Indeks Pelayanan Publik	4,51	5
27	Anti Korupsi			Indeks Integritas Nasional	72,96	87,89	25. Anti Korupsi		

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Sasaran RPJPD KOTA BOGOR	
		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
a.	Indeks integritas nasional	71,94	96,98				a. Nilai hasil survey penilaian integritas (SPI)	73,37	87,89-90,00
b.	Indeks persepsi korupsi	34	60						
							Indeks Profesionalitas ASN	62,5	80-85
							Indeks Kelembagaan	2,85	4-4,5
SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA				KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH		KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH			
IE10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial			Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial (nomenklatur dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah)			Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas		
28	Indeks pembangunan hukum	0,6 (2021)	0,84	Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama			26. Indeks Kualitas Kebijakan	55	75-80
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	62,8 (2020)	80	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	51,78 (2020)	69,16	27. Persentase penurunan angka Kriminalitas		
30	Indeks demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi (>80)	Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Tinggi	28. Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi (provinsi)	Tinggi
IE11	Stabilitas Ekonomi Makro			Stabilitas Ekonomi Makro (nomenklatur dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah)			Pengendalian stabilitas ekonomi makro daerah		

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025–2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025–2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025–2045	
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Sasaran RPJPD KOTA BOGOR	
		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
31	Rasio pajak terhadap PDB (%)	10,0-12,0	18,0-20,0	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	2,2	4,6	29. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,4 (2022)	4,6
							30. Kapasitas fiskal daerah	1,817 (2023)	3
32	Tingkat inflasi (%)	2,5 + 1	2,0 + 1	Tingkat Inflasi (%)	3,3 – 3,9	1,1 – 3,2	31. Tingkat Inflasi (%)	3,36	1,1 – 3,2
33	Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan					
a.	Aset perbankan/PDB (%)	66,9	200	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	25,31	78,1			
b.	Aset dana pensiun/PDB (%)	7,6	60	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	1,24	2,78			
c.	Aset asuransi/PDB (%)	9,1	20	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	55.162,04	302.703,47			
d.	Kapitalisasi pasar modal/PDB (%)	57,8	120						
e.	Total kredit/PDB (%)	37,8	80-90	Total Kredit/PDRB (%)	23,7	73,8	32. Total Kredit/PDRB (%)	NA	73,8
34	Inklusi keuangan (%)	91	98	Inklusi Keuangan (%)	94,22	99,03			
IE12	Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan			Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan (nomenklatur dapat diganti/disesuaikan dengan karakteristik daerah dengan tetap serumpun dengan IE)			Peningkatan kerjasama regional maupun internasional		
35	Asia Power Index (Diplomatic Influencer)	60,4 (2023)	75,0-80,0	Jumlah Kerjasama Internasional	N/A	N/A	33. Jumlah kerjasama nasional dan Internasional bidang sains kreatif	NA	30
36	Asia Power Index (Military Capability)	14,16 (2023)	45	Jumlah Sister Province	4	N/A			

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045			
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Sasaran RPJPD KOTA BOGOR			
		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI			
IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			Peningkatan kerukunan, kemaslahatan beragama dan Berkebudayaan Maju				
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,57*	68,15	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	54,09 - 54,1	66,08 - 66,41	34. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	NA	66,08 - 66,41		
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75,19*	84,2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,79 - 74,85	81,68 - 82,32	35. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	79,31	81,68 - 82,32		
IE14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif			Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif			Peningkatan Kualitas pemuda, keluarga dan kesetaraan gender				
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,49 (2022)	80	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,92 - 70,95	75,81 - 76,05	36. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73,18	75,81 - 76,05		
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,459 (2025)	0,15	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,46 - 0,45	0,23 - 0,21	37. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,33	1,37		
							Indeks Pembangunan Pemuda				
IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas			Lingkungan Hidup Berkualitas			Peningkatan kualitas lingkungan hidup				
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2020)	0,7	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,557	0,741					
42	Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup			38. Kualitas Lingkungan Hidup				
a.	Indeks kualitas lingkungan hidup	72,42 (2022)	76,12	Indeks kualitas lingkungan hidup	56,27	57,68	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,73	76,12		

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025–2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025–2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025–2045	
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Sasaran RPJPD KOTA BOGOR	
		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
b.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	12,5	70	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	13,5	85	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	8,64	85
c.	Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolahan sampah (%)			Pengelolaan Sampah		90			
		15	90	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11,54 (2022)		c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	79,25	90
		(13% terdaur ulang)	(35% terdaur ulang)	- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	47,77 (2022)	100	d. Timbulan Sampah terdaur ulang (%)	7,8	35
IE16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi		
43	Ketahanan energi, air, dan pangan			Ketahanan energi, air, dan pangan					
a.	Ketahanan Energi			Ketahanan Energi			39. Ketahanan energi, air, dan pangan		
	- Indeks ketahanan energi	6,61	8,24	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	1.400	2.670	a. Konsumsi listrik per kapita (kWh)	1500	2.670,00
				- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	191	165			
b.	Prevalensi ketidak cukupan pangan (%)	6,2	2,1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	6,75	1,39	b. Prevalensi Ketidakcukupan pangan (%)	4,5	1,39
							c. Skor pola pangan harapan	80	100
c.	Ketahanan air			Ketahanan Air					

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Sasaran RPJPD KOTA BOGOR	
		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045		Sasaran 2025	Sasaran 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	- Kapasitas tampungan air per kapita (m3/kapita)	63,45	200	- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	4,93	63,12			
	- Akses rumah tangga perkotaan terhadap asir siap minum perpipaan (%)	39	100	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	34,74	100	d. Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	73,74	100
IE17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim		
44	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%)	0,14	0,11	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	131,62	107,27 - 86,47	40. Indeks Risiko Bencana Daerah	73	50
45	Presentasi penurunan emisi GRK (%)			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			41. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
a.	Kumulatif	28,12	51,51	a. Kumulatif	2,66	31,65	a. Kumulatif	5,35	35,21
b.	Tahunan	32,65	80,89	b. Tahunan	9,27	70,08	b. Tahunan		

5.2.2. Arah Kebijakan Transformatif

Dalam mewujudkan Sasaran Pokok RPJPD Kota Bogor, perlu dirumuskan juga Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kota Bogor yang dalam hal ini dilakukan dengan memperhatikan karakteristik, inovasi dan pengembangan daerah Kota Bogor. Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kota Bogor dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4. Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kota Bogor

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kab/Kota)	
Transformasi (1)	Arah Kebijakan (2)
Transformasi Sosial	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.
	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
	Peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan.
	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk Mendukung Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkualitas.
	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.
	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	
Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.	
Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kab/Kota)	
Transformasi	Arah Kebijakan
(1)	(2)
	Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).
	Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).
	Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.
	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).
	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).
	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).
	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.
	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.
	Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).
	Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).
	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).
	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kab/Kota)	
Transformasi (1)	Arah Kebijakan (2)
Transformasi Ekonomi	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
	Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.
	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung (megapolitan Jakarta-Bandung).
	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)
	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum
	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure)
	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy
	Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage
	Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek.
	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek.
	City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism
	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.
	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
	Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan kelurahan
	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global
Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.	
Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan prosesbisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kab/Kota)	
Transformasi	Arah Kebijakan
(1)	(2)
	<p>Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.</p> <p>Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.</p> <p>Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.</p> <p>Peningkatan produktivitas BUMD.</p> <p>Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.</p>
	<p>Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).</p>
Transformasi Tata Kelola	<p>Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.</p> <p>Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.</p> <p>Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.</p> <p>Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi.</p> <p>Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital</p>

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kab/Kota)	
Transformasi	Arah Kebijakan
(1)	(2)
	<p>Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.</p> <p>Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.</p> <p>Penguatan integritas partai politik</p>
Transformasi Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	<p>Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.</p> <p>Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.</p> <p>Penguatan pengendalian inflasi daerah.</p>
Transformasi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<p>Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.</p> <p>Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.</p> <p>Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis.</p> <p>Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.</p> <p>Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.</p> <p>Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.</p> <p>Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.</p> <p>Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.</p> <p>Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.</p> <p>Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.</p>
Implementasi Transformasi	<p>Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.</p> <p>Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan</p> <p>Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim</p> <p>Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat,</p>

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kab/Kota)	
Transformasi	Arah Kebijakan
(1)	(2)
	terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif
	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.
	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.
	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.
	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.
	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

BAB 6. PENUTUP



RPJPD Kota Bogor
2025-2045

Untuk mewujudkan Kota Bogor 2045 harus dikawal dengan kaidah pelaksanaan yang efektif. Kaidah pelaksanaan diperlukan sebagai norma-norma agar visi dan misi dapat dilaksanakan dan diukur keberhasilannya. Di samping itu, juga diperlukan komunikasi publik yang efektif penting dalam rangka membangun kesamaan pemahaman serta meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi bermakna seluruh pelaku pembangunan di Indonesia.

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Visi Kota Bogor 2045 terwujud melalui partisipasi semua pelaku pembangunan. RPJP Daerah harus dijadikan acuan oleh seluruh pelaku pembangunan, termasuk pihak swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan strategi tujuan pembangunan sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan.

Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, dan mekanisme perubahan. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman (*safeguarding*) untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJPD Kota Bogor 2025-2045 sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia.

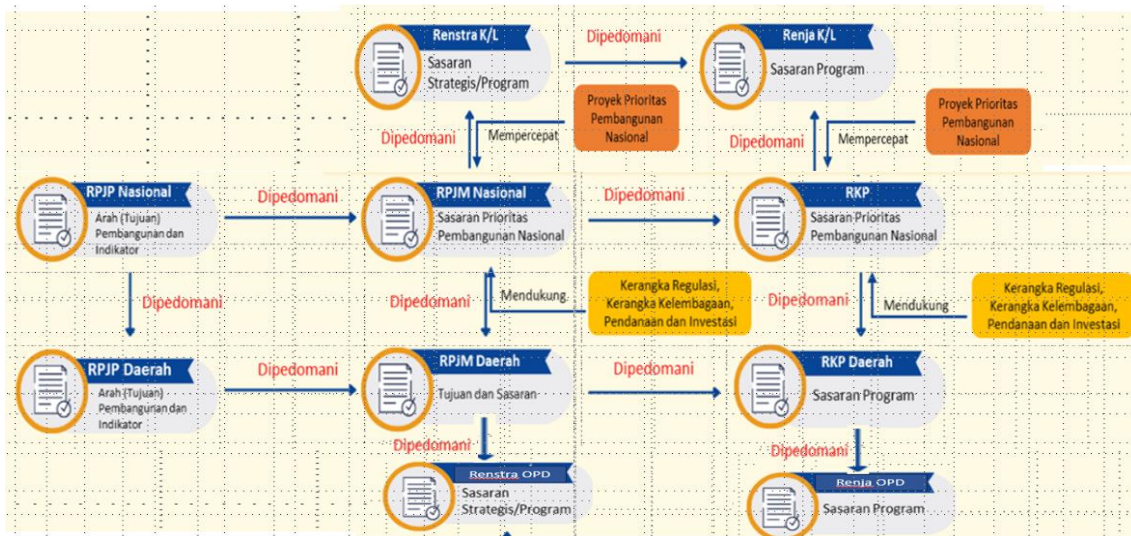
6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antardokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pelaku nonpemerintah.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level kegiatan/sub kegiatan, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

6.1.2. Keterkaitan RPJP Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Nasional dan Propinsi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), baik di tingkat pusat maupun daerah. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pemerintah di tingkat pusat (APBN) dan di tingkat daerah (APBD). Keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat diperhatikan pada Gambar 6.1 berikut.



Gambar 6.1. Keterkaitan RPJPD Daerah dengan Dokumen Nasional

Konsistensi antara RPJPD Daerah dengan dokumen perencanaan turunannya adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJPD Daerah ke RPJM Daerah. Periodisasi RPJM Daerah mengikuti RPJPD Daerah. Arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan berikut indikator pengukurnya menjadi bagian dari muatan utama RPJPD Daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah bersifat jangka panjang sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang untuk mencapai Kota Bogor 2045. Hal-hal lain yang bersifat spesifik daerah akan dimuat di RPJM Daerah, serta yang bersifat rencana strategis 5 tahunan semua Organisasi Perangkat Daerah dimuat ke dalam RPJM Daerah.
3. Tujuan Pembangunan Daerah dan indikator dalam RPJPD Daerah menjadi pedoman dalam penentuan sasaran dan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RPJM Daerah, dan menjadi pedoman bagi RPJPD Daerah untuk menentukan arah kebijakan, sasaran pokok dan indikator sasaran pokok pembangunan.
4. Sasaran pokok dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RPJM daerah menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RKP, sasaran dan indikator strategis/program pada rencana strategis OPD (Renstra OPD), serta tujuan dan sasaran pada RPJM Daerah.
5. Sasaran dan indikator strategis/program Renstra OPD menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), sedangkan tujuan dan sasaran pada RPJM Daerah menjadi pedoman bagi penyusunan sasaran program RKP Daerah.
6. Sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RKP juga dipedomani dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja OPD dan sasaran program RKP Daerah. Indikator prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja OPD.
7. Dokumen RPJPD, dokumen RPJM, dan dokumen RKP menjadi pedoman dalam penyusunan rencana aksi pembangunan daerah (OPD atau lintas OPD) seperti rencana induk/Master Plan/Grand Design, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah.
8. Dokumen RPJPD menjadi pedoman visi, misi, dan program bagi pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah provinsi dan Kabupaten/kota.

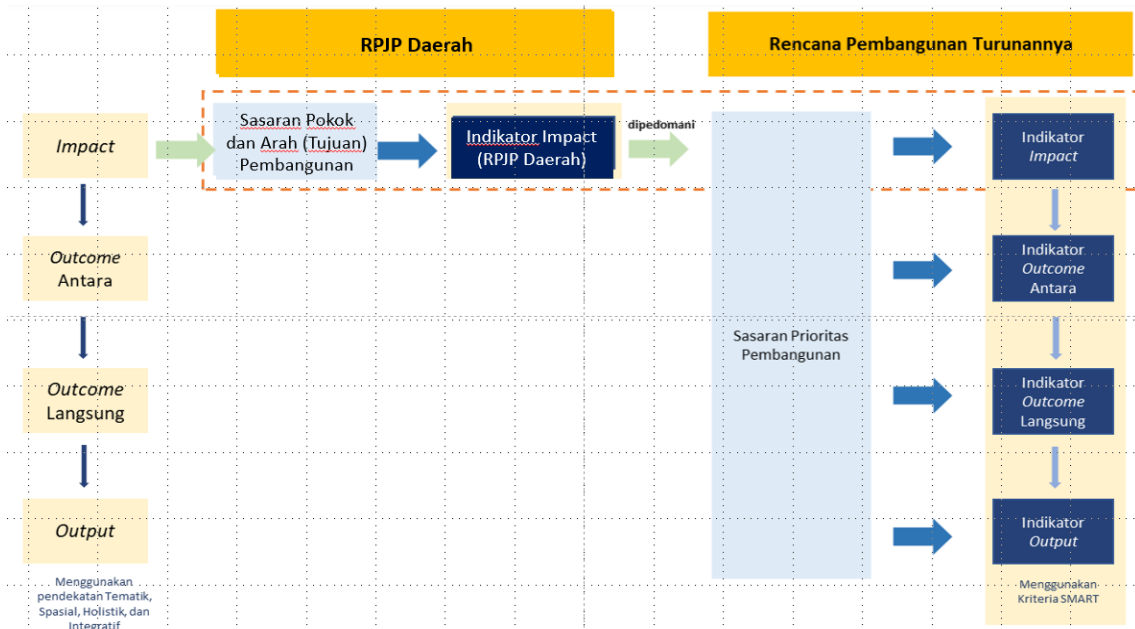
6.1.3. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan RPJP Daerah dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif.

- Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan.
- Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah.
- Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup: pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.
- Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/ daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Kerangka Kerja Logis menggambarkan hubungan antara input-proses-output-outcome-impact. Sasaran utama pembangunan dalam RPJP Daerah yang bersifat impact-outcome, harus diterjemahkan dengan baik hingga ke level input. Pendetailan sasaran tersebut dilakukan melalui dokumen turunannya, meliputi rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek, baik untuk perencanaan pemerintah daerah maupun OPD (Gambar 6.2).



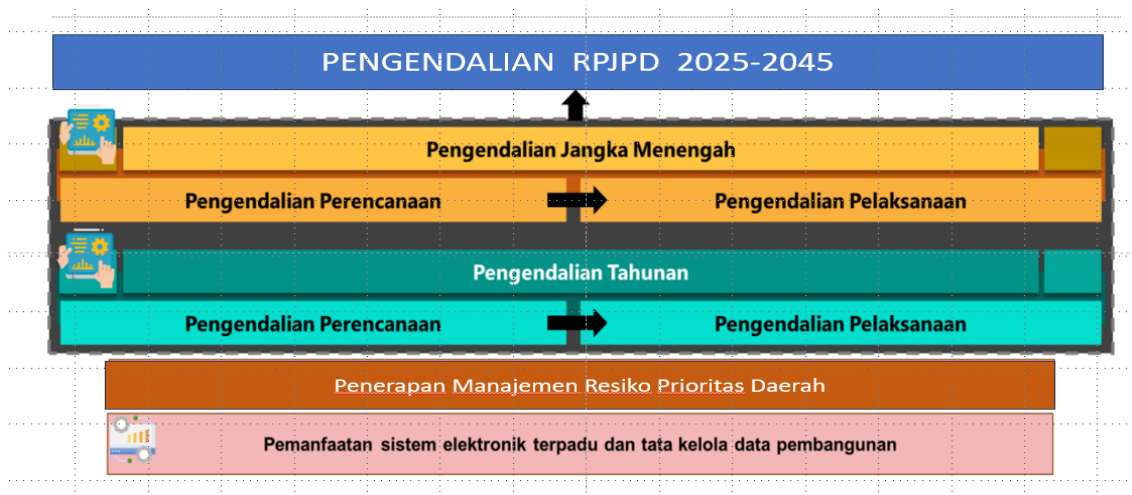
Gambar 6.2. Hierarki Kerangka Kerja Logis RPJP Daerah – Rencana Pembangunan Turunannya

6.1.4. Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan RKPD, perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KKL dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria *Specific, Measurable, Achievable, ResultOriented/Relevant, dan Time-Bound (SMART)*, sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJP Daerah harus menjadi bagian dari RPJM Daerah, dan seluruh indikator RPJM Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun nonpemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan.

6.2. Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti. Kerangka pengendalian RPJP Daerah 2025-2045 lebih detail adalah sebagaimana Gambar 6.3.



Gambar 6.3. Kerangka Pengendalian RPJP Daerah 2025-2045

Pengendalian RPJP Daerah dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan daerah terbagi menjadi dua bagian.

- a. Pengendalian perencanaan. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas penetapan kegiatan/subkegiatan prioritas pembangunan daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi

anggaran, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Pengendalian jangka menengah mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJM Daerah ke RPJM Daerah dan RPJM Daerah ke dokumen rencana jangka menengah OPD; (ii) kesiapan penetapan kegiatan/subkegiatan prioritas pembangunan daerah termasuk penerapan prinsip KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Pengendalian jangka pendek mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJM Daerah ke dokumen RKPD, dan dokumen RKPD ke dokumen rencana jangka pendek OPD; (ii) kesiapan penetapan kegiatan/subkegiatan prioritas pembangunan daerah termasuk penerapan KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

- b. Pengendalian pelaksanaan. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (i) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan daerah; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Kementerian/Lembaga (K/L) yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan Daerah.

Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja K/L/D terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah.

Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal OPD.

6.3. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, target RPJM Daerah dapat dimutakhirkan melalui RPJM Daerah. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJM Daerah Tahun 2025–2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

6.4. Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik RPJP Daerah 2025-2045 berprinsip “tidak ada yang tertinggal” (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu Pemerintah Daerah, OPD, dan masyarakat. Komunikasi kepada OPD dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi agar OPD dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan daerah, sedangkan komunikasi kepada pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah desa/kelurahan, kabupaten, dan provinsi untuk membangun pemahaman dan partisipasi. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hassan, R., and Quibria, M.G. (2002). Poverty and Patterns of Growth. ERD Working Paper No.18.
- Jonaidi, A. (2012). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1 (1): 140–164
- Kumara, I. B. P. (2015). Keterkaitan antara Redistribusi, Ketimpangan Pendapatan, dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Kabupaten/kota di Pulau Jawa. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/74275>.
- Sukirno, S. (2004). *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Raja Persada Grafindo.
- Panjaitan, R.P., Nopijantoro, W., dan Nugroho, A. 2023. Menggali Sektor Ekonomi Unggulan dan Berdaya Saing di Kota Bogor Tahun 2014- 2022. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik* Volume 7, No. 2, (p.106-123) e-ISSN: 2581-1207.